









Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta







Rencana Aksi Daerah

2018

111













GO









Tujuan Pembangúnan Berkelanjutan

SUSTAINABLE DEVELOPMENT G ALS 2018 - 2022

GUBERNUR DAFRAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2018-2022

GUBERNUR DAFRAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Menimbang: a. Bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan melaksanakan tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, Filantropi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan Pencapaian targettarget TPB melalui Rencana Aksi Nasional dan Daerah yang telah di tetapkan;

kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya;

c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2022.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (RAD TPB) TAHUN 2018-2022

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 2022 dan selanjutnya dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 3

RAD TPB merupakan panduan dalam rangka pencapaian target TPB dan tujuan mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat Tujuan, Indikator, Target dan strategi pencapaian serta dukungan program dan kegiatan Perangkat Daerah maupun Non Pemerintah Daerah dalam pencapaian sebagaimana tercantum dalam RAD TPB Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tersebut dalam lampiran, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- 1.2. TPB Menyempurnakan Tujuan Pembangunan Milenium
- 1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB di Daerah
- 1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB
- 1.5. Pembiayaan TPB di Daerah
- 1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB
- 1.7. Sistematika Rencana Aksi TPB

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB

- 2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun
- 2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- 2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- 2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- 2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- 2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern
- 2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- 2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
- 2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara
- 2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

- 2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- 2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan
- 2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan
- 2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
- 2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh
- 2.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

BAB III TARGET DAN ARAH KEBUAKAN PENCAPAIAN TPB

- 3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- 3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- 3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- 3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- 3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
- 3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
- 3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- 3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- 3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
- 3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
- 3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- 3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- 4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB 2018-2022
- 4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- 1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah
- 2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

Pasal 5

RAD TPB Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun Renstra dan RKPD serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memprioritaskan Kerjasama Lintas Sektor dalam upaya percepatan pencapaian target TPB di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan asistensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB dalam lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Dalam hal peningkatan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi TPB di Daerah Istimewa Yogyakarta Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memanfaatkan aplikasi E-Planning.
- (3) Dalam hal asistensi, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berjenjang, secara operasional oleh Sekretariat Tetap Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Daerah Istimewa Yogyakarta bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juli 2018
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

HAMENGKU BUWONO X







Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta







2018



























Tujuan Pembangúnan Berkelanjutan

SUSTAINABLE DEVELOPMENT G ALS 2018 - 2022



| DAFTAR IS | 51 | I |
|-----------|--|----------------|
| DAFTAR T | ABEL | V |
| DAFTAR G | AMBAR | IX |
| BAB I PEN | NDAHULUAN | 1 |
| A. | Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan RPJMD | 1 |
| В. | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menyempurnakan Milenium Development Goals | 5 |
| C. | Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB di Daerah | 6 |
| D. | Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB | 11 |
| E. | Pembiayaan TPB di Daerah | 13 |
| F. | Metodologi Penyusunan RAD TPB | 13 |
| G. | Sistematika RAD TPB | 15 |
| BAB II KO | NDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB | 19 |
| A. | Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun | 19 |
| | Persentase Penduduk Miskin | 25 27 27 |
| | 5B Reparation Remission (1.2) 511 2012 2017 | 23 |

| | 6. Tingkat Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan DIY 2012- 2017 | 30 |
|----|---|----|
| | 7. Tantangan Pelaksanaan TPB | |
| В. | Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | 31 |
| C. | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 43 |
| D. | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | 49 |
| | Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Angka Rata-Rata Lama Sekolah | |
| E. | Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan | 52 |
| F. | Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak | 61 |
| G. | Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern | 68 |
| | Rasio Elektrifikasi | 69 |
| Н. | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan | 73 |
| I. | Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi | 81 |
| J. | Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara | 82 |
| | Koefisien Gini Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan | |
| K. | Kota dan Permukiman Berkelanjutan | 87 |
| ı | Pola Produkci dan Konsumsi yang Berkelanjutan | 9. |

| | IVI. | Kebencanaan Perubahan Iklim dan Penanggulangan | . 101 |
|-------|-------|---|-------|
| | N. | Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan | . 103 |
| | Ο. | Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan | . 106 |
| | P. | Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh | . 109 |
| | Q. | Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global | . 110 |
| BAB I | II TA | RGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB | . 113 |
| | A. | Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan | . 113 |
| | В. | Tujuan 2 Tanpa Kelaparan | . 118 |
| | C. | Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera | . 121 |
| | D. | Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas | . 123 |
| | E. | Tujuan 5 Kesetaraan Gender | . 125 |
| | F. | Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak | . 129 |
| | G. | Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau | . 132 |
| | Н. | Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | . 134 |
| | I. | Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur | . 139 |
| | J. | Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara | . 141 |
| | K. | Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan | . 143 |
| | L. | Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab | . 145 |
| | M. | Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim | . 147 |
| | Ο. | Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan | . 149 |
| | P. | Tujuan 15 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Daratan | . 151 |
| | Q. | Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh | . 154 |
| | R. | Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan | . 156 |

| BAB IV PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN | 159 |
|---|-----|
| A. Landasan Peraturan | 159 |
| Tujuan Pemantauan dan Evaluasi | 160 |
| 2. Lingkup Pemantauan dan Evaluasi | 160 |
| B. Mekanisme Pemantauan RAD | 161 |
| C. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pihak | |
| NonPemerintah | 163 |
| C. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 2018- | |
| 2022 | 164 |
| D. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi | 166 |
| BAB V PENUTUP | 167 |
| DAFTAR PUSTAKA | 171 |



| Tabel 1.1. | Keterkaitan Isu-isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan DIY dengan TPB |
|-------------|--|
| Tabel 1.2. | Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD DIY 2017-2022 10 |
| Tabel 2.1. | Persentase Penduduk Miskin DIY dan Nasional 22 |
| Tabel 2.2. | Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-DIY 22 |
| Tabel 2.3. | Lima Kontribusi Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan menurut Tipe Daerah (September 2017)25 |
| Tabel 2.4. | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2016-September 2017 |
| Tabel 2.5. | Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman, dan Indeks Keparahan DIY 2012-217 |
| Tabel 2.6. | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di D.I. Yogyakarta Menurut Daerah, September 2016 - September 2017 |
| Tabel 2.7. | Luas Lahan Sawah Beririgasi dan Non Irigasi di DIY Tahun 2013-2017 |
| Tabel 2.8. | Produksi Tanaman Pangan di DIY (dalam ton), Tahun 2013- 2017 |
| Tabel 2.9. | Produksi Hortikultura di DIY (dalam ton), Tahun 2015-2017 39 |
| Tabel 2.10. | Populasi Ternak di DIY (dalam ekor), Tahun 2013-2017 40 |

| Tabel 2.11. | Produksi 5 Komoditas Uggulan Perkebunan DIY Tahun 2013-2017 | . 41 |
|-------------|---|------|
| Tabel 2.12. | Target IKA DIY 2018-2022 | . 61 |
| Tabel 2.13. | Target Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai di 10 Sungai di DIY | . 62 |
| Tabel 2.14. | Proyeksi Kebutuhan Air Minum di DIY Sampai Dengan Tahun 2030 | . 64 |
| Tabel 2.15. | Volume Timbulan Sampah Kabupaten/Kota | . 65 |
| Tabel 2.16. | Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah DIY Tahun 2017 | . 67 |
| Tabel 2.17. | Arah Kebijakan dan Strategi RAD 100-0-100 DIY | . 67 |
| Tabel 2.18. | Data Jenis Energi Baru Terbarukan | . 70 |
| Tabel 2.19. | Data Jenis Energi Baru Terbarukan yang mendukung capaian target di tahun 2017 | . 71 |
| Tabel 2.20. | Konsumsi Listrik di DIY (GWH) | . 71 |
| Tabel 2.21. | Elastisitas Energi | . 72 |
| Tabel 2.22. | PDRB DIY ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2013-2017 (juta rupiah) | . 74 |
| Tabel 2.23. | Distribusi Persentase PDRB DIY ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2013-2017 | . 74 |
| Tabel 2.24. | Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja | . 74 |
| Tabel 2.25. | Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama DIY, Tahun 2013-2016 | . 76 |
| Tabel 2.26. | Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2013-2017 | |
| Tabel 2.27. | Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2013-2017 | . 80 |
| Tabel 2.28. | Nilai PDRB DIY ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013-2017 (juta rupiah) | . 81 |

| Tabel 2.29. | Pengolahan Tahun 2013-2017 | 81 |
|-------------|---|--------------|
| Tabel 2.30. | Penduduk Bekerja Menurut Pada Sektor Industrri di DIY 2013 - 2017 | 82 |
| Tabel 2.31. | Tingkat Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013- 2017 | 86 |
| Tabel 2.32. | Luas Kawasan Kumuh DIY | 90 |
| Tabel 2.33. | Penanganan Kawasan Kumuh 2017 | 91 |
| Tabel 2.34. | Rencana Penanganan Kumuh 2018 | 91 |
| Tabel 2.35. | Data Rumah Tidak Layak Huni 2016 | 92 |
| Tabel 2.36. | Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2017 | 95 |
| Tabel 2.37. | Rencana Penanganan RTLH 2018 | 95 |
| Tabel 2.38. | Kriteria dan Indikator IKLH | 98 |
| Tabel 2.39. | Target IKLH DIY tahun 2018-2022 | 98 |
| Tabel 2.40. | Lokasi Pengukuran Kualitas Udara 1 | L O O |
| Tabel 2.41. | Perkembangan Ekspor di DIY, Tahun 2013-2017 1 | l 1 0 |
| Tabel 3.1. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan 1 | l 1 6 |
| Tabel 3.2. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan | L 2 0 |
| Tabel 3.3. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera | 122 |
| Tabel 3.4. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas | L 2 4 |
| Tabel 3.5. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender 1 | L 27 |
| Tabel 3.6. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak | L31 |
| Tabel 3.7. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau | 133 |

| Tabel 3.8. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
|-------------|--|
| Tabel 3.9. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur |
| Tabel 3.10. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan |
| Tabel 3.11. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan |
| Tabel 3.12. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab |
| Tabel 3.13. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim |
| Tabel 3.14. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 14. Ekosistem Lautan 150 |
| Tabel 3.15. | Target Indikator Tujuan 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan |
| Tabel 3.16. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh |
| Tabel 3.17. | Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan |

viii | Rencana Aksi Daerah



| Gambar 2.1. | Garis Kemiskinan Daerah Perkotaan DIY 2011-2017 23 | | | |
|--------------|--|----|--|--|
| Gambar 2.2. | Garis Kemiskinan Daerah Perdesaan DIY 2011-2017 | 24 | | |
| Gambar 2.3. | Tingkat Kemiskinan DIY | | | |
| Gambar 2.4. | Jumlah Penduduk Miskin di DIY September 2012- September 2017 (dalam ribuan orang) | 27 | | |
| Gambar 2.5. | Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY, 2012- 2017 | 28 | | |
| Gambar 2.6. | Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan DIY, 2012- 2017 | 29 | | |
| Gambar 2.7. | Perkembangan Tingkat Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan DIY 2012-2017 | 30 | | |
| Gambar 2.8. | Capaian Skor PPH DIY Tahun 2013-2017 | 32 | | |
| Gambar 2.9. | Perbandingan Capaian Ketersediaan dan Konsumsi Energi Tahun 2013-2017 | 33 | | |
| Gambar 2.10. | Perbandingan Capaian Ketersediaan dan Konsumsi Protein Tahun 2013-2017 | 34 | | |
| Gambar 2.11. | Jumlah Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2013-2017 | 35 | | |
| Gambar 2.12. | Perkembangan Luas Lahan Sawah di DIY | 37 | | |
| Gambar 2.13. | Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2013-2017 | 41 | | |

| Gambar 2.14. | di DIY Tahun 2014-2016 | 43 |
|--------------|--|----|
| Gambar 2.15. | Jumlah Kematian Bayi, Balita, dan Ibu tahun 2012-2017 | 45 |
| Gambar 2.16. | Jumlah kasus HIV dan AIDS 1997-2017 | 46 |
| Gambar 2.17. | Cakupan Penemuan Penderita Penyakit Tuberkolosis (TBC) di DIY | 46 |
| Gambar 2.18. | Kasus Malaria DIY tahun 2012-2017 | 47 |
| Gambar 2.19. | API (Annual Parasite Index) Malaria di DIY Tahun 2015-2017 | 47 |
| Gambar 2.20. | Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten Kota se-DIY Tahun 2014-2016 | 50 |
| Gambar 2.21. | Rata-rata lama sekolah | 51 |
| Gambar 2.22. | Capaian rata-rata lama sekolah DIY | 52 |
| Gambar 2.23. | Trend IPG dan IDG Tahun 2010-2016 | 53 |
| Gambar 2.24. | Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) Nasional & DIY | 75 |
| Gambar 2.25. | Upah Rata Rata pekerja per Bulan Di DIY Tahun 2013-2016 | 77 |
| Gambar 2.26. | Perkembangan Koefisien Gini DIY, 2010-2017 (Maret) | 83 |
| Gambar 2.27. | Perkembangan Jumlah Orang Miskin dan Tingkat Kemiskinan DIY, 2013-2017 (September) | 85 |
| Gambar 2.28. | Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 2013-2017 menurut Kabupaten/Kota di DIY | 86 |
| Gambar 2.29. | Penurunan Kemiskinan 2013-2017 menurut Kabupaten/Kota di DIY | 87 |
| Gambar 2.30. | Grafik Jumlah Kejadian Bencana 2005-2015 | 88 |
| Gambar 2.31. | Infografis Data Bencana DIY 2017 | 89 |
| Gambar 2.32. | Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Permukiman di Kawasan Kumuh melalui APBD Provinsi 2017 | 92 |
| Gambar 2.33. | Penerima Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui skema BSPS 2017 di Kabupaten Sleman | 96 |

| Gambar 3.4. | Peta Potensi Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan | |
|-------------|---|-----|
| | (WPP) | 104 |
| Gambar 4.1. | Tujuan, Target dan Indikator | 160 |
| Gambar 4.2. | Alur Pemantauan RAD | 161 |
| Gambar 4.3 | Alur Pelaporan | 163 |
| Gambar 4.4. | Jadwal Pemantauan dan Evaluasi | 165 |

2018



Rencana Aksi Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan





A. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pada pasal 2 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selaras dengan muatan TPB yang tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022 Nomor 3 Tahun 2018.

Beberapa poin TPB terdapat dalam isu-isu strategis pembangunan daerah, yaitu:

1. Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan risiko bencana melingkupi beberapa tema TPB yaitu air bersih dan sanitasi (tujuan ke-6), penyediaan permukiman (tujuan ke-11), perubahan iklim (tujuan ke-13), pengelolaan ekosistem laut dan pengelolaan ekosistem daratan (tujuan ke-15). Isu pencemaran lingkungan berkaitan erat dengan tujuan TPB ke-6 yaitu "menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua". Salah satu jenis pencemaran, yaitu pencemaran

air, dapat ditekan dengan beberapa sasaran dalam tujuan TPB ke 6. Terutama terkait penyediaan air baku, pencegahan pencemaran air yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengolah air limbah, peningkatan kualitas air sungai, dan pengendalian penggunaan air tanah. Isu pencemaran lingkungan dan risiko bencana juga memiliki hubungan dengan tujuan TPB ke-11 yaitu "Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan". Sasaran tujuan TPB ke-11, yang tercakup dalam isu pencemaran lingkungan, adalah penanganan sampah dan limbah perkotaan. Sementara sasaran yang tercakup dalam isu risiko bencana yaitu penurunan indeks risiko bencana, peningkatan kapasitas masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana, dan penyediaan sistem peringatan dini. Isu risiko bencana memiliki keterkaitan dengan tujuan TPB ke-13 yaitu "mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya", sasaran TPB terkait yaitu menurunnya indeks risiko bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana. Isu pencemaran dan kerusakan lingkungan berkaitan dengan tujuan ke-14 mengenai pengelolaan ekosistem perairan dan tujuan ke-15 tentang pengelolaan ekosistem darat. Dalam tujuan ke-14, sasarannya adalah peningkatan wilayah konservasi perairan. Untuk tujuan ke-15, sasaran-sasaran TPB bidang pengelolaan ekosistem darat yang terkait dengan isu pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan dan pengurangan luasan lahan kritis melalui rehabilitasi.

2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian, melingkupi beberapa tujuan TPB. Isu ini berkaitan dengan tujuan TPB ke-11 dan ke-2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang melingkupi sasaran dalam tujuan TPB ke-11 mengenai upaya menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Sasaran yang dilingkupi adalah perwujudan kota dan kawasan permukiman yang layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya. Tingginya alih fungsi lahan pertanian melingkupi sasaran tujuan TPB ke-2 terkait upaya menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Sasaran pembangunan berkelanjutan yang terkait adalah penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

- 3. Ketimpangan wilayah melingkupi sasaran pada tujuan TPB ke-8 terkait "meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Sasaran tujuan TPB yang berkaitan dengan isu ketimpangan wilayah yaitu peningkatan PDRB. Isu ketimpangan juga berhubungan dengan tujuan TPB ke-10 yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. Sasaran yang terlingkupi adalah penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri.
- 4. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan DIY merupakan isu bidang ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan TPB ke-9. Tujuan tersebut adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif, dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Sasaran TPB yang terlingkupi dalam isu penyediaan infrastruktur ini adalah pembangunan bandara baru.
- 5. Masih tingginya angka kemiskinan melingkupi dua tujuan TPB. Tujuan ke-1 yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun, dan tujuan ke-10 yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Sasaran dalam tujuan ke-1 yang tercakup dalam isu kemiskinan yaitu penurunan tingkat kemiskinan, penurunan persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan penurunan jumlah keluarga sangat miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat. Sasaran dalam tujuan ke-10 yang terkait dengan isu ini yaitu penurunan persentase penduduk miskin terutama di daerah tertinggal.

Tabel 1.1. Keterkaitan Isu-isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan DIY dengan TPB

| | Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY | Tujuan TPB | | |
|---|--|------------------|--------------------|--|
| | Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup | 1. Air bersih da | n sanitasi layak | |
| d | lan risiko bencana | (tujuan 6) | | |
| | | 2. Kota dan per | mukiman | |
| | | berkelanjuta | n (tujuan 11) | |
| | | 3. Penanganan | perubahan iklim | |
| | | (tujuan 13) | | |
| | | 4. Ekosistem La | utan (tujuan 14) | |
| | | 5. Ekosistem Da | aratan (tujuan 15) | |

| | Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY | | Tujuan TPB |
|----------|--|----------------|---|
| 2. | Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian Masih Tingginya ketimpangan wilayah | 1. 2. 1. | Tanpa Kelaparan (tujuan 2) Kota dan Permukiman berkelanjutan (tujuan 11) Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8) Berkurangnya Kesenjangan |
| 4. 5. | selatan belum optimal | 1. 1. 2. | (tujuan 10) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (tujuan 9) Tanpa Kemiskinan (tujuan 1) Berkurangnya Kesenjangan |
| 6. | Belum optimalnya implementasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia | 1. | (tujuan 10) Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4) |
| 7. | Belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan. | 1. | Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Tujuan 11) |
| 8. | Belum optimalnya implementasi Tata Kelola pemerintahan (<i>Good Governance</i>) pada semua lini pemerintahan | 1. | Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (Tujuan 16) |
| 9. | Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif | 3. | Energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8) Industri, Inovasi dan Infratruktur (Tujuan 9) Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10) |
| 10 | . Belum optimalnya ratifikasi Kebijakan Internasional Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB | 1. | Kemitraan untuk mencapai tujuan (Tujuan 17) |

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022 dan RAN TPB 2017-2019

B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menyempurnakan Milenium Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global, merupakan transformasi yang ambisius dari *Milenium Development Goal's* (MDG's). Sebagai contoh, Tujuan 1 MDGs tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB menjadi sebanyak 6 Tujuan meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan.

Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan global, TPB jauh lebih ambisius karena bertujuan menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan "Tanpa Kemiskinan" dan "Tanpa Kelaparan", akan dituntaskan hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai "Zero Goal". Sebagai contoh, target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030 adalah Nol. Begitu pula target kelaparan pada Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol.

TPB juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB telah bertransformasi menjadi 241 Indikator.

DIY termasuk provinsi yang berhasil mencapai hampir semua indikator MDGs dibandingkan provinsi lainnya. 37 indikator dari 41 indikator MDGs telah berhasil dicapai DIY pada akhir tahun 2015. Enam indikator utama yang telah dicapai dalam MDGs tersebut meliputi: 1) Akses pendidikan dasar; 2) Kesetaraan gender dalam pendidikan; 3) Angka Kematian Bayi dan Balita; 4) Pengendalian penyakit tuberkulosis (TB) dan malaria, 5) Akses terhadap air bersih dan sanitasi perkotaan, dan 6) permukiman kumuh perkotaan. Empat indikator MDGs yang belum dapat

dicapai pada akhir tahun 2015 di yaitu: 1) Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari 1 US dolar/kapita/hari; 2) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD; 3) *Unmeet need;* 4) Jumlah emisi karbondioksida (CO₂). Pencapaian MDGs inilah yang diteruskan dalam pelaksanaan TPB.

C. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB di Daerah

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berkomitmen untuk menyukseskan pencapaian TPB. Hal ini dibuktikan dengan keseriusannya dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang akan menjadi panduan pelaksanaan TPB. Pemda DIY telah mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang RAD TPB Nomor 34 Tahun 2018. Selain itu, telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 124/TIM/2018 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB di daerah.

Isu-isu strategis pembangunan daerah dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022 selaras dengan pencapaian TPB di DIY. Pemda DIY berkomitmen menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung sasaran tujuan pertama TPB yaitu pada tahun 2030 mengurangi setidak-tidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Tingkat kemiskinan DIY pada 2010 sampai dengan 2018 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin 2010 sebesar 16,83%, turun menjadi 12,36% pada September 2017. Namun demikian, jika dibandingkan dengan nasional, tingkat kemiskinan DIY masih lebih tinggi. Dalam sasaran pengurangan kemiskinan RPJMN 2015-2019, target tingkat kemiskinan DIY tahun 2019 adalah 7%-8%. Dalam RPJMD DIY ditargetkan tingkat kemiskinan secara bertahap turun kurang lebih 1% per tahun sehingga diharapkan pada tahun 2022 menjadi 7%.

Isu strategis pembangunan di DIY terkait ketimpangan wilayah mendapatkan perhatian dalam TPB. Tujuan 8 secara khusus berkaitan dengan ketimpangan wilayah yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan layak bagi semua. Tujuan 10 yaitu mengurangi kesenjangan daerah, dengan sasarannya yaitu: meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya Produk Domestik

Bruto (PDB) per kapita per tahun, tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun, menurunnya koefisien gini, dan menurunnya tingkat kemiskinan.

Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi di DIY masih terpusat di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Nilai PDRB kedua wilayah ini mencapai 60% dari total PDRB DIY. Sementara Kulon Progo dan Gunungkidul, yang mencakup 65 % dari luas wilayah DIY, pangsa distribusi ekonomi dua wilayah ini terhadap DIY hanya sekitar 21%. Dua wilayah terletak jauh dari pusat kota Yogyakarta dan belum ada pusat kegiatan ekonomi yang besar di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih lambat.

Komposisi struktur ekonomi tiap kabupaten/kota perlu untuk dicermati karena mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonominya. Sementara di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta penggerak utama perekonomian adalah sektor industri pengolahan. Melihat perbedaan karakter tersebut, tantangan ke depan adalah menumbuhkan investasi secara proporsional dengan memperhitungkan potensi tiap daerah untuk menghilangkan kesenjangan kabupaten/kota.

Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah merupakan salah satu sasaran dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022. Dengan indikator Indeks Williamson, tahun 2017 sebesar 0,4662 dan pada tahun 2022 menjadi 0,4489. Isu strategis ketimpangan wilayah diatasi dengan strategi mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru (selaras dengan TPB 8) dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian (selaras dengan TPB 9).

Isu lingkungan menjadi masalah yang terus dibicarakan mulai dari MDGs sampai dengan adanya SDGs/TPB. Dalam pelaksanaan aksi pencapaian SDGs/TPB, lingkungan menjadi pilar tersendiri. Pilar ini terdiri dari tujuan ke-6 (air bersih dan sanitasi layak), tujuan ke-11 (kota dan permukiman berkelanjutan), tujuan ke-12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan), tujuan ke-13 (penanganan perubahan iklim), tujuan ke-14 (ekosistem lautan), dan tujuan ke-15 (ekosistem daratan). Terkait hal tersebut, isu lingkungan di DIY dianggap sangat penting sehingga menjadi salah satu indikator sasaran dalam RPJMD yaitu meningkatnya aktivitas

perekonomian yang berkelanjutan. Dua indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi naik dari 5,05 (tahun 2017) menjadi 5,34 (tahun 2022) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) naik dari 55,80 (2017) menjadi 66,15 (tahun 2022).

Masalah pengembangan pendidikan, DIY telah menyelaraskannya sesuai dengan tujuan ke-4 TPB yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat DIY menjadi manusia cerdas utuh berbudaya sesuai dengan filosofi dan ajaran moral nilai luhur budaya. Adapun sasarannya adalah:

- 1. Pada tahun 2022, terwujudnya aksesibilitas dan perluasan kesempatan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat;
- 2. Pada tahun 2022, terwujudnya relevansi pendidikan menengah untuk menjawab pembangunan daerah;
- 3. Pada tahun 2022, terwujudnya tata kelola management pendidikan yang bermutu menuju pada pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 4. Pada tahun 2022, terwujudnya pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas.

Terkait isu tata kelola pemerintahan, menjadi bahasan dalam TPB khususnya pada tujuan ke-16. Tujuannya adalah meningkatkan perdamaian dan menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang (termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan). Skor Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2016 mencapai 73,07 yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 56.69. Pencapaian tersebut menjadikan DIY sebagai salah satu provinsi terbaik dalam aspek reformasi birokrasi. Pencapaian ini membawa DIY sebagai rujukan penerapan reformasi birokrasi. Pemda DIY perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungannya serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pilar tersendiri dalam. Pilar tersebut terdiri dari 4 (empat) tujuan yaitu: energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8), industri, inovasi dan infrastruktur (Tujuan 9), berkurangnya kesenjangan (Tujuan 10).

Paradigma pembangunan ekonomi mengalami pergeseran, dari mengejar angka pertumbuhan meningkat menjadi pertumbuhan yang bersifat inklusif. Pertumbuhan inklusif dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing-masing individu. Pertumbuhan inklusif akan memberi rakyat miskin sebuah titik awal yang memungkinkan mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, yaitu percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap peluang, peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, penguatan kapasitas produksi, dan juga mewujudkan sistem perlindungan sosial.

Pertumbuhan inklusif diukur melalui Inclusive Growth Index (IGI) yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) Dimensi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur ekonomi; (2) Dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, (3) Dimensi kesetaraan gender; (4) Dimensi kapabilitas; dan (5) Dimensi perlindungan sosial. Hasil kajian BPS menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi DIY memuaskan tetapi belum inklusif. Berdasarkan pengukuran indeks IGI diperoleh dimensi infrastruktur ekonomi, kesetaraan gender, dan kapabilitas manusia mencapai indeks kepuasan yang relatif tinggi. Sedangkan dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih relatif rendah pencapaiannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan belum diikuti dengan penurunan kesenjangan baik distribusi pendapatan antar individu maupun distribusi pendapatan antar kabupaten/kota. Pemda DIY berkomitmen mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan meletakkan IGI sebagai indikator tujuan meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta (yaitu indikator Angka IGI dari 5,59 pada tahun 2016 menjadi 6,2 pada tahun 2022).

2018

Komitmen pelaksanaan Pencapaian TPB di atas dapat disajikan dalam skema Visi Misi Tujuan dan Sasaran pembangunan di DIY secara umum sebagai berikut:

Tabel 1.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD DIY 2017-2022

Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

| visi. Terwajaanya Fermigkatan kemanaan martabat manasia soga | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| No | Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Base -line 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Meningkat- kan KualitasMeningkat- nya kualitasAngkaHidup, Kehidupankehidupan danInclusiveKehidupan dan(IGI) 5,59Penghidup- anpenghidupan masyarakat(2016)Masyara- dandengan6,2 | Inclusive Growth | Mening- katnya Derajat Kualitas | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 79,73 | 80,29 | 80,72 | 81,08 | 81,4 | 81,68 | |
| | | SDM (selaras dengan TPB ke-4) | (selaras dengan | Indeks Pemberdaya- an Gender (IDG) | 69,80 | 69,91 | 70,02 | 70,12 | 70,22 | 70,32 | |
| | kat Yang Berkeadilan | tatanan sosial yang | (2022); | 2. Mening- katnya | Indeks Gini | 0,4 40 | 0,39 17 | 0,38 46 | 0,37 76 | 0,37 05 | 0,36 35 |
| | dan menjamin Berkeadab- an ke-Bhinneka- Tunggal-Ika- an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengemban gkan budaya Yogyakarta | menjamin menjamin ke-Bhinneka- Tunggal-Ika- an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengemban gkan budaya | derajat ekonomi masyara- kat. (selaras dengan TPB ke-1, TPB ke-9, TPB ke-12) 3. Terpeli- hara dan Berkem- bangnya Kebudaya- an 4. Mening- katnya aktivitas perekono mian yang berkelanju | Persentase Angka Kemiskinan | 12,36 % | 11,23 % | 10,19 % | 9,11 % | 8,07 % | 7,00 % | |
| | | | | Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi | 10,98% | 11.46 | 11.68 | 11.72 % | 11.99 | 12.04 | |
| | | | | Pertumbuhan Ekonomi. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) | 5,21 % 56,65 | 5,24 % 58,58 | 5,26 % 60,51 | 5,29 % 62,44 | 5,31 % 64,18 | 5,34 % 66,15 | |
| | | | | tan (selaras dengan TPB ke-7, TPB ke-8, TPB ke-13, TPB ke-14; TPB ke-15) | Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 75 % | 76.5 % | 78 % | 79.5 % | 81 % | 82.5 % |
| | | | | | Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan | 11.11 % | 21,11 % | 30,42 % | 40,69 % | 49,03 % | 54,44 % |

| No | Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Base -line 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---|---|---|---|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 5. Menurunnya kesenjang- an ekono- mi antar wilayah (selaras dengan TPB ke-8, TPB ke-9 TPB ke-10) | Indeks Williamson | 0.45 77 | 0,45 59 | 0,45 42 | 0,45 24 | 0,45 06 | 0,44 89 |
| 2. | Mewujud- kan Tata Pemerintah -an yang Demokratis; | Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintaha n yang baik (good governance) | Indikator Reforma si Birokrasi dari 73,07 (BB) (2016) menjadi 76 (A) (2022) | 1. Mening-katnya kapasitas tata kelola pemerinta han (selaras dengan TPB ke-16) 2. Mening-katnya Kapasitas Pengelola-an Keis-timewaan 3. Mening-katnya Pengelola-an dan pemanfaat -an tanah Kasultan-an, Kadipaten dan tanah desa | Opini BPK Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) | WTP A | WTP A | WTP A | MTP A | MTP A | WTP A |
| | | | | | Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan | N/A | 65.22 % | 73.91 % | 82.61 % | 86.96 % | 91.30 |
| | | | | | bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan | 5.3 69 | 7.9 19 | 9.4 19 | 13.4 19 | 17.6 19 | 21.8 77 |

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

D. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB

Beranjak dari pengalaman dalam melaksanakan pencapaian target-target MDGs yang belum optimal, telah disepakati penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB. TPB dilaksanakan dengan mengedepankan prinsipprinsip pembangunan yang universal, tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga daerah (kabupaten/kota) dan non pemerintah.

TPB merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 *platform* partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda.

Setiap *platform* ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

TPB tidak hanya mencakup tujuan dan target, namun juga cara pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB tidak hanya

bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB di atas, DIY berketetapan untuk menjadikan TPB sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD TPB ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh *platform* yang tercermin pada Matriks RAD, baik yang akan dilaksanakan oleh Pemda maupun nonpemerintah.

E. Pembiayaan TPB di Daerah

Sebagai wujud komitmen kuat dalam menjalankan TPB Pemda DIY mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan TPB, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (innovative financing). Sehubungan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemda, dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB di daerah. Sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD), namun juga pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan. Selanjutnya, kerjasama antara pemerintah dan swasta di wujudkan dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam upaya pencapaian pelaksanaan TPB.

F. Metodologi Penyusunan RAD TPB

Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, maka dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017, dokumen RAD TPB tahun 2018-2022 harus ditetapkan.

RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Untuk pencapaian sasaran TPB daerah, gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama bupati/walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAD SDGs menjadi sangat penting.

Mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan TPB.

Penyusunan RAD TPB dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (pokja) yang didasarkan atas Pergub terkait Tim Koordinasi Nasional TPB;
- 2. Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan Renaksi TPB;
- 3. Masing-masing pokja, yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB, dengan tahapan:
 - a. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB
 - b. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator terkait dengan pencapaian TPB
 - c. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana
 - d. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPR
- 4. Melaksanakan pembahasan Draf RAD TPB (narasi dan matrik) masing-masing pokja;
- 5. Melaksanakan pleno penyempurnaan Draf Final RAD TPB berdasarkan masukan hasil pembahasan dari masing-masing pokja;

- 6. Melakukan Penyempurnaan Draf Final RAD TPB oleh Tim Pelaksana TPB;
- 7. Mengesahkan RAD TPB oleh gubernur;
- 8. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi RAD TPB kepada seluruh pemangku kepentingan;
- 9. Melakukan penyusunan RAD TPB di tingkat daerah sesuai dengan proses penyusunan Renaksi TPB di tingkat nasional.

G. Sistematika RAD TPB

Sistematika penulisan dalam dokumen RAD TPB (RAD TPB) DIY adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari sub bab sebagai berikut:

- A. Keselarasan (TPB) dengan RPJMD
- B. (TPB) Menyempurnakan MDGs
- C. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian (TPB) di Daerah
- D. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB
- E. Pembiayaan TPB di Daerah
- F. Metodologi Penyusunan RAD TPB
- G. Sistematika RAD TPB

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB

Bab II terdiri dari sub bab sebagai berikut:

- A. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun
- B. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,
 Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- C. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- E. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- F. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
- G. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

2018

- H. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- I. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
- J. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara
- K. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- L. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- M. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan
- N. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan
- O. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
- P. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh
- Q. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB

Bab III terdiri dari sub bab sebagai berikut:

- A. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- B. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- C. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- D. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- E. Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- F. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- G. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
- H. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- I. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- J. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
- K. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- L. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- M. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
- N. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
- O. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- P. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- Q. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bab IV terdiri dari sub bab sebagai berikut:

- A. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB 2018-2022
- C. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

2018









Pelaksanaan TPB

































Rencana **Aksi Daerah**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SUSTAINABLE **DEVELOPMENT** G ALS

2018 - 2022

Bab II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB

A. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

Berbagai macam definisi kemiskinan telah diungkapkan dan menjadi bahan perdebatan oleh pemerhati kemiskinan. Bank Dunia (2005) mendefinisikan kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Menurut Amartya Sen (1999), kemiskinan dapat terjadi akibat perampasan kapabilitas (*capability deprivation*), yakni kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang. Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi karena kelangkaan sumber daya alam sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah, sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena alokasi sumber daya yang ada tidak terbagi secara merata.

Keberagaman pandangan tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multi dimensi. Fenomena ini membuat pengukuran kemiskinan menjadi tidak mudah. Namun demikian, kemiskinan tetap harus diukur sebagai gambaran dan bahan pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. World Bank Institute (2005) mengemukakan empat alasan urgensi pengukuran kemiskinan, yaitu:

- 1. Agar orang miskin terus berada dalam agenda dan diperhatikan,
- 2. Pengidentifikasian orang miskin dan keperluan intervensi mengenai pengentasan kemiskinan,

- 3. Pemantauan dan evaluasi proyek atau kebijakan intervensi terhadap orangmiskin,
- 4. Evaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan biasanya dikaitkan dengan konsep kemiskinan mutlak dan dilihat dari sisi ekonomi. Pengukuran tersebut menggunakan indikator kesejahteraan. Ravallion (1998) mengemukakan tiga tahapan pengukuran kemiskinan, meliputi:

- 1. Mendefinisikan indikator kesejahteraan yang digunakan,
- 2. Membangun standar minimum dari indikator kesejahteraan. Standar minumun ini dikenal dengan garis kemiskinan (GK),
- 3. Membuat ringkasan statistik.

Terkait pengukuran kemiskinan, *World Bank Institute* (2005) menyebutkan tiga ukuran agregat kemiskinan yang bisa dihitung, yaitu:

- Headcount index (P₀) yang mengukur proporsi penduduk terkategori miskin. Kelebihan dari ukuran kemiskinan ini adalah kemudahannya dalam penghitungan dan mudah dipahami. Kelemahan headcount index ialah tidak memperhitungkan intensitas kemiskinan, tidak menunjukkan level kemiskinan, dan tidak berubah jika penduduk di bawah GK menjadi lebih miskin.
- 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁ atau *Poverty Gap Index*) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P₁ berarti semakin dalam tingkat kemiskinan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
- 3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* atau *Squared Poverty Gap Index*/P₂) yang mengukur sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P₂ berarti semakin parah tingkat kemiskinannya akibat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Di Indonesia, pengukuran kemiskinan dilakukan oleh BPS. Konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Berdasarkan pendekatan ini, BPS merumuskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengeluaran per kapita per bulan dipakai sebagai variabel yang akan dibandingkan dengan besarnya nilai garis kemiskinan untuk menentukan seseorang dikategorikan miskin atau tidak miskin. Seseorang yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dikategorikan sebagai penduduk miskin.

BPS merumuskan garis kemiskinan dengan menjumlahkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditas dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari Komoditas-Komoditas non-makanan terpilih, meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per Komoditas/sub-kelompok nonmakanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran Komoditas/subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran Komoditas/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. GKM, GKNM, dan garis kemiskinan dihitung untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Perhitungannya pun dipisahkan juga untuk daerah pedesaan/perkotaan, sehingga nilainya tidak akan sama (tergantung cakupan/tingkatan wilayah dan daerah pedesaan/perkotaan).

Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin atau *Headcount index* (Po) adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK) dibanding dengan jumlah penduduk wilayah pada tahun yang yang bersangkutan. Persentase penduduk miskin DIY dan Nasional selama 2012-2017 seperti ditunjukkan tabel berikut:

2018

Tabel 2.1. Persentase Penduduk Miskin DIY dan Nasional

| Persentase Penduduk Miskin | Tahun | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Persentase Penduduk Miskin | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| DIY | 15,88 | 15,03 | 14,55 | 13,16 | 13,10 | 12,36 | |
| Nasional | 11,66 | 11,46 | 10,96 | 11,13 | 10,70 | 10,12 | |

Sumber: BPS DIY

Angka kemiskinan di DIY selama enam tahun terakhir (2012-2017) menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012, angka kemiskinan sebesar 15,88 % dengan jumlah penduduk miskin 565,73 ribu jiwa. Penurunan terus terjadi hingga tahun 2017 menjadi 12,36 % dengan jumlah penduduk miskin sebesar 466,33 ribu jiwa. Berbagai upaya yang ditempuh Pemda untuk mengurangi penduduk miskin sekaligus peningkatan taraf kesejahteraan penduduknya. Diantaranya melalui peningkatan perekonomian, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana pada level provinsi, pada seluruh wilayah masing-masing Kabupaten/Kota juga menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 (Maret) persentase kemiskinan terendah adalah Kota Yogyakarta sebesar 7,64 persen dan persentase tertinggi ada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 20,03 persen. Pada dua tahun sebelumnya, yakni tahun 2015, kemiskinan tertinggi masih berada di Kabupaten Gunungkidul sebesar 21,73 %, sementara Kabupaten Kulon Progo sebesar 21,40 %. Selama dua tahun terakhir (2015-2017), tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dapat turun dari 21,73 % menjadi 18,65 atau turun sebesar 3,08 (rata-rata per tahun turun sebesar 1,54%).

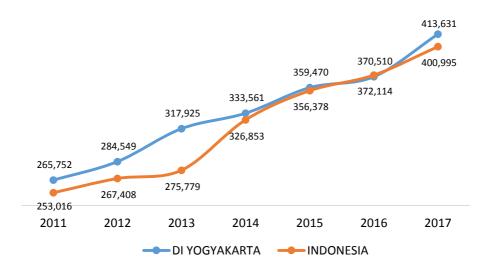
Tabel 2.2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-DIY

| Tahun | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 22.62 | 22 21 | 21 20 | 20.64 | • • | | (Maret) 20,03 | |
| - , - | - / - | , | - / - | _ | | 14,07 | |
| , - | - / - | -, - | - / | | | 18,65 | |
| -, | , | , | - / | | | 8,13 | |
| 9,62 | 9,38 | 8,82 | 8,67 | 8.75 | 7.70 | 7,64 | |
| | 23,62 17,20 23,03 10,61 | 23,62 23,31 17,20 16,97 23,03 22,72 10,61 10,44 | 23,62 23,31 21,39 17,20 16,97 16,48 23,03 22,72 21,70 10,61 10,44 9,68 | 2011 2012 2013 2014 23,62 23,31 21,39 20,64 17,20 16,97 16,48 15,89 23,03 22,72 21,70 20,83 10,61 10,44 9,68 9,50 | 2011 2012 2013 2014 2015 (Maret) 23,62 23,31 21,39 20,64 21.40 17,20 16,97 16,48 15,89 16.33 23,03 22,72 21,70 20,83 21.73 10,61 10,44 9,68 9,50 9.46 | 2011 2012 2013 2014 2015 (Maret) 2016 (Maret) 23,62 23,31 21,39 20,64 21.40 20.30 17,20 16,97 16,48 15,89 16.33 14.55 23,03 22,72 21,70 20,83 21.73 19.34 10,61 10,44 9,68 9,50 9.46 8.21 | |

Sumber: BPS DIY

Berdasarkan data BPS, dalam kurun tujuh tahun terakhir Garis Kemiskinan DIY terus mengalami kenaikan. Pada daerah tipe perkotaan, tahun 2011 Garis Kemiskinan sebesar Rp227.602-/Kapita/Bulan. Setiap tahun selalu mengalami perbaikan seperti terlihat pada tabel di atas. Bila dibandingkan dengan nasional, terlihat mulai tahun 2016 dan 2017 GK perkotaan DIY nilainya lebih kecil dari GK perkotaan nasional.

Demikian pula untuk daerah tipe perdesaan. Nilai garis kemiskinan perdesaan DIY selalu mengalami kenaikan seperti ditunjukkan dalam tabel 1.3 dan grafik 1.2. Tahun 2011, garis kemiskinan perdesaan DIY sebesar Rp213.752-. Bila dibandingkan dengan nasional, terlihat mulai tahun 2015 sampai tahun 2017, garis kemiskinan perdesaan DIY nilainya lebih kecil dari garis kemiskinan perdesaan nasional.



Gambar 2.1. Garis Kemiskinan Daerah Perkotaan DIY 2011-2017
Sumber: BPS DIY



Gambar 2.2. Garis Kemiskinan Daerah Perdesaan DIY 2011-2017
Sumber: BPS DIY

Besarnya garis kemiskinan tahun 2017 (September) adalah Rp396.271- untuk nilai gabungan desa dan kota. Peningkatan Garis Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada peningkatan Garis Kemiskinan di daerah perdesaan. Pada periode Maret-September 2017, Garis Kemiskinan di daerah perkotaan meningkat dari Rp385.308 per kapita per bulan menjadi Rp413.631 per kapita per bulan (naik sebesar 7,35 persen). Pada periode yang sama, Garis Kemiskinan di perdesaan hanya meningkat 1,38 persen dari Rp348.061 menjadi Rp352.861.

Pada tipe daerah perkotaan dalam tahun 2017, kontribusi 5 Komoditas terbesar terhadap garis kemiskinan DIY komponen makanan secara beruturtturut adalah beras, daging sapi, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan gula pasir (sebesar 61,20%). Sedangkan pada komponen Non Makanan secara berturut berupa Perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi (sebesar 71,12%).

Pada tipe daerah perdesaan dalam tahun 2017, kontribusi 5 Komoditas terbesar terhadap garis kemiskinan DIY komponen makanan secara berturutturut berupa beras, rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, dan kue basah (sebesar 55,97%). Sedangkan Non Makanan (Perumahan, bensin, air, kayu bakar, dan listrik) sebesar 65,85%;

Tabel 2.3. Lima Kontribusi Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan menurut Tipe Daerah (September 2017)

| Jenis Komoditas | Perkotaan (%) | Jenis Komoditas | Perdesaan (%) | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Garis Kemiskinan Makanan | | | | | | | | | |
| Beras | 23,06 | Beras | 28,27 | | | | | | |
| Daging Sapi | 16,57 | Rokok Kretek Filter | 11,23 | | | | | | |
| Rokok Kretek Filter | 11,36 | Daging Sapi | 7,02 | | | | | | |
| Telur ayam ras | 5,79 | Telur ayam ras | 5,33 | | | | | | |
| Gula pasir | 4,42 | Kue Basah | 4,12 | | | | | | |
| Garis Kemiskinan Non N | 1akanan | | | | | | | | |
| Perumahan | 22,39 | Perumahan | 23,18 | | | | | | |
| Bensin | 21,5 | Bensin | 22,58 | | | | | | |
| Listrik | 13,94 | Air | 7,39 | | | | | | |
| Pendidikan | 9,32 | Kayu Bakar | 6,94 | | | | | | |
| Perlengkapan Mandi | 3,97 | Listrik | 5,76 | | | | | | |

Sumber: BPS Susenas 2017

2. Tingkat Kemiskinan DIY Per September 2017

Pada tahun 2012 (September), tingkat kemiskinan DIY sebesar 15,88, sementara pada tahun 2017 tingkat kemiskinan DIY sebesar 12,36%. Terjadi penurunan 3,52 poin selama 5 tahun dalam masa RPJMD DIY (2012-2017). Bila dirata-rata, penurunan per tahun sebesar 0,70 poin. Prestasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang nilai penurunannya sebesar 1,39 poin, dan penurunan terendah pada tahun 2016 yang hanya sebesar 0,06 poin.



Gambar 2.3. Tingkat Kemiskinan DIY

Sumber: BPS, Susenas September 2012 - September 2017

2018

Tabel 2.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2016-September 2017

| Daerah/Tahun | Jumlah penduduk miskin (000) | Persentase penduduk miskin | | |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Perkotaan | | | | |
| September 2016 | 301,25 | 11,68 | | |
| Maret 2017 | 309,03 | 11,72 | | |
| September 2017 | 298,39 | 11,00 | | |
| Perdesaan | | | | |
| September 2016 | 187,58 | 16,27 | | |
| Maret 2017 | 179,51 | 16,11 | | |
| September 2017 | 167,94 | 15,86 | | |
| Kota+Desa | | | | |
| September 2016 | 488,83 | 13,1 | | |
| Maret 2017 | 488,53 | 13,02 | | |
| September 2017 | 466,33 | 12,36 | | |

Sumber: BPS Susenas September 2016, Maret 2017, September 2017

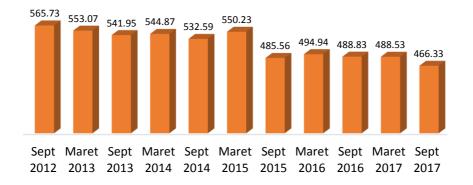
Berdasarkan hasil analisis BPS, turunnya tingkat kemiskinan pada September 2017 selaras dengan pertumbuhan positif beberapa indikator ekonomi. Pada Triwulan III 2017, perekonomian D.I. Yogyakarta mengalami pertumbuhan sebesar 5,55 persen dibandingkan periode sebelumnya. Lapangan usaha pertanian yang merupakan salah satu tumpuan utama penduduk miskin di pedesaan tumbuh sebesar 14,61 persen. Pada periode yang sama, lapangan usaha yang diduga menjadi tumpuan penduduk miskin di perkotaan seperti konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing tumbuh sebesar 9,37; 2,69; 6,17 persen (BRS BPS DIY No. 63/11/Th XIX, 2017).

Industri Mikro Kecil (IMK), yang juga merupakan salah satu basis perekonomian bagi penduduk miskin, turut mencatatkan pertumbuhan positif pada Triwulan II 2017. Pertumbuhan produksi IMK pada kurun waktu tersebut sebesar 2,93 (*q to q*) dan 18,25 (*y on y*).

3. Jumlah Penduduk Miskin DIY September 2012-2017

Pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin DIY sebanyak 565,73 ribu jiwa dan pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin DIY sebanyak 541,95 ribu jiwa (berkurang 23,78 ribu jiwa). Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin DIY sebanyak 466,33 ribu. Bila dibandingkan dengan penduduk tahun 2016 yang sebesar 488,83 ribu jiwa, maka berkurang sebesar 22,5 ribu jiwa.

Nilai penurunan tertinggi jumlah penduduk miskin terjadi tahun 2015 (September) dari tahun 2014 sebesar 532,59 ribu jiwa menjadi 485,56 ribu jiwa (berkurang sebesar 47,03 ribu jiwa). Dilihat dari persentasenya, nilai penurunan terkecil terjadi pada tahun 2016 yakni 0,06. Namun dilihat dari jumlah penduduknya bertambah dari 485,56 ribu jiwa menjadi 488,83 ribu jiwa, atau bertambah sebesar 3,27 ribu jiwa.



Gambar 2.4. Jumlah Penduduk Miskin di DIY September 2012-September 2017 (dalam ribuan orang)

Sumber: BPS, Susenas September 2012 - September 2017

4. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) DIY 2012- 2017

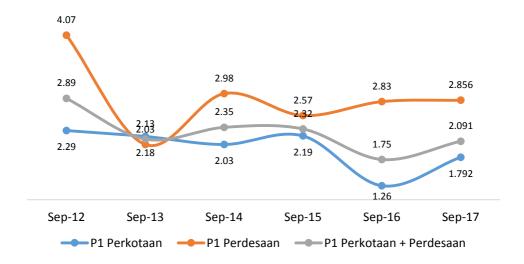
Penanggulangan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengatasi kedalaman kemiskinan DIY. Kedalaman kemiskinan merupakan ukuran ratarata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Pada tahun 2012 (September) tingkat kedalaman kemiskinan (P1) DIY sebesar 2,89, sedangkan pada tahun 2017 (September) tingkat kedalam kemiskinan (P1) DIY sebesar 2,09 (turun sebesar 0,80 poin). Perkembangan P1 dari tahun 2012 sampai dengan 2017 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Bila dirata-rata per tahun maka penurunan P1 pertahun sebesar 0,16 poin. Pada tahun 2017 (September) nilai P1 sebesar 2,09. Bila dibanding dengan 2016 (September) yang sebesar 1,75, maka nilai P1 ini mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin.

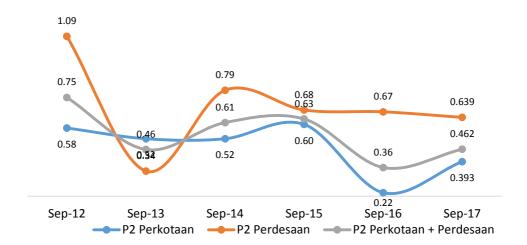
Tabel 2.5. Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman, dan Indeks Keparahan DIY 2012-217

| Bulan/Tahun - | Perkotaan | | | Pe | Perdesaan | | | Perkotaan + Perdesaan | | |
|---------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|--------------------------|------|--|
| Bulany raniun | Po (%) | P1 | P2 | Po (%) | P1 | P2 | Po (%) | P1 | P2 | |
| Sep-12 | 13.10 | 2.29 | 0.58 | 21.29 | 4.07 | 1.09 | 15.88 | 2.89 | 0.75 | |
| Sep-13 | 13.73 | 2.18 | 0.52 | 17.62 | 2.03 | 0.34 | 15.03 | 2.13 | 0.46 | |
| Sep-14 | 13.36 | 2.03 | 0.52 | 16.88 | 2.98 | 0.79 | 14.55 | 2.35 | 0.61 | |
| Sep-15 | 11.93 | 2.19 | 0.60 | 15.62 | 2.57 | 0.68 | 13.16 | 2.32 | 0.63 | |
| Sep-16 | 11.68 | 1.26 | 0.22 | 16.27 | 2.83 | 0.67 | 13.10 | 1.75 | 0.36 | |
| Sep-17 | 11.00 | 1.79 | 0.39 | 15.86 | 2.86 | 0.64 | 12.36 | 2.09 | 0.46 | |

Sumber: BPS DIY: Statistik DIY 2017; BRS Januari 2018, diolah



Gambar 2.5. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY, 2012-2017 Sumber: BPS DIY (Statistik DIY, 2017), diolah



Gambar 2.6. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan DIY, 2012-2017

Sumber: BPS DIY

Tabel 2.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di D.I. Yogyakarta Menurut Daerah, September 2016 - September 2017

| Tahun | Kota | Desa | Kota+Desa |
|----------------------------------|-------|-------|-----------|
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | | | |
| September 2016 | 1,265 | 2,826 | 1,747 |
| Maret 2017 | 2,148 | 2,290 | 2,191 |
| September 2017 | 1,792 | 2,856 | 2,091 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | | | |
| September 2016 | 0,219 | 0,666 | 0,357 |
| Maret 2017 | 0,582 | 0,471 | 0,549 |
| September 2017 | 0,393 | 0,639 | 0,462 |

Sumber: BPS, Susenas September 2016, Maret 2017, September 2017

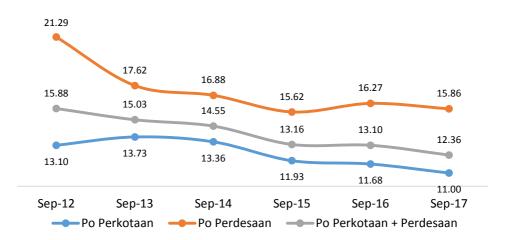
5. Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) DIY 2012 – 2017

Tingkat keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Periode waktu 2012-2017 tingkat keparahan kemiskinan (P2) DIY cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012 (September) tingkat keparahan kemiskinan (P2) DIY (Tabel 2.5.) sebesar 0,75, sedangkan pada tahun 2017 (September) tingkat

keparahan kemiskinan (P2) DIY sebesar 0,46 atau turun sebesar 0,29 poin. Bila dirata-rata per tahun, maka penurunan tingkat keparahan sebesar 0,06. Pada tahun terakhir 2017 (September) ini bila dibanding dengan tahun 2016 (September) sebesar 0,36, maka terjadi penurunan sebesar 0,10 poin.

6. Tingkat Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan DIY 2012-2017

Pada tahun 2012 (September), tingkat kemiskinan perdesaan DIY sebesar 21,29% dan pada tahun 2107 kemiskinan perdesaannya sebesar 15,86%. Selama 2012-2017 telah dapat diturunkan sebesar 5,43 poin atau rata-rata per tahun sebesar 1,09 poin. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan perdesaan DIY sebesar 16,27% sehingga pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 0,59 poin.



Gambar 2.7. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan DIY 2012-2017

Sumber: BPS DIY: Statistik DIY 2017 dan BRS Januari 2018, diolah

Tingkat kemiskinan perkotaan, pada tahun 2012 (September) adalah 13,10% dan pada tahun 2017 sebesar 11,00%. Selama 2012-2017, terjadi penurunan sebesar 2,10 poin. Bila dirata-rata per tahun, maka penurunannya sebesar 0,42 poin. Sementara dengan nilai Po perkotaan tahun 2016 sebesar 11,68%, maka perkembangan terakhir terjadi penurunan sebesar 0,68 poin. Selama enam tahun tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan untuk wilayah perdesaan selalu lebih tinggi.

7. Tantangan Pelaksanaan TPB

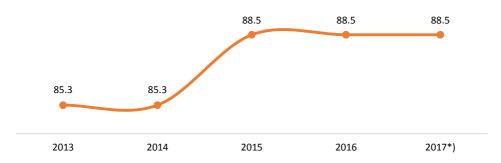
- a. Menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun 2022 sampai dengan 7%, dari tahun 2017 sebesar 12,36%. Mengingat selama 5 tahun terakhir penurunan tingkat kemiskinan rata-rata per tahun sebesar 0,70%.
- b. Terkait dengan angka 1, beberapa persoalan perlu dipecahkan untuk efektivitas penurunan tingkat kemiskinan:
 - 1) Menyatukan data antara kabupaten-provinsi-pusat
 - Terjadinya inclusion dan exclusion error pada data yang saat ini ada (Basis Data Terpadu dan Data Terpadu Pogram Penanganan Fakir Miskin/DTPPFM)
 - Menyelesaikan kesenjangan antara tingkat kemiskinan makro (Susenas) dengan tingkat kemiskinan termonitor (by name by address)
- c. Mengembalikan budaya, mental, karakter, atau perilaku miskin kembali kepada perilaku sosial yang bermartabat.
- d. Menyelesaikan kesenjangan antara input (termasuk pembiayaan) program kebutuhan dasar (misalnya perbaikan RTLH) dan signifikansinya terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
- e. Mengoptimalkan peran serta dari segala potensi yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan (CSR, perguruan tinggi, filantropy, dan lembaga lainnya: sosial masyarakat, Lembaga keagamaan, dsb).
- f. Mengoptimalkan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat yang berhak.

B. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara maupun perseorangan. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan pangan. Meliputi jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Selain itu, pangan tersebut tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pangan yang dimanfaatkan untuk hidup sehat, aktif, produktif, secara berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi dengan mengoptimalkan peran dari masing-masing komponen ketahanan pangan. Komponen tersebut adalah ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Semuanya dilakukan melalui kegiatan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, menjamin kemudahan masyarakat dalam mengakses pangan, menyosialisasikan tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat. Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Termasuk upaya pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal.

Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat diukur dengan indikator kinerja skor PPH (Pola Pangan Harapan). Capaian skor PPH terlihat meningkat. Capaian tahun 2017 sebesar 88,5 (menggunakan data Susenas 2016 yang diolah). Hasil tersebut lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 83,4. Tercapainya indikator skor PPH ini disebabkan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat karena meningkatnya kesejahteraan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA.

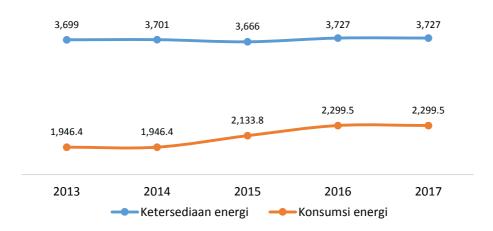


Gambar 2.8. Capaian Skor PPH DIY Tahun 2013-2017 Sumber: BKPP DIY, 2018

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan didukung oleh 3 (tiga) sub sistem penyusunnya. Ketiga hal tersebut adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Sasaran strategis pembangunan ketahanan pangan pertama adalah terwujudnya ketersediaan

pangan dengan indikator kinerja angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi baik (baik pangan hasil produksi dalam daerah maupun dari impor). Pencapaian indikator ketersediaan energi dan protein tahun 2017 sebesar 3.727 kal/kapita/hari dan 101,41 gr/kapita/hari. Hasil ini melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan (sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan 63 gr/kapita/hari).

Dari sisi konsumsi, selain pelaksanaan Gerakan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), pencapaian target skor PPH didukung melalui usaha pemberdayaan wanita. Kegiatannya berupa pemanfaatan pekarangan, pengembangan diversifikasi produk antara, dan peningkatan sosialisasi maupun promosi penganekaragaman konsumsi pangan lokal. Sasaran strategis pembangunan ketahanan pangan kedua adalah meningkatnya konsumsi pangan masyarakat dengan indikator kinerja angka konsumsi energi dan angka konsumsi protein. Capaian tahun 2017, angka konsumsi energi di DIY adalah 2.299,5 kkal/kapita/hari dan angka konsumsi protein 68 gr/kapita/hari. Jika dibandingkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan (2.150 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari), tingkat konsumsi energi di DIY telah melebihi angka kecukupan. Tetapi jika dilihat dari keberagaman jenis/golongan pangan yang dikonsumsi masyarakat, masih perlu ditingkatkan. Khususnya konsumsi dari kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah.

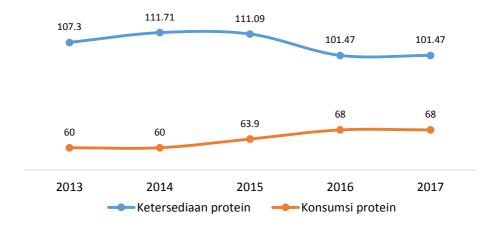


Gambar 2.9. Perbandingan Capaian Ketersediaan dan Konsumsi Energi Tahun 2013-2017

Sumber: BKPP DIY 2018

2018

Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal, terutama umbi-umbian, menjadi alternatif terbaik dalam memenuhi kebutuhan energi. Hal tersebut sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit degeneratif (seperti diabetes, kanker, dan serangan jantung). Sebab umbi-umbian dapat dikembangkan menjadi makanan fungsional yang memiliki indeks glisemik rendah, kaya kandungan prebiotik dan antioksidan. Di wilayah DIY, tingkat ketersediaan energi dan protein lebih tinggi dibanding tingkat konsumsi masyarakatnya. Kondisi ini menggambarkan ketersediaan pangan di DIY mencukupi bahkan melebihi kebutuhan konsumsi penduduk DIY.



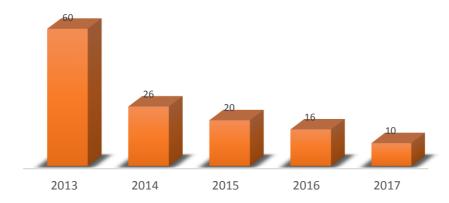
Gambar 2.10. Perbandingan Capaian Ketersediaan dan Konsumsi Protein Tahun 2013-2017

Sumber: BKPP DIY 2018

Selain mutu/kualitas konsumsi, aspek keamanan pangan sangat penting diperhatikan. Dengan terbukanya pasar terhadap produk pangan dari luar daerah maupun luar negeri, masalah dan tantangan keamanan pangan semakin kompleks. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) telah berperan aktif di DIY dalam mengamankan pangan yang diproduksi maupun pangan yang beredar. Baik pangan segar maupun olahan. Sehingga pangan yang dikonsumsi masyarakat DIY aman dari berbagai cemaran fisik, biologis, kimiawi, maupun mikrobiologis. Pembinaan terhadap produsen pangan pun terus dilaksanakan agar produsen pangan di DIY dapat menyediakan pangan yang bermutu dan aman, sekaligus dapat bersaing menghadapi pasar bebas ASEAN (MEA).

Distribusi dan akses pangan telah tertangani dengan baik. Fasilitasi diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan dengan tujuan mendekatkan pangan ke masyarakat. Tujuannya tersedia pangan sesuai kebutuhan masyarakat setempat dengan harga terjangkau secara berkelanjutan. Gapoktan di daerah sentra produksi pangan difasilitasi agar dapat menampung dan mengelola hasil panen masyarakat setempat. Harga pangan pun dapat terjaga, tidak merugikan petani saat panen raya, dan tidak memberatkan konsumen saat musim paceklik. Harga pangan pokok yang berpengaruh terhadap inflasi dipantau secara rutin. Termasuk dilakukan pengendalian melalui operasi pasar oleh instansi terkait. Harga pangan pokok di DIY selama tahun 2017 relatif terkendali. Hal ini sangat didukung oleh keberadaan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Keberhasilan pencapaian ketiga sub sistem ketahanan pangan tersebut telah mendukung upaya penurunan kemiskinan dan kerawanan pangan di DIY. Selama periode 6 tahun sebelumnya, jumlah desa rawan pangan di DIY turun dari 80 desa (tahun 2012) menjadi 10 desa (tahun 2017). Desa rawan pangan tersebut tersebar di Kabupaten Bantul (3 desa), Kabupaten Kulon Progo (4 desa), dan Kabupaten Gunungkidul (3 desa).



Gambar 2.11. Jumlah Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2013-2017 Sumber: BKPP DIY, 2018

Persentase penyuluh, yang meningkat kapasitasnya, mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 sebesar 74% dan pada tahun 2016 menjadi 87,22%. Bahkan pada tahun 2017 mencapai 100% (sesuai dengan target akhir RPJMD periode 2012-2017). Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang

mantap dan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia sangat penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan. Upaya pengembangan sumber daya manusia perlu lebih dioptimalkan. Program penyuluhan menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian kedepannya. Program disusun dengan mengakomodir keperluan masyarakat yang dibuat berjenjang. Mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Program tersebut tetap berpegang pada rambu-rambu perundangan kebijakan pemerintah, RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah. Program yang disusun secara partisipatif diharapkan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Hasil akhirnya akan bermanfaat bagi peningkatkan kualitas penyuluh tersebut.

Menjamin sistem produksi pangan berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh. Salah satu upaya untuk menjamin sistem produksi pangan berkelanjutan adalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Sebab alih fungsi lahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sektor pertanian menempati posisi tiga besar penyumbang PDRB di DIY, yaitu sebesar 10,41%, pada tahun 2016. Tetapi, dalam kurun 2012-2016, kontribusi sektor ini mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,06% dalam hal distribusi persentase PDRB DIY. Hal tersebut disebabkan oleh kompetisi sektor pertanian dengan sektor lain dalam penggunaan sumber daya lahan dan air. Selama rentang waktu tersebut, telah terjadi alih fungsi lahan sawah rata-rata sebesar 0,083% per tahun. Alih fungsi justru terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan produktivitas tinggi. Kasus ini banyak ditemui di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Penyebab alih fungsi lahan yang tinggi disebabkan oleh: peningkatan kebutuhan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat, pertumbuhan sektor non pertanian, perkembangan kawasan perkotaan/urban, perubahan preferensi usaha akibat skala usaha pertanian yang tidak ekonomis, SDM pertanian yang kurang produktif, dan kerentanan petani menghadapi instabilitas harga produk segar pada saat panen. Upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan belum memberikan hasil yang diharapkan. Pada rentang tahun 2007-2017, lahan sawah DIY mengalami penurunan dari 57.443 ha menjadi 51.161 ha (rata-rata sebesar 1,13% per tahun). Tantangan yang

harus dijawab adalah bagaimana lahan produktif yang masih ada dimanfaatkan secara optimal dan arif agar tidak berkurang fungsi dan kemanfaatannya. Upaya perlindungan lahan pertanian juga belum didukung langkah penetapan lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di masing-masing kebupaten. Penurunan lahan sawah di DIY dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.12. Perkembangan Luas Lahan Sawah di DIY Sumber: BPS, 2018

Sawah di DIY terbagi menjadi sawah beririgasi dan sawah non-irigasi (sawah tadah hujan). Luasan sawah beririgasi cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun, namun sebaliknya sawah non irigasi/tadah hujan mengalami kenaikan. Data luas lahan sawah irigasi dan non irigasi/tadah hujan dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Luas Lahan Sawah Beririgasi dan Non Irigasi di DIY Tahun 2013-2017

| Jenis Lahan Sawah | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sawah Beririgasi | 47.133 | 46.300 | 45.976 | 45.880 | 41.712 |
| Sawah Non Irigasi | 9.406 | 9.350 | 9.449 | 9.412 | 9.449 |

^{*)}Angka Sementara

Sumber: Dataku Jogja. Bappeda DIY, 2018

Rencana kawasan budidaya untuk kawasan peruntukan pertanian memiliki arah pemanfaatan ruang untuk mempertahankan luasan kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering. Selain itu, untuk meningkatkan prasarana dan sarana pendukung di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertanian dengan cara melestarikan

kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan kering. Tujuannya mendukung ketahanan pangan dan energi, menjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Berdasarkan pencermatan RTRW DIY pada tahun 2018, dilakukan pengusulan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY seluas 104.905,8 ha.

DIY mengalami fluktuasi produksi padi pada kurun waktu 2013-2017, dimana pada tahun 2017 secara keseluruhan jumlah produksi padi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2.045 ton. Dilihat dari produksi pertanian sawah dan ladang tahun 2017, pertanian mengalami penurunan sebesar 34.204 ton dan ladang mengalami peningkatan sebesar 1.507 ton pada tahun 2017 karena peningkatan produktivitas. Produksi jagung selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, 2016, dan 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2014. Hal ini diakibatkan oleh musim kemarau basah yang mengganggu produksi dan penyusutan lahan pertanian.

Produksi tanaman pangan di DIY Tahun 2013-2017 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8. Produksi Tanaman Pangan di DIY (dalam ton), Tahun 2013-2017

| No | Jenis Tanaman | | | Tahun | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|----|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017*) | (%) |
| 1 | Padi Sawah | 721.674 | 719.194 | 746.810 | 712.285 | 678.081 | -1,48 |
| 2 | Padi Ladang | 200.150 | 200.379 | 198.326 | 170.417 | 202.576 | 0,97 |
| | Total Padi | 921.824 | 919.573 | 945.136 | 882.702 | 880.657 | -1,08 |
| 3 | Jagung | 289.580 | 312.236 | 299.084 | 310.257 | 331.764 | 1,96 |
| 4 | Kedelai | 31.677 | 19.579 | 18.822 | 16.763 | 8656 | -25,34 |
| 5 | Kacang Tanah | 70.834 | 71.582 | 83.300 | 75.816 | 79.907 | 3,46 |
| 6 | Kacang Hijau | 318 | 261 | 230 | 289 | 301 | -0,001 |
| 7 | Ubi Kayu | 1.013 | 884 | 873 | 1.125 | 1.025 | 1,50 |
| | | .565 | .931 | .362 | .375 | .779 | |
| 8 | Ubi Jalar | 4.951 | 5.237 | 6.070 | 3.256 | 5289 | 9,44 |
| 9 | Cantel/Sorghum | 135 | 145 | 51 | 56 | 31 | -23,06 |

^{*)}Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Tanaman hortikultura di DIY juga mengalami peningkatan. Tahun 2015 sebesar 383.913 ton menjadi menjadi 394.800 ton pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun terakhir sebesar 0,67%. Produksi hortikultura selengkapnya dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.9. Produksi Hortikultura di DIY (dalam ton), Tahun 2015-2017

| Kelompok | 2015 | 2016 | 2017* | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|-------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------|
| Buah dan Sayur Semusim | 98.600 | 100.177 | 100.630 | 1,03 |
| Buah dan Sayur Tahunan | 273.239 | 272.763 | 276.259 | 0,55 |
| Tanaman Biofarmaka | 17.734 | 19.481 | 17.911 | 0,90 |

^{*)}Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Komoditas melon merupakan kontributor terbesar kelompok buah dan sayur semusim dengan sumbangan sebesar 26,04%. Komoditas tersebut banyak dikembangkan di lahan pesisir. Kontributor terbesar kelompok buah dan sayur tahunan adalah komoditas Salak (26,63%) yang banyak dikembangkan di daerah Sleman bagian Utara (Turi, Cangkringan, Pakem). Sedangkan Jahe (27,45%) merupakan kontributor terbesar kelompok tanaman biofarmaka. Hal ini dikarenakan komoditas tersebut mudah dikembangkan serta permintaan pasarnya sebagai bahan farmasi herbal cukup tinggi.

Untuk sub sektor perternakan, jumlah populasi ternak tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,53% dibanding tahun 2016 (setara dengan 578.361 ekor). Ternak unggas merupakan komoditas yang pertumbuhannya cukup tinggi. Kebutuhan unggas untuk bahan pangan cukup tinggi di DIY, terutama dalam rangka mendukung daerah ini sebagai tujuan wisata. Rata-rata pertumbuhan selama periode 2013 hingga 2017 sebesar 7,50%. Lebih rinci pertumbuhan populasi ternak disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10. Populasi Ternak di DIY (dalam ekor), Tahun 2013-2017

| Kelompok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | Rata-rata Pertumbuhan |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Ternak Besar | 279.877 | 309.037 | 307.418 | 311.766 | 322.212 | 3,67 |
| Ternak Kecil | 514.030 | 565.786 | 576.697 | 585.622 | 600.868 | 4,04 |
| Ternak Unggas | 11.937 .631 | 13.535 .473 | 15.047 .604 | 15.465 .288 | 16.017 .957 | 7,73 |

^{*)}Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Populasi ternak besar DIY didominasi oleh sapi potong yang berkontribusi sebesar 97,65%. Sedangkan kambing merupakan kontributor terbesar kelompok ternak kecil dengan sumbangan sebesar 67,33%. Gunungkidul merupakan sentra penghasil ternak besar dan kecil. Gunungkidul menyumbang 48,39% populasi sapi potong DIY dan 44,23% populasi kambing DIY. Sementara ayam ras pedaging merupakan kontributor terbesar kelompok ternak unggas dengan peranan sebesar 44,89%. Kabupaten Sleman adalah produsen dari ayam ras pedaging terbesar dengan kontribusi sebesar 38,16%.

Wilayah DIY yang memiliki lahan kering dengan topografi bergelombang (berbukit/bergunung). Hal ini membuat konsentrasi komoditas perkebunan yang cukup beragam dari sisi luasan. Diantaranya komoditas tersebut adalah: kelapa, kakao, kopi, tembakau, dan tebu. Sentra produksi kelapa, kakao, dan jambu mete berada di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di Kabupaten Sleman. Komoditas perkebunan tersebut memiliki cakupan luas yang besar, prospek pasar yang potensial, nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dan berperan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan (tebu).

Luas lahan perkebunan di DIY tahun 2017 mencapai 67.290,704 ha. Luasan tersebut tersebar di 4 Kabupaten di DIY. Kabupaten Kulon Progo menjadi sentra produksi komoditas kelapa, kopi, kakao dan nilam. Kabupaten Gunungkidul sebagai sentra jambu mete, kelapa dan kakao. Sedangkan komoditas tembakau, mendong dan tebu banyak terdapat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Tabel 2.11. Produksi 5 Komoditas Uggulan Perkebunan DIY Tahun 2013-2017

| No | Komoditas | | | | | |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NO. | No. Komoditas | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Kelapa | 55.752,71 | 53.775,40 | 58.725,92 | 54.606,52 | 47,318.93 |
| 2. | Kopi | 1.073,09 | 865,23 | 766,00 | 584,67 | 2.933,75 |
| 3. | Jambu mete | 260,63 | 452,36 | 567,90 | 421,29 | 277,78 |
| 4. | Kakao | 1.124,10 | 1.597,67 | 2.540,79 | 1.608,96 | 1.896,12 |
| 5. | Tebu | 15.960,80 | 14.896,78 | 11.251,80 | 10.206,37 | 7.988,90 |
| | Jumlah | 74.171,33 | 71.587,44 | 73.852,41 | 67.427,81 | 60.415,48 |

*) Angka Sementara

Sumber: Dishutbun DIY, 2018

Produksi perikanan DIY, baik budidaya maupun tangkap, cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Produksi perikanan budidaya yang mendominasi hasil perikanan di DIY ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.13. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2013-2017

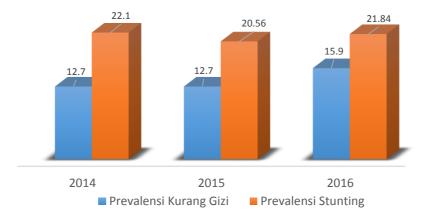
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2018

Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi. Prevalensi *stunting* pada anak di bawah dua tahun (baduta) masih cukup tinggi dan angkanya fluktuatif. Pada tahun 2014, proporsi *stunting* pada anak balita sebesar 22,1% dan menurun menjadi 19,8% tahun 2017. Angka Kurang Gizi pada balita masih menjadi masalah di DIY. Angkanya meningkat sejak tahun 2014 sampai tahun 2017. Tahun 2014 sebesar 12,7% dan tahun 2017 menjadi 15,9%. Faktor yang berperan penting dalam

mempengaruhi *stunting* dan kurang gizi adalah rendahnya akses terhadap makanan dari jumlah dan kualitas gizi, pola asuh yang kurang baik (terutama pada perilaku dan praktek pemberian makan bayi dan anak), rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan (termasuk akses sanitasi dan air bersih). Masalah *stunting* dan kurang gizi juga berhubungan dengan konsumsi pangan. Data menunjukkan balita 53% defisit energi dan 24,3% defisit protein, dan ibu hamil 51,2% defisit energi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan gizi berkaitan dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak.

Permasalahan gizi yang lain adalah masih tingginya prevalensi anemia ibu hamil di DIY. Pada tahun 2015 sebesar 14,85 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 16,09 %. Upaya penurunan prevalensi anemia ibu hamil perlu dilakukan secara optimal. Sebab target penurunan jumlah kematian ibu menjadi prioritas permasalahan kesehatan di DIY. Prevalensi ibu hamil yang menderita KEK di DIY mengalami kenaikan. Tahun 2015 adalah 9,11%,, tahun 2016 menjadi 10,39 %, tahun 2017 menjadi 10,70. Permasalahan anemia ibu hamil dan ibu hamil KEK merupakan permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan penanganan lebih baik, mengingat status kesehatan ibu hamil sangat menentukan dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada prevalensi gizi lebih pada anak balita. Gizi lebih di DIY juga merupakan masalah kesehatan yang harus mendapatkan perhatian. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi di DIY, balita kegemukan (berat badan per Umur) tahun 2014 adalah 5,84%. Tahun 2015 menjadi 3,81% dan tahun 2016 menjadi 3,11%. Pada usia diatas 18 tahun, DIY adalah salah satu provinsi dengan angka obesitas diatas nasional. Prevalensinya sebesar 15,8%, sementara nasional adalah 15,4% (Riskesdas, 2013). Dengan memperhatikan masalah gizi, DIY menghadapi beban ganda permasalahan gizi, yaitu permasalahan gizi kurang dan gizi lebih.



^{*}Hasil Sementara Sirkesnas 2016

Gambar 2.14. Prevalensi Kurang Gizi dan Stunting pada Balita dan Baduta di DIY Tahun 2014-2016

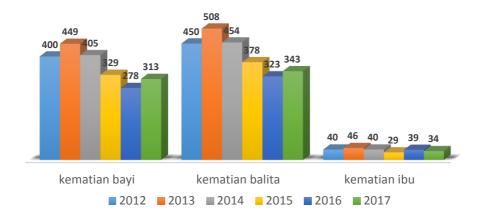
Sumber: Riskesdas Tahun 2007, 2010, dan 2013

C. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Upaya pemerintah mengurangi AKI adalah memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditangani tenaga kesehatan. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), persalinan di fasilitas kesehatan meningkat setiap tahunnya. Persentasenya adalah 46% (2007), 63,2% (2012) dan 79% (2017). Data Susenas menunjukkan peningkatan sebesar 77,6% (2015) dan 79,7% (2016). Proporsi kelahiran yang dibantu tenaga medis profesional meningkat dari 73% (2007), 83% (2012) dan menjadi 90,9% (2017). Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di DIY cenderung stagnan. Penyebabnya karena pencapaiannya sudah maksimal (yaitu 99,92% tahun 2013 menjadi 99,97% tahun 2017). Sedangkan persalinan di fasilitas kesehatan pencapaiannya tidak jauh berbeda dengan persalinan oleh tenaga kesehatan. Tahun 2013 sebesar 99,80% dan tahun 2017 sebesar 99,87%. Jumlah kematian ibu angkanya fluktuatif. Tetapi ada kecenderungan menurun. Kasus kematian ibu tahun 2012 sebesar 40 kematian dan menjadi 34 pada tahun 2017. Secara nasional AKI telah menurun dari 346 kematian (SP 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015). Artinya terjadi penurunan sebesar 2,4% setiap tahun (*Annual ReductionRate*/ARR). Target RPJMN pada tahun 2019 sebesar 306 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup telah tercapai. Dibutuhkan ARR sebesar 9,5% untuk mencapai target TPB AKI yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita. Kematian bayi adalah indikator kesejahteraan masyarakat. Jumlah kematian bayi menurun dari tahun 2012 sampai tahun tahun 2017. Kematian bayi tahun 2012 sebanyak 400 kematian menjadi 313 pada tahun 2017. Sedangkan kematian balita pun mengalami penurunan dari 450 pada tahun 2012 menjadi 343 kematian pada tahun 2017. Data proyeksi kematian bayi di DIY cenderung stabil. Dari 13 per 1000 kelahiran hidup tahun 2010 menjadi 11 per 1000 kelahiran hidup tahun 2035. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBA) di Indonesia terus menurun. Data SDKI tahun 1991 sebesar 68 per 1000 kelahiran hidup menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup tahun 2017. Angka Kematian Balita (AKBA) mengalami penurunan sejak tahun 1991. Dari 97 per 1000 kelahiran hidup menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup tahun 2017.

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) stagnan dalam 3 tahun terakhir. Capaian tahun 2015 sebesar 97,16% menjadi 97,44% tahun 2017. Data SDKI dan Riskesdas menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) terus mengalami peningkatan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi meningkat dari 71,2% (2013) menjadi 80,7% (2016). Meskipun meningkat, sebesar 32,1% anak usia 12-23 bulan mendapatkan imunisasi yang tidak lengkap, dan 8,7% yang sama sekali tidak pernah mendapatkan imunisasi.



Gambar 2.15. Jumlah Kematian Bayi, Balita, dan Ibu tahun 2012-2017

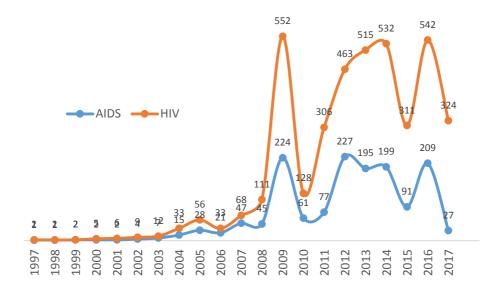
Sumber: Profil Kesehatan DIY (2012-2017)

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, sistem rujukan, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2) peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; 3) peningkatan surveilans gizi; 4) peningkatan kompetensi petugas gizi dan KIA; 5) pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak;dan 6) peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama capaian imunisasi tiap desa dan daerah yang belum sepaham untuk imunisasi.

Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular. DIY menempati urutan ke-9 sebagai provinsi dengan penderita HIV-AIDS terbanyak. Kasus HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan meningkat, namun prevalensi masih dapat ditahan di bawah 0,5%. Jumlah ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) terus meningkat dari 2 orang (1997) menjadi 4012 orang (2017). Penemuan TB BTA (+) dari tahun 200-2016 masih belum mencapai target 70% (gambar 7). Kemajuan yang signifikan dicapai dalam upaya mengakhiri epidemi malaria, kusta dan filariasis. DIY merupakan wilayah endemis Malaria, yang sampai dengan saat ini belum dapat dieliminasi. Wilayah endemis malaria berada di Kabupaten Kulon Progo, khususnya terjadi di wilayah

2018

perbukitan Menoreh yang terdiri dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang. Kecenderungan penurunan jumlah kasus malaria dari tahun 2012-2016, dari 241 kasus menjadi 95 kasus. DIY hanya memiliki satu kabupaten yang memiliki kasus malaria dimana direncanakan tahun 2022 akan eliminasi. Pada penyakit kusta, DIY sudah eliminasi begitu juga filariasis.



Gambar 2.16. Jumlah kasus HIV dan AIDS 1997-2017
Sumber: Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DIY (2017)



Gambar 2.17. Cakupan Penemuan Penderita Penyakit Tuberkolosis (TBC) di DIY



Gambar 2.18. Kasus Malaria DIY tahun 2012-2017



Gambar 2.19. API (Annual Parasite Index) Malaria di DIY Tahun 2015-2017

Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM). Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi hipertensi adalah sebesar 25,8% (hampir 42,1 juta penduduk di atas 18 tahun). Di DIY, beberapa prevalensi PTM melebihi angka nasional. Prevalensi Diabetes Mellitus sebesar 2,6% dibanding nasional 1,5%. Hipertensi hampir sama dengan angka nasional (25,7%), stroke 16,9 permil dibandingkan nasional 12,1 permil, dan kanker 4,1 permil dibandingkan nasional 1,4 permil. Prevalensi hipertensi pun mengalami fluktuasi berdasarkan Riskesdas 2007, Riskesdas 2013 dan Sirkesnas 2016. Prevalensi obesitas penduduk Indonesia di atas usia 18 tahun meningkat dari 10,3% (2007) menjadi 15,4% atau sekitar 23,5 juta penduduk (2013).

Di DIY, prevalensi obesitas diatas angka nasional sebesar 15,8%. Perilaku merokok, selain pola makan dengan gizi tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik, menyumbang pada peningkatan prevalensi PTM di Indonesia. Proporsi penduduk umur di atas 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau meningkat dari 34,2% (2007) menjadi 36,3% (2013). Sedangkan di DIY angkanya lebih kecil dari nasional, yaitu sebesar 15,6%. Sebanyak 26,1% penduduk Indonesia kurang aktivitas fisik, dan tidak berbeda jauh dengan DIY yang angkanya 27,5%. Konsumsi buah dan sayur pada 93,5% penduduk di atas usia 10 tahun masih kurang, sedangkan di DIY jumlahnya lebih kecil dari angka nasional sebesar 52,1% (2013).

Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah: 1) perluasan *screening* wajib pada ibu hamil dan kelompok beresiko tinggi; 2) kerja sama lintas sektor dan masyarakat untuk penemuan TB; 3) perluasan penggunaan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) TB ke seluruh RS untuk meningkatkan temuan kasus baru TB; 3) peningkatan upaya mencegah *Multi Drug Resistance* (MDR); 4) peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan *diagnostic kit*) dan TB; 5) Eliminasi malaria pada kawasan menoreh.

Tantangan untuk menurunkan kematian akibat PTM diantaranya: 1) penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui bahwa telah menderita PTM; 2) peningkatan upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko PTM; dan 3) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita PTM.

Mencapai Cakupan Kesehatan Universal. Jumlah penduduk yang tercakup dalam JKN terus meningkat Sampai dengan 31 Desember 2017, sebanyak 3,1 juta penduduk telah menjadi peserta. Berdasarkan Susenas, perluasan cakupan berdampak pada menurunnya *unmet need* pelayanan kesehatan. Dari 9,9% (2006) menjadi 4,3% (2016). Pelaksanaan cakupan kesehatan universal perlu diarahkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antar wilayah. Upaya yang perlu dilakukan adalah: 1) menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah; 2) mendorong Pemda untuk dapat mendorong integrasi jamkesda ke dalam JKN; 3) memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri; dan 4) mengurangi ketimpangan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan. Tantangan utama yang

dihadapi dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan adalah rendahnya peserta yang termasuk dalam kategori mandiri dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin. Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Namun, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan belum merata. Sebagian besar tenaga kesehatan terutama dokter, dokter spesialis dan dokter gigi terkonsentrasi di kota Yogyakarta, kabupaten Sleman dan Bantul. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas di Indonesia meningkat dari 75,5% (2014) menjadi 81,57% (2016). Untuk DIY, persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2016 sebesar 97,73% dan tahun 2017 sebesar 95,88%. Untuk menjamin mutu dan keamanan obat yang beredar, pengawasan obat terus ditingkatkan. Tantangan yang dihadapi adalah: 1) peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan; 2) meningkatkan penggunaan obat rasional dan memperkuat sistem pengawasan obat.

D. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

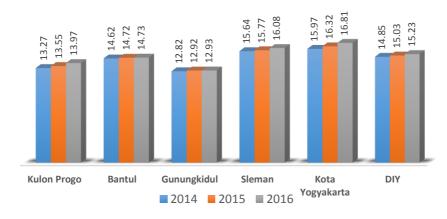
Dalam hal pembangunan pendidikan, keberhasilan pembangunan pendidikan ditunjukkan dengan ketersedian layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas mutu pendidikan yang memadai, terwujudnya kesetaraan dalam pendidikan, dan jaminan kepastian mendapatkan layanan pendidikan.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan diantaranya: Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Sementara itu, keberhasilan pembangunan kesehatan dinilai dari capaian indikator yang meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Status Gizi Bayi/Balita.

1. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Mulai tahun 2014, BPS melakukan penyempurnaan beberapa indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk metodologi penghitunganya. Sebagai salah satu komponen penyusunan IPM, Angka Melek Huruf dianggap tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Indikator baru yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Capaian AHLS DIY tahun 2016 adalah sebesar 15,23 tahun, meningkat 0,20 poin dari 15,03 pada tahun 2015. Untuk kabupaten/kota, capaian tertinggi Kota Yogyakarta sebesar 16,81 tahun dan capaian terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar 12,93 tahun.



Gambar 2.20. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten Kota se-DIY Tahun 2014-2016

50 | Rencana Aksi Daerah

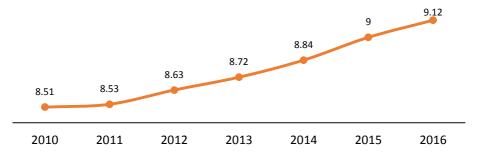
Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016

Dari gambar tersebut terlihat bahwa AHLS di Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas AHLS DIY, sedangkan AHLS Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul berada di bawah AHLS DIY, ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan AHLS di kabupaten kota di DIY. Dari data bisa disimpulkan bahwa AHLS Gunungkidul selain capaiannya terendah di antara kabupaten kota di DIY, meskipun ada peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun tetapi peningkatannya kurang signifikan.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Capaian angka rata-rata lama sekolah mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Angka rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri.

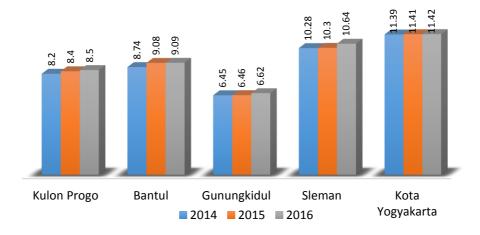
Untuk meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan. Selama 2010-2016 terjadi tren peningkatan capaian Rata-Rata Lama Sekolah DIY yaitu dari 8,51 di tahun 2010 menjadi 9,12 di tahun 2016.



Gambar 2.21. Rata-rata lama sekolah
Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DIY Tahun 2010-2016. Dilihat data per kabupaten/kota, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2015 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 11,41 tahun sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 6,46 tahun, dengan kata lain terdapat ketimpangan yang mencolok antara Kota Yogyakarta yang rata-rata penduduknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dengan Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar.

Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan. Capaian rata-rata lama sekolah DIY tahun 2014-2016 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.22. Capaian rata-rata lama sekolah DIY

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016

E. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indeks penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan gender. DIY (DIY) meraih capaian yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia selama dua tahun berturut-turut. Meskipun begitu,

terjadi penurunan skor dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pada tahun 2015, IPG DIY adalah 94,41 dan turun menjadi 94,27 pada tahun 2016. Selain itu, disparitas pencapaian IPG antar kabupaten/kota di DIY cukup tajam. Berdasarkan data tahun 2015 capaian IPG tertinggi sebesar 98,78 untuk Kota Yogyakarta dan terendah 83,10 untuk kabupaten Gunungkidul. Demikian pula dengan IDG, terdapat penurunan dari 68,75 pada tahun 2015 menjadi 66,96 pada tahun 2016. Disparitas IDG antar kabupaten/kota juga terlihat lebar, IDG Kota Yogyakarta tertinggi dengan 79,33 dan Kabupaten Bantul terendah dengan pencapaian IDG sebesar 61,77.



Gambar 2.23. Trend IPG dan IDG Tahun 2010-2016

Salah satu faktor krusial penyebab menurunnya skor IPG dan IDG DIY adalah rendahnya tingkat partisipasi perempuan di ranah politik. Tantangannya adalah meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengarusutamaan gender. Disamping itu, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Hasil Survei Prevalensi Perempuan Korban KDRT yang dilaksanakan oleh BPPM DIY dan Rifka Annisa Women Crisis Centre pada tahun 2017 di Kabupaten Sleman menunjukkan:

- Kekerasan oleh pasangan: diperkirakan 1 dari 5 (19,3%) perempuan berusia 18-49 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangannya sepanjang hidupnya. Lebih lanjut, 2 diantara 10 (5,5%) orang perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan emosional sebesar 17,5%. Sedangkan rentang usia mayoritas perempuan yang mengalami kekerasan adalah 35-49 tahun (12,5%).
- 2. Kekerasan oleh selain pasangan: Sebesar 10,1% pernah mengalami kekerasan fisik sebelum berusia 15 tahun. Sebagian besar pelaku kekerasan sejak berusia 15 tahun adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban. Prevalensi kekerasan seksual yang dilakukan oleh non-pasangan sejak usia 15 tahun adalah sebanyak 2,4%. Terdapat sebanyak 22,5 % perempuan yang mengaku mengalami kekerasan seksual semenjak usia 15 tahun. Pelaku kekerasan seksual non-pasangan terbesar (39,5%) adalah orang yang terdekat dikenal oleh korban.

Data yang dihimpun oleh BPPM DIY menunjukkan perempuan dan anak koban kekerasan angkanya terus meningkat. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1497 korban yang melapor. Pada tahun 2016 meningkat mejadi 1509 korban melapor. Angka ini ditengarai hanya merupakan puncak dari gunung es mengingat masih kentalnya budaya patriarki dan tabu di masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), adalah: (i) membangun sistem data dan informasi KtP; (ii) meningkatkan komitmen pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iii) meningkatkan efektifitas upaya-upaya pencegahan KtP dan penanganan korban KtP; dan (iv) meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KtP.

Menghapus Semua Praktik Berbahaya. Persentase perempuan yang menikah pada usia anak tahun 2016 meningkat 12,76% dari 8,85% di tahun 2015 menjadi 21,61%. Pada tahun 2016, Bantul mengalami kenaikan jumlah pernikahan anak yang signifikan, dimana pada perempuan usai <16 tahun terjadi peningkatan dari

8 menjadi 31 anak, dan pada anak laki-laki <19 tahun dari 31 menjadi 81. Pernikahan anak perempuan usia 17-21 tahun meningkat lebih dari 100% dan laki-laki 19-21 tahun meningkat lebih dari 2 kali lipat jumlah tahun 2015. Kenaikan jumlah usia pernikahan anak juga terjadi di Kulon Progo. Gunungkidul justru mengalami penurunan pernikahan usia anak dan usia muda. Keberadaan peraturan bupati tentang peningkatan usia perkawinan memberikan hasil yang signifikan pada pendewasaan usia menikah.

Peningkatan umur kawin pertama tersebut berkorelasi positif dengan meningkatnya pendidikan perempuan (SDKI, BPS). Disparitas gender dalam pemerataan pendidikan masih ditemui di berbagai wilayah di DIY. Tren angka harapan lama sekolah perempuan di DIY masih berada di bawah laki-laki dan terjadi dari tahun ke tahun tanpa terbatas antara wilayah rural dan urban. Di tingkat provinsi, AHL perempuan di tahun 2015 adalah 14.88 tahun, sementara laki-laki mencapai 15.22 tahun. Keduanya terpaut 0.34 tahun. Dari kelima wilayah, AHL terendah adalah anak perempuan di Gunungkidul yang hanya berada di angka 12.70 tahun. Meskipun sesama daerah rural, pencapaian AHL perempuan di Kulon Progo justru lebih tinggi dibanding laki-laki dengan selisih angka mencapai 1.13 tahun.

Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki ditemukan dalam rata-rata lama sekolah. Secara keseluruhan, angka rata-rata sekolah perempuan di DIY adalah 8.40 tahun, sementara laki-laki adalah 9.64 tahun. Selisih di antara keduanya mencapai 1.24 tahun. Kondisi ini secara merata terjadi di setiap daerah di DIY. Di Gunungkidul, kesenjangan semakin melebar mencapai 1.54 tahun dimana rata-rata lama sekolah laki-laki mencapai 7.27 tahun, sementara perempuan jauh di angka 5.73 tahun.

Di Sleman, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan juga melebar, laki-laki 10,83 tahun dan perempuan 9,78 tahun. Jika melihat tren lima tahunan, di Gunungkidul sendiri bisa dilihat bahwa pencapaian rata-rata lama sekolah laki-laki lebih progresif dibandingkan perempuan yang cenderung pelan. Di DIY, dari tahun 2014 hingga 2015, pencapaian rata-rata lama pendidikan laki-laki dan perempuan pun terlihat tidak signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pemerataan pendidikan bagi perempuan dan laki-laki tidak terbatas pada persoalan ekonomi, infrastruktur, dan kondisi geografis. Di bidang pendidikan, pemerataan bagi perempuan dan laki-laki berkelindan dengan berbagai faktor yang lebih rumit dan seringkali tidak kasat mata. Seperti stereotip gender yang melekat baik pada laki-laki atau perempuan. Pernikahan dini dan kehamilan remaja merupakan persoalan penting lain yang ikut menghambat perempuan menamatkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Peneliti dari PSKK UGM, Dr. Umi Listyaningsih, M.Si., memaparkan tren pernikahan usia dini di Yogyakarta tidak hanya dipicu oleh kehamilan. Rendahnya angka wajib belajar dan minimnya pengetahuan tentang konsep perencanaan keluarga menjadi penyebab lain pernikahan dini. Upaya peningkatan masa menempuh pendidikan dengan penerapan wajib belajar 12 tahun yang digencarkan pemerintah pada 2015 lalu sendiri masih belum diterapkan secara serius karena tidak ada payung hukum yang mewajibkan pemerintah provinsi dan daerah untuk segera menerapkan.

Tantangan yang dihadapi untuk menurunkan angka perkawinan anak dan juga angka kelahiran pada usia 15-19 tahun adalah: 1) mensinergikan dan mengharmonisasikan peraturan daerah dan kebijakan yang ada; 2) mengubah norma dan nilai dalam masyarakat akan perkawinan dini; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dan memberi kesempatan lebih besar pada anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; dan 4) meningkatkan cakupan pelayanan pendidikan khususnya di daerah terluar, terpencil dan tertinggal.

Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin. Melemahnya partisipasi dan kontrol perempuan dalam pengambilan kebijakan publik masih terjadi di DIY. Kuota 30% perempuan yang menduduki jabatan publik baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif secara umum masih belum terpenuhi, kecuali jaksa dan pejabat eselon 3, 4 dan 5.

Perempuan yang menduduki jabatan kepala daerah mengalami penurunan dari 40% menjadi 20% di tahun 2016, sementara persentase perempuan wakil kepala daerah masih tetap 20%. Di level kecamatan, jumlah camat perempuan, tetap pada posisi 9% dari 78 camat di DIY. Di Gunungkidul, tidak ada satupun

perempuan yang menduduki jabatan camat di tahun 2016. Sementara perempuan yang menduduki jabatan lurah atau kepala desa pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 10,3% menjadi 9,6%, namun Bantul menambah satu orang perempuan sebagai kepala desa.

Perempuan di DIY yang menduduki jabatan eselon 2 dan eselon 3 meningkat jumlahnya, terutama di Pemda DIY. Sementara eselon 4, jumlahnya menurun banyak, terutama karena restrukturisasi kelembagaan OPD. Namun DIY justru mengalami peningkatan jumlah laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan eselon 4. Data menunjukkan bahwa semakin tinggi jabatan struktural, persentase perempuan justru semakin rendah, meskipun persentase pegawai golongan 3 dan 4 lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Dengan kata lain, isunya bisa jadi bukanlah pada fase rekrutmen pegawai negeri sipil, namun bagaimana skema pengembangan karir memungkinkan perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang dan menduduki jabatan-jabatan strategis.

Problematika kebijakan netral gender, lingkungan kerja yang tidak ramah perempuan, budaya *ewuh pakewuh*, pandangan miring masyarakat terhadap perempuan yang memiliki jabatan/karir lebih tinggi dibanding suami, ditambah dengan masalah internal perempuan yang terperangkap dalam konstruksi gender, seringkali membuat perempuan kurang berani mengambil kesempatan dalam berkarir, maupun meneruskan pendidikan. Perempuan cenderung kurang berani dan memilih aman, memilih rumah tangga dan keluarga sebagai pertimbangan melanjutkan pendidikan ataupun mengejar jabatan.

Dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah di 5 kabupaten/kota, partisipasi perempuan sebagai pemilih selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di Kulon Progo, perempuan yang menggunakan hak pilih mencapai lebih dari 80%, sementara laki-laki 77%. Namun, tingginya partisipasi dalam menggunakan hak pilih ini tidak sejalan dengan jumlah atau persentase perempuan sebagai calon legislaif ataupun calon kepala daerah. Meski kuota 30% telah dilampaui, dalam pertarungan sesunggunya, banyak peempuan yang tersingkir. Data anggota legislatif perempuan di DIY maupun kabupaten/kota memperlihatkan sulitnya mencapai kuota 30% anggota dewan.

Tahun 2015, Sleman adalah wilayah dengan anggota legislatif perempuan terbanyak sebesar 26%, disusul Kota Yogyakarta 25%, Kulon Progo dengan 18%, Gunungkidul 16%, dan Bantul dengan 8%. Sementara di DIY, 11% anggota dewan adalah perempuan. Di level desa, perempuan yang menjadi anggota BPD persentasenya paling tinggi adalah Kabupaten Gunungkidul dengan 7,94%, sementara terendah adalah Sleman dengan 2% BPD perempuan.

Begitupun dalam kepengurusan partai politik. Beberapa isu gendernya antara lain, partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai masih dibawah 20%, kecuali kota yang mencapai 27%. Penyebabnya karena perempuan tidak tertarik berkarir di dunia politik dan dukungan partai terhadap kepemimpinan perempuan masih setengah hati. Meski sudah diatas kuota 30%, namun persentase jaksa perempuan yang menduduki jabatan struktural dan fungsional mengalami penurunan dari 51,37% di tahun 2015 menjadi 45,76% di tahun 2016. Penurunan persentase ini terutama terjadi pada jabatan struktural. Perempuan yang menjabat sebagai hakim dan pejabat struktural di jajaran pengadilan di DIY mengalami penurunan yang signifikan dari 28,57% di tahun 2015 menjadi 9,09% di tahun 2016. Perempuan yang menduduki jabatan di kepolisian mengalami penurunan dari 8,8% di tahun 2015 menjadi 6,25% di tahun 2016.

Penyebab rendahnya persentase perempuan yang menduduki jabatan publik antara lain karena, pandangan masyarakat (termasuk pegawai) bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, sehingga karir suami menjadi lebih penting dibandingkan karir istri. Pandangan masyarakat (termasuk pegawai) bahwa perempuan kurang berani mengambil keputusan strategis dibandingkan laki-laki, sehingga laki-laki lebih tepat untuk menduduki jabatan strategis. Disamping itu, menguatnya fundamentalisme tekstualis yang juga menempatkan posisi perempuan identik dengan urusan domestik.

Beban ganda perempuan pekerja dan belum setaranya proses pengambilan keputusan dalam keluarga juga berkontribusi pada rendahnya partisipasi perempuan dalam politik maupun dalam jabatan publik. Perempuan memilih berkarir dengan "sakmadyo", dengan pertimbangan peran sebagai penangung jawab urusan domestik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan harian keluarga dan pengasuhan anak. Pendidikan politik di keluarga juga ditengarai tidak cukup

mengajarkan anak berpartisipasi (termasuk berdialog dan bernegosiasi) dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam politik harian keluarga, pengambilan keputusan seringkali dilakukan sepihak dan menjadi otoritas orang tua.

Meningkatnya beban perempuan di ranah produktif dan publik yang tidak diimbangi dengan pembagian peran domestik, menjadikan perempuan tidak memiliki banyak pilihan. Perempuan pekerja yang memiliki penghasilan memadai akan membagi peran domestiknya dengan perempuan lain sebagai asisten rumah tangga (baca PRT). Konsekuensinya tentu membagi penghasilannya untuk 'membayar' berkurangnya beban praktek domestik yang harus dijalani. Pilihan yang lain adalah membagi beban domestik dengan keluarga. Mislanya dalam pengasuhan anak, banyak keluarga yang meminta jasa oang tuanya untuk mengasuh anak selama perempuan menjalani peran produksinya. Pada posisi perempuan sebagai pengambil kebijakan, beban ganda semakin 'mengikat' karena pandangan masyarakat bahwa setinggi apapun karir perempuan, dia tetap harus menunjukkan keteladanan sebagai perempuan yang tidak meninggalkan peran yang pada banyak pihak termasuk perempuan sendiri masih menganggap bahwa peran domestik adalah kodrat yang harus dijalani sebagai perempuan.

Dukungan bagi kepemimpinan perempuan masih terbatas, termasuk dari perempuan maupun dari keluarga. Tingginya jumlah calon legislatif perempuan yang tidak sebanding dengan jumlah anggota legislatif perempuan memperlihatkan bahwa di satu sisi, perempuan masih menjadi pelengkap prasyarat kuota 30%, kurangnya modal (baik kapasitas internal, modal, dan pengalaman) yang dimiliki perempuan menjadi peluang bagi lawan politik, baik yang berasal dari partai yang sama ataupun partai lain. Hal ini juga menggambarkan bagaimana pendidikan politik dalam keluarga tidak cukup mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin dan memilih karir profesional maupun politik.

Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi. Di DIY, pengguna alat kontrasepsi tahun 2016 didominasi oleh perempuan. Sebanyak 44 % alat kontrasepsi yang dipilih adalah suntik; 25 % IUD; 11 % menggunakan pil; masing-masing 7% untuk metode kontrasepsi implant dan kondom; 5% untuk MOW, dan pengguna paling sedikit adalah MOP sebanyak 1%.

Namun demikian, yang menggembirakan adalah jumlah pengguna alat kontrasepsi laki-laki meningkat dari tahun 2015, yakni menjadi 32.898 dari 32.404 akseptor. Kabupaten dengan tingkat penggunaan alat kontrasepsi untuk laki-laki cukup tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya adalah Bantul (9.609 akseptor). Di lain sisi, peserta KB perempuan di DIY mengalami penuruan dari tahun sebelumnya, yaitu 398.915 akseptor di tahun 2016 setelah sebelumnya berjumlah 399.014 akseptor.

Hal tersebut menunjukkan pengetahuan tentang alat kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan kepemilikan anak hanya dititikberatkan kepada perempuan. Sekali lagi, perempuan secara langsung memang menunjuk kepada salah satu dari dua jenis kelamin, tetapi di kehidupan sosial diposisikan hanya pada urusan domestik, walau pada dasarnya kesehatan dan proses reproduksi adalah tanggung jawab semua orang tanpa membedakan jenis kelamin. Di banyak tempat, perempuan tidak banyak mendapatkan pengetahuan tentang informasi kesehatan reproduksi sekaligus penyakit penyerta yang bisa mempengaruhi kesehatan ibu. Bahkan perempuan kerap menjadi "korban" atas kuasa yang timpang dari suami atau keluarga.

Meningkatkan Penggunaan Teknologi. Berdasarkan data dari UNICEF, stereotip terefleksi dalam cara siswa memilih spesialisasi dalam menempuh pendidikan. Sebagai contoh, ilmu sosial umumnya diambil oleh pelajar perempuan sementara bidang teknologi lebih banyak dipelajari oleh pelajar laki-laki. Baik laki-laki atau perempuan kerap mendapat label negatif ketika mengambil spesialisasi tak umum. Kondisi ini akan terlihat pada jenjang lebih tinggi ketika pelajar mulai memilih jurusan dan konsentrasi yang diambil. Dengan stereotip tersebut, kesempatan perempuan mengembangkan kapasitas dan berkontribusi di bidang-bidang teknologi menjadi terbatas.

Di luar itu, perempuan juga banyak yang melakukan usaha sendiri, dalam jumlah yang lebih banyak dibanding laki-laki yang mengerjakan hal yang sama. Pada tahun 2015 misalnya, sebanyak 50,63% perempuan memiliki usaha sendiri, jumlah yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang sebanyak 49,37%. Usaha sendiri ini, banyak dilakukan perempuan, seperti usaha warung, membuat usaha produksi makanan rumahan, hingga modiste/usaha jahitan. Namun juga,

dengan berkembangnya teknologi, banyak perempuan yang sekarang melakukan bisnis online: dari menjual baju, sepatu, pakaian bayi, makanan siap saji, sepatu, bahkan hingga perlengkapan rumah tangga.

Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan. Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi anggaran umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang sudah dikembangkan adalah Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Saat ini BPPM telah mengembangkan sebuah aplikasi penganggaran bernama "Sipager". Aplikasi berbasis online ini diharapkan akan lebih memudahkan berbagai perangkat daerah baik di DIY maupun kabupaten/kota untuk dapat menyusun penganggaran yang responsif gender.

F. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kualitas air di DIY terus-menerus dipantau. Termasuk sungai-sungainya. Data hasil pemantauan kualitas air sungai tersebut digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Air (IKA) DIY. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air adalah indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas akibat senyawa pencemar.

Tabel 2.12. Target IKA DIY 2018-2022

| Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IKU | 86,39 | 87,06 | 87,73 | 88,40 | 89,07 | 89,74 |

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PI_{j} = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_{i}}{L_{ij}}\right)_{M}^{2} + \left(\frac{C_{i}}{L_{ij}}\right)_{R}^{2}}{2}}$$

2018

PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij. 'Ci' menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke 'i'. Sementara 'Lij' menyatakan konsentrasi parameter kualitas air 'i' yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air 'j'. Peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Nilai PIj>1 menggambarkan bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- 2. Hitung indeks pencemaran (PIj) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Phosphat, Fecal Coli dan Total Coliform;
- 3. Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PIj sebagai berikut:
 - a. IKA = 100, untuk $PIj \le 1$,
 - b. IKA = 80, untuk PIj>1 dan PIj≤4,67 (4,67 adalah nilai PIj dari baku mutu kelas II terhadap kelas I),
 - c. IKA = 60, untuk PIj>4,67 dan PIj≤6,32 (6,32 adalah nilai PIj dari baku mutu kelas III terhadap kelas I),
 - d. IKA = 40, untuk PIj>6,32 dan PIj≤6,88 (6,88 adalah nilai PIj dari baku mutu kelas IV terhadap kelas I),
 - e. IKA = 20, untuk Plj>6,88.
- 4. Selanjutnya Nilai IKA setiap provinsi dihitung dari rata-rata IKA semua sampel dalam provinsi tersebut.

Tabel 2.13. Target Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai di 10 Sungai di DIY

| Indikator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Jumlah Komunitas/Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |

Dalam rangka meningkatkan IKA di DIY, Pemda melakukan berbagai upaya. Termasuk meningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai di DIY. Caranya dengan melibatkan komunitas/ kelompok masyarakat sekitar sungai yang berpartisipasi dalam pengelolaan sungai.

Komunitas pegiat sungai yang ada di DIY diantaranya adalah:

- 1. Pemerti Kali Code (Forum Masyarakat Code) Masjid Al-Sallam RW 07 Jetisharjo, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta.
- 2. FKWA (Forum Komunikasi Winongo Asri) Badran, RT 49/RW 11, Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
- 3. FKWA (Forum Komunikasi Winongo Asri) Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.
- 4. FORSIDAS (Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai) Gajahwong, Gambiran Baru UH 5 No. 7 RT 45/RW 08, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta.
- 5. Forum Pemerhati Sungai Gawe "Kalijogo", Srimartani, Piyungan
- 6. Payung Hijau untuk Sungai Bedog.
- 7. Pelestari Kali Kuning.

Air Bersih/Air Minum pun menjadi perhatian Pemda DIY. Merujuk laporan kinerja Pemda tahun anggaran 2017, realisasi persentase penduduk berakses air minum sebesar 88,85% (jumlah penduduk DIY akhir tahun 2017 DIY adalah 3.762.167 jiwa). Berdasarkan dokumen RAD 100-0-100, direncanakan 98,38% penduduk DIY telah dapat terlayani air minum.

Melalui program pengembangan pengelolaan air minum, dan dukungan APBN Ditjend Cipta Karya, hingga tahun 2017 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 3.342.838 jiwa dari total 3.762.167 penduduk di DIY. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat,

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi provinsi dalam cakupan pelayanan air minum DIY dilakukan melalui:

- 1. Pengembangan SPAM Regional
- 2. Pengembangan SPAM Perkotaan
- 3. Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air
- 4. Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat

2018

Hingga tahun 2030, diperkirakan kebutuhan air minum di DIY akan mencapai 9.355 l/detik. Jumlah ini dipasok dengan penambahan air baku yang mencapai 6.998 liter/detik. Berdasarkan jumlah tersebut, kebutuhan terbesar ada di Kabupaten Sleman dan Bantul. Rincian proyeksi kebutuhan air minum di DIY disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.14. Proyeksi Kebutuhan Air Minum di DIY Sampai Dengan Tahun 2030

| No | Kabupaten/kota | Tahun 2013 (I/dt) | Tahun 2015 (I/dt) | Tahun 2020 (I/dt) | Tahun 2025 (I/dt) | Tahun 2030 (I/dt) |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Kulon Progo | 271 | 597 | 853 | 1.166 | 1.966 |
| 2 | Sleman | 486 | 1.073 | 1.491 | 2.044 | 2.682 |
| 3 | Bantul | 392 | 534 | 1.050 | 1.628 | 2.518 |
| 4 | Gunungkidul | 658 | 968 | 993 | 1.020 | 1.047 |
| 5 | Yogyakarta | 550 | 328 | 558 | 815 | 1.142 |
| | Total | 2.357 | 3.5 | 4945 | 6.673 | 9.355 |

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap air bersih DIY maka diperlukan pengembangan penyediaan air bersih regional. Pilihan terhadap penyediaan air bersih regional yang diurutkan berdasarkan prioritas adalah:

- 1. SPAM Regional Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (dikenal dengan nama Kartamantul). Proyek ini rencanakan berkapasitas 700 liter/detik dengan menggunakan Sistem Kebonagung dan Sistem Bantar yang berasal dari Sungai Progo. Untuk mencapai kapasitas tersebut dilaksanakan melalui 2 tahap. Tahap I dengan kapasitas 400 liter/detik dan Tahap II dengan kapasitas 300 liter/detik. Biaya investasi diperkirakan mencapai 571 milyar rupiah.
- SPAM Regional Kapet Kabupaten Kulon Progo dan Kawasan Industri Pajangan Kabupaten Bantul. Sistem ini direncanakan dibangun di bawah Bendung Sapon /Groundsill Srandakan & S. Bogowonto dengan jumlah 1.400 Lt/det. Biaya investasi diperkirakan mencapai 559 milyar rupiah.
- 3. SPAM Regional Banyusoco-Sungai Oyo yang akan melayani Kec. Playen di Kab. Gunungkidul dan Kec. Dlingo di Kab. Bantul dengan menggunakan dari mata air Banyusuco, Kab. Gunung Kidul, sebesar 100 l/dt. Biaya investasi diperkirakan mencapai 56 milyar rupiah.

4. SPAM Regional Sungai Bawah Tanah (SBT) Gunungkidul yang akan melayani wilayah Kota Yogyakarta, Kec Prambanan di Kab. Sleman, Kec Piyungan dan Dlingo di Kab. Bantul serta Kec. Patuk di kab. Gunungkidul dengan kapasitas mencapai 100 l/dt. Biaya investasi diperkirakan mencapai 391 milyar rupiah.

Sampai dengan saat ini telah diprogramkan pembangunan SPAM Regional secara bertahap pembangunan SPAM Regional melalui 2 Sistim, terdiri dari:

- 1. Sistim Bantar dan Kebonagung-SPAM Regional Kartamantul (700 Lt/det);
- 2. Sistim Kamijoro-SPAM Regional KAPET Kulon Progo (500 lt/det);

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY, jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi layak sejumlah 1.103.298 rumah tangga atau sama dengan 96,78 % dari total rumah tangga DIY. Jumlah rumah tangga DIY pada akhir tahun 2017 berjumlah 1.140.061 rumah tangga (dalam RAD 100-0-100, Bidang Cipta Karya, 2017).

Masalah persampahan menjadi masalah klasik di setiap wilayah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat (baik itu sampah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, ataupun tingkat perkotaan). Pengelolaan sampah dapat dibagi dalam dua kegiatan utama yaitu:

- 1. Pengumpulan sampah
- 2. Pemrosesan akhir

Tabel 2.15. Volume Timbulan Sampah Kabupaten/Kota

| | | Jumlah Penduduk | | | Volume Timbulan Sampah | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|---------------------|---------|------------------------|-------|----------------------|-------|-------|-------|
| No Kabupaten /Kota | | Wilayah Perdesaan | Perdesaan Perkotaan | | Wilayah Perdesaan | | Wilayah Perkotaan | | Total | |
| | | (Orang) | (Orang) | (Orang) | (%) | m³/hr | (%) | m3/hr | (%) | m³/hr |
| 1 | Bantul | 519 | 409 | 928 | 14,31 | 1.298 | 11,28 | 1.023 | 25,60 | 2.321 |
| | | .280 | .396 | .676 | | ,20 | | ,49 | | ,69 |
| 2 | Gunungkidu | 692 | 69 | 762 | 19,10 | 1.732 | 1,92 | 173 | 21,02 | 1.906 |
| | | .949 | .503 | .452 | | ,37 | | ,76 | | ,13 |

| | | Jum | Jumlah Penduduk | | | Volume Timbulan Sampah | | | | | |
|----|--------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|------------------------|----------------------|-------|-------|-------|--|
| No | Kabupaten /Kota | Wilayah Perdesaan | Wilayah Perkotaan | Total | Wilayah Perdesaan | | Wilayah Perkotaan | | Total | | |
| | | (Orang) | (Orang) | (Orang) | (%) | m³/hr | (%) | m3/hr | (%) | m³/hr | |
| 3 | Kulon | 307 | 137 | 445 | 8,49 | 769 | 3,79 | 343 | 12,27 | 1.113 | |
| | Progo | .838 | .455 | .293 | | ,60 | | ,64 | | ,23 | |
| 4 | Sleman | 547 | 532 | 1.079 | 15,08 | 1.367 | 14,67 | 1.330 | 29,75 | 2.698 | |
| | | .094 | .116 | .210 | | ,74 | | ,29 | | ,03 | |
| 5 | Yogyakarta | - | 412 | 412 | 0,00 | - | 11,37 | 1.030 | 11,37 | 1.030 | |
| | | | .331 | .331 | | | | ,83 | | ,83 | |
| | Jumlah | 2.067 | 1.560 | 3.627 | 56,98 | 5.167 | 43,02 | 3.902 | 100 | 9.069 | |
| | Jumian | .161 | .801 | .962 | | ,90 | | ,00 | | ,91 | |

Sumber: Analisis Data Penduduk dan Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota

Akses layanan air limbah domestik DIY menempati posisi pertama nasional dengan akses layak sebanyak 5,72% menggunakan jamban bersama, 10.95 menggunakan jamban sehat semi permanen, 83,33% menggunakan jamban sehat permanen, dan 89,05% tidak ada penduduk yang terindikasi buang air besar sembarangan.

Jumlah infrastruktur layanan air limbah domestik DIY adalah sebagai berikut:

- 1. Sistem pengolahan air limbah terpusat (SPALD-T) skala perkotaan IPAL Sewon Bantul melayani 22.465 KK (2,09%),
- Sistem pengolahan air limbah terpusat (SPALD-T) skala permukiman IPAL Komunal sejumlah 435 unit melayani 37.918 KK (3,49%),
- 3. Sistem pengolahan air limbah setempat (SPALD-S) individual 830.916 unit melayani 906.412 KK, (83,34%),
- 4. Sistem pengolahan air limbah setempat (SPALD-S) komunal 234 unit melayani 1.071 KK (0,10%).

Sedangkan masyarakat yang masih menggunakan jamban yang tidak aman/tidak layak di DIY teridentifikasi 110.059 KK (10,95%). Rincian akses layanan air limbah domestik nasional dan DIY dapat dilihat pada tabel-tabel berikut

Tabel 2.16. Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah DIY Tahun 2017

| | | | | | | Al | kses Lay | ak | | |
|-------------------|--------------------|----------------|--|---|---|------------------------|---|---------------------------|--|------------|
| | | Tanna | Aksos | S | PALD-SE | TEMPA | Г | SPALD- | TERPUSAT | |
| | Kabu- | Tanpa Akses | Akses Dasar | | Sistem Individual | | tem nunal | SPALD-T Permuki man | SPALD-T Perkotaan | Jum- |
| No paten/ Kota | paten/ Kota | BABS (%) | Cubluk/ Tangki Septik Individua I Tidak Layak (%) | Jam-ban Keluarga Dengan Tangki Septick aman (%) | Memiliki akses ke jamban bersama "layak" (%) | MCK Komun al (%) | Tangki Septik Komun al (5 - 10 KK) (%) | IPAL Komunal (%) | Sambungan Rumah yang Berfungsi (%) | lah (%) |
| 1 | Bantul | 0,00 | 16,63 | 75,97 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,82 | 100,00 |
| 2 | Gunung- kidul | 0,00 | 16,72 | 69,71 | 11,01 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Kulon- progo | 0,00 | 16,18 | 73,26 | 7,79 | 0,00 | 0,02 | 2,76 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Sleman | 0,00 | 3,93 | 85,22 | 5,53 | 0,04 | 0,00 | 4,40 | 0,88 | 100,00 |
| 5 | Yogya- karta | 0,00 | 1,26 | 79,47 | 3,24 | 0,73 | 0,50 | 1,73 | 13,07 | 100,00 |
| 6 | DIY | 0,00 | 10,95 | 77,62 | 5,72 | 0,10 | 0,06 | 3,49 | 2,07 | 100,00 |
| P | ersentase | | | 83 | ,34 | | 16 | 3,49 | 2,07 | |
| | Layanan | 0,00 | 10,95 | | 83,5 | 50 | | | 5,55 | |
| | Limbah Domestik | , | , | | | | 89,05% | • | | |

Sumber Analisis Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota 2017

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi provinsi pengelolaan air limbah DIY telah dirumuskan dalam RAD (RAD 100-0-100) DIY Tahun 2015-2019. Tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan cakupan penduduk berakses sanitasi melalui tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.17. Arah Kebijakan dan Strategi RAD 100-0-100 DIY

| Arah Kebijakan | | Strategi | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------|-----|----------|--|
| Penyediaan sarana dan prasarana air limbah untuk pemenuhan kebutuhan | | Pengembangan Terpusat | Jaringan | Air | Limbah | |
| pelayanan air limbah layak 100% (92% | • | Pengembangan I | PAL Komur | nal | | |
| Layak dan 8% Dasar) | • | Pengembangan | Sanitas | i | Berbasis | |
| | | Masyarakat | | | | |

Sumber: RAD 100-0-100 DIY (Randal DIY, 2016)



G. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

1. Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan energi listrik adalah parameter penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan energi listrik yang benar dan terarah penting diperhatikan oleh pemda. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya peran pemda dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu pemda berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu.

Berdasarkan data rata-rata rasio elektrifikasi PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta tahun 2015 adalah untuk kota Yogyakarta 68,52%, Kabupaten Bantul 97,17%, Kulon Progo 88,91%, Sleman 87,78%, Gunungkidul 80,10% dan total rasio elektrifikasi sebesar 86,27%. Pemda DIY pada tahun 2016 melakukan *updating* data dan sinkronisasi pemenuhan rasio elektrifikasi untuk mengkaji potensi peningkatan rasio elektrifikasi yang meliputi Pemetaan terhadap jumlah rumah tangga berlistrik sebagai pelanggan PLN, Pemetaan terhadap jumlah rumah tangga (KK) yang listriknya masih menyalur, pemetaan terhadap jumlah KK yang belum berlistrik.

Dari hasil pemetaan diperoleh data KK belum berlistrik sekitar 333 rumah tangga. Jumlah rumah tangga belum berlistrik tersebut nilainya cukup kecil. Apabila diinputkan di dalam perhitungan rasio elektrifikasi seharusnya rasio elektrifikasi di DIY bisa mencapai 96,31% dengan rincian untuk kota Yogyakarta 99,86%, Kabupaten Bantul 99,22%, Kulon Progo 94,08%, Sleman 99,995%, dan Gunungkidul 84,69%.

Rasio elektrifikasi nasional berdasarkan data sampai dengan bulan Juni 2017 telah mencapai 92,80%. Angka ini jika diperbandingkan dengan capaian DIY akan menyisakan isu signifikan bahwa rasio elektrifikasi pada waktu yang sama baru mencapai angka 89,63% (terendah di Pulau Jawa). Distribusi rasio elektrifikasi per kabupaten/kota juga memperlihatkan pola yang khusus.

2018

Sesuai perhitungan dari bidang ESDM bahwa capaian rasio elektrifikasi pada akhir tahun 2017 adalah 91,20%, dengan perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik pelanggan PLN dan nonPLN sebanyak 1.039.719 rumah tangga dan jumlah rumah tangga total sebanya 1.140.061 rumah tangga.

2. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Kebijakan diversifikasi energi atau penganekaragaman energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan di DIY antara lain dengan pemanfaatan tenaga air, tenaga angin, tenaga surya dan biogas. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di tahun 2015 dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan mikro hidro untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi kelistrikan yang kurang baik, mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk wilayah perkotaan dan pemanfaatan bio energi khususnya biogas rumah tangga sebagai pengganti bahan bakar minyak atau LPG tabung 3 kg bagi lokasi yang mempunyai potensi biogas yang cukup besar.

Pada tahun 2015 pencapaian Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di DIY sebesar 118.153,28 SBM dari target sebesar 117.950 SBM. Realisasi pencapaian target di tahun 2015 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM sebesar 13.600 watt peak di Kabupaten Gunungkidul atau setara 187,27 SBM;
- Pemasangan 200 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari APBD
 DIY di 10 unit gedung Pemda DIY atau setara 206,54 SBM;
- c. Pembangunan Digester Biogas sebanyak 50 unit dari APBD DIY di Kabupaten Sleman, 150 unit dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kabupaten Gunungkidul dan 50 unit dari Yayasan Rumah Energi (YRE) dengan lokasi tersebar di DIY atau total setara 693,03 SBM;
- d. Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro sebesar 30 kW di Kabupaten Kulon Progo dan 8 kW di Kabupaten Sleman atau setara 523,24 SBM.

2018

Pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan langkah menuju keamanan energi berdasarkan produksi energi setempat. Berikut data jenis energi baru terbarukan di DIY yang terpasang pada tahun 2015.

Tabel 2.18. Data Jenis Energi Baru Terbarukan

| JENIS EBT | POTENSI | | TERPASANG 20 | 15 |
|--------------------|-----------------|---------|-----------------|-------|
| JEINIS ED I | Kapasitas | TOE | Kapasitas | TOE |
| PLTS | 10 MWp | 301 | 200 kWp | 0.32 |
| PLTMH | 2 MW | 817 | 882 kW | 358 |
| PLT Bayu | 100 MW | 165.920 | 131 kW | 24,6 |
| PLT Bagasse | 3.6 MVA /2.5 MW | 929 | 3.6 MVA /2.5 MW | 873 |
| PLT Sampah | 30 MW | 9,040 | 5 kW | 2 |
| Bioethanol | 36 Juta Liter | 18.060 | 5 juta | 2.508 |
| Biogas Ternak Sapi | 15,000 unit | 2.768 | 1.500 Unit | 328 |
| Biogas Sanitasi | 500 unit | 92 | 100 Unit | 11 |
| Biogas Ampas Tahu | 500 Unit | 91 | 10 Unit | 2 |
| Biomassa Pellet | 1,500 Ton | 548 | 600 Ton | 219 |
| DME | 20 Lokasi | | 1 Lokasi | |
| Total Energi (TOE) | 98.567 | | 4.388 | |

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2017

Pada tahun 2016, pencapaian target Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di DIY sebesar 123.590 SBM. Kegiatan pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga sebanyak 120 unit di Kabupaten Sleman, 230 unit di Kabupaten Gunungkidul, 130 unit di Kabupaten Bantul, dan 120 unit di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga pembangunan PLTS tersebar di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 100 unit dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 100 unit. Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro off grid sebanyak 3 unit juga dilakukan untuk mendukung pencapaian target tersebut.

Di tahun 2017, capaian EBT di DIY adalah 143.573,26 SBM dan dilakukan melalui PLT Bagasse, PLTS, PLT Hybrid, dan biogas. Berikut data jenis energi baru terbarukan di DIY yang mendukung capaian target di tahun 2017.

Tabel 2.19. Data Jenis Energi Baru Terbarukan yang mendukung capaian target di tahun 2017

| Jenis | Daya | | SBM | |
|----------------------|--------|------|-----------|-----|
| PLT Bayu Pantai Baru | 54 | kW | 743,56 | SBM |
| PLTMH | 0 | kW | 0 | SBM |
| PLTS DAK | 5000 | Wp | 68,85 | SBM |
| PLTS Pantai Baru | 29000 | Wp | 399,32 | SBM |
| PLTS APBD | 0 | Wp | 0 | SBM |
| Bagasse Madukismo | 2500 | kW | 17.211,96 | SBM |
| Biogas | 25 | Unit | 50,82 | SBM |
| Biogas Hivos | 450 | Unit | 914,76 | SBM |
| Biogas Poantai Baru | 384.65 | m3 | 130,32 | SBM |
| Biogas Tuksono | 24 | m3 | 8,13 | SBM |
| Biogas 4 m3 | 300 | Unit | 406,56 | SBM |
| Juml | ah | | 19.934,27 | SBM |

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2017

3. Konservasi Energi

Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Konservasi energi di DIY khususnya energi listrik belum dilakukan dilakukan secara optimal. Belum optimalnya konservasi energi dapat terlihat dari konsumsi energi listrik di DIY, di mana sektor rumah tangga menjadi konsumen terbesar.

Tabel 2.20. Konsumsi Listrik di DIY (GWH)

| Sektor | | Tahun | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| Sektor | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| a. Rumah Tangga | 1338,38 | 1377,49 | 1466.53 | | | | | |
| b. Bisnis | 527.55 | 570.22 | 660.35 | | | | | |
| c. Publik | 282.38 | 299.7 | 332.82 | | | | | |
| d. Industri | 222.38 | 237.84 | 239.62 | | | | | |
| TOTAL | 2369.6 | 2484.16 | 2698.23 | | | | | |

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2017

Hal ini berdampak pada tingginya elastisitas energi. Elastisitas energi adalah perbandingan antara laju pertumbuhan konsumsi energi dengan laju pertumbuhan ekonomi. Semakin kecil angka elastisitas, maka semakin efisien penggunaan energi. Angka elastisitas energi di bawah 1,0 dicapai apabila energi yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal.

Elastisitas energi di DIY masih di atas 1. Bahkan di tahun 2016 nilai elastisitas energi di DIY sangat tinggi yaitu 1,7. Artinya konsumsi energi lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi atau boros energi.

Tabel 2.21. Elastisitas Energi

| Uraian Asumai dan Targat | Satuan | | Tahun | | | |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--|--|
| Uraian Asumsi dan Target | Satuan | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Pertumbuhan Ekonomi *) | % | 5,2 | 5,0 | 5,0 | | |
| HASIL PROYEKSI | | | | | | |
| Kebutuhan Tenaga Listrik | GWh | 2.369,6 | 2.484,2 | 2.698,2 | | |
| Pertumbuhan Kebutuhan Tenaga Listrik | % | 7,4 | 4,8 | 8,6 | | |
| Elastisitas | | 1,4 | 1,0 | 1,7 | | |

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2017

Dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Daerah (RUED), pelaksanaan konservasi energi di DIY diarahkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 12,5% di tahun 2025 dan 24% di tahun 2050. Sebagai upaya mencapai target tersebut, dilakukan pendekatan konservasi energi di berbagai sektor. Pelaksanaan konservasi energi melalui APBD DIY mulai Tahun 2014 diprioritaskan untuk sektor publik yaitu gedung pemerintah, yang dilakukan melalui pelaksanaan audit energi gedung pemerintahan khususnya milik Pemda. Pelaksanaan audit energi tersebut menghasilkan rekomendasi yang berisi arahan untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik. Sampai dengan tahun 2017, pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan melalui kegiatan audit energi sebesar 28% (42 gedung pemerintah terhadap 150 gedung pemerintah).

H. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Secara absolut, nilai PDRB DIY terus meningkat (baik menurut harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan). Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku, dalam setahun, mencapai 9,1 triliun rupiah di tahun 2017. Jumlah ini merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara berdasarkan harga konstan peningkatan nilai PDRB di tahun yang sama mencapai 4,6 triliun rupiah (dan juga terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya). Total PDRB tahun 2017 atas dasar harga berlaku sebesar 119,2 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan sebesar 92,3 triliun rupiah.

Struktur perekonomian DIY tahun 2017, atas dasar harga berlaku, menunjukkan komposisi lapangan usaha/sektor di DIY beragam. Tiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; pertanian, kehutanan, dan perikanan. Masing-masing sebesar 13,12%, 10,32%, dan 10,01%. Urutan dari ketiga lapangan usaha tersebut mengalami pergeseran. Pertanian turun dari urutan kedua pada tahun 2016 menjadi urutan ketiga. Sementara lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sebaliknya Pergeseran tersebut sudah bisa diprediksi. Sebab kontribusi lapangan usaha pertanian mengalami tren menurun, sementara urutan di bawahnya (penyediaan akomodasi dan makan minum) terus mengalami tren meningkat.

Khusus Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kontribusinya cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Penyebabnya kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air serta terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Selain itu, SDM pertanian juga cenderung mengalami penurunan, sementara tingkat produktivitasnya juga rendah. Perkembangan nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam tahun 2013 hingga 2017 disajikan dalam tabel berikut:

2018

Tabel 2.22. PDRB DIY ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2013-2017 (juta rupiah)

| No | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian | 6.741.414,9 | 6.539.528,2 | 6.666.702,6 | 6.766.494,7 | 6.884.010,1 |
| 2. | Kehutanan dan Penebangan Kayu | 657.699,9 | 680.932,8 | 700.236,9 | 708.450,0 | 728.827,2 |
| 3. | Perikanan | 270.911,3 | 288.519,3 | 300.662,1 | 304.856,6 | 317.809,3 |

Sumber: BPS DIY, 2018

Tabel 2.23. Distribusi Persentase PDRB DIY ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2013-2017

| No. | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--|------|------|------|------|------|
| 1. | Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian | 9,83 | 9,20 | 9,31 | 9,12 | 8,75 |
| 2. | Kehutanan dan Penebangan Kayu | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,84 |
| 3. | Perikanan | 0,41 | 0,40 | 0,44 | 0,42 | 0,42 |

Sumber: BPS DIY, 2018

Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya peningkatan kesempatan kerja. Tambahan kesempatan kerja di DIY selama periode 2013-2016 sebesar 156.329 orang.

Tabel 2.24. Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja

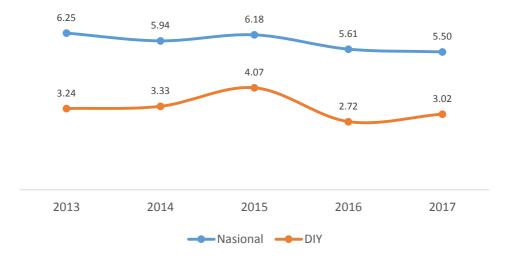
| LAPANGAN USAHA *) | | duduk Yang erja | Tambahan Kesempatan | |
|---|---------|--------------------|------------------------|--|
| | 2013 | 2016 | Kerja | |
| Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan | 531,559 | 475,346 | -56,213 | |
| 2. Pertambangan dan penggalian | 9,075 | 21,172 | 12,097 | |
| 3. Industri pengolahan | 251,892 | 282,309 | 30,417 | |
| 4. Listrik, gas dan air | 5,388 | 7,571 | 2,183 | |
| 5. Bangunan | 104,506 | 133,849 | 29,343 | |
| Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel | 487,923 | 606,474 | 118,551 | |

| LAPANGAN USAHA *) | | duduk Yang erja | Tambahan Kesempatan | |
|--|-----------|--------------------|------------------------|--|
| | 2013 | 2016 | Kerja | |
| 7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi | 65,684 | 77,195 | 11,511 | |
| Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan | 54,090 | 58,496 | 4,406 | |
| 9. Jasa kemasyarakatan | 375,954 | 379,988 | 4,034 | |
| JUMLAH | 1,886,071 | 2,042,400 | 156,329 | |

Sumber : Sakernas, BPS

Penyerapan tenaga kerja DIY selama empat tahun terakhir (2013-2016) masih didominasi sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan dan industri. Sektor pertanian penyerap tenaga kerja tertinggi tetapi mengalami penurunan jumlahnya. Penyebabnya beralihnya fungsi lahan serta minat generasi muda di sektor ini yang menurun. Sektor yang memberikan tambahan kesempatan kerja tinggi adalah perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel, serta sektor industri pengolahan. Hal ini seiring dengan pertumbuhan DIY sebagai kota pariwisata.

Perumbuhan kesempatan kerja diikuti turunnya jumlah pengangguran yang rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.



Gambar 2.24. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) Nasional & DIY

Sumber: Sakernas Agustus 2013-2016

Meskipun tingkat penganggur terbuka yang rendah, tetapi kualitas kesempatan kerja perlu dicermati. Sebab ketimpangan pendapatan menyebabkan kerentanan sosial akibat tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah yang tidak memadai, dan kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja.

Kecenderungan perubahan perekonomian ikut mendorong peningkatan proporsi penduduk yang bekerja dengan status formal. Penduduk yang bekerja formal jumlahnya lebih sedikit bila dibanding jumlah pekerja informal. Tetapi jumlah ini terus mengalami peningkatan selama tahun 2013-2016. Pada tahun 2013 pekerja formal sebanyak 838.169 orang (bertambah sebanyak 82.800 orang atau 9,88%). Dilihat dari proporsi penduduk yang bekerja secara formal setiap tahunnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dari sebesar 44,44% pada tahun 2013 menjadi 45,09% tahun 2016. Pekerja formal menurut status pekerjaan adalah no. 3 dan 4 pada tabel di bawah. Sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sisanya (nomor 1,2,5,6 dan 7) digolongkan pada sektor informal.

Tabel 2.25. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama DIY, Tahun 2013-2016

| STATUS PEKERJAAN*) - | TAHUN | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| STATUS PERERJAAN) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 1. Berusaha sendiri | 12,92 | 13,92 | 15,54 | 15,35 | | |
| 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap | 19,83 | 16,59 | 14,04 | 18,83 | | |
| 3. Berusaha dibantu buruh tetap | 4,57 | 3,90 | 3,48 | 3,51 | | |
| 4. Buruh/Karyawan/Pegawai | 39,46 | 43,22 | 45,31 | 41,58 | | |
| 5. Pekerja bebas di Pertanian | 1,47 | 1,43 | 2,18 | 2,55 | | |
| 6. Pekerja bebas di Non Pertanian | 5,65 | 6,19 | 7,53 | 5,64 | | |
| 7. Pekerja tidak dibayar | 16,10 | 14,75 | 11,92 | 12,53 | | |
| JUMLAH | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

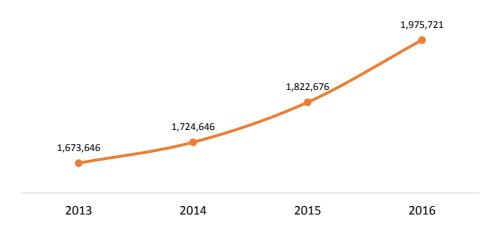
Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2013-2016 (Agustus)

Walaupun pekerja informal jumlahnya lebih banyak dari pekerja formal, namun dalam empat tahun terakhir jumlah dan proporsinya terus menurun. Apabila dilihat menurut status pekerjaan, pekerja informal dengan status berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap mendominasi seluruh pekerja informal di DIY.

Berdasarkan tingkat keaktifannya, proporsi kaum muda berusia 15-29 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan atau tidak dalam pelatihan (*Not in Education, Employment, or Training*/NEET) pada tahun 2016 relatif besar. Jumlahnya sebesar 102.285 orang. Maka pemberian motivasi serta peningkatan pendidikan, pelatihan bagi usia muda masih sangat diperlukan.

Upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan yang menyeluruh perlu dilakukan untuk mendorong kepastian berusaha dan investasi pada pekerja. Termasuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan. Upaya penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan dilakukan dengan mendorong tambahan jumlah pengawas ketenagakerjaan dan peningkatan sarana hubungan industrial.

Melihat rata-rata upah pekerja di DIY, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Penyebabnya peningkatan produktivitas serta naiknya Upah Minimum Kab/Kota (UMK) di DIY. Hal ini diharapkan akan mendorong upaya mewujudkan tenaga kerja yang lebih sejahtera.



Gambar 2.25. Upah Rata Rata pekerja per Bulan Di DIY Tahun 2013-2016

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi DIY dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif, antara lain:

- 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (*skill mismatch* dan *underqualified*);
- Tingginya jumlah pekerja rentan dan informal dengan tingkat produktivitas dan perlindungan yang rendah;
- 3. Transformasi struktural pasar kerja yang mengarah pada sektor dengan produktivitas rendah;
- 4. Efisiensi pasar tenaga kerja yang lemah dalam kerangka daya saing global;
- 5. Kenaikan upah yang tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja;
- 6. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai di tempat kerja;
- 7. Terbatasnya penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda sektor formal;
- 8. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan instansi dalam pencapaian target bersama.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Secara umum, keberadaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendominasi perekonomian Indonesia, termasuk DIY. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi tahun 2016, jumlah usaha mikro dan kecil mencapai mencapai 98,4 persen dari total usaha/perusahaan di DIY. Keberadaan UMK memberikan keuntungan bagi perekonomian daerah. Pada umumnya UMK menggunakan bahan baku lokal dan pemodalan yang tidak ditopang dari pinjaman perbankan. Hal tersebut memberikan dampak pada ketahanan UMK terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah maupun kondisi perekonomian global. Namun demkian, untuk mencapai peningkatan pendapatan diperlukan peningkatan skala usaha. Hal tersebut berimplikasi UMK harus keluar dari zona nyaman dan bersaing dengan kompetitor baik dari wilayah lain atau dari luar negeri. UMK perlu memperbaiki produktivitas serta kualitas produk. Untuk memperbesar skala usaha, diperlukan pemodalan yang cukup sehingga peningkatan akses pembiayaan dari lembaga keuangan diperlukan.

Berdasarakan data dari Dinas Koperasi dan UKM, Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY mengalami pertumbuhan positif rata-rata 5% dalam lima tahun terakhir. Tercatat jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 2.206 unit usaha (4,02%) dari semula 238.619 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 248.217 unit usaha pada tahun 2017. Apabia dinilai dari

aspek jenis usaha, sebaran terbanyak Usaha Kecil Menengah (UKM) berasal dari sektor perdagangan sebesar 28,52% dari total UKM di DIY dengan jumlah usaha sebanyak 70.794 unit usaha, diikuti oleh diikuti oleh sektor Industri Pertanian (27,20%), sektor Industri non Pertanian (22,61%), serta sektor aneka usaha sebesar (21,67%)

Tabel 2.26. Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2013-2017

| No | Jenis Usaha | Tahun | | | | | |
|-----|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| INU | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Aneka Usaha | 44.452 | 47.810 | 49.923 | 51.780 | 54.649 | |
| 2 | Perdagangan | 58.601 | 63.025 | 65.610 | 68.054 | 69.486 | |
| 3 | Industri Pertanian | 55.767 | 59.976 | 62.519 | 64.857 | 64.523 | |
| 4 | Industri Non Pertanian | 46.390 | 49.892 | 51.995 | 53.928 | 59.559 | |
| | Jumlah | 205.210 | 220.703 | 230.047 | 238.619 | 248.217 | |

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2018

Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke DIY merupakan variabel penting bagi Pemda DIY. Diperlukan bentuk pemasaran pariwisata yang dilakukan secara efektif dan efisien, hal itu dilakukan agar minat dari calon wisatawan ataupun wisatawan *repeater* selalu berminat untuk datang ke DIY. Pelaksanaan promosi pariwisata adalah salah satu cara efektif dalam mendatangkan serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke DIY. Selain itu pengembangan destinasi wisata juga menjadi unsur penting untuk menarik kunjungan wisatawan ke DIY. Kunci pengembangan destinasi terletak pada 3A (Atraksi, Aksesbilitas, dan Amenitas).

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati peringkat ketiga dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2016, yaitu sebesar 10,22%. Sementara itu laju pertumbuhan tahun 2016 adalah sebesar 5,51% (data BPS tahun 2016). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan dan banyaknya kegiatan di DIY sepanjang tahun 2016, termasuk kegiatan *Meeting, Incentive, Conference, Exhibition* (MICE).

2018

Tabel 2.27. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2013-2017

| Tohun | Ju | mlah | JumlahWisatawan |
|-------|---------|-----------|-------------------------|
| Tahun | Wisman | Wisnus | (Wisman+Wisnus) (Orang) |
| 2013 | 235.888 | 2.602.074 | 2.837.962 |
| 2014 | 254.213 | 3.091.967 | 3.346.180 |
| 2015 | 308.485 | 3.813.720 | 4.122.205 |
| 2016 | 355.313 | 4.194.261 | 4.549.574 |
| 2017 | 397.951 | 4.831.387 | 5.229.298 |

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2018

Pada tahun 2017, peningkatan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi sebanyak 679.724 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 211.68 (tahun 2016 sebesar 321.103 orang).

Destinasi wisata DIY masih diminati oleh wisawatan nusantara. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang meningkay setiap tahunnya dengan cukup signifikan. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 4.194.261 orang, sedangkan pada tahun 2017 kunjungan wisatawan nusantara bertambah sebanyak 637.086 orang (naik 15.2%), sehingga pada tahun 2017 jumlah wisatawan nusantara telah mencapai 4.831.347 orang dan telah melebihi target indikator kinerja tahun 2017.

Faktor pendukung dalam pencapaian target inidikator jumlah wisatawan nusantara adalah makin beragamnya destinasi wisata baru yang ada di DIY. Termasuk wisata yang booming melalui media sosial dan semakin bervariasinya atraksi wisata. Wisatawan nusantara memiliki kecenderungan datang ke DIY dengan tujuan berlibur. Untuk merespon hal tersebut, Pemda DIY bersama dengan stakeholder pariwisata berupaya untuk menyelenggarakan atraksi-atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan. Semakin banyak event yang dilakukan oleh para pelaku wisata di DIY, akan semakin banyak menarik wisatawan nusantara yang berencana unutk berlibur. Atraksi wisata dapat dilakukan dengan menyelenggarakan event-event kepariwisataan dan juga dengan cara membangun destinasi wisata baru. Kedua hal tersebut juga dilaksanakan oleh Pemda DIY dengan dukungan yang besar dari stakeholder pariwisata serta dari masyarakat DIY.

I. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan. Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian DIY yaitu mencapai 13,12% dari total PDRB DIY. Kontribusi tersebut ditopang baik oleh skala industri besar, sedang maupun industri kecil. Dari sisi jenis usaha, kontribusi terbesar ditopang oleh kontribusi golongan industri pengolahan makanan dan minuman dan diikuti oleh industri tekstil dan pakaian jadi. Dari sisi nilai tambahnya, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Walapun harus diakui pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan mengalami fluktuasi yaitu sempat mengalami penurunan pada kurun waktu 2014-2015 kemudian meningkat kembali pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel 2.28. Nilai PDRB DIY ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013-2017 (juta rupiah)

| No. | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Nilai PDRB Industri Pengolahan | 10.084.213 | 10.469.749 | 10.693.036 | 11.234.804 | 11.879.550 |
| 2 | Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | 6,87 | 3,82 | 2,13 | 5,07 | 5,74 |

Sumber: BPS DIY, 2018

Tabel 2.29. Distribusi Persentase PDRB DIY ADHB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013-2017

| No. | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Industri Pengolahan | 13,62 | 13,59 | 13,11 | 13,21 | 13,12 |

Sumber: BPS DIY, 2018

Pertumbuhan industri didorong untuk menjadi lebih inklusif dengan cara memberdayakan pelaku industri kecil serta tenaga kerja setempat. Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di DIY dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah IKM di

DIY mengalami pertumbuhan sebesar 308 unit usaha (0,34%) jika dibandingkan tahun 2016. IKM di DIY pada umumnya berkelompok pada suatu wilayah dan membentuk sentra. Geliat kegiatan industri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat terutama dalam aspek budaya. Produk IKM, terutama kerajinan, banyak yang merupakan produk budaya seperti gerabah, batik, wayang dan sebagainya. Pengembangan industri di DIY masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya daya saing produk IKM belum optimal, ketersediaan bahan baku, belum optimalnya kualitas produk, keterbatasan kemampuan teknologi IKM, serta keterbatasan dukungan infrastruktur dan sistem logistik.

Tenaga kerja sektor industri di DIY mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Proporsi tenaga kerja sektor industri pada tahun 2013 terhadap total penduduk bekerja hanya 13,45%. Jumlah tersebut meningka menjadi 15,83% pada tahun 2017. Peningkatan tenaga kerja tersebut terjadi baik untuk pekerja laki-laki maupun perempuan. Bahkan pada tahun 2017, proporsi keterlibatan perempuan dalam sektor industri semakin lebih baik. Pada tahun 2013, proporsi perempuan dalam tenaga kerja sektor industri baru mencapai 47%. Pada tahun 2017, proporsi perempuan dalam tenaga kerja sektor industri sudah hampir mencapai angka 50%.

Tabel 2.30. Penduduk Bekerja Menurut Pada Sektor Industrri di DIY 2013 - 2017

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah Penduduk Bekerja pada Sektor Industri | 253.720 | 273.329 | 276.386 | 262.108 | 325.061 |
| Total Penduduk Bekerja | 1.886.071 | 1.721.976 | 1.891.218 | 2.042.400 | 2.053.168 |

Sumber: Sakernas Agustus Th.2031- 2017, BPS , diolah Pusdatinaker

J. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

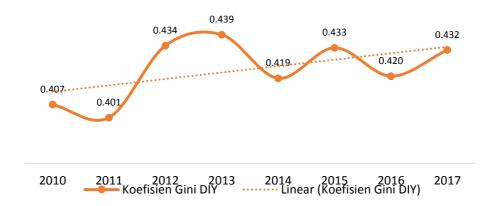
Dalam mendukung pencapaian TPB tujuan 10, yaitu mengurangi kesenjangan, maka target yang ditetapkan, yaitu: (1) Pada tahun 2030 secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional; dan (2) Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan

hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

Sebagai pedoman pencapaian target tersebut ditetapkan beberapa indikator, yaitu: (1) Koefisien Gini; (2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; (3) Desa mandiri berbudaya; (4) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); dan (5) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. Kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB tujuan ini diuraikan menurut indikator capaian target berikut:

1. Koefisien Gini

Ketimpangan pendapatan DIY saat ini menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan daerah karena meskipun termasuk dalam kategori ketimpangan moderat, perkembangan ketimpangan DIY cenderung meningkat. Selain itu, ketimpangan DIY yang diindikasikan oleh koefisien gini berada di atas rata-rata nasional dan tertinggi di Indonesia pada tahun 2016 dan 2017. Koefisien gini DIY tahun 2016 tercatat sebesar 0,420 meningkat menjadi 0,432 tahun 2017.



Gambar 2.26. Perkembangan Koefisien Gini DIY, 2010-2017 (Maret)

Sumber: BPS

Menurut kabupaten/kota di DIY, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman cenderung memiliki Koefisien Gini yang lebih tinggi dibandingkan 3 kabupaten lainnya. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh struktur perekonomian masing-masing kabupaten/kota. Perekonomian Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman cenderung didominasi oleh sektor industri, sedangkan perekonomian Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul didominasi oleh sektor pertanian. Ketimpangan di wilayah yang didominasi sektor pertanian cenderung lebih kecil dibandingkan ketimpangan di wilayah industri karena penghasilan di wilayah pertanian cenderung rendah. Tingkat penghasilan yang cenderung rendah di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul sejalan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di 3 kabupaten tersebut.

Tantangan yang dihadapi untuk mengurangi ketimpangan adalah meningkatkan produktifitas sektor pertanian untuk mendorong peningkatan pendapatan penduduk di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul serta menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha di sektor yang potensial untuk berkembang di tiga kabupaten tersebut sebagai alternatif matapencaharian yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping itu, tantangan lain adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk berpenghasilan rendah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Penurunan persentase penduduk miskin merupakan indikator berikutnya dalam pencapaian target tujuan 10 pembangunan berkelajutan. Jika dilihat dari perkembangannya, tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan. Selama 5 tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 68,85 ribu orang miskin dari 535,18 ribu orang tahun 2013 menjadi 466,33 ribu orang tahun 2017 atau tingkat kemiskinan turun 2,67% dari 15,03% tahun 2013 menjadi 12,36% tahun 2017. Namun demikian, kemiskinan masih menjadi prioritas dalam pembangunan DIY karena tingkat kemiskinan masih berada di atas rata-rata nasional dan berada pada peringkat ke-23 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2017. Selain itu, dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa dan Bali, tingkat kemiskinan DIY

adalah yang paling tinggi. Hal ini diantaranya disebabkan kurangnya infrastruktur yang terbangun di wilayah DIY yang menyebabkan minat investor untuk menanamkan modal masih rendah. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat juga masih terkonsentrasi pada area perkotaan yang menyebabkan ketimpangan investasi antar kabupaten/kota di DIY.



Gambar 2.27. Perkembangan Jumlah Orang Miskin dan Tingkat Kemiskinan DIY, 2013-2017 (September)

Sumber: BPS

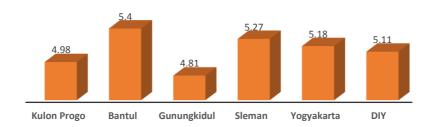
Menurut kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo diikuti Kabupaten Gunungkidul dan Bantul. Sementara itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta cenderung rendah. Penurunan tingkat kemiskinan terutama di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul merupakan salah satu tantangan yang dihadapi untuk mengurangi ketimpangan di DIY.

Tabel 2.31. Tingkat Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013-2017

| Kabupaten/Kota | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kulon Progo | 21.39 | 20.64 | 21.40 | 20.3 | 20.03 |
| Bantul | 16.48 | 15.89 | 16.33 | 14.55 | 14.07 |
| Gunungkidul | 21.7 | 20.83 | 21.73 | 19.34 | 18.65 |
| Sleman | 9.68 | 9.5 | 9.46 | 8.21 | 8.13 |
| Yogyakarta | 8.82 | 8.67 | 8.75 | 7.70 | 7.64 |

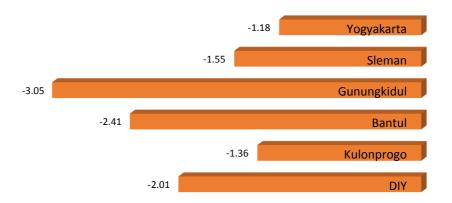
Sumber: BPS, per Maret

Jika dilihat dari karakteristik kemiskinan di wilayah kabupaten/kota, selama tahun 2013-2017 Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan provinsi, tetapi pengurangan kemiskinannya di bawah penurunan kemiskinan provinsi. Kabupaten Gunungkidul dan Bantul rata-rata pertumbuhannya di bawah rata-rata provinsi tetapi penurunan kemiskinan berada di atas penurunan provinsi. Tantangan yang dihadapi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta adalah mendorong pengembangan kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan tantangan yang dihadapi di kabupaten Gunungkidul dan Bantul adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang potensial untuk berkembang. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo membutuhkan perhatian khusus karena baik ratarata pertumbuhan ekonomi maupun penurunan kemiskinannya masih di bawah rata-rata provinsi.



Gambar 2.28. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 2013-2017 menurut Kabupaten/Kota di DIY

Sumber: BPS, diolah



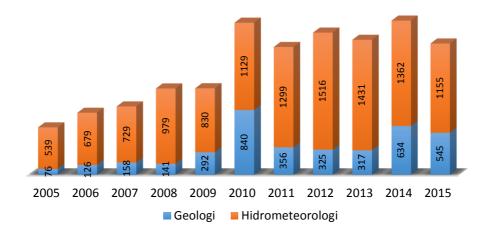
Gambar 2.29. Penurunan Kemiskinan 2013-2017 menurut Kabupaten/Kota di DIY

Sumber: BPS, diolah

K. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Salah satu TPB adalah mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial, mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana. Fokusnya adalah melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Tujuan lainnya meningkatkan jumlah kota dan permukiman yang mengimplementasi kebijakan dan perencanaan terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi. Hal ini harus adaptif terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini. Pencapaian ini sesuai dengan *The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.

Meningkatkan Ketahanan Daerah menghadapi bencana. Sebanyak 301 desa/kelurahan dari 438 desa/kelurahan di DIY berada di kawasan rawan bencana. Maraknya pembangunan, yang didominasi berbagai bentuk bangunan/gedung, harus mempertimbangan keberlanjutan lingkungan hidup maupun manfaat pembangunan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu kawasan biasanya diikuti dengan tingginya risiko bencana, Sebab semakin banyak nilai aset yang ada di kawasan pertumbuhan tersebut dan peningkatan jumlah penduduk.



Gambar 2.30. Grafik Jumlah Kejadian Bencana 2005-2015 Sumber: BNPB, Buku RBI, 2016.

Dalam kurun waktu 2005-2015, terlihat tren peningkatan jumlah kejadian bencana alam di DIY. Terutama kejadian bencana yang sebagian merupakan dampak perubahan iklim. Sebut saja banjir, longsor, gelombang pasang, abrasi, dan angin kencang. Dalam rangka menurunkan indeks risiko bencana, BPBD DIY menjalankan melakukan dua strategi: pembuatan kebijakan dan program pembangunan yang relevan. Strategi pembuatan kebijakan, antara lain: (1) Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana; (2) Perda No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda 8/2010 tentang Penanggulangan Bencana; (3) Pergub No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana di DIY; (4) Pergub No. 11 Tahun 2016 tetang Pedoman Penyelenggaraan Pencarian, Pertolongan dan Upaya Penyelamatan Sektor Kesehatan pada Situasi Bencana; (5) Pergub No. 72 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana PB Pada Saat Tidak Terjadi Bencana; (6) Pergub No. 71 Tahun 2014 tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis; (7) Pergub No. 70 Tahun 2014 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam PB; (8) Pergub No. 67 Tahun 2014 tentang Pola Koordinasi BPBD DIY dalam Penyelenggaraan PB; (9) Pergub No. 81 Tahun 2013 tentang Rencana PB Daerah tahun 2013-2017; (10) Pergub No. 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana; (11) Pergub No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana; (12) Pergub No. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Status Potensi

Bencana; (13) Pergub No. 49 Tahun 2011 tentang SOP PB; (14) Pergub No. 56 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPBD DIY; (15) Penyusunan RAD PRB DIY setiap 3 (tiga) tahun sekali; (16) Penyusunan RPB DIY; dan (17) Penyusunan Rencana Kontijensi. Strategi program pembangunan yang relevan, yaitu: (1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; (2) Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana; (3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Tantangan mewujudkan pembangunan DIY yang tanggap dan tangguh menghadapi bencana dan perubahan iklim, antara lain: (1) pengarusutamaan PRB sehingga menjadi prioritas pembangunan daerah dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanannya; (2) ketersediaan berbagai kajian risiko bencana dan peta risiko bencana berdasarkan data bahaya dan kerentanan daerah; (3) belum memadai dan terintegrasinya basis data dan sistem informasi mengenai kerawanan dan kerentanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim; dan (4) masih lemahnya koordinasi dari berbagai para pemangku kepentingan untuk melindungi warga DIY dari ancaman bencana.



Gambar 2.31. Infografis Data Bencana DIY 2017

Kawasan kumuh masih ditemui di DIY. Oleh sebab itu, kawasan kumuh di DIY ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tersebut, luasan kawasan kumuh di DIY seluas 966,65 ha.

Tabel 2.32. Luas Kawasan Kumuh DIY

| KABUPATEN | LUASAN KAWASAN KUMUH (ha) | Dasar Hukum |
|--------------------|---------------------------------|--|
| GUNUNGKIDUL | 164,91 | Keputusan Bupati Gunungkidul No. 132/KPTS/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomo. 287/KPTS/2014 tentang Kawasan Permukiman Kumuh dan Tahapan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019 |
| KULON PROGO | 293,79 | SK Bupati Kulon Progo No. 224/A/2016 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019 |
| SLEMAN | 163,47 | SK Bupati Sleman Nomor 14.31/Kep.KDH/A/2016 tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan |
| BANTUL | 79,58 | SK Bupati Bantul Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul |
| KOTA YOGYAKARTA | 264,90 | SK Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta |
| DIY | 966,65 | |

Sumber: SK Bupati/Walikota

Pembagian wewenang penanganan kawasan permukiman kumuh mengacu pada UU No 23 Tahun 2014, pembagian wewenangnya adalah sebagai berikut :

- 1. Pemerintah pusat menangani kawasan kumuh dengan luasan lebih dari 15ha;
- 2. Pemda provinsi menangani kawasan kumuh dengan luasan 10-15ha; dan
- 3. Pemda kabupaten/kota menangani kawasan kumuh dengan luasan kurang dari 10ha.

Tabel 2.33. Penanganan Kawasan Kumuh 2017

| | Luce - | Penar | Sisa Kawasan | | | |
|------------|------------------|--------|--------------|--------|-----------|---------------|
| Kewenangan | Luas – (ha) – | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Kumuh diakhir |
| | (IIa) – | ha | ha | | % | 2017 (ha) |
| Pusat | 682,02 | 260,23 | 371,49 | 26,95 | 38,48 | 310,53 |
| Provinsi | 110,39 | 12,91 | 31,97 | 1,34 | 3,31 | 78,42 |
| Kabupaten | 173,1 | 0 | 65,82 | 0 | 6,82 | 107,28 |
| DIY | 965,51 | 273,14 | 469,28 | 28,29 | 48,61 | 496,23 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2018.

Pada tahun 2017, penanganan kawasan kumuh yang tercantum sebagai baseline adalah 273,14 ha atau setara dengan 28,29%. Penanganan tersebut terdiri atas 12,91 ha penanganan provinsi dan 260,23 ha penanganan pusat. Penanganan yang telah dilaksanakan sebesar 469,28 ha atau setara dengan 48,60%. Penanganan yang dilakukan selain melalui Pemda, juga dilakukan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) dan Bantuan Dana Investasi (BDI) Program Kotaku.

Tabel 2.34. Rencana Penanganan Kumuh 2018

| Valuananaan | Luas Kumuh | | Rencana Po Kws Kum | Sisa Kawasan Kumuh diakhir | | |
|-------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| Kewenangan | nangan diakhir | | Realisasi | Target | Realisasi | - 2018 (ha) |
| | 2017 (ha) | ha | | | % | 2010 (IIa) |
| Pusat | 310,53 | 39,09 | 39,09 | 4,05 | 4,05 | 271,44 |
| Provinsi | 78,42 | 72,04 | 72,04 | 7,46 | 7,46 | 6,38 |
| Kabupaten | 107,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,28 |
| DIY | 496,23 | 111,13 | 111,13 | 11,51 | 11,51 | 385,1 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2018.

Target kawasan kumuh yang ditangani pada tahun 2018 sebesar 111,13 ha yang setara dengan 11,51%. Penanganan ini terdiri dari 72,04 ha di kawasan kewenangan provinsi dan 39,09 ha di kawasan kewenangan pusat. Untuk penanganan di kawasan kewenangan provinsi, target tersebut diproyeksikan tercapai di akhir 2018 seiring dengan penanganan yang sedang dilakukan oleh DPUP ESDM DIY. Target penanganan pada kawasan kewenangan pusat melalui APBN diproyeksikan akan terlampaui di akhir 2018 mengingat penuntasan kawasan kumuh pada tahun 2019 merupakan salah satu target dalam gerakan 100-0-100.



Kondisi 0 % Kondisi 100 %

Gambar 2.32. Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Permukiman di Kawasan Kumuh melalui APBD Provinsi 2017

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM, 2017.

Secara akumulatif, diakhir tahun 2017, penanganan kawasan kumuh yang telah dilakukan sebesar 469,28 ha. Apabila target 2018 terealisasikan seluruhnya maka diakhir tahun 2018 penanganan yang telah dilaksanakan mencapai 580,41 ha (setara dengan 60,11%). Sisa penanganan kawasan kumuh untuk 2019-2022 mencapai 385,10 ha atau 39,89% dari kawasan kumuh keseluruhan.

Rumah Tidak Layak Huni. Pada tahun 2017, DPUP ESDM DIY beserta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota, melakukan pendataan sekaligus penyepakatan mengenai data rumah tidak layak huni yang akan digunakan sebagai baseline penanganan. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di DIY pada akhir 2016 berjumlah 65.578 unit, dengan proporsi terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2.35. Data Rumah Tidak Layak Huni 2016

| Kabupaten | Kecamatan | RTLH (unit) |
|-------------|-----------|-------------|
| Gunungkidul | Wonosari | 2002 |
| Gunungkidul | Nglipar | 1708 |
| Gunungkidul | Playen | 3062 |
| Gunungkidul | Patuk | 896 |
| Gunungkidul | Paliyan | 1410 |
| Gunungkidul | Panggang | 530 |
| Gunungkidul | Tepus | 1170 |

| Kabupaten | Kecamatan | RTLH (unit) |
|-------------|-------------|-------------|
| Gunungkidul | Semanu | 1005 |
| Gunungkidul | Karangmojo | 1956 |
| Gunungkidul | Ponjong | 1871 |
| Gunungkidul | Rongkop | 1359 |
| Gunungkidul | Semin | 1709 |
| Gunungkidul | Ngawen | 1614 |
| Gunungkidul | Gedangsari | 2219 |
| Gunungkidul | Saptosari | 1108 |
| Gunungkidul | Girisubo | 1264 |
| Gunungkidul | Tanjungsari | 602 |
| Gunungkidul | Purwosari | 355 |
| Kabupaten | Gunungkidul | 25.840 |
| Sleman | Gamping | 340 |
| Sleman | Godean | 778 |
| Sleman | Moyudan | 617 |
| Sleman | Minggir | 1570 |
| Sleman | Seyegan | 1004 |
| Sleman | Mlati | 1088 |
| Sleman | Depok | 684 |
| Sleman | Berbah | 514 |
| Sleman | Prambanan | 528 |
| Sleman | Kalasan | 1015 |
| Sleman | Ngemplak | 218 |
| Sleman | Ngaglik | 1783 |
| Sleman | Sleman | 1821 |
| Sleman | Tempel | 2449 |
| Sleman | Turi | 996 |
| Sleman | Pakem | 669 |
| Sleman | Cangkringan | 273 |
| | en Sleman | 16.347 |
| Kulon Progo | Temon | 468 |
| Kulon Progo | Wates | 656 |
| Kulon Progo | Panjatan | 879 |
| Kulon Progo | Galur | 501 |
| Kulon Progo | Lendah | 1162 |
| Kulon Progo | Sentolo | 1923 |
| Kulon Progo | Pengasih | 1741 |
| Kulon Progo | Kokap | 2748 |
| Kulon Progo | Girimulyo | 1468 |
| Kulon Progo | Nanggulan | 848 |
| Kulon Progo | Samigaluh | 1513 |
| Kulon Progo | Kalibawang | 984 |
| <u> </u> | Kulon Progo | 14.891 |
| Bantul | Srandakan | 222 |
| | | |

| Kabupaten | Kecamatan | RTLH (unit) | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|--|
| Bantul | Sanden | 233 | |
| Bantul | Kretek | 81 | |
| Bantul | Pundong | 146 | |
| Bantul | Bambanglipuro | 122 | |
| Bantul | Pandak | 230 | |
| Bantul | Pajangan | 578 | |
| Bantul | Bantul | 83 | |
| Bantul | Jetis | 277 | |
| Bantul | Imogiri | 1484 | |
| Bantul | Dlingo | 717 | |
| Bantul | Banguntapan | 213 | |
| Bantul | Pleret | 254 | |
| Bantul | Piyungan | 354 | |
| Bantul | Sewon | 151 | |
| Bantul | Kasihan | 261 | |
| Bantul | Sedayu | 297 | |
| Kabupat | en Bantul | 5.703 | |
| Kota Yogyakarta | Tegalrejo | 438 | |
| Kota Yogyakarta | Jetis | 184 | |
| Kota Yogyakarta | Gondokusuman | 97 | |
| Kota Yogyakarta | Danurejan | 302 | |
| Kota Yogyakarta | Gedongtengen | 34 | |
| Kota Yogyakarta | Ngampilan | 62 | |
| Kota Yogyakarta | Wirobrajan | 128 | |
| Kota Yogyakarta | Mantrijeron | 167 | |
| Kota Yogyakarta | Kraton | 199 | |
| Kota Yogyakarta | Gondomanan | 18 | |
| Kota Yogyakarta | Pakualaman | 136 | |
| Kota Yogyakarta | Mergangsan | 580 | |
| Kota Yogyakarta | Umbulharjo | 237 | |
| Kota Yogyakarta | Kotagede | 215 | |
| Kota Yo | Kota Yogyakarta | | |
| Cumber - Dings Delsariaan Umum De | IY | 65.578 | |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2017

Penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemda dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat pun memiliki andil dalam mengatasi permasalahan ini. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan penanganan RTLH melalui beberapa skema pembiayaan yakni APBN, APBD Kab/Kota dan CSR.

Tabel 2.36. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2017

| Kabupaten / | Database _ | | Penanganan RTLH 2017 Total Penanganan | | | Sisa RTLH diakhir | | |
|--------------------|------------|------|---------------------------------------|------|------------------|-------------------------|------|---------------|
| Kota | | DAK | BSPS | вкк | APBD Kab/Kota | CSR | 2017 | tahun 2017 |
| Kota Yogyakarta | 2797 | 0 | 92 | 110 | 15 | 10 | 227 | 2570 |
| Kulon Progo | 14891 | 564 | 406 | 457 | 474 | 82 | 1983 | 12908 |
| Bantul | 5703 | 622 | 289 | 76 | 557 | 0 | 1544 | 4159 |
| Sleman | 16347 | 529 | 381 | 546 | 256 | 143 | 1855 | 14492 |
| Gunungkidul | 25840 | 0 | 398 | 521 | 0 | 0 | 919 | 24921 |
| DIY | 65578 | 1715 | 1566 | 1710 | 1302 | 235 | 6528 | 59050 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2018.

Berdasarkan data di atas, jumlah RTLH pada tahun 2017 telah berkurang 6528 unit menjadi 59.050 unit. Penanganan yang dilakukan ini setara dengan 9,95%. Penanganan berdiri dari 1715 unit DAK, 1566 unit BSPS, 1710 unit BKK, 1302 APBD Kab/Kota dan 235 unit melalui dukungan CSR.

Tabel 2.37. Rencana Penanganan RTLH 2018

| Rencana Penanganan RTLH 2018 | | | | | | Total | Sisa RTLH |
|------------------------------|------|------|--------------|----------------------|-----|-------------------------------|-----------------------|
| Kabupaten / Kota | DAK | BSPS | APBD Prov | APBD Kab/ Kota | CSR | Rencana Penanganan 2018 | diakhir tahun 2018 |
| Kota Yogyakarta | 207 | 179 | 203 | 20 | 5 | 614 | 1956 |
| Kulon Progo | 271 | 418 | 534 | 526 | 39 | 1788 | 11120 |
| Bantul | 172 | 592 | 528 | 200 | 0 | 1492 | 2667 |
| Sleman | 439 | 420 | 257 | 300 | 0 | 1416 | 13076 |
| Gunungkidul | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 23971 |
| DIY | 1089 | 1609 | 2472 | 1046 | 44 | 6260 | 52790 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2018.

Target penanganan RTLH pada tahun 2018 adalah 7,62% atau setara dengan ± 5000 unit. Adapun rencana penanganan RTLH pada tahun 2018 sebesar 6260 unit. Penanganan tersebut berasal dari BSPS, DAK, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota dan CSR. Penanganan yang direncanakan pada tahun 2018 ini setara dengan 9,55%.



Kondisi 0% Kondisi 100%

Gambar 2.33. Penerima Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui skema BSPS 2017 di Kabupaten Sleman

Sumber: SNVT Penyediaan Perumahan DIY, 2017.

Secara akumulatif, diakhir tahun 2018 total penanganan RTLH yang telah dilakukan sejak 2017 berjumlah 12.788 unit atau setara dengan 19,15%. Jumlah RTLH diakhir 2018 diproyeksikan turun menjadi 52.790 unit. Pada tahun 2019 target penanganan rumah tidak layak huni adalah sebesar 14,13% yang setara dengan 9266 unit. Sampai dengan tahun 2022, target penanganan rumah tidak layak huni setiap tahunnya berjumlah ± 7000 unit yang setara dengan 10,68% per tahun. Dengan target kinerja tersebut diharapkan pada akhir 2022 total penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan adalah sebesar 53,78% atau setara dengan 35.268 unit.

Kawasan Cagar Budaya dan Warisan Budaya. DIY diperkaya dengan kawasan-kawasan cagar budaya. Kawasan-kawasan tersebut mendukung pembangunan sosial budaya dan keberadaannya berpacu dengan dinamika kota. Pengembangan kawasan cagar budaya tidak lepas dari pengembangan perkotaan DIY secara keseluruhan. Benturan kepentingan, yang sering terjadi antar pihak-pihak terkait, dapat berakibat dalam proses pelestariannya.

Persebaran kawasan cagar budaya di wilayah DIY mencakup tiga kawasan di Bantul (Imogiri, Pleret, Parangtritis), satu kawasan di Gunungkidul (Sokoliman), tiga kawasan di Sleman (Prambanan, Ratu Boko, Ambarketawang), dan di kawasan di Kota (Kotagede, Kotabaru, Kraton, Puro Pakualaman, dan Maliboro). Berdasarkan SK Gubernur DIY Nomor 186/Kep/2011, terdapat 6 kawasan yang menjadi kewenangan provinsi yaitu Kraton, Puro Pakualaman, Imogiri, Kotabaru, Kotagede, dan Malioboro. Sumbu filosofi (Panggung Krapyak-Kraton-Tugu) telah masuk dalam tentatif list warisan budaya dunia UNESCO.

L. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan. Penetapan IKLHD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi DIY berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan. Informasi tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban pencapaian target program-program pemprov di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka menunjang ketahanan air dan pangan, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 adalah "menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berada pada kisaran 66,5-68,6. Pada saat ini kondisi kualitas air sungai di DIY menurun karena pencemaran limbah domestik yang mengakibatkan parameter BOD, fecal coli, dan total coliform melebihi baku Selain itu penurunan kualitas air sungai dan danau disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang berdampak pada ketersediaan air.

- Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform;
- 2. Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO₂ dan NO₂;
- 3. Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Tabel 2.38. Kriteria dan Indikator IKLH

| No. | Indikator | Parameter | Bobot |
|-----|------------------------|---|-------|
| 1 | Kualitas Air | TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform | 30% |
| 2 | Kualitas Udara | SO2 dan NO2 | 30% |
| 3 | Kualitas Tutupan Lahan | Luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi | 40% |

Rumus yang digunakan untuk menghitung IKLH provinsi adalah:

Keterangan: IKLH Provinsi = indeks kualitas lingkungan tingkat provinsi

IKA = indeks kualitas air
IKU = indeks kualitas udara

IKTL = indeks kualitas tutupan lahan

Tabel 2.39. Target IKLH DIY tahun 2018-2022

| Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IKLH | 55,80 | 56,65 | 58,58 | 60,51 | 62,44 | 64,18 | 66,15 |
| IKU | 86,39 | 86,39 | 87,06 | 87,73 | 88,40 | 89,07 | 89,74 |
| IKA | 29,17 | 32,00 | 34,20 | 36,40 | 38,60 | 40,80 | 42,50 |
| ITTL | 52,84 | 52,84 | 55,50 | 58,18 | 60,86 | 63,05 | 66,20 |

Indeks Kualitas Air (IKA). Di DIY sungai-sungai yang dipantau kualitas airnya adalah Sungai Opak, Oyo, Code, Winongo dan Sungai Progo. Data hasil pemantauan kualitas air sungai tersebut dipergunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Air (IKA) DIY. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PI_{j} = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_{i}}{L_{ij}}\right)_{M}^{2} + \left(\frac{C_{i}}{L_{ij}}\right)_{R}^{2}}{2}}$$

PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Nilai PIj > 1 artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001.

Indeks Kualitas Udara (IKU). Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O₃) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Penyusunan dan penghitungan indeks kualitas udara ditujukan:

- sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara; dan
- 2. sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.

Penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO2 dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Parameter NO₂ dan SO₂, diukur pada empat lokasi pada setiap

kabupaten/kota dengan menggunakan metode *passive sampler*. Lokasi tersebut mewakili area transportasi, industri, perumahan dan komersial atau perkantoran/perdagangan.

Indeks Kualitas Udara (IKU) didapatkan melalui persamaan sebagai berikut:

IKU =
$$100 - \left(\frac{50}{0.9} \times (I_{EU} - 0.1)\right)$$

Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar. Sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100 persen. Tabel berikut ini menyajikan lokasi pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler di 5 (lima) Kabupaten/Kota di DIY.

Tabel 2.40. Lokasi Pengukuran Kualitas Udara

| No | Kabupaten/Kota | Peruntukan | Lokasi Pemantauan | | |
|----|------------------------|------------------------|---|--|--|
| 1 | KULON PROGO (3401) | Transportasi | Kantor Cabang BRI Wates, Jl. Wates Purworejo Karangnongko Wates | | |
| | | Industri/Agro Industri | Sekitar Industri PT Aneka Sinendo, Banguncipto Sentolo | | |
| | | Pemukiman | Rumah Bapak Sudarmadi, ST, Kasatriyan Giripeni Wates | | |
| | | Perkantoran/Komersial | KLH Kabupaten Kulon Progo, Jl. Sugiman Watulunyu Wates | | |
| 2 | BANTUL (3402) | Transportasi | Balai Pengujian Kendaraan Dishub Bantul ,Jl. Parangtritis Bantul | | |
| | | Industri/Agro Industri | PT Samitex, Jl. Krapyak Sewon | | |
| | | Pemukiman | Perum Sewon Residence | | |
| | | Perkantoran/Komersial | Bank BPD Bantul, Jl. Bantul. | | |
| 3 | GUNUNG KIDUL (3403) | Transportasi | Depan Kapedal Wonosari, Jalan Wonosari- Yogyakarta km. 3 | | |
| | | Industri/Agro Industri | Depan BPP Semanu, Jl. Wonosari- Semanu Mijahan | | |
| | | Pemukiman | Depan Pendopo Sewoko Projo Kabupaten Gunungkidul | | |
| | | Perkantoran/Komersial | Rumah Bapak Eko Suharso, Desa Madusari Wonosari | | |
| 4 | SLEMAN | Transportasi | Terminal Condongcatur | | |
| | (3404) | Industri/Agro Industri | PT Westa Pusaka | | |

| No | Kabupaten/Kota | Peruntukan | Lokasi Pemantauan | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| | | Pemukiman | Perumahan Sleman Permai I | | | | |
| | | Perkantoran/Komersial | Dishubkominfo Sleman | | | | |
| 5 | 5 KOTA Yogyakarta (3471) | Transportasi | Halaman Kantor Kelurahan | | | | |
| | | | Giwangan | | | | |
| | | Industri/Agro Industri | Halaman Kantor Kelurahan | | | | |
| | | | Sorosutan | | | | |
| | | Pemukiman | Halaman UPT Malioboro | | | | |
| | | Perkantoran/Komersial | Halaman Kantor Kelurahan Baciro | | | | |

M. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk menurunkan indeks risiko bencana khususnya pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi. Dalam komitmen global (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengurangan risiko bencana diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sektor yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan membangun kesiapsiagaan. Hingga akhir tahun 2016, jumlah kejadian bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim masih terus meningkat. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana dari BNPB, terdapat 322 Kabupaten/Kota yang masih berada pada kelas risiko tinggi dan 174 Kabupaten/Kota pada kelas risiko bencana sedang. Hal ini masih menunjukkan bahwa ke depan, upaya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana khususnya di daerah masih terus diperlukan.

Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta dampak perubahan iklim, BPBD DIY menjalankan melakukan dua strategi yaitu adaptasi dan mitigasi baik struktural maupun non-struktural melalui program pembangunan yang relevan. Strategi program pembangunan yang relevan, yaitu: (1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; (2) Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana; (3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mitigasi struktural dan non-struktural, antara lain: (1) meningkatkan kapasitas daerah sehingga dapat menurunkan jumlah korban terkena dampak bencana; (2) meningkatkan koordinasi lintas sektoral bukan hanya saat kondisi tanggap darurat tapi terutama dalam upaya pengurangan risiko bencana; (3) memperkuat kelembagaan dan regulasi terkait PRB dampak perubahan iklim sebagai tindak lanjut dari beberapa regulasi antara lain: Indonesia Adaptation Strategy (Bappenas, 2011), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia (DNPI, 2011), dan *Indonesia Climate Change Sectoral Road Map* (Bappenas, 2010), Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007), serta Dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), yang disahkan pada Februari 2014 sebagai alat harmonisasi dan operasionalisasi berbagai dokumen kebijakan adaptasi yang sudah ada.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari potensi risiko atau bahaya yang ditimbulkan dari perubahan iklim, Indonesia secara serius dan konsisten terus menjalankan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan melaksanakan program aksi adaptasi perubahan iklim, yang sejalan dengan TPB (TPB/SDGs). Pengarusutamaan penanganan perubahan iklim sebagai agenda pembangunan nasional lintas bidang terus dilakukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam jangka menengah (RPJMN 2015-2019) dan perenacaan pembangunan tahunan (RKP). Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam melaksanakan komitmen global dalam penanganan perubahan iklim. Secara reguler, dokumen bukti kontribusi terhadap penanganan perubahan iklim disampaikan ke UNFCCC, baik dalam bentuk *National Communication* maupun *Biennial Update Report* (BUR).

Untuk mewujudkan target penurunan emisi gas rumah kaca, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). RAN-GRK memiliki kerangka kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam penurunan emisi GRK sebesar 26% (skenario fair/menggunakan kemampuan sendiri) dan sebesar 41% (skenario ambisius/jika mendapat dukungan internasional) pada bidang berbasis lahan, energi dan pengelolaan limbah dalam kurun waktu 2010-2020. Perpres tersebut

mengamanatkan Pemda wajib untuk menyusun RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Komitmen tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 29% (skenario *fair*) dan 41% (skenario ambisius) untuk tahun 2030.

N. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Penyusunan Tata Ruang Laut. Indonesia sudah memiliki landasan pengelolaan sumberdaya kelautan melalui UU No. 32/2014 tentang Kelautan dan UU No. 27/2007 jo. UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan tersebut mengamanatkan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Maksud RZWP3K adalah mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan terintegrasi melalui: (i) peningkatan perlindungan terhadap lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; (ii) perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya maritim, masyarakat adat, dan nelayan tradisional; (iii) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan kemaritiman, serta (iv) memberi kepastian hukum untuk mendorong investasi.

Melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan ruang laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang mencakup hingga 12 mil dari garis pantai diukur dari pasang tertinggi. Pada akhir 2017, Pemda DIY telah menyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah terkait RZWP3K dan ditargetkan pada Tahun 2018 disahkan di DPRD menjadi Perda RZWP3K DIY Tahun 2018-2038. Seiring dengan proses penetapan Perda tersebut, Pemda DIY sedang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZWP3K pada tahun 2018.

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Laut Berkelanjutan. Untuk mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, Indonesia telah membagi manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2014. Untuk membentuk kelembagaan WPP sebagai platform kawasan pengelolaan usaha perikanan yang mandiri, diperlukan struktur dan mekanisme tata kelola yang tepat, efektif dan efisien untuk mewujudkan

pengelolaan perikanan yang baik (*good fisheries management*). DIY termasuk dalam WPP RI 573 yang termasuk selatan pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat.



Gambar 3.4. Peta Potensi Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Penangkapan Ikan Dalam Batasan Biologis yang Aman. Indonesia secara konsisten melakukan pemutakhiran angka pendugaan kelimpahanikan (stock assessment) dilaut, untuk menduga nilai Potensi Maksimum Lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah sebesar 80% dari potensi maksimum lestarinya. Pada tahun 2013, MSY ditetapkan sebesar 7,3 juta ton (Renstra KKP 2015-2019, Permen KP No.25/2015); selanjutnya pada tahun 2016, ditetapkan nilai MSY sebesar 9,9 juta ton (Kepmen KP No.47/2016); dan terakhir pada tahun 2017, nilai MSY meningkat menjadi 12,5 juta ton (Kepmen KP No.50/2017). Peningkatan nilai MSY ini diiringi dengan pembaruan pencatatan data khususnya tentang ketertiban pengumpulan data di seluruh tempat pendaratan ikan, pencatatan kapal, perbaikan metodologi perhitungan, dan masuknya spesies baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng Dinas Kelautan dan Perikanan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan pembuatan Log Book perikanan dan Vessel Monitoring System yang kemudian masuk dalam sistem satu data.

Penegakan hukum dan pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *fishing* terus ditingkatkan. Pemberantasan IUU *fishing* merupakan masalah yang memerlukan komitmen tinggi dan kerjasama lintas institusi pada tingkat operasional. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia, telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memerangi IUU *fishing* di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 j.o Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam rangka mendukung pemberantasan IUU fishing, Pemda DIY telah membentuk tim pengawasan terpadu dari Lanal, Polair, Dishub DIY dan Dinas terkait lainnya yang tugasnya mengawasi di perairan laut dan daratan. Selain itu diperlukan pelibatan inklusif semua pelaku perikanan dalam memanfaatkan potensi perikanan secara *legal, reported* dan *regulated*.

Dukungan dan Perlindungan Nelayan Kecil. Pemda DIY melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Beberapa dukungan dalam peraturan tersebut untuk nelayan kecil adalah (a) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (b) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (c) meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (d) menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (e) menumbuh kembangkan sistem, serta kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (f) melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan (g) memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Hibah untuk nelayan skala kecil juga terus ditingkatkan berupa peralatan tangkap, kapal, pelatihan dan sosialisasi/pembinaan. Adapun tantangan yang perlu diatasi dalam memberikan bantuan kepada nelayan kecil adalah perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan operasionalisasi, penguatan kelembagaan nelayan, penyusunan regulasi yang tepat dalam mengatur pemanfaatan bantuan pendanaan dan bantuan teknis bagi nelayan skala kecil.



O. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Kinerja Tata Kelola Kehutanan. Peningkatan kinerja tata kelola kehutanan dilaksanakan melalui pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kehadiran KPH sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan hutan di tingkat tapak, yaitu illegal activities (*logging*, hunting, encroaching), pencurian plasma nutfah, kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di dalam kawasan hutan yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan. Upaya lainnya untuk peningkatan kinerja tata kelola kehutanan adalah dengan peningkatan aset kehutanan melalui upaya restorasi dan rehabilitasi untuk meningkatkan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.

Pada tahun 2017, pemanfaatan sumberdaya hutan tercatat sebesar 36,09%. Pemanfaatan sumberdaya hutan pada tahun 2017 berupa pemanfaatan hutan untuk produksi minyak kayu putih dan produksi kayu. Dari luas total hutan sebesar 18.715 ha sebesar 6.753,76 ha (terdiri dari 3.771,26 ha untuk produksi minyak kayu putih dan 2.985,50 ha untuk produksi kayu). Pemanfaatan tersebut hanya dilakukan di area hutan produksi yang memang diperuntukkan untuk produksi minyak kayu putih dan produksi kayu. Pada tahun 2017 luas pemanfaatan hutan secara optimal.

Secara umum, pemanfaatan hutan untuk produksi minyak kayu putih dan produksi kayu dapat dilakukan pada area seluas 10.117 ha atau sebesar 54,06% dari luas hutan keseluruhan dengan catatan kondisi tanaman seluruhnya pada kondisi normal dan produktif. Namun pada kenyataannya keadaan tanaman dengan kondisi normal hanya tercatat seluas 3.087,20 ha yang terdiri atas tegakan jati dan rimba seluas 2.985,50 dan tegakan kayu putih seluas 104,70 ha. Pada tegakan kayu putih dengan kondisi bertumbuhan kurang juga dilakukan pungutan daun untuk produksi minyak kayu putih seluas 3.666,56 ha. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target produksi minyak kayu putih.

Tantangan besar dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan adalah kondisi tegakan yang mayoritas berupa tegakan bertumbuhan kurang sehingga pemanfaatan sumberdaya hutan dalam hal ini untuk produksi kayu dan minyak kayu putih tidak bisa dilakukan secara optimal. Selain itu masih terdapat kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain diluar kepentingan kehutanan sehingga menghambat upaya pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal.

Kerusakan hutan sebagian besar diakibatkan karena adanya lahan kritis di dalam kawasan hutan. Kondisi lahan kritis di dalam kawasan hutan sebagian besar karena adanya tanah kosong dan petak bertumbuhan kurang. Penyebab lain dari kerusakan hutan adalah adanya gangguan keamanan hutan serta adanya bencana alam. Jumlah kerusakan hutan di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul dari tahun 2012–2016 mengalami fluktuasi dengan Kabupaten Gunungkidul memiliki kasus terbanyak.

Kasus pencurian kayu tertinggi dalam kurun waktu 2012-2016 terjadi pada tahun 2014, yaitu sebanyak 81 kasus dengan volume kayu yang dicuri sebanyak 353 meter kubik. Luas areal hutan yang terbakar terbesar selama kurun waktu 2012 – 2016 terjadi pada tahun 2015 yaitu seluas 128,5 hektar, sedangkan pada tahun 2016 tidak terjadi kebakaran hutan. Jumlah titik lokasi kebakaran hutan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 19 titik. Di sisi lain, deforestasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 40,49 hektar, sedangkan pada tahun 2016 hanya sebesar 0,42 hektar. Penurunan kerusakan hutan diwujudkan melalui peningkatan upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Selain itu, didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui skema tumpangsari maupun pola kerjasama lain.

Tantangan utama dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati terutama sumberdaya hutan adalah tingginya kebutuhan lahan oleh masyarakat sekitar hutan yang memunculkan penyerobotan lahan hutan atau penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang relatif rendah sehingga memunculkan gangguan hutan terutama pencurian kayu. Tindakan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran

masyarakat sekitar hutan akan arti penting kelestarian hutan berkaitan dengan kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, serta meningkatkan upaya perlindungan kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan.

Indeks Tutupan Hutan. Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakukan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Penghitungan ITH dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan ITH ini, diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,3% dari luas wilayah administrasinya). Asumsi yang digunakan dalam penghitungan ITH, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai ITH tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya.

Penghitungan indeks tutupan hutan diawali dengan melakukan penjumlahan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Penghitungan indeks tutupan hutan menggunakan rumus:

$$TH = \frac{LTH}{LWP}$$

Keterangan: TH = Tutupan Hutan

LTH = Luas Tutupan Hutan LWP = Luas Wilayah Provinsi

Kemudian dilakukan konversi persentase yang merupakan perbandingan luas tutupan hutan dengan luas wilayah provinsi melalui persamaan sebagai berikut:

ITH =
$$100 - \left((84.3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54.3} \right)$$

Keterangan: ITH = Indeks Tutupan Hutan

TH = Tutupan Hutan

P. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan. Dalam mencegah dan menurunkan kekerasan terhadap anak dan perempuan, BPPM melakukan dua strategi yaitu pembuatan kebijakan dan program pembangunan yang relevan. Strategi pembuatan kebijakan, antara lain: (1) Perda Nomor 3/2012 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; (2) Pergub Nomor 66/2012 Forum perlindungan korban kekerasan; (3) Pergub Nomor 67/2012 tentang organiasai dan tata kerja P2TPA RDU; (4) Pergub Nomor 34/2013 tentang RAD perlindungan perempuan dan akan korban kekerasan tahun 2013-2017; (5) Perda Nomor. 6/2014 tentang Perlindungan terhadap korban TPPO, (6) Perda Nomor. 2 tahun 2018 tentang Pelindungan anak; (7) Penyusunan Perda Ketahanan Keluarga

Strategi program pembangunan yang relevan, antara lain: (1) peningkatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor pencegahan kekerasan; (2) pelayanan Telepon Sahabat Anak (TeSA). Layanan ini berupa saluran telepon yang beroperasi selama 24 jam 7 hari untuk menerima berbagai aduan terkait kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaraan terhadap anak; (3) penguatan sistem perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas SDM pada institusi yang mencakup pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah dengan pengembangan dan penguatan program kesejahteran sosial anak—integratif dan penguatan; (4) penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan didukung Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA); (5) pengembangan program untuk pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah dengan mempromosikan penggunaan disiplin positif bagi guru dan pengembangan program pencegahan perundungan (anti-bullying); (6) penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat untuk pencegahan dan deteksi dini kekerasan,

perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaraan melalui peningkatan peran dunia usaha, media massa dan masyarakat dalam penguatan pengasuhan berbasis keluarga dan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); serta (7) peningkatan partisipasi masyarakat termasuk anak-anak melalui pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak dan Forum Anak.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kekerasan dan angka kematian, antara lain: (1) peningkatan kualitas layanan untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; (2) penguatan perlindungan anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; dan (3) peningkatan koordinasi dari para pemangku kepentingan untuk melindungi anak dan perempuan.

Q. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Keterbukaan ekonomi memberikan manfaat bagi perekonomian DIY melalui perdagangan antar negara. Secara umum, perkembangan ekspor di DIY selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Dalam tiga tahun terakhir, kinerja sektor perdagangan mulai membaik dan tercatat surplus karena terpengaruh oleh pulihnya kondisi perekonomian global. Tercatat, Nilai Ekspor DIY pada tahun 2017 sebesar 296,61 Juta US\$. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 44,43 Juta US\$ (17,62%) jika dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sebesar 252,18 Juta US\$. Peningkatan ekspor DIY didukung oleh 5 (lima) komoditas utama ekspor yaitu pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, atsiri daun cengkeh, dan produk tekstil lainnya. Sementara tujuan utama ekspor komoditas DIY adalah Jerman, diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda.

Tabel 2.41. Perkembangan Ekspor di DIY, Tahun 2013-2017

| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Volume (Juta kg) | 34,03 | 57,51 | 56,9 | 57,01 | 59,24 |
| Nilai (Juta US \$) | 211,76 | 233,25 | 242,47 | 252,18 | 296,61 |
| Komoditas | 127 | 166 | 110 | 88 | 78 |
| Negara | 111 | 114 | 115 | 112 | 112 |
| Eksportir | 286 | 310 | 325 | 286 | 314 |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2018

Kemitraan untuk mencapai TPB diwujudkan melalui kerjasama pada level internasional. Pada sasaran global, target pembangunan adalah memperkuat mobilisasi sumber daya domestik termasuk mencari dukungan internasinal untuk peningkatan kapasitas lokal. Pada sisi perkuatan sumber daya domestik, Pemda DIY terus mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi, dan pada sisi kerjasama internasional Pemda DIY diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan beberapa negara maju di dunia.

Pemda DIY menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pemerintah Prefektur Yamanashi, Jepang pada tanggal 24 November 2016. Kerjasama dilakukan dalam bidang pertanian selama 3 tahun (dari tahun 2018 hingga 2021). Skema kerjasama dilakukan dengan pemagangan tenaga pertanian dari pemda DIY di prefektur Yamanashi untuk belajar tentang budidaya tanaman anggur dan stroberi.

Serangkaian kerjasama dalam bentuk sister province juga dilaksanakan dengan pemerintah Australia (khususnya negara bagian Victoria) dalam bidang seni dan kebudayaan. Kerjasama pun dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Gangwon dan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Kegiatannya adalah "Gangwon Provincial Program for Local Government Officials of Sisterhood Governments" dan Saemaul Undong Program. Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kualitas hidup, peningkatan pendapatan, aktivitas relawan dan pengenalan budaya Korea.







































Rencana **Aksi Daerah**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



2018 - 2022

Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB

A. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan



Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara, maka penghilangan kemiskinan dan kelaparan pada 2030 menjadi tulang punggungnya. Kemiskinan, yang menjadi tujuan utama MDGs, kembali menjadi tujuan

utama dalam TPB. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs.

Berdasarkan evaluasi dan monitoring pencapaian RAD MDG's DIY 2010-2015, salah satu indikator dengan kategori merah (belum tercapai) adalah indikator penurunan kemiskinan. Target pencapaian penurunan yang seharusnya diakhir periode MDG's berada pada 10,30%, namun kenyataanya hanya turun pada angka 13,16%. Maka, Pemda (Pemda) DIY, dalam rangka mencapai Tujuan 1 TPB Tanpa Kemiskinan, menargetkan penurunan angka kemiskinan mencapai 7-8 % (RPJMD DIY 2017-2022).

Persoalan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan menyangkut beberapa hal antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan

seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Arah kebijakan untuk mencapai target mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun adalah:

- Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja organisasi Pemda (OPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program.
- 2. Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin.
- 3. Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin.
- 4. Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah.
- 5. Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah.
- Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya yang menghubungkan tempat produksi dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin.
- 7. Peningkatan infrastruktur fisik seperti energi, terminal, pelabuhan, dan lainnya dalam rangka meningkatkan akses dan memudahkan jangkauan perekonomian masyarakat miskin maupun rentan.
- 8. Pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, peningkatan perekonomian desa dan kawasan perdesaan baik melalui pengembangan ekonomi yang sudah ada maupun dari potensi ekonomi desa yang ada.
- 9. Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa dalam rangka menumbuhkan keberdayaan masyarakat desa.



- 10. Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial.
- 11. Peningkatan kerjasama kemitraan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan perguruan tinggi, forum tanggungjawab dan lingkungan perusahaan (TLSP), organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Kebijakan Tujuan 1. Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, RPJMD 2017-2022 diarahkan untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, dengan program penanggulangan kemiskinan yang indikator kinerjanya meliputi:

- 1. Persentase peningkatan Penumbuhan wirausaha baru
- 2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)
- 3. Pengeluaran per kapita masyarakat

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 1, program dan kegiatanya mencakup: (1) Penumbuhan wirausaha baru yang mandiri (2) Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat (3) Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin (4) Peningkatan penduduk berakses air bersih layak (5) Peningkatan enduduk berakses energi (6) Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah (7) Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin (8) Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial.

Selain itu, ada program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Diantaranya bisa dilihat pada lampiran.

Target Indikator Tujuan 1. Target pencapaian indikator Tujuan 1 bisa dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1. Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

| Kode | Target/ | Sumber | Satuan | Baseline | Target Pencapaian | | | | |
|--------------------------|--|---------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indikator | Indikator | Data | Jacaan | (2017) | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | . Pada tahun 2030, | | | | | | | | |
| anak-anak definisi na | dari semua usia, | yang hid | up dalan | n kemiskin | an di s | emua d | imensi, | sesuai | dengan |
| 1.2.1 | Tingkat kemiskin- | BPS | % | 13,02 % | 11,23 | 10,19 | 9,11 | 8,07 | 7 |
| | an daerah | | | (2017: 12.36%) | , - | , | , | -,- | |
| semua, te | . Menerapkan seca rmasuk kelompok y | ang palir | ng miskin, | | | | | | |
| | ıl bagi kelompok m | | | 75.20 | 02.0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.3.1 | Presentase Penduduk Miskin | Dinkes | % | 75,28 (Indo- | 83,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | yang mendapat- | | | nesia | | | | | |
| | kan layanan jami- | | | dalam | | | | | |
| | nan kesehatan | | | angka | | | | | |
| 1 2 2 | Lunalah Daganta | Diana | lia | 2017) | 224 | 220 | 240 | 257 | 200 |
| 1.3.2 | Jumlah Peserta Program Jaminan | Disna- ker | Jiwa | 279 .519 | 331 .665 | 339 .957 | 348 .456 | 357 .167 | 366 .097 |
| | Sosial Bidang | KCI | | .515 | .005 | .557 | .430 | .107 | .037 |
| | Ketenagakerjaan | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Jumlah peserta | Disna- | Jiwa | 256 | 307 | 314 | 321 | 328 | 336 |
| | Program SJSN | ker | | .099 | .074 | .136 | .344 | .700 | .206 |
| | Ketenagakerjaan (Formal) | | | | | | | | |
| 1.3.4 | Jumlah peserta | Disna- | Jiwa | 23 | 24.59 | 25.82 | 27.11 | 28.46 | 29.89 |
| | Program SJSN | ker | | .420 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| | Ketenagakerjaan | | | | | | | | |
| 1.3.5 | (Nonformal) Jumlah penyan- | Dinsos | Jiwa | 672 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 1.5.5 | dang difabilitas | טוווטט | JIWa | 072 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| | miskin dan ren- | | | | | | | | |
| | tan yang meneri- | | | | | | | | |
| | ma bantuan | | | | | | | | |
| | pemenuhan | | | | | | | | |
| 1.3.6 | kebutuhan dasar Jumlah keluarga | Dinsos | Jiwa | | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 1.5.0 | miskin yang | 5111303 | 31000 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | mendapatkan | | | | | | | | |
| | bantuan tunai | | | | | | | | |
| | bersyarat/PKH | | | | | | | | |
| Target 1 / | Graduasi | n monia | min habi | va comus | laki lak | i dan n | orome | an khu | icuchyo |

Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

| Kode | Target/ | Sumber | Satuan | Baseline | | Targe | et Penca | paian | |
|-----------|--|----------------------------------|--------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indikator | Indikator | Data | Jatuan | (2017) | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.4.1 | Meningkatnya cakupan CPR (Contraceptive Prevalence Rate) | SDKI 2017 | % | 76 | 76,1 | 76,2 | 76,3 | 76,4 | 76,5 |
| 1.4.2 | Cakupan persali- nan di fasilitas pelayanan kesehatan | Dinkes | % | | 99,77 | 99,77 | 99,77 | 99,77 | 99,77 |
| 1.4.3 | Persentase anak berusia 12-23 bulan yang mene- rima imunisasi dasar lengkap. | Dinkes | % | 96,4 | 97 | 97,5 | 98 | 98 | 98 |
| 1.4.4 | Meningkatnya akses air minum layak | Indone -sia dalam angka | % | 81,04 | 86,98 | 88,71 | 90,49 | 92,30 | 94,14 |
| 1.4.5 | Penanganan kawasan kumuh | Dinas PU ESDM | % | 39,8 | 39,80 | 58,22 | 72,16 | 86,08 | 100,00 |
| 1.4.6 | Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni | Dinas PU ESDM | % | | 11,54 7,62 | 23,08 21,75 | 34,62 32,43 | 46,15 43,10 | 57,69 53,78 |
| 1.4.7 | Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat | Dinas Pendi- dikan | % | SD LK = 98,68. PR = 94,86 | 97,10 | 97,33 | 97,57 | 97,8 | 98,27 |
| 1.4.8 | Angka Parisipasi Murni SMP/MTs sederajat | Dinas Pendi- dikan | % | SMP LK= 8492. PR= 8376 | 84,7 | 84,75 | 84,79 | 84,84 | 84,89 |
| 1.4.9 | Angka Parisipasi Murni SMA/SMK/ MAsederajat | Dinas Pendi- dikan | % | SMA/K LK=6634. PR= 6647 | 97,96 | 99,76 | 101,56 | 103,36 | 105,16 |
| 1.4.10 | Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan persentase (%) kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP elektronik. | Tapem | % | 2.736 .850 | 97,9 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 |
| 1.4.11 | Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk (Rasio Elektrifikasi). Pada tahun 2030, | | % | 88,66 | 93,02 | 95,6 | 98,14 | 99,7 | 100 |

Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

| Kode | Target/ Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2017) | Target Pencapaian | | | | | |
|-----------|---|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|--|
| Indikator | | | | | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1.5.1 | Jumlah desa yang sudah menjadi Destana/Katana | BPBD | Lokasi | 323 | 323 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 1.5.2 | Meningkatnya Desa Tangguh Bencana | Dinsos | Lokasi | 189 | 214 | 239 | 264 | 289 | 301 | |
| 1.5.3 | Persentase korban mening- gal dan hilang terhadap jumlah kejadian bencana | BPBD | % | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| 1.5.4 | Capaian indeks pemulihan pasca- bencana di DIY | BPBD | | 50 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 1.5.5 | Kebutuhan dasar korban bencana kebakaran | | jiwa | 196 | 196 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 1.5.6 | Pemulangan Orang Telantar | Dinsos | jiwa | 323 | 323 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 1.5.7 | Jumlah dokumen RPB DIY & RAD PRB DIY | BPBD | Doku- men | 155 | 149 | 143 | 137 | 131 | 125 | |
| | | | | _ | | _ | | | _ | |

Keterangan: Indikator tidak memakai 40% masyarakat terbawah karena ketidaktersediaan data di lapangan. Layanan pun tidak memandang strata dan capaianya sudah maksimal mendekati 100% (99,77%)

B. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan



Tujuan 2 TPB adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan target yang diukur

melalui indikator. Target tersebut adalah menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Upaya perbaikan gizi masyarakat diantaranya adalah: (1) sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif; (2) peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, *hygiene*, dan pengasuhan; (3) pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan



penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal (termasuk sosialisasi manfaat dan menciptakan minat atau preferensi pada konsumsi pangan ikan, hasil peternakan, sayuran, dan buah-buahan lokal); (4) perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan; (5) penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan keamanan pangan; (6) penguatan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil; (7) perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya; (8) penguatan sistem surveilans pangan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan; (9) pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); (10) peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat; dan (11) penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis (berpendapatan rendah) dan transien (darurat bencana).

Kebijakan yang dilakukan adalah:

- 1. Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan
- 2. Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat
- 3. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan

Pogram Tujuan 2 adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan keamanan pangan; Pemberdayaan daerah rawan pangan; Peningkatan produksi tanaman pangan; Peningkatan produksi hortikultura; Peningkatan populasi peternakan; Peningkatan produksi perkebunan; Peningkatan produksi perikanan budidaya; Peningkatan produksi perikanan tangkap.

Target Indikator Tujuan 2. Target pencapaian indikator Tujuan 2 bisa dilihat pada tabel berikut:

Base-

Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tabel 3.2.

905,8 ha

Produksi

tanaman

pangan

Produksi

Dinas Per-

tanian dan

Ketahanan

Dinas Per-

Ketahanan Pangan

Pangan

hortikultura tanian dan

ton

ton

2.204

.717

2.209

.769

2.312

.780

392.421 396.375 397.965 399.550 401.150 402.750

2.313

.050

2.313

.255

2.313

.500

2.3.2

2.3.3

| Kode | Target / | Sumber | Satuan | Base- line | Target Pencanaian | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| ndikator | Indikator | Data | | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 025 mer | l. Pada tahun ncapai target na tahun, da nula. | t yang dise | oakati se | cara int | ernasiona | ıl untuk a | anak pen | dek dan | kurus d |
| 2.2.1 | Kualitas kon-sumsi pang-an yang di- | Dinas Per- tanian dan Ketahanan Pangan | Skor | 88,5 | 89,92 | 90,22 | 90,52 | 90,82 | 91,12 |
| | indikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan per kapita | BPS | Kg/ Kapita/ Tahun | 23,1 | N/A | 24,55 | 25,21 | 25,48 | 26,05 |
| 2.2.2 | Jumlah Desa Rawan Pangan | Dinas Per- tanian dan Ketahanan Pangan | Desa | 10 | N/A | 6 | 4 | 2 | 0 |
| makanan penggeml sumber d | 3. Pada tahur skala kecil, k bala dan nela aya produkti lan pekerjaa | n 2030, men hususnya po ayan, termas f, dan input | erempua suk melal lainnya, _l | n, masya ui akses | ırakat per yang ama | nduduk as an dan sa | sli, keluar ma terha | ga petan dap lahar | i, 1, |
| 2.3.1 | Penetapan Kawasan Pertanian Berkelanjut- an (KP2B) seluas 104. | Dinas Per- tanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas | ha | N/A | 104.905 ,80 | 104.905 ,80 | 104.905 ,80 | 104.905 ,80 | 104.909 ,80 |

| Kode | Target / | Sumber | Satuan | Base- line | Target Pencapaian | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|----------------|---------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Indikator | maikator | Data | | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2.3.4 | Populasi ternak | Dinas Per- tanian dan Ketahanan Pangan | Animal Unit | 620.516 | 620.869 | 622.842 | 624.874 | 626.885 | 628.870 |
| 2.3.5 | Produksi perkebunan | Dinas Per- tanian dan Ketahanan Pangan | ton | 68.602 ,97 | 68.740 | 68.877 | 69.015 | 69.153 | 69.290 |
| 2.3.6 | Produksi perikanan budidaya | Dinas Ke- lautan dan Perikanan | ton | 76.875 ,60 | 89.336 | 89.400 | 89.500 | 89.600 | 89.700 |
| 2.3.7 | Produksi perikanan tangkap | Dinas Ke- lautan dan Perikanan | ton | 5.001 ,20 | 5.817 | 6.199 | 6.481 | 6.863 | 7.063 |

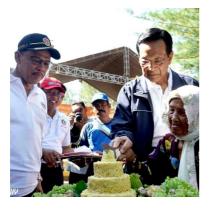
C. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera



Tujuan 3 TPB adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50

indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (tobacco control), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera didasarkan pada strategi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan: (1) Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (2) Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan) (3) Peningkatan pelayanan Medis, rehab medis, rehab sosial dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa (4) Peningkatan aksebilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.



Program Tujuan 3. Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan TPB tujuan 3, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup: 1) pelayanan kesehatan yang bermutu dan peningkatan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; 2) penguatan sarana, prasarana dan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar dan rujukan; 3) penyehatan lingkungan; 4) peningkatan

ketersediaan farmasi dan alat kesehatan; 5) pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; 6) rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA; 7) pelayanan KB bagi perempuan usia reproduksi; 8) pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia reproduksi, termasuk remaja; dan 9) peningkatan ketersediaan SDM kesehatan.

Target Indikator Tujuan 3. Target pencapaian indikator Tujuan 3 bisa dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3. Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

| Kode | Target/ | Sumber | Satuan E | Baseline | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
|------------|--|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| Indikator | Indikator | Data | Satuali | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Target 3.7 | 7. Pada tahun | 2030, me | njamin a | kses univ | ersal terh | adap laya | ınan kese | hatan sek | sual dan |
| reproduk | si, termasuk k | eluarga b | erencan | a, informa | ısi dan pe | ndidikan, | dan integ | grasi kese | hatan |
| reproduk | si ke dalam st | rategi dan | program | m nasiona | l. | | | | |
| 3.7.1 | Meningkat- nya jumlah peserta KB aktif | BKKBN | Jiwa | 363.937 (PPM PA 2018) | 363.937 | 369.093 | 366.297 | 367.502 | 368.707 |
| 3.7.2 | Meningkat- nya cakupan CPR cara modern (Contracep- tive Preva- lence Rate) | BPS | % | 32,18 (SDKI 2017) | 57,9 | 58,0 | 58,2 | 58,3 | 58,5 |

| Kode | Target/ | Sumber | Catuan | Baseline | | Targe | et Pencap | aian | |
|-----------|---|--------|--------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| Indikator | Indikator | Data | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3.7.3 | Meningkat- nya cakupan CPR cara modern pada peng- gunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang | BPS | % | 20 (SDKI 2017) | 32,40 | 32,50 | 32,70 | 32,90 | 33,00 |
| 3.7.4 | Menurunnya jumlah kela- hiran pada remaja usia 15-19 tahun | BPS | % | 2,2 (SDKI 2017) | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 3.7.5 | Menurunnya rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh WUS sepanjang masa repro- duksinya | BPS | % | 2,2 (SDKI 2017) | 2,18 | 2,16 | 2,14 | 2,12 | 2,1 |

D. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas



Tujuan 4 TPB adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030,

ditetapkan 10 target yang diukur melalui 23 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas didasarkan pada strategi meningkatkan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan, dengan arah kebijakan: (1) Peningkatan Aksesibilitas dan Kulitas Pendidikan Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung Pendidikan (3) Peningkatan layanan pendidikan di DIY (4) Memperkuat mengembangkan pendidikan karakter.



Program Tujuan 4. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 1) program-program terkait peningkatan kualitas dan akses pendidikan dasar dan menengah; 2) program terkait peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; 3) program terkait peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 4) program terkait penilaian mutu satuan pendidikan; 5) program terkait peningkatan kapasitas dosen, guru, dan tenaga kependidikan; 6) program terkait penyediaan/pemberian bantuan pendidikan untuk penduduk; 7) program terkait pengembangan dan pembinaan, dan pelindungan bahasa; 8) program terkait peningkatan kualitas kelembagaan, tata kelola, dan layanan pendidikan.

Target Indikator Tujuan 4. Target pencapaian indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.4. Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

| Kode | Target / Indikator | Sumber Satuan | | Baseline | | Targe | t Penca | paian | |
|----------|--|------------------|---------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Indikato | r | Data | Satuali | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Target 4 | .1. Pada tahun 2030, m | enjamin b | ahwa se | emua ana | k peren | ipuan da | an laki- | laki | |
| menyele | saikan pendidikan dasa | ar dan mei | nengah | tanpa dip | ungut b | iaya, se | tara, da | n berku | alitas, |
| yang me | ngarah pada capaian pe | embelajar | an yang | relevan | dan efel | ctif. | | | |
| 4.1.1 | Meningkatnya per- sentase SD/MI ter- akreditasi minimal B | Disdik- pora | % | 96,33 | 97,21 | 97,88 | 98,12 | 98,46 | 99,11 |
| 4.1.2 | Meningkatnya per- sentase SMA/MA ter- akreditasi minimal B | Disdik- pora | % | 94,57 | 94,62 | 95,13 | 95,81 | 96,02 | 96,58 |

| Kode | Target / Indikator | Sumber Sa | Satuan | Baseline | Target Pencapaian | | | | | |
|-----------|---|-----------------|---------|----------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| Indikator | raiget / illulkator | Data | Satuali | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 4.1.3 | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat | Disdik- pora | % | 108,19 | 108,26 | 108,22 | 108,18 | 108,13 | 108,7 | |
| 4.1.4 | Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat | Disdik- pora | % | 112,47 | 112,34 | 112,26 | 112,15 | 112,15 | 112,10 | |
| 4.1.5 | Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sedera jat | Disdik- pora | % | 94,27 | 94,35 | 94,41 | 94,49 | 94,56 | 94,64 | |
| 4.1.6 | Angka Partisipasi Kasar (APK) anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) | Disdik- pora | % | 9,10 | 93,68 | 93,89 | 93,91 | 93,94 | 93,97 | |
| 4.1.7 | Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat | Disdik- pora | % | 94,27 | 94,35 | 94,41 | 94,49 | 94,56 | 94,64 | |

E. Tujuan 5 Kesetaraan Gender



Isu kesetaraan gender perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program kegiatan, karena isu gender masih cukup mengemuka seperti aktivitas perempuan dalam kegiatan ekonomi masih tertinggal dengan laki-laki, demikian halnya

dengan posisi perempuan dalam lembaga politik yang masih rendah dibanding laki-laki. Di sektor domestik perempuan masih memikul beban ganda, yaitu mengurus kebutuhan domestik dan masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu kekerasan dalam rumah tangga dimana lebih banyak perempuan dan anak-anak sebagai korban.

Kebijakan Tujuan 5. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD untuk pencapaian Goal 5 berasal dari kebijakan di berbagai perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah: (1) pembentukan Desa Prima Sejahtera baru di fokuskan di daerah tertinggal/miskin untuk membuka dan meningkatkan akses perempuan pada potensi pemberdayaan ekonomi (2) peningkatan perempuan pengambil keputusan di ranah publik dengan diprioritaskan pada penguatan kapasitas pada perempuan dan advokasi lembaga (3) percepatan penurunan prevalensi pada perempuan dan anak diprioritaskan pada kegiatan pencegahan dengan



memperkuat jejaring antar lembaga (4) peningkatan level capaian KLA di DIY melalui peningkatan kapasitas gugus tugas KLA terutama di Kab. Bantul yang belum mencapai level terendah KLA (pratama) (5) peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan korban terutama di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (6) penyusunan kebijakan daerah dalam upaya

pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan (7) pembentukan sistem konseling keluarga yang holistik dan integratif sesuai dengan rancangan Grand Design Ketahanan Keluarga, dan (8) pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Program Tujuan 5. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 5 antara lain adalah: (1) Program perlindungan perempuan dan anak yang didukung dengan kegiatan (a) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (b) Pengembangan data gender dan perlindungan perempuan dan anak (c) Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak. (2) Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang didukung dengan kegiatan (a) Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan anak (b) Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi. (3) Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk yang didukung dengan kegiatan (a) Pembinaan Keluarga Berencana (b) Peningkatan kesehatan reproduksi. (4) Program peningkatan kualitas keluarga yang didukung dengan kegiatan (a) Peningkatan Ketahanan keluarga (b) Pengembangan Bina Keluarga.

Selain program di atas masih ada program-program lain yang memberikan kontribusi pada upaya pencapaian target TPB. Dari masing-masing program tersebut kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan TPB dicantumkan dalam martiks-matriks terlampir. Selain Program dan kegiatan-kegiatan yang berasal dari pemerintah, dalam upaya pencapaian target TPB juga didukung oleh program dan kegiatan yang berasal dari organisasi nonpemerintah yaitu dari organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.

Target Indikator Tujuan 5. Target pencapaian indikator ini bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5. Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

| Kode | Target/ | Sumber | | Baseline | | Targ | et Pencapa | ian | |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|--------|
| Indik ator | Indikator | Data | Satuan | (2015) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| _ | t 5.1. Mengakhir | _ | | | - | - | - | | |
| 5.1.1. | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan | BPPM DIY, Biro Hukum DIY | Dokum en | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| Targe | t 5.2. Menghapu | skan segala | a bentuk | kekerasan | terhada | p kaum po | erempuan | di ruang | publik |
| dan p | ribadi, termasuk | perdagang | an orang | g dan eksp | loitasi se | ksual, ser | ta berbaga | i jenis | |
| eksplo | oitasi lainnya. | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 th | BPPM, BPS | % | 0,042 (2015) 0,050 (2016) | 0,049 | 0,048 | 0,047 | 0,046 | 0,045 |
| 5.2.2 | Proporsi pe- rempuan dan anak perem- puaan meng- alami kekeras- an Dalam Ru- mah Tangga (KDRT) | BPPM, BPS | % | 0,019 (2017) | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,014 |
| 5.2.3 | Proporsi pe- rempuan dan anak perem- puan meng- alami kekeras- an non-KDRT | BPPM, BPS | % | 0,046 (2017) | 0,045 | 0,044 | 0,043 | 0,042 | 0,041 |
| 5.2.4 | Persentase korban keke- rasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | BPPM, BPS | % | 52,23 | 70 | 73 | 76 | 80 | 85 |
| Targe | t 5.3. Menghapu | skan semu | a praktik | berbahay | a, seperti | i perkawir | nan usia an | ak, perk | awinar |
| _ | an paksa, serta s | | - | • | • | - | | | |
| 5.3.1. | Median usia | Cascad-ing | | Rata-rata | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| | kawin pertama | Rancang- | | usia | | | | | |
| | perempuan | | | menikah | | | | | |

| Kode | Target/ | Sumber | | Baseline – | | Target | Pencapai | an | |
|---------------|--------------|-----------|--------|------------|------|--------|----------|------|------|
| Indik ator | Indikator | Data | Satuan | (2015) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | pernah kawin | an RPJMD, | | Perempu- | | | | | |
| | umur 25-49 | IKU BPPM | | an: | | | | | |
| | tahun. | | | 2015: 25,8 | | | | | |
| | | | | 2016: 25,1 | | | | | |
| | | | | Rata-rata | | | | | |
| | | | | usia | | | | | |
| | | | | menikah | | | | | |
| | | | | Laki-laki: | | | | | |
| | | | | 2015: 27 | | | | | |
| | | | | 2016: 26 | | | | | |
| | | | | Sumber | | | | | |
| | | | | Data | | | | | |
| | | | | Kemenag | | | | | |
| | | | | DIY 2017 | | | | | |

Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

| 5.5.1 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen | Data Gender dan Anak 2017 | % | DPRD Prov= 13 (2015) | DPRD Prov=13 (2016) | DPRD Prov=13 (2016) | DPRD Prov=13 (2016) | DPRD Prov=1 3 (2016) | Prov=1 |
|-------|---|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | | | DPRD Kab/kota= 17,72 (2015) | DPRD Kab/kot a=17,97 (2016) | | DPRD Kab/kota= 17,97 (2016) | Kab/k ota=17 | ota=1 7,97 |
| 5.5.2 | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | Data Gender dan Anak 2017 | % | Eselon I= 0% (2015) Eselon II=19,10% (2015) | , | 0% (2016) Eselon | -, | Eselon II=21% | I= 0% (2016) Eselon |

Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.

| 5.6.1 | Undang- | BPPM DIY, | Dokum | Pergub = | Pergub | Pergub = Pergub = 1 | Pergub | Pergu |
|-------|------------------|-----------|-------|----------|--------|---------------------|--------|-------|
| | undang atau | Biro | en | 1 | = 1 | 1 | = 1 | b = 1 |
| | Peraturan | Hukum | | | | | | |
| | Pemerintah | DIY | | | | | | |
| | (PP) yang men- | | | | | | | |
| | jamin perem- | | | | | | | |
| | puan umur 15- | | | | | | | |
| | 49 tahun untuk | | | | | | | |
| | mendapatkan | | | | | | | |
| | pelayanan, | | | | | | | |
| | informasi dan | | | | | | | |
| | pendidikan | | | | | | | |
| | terkait kesehat- | | | | | | | |

| Kode | Target/ | Sumbor | | Baseline - | | Targe | t Pencapai | an | |
|-------|-----------|----------------|--------|------------|------|-------|------------|------|------|
| Indik | Indikator | Sumber Data | Satuan | (2015) | 2019 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ator | markator | Data | | (2013) | 2010 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

an seksual dan reproduksi.

Target 5.7. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak- anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.

| 5.7.1 Tersedianya p | ousat Data Lembaga | 6 (Semua 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---------------------|--------------------|------------|---|---|---|---|
| layanan korba | an Gen P2TP2A | kabupate | | | | |
| kekerasan | der | n/kota | | | | |
| perempuan d | an dan | dan | | | | |
| anak di DIY | Anak | Provinsi | | | | |
| | 2017 | telah | | | | |
| | | terbentuk | | | | |
| | | P2TP2A) | | | | |

F. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak



Tujuan 6 TPB adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator.

Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah

Untuk mewujudkan Tujuan ini, Pemda DIY menetapkan Strategi: (1) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi (2) Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi (3) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat (4) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi (5) Meningkatkan peran rencana

2018

tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi (6) Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis.

Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua adalah: (1) Percepatan Penyusunan



Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh gubernur (2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang, fasilitasi upaya ketaatan terhadap rencana rata ruang (3) Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air, melalui penyelesaian hambatan perijinan, pembiayaan, penyediaan lahan dan penanggulangan masalah sosial (4) Perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air serta sistem informasi sumber daya air (5) Peningkatan pengelolaan infrastruktur sumber air, melalui operasional dan pemeliharaan infrastruktur sumber air guna mengembalikan fungsi & kapasitas tampungannya (6) Pengembangan metode pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan (7) Peningkatan layanan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) (9) Percepatan pembangunan & rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum dan kawasan produktif.

Program Tujuan 6. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 6 TPB, program yang akan dilaksanakan DIY mencakup (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (2) Peningkatan Penduduk Berakses Air Bersih Layak (3) Penyediaan Tempat Tinggal yang Layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah.

Target Indikator Tujuan 6. Target pencapaian indikator Tujuan yang sebagian bersumber dari data capaian kinerja program dan kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

| Kode Target / Sumber Satuan Baseline Target Pencapa | | | paian | | | | | | |
|---|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------|
| Indikator | Indikator | Data | | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | ahun 2030, menc | apai akses | universal da | an merata 1 | terhada | p air mi | num yar | ng aman | dan |
| 6.1.1 | bagi semua Persentase rumah tangga | Dinas PU ESDM | % | 85.27 | 86.98 | 88.71 | 90.49 | 92.30 | 94.14 |
| | yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | | | | | | | | |
| 6.1.2 | Penambahan kapasitas air baku | Dinas PU ESDM | Liter/detik | | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| merata ba | ahun 2013, menc gi semua, dan m | enghentik | an praktik b | uang air be | esar di t | empat | terbuka | , memb | |
| • | khusus pada keb | | | - | | | • | | 04.00 |
| 6.2.1 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | Dinas PU ESDM | % | 86,97 | 88,71 | 90,49 | 92,30 | 94,14 | 94,92 |
| 6.2.4 | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal | Dinas PU ESDM | Jumlah kabupaten | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| menghilan berbahaya | Pada tahun 2030 gkan pembuanga , mengurangi set kan daur ulang, | an, dan m tengah pro | eminimalka oporsi air lin | n pelepasa nbah yang | n mate tidak di | rial dan olah, da | bahan l an secar | kimia a signifi | |
| 6.3.1 | Kualitas air sungai sebagai air baku/Indeks Kualitas Air Sungai | BLH DIY | - | 29,17 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| sektro, da | Pada tahun 2030 n menjamin peng n air, dan secara | gunaan d | an pasokan | air tawar y | ang be | rkelanju | itan unt | uk men | |

kelangkaan air

| Kode | Target / | Sumber | Catuan | Baseline | | Targe | et Penca | paian | |
|------------|--|------------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|------|
| Indikator | Indikator | Data | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6.4.1 | Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap renca- na tata ruang | Dinas PU ESDM | izin | 290 | 330 | 370 | 410 | 450 | 490 |
| Target 6.5 | Pada tahun 203 | 0, menera | pkan penge | lolaan sum | nber day | /a air te | rpadu d | li semua | 3 |
| tingkatan, | termasuk melalı | ıi kerjasaı | ma lintas bat | tas yang te | pat. | | | | |
| 6.5.1 | Jumlah Kelom- pok Masyarakat Sekitar Sungai yang Berpartisi- pasi dalam Pengelolaan Sungai | BLH DIY | Kelompok | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |

G. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau



Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring

meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global.

Untuk mewujudkan Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Pemda DIY didasarkan pada strategi Pemenuhan layanan Dasar Masyarakat Miskin, dengan arah



kebijakan: (1) Meningkatkan pasokan energi dan ketenagalistrikan dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan bauran energi dan pengendalian pemanfaatan yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi (2) Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (3) Meningkatkan aksesibilitas (4) energi Meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Program Tujuan 7. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 7 TPB, program yang akan dilaksanakan DIY mencakup: (1) Program Pengawasan dan Pengendalian Energi, Geologi, Air Tanah dan Pertambangan (2) Program Penyelenggaraan Energi dan Ketenagalistrikan.

Target Indikator Tujuan 7. Target pencapaian indikator Tujuan 7 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

| | • | • | | • | | • | | • | U |
|----------------------------|--|------------------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| Kode | Target/Indikator | Sumber | Satuan | Baseline | | Targ | get Pen | capaian | |
| Indikator | raiget/ maikator | Data | Jacaan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Target 7.1 dan mode | Pada tahun 2030, r rn. | nenjamin | akses un | iversal lay | anan e | nergi ya | ing terj | angkau, | andal |
| 7.1.1 | Presentase Rumah Tangga berakses Iistrik | Dinas PUP & ESDM | persen | 88,66 | 93,02 | 95,60 | 98,14 | 99,70 | 100,00 |
| 7.1.2 | Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik | Dinas PUP & ESDM | RT | 3.000 | N/A | 7.848 | 9.848 | 11.848 | 13.848 |
| Target 7.3 dua kali lip | Pada tahun 2030, r pat. | nelakukar | n perbaik | an efisien | si energ | i di ting | gkat glo | bal seba | nyak |
| 7.3.1 | Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi | Dinas PUP & ESDM | Unit | 32,00 | N/A | 62,00 | 72,00 | 82,00 | 92,00 |
| 7.3.2 | Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan | Dinas PUP & ESDM | Izin | 0,00 | N/A | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 |

H. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi



Perekonomian DIY berkembang seiring dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan teknologi. Selama lima tahun terakhir, perekonomian tumbuh rata-rata sebesar 5,11 % per tahun. Kondisi ekonomi DIY, dari sudut pandang pertumbuhan

produksi lapangan usaha atau kategori ekonomi yang membanggakan. Tahun 2017 landasan ekonomi DIY cukup baik, karena pertumbuhan ekonomi digerakkan terutama oleh kategori-kategori usaha yang mempunyai pangsa besar terhadap PDRB DIY. Sektor tersebut antara lain pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi.

Tujuan 8 berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-targetnya meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita; mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi; menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif; penciptaan lapangan kerja layak; mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM); mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET); mempromosikan pariwisata berkelanjutan; memperkuat lembaga keuangan.

Kebijakan Tujuan 8 yang diarahkan untuk pencapaian target-target meliputi kebijakan: (1) Pertumbuhan Ekonomi Makro secara berkelanjutan, (2) Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif, (3) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), (4) Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan.

Kebijakan pertumbuhan ekonomi makro meliputi: (1) Peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sector pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif (2) Penyiapan potensi dan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong realisasi dan pemerataan investasi (3) Penumbuhan Wirausaha Baru yang Mandiri (4) Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial. (5) Memperkuat daya saing dan perlindungan tenaga kerja

(6) Penyediaan ruang dan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian (8) Mengembangkan sosialekonomi masyarakat dengan memberdayakan lembaga-lembaga organik lokal, mendayagunakan potensi wisata, budaya dan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat (9) Memperkuat



peran pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah (10) Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata (11) pengembangan sektor pariwisata di kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya.

Kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif meliputi: (1) Mendorong masuknya investasi dengan promosi keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki DIY, dengan mengedepankan kepastian berusaha, melalui dukungan regulasi yang mendorong arus investasi. Selanjutnya investasi diarahkan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan memajukan wilayah-wilayah pinggiran yang terpencil, dengan prioritas investasi dan program strategi pemerintah diarahkan ke Kab. Kulon Progo, Gunungkidul dan bantul. (2) Meningkatkan akses pelayanan informasi pasar kerja dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas; (3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan mendorong relevansi kurikulum, standarisasi dan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja; (4) Meningkatkan perluasan kerja melalui usaha mandiri dengan penyesuain dengan perkembangan inovasi saat ini. (5) Mendorong terlaksananya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan yang dilakukan melalui pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh untuk melakukan negosiasi bipartit dengan prinsip collective bargaining dan peningkatan kuantitas dan kualitas mediator hubungan industrial; (6) Meningkatkan perlindungan pekerja dengan mendorong perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi pekerja; (7) Meningkatkan kelembagaan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dengan penyederhanaan

prosedur dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan ketenagakerjaan.

Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi: (1) Mendorong kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha dengan membangun iklim usaha yang baik melalui peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat. (2) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan nonbank. (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan kewirausahaan (4) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.

Kebijakan Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan Meliputi: (1) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan diversifikasi produk wisata berbasis potensi lokal dengan dukungan ekosistem kepariwisataan yang handal untuk mendorong peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan wisatawan. (2) Mengembangkan keterpaduan dan komplementaritas pengembangan produk wisata serta konektivitas yang handal antar destinasi/kawasan strategis pariwisata, khususnya kawasan pantai selatan, untuk menciptakan keseimbangan pengembangan kepariwisataan wilayah (3) Mewujudkan komunikasi pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkat-kan citra pariwisata DIY di tingkat nasional dan internasional dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (4) Mewujudkan industri pariwisata handal dan unggul untuk mampu menggerakkan perekonomian DIY melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (5) Mengembangkan organisasi, tata kelola dan sumber daya manusia bidang kepariwisataan yang mampu menyinergikan pembangunan destinasi pariwisata, industri Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien di DIY

Program Tujuan 8. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 8 TPB, program yang akan dilaksanakan DIY mencakup:
(1) Pengembangan UKM Peningkatan Akses Pembiayaan (2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (3) Program Pengembangan Industri

Pariwisata (4) Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata (5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga (6) Program Pembinaan Pelatihan Standarisasi Dan Pemagangan (7) Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja Dan Transmigrasi (8) Program Pengawasan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan (9) Program Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial. (10) Program Pengujian Lingkungan Kerja Dan Kesehatan Kerja (11) Program Peningkatan produksi tanaman pangan (12) Program Peningkatan produksi hortikultura (13) Program Peningkatan populasi peternakan (14) Program Peningkatan produksi perkebunan (15) Program Peningkatan produksi perikanan budidaya (16) Program Peningkatan produksi perikanan tangkap (17) Program Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung.

Target Indikator Tujuan 8. Target pencapaian indikator Tujuan 8 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

| Kode | Target/ | Sumber | Satuan | Baseline | | Targ | et Penca | paian | |
|-----------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Indikator | · Indikator | Data | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Target 8. | Mempertal | nankan pertu | mbuhan eko | nomi per | kapita | sesuai d | engan k | ondisi n | asional |
| • | susnya, setidal | knya 7 perser | pertumbuh | an produ | k dome | stik bru | to per ta | hun di ı | negara |
| kurang b | erkembang | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Nilai sub sek- tor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peter- nakan dalam PDRB (ADHK) | BPS | Juta rupiah | 6.903 .079 | 7.041 .831 | 7.112 .249 | 7.183 .372 | 7.255 .205 | 7.327 .757 |
| 8.1.2 | Nilai subsek- tor kehutan- an dalam PDRB DIY (ADHK) | BPS | Juta rupiah | 720 .236 | 734 .713 | 742 .060 | 749 .480 | 756 .975 | 764 .545 |
| 8.1.3 | Nilai subsek- tor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) | | Juta rupiah | 312 .662 | 318 .947 | 322 .136 | 325 .357 | 328 .611 | 331 .897 |

Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya

| Kode | Target/ | Sumber | 6-1 | Baseline | | Targe | et Penca | paian | |
|------------------------|---|--|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Indikator | | Data | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 8.2.1 | Laju pertum- buhan PDB per tenaga kerja | BPS (Statistik Indonesia Sakernas) | % | -2,71 | 3,43 | 3,48 | 3,55 | 3,62 | 3,69 |
| pencipta: formalisa | 3 Menggalakka an lapangan ke Isi dan pertum Jasa keuangan | erja layak, kev buhan usaha | virausahaan | , kreativi | tas dan | inovasi, | dan me | ndoron | • |
| 8.3.1 | Proporsi lapangan kerja infor- mal sektor nonpertanian | BPS (Sakernas) | % | 42,54 | 43,86 | 42,49 | 41,12 | 39,75 | 38,38 |
| 8.3.2 | Persentase tenaga kerja formal | BPS (Sakernas) | % | 43,87 | 43,34 | 43,94 | 44,54 | 45,14 | 45,74 |
| 8.3.3 | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian | BPS (Sakernas) | % | 95,66 | 96,06 | 95,49 | 94,93 | 94,36 | 93,79 |
| 8.3.4 | Proporsi kredit UMKM terha-dap total kredit | BI | % | 32,04 | 32,62 | 33,21 | 33,79 | 34,37 | 34,96 |
| 8.3.5 | Jumlah pem- biayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun n (Rp) | | Rp | 12.000 .000 .000 | 12.000 .000 .000 | 15.870 .000 .000 | 18.250 .500 .000 | 20.988 .075 .000 | 24.136 .286 .250 |
| | tahun 2030, m | | | • | | | • | • . | • |
| • | erempuan dan | • | ٠. | emuda d | an peny | andang | difabilit | as, dan | upah |
| yang sam | ia untuk peker | j aan yang san BPS | - | 1.075 | 2.136 | 2.222 | 2 211 | 2 402 | 2 400 |
| 8.5.1 | Upah rata- rata perbulan | _ | Rupiah | 1.975 .721 | .940 | .417 | 2.311 | 2.403 .767 | 2.499 .917 |
| 8.5.2 | Tingkat pe- ngangguran terbuka (TPT) | BPS (Sakernas) | % | 2,72 | 3,21 | 3,11 | 3,01 | 2,92 | 2,82 |
| 8.5.3 | Persentase | BPS | % | 5,06 | 4,72 | 4,55 | 4,08 | 3,99 | 3,90 |

Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan

setengah pe- (Sakernas)

ngangguran

| Kode | Target/ | Sumber | Satuan | Baseline | | Targe | et Penca | paian | |
|------------|---|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Indikator | Indikator | Data | Satuali | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 8.6.1 | Persentase usia muda (15-24) yang se-dang tidak se-kolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) | Disnaker | % | | 89,478 | 85,209 | 80,940 | 76,671 | 93,747 |
| Target 8. | 8 Melindungi l | nak-hak tenag | a kerja dan | mempro | mosikan | lingkun | gan ker | ja yang a | aman |
| dan terja | min bagi semu | ıa pekerja, tei | rmasuk peke | erja migra | n, khus | usnya po | ekerja m | nigran | |
| perempu | an, dan merek | a yang beker | ja dalam pel | kerjaan b | erbahay | а | | | |
| 8.8.1 | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. | | Perusahaa n | 1.224 | 1.224 | 1.368 | 1.368 | 1.440 | 1.440 |
| Target 8.9 | 9 Pada tahun 2 | 2030. menvus | un dan mela | ksanakar | n kehijal | kan unti | ık mem | nromosi | kan |
| _ | a berkelanjuta | | | | - | | | | |
| produk lo | - | , | , | | , | | | , | |
| 8.9.1 | Meningkatny a nilai sektor akomodasi makan mi- num dalam PDRB | | | 8,274 ,501 | 9,297 ,230 | 9,855 ,064 | 10,446 ,367 | 11,073 ,149 | 11,737 ,538 |
| 8.9.2 | Jumlah Wisatawan Mancanegara | Dinas Pariwisata DIY | Jiwa | 355 .313 | 433 .400 | 498 .410 | 598 .092 | 747 .614 | 971 .899 |
| 8.9.3 | Jumlah Wisatawan Nusantara | Dinas Pariwisata DIY | Jiwa | 4.194 .261 | 4.972 .194 | 5.427 .818 | 5.944 .235 | 6.542 .235 | 7.405 .200 |

I. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur



Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal,

berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan *retrofit* industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas

teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet.

Sesuai dengan RPJMD DIY 2017-2022 yang telah dijabarkan juga dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, arah kebijakan terkait



dengan target mempromosikan industri inklusif dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk sektor (2) Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sector) (3) Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif (4) Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha (5) Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM.

Program Tujuan 9. Program yang akan dilaksanakan untuk mendukung tujuan 9 antara lain terkait dengan: (1) Program Peningkatan Teknologi Industri (2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Target Indikator Tujuan 9. Target pencapaian indikator Tujuan 9 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2017) | 2010 | ŭ | t Penca | | 2022 |
|-------------------|--|-----------------|-------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|------|
| | Name was a silve w | | ام گئی دادا | · · · · · · | 2018 | | | 2021 | |
| • | Mempromosikan i nifikan meningkatk | | | | • | • | | | • |
| bruto, seja | lan dengan kondis | i nasional, dan | meningk | atkan dua | kali lip | at pro | orsiny | a di ne | gara |
| kurang bei | rkembang. | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Proporsi nilai tambah sektor industri pengo- | BPS | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | lahan non migas terhadap PDRB | | | | | | | | |

| Kode | Towart/Indikator | Cumbar Data | Cotuon | Baseline | | Targe | t Penc | apaian | |
|------------|---|------------------------|----------|-------------|----------|--------|---------|--------|------|
| Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 9.2.2 | Laju pertumbuh- an PDRB industri pengolahan | BPS | % | 6 | 2,29 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9.2.3 | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan | BPS | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Target 9.3 | Meningkatkan aks | es industri dan | perusah | aan skala | kecil, k | hususn | ya di n | egara | |
| berkemba | ng, terhadap jasa k | keuangan, term | asuk kre | dit terjang | kau, da | n men | gintegi | asikan | ke |
| dalam ran | tai nilai dan pasar | - | | | | | _ | | |
| 9.3.1 | Proporsi nilai tambah industri kecil menengan terhadap total nilai tambah indusrti | Dinas Perindustrian | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

J. Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara



Pemda DIY mendukung pencapaian TPB untuk mengurangi ketimpangan karena sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2017-2022, yaitu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan serta mendorong

pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Adapun target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan mengurangi kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan selama tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut: (1) Koefisien Gini (2) Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (3) Desa mandiri berbudaya (4) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (5) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

Arah kebijakan Tujuan 10 adalah sebagai berikut: (1) Pemenuhan wirausaha baru yang mandiri (2) Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin (3) Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan

tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial (4) Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat (5) Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin (6) Peningkatan penduduk berakses air bersih layak. (7) Peningkatan penduduk berakses energi (8) Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas



masyarakat berpenghasilan rendah (9) Memperkuat lembaga pelestarian budaya dan pengembangkan budaya di kawasan cagar budaya, saujana budaya, desa dan kelurahan budaya (10) Upaya penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (11) Upaya penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

Target Indikator Tujuan 10. Target pencapaian indikator Tujuan 10 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

| Kode | Target/ Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline | | Targe | t Penca | paian | |
|---------------|---|---------------------|-----------|--------------|----------|---------|----------|----------|------|
| Indikator | raiget/ maikator | Juliber Data | Jatuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Target 10.3 | L Pada tahun 2030 | , secara progr | esif mend | capai dan r | nempei | rtahank | an per | tumbu | han |
| pendapata | n penduduk yang | berada di baw | rah 40% d | lari popula | isi pada | tingka | t yang l | lebih ti | nggi |
| dari rata-ra | ata nasional. | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Koefisien Gini. | BPS | | 0,42 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
| 10.1.2 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan | BPS | % | 12,36 | 11,23 | 9,78 | 8.82 | 7,85 | 7 |
| 10.1.3 | Desa mandiri berbudaya | Dinas Kebudayaan | Desa | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Target 10.3 | 3 Menjamin kesem | patan yang sa | ıma dan ı | menguran | gi kesen | jangan | hasil, t | ermas | uk |
| _ | enghapus hukum, I | | | | | - | | | |
| legislasi, ke | ebijakan dan tinda | kan yang tepa | t terkait | legislasi da | an kebij | akan te | rsebut | | |
| 10.3.1 | Jumlah pena- nganan pengadu- an pelanggaran HAM | Kumham | Kasus | _ | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |

| Kode | Tayaat / Indikatay | Cumber Date | Cotuon | Baseline | | Targe | t Penca | paian | |
|------------|---|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 10.3.2 | Jumlah pena- nganan pengadu- an pelanggaran HAM perempuan terutama keke- rasan terhadap perempuan | Kumham | Kasus | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Target 10. | 4 Mengadopsi keb | ijakan,terutan | na kebijal | an fiskal, | upah da | n perli | ndunga | an sosia | al, |
| serta seca | ra progresif menca | pai kesetaraa | n yang lel | oih besar | | | | | |
| 10.4.1 | Jumlah peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan | Disnaker- trans | Jiwa | 279 ,519 | 331 ,665 | 339 ,957 | 348 ,456 | 357 ,167 | 366 ,097 |
| bertanggu | 7 Memfasilitasi mi ngjawab, termasul lengan baik | • | | | - | • | • | | |
| 10.7.1 | Jumlah fasilitasi pelayanan pe- nempatan TKLN berdasarkan | Disnaker- trans | | 782 | 862 | 905 | 951 | 998 | 1048 |

K. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan



okupasi

Tujuan 11 TPB adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, melalui RAN TPB ditetapkan 10 target nasional. Target-

target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, Pemda DIY didasarkan pada strategi Pemenuhan layanan Dasar Masyarakat Miskin, dengan arah kebijakan Penyediaan Tempat Tinggal yang Layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemda DIY, dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2022, menetapkan sasaran (indikator) pada tujuan 11 sebagai berikut:



Program Tujuan 11. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB (1) Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal Hunian Layak dan Terjangkau (2) Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek (3) Penyiapan penyediaan sarpras angkutan perkeretaapian (4) Pengembangan Kawasan Keistimewaan (5) Pemenuhan kebutuhan sarpras keistimewaan

(6) Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) (7) Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan (RAD Sanitasi) (8) Ruang Terbuka Hijau (RTH) (9) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (11) Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana (12) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Target Indikator Tujuan 11. Target pencapaian indikator Tujuan 11 bisa dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.11. Target Pencapaian Indikator Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.

| Kode | Target/ | Sumber | Satuan | Baseline | | Targe | t Penca | apaian | |
|-----------|--|-------------|--------------|------------|--------|-----------|---------|---------|------|
| Indikator | Indikator | Data | Satuan | (2015) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| terdampa | tahun 2030, seca k, dan secara suk pabkan oleh bend tan | stansial me | ngurangi ker | ugian ekon | omi re | latif ter | hadap | PDB glo | |
| 11.5.1 | Persentase korban me- ninggal dan hi- lang terhadap jumlah kejadi- an bencana | BPBD | % | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 11.5.2 | Indeks Risiko Bencana Indo- nesia (IRBI) DIY | BPBD | Indeks | 165 | 160 | 155 | 145 | 135 | 125 |
| 11.5.3 | Indeks Keta- hanan Daerah (IKD) DIY | BPBD | Indeks | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |

| Kode | Target/ | Sumber | Satuan | Baseline | | Target Pencapaian | | | |
|------------|--|-------------|------------------------------|-----------|---------|-------------------|---------|---------|------|
| Indikator | Indikator | Data | Satuan | (2015) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11.5.4 | Jumlah desa/ kelurahan tang- guh bencana yang terbentuk | BPBD | Desa/ Kelurahan | 189 | 214 | 239 | 264 | 289 | 301 |
| 11.5.5 | Jumlah sistem peringatan dini yang sudah terintegrasi. | BPBD | Sistem Peringatan Dini | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.5.6 | Capaian indeks pemulihan pascabencana di DIY. | BPBD | Indeks | 50 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Target 11. | 4 Mempromosik | an dan menj | aga warisan | budaya du | nia dar | warisa | an alam | n dunia | |
| 11 / 1 | lumlah kayya | Dinne | kaurasan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 11.4.1 | Jumlah kawa- | Dinas | kawasan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|--------|----------------|------------|---------|---|---|---|---|---|---|--|
| | san cagar buda | - Kebudaya | - | | | | | | | |
| | ya dan warisan | an | | | | | | | | |
| | budaya dunia | | | | | | | | | |

Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan

| 11.5.1 | Jumlah doku- men RPB DIY & RAD PRB DIY. | BPBD | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|--------|--|------|---------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 11.5.2 | Persentase jumlah doku- men Rencana Kontijensi ter- hadap 5 (lima) jenis ancaman bencana di DIY. | BPBD | % | n/a | n/a | 80 | 100 | 100 | 100 |

L. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab



Tujuan 12 TPB adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pada tahun 2030, pada dokumen RAN ditetapkan 11 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari

pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.



Strategi untuk mencapai Tujuan 12 Menjamin Produksi dan Konsumsi yang Bertanggungjawab di DIY adalah: (1) Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (2) Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah (3) Penyebaran informasi ketersediaan produk

ramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat mengenai manfaat produk tersebut (4) Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur (5) Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan (5) Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan.

Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan adalah: (1) Penguatan mekanisme pemantauan & sistem informasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian peraturan, sengketa, kasus, tindak pidana serta perdata lingkungan secara tuntas (2) Peningkatan kualitas air dan kualitas udara (3) Peningkatan tutupan lahan/hutan, melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis/terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3 serta kawasan pesisir dan laut (4) Pengelolaan bahan berbahaya & beracun (B3).

Program Tujuan 12. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2015-2019 antara lain terkait dengan: (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2) Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup (3) Program Kajian dan Penaatan Lingkungan Hidup

Target Indikator Tujuan 12. Target pencapaian indikator Tujuan 12 bisa dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.12. Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

| Kode | Target / | Sumber | Satuan | Baseline | Target Pencapaian | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| Indikato | r Indikator | Data | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| ramah lir disepaka | 2.4 Pada tahur ngkungan, di s ti dan secara s r, dan tanah u an. | epanjang signifikan | siklus hid mengura | upnya, sesi ngi pencem | uai keran aran bah | igka kerja ian kimia | internas dan limb | ional yan ah tersel | g out ke | |
| 12.4.1 | Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU | BLH | Peserta proper | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |
| • | 2.5 Pada tahur han, penguran | • | | | | • | limbah m | nelalui | | |
| 12.4.2 | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang | BLH | ton | - | - | - | - | - | - | |

M. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim



Tujuan nasional 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan nasional penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target

tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim, Pemda DIY didasarkan pada strategi: (1) Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan (2) Pengurangan resiko bencana, dengan arah kebijakan: (1) Pengelolaan

2018

pencemaran dan kerusakan lingkungan (2) Pengurangan resiko bencana secara komprehensif.

Pemda DIY dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2022, menetapkan sasaran (indikator) pada tujuan 13 adalah: (1) Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) (2) Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi



Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan secara Tahunan (3) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Program Tujuan 13. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 13 TPB, program yang terkait dengan penguatan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam yang akan dilaksanakan oleh Pemda DIY mencakup (1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; (2) Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana; (3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Target Indikator Tujuan 13. Target pencapaian indikator Tujuan 13 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Target Pencapaian Indikator Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

| Kode | Target / | Sumber | Cotuen | Baseline | Т | arget Pe | ncapaia | n | | | |
|---|--|--------|--------|----------|------|----------|---------|------|------|--|--|
| Indikator | Indikator | Data | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1 | Persentase jumlah doku- men Rencana Kontijensi terhadap lima jenis ancaman bencana di DIY. | BPBD | % | n/a | n/a | 80 | 100 | 100 | 100 | | |
| 13.1.2 | Persentase korban meninggal dan hilang terhadap jumlah kejadian bencana. | BPBD | % | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | | |

| Kode | Target / | Sumber Satuar | Satuan | Satuan | Satuan | Baseline | T | arget Pe | ncapaia | n | |
|---|------------------|---------------|---------|--------|--------|----------|------|----------|---------|---|--|
| Indikator | Indikator | Data | Satuali | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi | | | | | | | | | | | |
| dan perer | ncanaan nasional | | | | | | | | | | |
| 13.2.1 | Dokumen pela- | Bappeda | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | poran penurun- | | | | | | | | | | |
| | an emisi gas | | | | | | | | | | |
| | rumah kaca | | | | | | | | | | |
| | (GRK). | | | | | | | | | | |

O. Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan



Tujuan 14 TPB adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target

yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU *fisihing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 14. Kebijakan pengelolaan ekosistem lautan yang dilakukan pemerintah telah termuat dalam RPJMD 2017-2022 terkait pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Visi Misi Gubernur DIY pada RPJMD 2017-2022 yaitu "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja". Tujuan 14 Ekosistem Lautan merupakan bagian dari pembangunan DIY utamanya bidang Kelautan dan pesisir dan Bidang Perikanan. Dalam rangka pemeliharaan sumber daya dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan, serta peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan, arah kebijakan pembangunan terkait pengelolaan Tujuan 14 Ekosistem Lautan difokuskan pada dua arah kebijakan utama, yaitu: (1) pengelolaan pesisir serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan (2) pengelolaan kawasan konservasi perairan.



Arah kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut: (1) Meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan, termasuk upaya penataan ruang laut dan harmonisasinya; (2) Meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut, termasuk penambahan luasan kawasan konservasi perairan dan penguatan kelembagaan serta

efektivitas pengelolaannya; (3) Mengendalikan IUU fishing dan kegiatan yang merusak di laut (4) Menguatkan peran SDM dan iptek kelautan serta budaya maritime (5) Meningkatkan produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan, termasuk alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, serta penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan;

Program Tujuan 14. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 14 TPB, program yang akan dilaksanakan antara lain: (1) Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2) Pengelolaan Pelabuhan.

Target Indikator Tujuan 14. Target pencapaian indikator Tujuan 14 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Target Pencapaian Indikator Tujuan 14. Ekosistem Lautan

| Kode | Target/Indikator | r Satuan | Baseline | Target Pencapaian | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|
| Indikator | rarget/illulkator | Data | Jatuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| penangkap merusak, s memulihka setidaknya | 4 Pada tahun 2020, pan ikan yang berleb erta melaksanakan an persediaan ikan s ke tingkat yang da ik biologisnya | oihan, pena rencana pe secara layal | ingkapan engelolaai k dalam w | ikan ilegal n berbasis vaktu yang | dan pra ilmu pe paling s | ktek pe ngetahu ingkat y | nangkar Ian, unt Vang me | oan ikar uk mungki | inkan, |
| 14.4.1 | Perikanan Tangkap | Dinas Kelautan dan Perikanan DIY | Ton | 5001,2 | 5817 | 5899 | 5981 | 6063 | 6145 |

| Kode | Target/Indikator | Sumber | Satuan | Baseline | Target Pencapaian | | | | | |
|--|---|--|------------|-----------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|---------|--|
| Indikator | rarget/illulkator | Data | | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Target 14. | 5. Pada tahun 202 | 0, melestari | ikan setid | aknya 10 _l | persen (| dari wila | ayah pe | sisir dar | ı laut, | |
| konsisten yang terse | dengan hukum nas edia | ional dan ir | nternasio | nal dan be | rdasark | an info | masi ilr | niah ter | baik | |
| 14.5.1 | Peningkatan status kawasan konservasi perairan | Dinas Kelautan dan Perikanan DIY | % | N/A | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | |
| Target 14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang | | | | | | | | | | |

Target 14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization

| 14.6.1 | Persentase kawa- san rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan DIY | % | N/A | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
|--------|--|--|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 14.6.2 | Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan | | % | N/A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.

| 14.b.1 | Nilai produksi | Dinas | milyar | N/A | 32,84 | 33,31 | 34,78 | 35,25 | 36,73 |
|--------|------------------|-----------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | ikan yang masuk | Kelautan | rupiah | | | | | | |
| | melalui pelabuh- | dan | | | | | | | |
| | an/ tempat | Perikanan | | | | | | | |
| | pelelangan ikan | DIY | | | | | | | |

P. Tujuan 15 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Daratan



Tujuan 15 TPB adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan eksosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekargaman

hayati. Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 12 target yang diukur melalui 25 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum

2018

bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.



Kebijakan Tujuan 15. Pembangunan kehutanan

pada periode 2017–2022 diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu pengelolaan hutan lestari. Perumusan arah kebijakan pembangunan kehutanan dilakukan berdasar analisis pola pemanfaatan ruang (analisis spasial) di DIY dengan membagi wilayah dalam kawasan-kawasan dengan arah pemanfaatan dan kriteria tertentu. Berdasarkan analisis pemanfaatan ruang, strategi pembangunan kehutanan dititikberatkan pada pembangunan hutan berbasis fungsi hutan yaitu fungsi ekologi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Selanjutnya maka dapat ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Pembaharuan Sistem Tata Kelola Kehutanan. (2) Mempertahankan keberadaan kawasan hutan (3) Pemantapan Kawasan Hutan (4) Perencanaan Kehutanan yang Komprehensif dan berkesinambungan (5) Peningkatan produktifitas dan nilai tambah sumberdaya hutan dan fungsinya (6) Optimalisasi Pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Hutan (7) Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan (8) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan (9) Penguatan Kelembagaan dan SDM Kehutanan (10) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan (11) Peningkatan Kontribusi Kehutanan bagi Keberlanjutan Sektor Perekonomian lainnya (12) Konservasi Keanekaragaman Hayati (13) Peningkatan Manfaat Jasa Ekosistem (14) Peningkatan Peran Hutan dalam Pemulihan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) (15) Rehabilitasi lahan dan pencegahan bencana alam (16) Optimalisasi dan Distribusi Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan.

Program Tujuan 15. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 15 TPB, program yang akan dilaksanakan antara lain: (1) Pengelolaan tutupan vegetasi dan konservasi sumberdaya alam (2) Pengembangan Pembibitan

Kehutanan (3) Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan (4) Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung (5) Pengelolaan Hutan Konservasi

Target Indikator Tujuan 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15. Target Indikator Tujuan 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15

Ekosistem Daratan

| Kode | Target/ | Sumber | Satuan | Baseline | | Tar | get Penca | paian | |
|------------|--|---|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|-------|
| Indikator | | Data | | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| dari ekosi | .1 Pada tahun istem daratan າan basah, peg າ | dan perairar | n darat s | erta jasa l | lingkun | gannya, k | chususnya | a ekosiste | em |
| 15.1.1 | Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ha | 150 | N/A | 160 | 165 | 170 | 175 |
| 15.1.2 | Persentase Penurunan kerusakan hutan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | % | 7,18 | N/A | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| _ | Produksi bibit tanam- an bersertifi- kat yang ditanam (batang) .2 Pada tahun utan, menghe | Kehutanan 2020, menin | gkatkan | - | aan pe | - | n semua j | enis huta | |
| - | itkan secara si | | | | | | - | i dan | |
| 15.2.1 | Persentase kawasan hutan tertata | Dinas Lingkungan | % | 84,12 | N/A | 87,40 | 89,40 | 90,68 | 92,32 |
| 15.2.2 | Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memili- ki sertifikat | | % | 2,00 | N/A | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 15.2.3 | Rasio pemanfaatan sumber daya hutan | | Rasio | 86,57 | 86,60 | 86,62 | 86,64 | 86,65 | 86,66 |

| Kode Target/ | | Sumber | Satuan | Baseline | Target Pencapaian | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|--------|----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Indikator | r Indikator | Data | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 15.2.4 | Persentase | Dinas | % | 75,21 | N/A | 75,86 | 76,62 | 76,97 | 77,09 | | |
| | hutan | Lingkungan | | | | | | | | | |
| | konservasi | Hidup dan | | | | | | | | | |
| | terkelola | Kehutanan | | | | | | | | | |

Q. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh



Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*Peace*), terwujudnya penegakan

keadilan (*Justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (*Strong institutions*). Dalam kaitannya dengan Tujuan 16 nasional ditetapkan 12 target dengan 34 indikator.

Kebijakan Tujuan 16. Tujuan 16 Perdamaian, keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh di DIY difokuskan pada tiga sasaran utama berikut: (1) mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan melindungi; dan (3) menjalankan peran pemerintah dalam pemenuhan hak sipil bagi warga negara terutama perempuan dan anak-anak.

Dalam rangka untuk mencapai ketiga sasaran utama dari Tujuan 16 arah kebijakannya adalah: (1) meningkatkan akses semua perempuan dan anak terhadap pelayanan yang berkualitas dan mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (2) menguatkan sistem perlindungan perempuan dan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan (3) meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak (4) mendorong perempuan untuk ikut aktif terlibat dalam dunia politik (5) meningkatkan kapasitas dan skill perempuan yang berpotensi di dunia politik (6) Mendorong dibukanya kesempatan yang sama bagi perempuan di semua lini kepemimpinan di masyarakat (7) KIE tentang Hak Anak kepada seluruh

stakeholder yang terlibat (8) Koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjalankan pemenuhan Hak Anak.

Program Tujuan 16. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 16 TPB, program yang terkait dengan mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akan dilaksanakan



oleh Pemda DIY adalah: (1) Program Perlindungan Perempuan dan Anak (2) Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Target Indikator Tujuan 16. Target pencapaian indikator Tujuan 16 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16. Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

| Kode | Target/ | Sumber | Satuan | Baseline | | Targe | et Penca | paian | |
|-----------|--|-----------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|
| Indikator | Indikator | Data | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| • | .7 Menjamin pe atif di setiap ti | engambilan kepu ngkatan. | ıtusan ya | ng respon | sif, inkl | usif, pa | rtisipati | f dan | |
| 16.7.1 | Persentase keterwakilan perempuan sebagai peng- ambilan ke- putusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III). | | % | 34,25 | 34,25 | 34,34 | 34,38 | 34,42 | 34,45 |
| 16.7.2 | Indeks Hak- hak Politik. | BPS | Indeks | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Target 16 | .9 Pada tahun 2 | 2030, memberik | an identit | as yang sy | ah bagi | semua | , terma | suk | |

pencatatan kelahiran.

| Kode | Target/ | Sumber | Satuan | Baseline | | Targe | et Penca | paian | |
|------------|---|-------------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| Indikator | Indikator | Data | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 16.9.1 | umur di ba- wah 5 tahun yang kelahir- annya dicatat oleh lembaga pencatatan - sipil, menurut umur. | | | 86,84 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99,9 |
| Target 16. | 10 Menjamin a | ıkses publik terh | adap info | ormasi dar | n melind | dungi ke | ebebasa | n mend | lasar, |
| sesuai den | gan peraturan | nasional dan ke | sepakata | ın internas | ional | | | | |
| 16 10 1 | Jumlah ∩DD | Kominfo | OPD | 30 | 30 | Ω | Λ | Ω | Λ |

| 16.10.1 | Jumlah OPD Pemda DIY yang telah menyusun Draf Infor- masi Publik sebagaimana diatur dalam UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Kominfo | OPD | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|--|---------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| 16.10.2 | Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi | | | | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 |

R. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan



Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh TPB (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/SDGs 17 yang memiliki target nasional dan indikator yang cukup

luas dan beragam dengan 19 target, 25 indikator global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 32 indikator.

Untuk mewujudkan Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan, Pemda DIY didasarkan pada strategi Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui



kerjasama dengan badan usaha/swasta dengan arah kebijakan: (1) Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata (2) Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan investasi masyarakat lainnya.

Program Tujuan 17. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 17 TPB,

program yang akan dilaksanakan antara lain: (1) Program Peningkatan Ekspor dan (2) Pengembangan Ekspor

Target Indikator Tujuan 17. Target pencapaian indikator Tujuan 17 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

| Kode | Target / | Sumber | Satuan | Baseline | | Targ | et Penca | paian | |
|------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|--------|
| Indikator | Indikator | Data | Satuali | Daseillie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Target 17. | 11 Secara s | ignifikan menir | ngkatkar | ekspor da | ari negar | a berker | nbang, k | hususny | a |
| dengan tu | juan menin | gkatkan dua ka | ali lipat p | roporsi ne | egara ku | rang ber | kembang | g dalam e | ekspor |
| global pad | la tahun 20 | 20. | | | | | | | |
| | Nilai | Dinas | Juta | 296,61 | 302,54 | 308,59 | 314,76 | 321,06 | 327,48 |
| | ekspor | Perindustrian | US\$ | | | | | | |
| | | dan | | | | | | | |
| | | Perdagangan | | | | | | | |





Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Bab IV Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan

Tahapan penting dalam upaya pencapaian target-target TPB adalah pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus pelaksanaan pencapaian di tingkat pusat maupun daerah. Pemantauan dan evaluasi program/kegiatan dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan dan dimulai sejak tahap penyusunan rencana aksi, baik di level nasional maupun daerah.

A. Landasan Peraturan

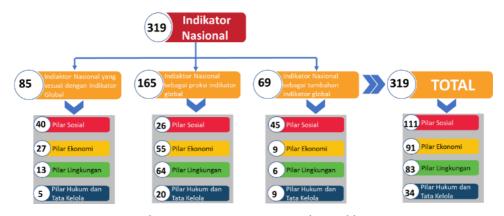
Berdasarkan Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB (khususnya pada pasal 7 butir b), kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah tugas Tim Pelaksanaan TPB/SDGs. Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Sedangkan untuk pemerintah, landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Agar pelaporan pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dapat berjalan komprehensif, keterlibatan organisasi nonpemerintah -seperti organisasi kemasyarakatan, media, pelaku usaha, filantropi serta akademisi- memiliki peran yang penting dan dapat dilaksanakan menggunakan mekanisme tersendiri.

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Tujuan pemantauan adalah memonitor perkembangan pencapaian TPB/SDGs secara periodik. Kegiatan dilakukan untuk menilai kemajuan pencapaian target berdasarkan indikator yang telah disahkan sekaligus mengidentifikasi dan mengantisipasi hambatan/persoalan menghambat pencapaian target. Sehingga dapat diambil kebijakan maupun untuk mengatasi persoalan sedini mungkin kompleksitasnya bertambah. Tujuan evaluasi dimaksudkan memberikan gambaran tentang tingkat capaian TPB/SDGs dan memberikan analisis terkait masalah/hambatan serta faktor penyebabnya. Secara ideal, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik/masukan yang tepat untuk penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan yang secara khusus terkait TPB/SDGs.

2. Lingkup Pemantauan dan Evaluasi.

Ruang lingkup TPB/SDGs meliputi 17 tujuan global dan 49 target daerah yang seluruhnya terkait dengan target nasional yang telah diselaraskan dengan RPJMD DIY Tahun 2017–2022. Setiap target dilaksanakan oleh OPD dan Lembaga pelaksana yang pencapaiannya diukur dengan 126 indikator. Secara menyeluruh, Tujuan, Target dan Indikator dikelompokkan ke dalam empat pilar (gambar 4.1). Lingkup Pemantauan dan evaluasi terhadap tujuan, target dan indikator TPB/SDGs harus dilakukan secara menyeluruh pada programprogram baik yang oleh APBN maupun APBD.

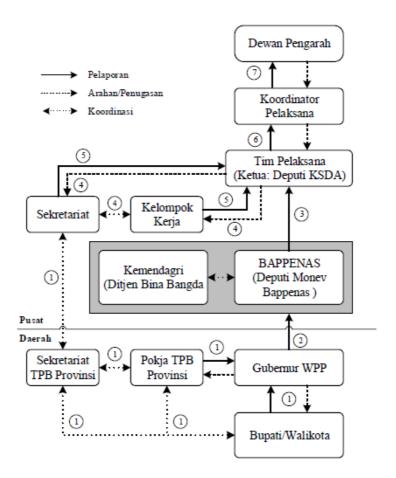


Gambar 4.1. Tujuan, Target dan Indikator

B. Mekanisme Pemantauan RAD

Berdasarkan Perpres 59/2017 pada pasal 15 ayat 1, daerah diamanatkan menyusun RAD dalam rangka pencapaian TPB/SDGs. Saat penyusunan, gubernur bekerja bersama dengan bupati/walikota di wilayahnya dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak lainnya. Pada pasal 17 ayat 2 Perpres 59/2017, mengamanatkan gubernur untuk menyampaikan Laporan tahunan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri.

Alur pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti mekanisme (Gambar 4.2) sebagai berikut:

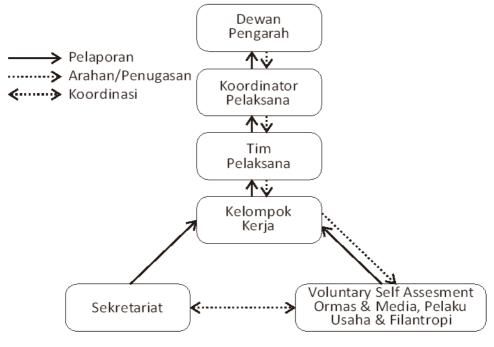


Gambar 4.2. Alur Pemantauan RAD

- 1. **Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melakukan koordinasi pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) setiap enam bulan sekali. Koordinasi dilakukan terkait program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGs Provinsi kemudian melaporkan capaian RAD kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs pusat (Langkah 1).
- 2. **Gubernur** sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) menyampaikan laporan progress pencapaian TPB/SDGs sesuai format yang berlaku kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS. Laporan juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2).
- 3. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS kemudian menyampaikan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (Langkah 3).
- 4. **Ketua Tim Pelaksana** mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).
- Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5).
- 6. **Ketua Tim Pelaksana** melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Nasional (Langkah 6).
- 7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017 (Langkah 7).

C. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pihak NonPemerintah

Berbeda dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi rencana aksi program/kegiatan pemerintah, mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah dilakukan menggunakan mekanisme "penilaian diri sukarela" (voluntary self assesment). Pihak nonpemerintah meliputi organisasi kemasyarakatan, media, pelaku usaha, filantropi, serta akademisi. Perbedaan ini disebabkan karena program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (voluntary), sehingga mekanisme pelaporannya pun bersifat sukarela. Sebagai catatan, meskipun bersifat sukarela, pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan format laporan melalui self assesment tool (SAT) yang disepakati.



Gambar 4.3 Alur Pelaporan

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkahlangkah berikut:

- Organisasi nonpemerintah melakukan voluntary self assessment terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai format self assessment tool. Laporan ini kemudian disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar yang terkait dan ditembuskan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs kemudian bertugas mengkompilasi laporan dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (Langkah 1).
- 2. **Kelompok Kerja** dibantu oleh Sekretariat SDGs selanjutnya menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 2).
- 3. **Ketua Tim Pelaksana** kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana (Langkah 3).
- 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (Langkah 4).

Mekanisme evaluasi bagi organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc.* Forum ini merupakan panel independen dan nirkepentingan. Kelembagaan forum terdiri dari anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

C. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 2018-2022

Jadwal Pemantauan dan evaluasi pencapaian TPB/SDGS 2018-2022 dilaksanakan berdasarkan Perpres 59/2017 Pasal 20. Pasal ini mengatur tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Enam bulan setelah Perpres 59/2017 berlaku, atau tepatnya 10 Januari 2018, Rencana Aksi Nasional 2017-2019 harus dapat disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGS kepada Presiden

RI. Untuk tingkat daerah, RAD harus dilaporkan setelah satu tahun setelah Perpres 59/2017 diundangkan. Batas waktu penyerahan RAD TPB/SDGS provinsi adalah 10 Juli 2018. Perpres 59/2017 kemudian mengamanatkan agar *roadmap*/Peta Jalan TPB/SDGS 2017-2030 harus sudah selesai 12 bulan setelah Perpres 59/2017 diundangkan.

Sesuai dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan, pemantauan RAN dilakukan pada bulan Juli 2018 dan pemantauan RAD akan dilakukan pada Januari 2019 (atau bersamaan dengan pemantauan/evaluasi tahunan RAN). Laporan pemantauan dari Kementerian dan Lembaga serta dari Gubernur disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan.

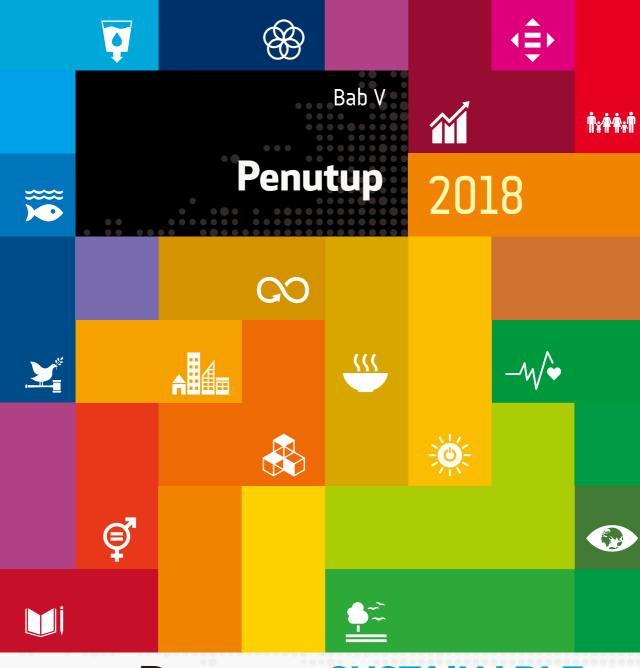


Gambar 4.4. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi



D. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik dilakukan melalui laman sdgs.BAPPENAS.go.id yang dipersiapkan oleh Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dan dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGS. Laman ini akan terus dikembangkan untuk dapat mengakomodir muatan yang dihasilkan dari pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia. Publikasi hasil pemantauan dan evaluasi TPB/SDGS di DIY dilakukan melalui media massa.



Rencana Aksi Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan





Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disusun dan berisi aksi-aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemda dan nonpemerintah secara bersama-sama. TPB berpegang pada prinsip integrasi dan *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi untuk pencapaian target setiap indikator TPB di daerah.

Prinsip integrasi dalam TPB menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/*Goal* tertentu menentukan keberhasilan dari Tujuan/*Goal* lainnya. Keterkaitan antar tujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB, yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Maka, mekanisme pemantauan yang inklusif diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh Pemda maupun nonpemerintah.

Pelaksanaan RAD TPB memerlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Perluasan Penggunaan Teknologi. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi. Teknologi informasi juga berfungsi mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB. Baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, Pemda, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB.

Kemitraan Multipihak. Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global dan nasional, juga diterapkan di tingkat daerah (DIY). Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB di tingkat daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemda, filantropi dan pelaku usaha, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya perwakilan setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB. Kemitraan ini memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB secara bersama. Termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (online) dan luring (offline).

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian TPB mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB di tingkat nasional dan daerah. Kementerian PPN/BAPPENAS di tingkat pusat dan BAPPEDA di tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB.

Dalam aspek **kerangka hukum**, koordinasi koheren ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB) di tingkat nasional dan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota di tingkat daerah. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB serta hubungan antara pemerintah pusat, Pemda dan organisasi nonpemerintah.

Terkait aspek **kelembagaan**, telah ditetapkan organisasi Tim Koordinasi TPB di tingkat daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 124/TIM/2018 tentang Tim Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TPB Daerah yang melibatkan peran dan posisi, baik wakil pemerintah maupun wakil organisasi nonpemerintah, serta tata cara kerjanya.

Dalam aspek **substansi program**, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB. Dalam aspek **pendanaan** perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana Pemda (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Peningkatan Kapasitas. Untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB di tingkat pusat dan daerah diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Organisasi Pemda (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak. Penghargaan diberikan kepada Pemda kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh Tim Koordinasi TPB.

Strategi Komunikasi. Agar TPB menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi.

2018

Pemutakhiran Dokumen. Dokumen RAD TPB merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak Pemda dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (*online*) dan luring (*offline*). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

Yogyakarta, 10 Juli 2018

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



Rencana **Aksi Daerah**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan





| Buku Status Lingkungan Hidu | ıp DIY (SLHD) Tahun 2011 |
|-----------------------------|--------------------------|
| | Tahun 2012 |
| | Tahun 2013 |
| | Tahun 2014 |
| | Tahun 2015 |
| | Tahun 2016 |

Dokumen SNI No.8357 Tahun 2017 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana

http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/kemiskinan/166-pengukuran-kemiskinan-sebuah-pendekatan-ekonomi

Hyogo Framework for Action 2005-2015

Inpres No.6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Perda DIY No.10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY

Perda DIY No.2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Raung Wialayah DIY Tahun 2009-2029

Perda DIY No.2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Perda DIY No.3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

- Perda DIY No.3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Perda DIY No.3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Perda DIY No.5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Perda DIY No.8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana
- Perka BNPB No.01 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Perka BNPB No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
- Perka BNPB No.04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Perka BNPB No.10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana
- Perka BNPB No.11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Perka BNPB No.12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Perka BNPB No.13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana
- Perka BNPB No.14 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana
- Perka BNPB No.14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dam Penanggulangan Bencana
- Perka BNPB No.15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
- Perka BNPB No.17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

- Perka BNPB No.21 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pembelajaran dan Pertukaran Ilmu Pengetahuan (Knowledge Sharing) Serta Pengalaman Penanggulangan Bencana
- Perka BNPB No.4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana
- Permen Desa PDTT No.22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Permen Desa PDTT No.5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Perpres No.17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
- PP No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Ravallion, M.1998. Poverty Lines in Theory and Practice, Living Standards Measurement Study Working Paper No.133, World Bank.
- Sen, A. 1999. Development as Freedom. New York.
- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
- Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan: Kontekstualisasi Indonesia. 2015: Kemensos, UNICEF, Wahana Visi Indonesia.
- Supadi dan Nurmanaf, A.R. 2004. *Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Pedesaan dan Kaitannya dengan Tingkat Kemiskinan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- The Sphere Project: Humanitarian Minimum Standards in Humanitarian Response, Edisi Bahasa Indonesia, 2012: MPBI Jakarta.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No.23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

World Bank Institute. 2005. *Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual*. World Bank Institute.



Rencana Aksi Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Matrik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's Kabupaten Bantul

TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN

| Kode | | | | Baseline | | Target Pe | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|---------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Indikator | Indikator RAD | Sumber Data | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| Target 1.2. P | Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional | า anak-anak dari se | emua usia, yang hidu | p dalam kemiski | nan di semua | dimensi, sesu | ai dengan def | inisi nasional. | |
| 1.2.1 | Tingkat kemiskinan daerah | Din sos P3A | % | 14 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.50 | DinsosP3A |
| 1.2.2 | Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam herbapai dimensi, sesurai dengan definisi nasional | DinsosP3A | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DinsosP3A |
| Target 1.3. N | | mua, termasuk ke | slompok yang paling r | miskin, dan pada | a tahun 2030 r | mencapai caku | upan substans | ial bagi kelom | pok miskin dan rentan |
| 1.3.1 (a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan | Dinsos | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinsos |
| 1.3.1 (b) | Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketengakerjaaan | Disnakertrans | formal (%) | 70 | 72 | 74 | 9/ | 80 | Disnakertrans |
| | | | informal (%) | 20 | 52 | 54 | | 58 | |
| 1.3.1 (c) | Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak | Dinsos | % | 10 kegiatan | 10 kegiatan | | | | Dinsos |
| | dasar dan inkusifnya | Dinsos | orang | 576 orang | 576 orang | 576 orang | 576 orang | 576 orang | |
| 1.3.1. (d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH | Dinsos | jiwa | | 67585 | 00059 | 62000 | 00009 | Dinsos |
| Target 1.4. P | Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelatanan dasar, kepemilikan, dan | niskin dan rentan | memiliki hak yang sa | ma terhadap su | mber daya ek | onomi serta ak | kses terhadap | pelatanan da | ar, kepemilikan, dan |
| kontrol atas | kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumberdaya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro | jasa keuangan ya | ng tepat termasuk ke | uangan mikro | | | | | |
| 1.4.1. (a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan Dinkes terakhirnya di fasilitas kesehatan | Dinkes | % | 97.5 | 97.5 | 97.63 | 97.63 | 98.00 | Dinkes |
| 1.4.1. (b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap | Dinkes | % | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinkes |
| 1.4.1. (c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin | DPPKBPMD | % | 76,4% | %9'92 | 76,8% | 77.00% | 77,2% | DPPKBPMD |
| 1.4.1. (d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air | DPPKBPMD | % | 32,6% | 39,80% | 47.00% | 54,2% | 54,2% | DPPKBPMD |
| | minum layak | | | | | | | | |
| 1.4.1. (e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | DPPKBPMD | % | % | 0.61% | 0.45% | 0.29% | 0.13% | DPPKBPMD |
| 1.4.1. (f) | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan | DPUPKP | % | 0.61% | 0.45% | 0.29% | 0.13% | %00.0 | DPUPKP |
| 1.4.1. (g) | APM SD/MI/sederajat | Disdikpora | % | 88,25 | 84,45 | 84,55 | 84,65 | 84,75 | Disdikpora |
| 1.4.1. (h) | APM SMP/MTS/sederajat | Disdikpora | % | 77,01 | 6,79 | 89 | 68,2 | 68,22 | Disdikpora |
| 1.4.1. (i) | Persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran | Disdukcapil | % | 91,74 | 93.00% | 94.00% | 92.00% | %00.96 | Disdukcapil |
| 1.4.1. (j) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN | Dinsos/DPUPKP | % | | | | | | Dinsos/ DPUPKP |
| Target 1.5. P | i arget 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miuskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekosnomi, sosial, | da dalam kondisi | rentan, dan mengura. | ngi kerentanan | mereka terhac | dap kejadian e | kstrim terkai | t iklim dan gur | cangan ekosnomi, sosial, |
| lingkungan, | lingkungan, dan bencana | | | | | | | | |
| 1.5.1. (a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah | BPBD | lokasi | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | врво |
| 1.5.1. (b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial | BPBD | jiwa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPBD |
| 1.5.1. (c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial | Dinsos | jiwa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPBD |
| 1.5.1. (d) | Kajian resiko bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana | BPBD | kajian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPBD |
| Target 1.a. N | Farget 1.a. Menajmin mobilitas yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara | suk melalui kerjas | ama pembangunan y | ang lebih baik u | intuk menyed | iakan sarana y | ang memada | i dan terjangka | au bagi negara |
| berkembang | berkembang, khsusunya negara kurang berekmbang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi | n mengakhiri kem | iskinan di semua dim | ensi | | | | | |
| 1.a.1 | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan | Bappeda | rupiah | | | | | | Bappeda |
| 1.a.2. | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan engial) sebagai percentasa dari total belanaia pemerintah | Bappeda | rupiah (fungsi | | | | | | Bappeda |
| | sosiai) sebagai persentase dan totai belanaja pernemitan | | periorial (funda) | | | | | | |

rupiah (fungsi pendidikan) rupiah (fungsi kesehatan)

| | ı |
|----|---|
| _ | I |
| ₹ | I |
| Ä | I |
| Αb | I |
| 茰 | I |
| Ā | I |
| Š | I |
| ₹ | |
| 7 | I |
| ş | I |
| ⊇ | I |
| 덛 | |

| Kode Indikator Target 2.1. Pad | ator Indikator RAD | Sumber Data | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 2020 | 2021 | _ Penanggungjawab Pelaksana |
|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------------|--------------------------------|
| Target 2.1. | and a comment in a constant in | and eveniends | den den en en en en | | | 1 1 | opodood | | |
| sepanjang tahun | l arget Z.1. Pada tahun 2030, mengnilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, knususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, temadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun | g, Kilususinya orang | g miskin dan mereka | ı yang berada dalam | kondisi rentan | ı, termasuκ ι | oayı, ternaua | p makanan y | yang aman, bergizi, dan cuk |
| 2.1.1. | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan | Diperpautkan | % | 2017 | | | | | Diperpautkan |
| | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Desa Mandiri Pangan | | | | | | | | |
| 2.1.1. (a) | Prevalensi kekurangan gizi pada anak Balita | Dinkes | % | 11.80% | 11.70% | 11.60% | 11.50% | 11.40% | Dinkes |
| 2.1.2. | Prevalensi penduduk dengan kerwanan pangan sedang atau berat | Diperpautkan | % | 2017 | | | | | Diperpautkan |
| | berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan Persentase kerukunan air irigasi | | | | | | | | |
| 212 (a) | Proporti pendiduk dengan asunan kalori minimum di hawah | # | | 2017 | | | | | Dinkes |
| (b) | 1400kkal/kapita/hari | ŧ | | | | | | | |
| Target 2.2. | Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasioanl untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun dan memenuhi | hun 2025 mencapa | ni target yang disepa | kati secara internasio | oanl untuk ana | ak pendek da | an kurus di b | awah lima ta | ahun dan memenuhi |
| kebutuhan | kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan | substansial bagi ke | lompok miskin dan | rentan | | | | | |
| 2.2.1 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak Balita | Dinkes | % | 11.80% | 11.70% | 11.60% | 11.50% | 11.40% | Dinkes |
| 2.2.1. (a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak Baduta | Dinkes | % | | | | | | Dinkes |
| 2.2.2. | Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) amak pada usia | Dinkes | % | 100.00% | 82.00% | %00.06 | %00.06 | %00.06 | Dinkes |
| | Kulangualio taliun | | , , | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,000 | - |
| 2.2.2. (a) | Prevalensi anemia pada ibu namili | Dinkes | % % | 16.32% | | 19.40% | 19.30% | 19.20% | UINKes |
| 2.2.2. (b) | Presentase bayl usia Kurang dari 6 bulan yang mendapatkan Asi ekskiusir | Dinkes | % | 74.27% | //.00% | /8.00% | /9.00% | 80.00% | Dinkes |
| TUJUAN 3 | TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA | | | | | | | | |
| | | | | | | T | Tarret Doncar | | description |
| Kode Indikato | stor Indikator RAD | | Sumber Data | Satuan | 6 | 2018 2019 | 3et reincapaiai | 2021 | Pelaksana |
| Target 3.1. | Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hiduo. | 100.000 kelahiran | hidup. | | 3 | | | | |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | | Se | | 87.5 | 87.5 | 85 | 82 | Dinkes |
| 3.1.2* | Propose perempian perpah kawin umir 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya | evalhira | Dinkes % | | 10.0 | | 001 | 100 | Dinkes |
| 3.1.2 | ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | מומצווווי) מ | | | 001 | | | 001 | Dilkes |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | ın terakhirnya di | Dinkes % | | 100% | 4 100% | 100% | 100% | BPS. Dinkes |
| Target 3.2. | Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan | ah, dengan seluruł | h negara berusaha n | nenurunkan Angka Ke | ematian Neon | atal setidakr | nya hingga 12 | per 1000 KH | H (Kelahiran Hidup) dan |
| Aligna hell | | | | | | | | | |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | (AKBa) per 1000 | Dinkes ke | kematian per 1000 kelahiran hidup | ınıran 8.20% | 8.20% | 8.00% | 8.00% | Dinkes |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | | Dinkes ke | kematian per 1000 kelahiran hidup | ıhiran - | | | | Dinkes |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) | | Dinkes ke | kematian per 1000 kelahiran | ıhiran 8.20% | % 8.20% | %00.8 % | 8.00% | Dinkes |
| | per 1000 kelahiran hidup. | | Ä | hidup | | | | | |
| Target 3.3. | Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | opis yang terabaik | an, dan memerangi | hepatitis, penyakit be | ersumber air, s | serta penyak | kit menular la | iinnya. | |
| 3.3.1* | Angka Infeksi Baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV | | Dinkes % | | <0,3 | <0,2 | <0,1 | <0,1 | Dinkes |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | | Dinkes % | | | | | | Dinkes |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk | | Dinkes % | | 70.00% | %00.07 %0 | %00.07 %0 | 20.00% | |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1.000 orang | | Dinkes | | | | | | Dinkes |
| 3.3.4* | Insiden hepatitis B per 100.000 penduduk | | Dinkes | | | | | | Dinkes |
| 3.3.5(a) | Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati | | Dinkes | | | | , | | Dinkes |
| 3.3.5(c) | Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis 100% | | Dinkes | | | | | | Dinkes |
| Target 3.4. | Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan | it tidak menular m | elalui pencegahan (| lan pengiobatan sert | a meningkatka | ın kesehataı | n mental dan | kesejahtera | |
| 3.4.1. (a) | jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa | | Dinkes pu | puskesmas | | | | | Dinkes |
| 3.4.1(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi | | | | | | | | Dinkes |

| todilon obovi | C V C market librari | oto C. sodowich | | | Target Pe | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|---------------|---|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| Node Indikato | | Sumber Data | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| 3.4.1(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18 tahun | | | | | | | Dinkes |
| 3.4.1(d) | Persentase perempuan usia 30 -50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara | | | | | | | Dinkes |
| 3.4.2* | Angka Kematian dari Percobaan Bunuh Diri | | | | | | | Dinkes |
| Target 3.5. N | Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan | dan pengguna | an alkohol yang membahayakan | | | | | |
| 3.5.1(a) | Jumlah penyalahgunaan Narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di Fasyankes | BNN | orang | | | | | Dinkes |
| 3.5.1(b) | Jumlah yang menyelesaikan program rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Dinsos | orang | 45 | 20 | 55 | 09 | Dinkes |
| 3.5.1(c) | Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. | Dinsos | orang | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | Dinkes |
| 3.5.1(d) | Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai | | | | | | | Dinkes |
| | standar pelayanan | | | | | | | |
| 3.5.2* | Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk usia≥15 tahun dalam satu tahun terakhir | | | | | | | Dinkes |
| Target 3.6. P | Target 3.6. Pada tahun 2030, menjamin akses universal tergadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk keluarga berencana informasi dan pendidikan dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program | asuk keluarga | perencana informasi dan pendidil | kan dan inte | grasi keseh | atan repro | duksi ke dal | am strategi dan program |
| nasional | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan | DPPKBPMD | % | | | | | DPPKBPMD |
| | keluarga berencana dan menggunakan alkon metode modern | | | | | | | |
| 3.7.1. (a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS | DPPKBPMD | % | 72,02% | 72,02% | 72,01% | 72,01% | DPPKBPMD |
| 3.7.1. (b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi MKJP | DPPKBPMD | % | 34,28% | 34,29% | 34,30% | 34,30% | DPPKBPMD |
| 3.7.1. © | ASFR | DPPKBPMD | kelahiran per 1000 perempuan | 27 | 56 | 25 | 24 | DPPKBPMD |
| 3.7.1. (d) | ТFR | DPPKBPMD | LS-49 tanun jumlah anak perWUS | 2,09 | 2,08 | 2,07 | 2,06 | DPPKBPMD |
| Target 3.8. N | Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatn universal termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan | ınan kesehatar | dasar yang baik, dan akses terha | dap obat-ol | oatan dan v | aksin dasar | yang aman | , efektif, berkualitas, dan |
| terjangkau k | terjangkau bagi semua orang | | | | | | | |
| 3.8.1. (a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | Dinsos | % | | | | | Dinkes, Dinsos |
| 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk | | | | | | | Dinkes |
| 3.a Memper | 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. | ıgkah yang tep | £. | | | | | |
| 3.a.1 | Persentase merokok pada penduduk usia ≥15 tahun | | | | | | | Dinkes |

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

| Kode | CAC and collect | active Date Canadamica | Baseline | | arget | l arget Pencapalan | | Penanggungjawab |
|---------------------|---|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Indikator | | Sumper Data Satu | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 2019 2020 2021 | Pelaksana |
| Target 4.1. | araget 4.1. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang | ar dan menengah tanp | a dipungut biay | a, setara, dan | berkualitas, | yang mengar | ah pada capaia | ın pembelajaran yang |
| relevan dan efektif | n efektif | | | | | | | |
| 4.1.1* | Proporsi anak-anak/anak muda: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ | | | | | | | |
| | kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika, menurut | | | | | | | |
| | jenis kelamin | | | | | | | |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | Disdikpora % | 97,73 | 96,2 | 86,3 | 96,4 | 96,5 | Disdikpora |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | Disdikpora % | 92'66 | 95,2 | 95,25 | 95,3 | 96 | Disdikpora |
| 4.1.1.(g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun | Disdikpora Tahun 9,4 | 9,4 | 8,89 | 8,94 | 8,99 | 6 | Disdikpora |
| Target 4.2. | Target 4.2. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah yang berkualitas, sehingga mereka | mbangan dan pengasu | han anak usia d | ini, pengasuha | n, pendidik | an pra sekola | h yang berkuali | itas, sehingga mereka |
| siap untuk | iap untuk menempuh pendidikan dasar. | | | | | | | |
| 4.2.2.(a) | 3.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Disdikpora % 108,68 98,8 98,85 98,9 98,95 Disdikpora | 108,68 | 8,86 | 98,85 | 6'86 | 98,95 | Disdikpora |
| 4.4 Pada ta | 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan | n yang relevan, termas | uk keterampilar | n teknik dan ke | juruan, unt | uk pekerjaan | , pekerjaan yan | g layak dan |

Proporsi remaja/dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menurut tipe Disdikpora

keterampilan.

kewirausahaan. 4.4.1* di (4) Perguruan Tinggi

| Kode | And makes libert | of and | 100 | Baseline | | Target P | Farget Pencapaian | | Penanggungjawab |
|----------------|--|--|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-----------------|
| Indikator | Indinator NAD | Sumper Data Satuan | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| | Rasio APM di SD/MI/sederajat | Disdikpora % | | 88,25 | 84,45 | 84,55 | 84,65 | 84,75 | Disdikpora |
| | Rasio APM di SMP/MTs/sederajat | Disdikpora | % | 77,01 | 6,79 | 89 | 68,2 | 68,22 | Disdikpora |
| Target 4.6. Pa | get 4.6. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-lak | i maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi | puan, men | niliki kemamp | uan literasi | dan numeras | | | |

| ~ |
|-----|
| PER |
| ۵ |
| z |
| 픙 |
| v |
| z |
| ۹ |
| ≤ |
| ₹ |
| ₽ |
| įų, |
| S |
| ☲ |
| |
| 'n |
| z |
| ⊴ |
| 2 |
| 3 |
| F |

| ODOAN 5. | IOJOAN S. NESELAKAAN GENDER | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| Kode | | of and and and | 1 | Baseline | | Target Po | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
| Indikator | Indikator KAD | sumper Data | satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| Target 5.1. | Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. | | | | | | | | |
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | Dinsos | Desa | | 3 desa | 4 Desa | 5 Desa | 6 Desa | Dinsos |
| Target 5.2.1 | Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. | li, termasuk perda | gangan orang dan eks | ploitasi seksua | al, serta berb | agai jenis e | ksploitasi la | innya. | |
| 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami | Dinsos | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinsos |
| | kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir | | | | | | | | |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | Dinsos | % | | | | | | Dinsos |
| 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami | Dinsos | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinsos |
| | kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | | | | | | | | |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Dinsos | Dinsos | % | | 20 | 20 | 30 | 30 | Dinsos |
| Target 5.3. I | Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. | aksa, serta sunat p | eremp uan. | | | | | | |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama Dinsos | Dinsos | % (sebelum umur 15 15 desa | 15 desa | 15 desa | 15 desa | 15 desa | 15 desa | Dinsos |
| | sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | | tahun) | | | | | | |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | Dinsos | Tahun | | | | | | Dinsos |
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | # | kelahiran per 1000 | | | | | | # |
| | | | perempuan umur 15- | | | | | | |
| | | | 19 tahun | | | | | | |
| Target 5.5. I | Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. | mimpin di semua | ingkat pengambilan | keputusan dal | am kehidupa | n politik, el | tonomi, dan | masyaraka | ئە |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah dan pemerintah daerah. | Setwan | % | 9,9 | 9'9 | 9'9 | | | Setwan |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | BKPP | % | 40 | | | | | ВКРР |
| Target 5.6. I | Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesebatan seksual dan reproduks, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development | erti yang telah dise | pakati sesuai dengan | Programme o | of Action of th | e Internatio | onal Confere | ance on Pop | ulation and Development |
| and the Beij | and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. | | | | | | | | |
| *** | Drongeri noromanian immir 15 40 tahun yang mamhirat banuturan candiri tarkait huhungan Diakar | Distro | /6 | | | | | | Diskor Dobydown |

5.6.1*

| 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan Dinkes, | Dinkes, | % | | | | | | Dinkes, DPPKBPMD |
|-------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | DPPKBPMD | | | | | | | |
| 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | DPPKBPMD | % | 8,42% | 8,42% | 8,45% | 8,39% | 8,37% | DPPKBPMD |
| 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi | DPPKBPMD | % | 8,42 | 8,42 | 8,4 | 8,39 | 8,37 | DPPKBPMD |
| | modern. | | | | | | | | |
| 5.6.2* | Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 DPPKBPMD | DPPKBPMD | Dokumen | 09 | 63 | 65 | 29 | 70 | DPPKBPMD |
| | tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | dan reproduksi. | | | | | | | | |
| 5.a Melakul | 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber | ni, serta akses te | erhadap kepemilikan d | lan kontrol ata | as tanah dan l | oentuk kepe | emilikan lair | n, jasa keuar | gan, warisan dan sumber |
| daya alam, | daya alam, sesuai dengan hukum nasional. | | | | | | | | |
| 5.a.2* | Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan | | | | | | | | |

Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol

| | Kominfo | |
|--|---|--|
| unikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. | ninfo % | |
| i. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komu | Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam. | |
| Target 5.h | 5.b.1* | |

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

| sotolibal obox | O A G mode cilibrat | Carolania Carolania | 201403 | (710c) cailosed | | Target P | Target Pencapaian | | control of descriptions |
|------------------|--|------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|---------------------|------------|------------------------------|
| NOUE III GIRALOI | | online Data | Satuali | paseillie (2017) | 2018 | 2019 | 2018 2019 2020 2021 | 2021 | 1 |
| Target 6.1. Pada | Target 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua | dan terjangkau bag | isemua | | | | | | |
| 6.1.1(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum Dinkes | Dinkes | % | | | | | | Dinkes |
| | layak | | | | | | | | |
| Target 6.2. Pada | i arget 6.2. Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum | nerata bagi semua, | dan menghentikan | praktik buang air be | sar tempa | t terbuka, | nemberika | n perhatia | n khusus pada kebutuhan kaum |
| perempuan, sert | perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | | | | | | | | |
| 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air | # | | | | | | | # |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | Dinkes | % | | | | | | Dinkes |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | Dinkes | desa/kelurahan | 4 | 15 | 27 | 40 | 54 | Dinkes |
| | (STBM) | | | | | | | | |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | Dinkes | desa/kelurahan | 50,3 % | % 8′05 | 51,3% | 50,8% 51,3% 51,8% | 52,3 % | Dinkes |
| 6.2.1.(f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat | # | % | | | | | | # |

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

| soft of or | C < G >< 400 F = 1 | Cachen. 2 | 201403 | (700C) caileag | | Target Pen | capaian | | Target Pencapaian Paramarana Paramarana Paramarana Palaksana |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|------|------------|---------|------|--|
| Node Illumatol | | Sulline Data | | paseille (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 1021 | relialigguilgjawab relansalia |
| Target 7.1. Pada Ta | rarget 7.1. Pada Tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern | terjangkau, andal dar | modern | | | | | | |
| 7.1.1* | Rasio elektrifikasi | PLN | % (bersen) | | | | | | |
| 7.1.1.(a) | Konsumsi listrik per kapita | PLN | kWh | | | | | | |
| 7.1.2.(a) | Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga* DPUPKP | DPUPKP | SR (Sambungan Rumah Tangga) | | | | | | |
| Target 7.2. Pada Ta | Target 7.2. Pada Tahun 2030, meningkatkan secara substasial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global | erbarukan dalam bat | ıran energi global | | | | | | |
| 7.2.1* | Bauran energi terbarukan | DPUPKP % (Persen) | % (Persen) | | | | | | |
| Target 7.1. Pada Ta | farget 7.1. Pada Tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat | global sebanyak dua | kali lipat | | | | | | |
| 7.3.1* | Intensitas energi primer | DPUPKP | DPUPKP SBM (Setara Barrel Minyak) | | | | | | |

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

| - Frank | | 4.0 | 1 | (1,000) | | Target Pencapaian | paian | | Penanggungjawab |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| Kode Indikator | or indikator KAD | Sumber Data | satuan | Baseline (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| Target 8.1 Mem | Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang | si nasional dan, khususnya, | , setidaknya 7 p | ersen pertumbuhan | produk domest | ik bruto per tah | un di negara k | urang berkemb | ang |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita | Bappeda | % (Persen) | | | | | | |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita | Bappeda | Juta Rupiah | | | | | | |
| 8.2 Mencapai ti | 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. | eningkatan dan inovasi tel | knologi, termas | uk melalui fokus pa | da sektor yang n | nemberi nilai taı | nbah tinggi da | n padat karya. | |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDR riil ner orang bakeria ner tahun | Bappeda | % (Persen) | | | | | | |
| Target 8.3 Mens | Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangan pang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kedi, dan | ktif, penciptaan lapangan k | erja layak, kev | irausahaan, kreativi | tas dan inovasi, | dan mendorong | formalisasi da | an pertumbuha | n usaha mikro, kecil, dan |
| menengah, tern | menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | | | | | | | | |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, | Disnakertrans | % (Persen) | 80 | 82 84 | | 8 98 | 88 Dis | Disnakertrans |
| | berdasarkan jenis kelamin | | | | | | | | |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal | Disnakertrans | % (Persen) | 22.0 | 25 27 | | 30 3 | 32 Dis | Disnakertrans |
| 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian | Disnakertrans | % (Persen) | 19 | 21 23 | | 25 2 | 27 Dis | Disnakertrans |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke | KUKMP | % (Persen) | | 5% 5% | | 5% 2 | 5% KU | KUKMP |
| | layanan keuangan | | | | | | | | |
| Target 8.5 Pada | Farget 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang | yang layak bagi semua per | empuan dan la | ki-laki, termasuk bag | gi pemuda dan p | enyandang difa | bilitas, dan up | ah yang sama u | ıntuk pekerjaan yang |
| sama nilainya. | | | | | | | | | |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja | Disnakertrans | Rupiah | 7891 | 8579 88 | 8867 | 6339 | 9963 Dis | Disnakertrans |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur | Disnakertrans | % (Persen) | | | | | Dis | Disnakertrans |
| | | | | | | | | | |

| 4-11-71 | | 4 | | react, see House | | Target F | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| kode Indikator | Indikator KAD | Sumper Data | Satuan | paseline (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| 8.5.2.(a) | Persentase setengah pengangguran | Disnakertrans | % (Persen) | | | | | | Disnakertrans |
| Target 8.6 Pada | farget 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. | ang tidak bekerja, tidak me | nempuh pendidik | an atau pelatihar | | | | | |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja Disnakertrans | rja Disnakertrans | % (Persen) | | | | | | Disnakertrans |
| | atau mengikuti pelatihan (NEET) | | | | | | | | |
| Target 8.9 Pada | Farget 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal | promosikan pariwisata berk | elanjutan yang m | enciptakan lapan | gan kerja dan r | nempromosika | n budaya dan p | rod uk lokal. | |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB | Bappeda | % (Persen) | | | | | | Bappeda |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara | Dispar | Orang | 12.500 | 15000 | 18300 | 22200 | 27500 | Dispar |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | Dispar | Orang | 3393185 | 3629083 | 4427481 | 5446111 | 6753206 | Dispar |
| 8.9.1.(c) | Jumlah pendapatan retribusi sektor pariwisata | Dispar | Juta Rupiah | 2% | %8 | 11% | 14% | 17% | Dispar |
| 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap Disnakertrans , | lap Disnakertrans / | % (Persen) | | | | | | Disnakertrans / Pariwisata |
| | total pekerja | Pariwisata | | | | | | | |
| Target 8.10 Men | Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. | ng dan memperluas akses te | erhadap perbanka | ın, asuransi dan ja | isa keuangan b | agi semua. | | | |
| 8.10.1* | a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa | BKAD | Unit | | | | | | BKAD |
| 8.10.1* | b. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa | BKAD | Unit | | | | | | BKAD |
| 8.10.1.(a) | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) | BKAD | Km | | | | | | BKAD |
| 8.10.1.(b) | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit | KUKMP | % (Persen) 5 | 2 | ∞ | 11 | 14 | 17 | KUKMP |
| 8.B Pada tahun 2 | .B Pada tahun 2030, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization. | untuk ketenagakerjaan pem | uda dan menera | okan the Global Jo | bs Pact of the | International La | bour Organizat | tion. | |
| 8.B.1.2 | Jumlah peserta Program SJSN Ketenagakerjaan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

| | COCAN STREET, INC. AND EAST TO THE COLOR OF | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|---|
| Application of | | | 400 | | (F.100) | | Target P | Target Pencapaian | | 400000000000000000000000000000000000000 |
| Node Indikator | יסי | | Sumper Data | Satuan | (/TOZ) auliaspq | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fenanggungjawan Pelaksana |
| Target 9.1 Mer | Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus | dan tangguh, tern | asuk infrastruk | tur regional dar | lintas batas, untuk n | nendukung | pembangur | an ekonom | i dan kesejal | hteraan manusia, dengan fokus |
| pada akses yar | pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | | | | | | | | | |
| 9.1.1.(a) | Kondisi mantap jalan kabupaten. | | DPUPKP | % | 74.18 | 75.42 | 76.52 | 77.62 | 78.72 | DPUPKP |
| 9.1.1.(b) | Panjang peningkatan jalan kabupaten. | | DPUPKP | km | 33 | 15 | 17 | 17 | 17 | DPUPKP |
| Target 9.2 Mer | larget 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan | ahun 2030, secara | signifikan meni | ngkatkan propo | rsi industri dalam lap | angan kerja | dan produ | k domestik | bruto, sejala | n dengan kondisi nasional, dan |
| meningkatkan | meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. | | | | | | | | | |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan Bappeda | rhadap PDB dan | Bappeda | % | | | | | | Bappeda |
| | perkapita. | | | | | | | | | |
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas. | | Bappeda | % | | | | | | Bappeda |
| 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas. | gas. | Bappeda | % | | | | | | Bappeda |
| Target 9.3 Mer | farget 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. | i negara berkemba | ng, terhadap ja: | sa keuangan, te | rmasuk kredit terjang | kau, dan m | engintegras | ikan ke dala | ım rantai nil | ai dan pasar. |
| 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil menengah terhadap total nilai tambah | nilai tambah | KUKMP | % | | 49,5 | 51 | 53 | 55 | KUKMP |
| | industri. | | | | | | | | | |
| 9.3.2* | Cakupan industri kecil menengah dengan pinjaman atau kredit. | ند | KUKMP | Rp (juta) | 300 | 250 | 235 | 210 | 200 | KUKMP |
| Target 9.4 Pad | Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri aga | r dapat berkelanju | tan, dengan per | ningkatan efisie | nsi penggunaan sum | erdaya dan | adopsi yan | g lebih baik | dari teknolo | dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan |
| ramah lingkun | ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. | masing. | | | | | | | | |
| 9.4.1* | Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri | ektor industri | DLH | % | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | DLH |
| | manufaktur. | | | | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Udara (IKUd) | | | | | | | | | |
| 9.4.1.(a) | Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca. | | DLH | % | | | | | | DLH |
| Target 9.5 Mer | Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan | ndustri di semua n | egara, terutama | ı negara-negara | berkembang, termas | uk pada tah | nun 2030, m | endorong ir | novasi dan s | ecara substansial meningkatkan |
| jumlah pekerja | jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan. | n pembelanjaan p | ublik dan swasta | ı untuk peneliti | ın dan pengembanga | ė | | | | |
| 9.5.1* | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. | | Bappeda | % | | | | | | Bappeda |
| | | | | | | | | | | |

Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

| and of the land of the land | OAG anderlibed | de Canadamir 2 | 100 | Possible (TOC) | Target Pencapaian | capaian | | de de la constitución de la cons |
|-----------------------------|--|----------------|--------|------------------------------------|---------------------|---------|------|--|
| Node Indikator | IIIIIIKATOI NAD | Sumper Data | Satuan | Sumber Data Satuan Baseline (2017) | 2018 2019 2020 2021 | 2020 | 2021 | renanggungjawab rejaksana |
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | Kominfo | % | | | | | Kominfo |
| 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | Kominfo | % | | | | | Kominfo |
| 9.c.1.(b) | Proporsi individu vang menggunakan Internet. | Kominfo | % | | | | | Kominfo |

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

| | | | | Baseline | | Target P | Target Pencapaian | | Penangannaiawah |
|----------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| Kode Indikator | stor Indikator RAD | Sumber Data | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| 10.1 Pada ta | 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi paling bawah pada tingkat yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional | dari 40 persen pop | ulasi paling bawah pada t | tingkat yang lebil | h tinggi dar | ipada rata- | rata nasior | lal | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini. | Bappeda | index | | | | | | Bappeda |
| | Pertumbuhan ekonomi | | | | | | | | |
| | Pemerataan Pendapatan | | | | | | | | |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis | Bappeda | % | | | | | | Bappeda |
| | kelamin dan kelompok umur. | | | | | | | | |
| 10.1.1.(b) | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. | Bappeda | kabupaten | | | | | | Bappeda |
| 10.1.1.(c) | Jumlah desa tertinggal | Bappeda | desa | | | | | | Bappeda |
| 10.1.1.(d) | Jumlah desa mandiri | Bappeda | desa | | | | | | Bappeda |
| 10.1.1.(e) | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. | Bappeda | % | | | | | | Bappeda |
| 10.1.1.(f) | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. | Bappeda | % | | | | | | Bappeda |
| Target 10.2 | Farget 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. | : bagi semua, terle | pas dari usia, jenis kelam | in, difabilitas, ra | s, suku, asa | ıl, agama at | au kemam | puan ekono | mi atau status lainnya. |
| 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut Dinsos | Dinsos | % | | | | | | Dinsos |
| | jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | | | | | | | | |
| Target 10.3 | Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat | menghapus huku | m, kebijakan dan praktik | yang diskriminat | if, dan mer | npromosika | ın legislasi, | kebijakan d | an tindakan yang tepat |
| terkait legis | terkait legislasi dan kebijakan tersebut. | | | | | | | | |
| 10.3.1.(a) | Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia | Kesbangpol | indeks | | | | | | Kesbangpol |
| 10.3.1.(b) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). | Kesbangpol | Berkas Pengaduan | | | | | | Kesbangpol |
| 10.3.1.(c) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadan perempuan. | Kesbangpol | % | | | | | | Kesbangpol |
| 10.3.1.(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan | Kesbangpol | Kebijakan/Dokumen | | | | | | Kesbangpol |
| Target 10.4 | Taret 10.4 Mensadonsi ketilalan. Perutama ketilalan dan berlindunsan sosial. serta secara prosresif mencapai kesetaraan vans lebih besar. Taret 10.4 Mensadonsi ketilalan. Perutama ketilalan fiskal. unah dan perlindunsan sosial. serta secara prosresi | cara progresif me | ncapai kesetaraan vang le | ebih besar. | | | | | |
| 10.4.1.(a) | Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah | Bappeda | Persen | | | | | | Bappeda |
| • | daerah | : | | | | | | | |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Disnakertrans | | 70 | | 74 | 9/ | 78 | Disnakertrans |
| | | | Informal (%) | 20 | 52 | 54 5 | 26 | 28 | |
| Target 10.7 | Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. | ıng jawab, termas | uk melalui penerapan kel | bijakan migrasi y | ang terenc | ana dan ter | kelola deng | gan baik. | |
| 10.7.2.(a) | Jumlah dokumen kerja sama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran | Disnakertrans | Penambahan dokumen | | | | | | Disnakertrans |
| | antara daerah. | | | | | | | | |
| 10.7.2.(b) | Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi. | Disnakertrans | Disnakertrans Fasilitasi TKLN | | | | | | Disnakertrans |

TUJUAN 11. KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

| actolibal open | | 400 204 | 403 | (707) Seiles | | Target Pe | Target Pencapaian | | and a description of the second |
|-------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| Node Illuikator | | Sumper Data | Satuali | Baseline (2017) 2018 2019 2020 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 21 renanggungjawan renansana |
| Target 11.1. Pada | farget 11.1. Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh | layak, aman, terjangka | ıu, dan pelayanan d | asar, serta menata ka | wasan kumu | <u>-</u> | | | |
| 11.1.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang DPUPKP | DPUPKP | % | 99.03 | 99.41 99.78 | 82.66 | 100 | 100 | DPUPKP |
| | layak dan terjangkau | | | | | | | | |
| Target 11.2. Pada | Target 11.2. Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas | man, terjangkau, mud | ah diakses dan berl | elanjutan untuk semu | ıa, meningk | atkan kesela | matan lalu | lintas, teruta | ama dengan memperluas |
| jangkauan transp | ingkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orangtua | reka yang berada dala | m situasi rentan, pe | rempuan, anak, peny | andang difat | oilitas dan o | angtua | | |
| 11.2.1.(a) | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan | Dishub | % | | | | | | Dishub |

| - t-dilbert - b - M | | 4.00 | | (F100) a | | Target Pe | Target Pencapaian | | |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------------------|
| Kode Indikator | or indikator KAD | Sumber Data | Satuan | baseline (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | - Penanggungjawan Pelaksana |
| | Persentase 'ketersediaan simpul transportasi yang memadai | | | | | | | | |
| | Persentase angkutan umum yang layak jalan | | | | | | | | |
| | Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji | | | | | | | | |
| Target 11.5. Pad | Farget 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan | ગrang terdampak, dદ | งก secara substans | ial mengurangi kerugi | an ekonomi | relatif terha | dap PDB glo | bal yang di | isebabkan oleh bencana, dengan |
| fokus melindung | fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan | | | | | | | | |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | BPBD | Orang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | врво |
| | Persentase Penanganan Banjir | | | | | | | | |
| 11.5.1.(b) | Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk | BPBD | desa tangguh | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | ВРВО |
| Target 11.6. Pad | larget 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota | merugikan, terması | ık dengan membe | ri perha tian khusus pa | da kualitas u | ıdara, terma | suk penang | anan samp | ah kota |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang terkini | DLH | % | 20 | 25 | 30 | 32 | 40 | DLH |
| | Volume sampah yang tertangani | DLH | ribu m3 | 441 | 440 | 450 | 460 | 470 | DLH |
| 11.6.1.(b) | Persentase sampah yang terangkut | DLH | % | 14,24 | 16 | 18 | 70 | 22 | DLH |
| Target 11.7. Pad | Farget 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas | nan, inklusif dan mu | dah dijangkau ter | utama untuk perempu | an dan anak, | , manula da | n penyanda | ng disabilita | as |
| 11.7.1.(a) | Jumlah ruang terbuka hijau | DLH | % | 34.3 | | | | | DLH |
| | Indeks Tutupan Lahan | | | | | | | | |
| 11.7.1.(b) | Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan POLRES kepada polisi | POLRES | % | | | | | | POLRES |
| Target 11.b. Pad | Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, | nan yang mengador | si dan mengimple | mentasikan kebijakan | dan perenca | anaan yang t | erintegrasi | tentang pe | nyertaan, efisiensi sumber daya, |
| mitigasi dan ada | mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster | gembangkan dan m | engimplementasik | an penanganan holisti. | k risiko benα | ana di semu | ıa lini, sesua | ai dengan th | he Sendai Framework for Disaster |
| Risk Reduction 2015-2030 | 2015-2030 | | | | | | | | |
| 11.b.1* | Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana | врво | % | | | | | | |
| 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah | врво | Dokumen | | | | 1 | | врво |
| | | | | | | | | | |

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | COOCH IE: NOMOCINE DAM I NODONS! I DIN CONTROLL DE NOTON SAME | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| And the N | - | 4-6 | | (1000) | | Target Pe | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
| Node Indikator | INDIRATOF RAD | sumper Data | Satuan | Daseline (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| Target 12.1 N | Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan | oduction Pattern | ıs, dengan semua nega | ıra mengambil tinda | kan, dipin | npin negara | maju, den | gan memp | ertimbangkan pembangunan |
| dan kapasita | dan kapasitas negara berkembang. | | | | | | | | |
| 12.1.1* | Jumlah kolaborasi tematik quickwins program. | Bappeda | Kolaborasi tematik | | | | | | Bappeda |
| Target 12.4 F | Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi | ingkungan, di ser | anjang siklus hidupny | a, sesuai kerangka | cerja inter | nasional ya | ng disepak | ati dan sec | ara signifikan mengurangi |
| pencemaran | pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. | uruk terhadap k | esehatan manusia dan | lingkungan. | | | | | |
| 12.4.1.(a) | Jumlah peserta Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam | DLH | Peserta Proper | 2 | 33 | 3 | 4 | 4 | DLH |
| | Pengelolaan Lingkungan) yang mencapai minimal ranking BIRU. | | | | | | | | |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan DLH | DLH | ton | 27 | 155 | 190 | 200 | 250 | ргн |
| | perundangan (sektor industri). | | | | | | | | |
| Tagrget 12.5 | Tagrget 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. | ngurangan, daur | ulang, dan penggunas | an kembali. | | | | | |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | DLH | ton | 3000 | 8250 | 8250 13500 18750 24000 | 18750 | | DLH |
| Target 12.6 N | l arget 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. | i praktek-praktel | k berkelanjutan dan m | engintegrasikan inf | ormasi keb | erlanjutan | dalam siklı | ıs pelapora | an mereka. |
| 12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | DLH | Perusahaan | | | | | | DLH |
| Target 12.7 N | Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. | lan prioritas nasi | onal. | | | | | | |
| 12.7.1.(a) | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. | DLH | Produk Ramah | | | | | | ргн |
| | | | Lingkungan | | | | | | |
| Target 12.8 F | Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. | an dan kesadara | n terhadap pembangu | nan berkelanjutan | an gaya h | idup yang s | elaras den | gan alam. | |
| 12.8.1.(a) | Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan | DLH | Fasilitas Publik | | | | | | DLH |
| | teregister. | | | | | | | | |

| And the N | | of and and | 10.4-5 | (T100/: | | Target P | Target Pencapaian | | |
|----------------|--|---------------------|---------|--|------|----------|-------------------|------|-------------------------------|
| Kode Indikator | INDIKATOR KALD | Sumper Data | satuan | Satuan baseline (2017) 2018 2019 2020 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 021 Penanggungjawab Pelaksana |
| Target 13.1 Me | arget 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. | alam di semua negar | · | | | | | | |
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | BPBD | Dokumen | | | | 1 | | BPBD |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | BPBD | Orang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPBD |
| Target 13.2 Me | arget 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. | encanaan nasional. | | | | | | | |
| 13.2.1* | Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia. | BPBD | Dokumen | | | | | | |
| | | | BUR ke- | | | | | | |
| 13.2.1.(a) | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | DLH | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 1 | 1 | DUH |

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN

| 1 1 1 | 1 | | | 111111111111111111111111111111111111111 | | Target P | Target Pencapaian | | |
|-------------------|---|----------------------|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|---|
| Kode Indikator | Indikator KAD | sumper Data | satuan | Baseline (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Penanggungjawab Pelaksana |
| Target 14.2 Pada | Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi | rkelanjutan untuk n | nenghindari dampak buru | k yang signifikan, ter | masuk de | ngan mem | erkuat ket | ahanannya | a, dan melakukan restorasi |
| untuk mewujudi | untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. | | | 1 | | | | | |
| 14.2.1.(a) | Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut | Diperpautkan | Dokumen (PP) | | | | | | Diperpautkan |
| 14.2.1.(b) | Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan. Diperpautkan | Diperpautkan | WPP | | | | | | Diperpautkan |
| Target 14.4 Pada | larget 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan igagal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana | gkapan ikan yang be | rlebihan, penangkapan ik | an ilegal dan praktek | penangk | apan ikan y | ang merus | ak, serta m | elaksanakan rencana |
| pengelolaan ber | pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan | am waktu yang pali | ng singkat yang memungl | cinkan, setidaknya ke | tingkat y | ang dapat r | nemprodul | si hasil ma | ıksimum yang berkelanjutan |
| sesuai karakteris | sesuai karakteristik biologisnya. | | | | | | | | |
| 14.4.1* | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Diperpautkan | n Diperpautkan | % (Target dibagi dengan | u. | | | | | Diperpautkan |
| | | | MSY) | | | | | | |
| Target 14.5 Pada | Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. | , konsisten dengan | hukum nasional dan inter | nasional dan berdasa | arkan info | rmasi ilmia | h terbaik ya | ang tersedi | ė |
| 14.5.1* | Jumlah luas kawasan konservasi perairan. | Diperpautkan | Jt Ha | | | | | | Diperpautkan |
| Target 14.6 Pada | larget 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan | ontribusi terhadap k | elebihan kapasitas dan pe | enangkapan ikan berl | ebihan, m | enghilangk | an subsidi | yang berko | ntribusi terhadap penangkapan |
| ikan ilegal, yang | ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi | gakui bahwa perlak | uan khusus dan berbeda | yang tepat dan efekti | if untuk ne | gara berke | mbang & r | negara kura | ing berkembang harus menjadi |
| bagian integral c | bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization. | | | | | | | | |
| 14.6.1.(a) | Persentase kepatuhan pelaku usaha. | Disnakertrans | % | 09 | 62 | 64 | 99 | 89 | Diperpautkan |
| | Jumlah kepatuhan pelaku usaha. | | | | | | | | |
| Target 14.b Men | Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar | dap sumber daya laı | ut dan pasar. | | | | | | |
| 14.b.1* | Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang | Diperpautkan | Regulasi /Kebijakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Diperpautkan |
| | mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil. | | | | | | | | |
| 14.b.1.(a) | Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan. | Diperpautkan | lokasi | | | | | | Diperpautkan |
| | Jumlah kecamatan dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan. | | | | | | | | |
| 14.b.1.(b) | Jumlah nelayan yang terlindungi. | Diperpautkan | orang | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Diperpautkan |
| Target 14.c Men | Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang | yanya dengan men | erapkan hukum internasio | onal yang tercermin d | alam the | United Nat | ons Conve | ntion on th | e Law of the Sea, yang |
| menyediakan ke | menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want". | sumber dayanya, s | eperti yang tercantum da | lam ayat 158 dari "Th | e future v | ve want". | | | |
| 14.c.1* | Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS Diperpautkan | Diperpautkan | Dokumen Ratifikasi | | | | | | Diperpautkan |
| | (the United Nations Convention on the Law of the Sea). | | | | | | | | |

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARAT

| todilon obovi | C & C and collined | of Carrier S | (710C) callage | Targ | et Pencapaian | | and a description of the second |
|----------------|--|---|---------------------|--------------|----------------|--------------|--|
| Node Indikator | | Sumber Data Satuan | (/TOZ) auliaspo | 2018 20 | 19 2020 | 2021 | Sumber Data Satuan basemine (2017) 2018 2019 2020 2021 Penanggungjawan Pelaksana |
| Target 15.1 Pa | rrget 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan dan paran yangan dan lahan | jutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta | jasa lingkungannya, | khususnya ek | osistem hutan, | , lahan basi | ah, pegunungan dan lahan |
| kering, sejala | ering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. | | | | | | |
| 15.1.1.(a). | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | Diperpautkan, DLH % | | | | | Diperpautkan, DLH |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | |

| Kode Indikato | ator Indikator RAD | Sumber Data | Satuan Baseli | Baseline (2017) 2018 | 1 1 | Target Pencapaian 2019 2020 | 2021 | Penanggungjawab Pelaksana |
|---|---|---|------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|------------------|--|
| Target 15.2 P | Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global. | , menghentikan defor | estasi, merestorasi | hutan yang terdegr | adasi dan r | neningkatk | an secara si | gnifikan forestasi dan |
| 15.2.1.(a). | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. | Diperpautkan, DLH | Hektar | | | | ۵ | Diperpautkan, DLH |
| Target 15.3 P | 1 State 15.3 Pada stahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang tekera penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. | yang terkena penggu | runan, kekeringan | dan banjir, dan ben | ısaha men | capai dunia | yang bebas | dari lahan terdegradasi. |
| 15.3.1.(a). | 22.2.1.(4). 12.0.01 (16.1.) The stand introduction terminated by Lastinating the standard of t | Diperpautkan, DLH ik dan meningkatkan | nd akses vang tenat te | rhadan sumber day | ta tercehit | social kee | U nakatan ir | Diperpautkan, DLH internacional |
| 15.6.1*. | Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian | Diperpautkan, DLH | PIC | in company | 2000 | | | Diperpautkan, DLH |
| | | | | | | | | |
| T 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | merata. | | | 4 | 1 | | 1 | |
| 15.7.1.(a). | i perburuan dan perdagangan Jenis 110ra dan tauna ya Jingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah | ng allinaungi serta me Diperpautkan DI H | ıgatası permintaan % | dan pasokan produ | ик піапрап | llar secara | | Dipernautkan DI H |
| ./5 | | | 2 | | | | 1 | |
| | Persentase penyelesaian aduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan | | | | | | | |
| 15.c Meningk 15.c.1.(a). | 15.c. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan. 15.c.1.(a). Persentase penyelesalan tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 Diperpautkan, DLH % dari lumiah kasu syang terladi. | gi, termasuk dengan n Diperpautkan, DLH | ıeningkatkan kapas % | itas masyarakat lok | al mengeja | r peluang n | nata pencal D | aharian yang berkelanjutan. Diperpautkan, DLH |
| TUJUAN 16. | TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH | | | | | | | |
| Kode Indikator | Indikator RAD | Sumber Data | Satuan | Baseline (2017) | Ta 2018 | Target Pencapaian 2019 2020 | aian 20 2021 | Penanggungjawab Pelaksana |
| Target 16.1. | Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun | | | | | | | |
| 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir | Satpol PP, POLRES | kasus | | | | | Satpol PP, POLRES |
| | Persentase penyelesaian pelanggaran K3 | | | | | | | |
| 16.1.2.(a) | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk | POLRES | kematian/100.000 penduduk | | | | | POLRES |
| 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir | Satpol PP, POLRES | persentase | | | | | Satpol PP, POLRES |
| 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | | | | | | | |
| Target 16.2 N | farget 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak | ksaan terhadap anak | | | | | | |
| 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik | Dinsos | persentase | | | | | Dinsos |
| 16.2.1 (h) | dan/atau agresi psikologis dari pengasun dalam setahun teraknir Dravalansi kakarasan tarbadan anak laki laki dan anak nasamulan | Oisos | parcontaca | | | | | Discoe |
| 16.2.3 (a) | Proportsi neremnian dan laki-laki milda ilmiir 18-24 tahiin yang mengalami kekerasan seksilal | Dinsos | persentase | | | | | Dinsos |
| (B):0:3:01 | sebelum umur 18 tahun | | 750 | | | | | |
| 16.3 Mengga | 16.3 Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. | sama terhadap keadi | lan bagi semua. | | | | | |
| 16.3.1.(a) | | | | | | | | |
| 16.3.1.(b) | Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan | | | | | | | |
| , | non litigasi. | | | | | | | |
| 16.3.2* | Proporsi tahanan terhadap seluruh jumlah tahanan dan narapidana. | | | | | | | |
| 1arget 16.6 m | Target 15.5 mengembangkan lembaga yang erektri, akuntabel, dan ransparan di semua tingkat 16.6.1* | - Pource | Dorrontoco | | | | | 200000 |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan | BKAD | persentase | 1 | 4 | 1 1 | 1 | BKAD |
| 40.04(4) | Kementerian/Lembaga dan pemerintan Daeran (Provinsi/Kabupaten/Kota) | | C | | | | | |
| 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintan (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | Adm. Pemerintanan Persentase | Persentase | | | | | Adm. Pemerintahan |
| 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan | ULP | persentase | 98.75 | 100 | 100 100 | 100 | Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |
| | | ULP | persentase | 98.75 | 100 | 100 100 | 100 | Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |
| | | | | | | | | |

| Kode | Indikator RAD | Sumber Data | Satuan | Baseline (2017) | Ta | Target Pencapaian | encapaian 2020 2021 | ١, | Penanggungjawab Pelaksana |
|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------------|
| 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memilik Indeks Reformasi Birokrasi baik Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | Bag. Organisasi | Persentase | , | | | | | Bag. Organisasi |
| 16.6.2.(a) | Capatan Index Reportmas broxtasi kabupaten bantul Persentase kepatuhan pelaksanan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Satpol PP, Bagian Daerah (Provinsi/Kabupaten/kota) Persentase OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik yang sudah menyusun Standar palayanan Kos | Satpol PP, Bagian organisasi | persentase | | | | | Satpol | Satpol PP, Bagian organisasi |
| Target 16.7 n 16.7.1.(a) | nbilan keputusan yang responsif inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tir erwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (IPPR) dan Dewan Perwakilan InpRn) | gkatan KPU, Setwan | Persentase | | | | | KPU, S | KPU, Setwan |
| 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eseloni dan II) | ВКРР | persentase | 15% | 15% | | | ВКРР | |
| 16.7.2.(a) | Indeks Lembaga Demokrasi | Kesbangpol | Indeks | | | | | Kesbangpol | loggu |
| 16.7.2.(b) 16.7.2.(c) | Indeks kebebasan Sipil Indeks Hak-hak politik | Kesbangpol Kesbangpol | Indeks | | | | | Kesbangpol | ngpol |
| Target 16.9 P | Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran | 5 | | | | | | | i |
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur | Disdukcapil, Dinkes | persen | | | | | Disdul | Disdukcapil, Dinkes |
| 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah | Disdukcapil | persen | | | | | Disdukcapil | capil |
| 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran | Disdukcapil | persen 5 | 91,74 | 93 6 | 94 95 | 96 9 | Disdukcapil | capil |
| Target 16.10 | farget 16.10 menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional | raturan nasional dan | kesepakatan internasional | | | | | | |
| 16.10.1.(a) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM | Kesbangpol | Berkas pengaduan | | | | | Kesba | Kesbangpol |
| 16.10.1.(b) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan | Kesbangpol | Persentase | | | | | Kesbangpol | loggn |
| 16.10.2* | Jumlah instansi yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi | Kominfo | Negara | 54 | 54 | 54 54 | 54 | Kominfo | ıfo |
| 16.10.2.(a) | Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Kominfo | persentase | 100 | 100 | 100 100 | 0 | Kominfo | ıfo |
| 16.10.2.(b) | Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi Kominfo | Kominfo | Persentase (| 0 | 100 | 100 10 | 100 100 | Kominfo | fo |
| 16.10.2.(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelolaan Informasi dan dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | Kominfo | PPID | _ | 6 | 11 13 | | Kominfo | ıfo |
| Target 16.a n memerangi t | Target 16.a memperkuat lembaga lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan | ıtuk membangun ka _l | oasitas di semua tingkatan, l | khususnya d | i negara b | erkemba | ng, untuk ı | mencegah | kekerasan serta |
| 16.a.1* Target 16.b n | 16.a.1* tersedianya lembaga HAM nasiona yang independenyang sejalan dengan Paris Principles Kesbangpol ler Tareet 16.b menezalakkan dan menezakkan undana-undang dan kebilakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanlutan | Kesbangpol | lembaga an | | | | | Kesbangpol | ngpol |
| 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional Persentase penegakan perda | Kesbangpol | Kebijakan/dokumen | | | | | Kesbangpol | ngpol |
| | - | | | | | | | | |

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

| 1 | | 4 | | Baseline | | Target Pe | encapaian | | Penanggungjawab |
|----------------|---|------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| Kode Indikator | or indikator KAD | Sumber Data | Satuan | (2017) | (2017) 2018 2019 2020 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| Target 17.1 N | Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | ın internasional kepada nega | ra berkembang, untuk n | neningkatkan kar | asitas lokal b | agi pengum | pulan pajak | dan penda | atan lainnya. |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah kabupaten sebagai proporsi terhadap PDB | OB BKAD | Persentase | 22 | 23 | 24 | 52 | 56 | BKAD |
| | menurut sumbernya. | | | | | | | | |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | BKAD | Persentase | 17.5 | 18 | 19.00 | 20.0 | 21 | BKAD |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran daerah yang didanai oleh pajak daerah | BKAD | Persentase | 00.09 | 65 | 00.89 | 70.00 | 75 | BKAD |

| | | | | Baseline | | Target Pe | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|---------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---|
| Kode Indikato | or Indikator RAD | Sumber Data | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| Target 17.6 M | Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan | lar secara regional dar | internasional terkait dan | akses terhadap | ains, tekno | logi dan inov | asi, dan menin | gkatkan b | erbagi pengetahuan |
| perdasar Kese | Dergasar Kesepakatan timbal balik, termasuk melalul koordinasi yang lebih balik antara mekanisme yang telah ada, kinsusnya di tingkat Perserikatan bangsa-bangsa (Pibb), dan melalul mekanisme tasilitasi teknologi global | anisme yang telan ada, | , knususnya di tingkat Pers | erikatan bangsa | bangsa (Pb | b), dan mela | ıuı mekanısme | rasilitasi t | eknologi global. |
| 17.6.2.(a) | Persentase jaringan tulang punggung serat optik daerah yang menehihinpkan kecamatan. | Kominfo | Persentase | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 k | Kominfo |
| 17.8 Mengobe | 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang | unan kapasitas teknok | ogi dan inovasi untuk nega | ra kurang berke | nbang pada | tahun 2017 | dan meningka | tkan pengs | unaan teknologi vang |
| memampukar | memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. | _ | | ì | ; | |) | | |
| 17.8.1.(a) | Persentase desa yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal | Kominfo | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 k | Kominfo |
| | | | | | | | | | |
| Target 17.11 § | farget 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020. | ngan tujuan meningkat | tkan dua kali lipat propors | i negara kurang l | erkembang | g dalam eksp | or global pada | tahun 202 | ó |
| 17.11.1.(a) | Pertumbuhan ekspor produk non migas | Disdag | Persentase | 7.09 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | 7.25 | Dinas Perdagangan |
| Target 17.13 F | Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan. | bijakan dan keterpadu | an kebijakan. | | | | | | |
| 17.13.1* | Tersedianya Dashboard Makroekonomi. | Bappeda | Dashboard | | | | | ш | Bappeda |
| Target 17.17 P | Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama. | sipil yang efektif, berd | asarkan pengalaman dan | bersumber pada | strategi ker | ja sama. | | | |
| 17.17.1.(a) | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja | DPMPT, Bag. | Dokumen berisi daftar | | | | | _ | DPMPT, Bag. Perekonomian |
| | sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | Perekonomian | proyek KPBU | | | | | | |
| | Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti | | | | | | | | |
| | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat | | | | | | | | |
| 17.17.1.(b) | Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan | Bag. Adm. | Alokasi | | | | | В | Bag. Adm. Pemerintahan |
| | dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha | Pemerintahan | | | | | | |) |
| | (KPBU). | | | | | | | | |
| Toward 17 10 p | recent 11 to Determine the second process transfer into a consequent transfer into a consequent transfer into the second process tra | served moderated care | 2 | and and and an | denoulated on | A meline see | aces durant lie | a colection i | 2000 |
| ketersediaan nasional. | rager 17.20 rada kaluni 2020, illemingkatkan dukungan kapasikas barkan kangan kerikan kerikan keru, unun illemingkatkan sekara sejimikan ketesadiaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks pasional. | arkan pendapatan, gen | iasuk negara kurang berke ider, umur, ras, etnis, stati | mbang dan nega ıs migrasi, difabi | itas, lokasi | geografis da | cu, untuk men n karakteristik | lainnya ya | secara signinkan ng relevan dengan konteks |
| 17.18.1.(a) | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas | BPS | Persentase | 98,19 | 88 | 06 | | ш | BPS |
| | dengan kualitas data statistik. | | | | | | | | |
| 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS | BPS | Persentase | 77,78 | 88 | 06 | | Ш | BPS |
| | sebagai rujukan utama. | | | | | | | | |
| 17.18.2* | Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi. | | D) | | | | | | |
| 17.18.2.(a) | Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. | | Review | | | | | | |
| 17.18.3.(a) | Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS). | | Strategi Nasional | | | | | | |
| Target 17.19 F | Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelajutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan | an pengukuran atas ke | emajuan pembangunan be | rkelanjutan yang | melengka | oi Produk Do | nestik Bruto, c | lan mendu | kung pengembangan |
| kapasitas stat | kapasitas statistik di negara berkembang. | | | | | | | | |
| 17.19.1.(a) | Jumlah pejabat fungsional pranata komputer pada Pemerintah Daerah | ВКРР | Pegawai | 23 | 28 | | | ш | ВКРР |
| 17.19.1.(b) | Persentase OPD yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau | ВКРР | Persen | 14% | 14% | | | ш | ВКРР |
| | pranata komputer. | | | | | | | | |
| 17.19.1.(c) | Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan | ВКРР | Persen | 32% | 36% | | | ш | ВКРР |
| | pranata computer OPD | | | | | | | | |
| 17.19.2 (a) | Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020. | | Sensus Penduduk | | | | | | |
| 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>) | Disdukcapil | Data Registrasi | | | | | | Disdukcapil |
| 17.19.2.(c) | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik | Kominfo | Pengunjung | 66.778 | 72,000 | 75,000 | 80,000 | ~ | Kominfo |
| | melalui website. | | | | | | | | |
| 17.19.2.(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik BPS (BPS). | BPS | Persentase | 94,81 | 88 | 06 | | ш | ВРЅ |
| 17.19.2.(e) | Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi nembangunan nasional | BPS | Persentase | 26,47 | 35 | 40 | | ш | BPS |
| | | | | | | | | | |

Matrik Program Kegiatan, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Bantul

TUJUAN: 1. TANPA KEMISKINAN

| | | | | ' | E | Target Pencapaian | aian | Indikatif | | | |
|--|--|--|----------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Baseline 2017 | 2018 | 2019 20 | 2020 2021 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendanaan | Sumber Data | Instansi Pelaksana |
| Target 1.2. Pada tahun 20 | Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | erempuan dan anak-anak d | ari semua usia | , yang hidup | dalam kem | iskinan di s | emua dime | ısi, sesuai denga | າ definisi nasioı | nal. | |
| INDIKATOR SDG'S: 1.2.2 F | INDINATOR SDG'S : 1.2.1 Ingrat kemishinan daeran INDIKATOR SDG'S : 1.2.2 Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional | a usia, yang hidup dalam k | emiskinan dal | am berbagai | dimensi, se | ssuai denga | າ definisi ກຂ | sional. | | | |
| INDIKATOR SDG's: '1.3.1 (| INDIKATOR SDG's: '1.3.1 (c) Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inkusifnya | ntan yang terpenuhi hak da | sar dan inkusi | fnya | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 1.3.1. (| INDIKATOR SDG's : 1.3.1. (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKHnasional. | iai bersyarat/PKHnasional. | | | | | | | | | |
| PROGRAM PELAYANAN | | Tersusunnya data | | | | | | 1200 | | Dinsos | DinsosP3A |
| RANTIIAN SOSIAI | | statistik kemiskinan daerah | | | | | | | | | |
| | Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah | | | | | | | | | Dinsos | |
| Program Pemberdayaan | | | | | | | | 8825 | | Dinsos | |
| Fakir Miskin, Komunitas | | Masyarakat melalui Ban- | | | | | | | | | |
| Adat Terpencil (KAT) dan | | tuan bagi Keluarga Miskin | | | | | | | | | |
| renyandang masalan | 1000 OMIGRAN CINED FACE STEELS ON MATENIONINES | IVIDALIII | | | | | | | | 9 | |
| Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENDAMPING SOSIAL, FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA | Jumlah PMKS yang men- dapatkan pendampingan | | | | | | | | Dinsos | |
| | PENYUSUNAN DATA DAN ANALISIS PERMASALAHAN | Jumlah pemohon | | | | | | | | Dinsos | |
| | PMKS | Rekomendasi Jaminan | | | | | | | | | |
| | | Kesehatan | | | | | | | | | |
| | Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin | Jumlah pengawasan dan pengendalian bantuan bagi Raskin | | | | | | | | Dinsos | |
| Program Pelayanan dan | | Cakupan Pemberdayaan | | | | | | 9970 | | | |
| Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | Masyarakat melalui Ban- tuan bagi Keluarga Miskin | | | | | | | | | |
| | Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS | Jumlah PMKS yang tertangani | | | | | | | | | |
| | Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi keseiahteraan sosial bagi PMKS | | | | | | | | | | |
| | Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah keselahteraan sosial | | | | | | | | | | |
| Program Pemberdayaan | | Jumlah Kegiatan untuk | | | | | | 5994 | | | |
| Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | peningkatan kemampuan berorganisasi dan prestasi pada karang | | | | | | | | | |
| | | taruna | | | | | | | | | |
| | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Jumlah lembaga | | | | | | | | | |
| Program perencanaan | | Cakupan koordinasi dan | | | | | | 6294 | | | |
| sosial dan budaya | | evaluasi perencanaan | | | | | | | | | |
| | | pembangunan sosial | | | | | | | | | |
| | | pudaya | | | | | | | | | |

| | | | | | | Target Pencapaian | ncapaian | | Indikatif | | | |
|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|-----------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Baseline 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendanaan | Sumber Data | Instansi Pelaksana |
| | Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dokumen | dokumen | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat | dokumen | | | 11111 | | 0.00 | | | | 1 | |
| larget 1.3. Menerapkan st | remaiger 1.3., Wenerapkan secara nasionan sistem dan upaya perindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapal cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan | tepat bagi semua, termasu | к кеготрок | ang paling i | niskin, da | n pada ta | nun 2030 | mencapa | cakupan substa | ansial bagi kelo | ompok miskin da | n rentan |
| 1.3.1 (a) : Proporsi peserta jaminan kesenatan | Jaminan Kesenatan | - | | | | | | | 000 | | | |
| PROGRAM PELAYANAN | | Tersusunnya data | | | | | | | 1200 | _ | Dinsos | DinsosP3A |
| PENDALAAN JAMIINAN BANTUAN SOSIAL | | statistik kemiskinan daerah | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah | | | | | | | | | | Dinsos | |
| PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK | | jumlah peserta PBI Jamkesda | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106994 | | Dinkes | |
| MISKIN | Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda | pelayanan kesehatan warga miskin | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106994 | | | |
| Program Perlindungan | | Penetapan nilai KHL | | | | | | | | | Disnakertrans | |
| Pengembangan Lembaga | | (Kebutuhan Hidup Layak) | | | | | | | | | | |
| Ketenagakerjaan | penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan | Jumlah kegiatan pemberian perlindungan bukum dan JAMSOSTEK | kegiatan | | | | | | | | | |
| | Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang katamagakariaan | Jumlah peserta sosialisasi perusahaan | perusahaan | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Keselahteraan Pekeria | limlah kegiatan | kegiatan | | | | | | | | | |
| | reillignatail neocjailtelaailt enerja | sosialisasi/workshop | vegiatai. | | | | | | | | | |
| Target 1.4. Pada tahun 203 | Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelatanan dasar, kepemilikan, dan | masyarakat miskin dan ren | tan memiliki | hak yang sar | na terhad | ad sumpe | r daya ek | onomi se | ta akses terhad | ap pelatanan | dasar, kepemilika | ın, dan |
| Kontrol atas tanah dan bei | kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumberdaya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro INDIKATOR SDG's - 1.4.1 (a) persentasa neremnian nernah kawin imiri 17.49 tahun yang moses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | ogi baru, dan jasa keuangar n vang nroses melahirkan t | ı yang tepat t erakhirnya d | ermasuk ke Fasilitas kes | Jangan m | 2 | | | | | | |
| Program noninglatur | מון בו זכוויים לכן כוולאמנו לכן ומון צמאנון מון דר-דין מון | Angle Proses meranikan | 5 ak | 201 681 1681 | 3 | | | | | | Dipkor | |
| Program peningkatan | | Aligna helilatidii ibu | | | | | | | | | CIIIRES | |
| keselamatan ibu melahirkan dan anak | Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 1.4.1. (| INDIKATOR SDG's : 1.4.1. (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap | unisasi dasar lengkap | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN | | _ | % | 92 | | 100% | 100% | 100% | 630 | | Dinkes | |
| PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA | PELAYANAN KESEHATAN Pelayanan kesehatan anak dan Balita ANAK BALITA | Persentase pelayanan kesehatan balita | | 80 | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| Program Pencegahan dan Distribusi Vaksin Penanggulangan Penyakit Menular | Distribusi Vaksin | Persentase desa/ kelu- rahan yang mencapai UCI | | | | | | | | | Dinkes | |
| INDIKATOR SDG's: 1.4.1. | INDIKATOR SDG s. 1.4.1. (c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15.49 tahun yang berstatus kawin | ua cara pada PUS usia 15-49 | tahun yang | berstatus ka | win | | | | | | | |
| Program Keluarga Berencana | | Cakupan peserta KB aktif | | | | | | | | | DPPKBPMD, Dinkes | |
| | Pelayanan KIE, Sarana Mobilitas KB | Jumlah pelaksanaan | | | | | | | | | DPPKBPMD, | |
| | | kegiatan pelayanan KIE IMP | | | | | | | | | Dinkes | |
| INDIKATOR SDG's: 1.4.1. (| INDIKATOR SDG's: 1.4.1. (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | p layanan sumber air minu | m layak | | | | | | | | | |

| | | | | | Targ | Target Pencapaian | _ | Indikatif | | | |
|---|---|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Baseline 2017 | 2018 20 | 2019 2020 | 2021 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendanaan | Sumber Data | Instansi Pelaksana |
| Program Peningkatan | Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) | Ketersediaan dan kualitas | | | | | | | | DPPKBPMD, | |
| Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Perdesaan | Perdesaan | air bersih | | | | | | | | Dinkes | |
| INDIKATOR SDG's: 1.4.1. | INDIKATOR SDG's : 1.4.1. (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | ap layanan sanitasi layak | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 1.4.1. | INDIKATOR SDG's: 1.4.1. (f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan | Program Pengembangan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | 3102 | | DPPKBPMD, | |
| Drogram Lingkingan | Denangang Kawasan Kiimiih | diraily ac sewe X | | | | | | | | DITINES | DDIIDKD |
| Sehat Perumahan | renaigarian wawasan wantan | tertangani | | | | | | | | 2 | 2 |
| INDIKATOR SDG's: 1.4.1. | INDIKATOR SDG's : 1.4.1. (f) APM SD/MI/sederajat | • | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 1.4.1. | INDIKATOR SDG's: 1.4.1. (f) APM SMP/MTS/sederajat | | | | | | | | | | |
| Program Wajib Belajar | penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI | Persentase peningkatan | | | | | | | | Disdikpora | |
| Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | sarana prasarana mutu | | | | | | | | | |
| Program Waiib Belajar | penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTS/sederajat | Persentase peningkatan | | | | | | | | Disdikpora | |
| Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | sarana prasarana mutu pendidikan SMP | | | | | | | | - | |
| INDIKATOR SDG's: 1.4.1. | INDIKATOR SDG's: 1.4.1. (i) Persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran | ilikan akte kelahiran | | | | | | | | | |
| | Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian | Kepemilika Akta Kelahir- | | | | | | 711.938 | | Disdukcapil | Disdukcapil |
| | | an usia 0-18 Tahun | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 1.4.1. | INDIKATOR SDG's : 1.4.1. (j) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN | ber penerangan utamanya lis | trik baik dar | i PLN dan bu | can PLN | | | | | | |
| Program Pengembangan Perumahan | | | | | | | | | | DPUPKP | DPUPKP |
| Target 1.5. Pada tahun 20 | Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miuskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekosnomi, sosial, | eka yang berada dalam kond | isi rentan, da | an menguran | gi kerentanar | n mereka terh | adap keja | dian ekstrim ter | kait iklim dan g | guncangan ekosi | nomi, sosial, |
| lingkungan, dan bencana | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 1.5.1. | INDIKATOR SDG's : 1.5.1. (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah | daerah | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 1.5.1. | INDIKATOR SDG's : 1.5.1. (d) Kajian resiko bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana | encana | | | | | | | | | |
| Program pencegahan dini | | Persentase Desa Tangguh Rencana | | | | | | 16946 | | BPBD | BPBD |
| korban bencana alam | | | | | | | | | | | |
| Program pencegahan dini | | Persentase Desa Tangguh | | | | | | 16946 | | BPBD | BPBD |
| dan penanggulangan | | Bencana | | | | | | | | | |
| Korban bencana alam | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 1.5.1. | INDIKATOR SDG's: 1.5.1. (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana social | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 1.5.1. | INDIKATOR SDG's : 1.5.1. (c) Pendampingan psikososial korban bencana social | | | | | | | | | | |
| Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah | | Persentase relokasi warga yang terdampak | | | | | | 5624 | | врво | |
| Kawan Bencana | | | | | | | | | | | |
| Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial | Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan | Jumlah Penyaluran bencana | | | | | | | | Dinsos | |
| Target 1.a. Menajmin mol | Target 1.a. Menajmin mobilitas yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara herkembana perarak barekmbana untuk melaksanakan Program dan kebilakan mengakhiri kemiskinan di semira dimensi | umber, termasuk melalui ker dan kebilakan mengakhiri ke | jasama pem miskinan di | ibangunan ya semila dime | ng lebih baik si | untuk menye | diakan sa | ana yang mem | adai dan terjan | gkau bagi negar | 6 |
| INDIKATOR SDG's : 1.a.1 F | INDIKATOR SDG's : 1.a.1 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk Program pemberantasan kemiskinan | secara langsung untukProgra | m pembera | ntasan kemis | kinan . | | | | | | |
| INDIKATOR SUG S: 1.a.2 I | INDIKATOK SDG S : 1.a.z. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perimdungan sosial) sebagai persentase dari totai belanaja pemerintah | ı, dan perlindungan sosiaij se | bagaı perser | tase dari tot | al belanaja po | emerintan | | | | | |

| | | | | | | | 1 | 314-111-11 | , | | | |
|--|---|--|------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|------------|--|---------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Kogistan | Satuan | Baseline | - 55 | one one | dydian. | Alokasi Anggaran 5 | | Sumber Sumb | Sumber Data | Instansi |
| | | riogianii) negiatan | | 707 | 7010 | 5019 | 0202 | 2021 Tahunan (Rp. Juta) | | allaall | | Leighsgilg |
| Program Perencanaan Pembangunan Sosial Buda ya | | Cakupan koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan sosial budaya | | | | | | 8687 | | Bappeda | da | |
| 9 P P | Perencanaan pembangunan pemerintahan Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat | dokumen akat dokumen dokumen | | | | | | | | Bappeda | qa | |
| TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN | ARAN | | | | | | | | | | | |
| Program | Indii Kegiatan Progr | Indikator Kinerja Satuan Program/Kegiatan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | Target Pencapaian 2019 2020 | 1 paian 2020 | 2021 | Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. | Sumber Pendanaan | Sumber Data | | Penanggungjawab Pelaksana |
| Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan bavi, terhadap makanan yang aman. bergizi, dan cukup | Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses k bavi, terhadan makanan vang aman. bergizi, dan cukun sepanjang tahun | dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk sepanjang tahun | ng miskin daı | n mereka yar | ıg berada c | lalam kon | disi renta | , termasuk | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 2.1.1 Prev | INDIKATOR SDG's : 2.1.1 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 2.1.2. (a) Proporsi penduduk dengan | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minim | asupan kalori minimum di bawah 1400kkal/kapita/hari | _ | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian /Perkebunan | | Ketersediaan pangan pokok | | | | | | 5854 | | Diperpautkan | ı Diperpautkan | ıtkan |
| Program Peningkatan | Cadangan Pangan | ıgan | | | | | | 1,471 | | Diperpautkan | Diperpautkan | ıtkan |
| Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | Kelompok bah konsumsi | Kelompok bahan pangan yang di Konsumsi | | | | | | | | Diperpautkan | ı Diperpautkan | ıtkan |
| | _ | nir Demapan | | | | | | | | Diperpautkan | | ıtkan |
| | L | apan | | | | | | | | Diperpautkan | | ıtkan |
| | Daerah Rawan Pangan Pembinaan Demapan | emapan | | | | | | | | Diperpautkan | | ıtkan |
| | Pelatinan teknis | IIS | | | | | | | | Diperpautkan | Diperpautkan | ıtkan |
| | Workshop NBM | Σ | | | | | | | | Diperpautkan | | ıtkan |
| | Workshop SKPG | 90 | | | | | | | | Diperpautkan | | ıtkan |
| | Laporan ketersediaan dan kerawanan pangan | sediaan dan ngan | | | | | | | | Diperpautkan | ı Diperpautkan | ıtkan |
| | Peringatan HP Sedunia) | Peringatan HPS (Hari Pangan Sedunia) | | | | | | | | Diperpautkan | . Diperpautkan | ıtkan |
| Program Pengembangan dan | | | | | | | | 128,398 | | | DPUPKP | |
| Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Iainnya | Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Jumlah dokumen perencanaan | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi/pemeliharaan Rehab jaringan irigasi Jaringan irigasi, rawa dan | n irigasi | | | | | | | | | | |
| | asi | Pemeliharaan saluran irigasi | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 2.1.1. (a) Prevalensi kekurangan gizi | pada ar | | | | | | | | | | | |
| Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Peningkatan status gizi Prevalensi Kek Balita | Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita | | | | | | 4,512 | | Dinkes | Dinkes | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | 400000000000000000000000000000000000000 | renanggungjawab Pelaksana | |
|------------|---|------------------------------|--------------|
| | | Sumber Data | |
| | 304001 | Pendanaan | |
| Indikatif | Alokasi | Anggaran 5 | allulal (hp. |
| | | 2021 | |
| ıcapaian | | 2020 | |
| Target Per | | 2019 | |
| | | 2018 | |
| | Tahun | Dasar | /T07 |
| | | Satuan | |
| | | Program/Kegiatan | |
| | | Kegiatan | |
| | | Program | |

Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasioani untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manulamencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan INDIKATOR SDG'S: 2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak Balita

INDIKATOR SDG's : 2.2.2. Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) amak pada usia kurang dari 5 tahun INDIKATOR SDG's: 2.2.1. (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak Baduta

| | | 3 | , | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|--------|------|---------------------------|--------------|
| Program Perbaikan Gizi | | | | | | | | | 4,512 | | | |
| Masyarakat | Peningkatan status gizi | Prevalensi Balita Stunting | | | | | | | | | Dinkes | Dinkes |
| | Peningkatan status gizi | Cakupan Balita ditimbang | | | | | | | | | Dinkes | Dinkes |
| | Peningkatan status gizi | Jumlah balita Kurus Mendapat | | | | | | | | | Dinkes | Dinkes |
| | | Makanan Tambahan Pemulihan | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 2.2.2. (a) | INDIKATOR SDG's : 2.2.2. (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil | _ | | | | | | | | | | |
| Program peningkatan | Peningkatan Pelayanan | Pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 95.00% | 100.00% 100.00% 100.00% 5,512 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 5,512 | | Dinkes | Dinkes |
| keselamatan ibu melahirkan Kesehatan | Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| dan anak | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 2.2.2. (b) | INDIKATOR SDG's : 2.2.2. (b) Presentase bayi usia kurang dari 6 | dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif | dusif | | | | | | | | | |
| Program peningkatan | Pelayanan kesehatan anak dan | dan Persentase pelayanan kesehatan % | % | 92 | 100% | 100% | 100% | 100% | 930 | APBD | Dinkes | Dinkes |
| pelayanan kesehatan anak balita | Balita | bayi | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. (c) Tingkat konsumsi ikan perkapita | an perkapita | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN | PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Sarana Prasarana | | | | | | | | 10,133 | | Diperpautkan Diperpautkan | Diperpautkan |
| PRODUKSI PERIKANAN | Perikanan Budidaya | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap Indikatif Alokasi

Target Pencapaian

| | | | | Tohir | | Target Pencapaian | rcapaian | | Indikatit Alokasi | | | |
|---|--|--|---------------|---------------|--------------|--|----------|---------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendanaan | Sumber Data | Instansi Pelaksana |
| Target 3.1. Pada tahun 2030, | Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | ningga kurang dari 70 per 100.000 ke | lahiran hidu | <u>a</u> | | | | | | | | |
| 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). | AKI). | | | | | | | | | | | |
| Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Pelayanan kesehatan ibu hamil % | | 95.00% 1 | %00.00 | 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% | 100.00% | 100.00% | 5,512 | | Dinkes | Dinkes |
| 3.1.2* Proporsi perempuan p | 3.1.2* Proporsi perempuan pemah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | oses melahirkan terakhirnya ditolon | g oleh tenag | ga kesehata | an terlatih. | | | | | | | |
| Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Program Upaya Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Cakupan pertolongan Persalinan % Masyarakat oleh Bidan atau Tenaga puskesmas Kesehatan atau Tenaga Kesehatan yang Meriliki Kesehatan yang Meriliki Kendinan komperensi kehidanan | i Cakupan pertolongan Persalinan 9 oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Komperensi Kehldanan | % | .00% | %00.00 | 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% | 100.00% | 100.00% | 394771 | | # | BPS, Dinkes |
| 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15- | uan pernah kawin umur 15-49 tahun ya | 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | fasilitas kes | ehatan. | | | | | | | | |
| Program Upaya Kesehatan | Program Upaya Kesehatan Program peningkatan keselamatan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % Masuprakat | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | | .00% 1 | %00.00 | 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% | 100.00% | 100.00% | 394771 | | Dinkes | BPS. Dinkes |
| Masyal and | מו מעל מעל מער וויי מווי עם ועם מווי אין מער | | | | | | | | | | | |

Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

3.2.1* Angka Kematian Baitra (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.

| Sumber Sumber Data Pendanaan Dinkes | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Program/Registrin Saluan Data (Apr. 2015) 2015 (100%) 2010 | | | Indikator Kineria | | hun | | arget Pen | capaian | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber | | Instansi |
| Perventiace pelayarian kesehatan % 92 100% 100% 100% 100% 630 Dinkes bayan busyan kesehatan kesehatan 80 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 | Program | Kegiatan | Program/Kegiatan | | | 8103 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | Pendanaan | Sumber Data | Pelaksana |
| Persentase pelayanan kesehatan | 3.2.2.(a) Angka Kematian Bay | i (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | | | | | | | | | | | |
| Loying Marie Service pelayanan kesehatan 80 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 | PROGRAM PENINGKATAN | | Persentase pelayanan kesehatan | | 100 | | | %001 | 100% | 630 | | Dinkes | |
| Percentase pelayanan kesehatan 80 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 | PELAYANAN KESEHATAN | | bayi | | | | | | | | | | |
| In indicated any penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Pelayanan kesekatan ronge dengan risko terinfeksi HIV Prevalensi HIV Pre | ANAK BALITA | Pelayanan kesehatan anak dan Balita | Persentase pelayanan kesehatan | 80 | 100 | | | | 100% | | | | |
| Pervalensi HIV Perval | Total and about 5 Changes | | balita | in the state of th | | 1000 | 1 | 4 | 1 | 411 | | | |
| Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfetsi HV Prevalensi HV Prev | larget 5.5. Pada tanun 2030, | mengaknin epidemi AiDS, tuberkulosis, | maiaria, dan penyakit tropis yang | erabalkan, dal | шешегап | B nebatic | s, penyak | ouinsan 1 | er all', ser | a penyakit menular | allunya. | | |
| Peta-yanah sesentaan dang Dinkes Introducian risko terninekol HIV Prevalensi HIV Dinkes Introducian risko terninekol HIV Dinkes Introducian risko terninekol HIV Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Peta-yanah kesehatan dengan kasus kusta kasus kusta kasus kusta penyakt fiarinsis akematian dini akibat penyakt tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan kera-visk dan payudara akematian dini akibat penyakt tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan akera-karis dan payudara akat Cakupan Puskesmas amelaksanakan UkM dan UKP Dinkes Basa akat Cakupan Puskesmas amelaksanakan UkM dan UKP Basa akat Cakupan Distribusi Vaksanas akat Cakupan Distribusi Vaksan | 3.3.1* Angka Inteksi Baru HIV | per 1000 populasi tidak terinteksi HIV | | | | | | | | | | | |
| Prevalensi HIV penemuan TB Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehata | Program Pencegahan dan | Pelayanan pencegahan dan | Pelayanan kesehatan orang | | | | | | | | | Dinkes | |
| penemuan TB Distribusi Vaksin pelayanan kesehatan dengan kasus kusta penyakit filaniasis penyakit filaniasis a kemastan dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan mental dan kesejahteraan ker servitis dan payudara a kemastan dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan mental dan kesejahteraan melaksanakan UKM dan UKP 280.627 280.627 | Penanggulangan Penyakit Menular | penanggulangan penyakit menular | dengan risiko terinteksi HIV | | | | | | | | | | |
| perevalensi HIV Dinkes Distribusi Vaksin pelayanan kesehatan dengan kasus kusta pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan dengan perayakt filanasis a kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan penglobatan serta meningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan kat Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UK | 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada | populasi dewasa. | | | | | | | | | | | |
| penemuan TB Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin pelayanan kesehatan dengan kasus kusta kasus kusta pelayanan kesehatan dengan berahan d | Program Pencegahan dan | Pelayanan pencegahan dan | Prevalensi HIV | | | | | | | | | | Dinkes |
| Distribusi Vaksin pelayanan kesehatan dengan kasus kusta kasus kusta pelayanan kesehatan dengan penyakit filarasis a kematlan dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahternan akat Cakupan Puskesnas melaksanakan UKM dan UKP 280,827 | Penanggulangan Penyakit | penanggulangan penyakit menular | | | | | | | | | | | |
| penemuan TB Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin pelayanan kesehatan dengan kasus kusta kasus kusta pelayanan kesehatan dengan dengan pelayanan kesehatan dengan kesehatan dengan deng | vienulai 13.3 (a) Incidos Tuborbulocis | (TE) 22, 100 000 200 (TE) | | | | | | | | | | | |
| Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Dinkes kasus kusta kasus kusta penjayanan kesehatan dengan penjayanan dengan penjayanan kesehatan dengan penjayanan kesehatan dengan penjayanan kesehatan dengan penjayanan dengan penjayana | .s.z.(a) insiden i uberkulosis | (11 b) per 100.000 penduduk | | | | | | | | | | | |
| Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Dinkes pelayanan kesehatan dengan kasus kusta Rasus kusta pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan mental dan kesejahteraan melaksanakan UKM dan UKP 280,827 | rogram Penceganan dan enanggulangan Penyakit | Pelayanan penceganan dan penanggulangan penyakit menular | penemuan I B | | | | | | | | | | DINKes |
| Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Dinkes pelayanan kesehatan dengan kasus kusta Rasus kusta pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan mental dan kesejahteraan a kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan tker serviks dan payudara kat Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP 280,827 | Jenular | | | | | | | | | | | | |
| Distribusi Vaksin Distribusi Vaksin Dinkes pelayanan kesehatan dengan kasus kusta kasus kusta pelayanan kesehatan dengan penyakit filariasis a kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan tere servika dan payudara kat Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP 280,827 | .3.3* Kejadian Malaria per 1. | .000 orang | | | | | | | | | | | |
| Dinkes pelayanan kesehatan dengan kasus kusta pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan dengan penyakt filariasis a kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan ker servik dan payudara kat Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP 1280,827 | rogram Pencegahan dan enanggulangan Penyakit | | Distribusi Vaksin | | | | | | | | | Dinkes | |
| pelayanan kesehatan dengan kasus kusta kasus kusta pelayanan kesehatan dengan pernyakit filariasis a kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan skat Gakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP 1280,827 | 3.4* Insiden hepatitis B per | 100.000 penduduk | | | | | | | | | | | |
| pelayanan kesehatan dengan kasus kusta pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan dengan peryakit filariasis a kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan sker serviks dan payudara kat Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP 280,827 | rogram Pencegahan dan | | Distribusi Vaksin | | | | | | | | | Dinkes | |
| pelayanan kesehatan dengan kasus kusta pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan dengan penyaki filariasis a kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan nker servik dan payudara kat Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP 1280,827 | enanggulangan Penyakit Tenular | | | | | | | | | | | | |
| pelayanan kesehatan dengan kasus kusta perayakit filariasis a kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan sera rika dan payudara kat Cakupan Puskesnas melaksanakan UKM dan UKP Dinkes 280,827 | .3.5(a) Proporsi kasus kusta | vang ditemukan dan diobati | | | | | | | | | | | |
| kasus kusta pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan dengan penyakit filariasis a kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan sker serviks dan payudara kat Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP 280,827 | rogram Pencegahan dan | | pelayanan kesehatan dengan | | | | | | | | | Dinkes | |
| pelayanan kesehatan dengan penyakit filariasis a kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan seruks dan payudara set Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP 280,827 | enanggulangan Penyakit | | kasus kusta | | | | | | | | | | |
| pelayanan kesehatan dengan perayakit filariasis a kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan sket serviks dan payudara kat Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP 280,827 | Tenular 2 E(s) Angle Dengengion Der | Activity Democial Ellusionis 1009/ | | | | | | | | | | | |
| percyatran Nessatran Control Percyatran Nessatran Control Percyatran Neselatan mental dan kesejahteraan can jiwa pertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan can jiwa teksi dini kanker serviks dan payudara tan Masyarakat Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP Juskesmas anggulangan argulangan arguna dan Masyarakat Cakupan Puskesmas anggulangan dan Masyarakat dan Masy | 23.3(c) Aligna remaparatir re | igobataii renyanteriiaiiasis 100% | negation becapation denotes | | | | | | | | | Dinkes | |
| izan jiwa izan keksi dini kanker serviks dan payudara izan Masyarakat Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP Puskesmas anggulangan izan izan izan izan izan izan izan izan | enanggulangan Penyakit | | penyakit filariasis | | | | | | | | | | |
| pertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan ian jiwa tan jiwa tan jiwa tan payudara tan payudara tan Masyarakat Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP 280,827 280,827 anggulangan ar | Jenular | | | | | | | | | | | | |
| teksi dini kanker serviks dan payudara teksi dini kanker serviks dan payudara tan Masyarakat Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP Dinkes anggulangan arg | arget 3.4. Pada tahun 2030, i | mengurangi hingga sepertiga angka ken | natian dini akibat penyakit tidak m | ınular melalui | pencegaha | n dan pen | giobatan s | serta menii | ngkatkan k | esehatan mental da | n kesejahtera | an | |
| teksi dini kanker serviks dan payudara tan Masyarakat Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP Puskesmas anggulangan ar garang | umlah puskesmas yang meny | enggarakan kesehatan | | | | | | | | | | | |
| teksi dini kanker serviks dan payudara tan Masyarakat Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP Puskesmas Tanggulangan ar garang | revalensi tekanan darah ting | - 82 | | | | | | | | | | | |
| 130 -50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan Puskesmas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan Puskesmas Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Penyakit tidak menular Penyamuk | revalensi obesitas pada pent | duduk usia ≥18 tahun | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan Puskesmas 393,000 APBN-APBD Dinkes of Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP 280,827 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pencegahan dan penanggulangan penanggulangan pengelakan menular penyakit tidak menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk | ersentase perempuan usia 3. | 0 -50 tahun yang dideteksi dini kanker s | serviks dan payudara | | | | | | | | | | |
| Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Penyemprotan/fogging sarang | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | (esehatan | Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP | | | | | | | | APBN-APBD | | Dinkes |
| | | Pelaksanaan BLUD di Puskesmas | | | | | | | | 280,827 | | | |
| | Program peningkatan Pencegahan Penyakit tidak | Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular | | | | | | | | | | | |
| nyamuk | | Penyemprotan/fogging sarang | | | | | | | | | | | |
| | | nyamuk | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Tar | Target Pencapaian | | Indikatif Alokasi | | | |
|---|---|---|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar | 2018 20 | 2019 2020 | 2021 | - Anggaran 5 Tahunan (Rp. | Sumber Pendanaan | Sumber Data | Instansi Pelaksana |
| | | 0 | | 2017 | | | | Juta) | | | |
| PROGRAM PENCEGAHAN | Pelayanan pencegahan dan | | | | | | | | | | |
| DAIN PENANGGOLANGAN | penanggulangan penyakit menular | | | | | | | | | | |
| PENTANII MENOLAN | dan penanggulangan wabah | | | | | | | | | | |
| Target 3.5. Memperkuat pend | farget 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan | n zat, termasuk penyalahguna | an narkotika d | an pengguna | an alkohol yan | g membahaya | can | | | | |
| 3.5.1(a) Jumlah penyalahgun | 3.5. 1(a) Jumlah penyalahgunaan Narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di Fasyankes | ehabilitasi di Fasyankes | | | | | | | | | |
| PROGRAM PELAYANAN DAN | PROGRAM PELAYANAN DAN Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ | | | | | | | | | BNN | Dinsos, BNN |
| KESEIAHTERAAN SOSIAI | Penggunaan Miras dan Narkoba serta Barkambangnya Draktak Drotistusi | | | | | | | | | | |
| 3.5.1(b) Jumlah vang menvele | 3.5.1(b) Jumlah yang menyelesaikan program rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | elavanan Kesehatan | | | | | | | | | |
| Drogram Delavanan | Deningkatan Kualitas Kampanya | Denangangan DMKS (Lancia | | | | | | 070 0 | | Dincoc | Dincoe |
| Rehabilitasi Kesejahteraan | Sosial, Pelavanan, Sarana dan | renanganan rivina (Lansia, Jenazah terlantar, anial. gepeng) | (a) | | | | | 0/6/6 | | NIISOS | 202 |
| Sosial | Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan | | ñ | | | | | | | | |
| | Sosial bagi PMKS | | | | | | | | | | |
| 3.5.1(c) Jumlah yang mengak: | 3.5.1(c) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. | Pelayanan Kesehatan. | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan | | jumlah peserta sosialisasi P4GN | _ | | | | | 0,970 | | | |
| Rehabilitasi Kesejahteraan | rta | (orang) | | | | | | | | | |
| Sosial | Berkembangnya Praktek Prostitusi | | | | | | | | | | |
| 3.5.1(d) Jumlah korban penya | 3.5.1(d) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan | shabilitasi sosial di dalam panti | sesuai standa | pelayanan pelayanan | | | | | | | |
| 3.5.2* Konsumsi alkohol (liter | 3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk usia≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir | un dalam satu tahun terakhir | | | | | | | | | |
| Target 3.6. Pada tahun 2030, | Target 3.6. Pada tahun 2030, menjamin akses universal tergadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk keluarga berencana informasi dan pendidikan dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program | nan kesehatan seksual dan rep | roduksi termas | uk keluarga | berencana info | ırmasi dan per | didikan dan i | ntegrasi kesehatan | ı reproduksi ke d | alam strategi | dan program |
| nasional 2.7.1 Droporti parametra tici | nasional 2 7 Doministration nets convoluted (15.00 shirm) status assacranus van maaniliki kahutukan kalu aras hacarana dan mananuakan alkan matadan | and idility of the second | and concentration | a ach cacoa | e dedeallmade | n abotan nov | adora | | | | |
| Drogon Christian Boroca | Drown Wolfers Boronana Delawara VE Carana Mobilita CD | ya yang manungan kasatana | 200 | 3 | 3 | | | | | Obboardo | Obboardo |
| 3.7.1. (a) Anaka nrevalensi ne | r i og i merkan gar ber en kana. 3.7.1. (a) Angka prevalensi nen ggunaan metode kontrasensi (CPR) semua cara nada PHS | SIId epan ada BIIS | | | | | | | | | |
| Program Pelavanan | Pelavanan Pemasangan Konstrasensi | Persentase Kenesertaan KB | | | | | | 484 | | DPPKRPMD | DPPKRPMD |
| Kontrasepsi | | בוזכוונמזכ עב ביינוממו עם | | | | | | ř | | | |
| 3.7.1. (b) Angka penggunaan metode kontrasepsi MKJP | metode kontrasepsi MKJP | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan | Constrasepsi | Jumlah Penghargaan Pelayanan | _ | | | | | 484 | | DPPKBPMD | DPPKBPMD |
| Kontrasepsi | | KB Baru (MOP) | | | | | | | | | |
| 3.7.1. © ASFR | | | | | | | | | | | |
| Program Kesehatan | KIE Kesehatan Reproduksi Remaja | Cakupan ketersediaan data dan | - | | | | | 755 | | DPPKBPMD | DPPKBPMD |
| Reproduksi Remaja | bagi Remaja | informasi keluarga | | | | | | | | | |
| 3.7.1. (d) TFR | | | | | | | | | | | |
| Program Keluarga Berencana | Pembinaan KB | Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga | _ | | | | | 755 | | DPPKBPMD | DPPKBPMD |
| Program Pelayanan | | | | | | | | | | | |
| Kontrasepsi | | | | | | | | | | | |
| Program penyiapan tenaga | Pelayanan KIE | | | | | | | | | | |
| pendamping Kelompok Bina | | | | | | | | | | | |
| Keluarga | - | | | | | | | | | | |
| Target 3.8. Mencapai cakupai | greg 1.8. Weingelan Kekehatu miversal termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, erektri, berkualitas, dan | gan risiko keuangan, akses teri | nadap pelayan | an kesehataı | ı dasar yang ba | iik, dan akses t | erhadap obat | -obatan dan vaksıı | າ dasar yang am | an, etektır, ber | kualitas, dan |
| terjangikau bagi semua orang 3.8.1. (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | 3 esehatan Nasional (JKN) | | | | | | | | | | |
| 3.8.2* Jumlah penduduk yang | 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk | kesehatan masyarakat per 1.0 | 000 penduduk | | | | | | | | |
| PROGRAM PELAYANAN | Penyusunan Data Base KK Miskin | | | | | | | | | Dinsos | Dinkes, |
| PENDATAAN JAMINAN | Penerima Bantuan | | | | | | | | | | Dinsos |
| BAINI DAIN SOSIAL | | | | | | | | | | | |

| | Instansi | Pelaksana | |
|-------------------|-------------------|------------------|------|
| | 2400 204000 | Sumper Data | |
| | Sumber | Pendanaan | |
| Indikatif Alokasi | Anggaran 5 | Tahunan (Rp. | |
| | | 2021 | |
| ıcapaian | | 2020 | |
| Target Per | | 2018 2019 2020 | |
| | | 2018 | |
| Topics | lalia. | Dasal | 2017 |
| | 400 | | |
| | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan | |
| | a choisea | Neglatali | |
| | | riogiaiii | |

3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. 3.a.1 Persentase merokok pada penduduk usia ≥15 tahun

| TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS | RKUALITAS | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|--|---|----------------|------------------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan (2017) | Target Pencapaian 2018 2019 2020 2021 | Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Data | Penanggungjawab Pelaksana |
| Target 4.1. Pada Tahun 2030, morelevan dan efektif | ıenjamin bahwa semua anak perempuan d | larget 4.1. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyekesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif | r dan menengah tanp | a dipungut biaya, setara, dan b | erkualitas, yang mengarah | pada capaiar | pembelajaran yang |
| INDIKATOR SDG's: 4.1.1* Propo | orsi anak-anak/anak muda: (a) pada kelas 4 | INDIKATOR SDG's: 4.1.1* Proporsi anak-anak/anak muda: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika, menurut jenis | hir SMP/kelas 3 yang | mencapai standar kemampuan | minimum dalam: (i) memb | aca, (ii) mate | matika, menurut jenis |
| kelamin | | , | | | | | |
| INDIKATOR SDG'S: 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK | gka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | at. | | | | | |
| INDIKATOR SDG's : 4.1.1.(e) Ang | INDIKATOR SDG's: 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | rajat. | | | | | |
| Target 4 E Bada Tahin 2030 m | INDIKATOR SDG'S: 4.1.1.(g) Kata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun ד-יריבול לוך באינם בילינים אולים באל המחלקים המחלקים באינו להים באולם באל המחלקים באינו באינו להים באל המחלקים | NDIKATOK SUSS. 4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | chibibaca tedanit dist | inch activitied achievale acts a | sems of actuor tederacisem | chactage du | tederensem tenen |
| naiget 4.5. Fada Tanun 2000, mengimangkan dispant penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. | rengimangkan dispantas gender dalam per Ialam kondisi rentan. | inidikan, dan menjamin akses yang sama di | ıtak tiliğkat pelididik | III dan pelatinan kejurdan, bagi | illasyalakat relitali te illias | ur penyanua | iig cacat, iiiasyai akat |
| INDIKATOR SDG's: 4.5.1.* Rasio APM di SD/MI/sederajat | o APM di SD/MI/sederajat | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 4.5.1.* Rasio APM di SMP/MTs/seder | o APM di SMP/MTs/sederajat | | | | | | |
| PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN | | Angka rata-rata lama sekolah | | | | | |
| acieles distances | accordence of the former of the former of the former of | Concession of the Control of the Con | | | | Disdilas | Circling |
| r og am wajn berajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | penyerenggaraan penduakan dasar SD/MI | ret sericase permigkacan sarana prasarana mutu pendidikan SD | | | | Disdirk pola | |
| Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan | penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTS/sederaiat | Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP | | | | Disdikpora | Disdikpora |
| Tahun | Pengembangan kompetensi siswa | siswa yang mengikuti Tes Pendalaman | | | | Disdikpora | Disdikpora |
| | periorinasar | iviate in veias 9 sivil | | | | | |
| | Pembangunan, renab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar | Jumlah sarana dan prasarana sekolah SMP | | | | Disdikpora | Disdikpora |
| | Pengembangan Kurikulum, bahan ajar | jumlah sekolah model penguatan | | | | Disdikpora | Disdikpora |
| | dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD | kurikulum 13 di sekolah dasar | | | | | |
| Target 4.2. Pada Tahun 2030, m | enjamin bahwa semua anak perempuan d | arget 4.2. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah yang berkualitas, sehingga mereka | nbangan dan pengasu | han anak usia dini, pengasuhan | , pendidikan pra sekolah ya | ang berkualit | as, sehingga mereka |
| siap untuk menempuh pendidikan dasar. | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) | | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | |
| Program Pendidikan Anak Usia Dini | | Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan | | | 27356 | Disdikpora | BPS, Disdikpora |
| Program Pendidikan Anak Usia | Pengembangan kurikulum, bahan aiar | 0 | | | 27356 | Disdikpora | BPS. Disdikpora |
| Dini | dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini | | | | | - | |
| Program Pendidikan Anak Usia | Pengembangan Pendidikan Anak Usia | | | | 27356 | Disdikpora | BPS, Disdikpora |
| | | | | | | : | |
| Program Pendidikan Anak Usia Dini | Pengadaan sarana dan prasarana KBM | | | | 27356 | Disdikpora | BPS, Disdikpora |
| Target 4.6. Pada Tahun 2030, m | ienjamin bahwa semua remaja dan propor | Target 4.6. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan iterasi dan numerasi | maupun perempuan, | memiliki kemampuan literasi d | an numerasi | | |

| | | | 6 | adilose | Target P | Target Pencapaian | Indikatif Alokasi | Sumbor | demeinampagae | 40,000 |
|--|--|---|-----------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan (2 | | 2018 2019 | 2020 2021 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Data | Pelaksana | a wan |
| INDIKATOR SDG's: 4.6.1 (a) Perse | INDIKATOR SDG's : 4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun | rr ≥ 15 tahun | | | | | | | | |
| PROGRAM PENDIDIKAN NON | Penyelenggaraan Pendidikan Non | jumlah penyelenggaraan Kejar paket | | | | | | Disdikpora | BPS, Disdikpora | |
| FORMAL | Formal Paket A dan B | | | | | | | | | |
| Target 4.c. Pada tahun 2030, seca | ra signifikan meningkatkan pasokan guru | Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama intemasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara | ama internasion | al dalam pe | latihan gur | u di negara berl | embang, terutama nega | ara kurang be | rkembang, dan ne | egara |
| berkembang kepulauan kecil. | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 4.c.1* Persent | INDIKATOR SDG's: 4.c.1* Persentase guru (SD, dan SMP) yang bersertifikat pendidik | t pendidik | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 4.c.1* Jumlah | INDIKATOR SDG's: 4.c.1* Jumlah guru TK dan SD dan SMP yang bersertifikat pendidik | at pendidik | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's: 4.c.1* Jumlah guru TK, SD dan SMP den | guru TK, SD dan SMP dengan kualifikasi minimal S1/D4 | ninimal S1/D4 | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN | | Persentase guru yang bersertifikasi | | | | | | Disdikpora | Disdikpora | |
| K DAN TENAGA | Evaluasi standar pelayanan minimal | Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan | | | | | | Disdikpora | Disdikpora | |
| KEPENDIDIKAN | | evaluasi 27 indikator pencapaian SPM | | | | | | | | |
| | Peningkatan kapasitas tenaga pendidik | Jumlah pelaksanaan Verifikasi, sosialisasi | | | | | | Disdikpora | Disdikpora | |
| | dan kependidikan | dan konsultasi pelaksanaan sertifikasi | | | | | | | | |
| | | guru (kegiatan rutin) | | | | | | | | |
| | Pendataan dan pemetaan pendidik dan | Jumlah laporan individu sekolah, data | | | | | | Disdikpora | Disdikpora | |
| | tenaga kependidikan | pendidik, tenaga kependidikan, siswa dan satuan pendidikan. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER | DER | | | | | | | | | |
| , | : | Indikator Kineria | | Baseline — | Targ | Target Pencapaian | Indikatif Alokasi | | | Instansi |
| Program | Kegiatan | Program/Kegiatan | Satuan | (2017) | 2018 20 | 2019 2020 | 2021 Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | | Sumber Data Pelak | Pelaksana |
| Target 5.1. Mengakhiri segala ben | farget 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. | an dimanapun. | | | | | | | | |
| 5.1.1* Jumlah kebijakan yang resp | 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | n perempuan. | | | | | | | | |
| Program Penguatan Kelembagaan | Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, | saha, Pelatihan bagi Kelompok Desa | | | | | | Dinsos | SC | |
| | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Data Pilah Gender dan | Jumlah buku profil | | | | | | | | |
| | Pemberdayaan Perempuan dan Anak | * | | | | | | | | |
| | Operasional Gabugan Organisasi Wanita | anita Jumlah Organsasi wanita | | | | | | | | |
| | Penunjang Kegiatan Dharma Wanita | Jumlah Kegiatan Dharma Wanita | | | | | | | | |
| | | Persatuan (OPD) | | | | | | | | |
| Target 5.2. Menghapuskan segala | bentuk kekerasan terhadap kaum peren | Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. | k perdagangan | orang dan e | ksploitasi s | eksual, serta be | bagai jenis eksploitasi la | ainnya. | | |

| Satuan Desa Manita Wanita Lual, atau emosional) E pringai | Indikator Kineria Baseline Target Pencapaian | capaian Indikatif Alokasi | Inctanci |
|--|--|---|----------|
| Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. 7.1.1 vinah kebijakan yang reponsif gender mendukung pemberdayaan perempuan Anak Program Penguatan Kelembagaan Petetihan Bimbingan Manajemen Usaha, Pelatihan bagi Kelompok Desa Pergran Pengarusutamaan Gender dan Anak Anak Operasional Gabugan Organisasi Wanita Jumlah buku profill Pemberdayaan Perempuan dan Anak Operasional Gabugan Organisasi Wanita Jumlah buku profill Pemberdayaan Perempuan dan Anak Operasional Gabugan Organisasi Wanita Jumlah buku profill Pemberdayaan Perempuan dan Anak Operasional Gabugan Organisasi Wanita Jumlah Buku profill Anak Garaman terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan Peringkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan Penngan Perempuan Perempuan Perempuan Penngan Perempuan Penngan Perempuan Penngan Perempuan Penngan Penngan Penngan Perempuan Penngan Perempuan Penngan Penn | Satuan | 2020 2021 Anggaran 5 Tahunan Sumber Data (Rp. Juta) | _ |
| 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Program Penguatan Kelembagaan Peletihan Bimbingan Manajemen Usaha, Pelatihan bagi Kelompok Desa Pengarusutamaan Gender dan Anak Anak Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Operasional Gabugan Organisasi Wanita Jumlah buku profil Penyasuan Data Plain Gender dan Anak Operasional Gabugan Organisasi Wanita Pengaran Peningkatan Reserasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan Pergam Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan Peningkatan Kualitas Hidup Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Jumlah Korban yang didampingal Upakan Peringkatan Kualitas Hidup Pelaksanaan Pempuan Ingkungannya dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Kualitas Hidup Pelaksanaan Pempuan Ingkungannya Ingkungannya dan Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SOM Forum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perempuan Ingkungannya dan Anak S.2.2.(a) Perempuan Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SOM Forum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SOM Porum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Pengaman Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Mualitas Hidup Peningkatan SOM Porum Perlindungan Perempuan Pengaman Peningkatan Kualitas Hidup Pengaman Pengaman Jumlah Persen korban yang perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Pengaman Peningkatan Pengaman Pengaman Pengaman Peningkatan Pengaman Pengaman Peningkatan Pengaman P | | | |
| Pergram Penguatan Kelembagaan Peletihan Bimbingan Manajemen Usaha, Pelatihan bagi Kelompok Desa pengarusutamaan Gender dan Anak Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Penyusunan Data Pilah Gender dan Anak Peranguan dan Anak Peranguan dan Anak S.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (PDD) S.2.1.* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (PSD) Program Peningkatan Kualitas Hidup Penkampuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasal dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup Penkamban Perunlugan Kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasal dan Perlindungan Perempuan S.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan gidampingai dan Anak S.2.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dan Penindungan Perempuan (wuru 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dan Perlindungan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingau Upaya Perlindungan perempuan Perempu | | | |
| Pengarusutamaan Gender dan Anak Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Anak Anak Pemberdayaan Perempuan dan Anak Penyusunan Data Pilah Gender dan Perempuan dan Anak Operasional Gabugan Organisasi Wanita Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Peratuan (OPD) 5.2.1 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (Iumur 15-64 tahur) mengalami kekerasan (PSI), seksual, atau emosional) oleh pasai Program Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan (Ingkungan Norban Kekerasan Peningkatan Kualitas Hidup Penungkatan Rewalisan Remagani Ungkungan Perempuan Pengaran Peningkatan Kualitas Hidup Penungkatan Rewalisan Remagani Ingkungannya dan Penindungan Perempuan Achan Kekerasan Perempuan Pengaran Peningkatan Kualitas Hidup Penungkatan SOM Porum Perlindungan Perempuan (Korban Kekerasan Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SOM Porum Perlindungan Perempuan (Korban Kekerasan Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SOM Porum Perlindungan Perempuan (Korban Kekerasan Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Rewasa dan anak perempuan (Korban Kekerasan Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Rualitas Hidup Pengaran Peningkatan Kualitas Hidup Pengaran Peningkatan Kualitas Hidup Pengaran Peningkatan Kualitas Hidup Pengaran Peningkatan Rualitas Hidup Pengaran Pengaran Peningkatan Rualitas Hidup Pengaran Pengaran Pengaran Pengaran Pengaran Pengaran Pengara | an bagi Kelompok Desa | Dinsos | |
| Anak Penyusuan Data Pilah Gender dan Jumlah buku profil Penyusuan Data Pilah Gender dan Penberdayaan Perempuan dan Anak Operasional Gabugan Organisasi Wanita Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Denunjang Kegiatan Dharma Wanita S.2.1 Proporsi pere mpuan dewasa dan anak perempuan (muru 15-64 tahun) mengalami kekerasan (psik, seksul, atau emosional) oleh pasa Program Peningkatan Kualitas Hidup Pelaksanaan Perempuan Pengaman Peningkatan Kualitas Hidup Pelaksanaan Perempuan Pengaman Peningkatan Kualitas Hidup Pelaksanaan Perempuan Lingkungan Perempuan Gan Anak S.2.2.1(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Malah Gorban Kekerasan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Mulah Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Alphaya Perlindungan Pengaman Peningkatan Kualitas Hidup Pengaman Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan Pengaman Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan Jumlah persen korban yang | (desa) | | |
| Penyusunan Data Pilah Gender dan Jumlah buku profil Penyusunan Data Pilah Gender dan Anak Denerakonal Gabugan Organisasi Wanita Penberakonal Gabugan Organisasi Wanita Penunjang Kegatan Dharma Wanita Penunjang Kegatan Dharma Wanita Persatuan (OPD) Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang bulik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan Persatuan kulatas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan Pengalami kekerasan (Fisik, seksua), atau emosional) oleh pasan Pengaman Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan Peningkatan Kualitas Hidup Pengamanan Penulihan dan Perlindungan Perempuan Pengaman Penulihan dan Perlindungan Perempuan Gan Anak 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Program Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SDM Forum Perlindungan Perempuan Kekerasan ana Perlindungan Perempuan Kekerasan and Penergahan Tindak 5.2.2.4 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dan Perlindungan Perempuan Pe | | | |
| Pemberdayaan Perempuan dan Anak 1. Aranget S.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadan Drama merempuan di rumlah kegatan Dharma Wanita Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Perempuan (Hanga) Perempuan Perempuan (Hanga) Perempuan Perempuan (Hanga) Perempuan Perempuan Perempuan (Hanga) Perempuan Perempuan Perempuan (Hanga) Perempuan Perempuan Perempuan (Hanga) Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan (Hanga) Perempuan | buku profil | | |
| Operasional Gabugan Organisasi Wanita Jumlah Organisasi wanita Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Jumlah Kegiatan Dharma Wanita Jersatuan (OPD) Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan diruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan Jumlah Korban yang didampingal Peleksanaan Penulihan dan Penjangkauan Jumlah Korban yang didampingal Peleksanaan Penulihan dan Perlindungan Perempuan Jumlah Korban yang didampingal Janahak 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan Markatan Kualitas Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SOM Forum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak 5.2.2.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan Man Pencegahan Tindak 5.2.2.(a) Program Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SOM Forum Perlindungan Perempuan Pengraman dan Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Pengraman Pengraman Peningkatan Kualitas Hidup Pengraman Pengraman Pengraman Pengraman Pengram | | | |
| Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan diruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dara Pengatuan (polb), termasuk perdagangan orang dara Program Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasan Program Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Perempuan Pengaman Peningkatan Kualitas Hidup Pendaman Peningkatan Kualitas Hidup Pendaman Peningkatan Kualitas Hidup Ana Anak S.2.1.(a) Pevalensi kekerasan terhadap anak perempuan Anak Brogram Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan Pergaman Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan Perlindungan Perempuan Pergampungan Perempuan Pergampungan Perempuan Pergaman Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan Perlindungan Penempuan Pergampungan Perempuan Pergampungan Perempuan Perempuan Perempuan Pergampuan Pergampungan Pengampuan Pengampungan Pengampuan Pengampungan Pengampuan Pengampungan Pengampuan Pengampungan P | Organsasi wanita | | |
| Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dar 5.2.1.* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasan Program Peningkatan Kualitas Hidup Pelaksanaan Perulindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan ditangani Perempuan perempuan terhadap Tindak Kekerasan ditangani Perempuan terhadap anak perempuan adan Anak 5.2.1.(a) Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SOM Forum Perlindungan Perempuan korban kekerasan dan Pencegahan Tindak Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SOM Forum Perlindungan Perempuan korban kekerasan dan Pencegahan Tindak Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Mulaina penampuan korban kerempuan dewasa dan anak perempuan (mur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dan Pendungan Perempuan P | Kegiatan Dharma Wanita | | |
| Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dar 5.2.1 Proposi perempuan dewasa dan anak perempuan Upaya Perlihdungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlihdungan ang Pergaman Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Perempuan Pergaman Peningkatan Kualitas Hidup Pengkanaan Penuluhan dan Perlihdungan Perempuan Pergaman Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan S.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan (korban kekerasan peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan S.2.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan (korban kekerasan peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlihdungan Perempuan dewasa dan anak perempuan (korban kekerasan terhadap anak perempuan (korban kekerasan terhada) penangkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlihdungan perempuan dewasa dan anak perempuan (korban kekerasan terhada) pendampingan Upaya Perlihdungan perempuan penangkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlihdungan perempuan Pe | (OPD) | | |
| 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasan dan Pengaran Perngatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan Perngam Perngatan Kualitas Hidup Pelaksanaan Pernulihan dan Penjangkauan Jumlah Korban yang didampingal berampuan Pelaksanaan Pernulihan dan Penjangkauan Jumlah Korban yang didampingal dan Anak dan Perngam Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SDM Forum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan anak perempuan Rohan Rekerasan anak perempuan Hodan Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Pendampuan (maur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dan Peningkatan Kualitas Hidup Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Pengraman Peningkatan Kualitas Hidup Pengraman Peningkatan Kanitas Hidup Pengraman Peningka | blik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksua | , serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. | |
| Program Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan Percempuan Perempuan Perempuan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan ditangani dan Perindungan Perempuan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan ditangani Jumlah Korban yang didampingal dan Penjangkauan Jumlah Korban yang didampingal dan Anak dan Anak Berempuan ingkungannya dan Anak Perempuan korban Kekerasan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SDM Forum Perlindungan Perempuan Arabanganak Rekerasan dan Pencegahan Tindak Program Peningkatan Kualitas Hidup Penlampuan Kekerasan dan Pencegahan Tindak Program Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan jumlah persen korban yang Perlampuan Arabangan Upaya Perlindungan jumlah persen korban yang dan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Penganan dan Perlindungan Perempuan Per | kerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan p | asangan dalam 12 bulan terakhir. | |
| dan Perlindungan Perempuan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan ditangani Program Peningkatan Kualitas Hidup Peaksanaan Penulihan dan Penjangkatan Jumlah Korban yang didampingai dan Perlindungan Perempuan Gan Anak S.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Program Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SDM Forum Perlindungan Annehidungan Perempuan Korban Kekerasan dan Penempuan Korban Kekerasan dan Penempuan (wurur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dan Peningkatan Kualitas Hidup Pendampuan penempuan | persen korban yang | Dinsos | |
| Program Peningkatan Kualitas Hidup Pelaksanaan Penulihan dan Penjangkauan Jumlah Korban yang didampingai dan Pengram Perempuan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan Ingkungannya dan Anak Ga.2.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Program Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SDM Forum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Plana Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Manak perempuan (wara dan anak perempuan (wara dan peningkatan Kualitas Hidup Pendampuan Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Pengraman (wara dan Pengram Peningkatan Kualitas Hidup Pengraman Perempuan (wara dan Pengraman dan Perlindungan Pengram Pengraman Pengraman Pengraman Pengraman dan Pengraman dan Pengraman Pengraman Pengraman dan Pengraman dan Pengraman P | ani | | |
| dan Perlindungan Perempuan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan lingkungannya dan Anak 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Program Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SDM Forum Perlindungan dan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan d Program Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan jumlah persen korban yang dan Perlindungan Perempuan Perempuan Penganan Penganan dan Penjangan Upaya Perlindungan dinangan dinangan dan Perlindungan Penganan Pengan | Korban yang didampingai | | |
| dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SDM Forum Perlindungan Program Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SDM Forum Perlindungan dan Perlindungan Perempuan Korban kekerasan dan Pencegahan Tindak Program Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan persem yang perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan d Program Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan jumlah persen korban yang dan Perlindungan Penempuan Penempuan Penempuan tenhadap Tindak kekerasan | gannya | | |
| 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Program Peningkatan Kuditas Hidup Peningkatan SDM Forum Perlindungan Program Peningkatan Kuditas Hidup Peningkatan SDM Forum Perlindungan S.2.2.* Propriori perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan d Program Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan jumlah persen korban yang dan Perlindungan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Penganan dinangani | | | |
| Program Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan SDM Forum Perlindungan dan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan d Program Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan jumlah persen korban yang dan Perlindungan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Alan Rekerasan ditangani | | | |
| dan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan d Program Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan jumlah persen korban yang dan Perlindungan Perempuan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan ditangani | | Dinsos | |
| Pidana 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak Perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan d Program Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan jumlah persen korban yang dan Perlindungan Perempuan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan ditangani | | | |
| 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan d Program Peningkatan Kualitas Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan jumlah persen korban yang dan Perlindungan Perempuan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan ditangani | | | |
| Hidup Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan | kerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan teral | ij. | |
| Perempuan terhadap Tindak Kekerasan | persen korban yang | Dinsos | |
| _ | ini | | |
| 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | ehensif. | | |

| | | | | 1 | Target Pencapaian | capaian | Indikatif Alokasi | | |
|---|--|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------|---|------------------|-----------------------|
| Program | Kegiatan | indikator kinerja Program/Kegiatan | Satuan Bas (2 | (2017) 2018 | 18 2019 | 2020 2021 | Anggaran 5 Tahunan Sumber Data (Rp. Juta) | Sumber Data | instansi Pelaksana |
| Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Program Peningkatan Kualitas Hidup Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak | Jumlah Korban yang didampingai lingkungannya | | | | | | Dinsos | |
| Target 5.3. Menghapuskan semua pral 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-2. | Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hiduo bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | , perkawinan dini dan paksa, serta ! hidup bersama sebelum umur 15 ta | sunat perempua | in. m umur 18 ta | hu. | | | | |
| Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Pelaksanaan Sosialisasi dan KIE Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Advokasi KIE PUG (desa) | | | | | | Dinsos | |
| 5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah l | erempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | | | | | | | | |
| Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan | Pelaksanaan Sosialisasi dan KIE Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan | Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Advokasi KIE PUG (desa) | | | | | | Dinsos | |
| Perempuan E 2 1 (h) Andra Volahiran nada nesam | Perempuan Pertindungan Anak E 3 1 (A) Anako balakiran nada nasamanan mang 15 10 ahun (Ana Saocific Eastilla, Data/ASED) | Pato (ASED) | | | | | | | |
| Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | .(1) | | | | | | Dinsos | |
| Target 5.5. Menjamin partisipasi penu 5.5.1* Proporsi kursi vang diduduki pe | Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. 5.5.1* Proporsi kursi vang diduduki perempuan di parlemen daerah dan pemerintah daerah. | gi perempuan untuk memimpin di s h daerah. | emua tingkat pe | engambilan ke | putusan dala | n kehidupan | politik, ekonomi, dan masy | arakat. | |
| Meningkatkan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | Meningkatkan Kapasitas lembaga perwakilan Persentase pembahasan rakyat daerah | Persentase pembahasan rancangan peraturan daerah | | | | | | Setwan | |
| 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial | la di posisi managerial. | | | | | | | | |
| Pengelolaan kepegawaian pindah/ purna tugas PNS | Pengelolaan mutasi jabatan administrasi dan Persentase penempatan aparatur JPT | Persentase penempatan aparatur dalam jabatan | | | | | | ВКРР | |
| Target 5.6. Menjamin akses universal and the Beijing Platform serta dokume | Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesual dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beiling Platform serta dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. | dan hak reproduksi seperti yang tela rensi tersebut. | ah disepakati se | suai dengan F | rogramme of | Action of the | International Conference o | n Population and | evelopment |
| 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan k | 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) | | | | | | | | |
| Program Keluarga Berencana | Pelayanan KIE, Sarana Mobilitas KB | PUS yang tidak ber KB | | | | | | DPPKBPMD | |
| 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahama | 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | e kontrasepsi modern. | | | | | | | |
| Program KB | Pelayanan KIE, Sarana Mobilitas KB | PUS yang paham metode kontrasepsi moder | | | | | | DPPKBPMD | |

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

| | | | | Grilos | Targ | Target Pencapaian | ian | Indikatif Alokasi | Sumbor | demeinamene |
|--|------------------------------------|---|--------------|------------|-------------|---------------------|------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan | | (2017) | 2018 2 | 2018 2019 2020 2021 | 2021 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Data | renanggawan Pelaksana |
| Target 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai | akses universal dan merata terha | farget 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua | oagi semua | | | | | | | |
| 6.1.1(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | nemiliki akses terhadap layanan s | umber air minum layak | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA Pengembangan pengelolaan, | Pengembangan pengelolaan, | | | | | | | | Dinkes | |
| PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR prasarana dan sarana air minum | prasarana dan sarana air minum | | | | | | | | | |
| LIMBAH | dan air limbah | | | | | | | | | |
| Target 6.2. Pada Tahun 2030, mencapai | akses terhadap sanitasi dan kebe | Farget 6.2. Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum | ua, dan meng | hentikan p | raktik buar | ig air besar | tempat ter | buka, memberikan perha | tian khusus | pada kebutuhan kaum |
| perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | t rentan. | | | | | | | | | |
| 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air | i fasilitas cuci tangan dengan sab | un dan air | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Lingkungan Pembinaan dan Pengawasan | Pembinaan dan Pengawasan | Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar | | | | | | # | | |
| Sehat | Kesehatan Lingkungan | Sanitasi Total Berbasis masyarakat | | | | | | | | |
| | | (STBM) | | | | | | | | |
| 6.2.1.(b)Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | memiliki akses terhadap layanan | sanitasi layak | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | Target Pencapaian | Indikatif Alokasi | | |
|---|--|--|-----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan | Baseline (2017) | 2018 2019 2020 2021 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Data | Penanggungjawab Pelaksana |
| Program Pengembangan Lingkungan Pembinaan dan Pengawasan Sehat | Pembinaan dan Pengawasan Kesebatan lingkungan | Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat | | | | Dinkes | |
| | | (STBM) | | | | | |
| 6.2.1.(c)Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | ielaksanakan Sanitasi Total Berbasis | s Masyarakat (STBM) | | | | | |
| Program Pengembangan Lingkungan Pembinaan dan Pengawasan | Pembinaan dan Pengawasan | Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar | | | | Dinkes | |
| Sehat | Kesehatan Lingkungan | Sanitasi Total Berbasis masyarakat | | | | | |
| | | (STBM) | | | | | |
| 6.2.1.(d)Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | pen Defecation Free (ODF)/Stop Bu | iang Air Besar Sembarangan (SBS) | | | | | |
| Program Pengembangan Lingkungan Meningkatnya Kesehatan | Meningkatnya Kesehatan | Cakupan Desa Stop BABS | | | | Dinkes | |
| Sehat | Lingkungan Masyarakat | | | | | | |
| 6.2.1.(f)Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat | rlayani sistem pengelolaan air limba | sh terpusat | | | | | |
| Program Pengembangan Lingkungan Pembinaan dan Pengawasan | Pembinaan dan Pengawasan | Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar | | | | DLH | |
| Sehat | Kesehatan Lingkungan | Sanitasi Total Berbasis masyarakat | | | | | |
| | | (STBM) | | | | | |

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

| יסיסקון זי בוזבויסן בבויסון בעול ובויסקולים | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|---|-----------|-----------|------|------------------------------|-------------|-----------|
| 2000 | 20,000 | and in the contract of the con | Target Pencapaian Indikatif Alokasi Anggara | Target Pe | encapaian | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | o de C | Instansi |
| Togram | regiatali | ilidinatol niitelja riogiailij neglatali | Satuali Basellile (2017) 20 | 18 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | Sumper Data | Pelaksana |
| Target 7.2. Pada Tahun 2 | 2030, meningkatkan | Target 7.2. Pada Tahun 2030, meningkatkan secara substasial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global | ıran energi global | | | | | | |
| 7.2.1*Bauran energi terbarukan | barukan | | | | | | | | |
| Program Potensi | | Meningkatnya cakupan potensi ketersediaan energi | | | | | | DKUKMP | |
| Energi | | | | | | | | | |
| 7.2.1*Bauran energi terbarukan | barukan | | | | | | | | |
| Pé | Pendataan Potensi | Tersusunnya Draft Dokumen Potensi Energi Panas | | | | | | DKUKMP | |
| 5 | Enorgi | Dumi Goothorms | | | | | | | |

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

| | | | | | | Target Pencapaian | apaian | _ | Indikatif Alokasi | | | |
|--|-----------------------------|---|----------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|------------|----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Baseline (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. | Sumber Pendanaan | Sumber Data | Instansi Pelaksana |
| | | | | | | | | | Juta) | | | |
| Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per | buhan ekonomi per kapita s | kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang | ın, khususnya | , setidaknya | 7 persen p | ertumbuhan | produk dor | nestik bru | o per tahun di ne | gara kurang berl | embang | |
| 8.1.1*Laju pertumbuhan PDB per kapita | oita | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | | _ | Bappeda | |
| Perekonomian | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1.(a)PDB per kapita | | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan pembangunan | | | | | | | | | _ | Bappeda | |
| unp | dunia usaha dan industri | | | | | | | | | | | |
| Perk | Perencanaan Ketahanan | | | | | | | | | | | |
| Panı | Pangan dan Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | |
| 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. | konomi yang lebih tinggi, m | elalui diversifikasi, peningkatan | dan inovasi te | knologi, terr | nasuk mela | lui fokus pad | a sektor ya | ng membe | ri nilai tambah tir | ıggi dan padat ka | arya. | |
| INDIKATOR SDG's : 8.2.1*Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun | nbuhan PDB per tenaga kerj | a/Tingkat pertumbuhan PDB riil | per orang bel | erja per tah | E | | | | | | | |
| Program Perluasan Kerja | | Persentase tenaga kerja yang | | | | | | | | | Bappeda | |
| | | berwirausaha | | | | | | | | | | |
| Kegi | Kegiatan terapan teknologi | Jumlah Peserta TTG | | | | | | | | | | |
| teps | tepat guna | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | Target Pencapaian | capaian | | Indikatif Alokasi | | | |
|--|---|--|-------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Baseline (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendanaan | Sumber Data | Instansi Pelaksana |
| | Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur | Produktif Jumlah paket padat karya | | | | | | | | | | |
| | Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Keria Lansia dan | Jumlah Peserta Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Keria | | | | | | | | | | |
| | Penyandang Cacat | Lansia dan Penyandang Cacat | | | | | | | | | | |
| | Pemanduan dan Pembinaan | Jumlah Peserta TKM | | | | | | | | | | |
| | usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri | | | | | | | | | | | |
| Target 8.3 Menggalakkan kebij | jakan pembangunan yang menduk | Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan | lapangan | cerja layak, | kewirausal | naan, kreativ | itas dan inov | asi, dan ı | nendorong formalis | sasi dan pertum | buhan usaha mikr | o, kecil, dan |
| menengah, termasuk melalui a | menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1*Proporsi lapangan kerja | 8.3.1*Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin | dasarkan jenis kelamin | | | | | | | | | | |
| Penempatan Tenaga Kerja | 1) Penyuluhan ketenagakerja- Pencari kerja yang ditempatkan | Pencari kerja yang ditempatkan | | | | | | | | | Disnakertrans | |
| | an, 2) Penempatan Pencari ker- | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1.(a)Persentase tenaga keria formal | ja menana kasa, akasa, akasa | | | | | | | | | | | |
| Penempatan Tenaga Keria | 1) Penyuluhan ketenagakeria- | Pencari kerja vang ditempatkan | | | | | | | | | Disnakertrans | |
| | an, 2) Penempatan Pencari ker- | | | | | | | | | | | |
| | ja melalui AKAL, AKAD, AKAN | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1.(b)Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian | ja informal sektor pertanian | | | | | | | | | | | |
| Penempatan Tenaga Kerja | 1) Penyuluhan ketenagakerja- | Pencari kerja yang ditempatkan | | | | | | | | | Disnakertrans | |
| | an, 2) Penempatan Pencari ker- ia melalui AKAL AKAD AKAN | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1.(c)Persentase akses UMK | 8.3.1.(c)Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Recil, dan Menengah) ke layanan keuangan | ngah) ke layanan keuangan | | | | | | | | | | |
| Program Penciptaan iklim | Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | KUKMP | |
| usaha-usaha kecil menengah | Kecil menengah | | | | | | | | | | | |
| dan kondusif | | | | | | | | | | | | |
| Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap sama nilainya. | iencapai pekerjaan tetap dan prod | dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang ditabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang | i semua pei | empuan da | an laki-laki, | termasuk ba | gi pemuda d | lan penya | ndang ditabilitas, d | an upah yang sa | ama untuk pekerja | an yang |
| 8.5.1*Upah rata-rata per jam pekerja | oekerja | | | | | | | | | | | |
| Perlindungan dan | Pendampingan dewan | jumlah lembaga yang didampingi | | | | | | | | | Disnakertrans | |
| pengembangan lembaga ketenagakeriaan | pengupahan | | | | | | | | | | | |
| 8.5.2*Tingkat pengangguran te | 8.5.2*Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur | dan kelompok umur | | | | | | | | | | |
| Program penempatan tenaga | 1) Penyuluhan ketenagakerja- | Pencari kerja yang ditempatkan | | | | | | | | | Disnakertrans | |
| kerja | an, 2) Penempatan Pencari kerja melalui AKAL, AKAD, AKAN | | | | | | | | | | | |
| 8.5.2.(a)Persentase setengah pengangguran | oengangguran | | | | | | | | | | | |
| Program penempatan tenaga | 1) Penyuluhan ketenagakerja- | Pencari kerja yang ditempatkan | | | | | | | | | Disnakertrans | |
| kerja | an, 2) Penempatan Pencari kerja melalui AKAL, AKAD, AKAN | | | | | | | | | | | |
| Target 8.8 Melindungi hak-hak pekerjaan berbahaya | tenaga kerja dan mempromosikaı | Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya | terjamin ba | gi semua pe | ekerja, tern | asuk pekerja | a migran, kh | ususnya p | ekerja migran pere | mpuan, dan me | reka yang bekerja | dalam |
| 8.8.1.(a)Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. | ing menerapkan norma K3. | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN | penyelesaian prosedur, | | | | | | | | | | Disnakertrans | |
| PENGEMBANGAN LEMBAGA | penyelesaian perselisihan | | | | | | | | | | | |
| KETENAGAKERJAAN | hubungan industrial | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | - | Target Pencapaian | aian | 2 | Indikatif Alokasi | | | |
|--|--|--|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Baseline (2017) | 2018 | 2019 | _ | Z021 T | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendanaan | Sumber Data | Instansi Pelaksana |
| | penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | |
| | Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakeriaan | | | | | | | | | | | |
| Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan | anakan | kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal | ta berkelar | ijutan yang | menciptaka | n lapangan k | erja dan me | mpromos | ikan budaya dan | produk lokal. | | |
| 8.9.1*Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB | wisata terhadap PDB | | | | | | | | | | | |
| Program pengembangan destinasi pariwisata | | Jumlah peningkatan destinasi pariwisat | | | | | | | | _ | Bappeda | |
| 8.9.1.(a)Jumlah wisatawan mancanegara | ncanegara | | | | | | | | | | | |
| Program pengembangan destinasi pariwisata | Pengembangan daerah tujuan wisata | Tersusunnya studi pengembang- an daerah tujuan wisata | | | | | | | | _ | Dispar | |
| 8.9.1.(b)Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | atawan nusantara. | | | | | | | | | | | |
| | a tarik Wisata | jumlah pentas seni di obyek | | | | | | | | _ | Dispar | |
| | | wisata | | | | | | | | | | |
| 8.9.1.(c)Jumlah pendapatan retribusi sektor pariwisata | tribusi sektor pariwisata | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan | Terselenggaranya koordinasi pelayanan kepariwisataan | | | | | | | | _ | Dispar | |
| 8.9.2*Jumlah pekerja pada ind | 8.9.2*Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja | rhadap total pekerja | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan dan Rehabilitasi jumlah pembangunan dan | jumlah pembangunan dan | | | | | | | | | Disnakertrans / | |
| | Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata | rehabilitasi sarana dan prasarana obvek wisata | | | | | | | | _ | Pariwisata | |
| Program pengembangan Kemitraan | | Peningkatan jumlah mitra pariwisat | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan SDM | Terlaksananya pelatihan dan | | | | | | | | | | |
| | Kelembagaan dan | sertifikasi kompetensi usaha | | | | | | | | | | |
| | Pengendalian Pariwisata | pariwisata | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata | Terselenggaranya sarasehan forkom pokdarwis | | | | | | | | | | |
| | Pemberdayaan Desa Wisata | Terlaksananya lomba desa wisata dan workshop | | | | | | | | | | |
| Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan dor | ᅙ | mestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. | kses terha | dap perban | kan, asuran | si dan jasa ke | uangan bag | i semua. | | | | |
| o.to.t.(b)rroporsi kredit Olwin | M Lernauap total Kreuit | | | | | | | | | | | |
| Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif | Pengembangan Usaha Mikro Kecil menengah | Jumlah KUKM Yang mendapatkan Kemudahan Akses Permodalan | | | | | | | | | KUKMP | |
| | | | | | | | | | | | | |

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

| | | | | onilogo | Targ | Target Pencapaian | u | Indikatif Alokasi | 204001 | 100 |
|--|----------|---|-----------------|--------------|--------------------------------|-------------------|------------|--|--------------|-----------------------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan D | (2017) | (2017) 2018 2019 2020 2021 Tah | 19 2020 | 2021 | Anggaran 5 Sun 21 Tahunan (Rp. Juta) Da | Data | oumber instansi Data Pelaksana |
| Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualita pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | aii: | as, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus | l dan lintas ba | tas, untuk ı | nendukung | embangun | an ekonomi | dan kesejahteraan n | nanusia, den | gan fokus |
| | | | | | | | | | | |

9.1.1.(a)Kondisi mantap jalan kabupaten.

| | | | | | Target Pencapaian | Indikatif Alokasi | | |
|---|--|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan Baseline (2017) | 2018 | 2020 2021 | - Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Data | Instansi Pelaksana |
| Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Presentase Jalan kabupaten kondisi mantap | | | | | DPUPKP | |
| 9.1.1.(b)Panjang peningkatan jalan kabupaten. Program Pembangunan dan Penselabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan | oaten. Peningkatan jalan | Penanganan Jalan kabupaten | | | | | DPUPKP | |
| Jembatan Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, di meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. | si inklusif dan berkelanjutan, dan pada ta di negara kurang berkembang. | Jembatan 1849.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. | oporsi industri dalan | n lapangan kerja da | n produk domestik | bruto, sejalan dengar | n kondisi nasi | onal, dan |
| 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita. | tri pengolahan non migas terhadap PDB | dan perkapita. | | | | | - | |
| Perencanaan Pembangunan Perekonomian | | | | | | | Bappeda | |
| 9.2.1.(a)Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non | pengolahan non migas. | | | | | | | |
| | Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri | | | | | | Bappeda | |
| 9.2.2*Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas. | industri pengolahan non migas. | | | | | | | |
| Perencanaan Pembangunan | Perencanaan Ketahanan Pangan dan | | | | | | Bappeda | |
| Target 9.3 Meningkatkan akses industri d | Jamper Daya Alam lan perusahaan skala kecil, khususnya di | r et ekonomia. Tetek 80-ioningkat keses industri dan perusahaan skala kedi, khususnya di negara berkembang, temadan temasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. | ι, termasuk kredit teι | rjangkau, dan meng | ntegrasikan ke dal | am rantai nilai dan pa | sar. | |
| 9.3.1*Proporsi nilai tambah industri kecil menengah terhadap total nilai tambah industri | menengah terhadap total nilai tambah | industri. | | | | | | |
| Program pengembangan industri kecil dan menengah | | cakupan jumlah IKM Non sentra yang dikembangkan | | | | | KUKMP | |
| | Pengembangan dan pemberdayaan | Terlaksananya Pelatihan Industri | | | | | KUKMP | |
| | IKM | | | | | | | |
| 9.3.2*Cakupan industri kecil menengah dengan pinjaman atau kredit. | lengan pinjaman atau kredit. | | | | | | | |
| Program pengembangan industri kecil dan menengah | Pengembangan Industri Kreatif | Jumlah Pelatihan Industri | | | | | KUKMP | |
| | Pengembangan Pemasaran IKM | Terlaksananya Pameran | | | | | | |
| Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | | jumlah wirausaha baru | | | | | | |
| | Pengembangan Kewirausahaan | Jumlah Dana | | | | | | |
| Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif | Dengambangan Heaba Mikro Keril | Jumlah KUKM Yang mendapatkan Kemudahan Akses Permodalan Tarlakeanawa Kegiatan Escilitas UKM | | | | | | |
| | Menengah | Terransariariya neglatari rasiirtas Onivi | | | | | | |
| | | l eriaksananya Fasilitas SPIRI | | | | | | |
| Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi | | jumlah usaha yang terstandarisasi | | | | | | |
| | Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri | Jumlah Dana | | | | | | |
| Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | | | | | | | | |
| | Pengembangan Industri Rumah | Terlaksanya penyuluhan IRT dan UMKM : 1 | | | | | | |
| | Peningkatan Promosi UMKM | jumlah promosi | | | | | | |
| Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatka | an infrastruktur dan retrofit industri agar | Target 9. A Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses indust ri bersih dan | fisiensi penggunaan s | sumberdaya dan adı | psi yang lebih baik | د dari teknologi dan pr | roses industri | bersih dan |
| ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. | nua negara sesuai kemampuan masing-r | masing. | | | | | | |

| | | | | | Baseline | Target Pencapaian | ıcapaian | Indikatif Alokasi | Sumber | Instansi |
|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | ogram/Kegiatan | Satuan | (2017) 2018 | 2019 | 2020 2021 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | | Pelaksana |
| 9.4.1*Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nila | ımah Kaca dengan nilai tambah sektor in | i tambah sektor industri manufaktur. | | | | | | | DLH | |
| Program Pengendalian Pencemaran dan Pengkajian dampak lir Perusakan Lingkungan Hidup 9.4.1.(a)Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca. | Program Pengendalian Pencemaran dan Pengkajian dampak lingkungan Perusakan Lingkungan Hidup 3.4.1.(a)Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca. | Angka konsentrasi DO (dissolved oxygen) di Sungai Winongo (mg/L) | dissolved oxygen) /L) | | | | | | | ргн |
| | | | | | | | | | DLH | |
| Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapab jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta o 9.5.1*Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. | Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan humida pekerja penelitan dan pengembangan per Lida orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan. 9.5.1.* Proposi anggaran riset pemerjatah terhadan 1908. | tor industri di semua negara, i atkan pembelanjaan publik da | erutama negara-neg n swasta untuk pene | ara berkemba litian dan pen | ng, termasuk pa gembangan. | ida tahun 20 | 30, mendorong ir | ovasi dan secara | substansial men | ingkatkan |
| PROGRAM PENGUATAN SISTEM INOVASI | OVASI Pengembangan sistem inovasi daerah | erah | | | | | | | Bappeda | |
| PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN | JNAN Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah | | | | | | | | Bappeda | |
| TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN | KESENJANGAN | | | | | | | | | |
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan Baseline (2017) | 2018 | Target Pencapaian 2019 2020 | 2021 | Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Ro. Juta) | Sumber Pendanaan | Sumber Data | Instansi Pelaksana |
| 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan me 10.1.1*Koefisien Gini. | esif mencapai dan mempertahankan perl | mpertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi paling bawah pada tingkat yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional | persen populasi pali | ng bawah pada | a tingkat yang l | ebih tinggi d | aripada rata-rata | nasional | | |
| Perencanaan Pembangunan Perekonomian | | | | | | | | | | |
| 10.1.1.(a)Persentase penduduk yaı | 10.1.1.(a)Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | nal, menurut jenis kelamin dar | n kelompok umur. | | | | | | | |
| PROGRAM PELAYANAN PENDATAAN JAMINAN RANTIJAN | | Tersusunnya data statistik kemiskinan daerah | | | | H | 1200 | | Dinsos | DinsosP3A |
| SOSIAL | Penyusunan dan pengumpulan data | Penyusunan data Miskin | | | | | | | Dinsos | |
| | dan statistik daerah | | - | 1.1 | and a different factors | | - | - | | |
| larget 10.2 Pada tahun 2030, mer. 10.2.1*Proporsi penduduk yang hic | l arget 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dan usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. 10.2.1*Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | siai, ekonomi dan politik bagi s lapatan, menurut jenis kelamir | emua, terlepas darı ı ı dan penyandang dif | ısıa, jenis kela abilitas. | mın, dırabılıtas, | ras, suku, a | sal, agama atau K | emampuan ekono | mi atau status i | aınnya. |
| PROGRAM PELAYANAN | | Tersusunnya data statistik | | | | 17 | 1200 | | Dinsos | |
| PENDATAAN JAMINAN BANTUAN | | kemiskinan daerah | | | | | | | | |
| SOSIAL | Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah | Penyusunan data Miskin | | | | | | _ | Dinsos | |
| Target 10.3 Menjamin kesempatan | i arget 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat | hasil, termasuk dengan meng | hapus hukum, kebijal | can dan prakti | k yang diskrimi | natif, dan m | empromosikan le | gislasi, kebijakan c | lan tindakan ya | ng tepat |
| terkait legislasi dan kebijakan tersebut. | but. | | | | | | | | | |
| 10.3.1.(a)Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi | lam Indeks Demokrasi Indonesia | | | | | | | | | |
| Program pembinaan sosial | Fasilitasi kelancaran pelaksanaan | | | | | 35 | 535 | ~ | Kesbangpol | |
| kemasyarakatan kecamatan | demokrasi | | | | | | | | | |
| 10.3.1.(b)Jumlah penanganan peng | 10.3.1.(b)Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) | IAM). | | | | | | | | |
| 10.3.1.(c)Jumlah penanganan peng | 10.3.1.(c)Jumlah pennganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. | AM) perempuan terutama kel | cerasan terhadap per | empuan. | | | | | | |
| PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN Pelaksanaan sosialisasi dan KIE | Pelaksanaan sosialisasi dan KIE | | | | | | | | | |
| PENINGKATAN KOALITAS ANAK DAN PEREMPUAN | kesetaraan gender dan perlindungan anak | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN | Pendampingan upaya perlindungan | | | | | | | | | |
| KUALITAS HIDUP DAN | | | | | | | | | | |
| PERLINDUNGAN PEREMPUAN | kekerasan | | | | | | | | | |

| | | the difference of the sector | | | 5 | 1 | | A OKAS | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| Drogram | Kagistan | Indikator Kinerja | Catuan | Baseline - | | | | Anggaran F | Sumber | Sumber Data | Instansi |
| 1080 | Neglatali | Program/Kegiatan | Januar | (2017) | 2018 | 2019 2020 | 20 2021 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) |) Pendanaan | Sumper Data | Pelaksana |
| | Peningkatan SDM Forum Perlindung- | | | | | | | | | | |
| | an Korban Kekerasan dan Pencegahan | | | | | | | | | | |
| | Tindak Pidana Perdagangan Orang | | | | | | | | | | |
| | (TPPO) | | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Pemulihan dan | | | | | | | | | | |
| | Penjangkauan Lingkungan Korban | | | | | | | | | | |
| | Kekerasan Perempuan dan Anak | | | | | | | | | | |
| Target 10.4 Mengadopsi kebijak. | Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. | indungan sosial, serta secara | progresif men | capai keseta | araan yang | ebih besar | | | | | |
| 10.4.1.(a)Persentase rencana an | 10.4.1.(a)Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial | sial | | | | | | | | | |
| pemerintah daerah | | | | | | | | | | | |
| Program perencanaan sosial dan | | Cakupan koordinasi dan | | | | | | | | Bappeda | |
| budava | | evaluasi perencanaan | | | | | | | | | |
| | | nembangunan sosial budaya | | | | | | | | | |
| | Derencanaan nembangunan | dokimen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 200 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.4 1 (h)Dronorio nocoto Drong | Acceptation of the second of t | | | | | | | | | | |
| 10.4.1.(D)riopoisi peseita riogi | ani Janinian Josial Bidang Netenaganerjaan. | | | | | | | | | | |
| PROGRAMI PERLINDONGAN | penyelesalan prosedur, penyelesalan | | | | | | | | | Disnakertrans | |
| PENGEMBANGAN LEMBAGA | perselisihan hubungan industrial | | | | | | | | | | |
| KETENAGAKERJAAN | Sosialisasi berbagai peraturan | | | | | | | | | | |
| | pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Kesejahteraan Pekerja | | | | | | | | | | |
| | Pendampingan Pembuatan | | | | | | | | | | |
| | Persyaratan kerja | | | | | | | | | | |
| Target 10.7. Memfasilitasi migra | Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana | n, berkala dan bertanggung ja | awab, termasu | k melalui pe | nerapan ke | bijakan mi | grasi yang te | rencana | | | |
| 10.7.2.(a)Jumlah dokumen kerja | 10.7.2.(a)Jumlah dokumen kerja sama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara daerah. | ekerja migran antara daerah. | | | | | | | | | |
| PROGRAM TRANSMIGRASI | Penyuluhan, Pengarahan, dan | | | | | | | | | Disnakertrans | |
| REGIONAL | Penempatan Transmigrasi | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 11. KOTA DAN PERN | TUJUAN 11. KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | o all occur | Target | Target Pencapaian | Indikatif Alokasi | is is | 1000 |
| Program | Kegiatan | Indikator Kine | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | | Satuan | | 2018 2019 | 9 2020 2021 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | _ | Pelaksana |
| Target 11.1. Pada Tahun 2030, n | Target 11.1. Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh | ahan yang layak, aman, terja | ngkau, dan pel | ayanan dasa | ar, serta me | nata kawa: | san kumuh | | | | |
| 11.1.1.(a)Proporsi rumah tangga | 11.1.1.(a)Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau | layak dan terjangkau | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat | | nanganan Rum | ah | | | | | 89.63 | DPUPKP | |
| Perumahan | kurang mampu | Tidak Layak Huni (RTLH) | uni (RTLH) | | | | | | | | |
| Target 11.2. Pada Tahun 2030, m | Target 11.2. Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas | tasi yang aman, terjangkau, | mudah diakses | dan berkela | njutan unt | uk semua, | meningkatk | an keselamatan lalu | ı lintas, terutama | dengan memper | luas |
| jangkauan transportasi umum, c | langkauan transportasi umun, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orangtua | utuhan mereka yang berada | dalam situasi r | entan, perer | npuan, ana | k, penyanc | dang difabili | as dan orangtua | | | |
| 11.2.1.(a)Persentase pengguna moda transportasi umum di | noda transportasi umum di perkotaan | | | | | | | | | | |
| PROGRAM REHABILITASI DAN | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian | pengujian | | | | | | | | | |
| PEMELIHARAAN PRASARANA DAN | | | | | | | | | | | |
| FASILITAS LLAJ | Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas | ou Lalu Lintas | | | | | | | | | |
| | dan Marka Jalan | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU | | | | | | | | | | |
| POGRAMI PENINGKATAN | Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan | nyamanan | | | | | | | | | |
| PELAYANAN ANGKUTAN | penumpang di lingkungan terminai | | | | | | | | | | |

| | | | | | | Target Pencapaian | paian | Indikatif Alokasi | | 1 |
|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Kegiatan Satuan | in (2017) | 2018 | 2019 20 | 2020 2021 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber a) Data | Instansi Pelaksana |
| | Pengumpulan dan analisis data base pelayanan | | | | | | | | | |
| | Dolovono novijinan di hidang norbuhungan | | | | | | | | | |
| | Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan | | | | | | | | | |
| | angkutan | | | | | | | | | |
| PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN | Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal | | | | | | | | | |
| Target 11.5. Pada tahun 2030, sec | Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan | orang terdampak, dan secara | substansial mer | ıgurangi keruş | gian ekonom | ni relatif ter | hadap PDB glo | bal yang disebab | kan oleh benca | ına, dengan |
| fokus melindungi orang miskin da | fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan | | | | | | | | | |
| 11.5.1*Jumlah korban meninggal, | 11.5.1*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | 90 | | | | | | | | |
| 11.5.1.(b)Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk | ncana yang terbentuk | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAI PENANGGULANGAN KORBAN | PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN Pembentukan Desa Tangguh Bencana PENANGGULANGAN KORBAN | | | | | | | | врвр | |
| Target 11.6. Pada tahun 2030, mel | ponchana Apuni Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk penanganan sampah kota | g merugikan, termasuk dengar | n memberi perha | tian khusus p | ada kualitas | dara, terr | nasuk penang | anan sampah kot | iā | |
| 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang terkini | otaan yang terkini | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Kerja sama pengelolaan persampahan | Cakupan kelompok pengelola sampah (kelompok) | в | | | | | 128,846 | DLH | DLH |
| 11.6.1.(b)Persentase sampah yang terangkut | gterangkut | | | | | | | | | |
| Drogram Dengembangan Kineria | Denyadisan Drasarana dan Carana Dengelolaan | | | | | | | 128 846 | <u>=</u> | |
| Pengelolaan Persampahan | Persampahan | | | | | | | 0,010 | <u>.</u> | |
| Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik c | nyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang a | lan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas | igkau terutama | untuk peremp | uan dan ana | ık, manula | dan penyanda | ng disabilitas | | |
| 11.7.1.(a)Jumlah ruang terbuka hijau | | | | | | | | | | |
| Program Perlindungan dan | Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem | Cakupan luasan tutupan lahan di | an di | | | | | 21,111 | DLH | DLH |
| Konservasi Sumber Daya Alam |) | | pantai, | | | | | | | |
| | Koordinasi Pengelolaan konservasi sumberdava | Cakupan luasan tutupan lahan di | ipudi | | | | | | PIH | |
| | alam | kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis) | pantai, | | | | | | | |
| Target 11.b. Pada tahun 2020, mer mitigasi dan adaptasi terhadap pe Risk Reduction 2015-2030 | Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 | iman yang mengadopsi dan m ngembangkan dan mengimple | engimplementa: mentasikan pen | ikan kebijaka anganan holis | n dan peren tik risiko beı | ıcanaan yan ncana di seı | g terintegrasi nua lini, sesua | tentang penyerta ii dengan the Sen | ıan, efisiensi su ıdai Frameworl | mber daya, c for Disaster |
| 11.b.2*Dokumen strategi pengura | 11.b.2*Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENCEGAHAN DINI DA | PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana | | | | | | | | BPBD | |
| BENCANA ALAM | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 12. KONSUMSI DAN I | TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Targ | Target Pencapaian | ue | Indikatif Alokasi | | | 1 |
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Satuan Program/Kegiatan | an (2017) | 2018 20 | 2019 2020 | 2021 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | s sumber p. Pendanaan | Sumber in Data | Instansi Pelaksana |
| Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of P dan kapasitas negara berkembang. 12.1.1*Jumlah kolaborasi tematik quickwins program. | Target 12.1 Welaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan kapasitas negara berkembang. 12.1.1*Jumlah kolaborasi tematik quickwins program. | mption and Production Patter | ıs, dengan semu | a negara mer | gambil tinda | akan, dipim | pin negara ma | iju, dengan mem | oertimbangkan | pembangunan |
| Program perencanaan | Perencanaan penganggaran | | | | | | | | Bappeda | |
| pembangunan daerah | | | | | | | | | | |

| | | | | | 1 | Target Pencapaian | capaian | | Indikatif Alokasi | | | |
|--|---|---|----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|--------------|-----------|
| T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | Kegistan | Indikator Kinerja | Catuan | Baseline | | | | | Anggaran 5 | Sumber | Sumber | Instansi |
| 100 | in Paris | Program/Kegiatan | | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. | Pendanaan | Data | Pelaksana |
| | | | | | | | | | Juta) | | | |
| | Perencanaan pembangunan sektoral | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan pembangunan kewilayahan | | | | | | | | | | | |
| Target 12.4 Pada tahun 2020 me | Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi | jenis limbah yang ramah lingkung | an, di sepanja | ng siklus hi | Jupnya, se | suai kera | angka ker | a interna | sional yang disepa | ıkati dan secara | signifikan m | engurangi |
| pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, ai | mbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk | r, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. | rhadap keseh | atan manus | ia dan ling | gkungan. | | | | | | |
| 12.4.1.(a)Jumlah peserta Proper | 12.4.1.(a)Jumlah peserta Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yang mencapai m inimal ranking BIRU. | haan Dalam Pengelolaan Lingkung | gan) yang mer | icapai minii | nal rankin | ng BIRU. | | | | | | |
| Program Pengendalian | Pengkajian dampak lingkungan | Angka konsentrasi DO | | | | | | | | | DLH | |
| Pencemaran dan Perusakan | | (dissolved oxygen) di Sungai | | | | | | | | | | |
| Lingkungan Hidup | | Winongo (mg/L) | | | | | | | | | | |
| 12.4.2.(a)Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi lim | g terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolal | bah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | sektor indust | ÷ | | | | | | | | |
| Program Pengembangan | Monitoring evaluasi dan pelaporan | Cakupan kelompok pengelola | в | | | | | | | | DLH | DLH |
| Kinerja Pengelolaan | | sampah (kelompok) | | | | | | | | | | |
| Persampahan | | | | | | | | | | | | |
| Tagrget 12.5 Pada tahun 2030, s | Tagrget 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. | ıh melalui pencegahan, pengurang | gan, daur ulan | g, dan peng | gunaan ke | embali. | | | | | | |
| 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | ah yang didaur ulang. | | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Kinerja 1) Kerjasama pengelolaan | 1) Kerjasama pengelolaan persampahan. 2) | | | | | | | | | | DLH | DLH |
| Pengelolaan Persampahan | Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan | aan | | | | | | | | | | |
| | lingkungan hidup | | | | | | | | | | | |
| Target 12.6 Mendorong perusah | Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam sikus pelaporan mereka | ısional, untuk mengadopsi praktel | k-praktek ber | kelanjutan o | dan mengi | integrasik | an inforn | nasi kebe | lanjutan dalam si | klus pelaporan n | nereka. | |
| 12.6.1.(a)Jumlah perusahaan ya | 12.6.1.(a)Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN | Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan | | | | | | | | | | DLH | |
| PENGEMBANGAN LEMBAGA | tentang ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | |
| KETENAGAKERJAAN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

| | | Indibator Kinoria | | oriloaca | | Target Pencapaian | ncapaian | | Indikatif Alokasi | Cumbor | isaction |
|---|---|------------------------------|-----------|----------|------|-------------------|----------|------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Program | Kegiatan | Program/Kegiatan | Satuan | (2017) | 2018 | 2018 2019 2020 | 2020 | 2021 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Pendanaan | Pelaksana |
| Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahan | farget 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. | im dan bencana alam di semu | a negara. | | | | | | | | |
| 13.1.1*Dokumen strategi pengurangan risil | 13.1.1*Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Ė | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN | Pembuatan Dokumen Penanggulangan | | | | | | | | | | |
| NGGULANGAN KORBAN BENCANA | Bencana | | | | | | | | | | |
| 13.1.2*Jumlah korban meninggal, hilang da | ALAIV 13.1.2*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | ng. | | | | | | | | | |
| | Peningkatan ketrampilan dan kualitas | jumlah pelatihan tanggap | | | | | | | | | |
| | penanggulangan bencana alam | bencana | | | | | | | | | |
| Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan ant | Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional | strategi dan perencanaan nas | ional. | | | | | | | | |
| 13.2.1.(a)Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | misi gas rumah kaca (GRK). | | | | | | | | | | |
| Program Pengendalian Pencemaran dan Pengkajian dampak lingkungan | Pengkajian dampak lingkungan | | | | | | | | | | |
| Perusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN

| See Case Case | 2 to 12 to 2 | Indikator Kinerja | 400 | Baseline | - | Target Pencapaian | capaian | - | ndikatif Alokasi Anggaran | Sumber | output in the state of the stat |
|---|---|--|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---|-----------------|--|
| riogiam | Neglatali | Program/Kegiatan | Satuali | (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 2019 2020 2021 5 Tahunan (Rp. Juta) | Pendanaan | IIIStalisi relaksalla |
| Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk su | arang bentuk-bentuk subsidi perikana | ubsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan | si terhadap kel | ebihan kapas | itas dan pe | nangkapar | וkan berl | ebihan, m | ıenghilangkan subsidi yang b | erkontribusi te | rhadap penangkapan |
| ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan me | Ξ | ahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlak | oahwa perlaku | an khusus da | n berbeda γ | ang tepat | dan efekti | f untuk n | kuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi | kurang berken | bang harus menjadi |
| bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the | sidi perikanan pada the World Trade Organization. | Organization. | | | | | | | | | |

| | 1 1 1 2 | Indikator Kinerja | | Baseline | ř | Target Pencapaian | aian | Indikatif Alokasi Anggaran Sumber | Sumper | and the second |
|---|---|---|------------------|----------|------|-------------------|------|-----------------------------------|-----------|--------------------|
| Program | Neglatan | Program/Kegiatan |) satuan | (2017) | 2018 | 2018 2019 2020 | | 2021 5 Tahunan (Rp. Juta) | Pendanaan | instansi Pelaksana |
| 14.6.1.(a)Persentase kepatuhan pelaku usaha. | pelaku usaha. | | | | | | | | | |
| Perlindungan pengembangan | sosialisasi berbagai peraturan | perusahaan yang disosialisasi | | | | | | | | Disnakertrans |
| lembaga ketenagakerjaan | tentang ketenagakerjaan | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Produksi Optimalisasi Perijinan Usaha | Optimalisasi Perijinan Usaha | Pelaku usaha yang disosialisasi | | | | | | 250 | | |
| Perikanan | Perikanan | | | | | | | | | |
| Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil | untuk nelayan skala kecil (small-s | (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar. | er daya laut da | n pasar. | | | | | | |
| 14.b.1*Ketersediaan kerangka hı | ukum/ regulasi/ kebijakan/ kelen | 14.b.1*Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk | ıngi hak akses u | ntuk | | | | | | |
| perikanan skala kecil. | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Produksi Optimalisasi Perijinan Usaha | Optimalisasi Perijinan Usaha | Peraturan perundang-undangan | | | | | | 50,000,000 | | Diperpautkan |
| Perikanan | Perikanan | di bidang perikanan | | | | | | | | |
| 14.b.1.(a)Jumlah provinsi dengan | 14.b.1.(a)Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan. | usaha nelayan. | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Produksi Peningkatan Kapasitas Usaha | Peningkatan Kapasitas Usaha | | | | | | | 1350000000 | | Diperpautkan |
| Perikanan | dan Kelembagaan Perikanan | | | | | | | | | |

| I UJUAN 15. EKUSISI EM DAKAI | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|---------------|------------|-------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Gaileac | Tai | Target Pencapaian | aian | Indikatif Alokasi | Sumbor | incton |
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | (2017) | 2018 | 2019 2020 | 0 2021 | 1 Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | ď | Pelaksana |
| Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan daratan darata darata jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan | starian, restorasi dan peman | faatan berkelanjutan dari ekosistem darata | n dan peraira | n darat serta | jasa lingk | ungannya, k | hususnya | ı ekosistem hutan, lahan | basah, pegununga | n dan lahan |
| kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. | ın perjanjian internasional. | | | | | | | | | |
| 15.1.1.(a). Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | uas lahan keseluruhan. | | | | | | | | | |
| Program Pengendalian Pencemaran dan | | Angka konsentrasi DO (dissolved oxygen) | | | | | | | | |
| Perusakan Lingkungan Hidup | | di Sungai Winongo (mg/L) | | | | | | | | |
| Program Perlindungan dan Konservasi | | Cakupan luasan tutupan lahan di kawasan | | | | | | | | |
| Sumber Daya Alam | | lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis) | | | | | | | | |
| Target 15.2 Pada tahun 2020. meningkatkan pelaksanaan | pelaksanaan pengelolaan ser | pengelolaan semua jenis hutan secara berkelani utan. menghentikan deforestasi. merestorasi hutan | hentikan defo | prestasi. me | estorasih | utan | | | | |
| yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global | signifikan forestasi dan refor | estasi secara global. | | | | | | | | |
| 15.2.1.(a).Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. | dasi yang dipulihkan kondisi | ekosistemnya. | | | | | | | | |
| Program Perlindungan dan Konservasi | Koordinasi Pengelolaan | Cakupan luasan tutupan lahan di kawasan | | | | | | 21111 | | DLH |
| Sumber Daya Alam | konservasi Sumberdaya | lindung (sempadan pantai, mata air, lahan | | | | | | | | |
| | Alam | kritis) | | | | | | | | |
| Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. | penggurunan, memulihkan k | ahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang | erkena peng | gurunan, kek | eringan d | an banjir, da | n berusa | ha mencapai dunia yang | bebas dari lahan te | erdegradasi. |
| 15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | habilitasi terhadap luas lahaı | n keseluruhan. | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN | Pengendalian Kerusakan | | | | | | | | | DLH |
| DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Lingkungan Alami dan | | | | | | | | | |
| | Buatan | | | | | | | | | |
| Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal. | mengakhiri perburuan dan p | oerdagangan jenis flora dan fauna yang dilin | dungi serta m | engatasi pe | mintaan c | an pasokan | produk h | idupan liar secara ilegal | | |
| 15.7.1.(a). Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. | dana lingkungan hidup sampa | ai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjad | _ | | | | | | | |
| Program Peningkatan Kualitas dan Akses | Penyelesaian aduan dan | Jumlah aduan yang terselesaikan | | | | | | | | DLH |
| Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan sengketa lingkungan hidup | sengketa lingkungan hidup | | | | | | | | | |
| Hidup | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Kualitas dan Akses | Penyelesaian aduan dan | Jumlah aduan yang terselesaikan | | | | | | | | DLH |
| Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan sengketa lingkungan hidup | າ sengketa lingkungan hidup | | | | | | | | | |
| Hidup | | | | | | | | | | |
| 15.c. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan. | paya memerangi perburuan Jana lingkungan hidup samp | dan perdagangan jenis yang dilindungi, tern si dengan P21 dari jumlah kasus yang terjad | ıasuk dengan | meningkatk | an kapasit | as masyaral | at lokal r | nengejar peluang mata _l | encaharian yang b | erkelanjutan. |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | and me danin median and a | i cengan i et can jannan kasas yang terjad | _ | | | | | | | |

| | | | | oniloso | Targe | Target Pencapaian | | Indikatif Alokasi | Sumbor | 100 |
|--|--|--|---------------------------|-------------|--------------------|----------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | (2017) | 2018 2019 | 9 2020 | 2021 Anggar (F | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Pendanaan | Pelaksana |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN Penyelesaian Aduan dan AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN Sengketa Lingkungan Hidup LINGKUNGAN HIDUP | AN Penyelesaian Aduan dan M DAN Sengketa Lingkungan Hidup | | % | | | | | | | ргн |
| TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH | LAN DAN KELEMBAGAAN YANG | TANGGUH | | | | | | | | |
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Sa Program/Kegiatan | Baseline Satuan (2017) | line | Farget Per 2019 | capaian 2020 2021 | Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Ro. Juta) | si Sumber Data ta) | | Penanggungjawab Pelaksana |
| Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk | ngi segala bentuk kekerasan dan terk | kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun | | | | | | (a) | | |
| 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk | per 100.000 penduduk | | | | | | | | | |
| 16.1.3.(a)Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir 16.1.4* Dronorsi penduduk yang merasa aman barialan sendirian di area tempat tinggalawa | yadi korban kejahatan kekerasan dala sa aman berialan sendirian di area ter | m 12 bulan terakhir mat tinggalnya | | | | | | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN | Pembinaan satuan keamanan | ipat tilgsamya. | | | | | | | | |
| MASYARAKAT UNTUK MENJAGA | lingkungan di masyarakat | | | | | | | | | |
| KETERTIBAN DAN KEAMANAN | Pemberdayaan masyarakat untuk | | | | | | | | | |
| | kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan | | | | | | | | | |
| Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, | | perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak | terhadap anak | | | | | | | |
| 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang | memiliki anak umur 1-17 tahun yang ı | 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir | i psikologis da | i pengasur | dalam setah | ın terakhir | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS | Pendampingan upaya perlindungan | perse | persentase | | | | | Dinsos | | |
| HIDUP DAN PERLINDUNGAN DEPEMBIJAN | perempuan terhadap tindak kakarasan | | | | | | | | | |
| TENEINIFORM 16.2.1 (h)Drevolensi kekerasan terhadan anak laki-laki dan anak neremulan | nenetasan an anak lakilaki dan anak nerempuan | | | | | | | | | |
| TO.Z.I.(D)FIEVEIEISI NENEI ASAII LEIIIAN | go and land and and and and and and and and and | | | | | | | i | | |
| | Peningkatan SDM Forum Perlindung- an Korban Kekerasan dan Pencegah- an Tindak Pidana Perdagangan Orang | | persentase | | | | | Dinsos | | |
| | (TPPO) | | | | | | | | | |
| 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki | -laki muda umur 18-24 tahun yang me | 16.2.3.(a)Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun | ır 18 tahun | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak | perse | persentase | | | | | Dinsos | | |
| Target 16.6 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan ransparan di semua tingkat | yang efektif, akuntabel, dan ranspara | n di semua tingkat | | | | | | | | |
| 16.6.1.(a)Persentase peningkatan Opin | ii Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) at | 16.6.1.(a)Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | aga dan peme | rintah Dae | ah (Provinsi/ | (abupaten/ | Kota) | | | |
| Program peningkatan dan | Opini pemeriksaan BPK atas LKPD | | | | | | | BKAD | | |
| pengembangan pengelolaan kenangan daerah | Kab. Bantul | | | | | | | | | |
| 16.6.1.(b)Persentase peningkatan Siste | em Akuntabilitas Kineria Pemerintah (| 16.6.1. Bersentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kineria Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaza dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | rintah Daerah | (Provinsi/k | abupaten/Ko | Ea) | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Pelaksanaan Pengukuran Kineria | Pelaksanaan Pengukuran Kineria | 0 | | | | | | Adm. | | |
| DAN KUALITAS KELEMBAGAAN | Perangkat Daerah | | | | | | | Pemerintahan | | |
| 16.6.1.(c)Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan | ocurement terhadap belanja pengada | u. | | | | | | | | |
| Program layanan pengadaan Barang | Pelaksanaan pengadaan barang dan | Persentase penyelesaian paket | | | | | | | Bagian Layanan | ınan |
| dan Jasa pemerintah | jasa pemerintah | pengadaan barang dan jasa secara e-tendering | | | | | | | Pengadaar Jasa | Pengadaan Barang dan Jasa |
| | Pelaksanaan pengadaan barang dan | Persentase penyelesaian paket | | | | | | | Bagian Layanan | ınan |
| | jasa pemerintah | pengadaan barang dan jasa secara e-tendering | | | | | | | Pengadaar | Pengadaan Barang dan Ises |
| 16.6.1.(d)Persentase instansi pemerint | ah vang memiiki Indeks Reformasi Bir | 16.6.1.(d)Persentase instansi pemerintah vang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi baik Kemerina Birokrasi baik kemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | merintah Daer | ah (Provins | /Kabupaten/ | Kota) | | | | |
| | | | | | · / | , | | | | |

| | | cine all materials | | a il a c | Targ | Target Pencapaian | an | Indikatif Alokasi | | 49 |
|--|---|--|----------------------------|----------------|---|-------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Program | Kegiatan | Indikator Niherja Program/Kegiatan | Satuan | (2017) | 2018 20 | 2019 2020 | 2021 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Data | Penanggungjawab Pelaksana |
| PROGRAM PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH | Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | | | | | | | | Bag. Organisasi | |
| Target 16.7 menjamin pengambilan ke 16.7.1.(a)Persentase keterwakilan per | Target 16.7 menjamin pengambilan keputusan yang responsif inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan 16.7.1.(al)Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | patif dan representatif di setiap 1 DPR) dan Dewan Perwakilan Rak | ingkatan Jat Daerah (DP | (Q) | | | | | | |
| PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | | | | | | | KPU, Setwan | |
| PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK | | | | | | | | | | |
| 16.7.1.(b)Persentase keterwakilan per | 16.7.1.(b)Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) | an di lembaga eksekutif (Eselon I | dan II) | | | | | | | |
| Pengelolaan Kepegawaian Pindah | Pengelolaan Mutasi Jabatan | Persentase penempatan | | | | | | | ВКРР | |
| Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang | ikan identitas yang syah bagi semua, te | syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran | | | | | | | | |
| 16.9.1*Proporsi anak umur di bawah 5 | 16.9.1*Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur | lembaga pencatatan sipil, menur | ut umur | | | | | | | |
| 16.9.1.(a)Persentase kepemilikan akta lahir untuk pendu | 16.9.1.(a)Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah 16.9.1.(h)Persentase anak vang memiliki akta kelahiran | atan bawah | | | | | | | | |
| Keserasian Kebijakan Kependudukan | Keserasian Kebijakan Kependudukan Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kepemilika Akta Kelahiran usia Akta Kemarian | Kepemilika Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun | | | | | | 711.938 | Disdukcapil | Disdukcapil |
| PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Pendataan Penduduk Rentan | Pendataan Penduduk Rentan | | | | | | | | | |
| KEPENDUDUKAN | Administrasi Kependudukan Bongombangan Sirtom Administrasi | | | | | | | | | |
| | rengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | | | | | | | | | |
| Target 16.10 menjamin akses publik te | ranget 16.11.0 menjamin akses publik terhadap Informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional | basan mendasar, sesuai dengan | peraturan nasi | onal dan kese | spakatan in | ternasional | | | | |
| 16.10.1.(b)lumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM rate 10.1.(b)lumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM ra | to.t.u.t.(a)Jumian penanganan pengaduan pelanggaran HAM 16.10.1 (b)Jumiah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan | utama kekerasan terhadan perer | nbuan | | | | | | | |
| PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN | Pelaksanaan sosialisasi dan KIE | | | | | | | | | |
| PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN | kesetaraan gender dan perlindungan | | | | | | | | | |
| PEREMPUAN | anak | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | | | | | | | | | |
| | Peningkatan SDM Forum | | | | | | | | | |
| | Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana | | | | | | | | | |
| | Perdagangan Orang (TPPO) | | | | | | | | | |
| | Penjangkauan Lingkungan Korban | | | | | | | | | |
| A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | Kekerasan Perempuan dan Anak Ketanasi Indonesia dan melakanakan kendalan dan dan Ketanasan Jahindan Jahindan Jahindan Jahindan Jahindan Jahindan | وباوالطورا موماسوا ينوفرا موله انوفو | a soule shiften | ai checa dildi | incoming | | | | | |
| Pengkajian dan penelitian bidang | Pemberdayaan KID dan PPID | Persentase cakupan layanan | untuk akses p | anny hana | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 | | | | Kominfo | |
| informasi dan komunikasi | - | informasi yang bersifat terbuka | 10000 | 1 | | | | | | |
| Descheller des sedianya Badan Publik y | tou.;(a)) terseatanya badan Publik yang menjatankan kewapian sebagaimana dituti dalam Uu 014 tanun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Demokrista da analah bada publik yang menjatankan kebagaimana dalam da analah sebagai keterbukaan informasi Publik | ana diatur dalam UU No. 14 Tanu | n zuus Ientang | кетегрикаа | n Intormas, | Y NO II | | | , minfo | |
| Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi | Pemberdayaan KID dan PPID | Persentase cakupan layanan informasi yang bersifat terbuka | | | | | | | Kominto | |
| 16.10.2.(b)Persentase penyelesaian se | | i dan/atau ajudikasi non litigasi | | | | | | | | |
| Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi | Pemberdayaan KID dan PPID | Persentase cakupan layanan | | | | | | | Kominfo | |
| 16.10.2.(c)Jumlah kepemilikan sertifika | inconsal and incommental separation of the control | lokumentasi (PPID) untuk mengu | kur kualitas PP | D dalam me | njalankan t | ugas dan fu | ngsi seba | gaimana diatur dala | m peraturan perun | ndang-undangan |

| | | 21 X 20 40 71 E 21 | | orilord | Tan | Farget Pencapaian | paian | Indikatif Alokasi | | densignation |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------|------|-------------------|--------|----------------------------------|-------------|--------------|
| Program | Kegiatan | Program/Kegiatan | Satuan | (2017) 2018 2019 2020 2021 | 2018 | 2019 20 | 120 20 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Data | Pelaksana |
| Pengkajian dan penelitian bidang | Pemberdayaan KID dan PPID | Persentase cakupan layanan | | | | | | | Kominfo | |
| informasi dan komunikasi | | informasi yang bersifat terbuka | | | | | | | | |

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

| | | | | | ŕ | 9000 | 1 | include Standing | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------|--------------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | <u>-</u> | l arget Pencapalan | lan | Indikatir Alokasi | | | |
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Baseline (2017) | 2018 | 2019 2020 | 0 2021 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendanaan | Sumber Data | Penanggungjawab Pelaksana |
| Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domesti | isasi sumber daya domestik, te | ik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | rnasional ke | oada negara | berkemba | ang, untuk m | eningkatka | an kapasitas lokal ba | igi pengumpular | pajak dan pendapata | ın lainnya. |
| 17.1.1*Total pendapatan pemerintah kabupaten sebagai | | proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | mbernya. | | | | | | | | |
| 17.1.1.(a)Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | ak terhadap PDB. | | | | | | | | | | |
| 17.1.2*Proporsi anggaran daerah yang didanai oleh pajak | ah yang didanai oleh pajak daerah | ah | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN | Penyusunan rancangan | | | | | | | | | BKAD | |
| DAN PENGEMBANGAN | peraturan daerah tentang | | | | | | | | | | |
| PENGELOLAAN KEUANGAN | APBD | | | | | | | | | | |
| DAERAH | Penyusunan kebijakan | | | | | | | | | | |
| | dan pedoman | | | | | | | | | | |
| | pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | |
| | Operasional pajak daerah | | | | | | | | | | |
| | Pengendalian | | | | | | | | | | |
| | pelaksanaan pengelolaan | | | | | | | | | | |
| | keuangan daerah | | | | | | | | | | |
| | Pengendalian PAD | | | | | | | | | | |
| | Optimalisasi pendapatan | | | | | | | | | | |
| | daerah | | | | | | | | | | |
| | Pelayanan pajak daerah | | | | | | | | | | |
| | Pendataan dan | | | | | | | | | | |
| | penetapan wajib pajak | | | | | | | | | | |
| | Intensifikasi Sumber- | | | | | | | | | | |
| | sumber Pendapatan | | | | | | | | | | |
| | Daerah | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pajak Bumi | | | | | | | | | | |
| | dan Bangunan Perkotaan | | | | | | | | | | |
| | dan Perdesaan | | | | | | | | | | |
| | Regulasi Peraturan Pajak | | | | | | | | | | |
| | Daerah dan Retribusi | | | | | | | | | | |
| | Daerah | | | | | | | | | | |
| | Pembinaan Pengelolaan | | | | | | | | | | |
| | Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |

Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme eyang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. 17.6.2.(a)Persentase jaringan tulang punggung serat optik daerah yang menghubungkan kecamatan.

Pembangunan backbone internet Pengembangan Jaringan dan intranet di lingkungan Komunikasi dan Informasi perkantoran pemda, kecamatan Pembinaan dan Komunikasi, Informasi dan Program Pengembangan Media Massa

Kominfo

Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020. 17.11.1.(a)Pertumbuhan ekspor produk non migas dan desa

| | | | | | | ! | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | 1 | Ta | Target Pencapaian | apaian | Indikatif Alokasi | | | |
| Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan Ba | Baseline (2017) | 2018 | 2019 | 2020 20 | Anggaran 5 2021 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber . Pendanaan | Sumber Data | Penanggungjawab Pelaksana |
| Peningkatan dan pengembangan ekspor | Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/ | Kajian peraturan perijinan usaha perdagangan | | | | | | | | DPMPT, Disdag | Dinas Perdagangan |
| | asosiasi/ pengusaha | Publikasi melalui media cetak dan | | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta monev.ijin usaha | | | | | | | | | |
| | | bidang perdagangan | | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta sosialisasi bidang | | | | | | | | | |
| | | perdagangan | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya publikasi melalui | | | | | | | | | |
| | | sosial media | | | | | | | | | |
| | Pengembangan pasar dan | - | | | | | | | | | |
| | ekspor daerah | difasilitasi/ diikuti | | | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta pelatihan | | | | | | | | | |
| | | pernasarany distribusiy kemasan | | | | | | | | | |
| Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama 17.17.1.(a)Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaks: | meningkatkan kerja sama p g ditawarkan untuk dilaksar | Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama. 17.17.1.(a)Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan | ipil yang efekt nerintah dan | iif, berdasa | arkan pen | galaman | dan bersu | nber pada strategi k | erja sama. | | |
| Badan Usaha (KPBU). | | | | | | | | | | | |
| Program Penyusunan | | Persentase perikatan kerjasama | | | | | | 325 | | Bag. Adm. | Bag. Adm. Pemerintahan |
| Kebijakan Kerjasama Daerah | | yang ditindaklanjuti | | | | | | | | Pemerintahan | |
| Program Pengembangan | | | | | | | | 1,419 | | Bag. | Bag. Adm. Perekonomian |
| Kebijakan Perekonomian | | | | | | | | | | Perekonomian | |
| Daerah | | | | | | | | | | | |
| Target 17.19 Pada tahun 2030 | ı, mengandalkan inisiatif yar | Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan | n pengukuran | atas kema | ajuan pen | hangnua | n berkelar | ıjutan yang melengk | api Produk Domes | tik Bruto, dan mer | ndukung pengembangan |
| kapasitas statistik di negara berkembang. | | | | | | | | | | | |
| 17.19.1.(a)Jumlah pejabat fungsional pranata komputer | | pada Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Kepegawaian | Pengelolaan Mutasi | Jumlah PNS jabatan Fungsional | | | | | | 0 | | ВКРР | |
| Pindah/Purna Tugas PNS | Jabatan Fungsional | yang ditempatkan sesuai formasi | | | | | | | | | |
| 17.19.1.(b)Persentase OPD ya | ng sudah memiliki pejabat f | 17.19.1.(b)Persentase OPD yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer. | a komputer. | | | | | | | | |
| Pengelolaan Kepegawaian | Pengelolaan Mutasi | Persentase penempatan aparatur | | | | | | 0 | | ВКРР | |
| Pindah/Purna Tugas PNS | Jabatan Fungsional | dalam jabatan | | | | | | | | | |
| 17.19.1.(c) Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat | | 'ungsional statistisi dan pranata komputer OPD | outer OPD | | | | | | | | |
| Pengelolaan Kepegawaian | Pengelolaan Mutasi | Persentase penempatan aparatur | | | | | | 0 | | ВКРР | |
| Pindah/Purna Tugas PNS | Jabatan Fungsional | dalam jabatan | | | | | | | | | |
| 17.19.2.(c)Jumlah pengunjung | g eksternal yang mengakses | 17.19.2.(c)Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | website. | | | | | | | | |
| Program kerjasama informasi Penyebarluasan informasi Tersebarluasnya Informasi | Penyebarluasan informasi | i Tersebarluasnya Informasi | | | | | | | | Kominfo | |
| dengan mas media | pembangunan daerah | Pembangunan Daerah Kabupaten | | | | | | | | | |
| | | Bantul | | | | | | | | | |

Matrik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Gunungkidul

| TUJUAN | I OJOAN T. INENGHAPOS KEIVIISKIIVAN | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|--------|--------------------|--|--|--|--|----------|---------------------------|
| Kode | Indikator RAD | Sumber Data | Satuan | Satuan Tahun Dasar | | Tai | Target Pencapaian | | | Penanggungjawab Pelaksana |
| Indikator | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Target 1.2 | Target 1.2. Peningkatan Rehabilitasi Sosial | a | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Persentase penyandang disabilitas yang terlayani | Dinas Sosial | % | 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | Dinas Sosial |
| 1.3.1 | Persentase PMKS telah menerima jaminan sosial | Dinas Sosial | % | 2017 | 75 | 80 | 85 | 06 | N A | Dinas Sosial |
| 1.4.1 | Jumlah promosi pariwisata dan jumlah usaha pariwisata yang berizin | Dinas Pariwisata | | 2017 | 40 Promosi 25 TDUP | 40 Promosi 25 TDUP | 40 Promosi 25 TDUP | 40 Promosi 25 TDUP | ∀ | Dinas Pariwisata |
| 1.5.1 | Jumlah destinasi wisata dengan prasarana dan sarana lengkap | Dinas Pariwisata | | 2017 | 48 | 52 | 56 | 09 | A | Dinas Pariwisata |
| 1.6.1 | Jumlah lembaga pariwisata yang memenubi legalitas, usaha pariwisata dan pelaku usaha pariwisata yang memenuhi standar sertifikasi | Dinas Pariwisata | | 2017 | 4 Pokdarwis, 2 Desa Wisata, 2 Sertifikasi Usaha Pariwisata, 40 Sertifikasi Pelaku Usaha Pariwisata | 4 Pokdarwis, 2 Desa Wisata, 2 Sertifikasi Usaha Parwisata, 40 Sertifikasi Pelaku Usaha Parwisata | 4 Pokdarwis, 2 Desa Wisata, 2 Sertifikasi Usaha Parwisata, 40 Sertifikasi Pelaku Usaha Parwisata | 4 Pokdarwis, 2 Desa Wisata, 2 Sertifikasi Usaha Parwisata, 40 Sertifikasi Pelaku Usaha Parwisata | NA NA | Dinas Pariwisata |

| TUJUAN 2 | TUJUAN 2. MENGHAKIRI KELAPARAN | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Kode | | | | | | Target | Target Pencapaian | | Penan | Penanggungjawab |
| Indikator | r r | Sumber Data | satuan | anun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Pe | Pelaksana |
| Target 15.2 | Target 15.2 Peningkatan Agribisnis Pertanian | | | | | | | | | |
| 15.2.1 | Nilai pendapatan subsektor tanaman pangan | Dinas Pertanian | | 2017 | 1,556,608 | 2,135,882 | 1,127,203 | 1,151,284 | NA Dinas Pertanian | tanian |
| | | dan Pangan | | | ,500 | ,500 | 000′ | ,155 | dan Pangan | an |
| 15.3.1 | Persentase rekomendasi teknologi | Dinas Pertanian | kelompok | 2017 | 620,702 | 982,980 | 1,078,660 | 1,259,100 | NA Dinas Pertanian | tanian |
| | pertanian spesifik lokalita yang diterapkan | dan Pangan | | | ,500 | 000′ | 000 | ,833 | dan Pangan | an |
| 15.4.1 | Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan | Dinas Pertanian | | 2017 | 982,980 | 1,078,660 | 1,259,100 | 1,372,419 | NA Dinas Pertanian | tanian |
| | | dan Pangan | | | 000 | 000′ | ,833 | 706′ | dan Pangan | an |
| 15.4.2 | 1) Ketersediaan Beras (Pangan Pokok) | Dinas Pertanian | ton | 2017 | 5,100 | 5,150 | 5,200 | 5,250 | NA Dinas Pertanian | tanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | an |
| 15.4.3 | 2) Harga pangan yang terjangkau dan terkendali | Dinas Pertanian | Вр | 2017 | 8,100 | 8,200 | 8,300 | 8,400 | NA Dinas Pertanian | tanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | an |
| 15.4.4 | 3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan) | Dinas Pertanian | | 2017 | 85.80 | 87.20 | 90.00 | 92.20 | NA Dinas Pertanian | tanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | an |
| 15.4.5 | 4) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan) | Dinas Pertanian | | 2017 | 91.30 | 92.70 | 95.00 | 95.70 | NA Dinas Pertanian | tanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | an |
| 15.5.1 | Jumlah produksi hasil perkebunan dan hortikultura produk unggulan | Dinas Pertanian | | 2017 | | | | | NA Dinas Pertanian | tanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | an |
| 15.5.2 | Kakao | Dinas Pertanian | Kg | 2017 | 364,000 | 413,000 | 465,000 | 520,000 | NA Dinas Pertanian | tanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | an |
| 15.5.3 | Mete | Dinas Pertanian | Kg | 2017 | 548,191 | 575,600 | 604,380 | 634,600 | NA Dinas Pertanian | tanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | an |

| Kode | GAG | 2400 | 400 | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | | Target | Target Pencapaian | | Pena | Penanggungjawab |
|-----------|--------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Indikator | III AIN TAD | Sumper Data | Satuan | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 P | Pelaksana |
| 15.5.4 | Tembakau | Dinas Pertanian | Kg | 2017 | 468,157 | 491,565 | 516,143 | 541,950 | NA Dinas Pertanian | rtanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | gan |
| 15.5.5 | Kelapa | Dinas Pertanian | ton | 2017 | 21,732 | 22,819 | 23,960 | 25,158 | NA Dinas Pertanian | rtanian |
| | | dan Pangan | | | ,480 | ,104 | 650′ | ,062 | dan Pangan | gan |
| 15.5.6 | Bawang Merah | Dinas Pertanian | ton | 2017 | 463.60 | 470.56 | 477.61 | 484.78 | NA Dinas Pertanian | rtanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | gan |
| 15.5.7 | Cabe | Dinas Pertanian | ton | 2017 | 480.08 | 487.29 | 494.60 | 502.01 | NA Dinas Pertanian | rtanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | gan |
| 15.6.1 | Jumlah Populasi ternak : | Dinas Pertanian | | 2017 | | | | | NA Dinas Pertanian | rtanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | gan |
| 15.6.2 | 1. Sapi potong (ekor) | Dinas Pertanian | Ekor | 2017 | 151,573 | 153,008 | 154,619 | 156,165 | NA Dinas Pertanian | rtanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | gan |
| 15.6.3 | 2. Kambing (ekor) | Dinas Pertanian | Ekor | 2017 | 191,094 | 195,528 | 199,438 | 203,427 | NA Dinas Pertanian | rtanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | gan |
| 15.6.4 | 3. Ayam buras (ekor) | Dinas Pertanian | Ekor | 2017 | 1,150,109 | 1,161,610 | 1,173,263 | 1,184,956 | NA Dinas Pertanian | rtanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | gan |
| 15.6.5 | 4. Daging | Dinas Pertanian | Kg | 2017 | 4,618,031 | 4,664,211 | 4,710,854 | 4,757,962 | NA Dinas Pertanian | rtanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | gan |
| 15.6.6 | 5. Telur | Dinas Pertanian | Kg | 2017 | 3,417,314 | 3,451,487 | 3,486,002 | 3,520,862 | NA Dinas Pertanian | rtanian |
| | | dan Pangan | | | | | | | dan Pangan | gan |
| 15.7.1 | Jumlah produksi tamanan pangan | | | 2017 | | | | | NA | |
| 15.7.2 | Padi | | ton | 2017 | 290,817 | 291,195 | 291,572 | 292,488 | NA | |
| 15.7.3 | Jagung | | ton | 2017 | 206,500 | 207,500 | 208,500 | 209,500 | NA | |
| 15.7.4 | Kedelai | | ton | 2017 | 6,000 | 6,500 | 2,000 | 7,500 | NA | |
| 15.7.5 | Ubi Kayu | | ton | 2017 | 878,510 | 880,706 | 882,908 | 891,737 | NA | |

| z |
|---------|
| ~ |
| ➣ |
| ⋍ |
| ₩. |
| |
| <u></u> |
| ᆽ |
| ⋖ |
| ╗ |
| 3 |
| ш |
| V |
| |
| z |
| ⋖ |
| ã |
| Ξ |
| ¥ |
| |
| ≈ |
| 8 |
| G |
| ž |
| 5 |
| ~ |
| > |
| z |
| ~ |
| ≃ |
| ~ |
| ⋍ |
| _ |
| Ж |
| ES |
| |
| - |
| m |
| <u></u> |
| z |
| ⋖ |
| ⊃ |
| = |
| =i |
| = |
| • |

| Kode | | Sumber | | 4 | | Targ | Target Pencapaian | aian | | Penanggungjawab |
|-------------|---|-----------|--------|-------------|-------|-------|-------------------|-------|------|-----------------|
| Indikator | INDIKATOF KAD | Data | satuan | lanun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pelaksana |
| Target 3.2. | Target 3.2. Kesehatan Keluarga | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Jumlah Kematian Ibu | Dinas | kasus | 2017 | 2 | 2 | 4 | 4 | AA | Dinas |
| | | Kesehatan | | | | | | | | Kesehatan |
| 3.2.2 | Angka Kematian Bayi (AKB) | Dinas | | 2017 | 7.5 | 7.5 | 7,2 | 7 | NA | Dinas |
| | | Kesehatan | | | | | | | | Kesehatan |
| 3.3.1 | Presentasi balita wasting (kurus dan sangat kurus) | Dinas | % | 2017 | 2.80 | 2.80 | 2.30 | 1.60 | AA | Dinas |
| | | Kesehatan | | | | | | | | Kesehatan |
| 3.4.1 | Angka keberhasilan pengobatan TBC | Dinas | % | 2017 | 87 | 88 | 68 | 06 | AA | Dinas |
| | | Kesehatan | | | | | | | | Kesehatan |
| 3.4.2 | Prevalensi penderita Hipertensi yang berkunjung ke | Dinas | % | 2017 | 16.60 | 16.20 | 15.80 | 15 | AA | Dinas |
| | puskesmas | Kesehatan | | | | | | | | Kesehatan |
| 3.5.1 | Persentase Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap di sarana pelayanan kesehatan | Dinas | % | 2017 | 81 | 83 | 84 | 82 | AA | Dinas |
| | | Kesehatan | | | | | | | | Kesehatan |
| 3.6.1 | Persentase ketersediaan obat generik esensial dan vaksin di Puskesmas | Dinas | % | 2017 | 92.40 | 92.50 | 92.60 | 92.70 | AA | Dinas |
| | | Kesehatan | | | | | | | | Kesehatan |
| 3.7.1 | Persentase Pelayanan Kesehatan masyarakat Peserta jaminan Kesehatan | Dinas | % | 2017 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | AA | Dinas |
| | dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan | Kesehatan | | | | | | | | Kesehatan |
| 3.8.1 | Persentase Puskesmas yang terakreditasi | Dinas | % | 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | AA | Dinas |
| | | Kesehatan | | | | | | | | Kesehatan |

| Kode | | Sumber | 200 | | | Tar | Target Pencapaian | aian | | Penanggungjawab |
|-----------|---|-----------|--------|--------------------|-------|-------|----------------------|--------------------------|------|-----------------|
| Indikator | III DINAMI NAD | Data | Satuan | Satuan Tanun Dasar | | 2019 | 2020 | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2022 | Pelaksana |
| 3.9.1 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Puskesmas | Dinas | indeks | 2017 | 80,20 | 81,80 | 80,20 81,80 83,40 85 | 85 NA | NA | Dinas |
| | | Kesehatan | | | | | | | | Kesehatan |
| 3.10.1 | Persentase penyelesaian Pemeriksaan LAB sesuai standar waktu | Dinas | % | 2017 | 76.00 | 84 | 92.00 | 100 | ΝΑ | Dinas |
| | | Kesehatan | | | | | | | | Kesehatan |
| 3.11.1 | Persentase IKS (Indikator Keluarga Sehat) | Dinas | % | 2017 | 31 | 33 | 35 | 36 | ΝΑ | Dinas |
| | | Kesehatan | | | | | | | | Kesehatan |
| 3.12.1 | Indek kepuasan pelayanan kesehatan RSUD | RSUD | indeks | 2017 | 9.77 | 77.9 | 28 | 79 | ΝΑ | RSUD |
| | | Wonosari | | | | | | | | Wonosari |
| 3.12.2 | Indeks Keselamatan pasien | RSUD | indeks | 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | ΝΑ | RSUD |
| | | Wonosari | | | | | | | | Wonosari |

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERMUTU

| - | COOSIA TILLEGISTICA CERTIFICA O | | | | | | | | |
|----------------|---|---|-------|-------|--------|-------------------|-------|----------|---|
| Kode | | | Tahun | | Targe | Target Pencapaian | an | | 400000000000000000000000000000000000000 |
| Indikator | Indikator KAD | sumber Data satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Penanggungjawab Pelaksana |
| Target 4.2. Pe | Target 4.2. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga pemasyarakatan olahraga | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional | Dinas Pendidikan, Pemuda dan prestasi | 2017 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA N | Dinas Pendidikan, Pemuda dan |
| 4.3.1 | Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi, regional, | Dinas Pendidikan, Pemuda dan orang | 2017 | က | 3 | cc | 6 | NA | Dinas Pendidikan, Pemuda dan |
| | nasional dan internasional. yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi | Olahraga | | | | | | _ | Olahraga |
| 4.4.1 | Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan % Olahraga | 2017 | 21% | 24% | 27% | 29% | AN AN | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 4.4.2 | Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kecatanaan | Dinas Pendidikan, Pemuda dan % | 2017 | 75% | 83% | %76 | 100% | AN | Dinas Pendidikan, Pemuda dan |
| | | | | | | | | | or and a second |
| 4.5.1 | Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan % Olahraga | 2017 | 4.21 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | AN AN | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 4.5.2 | Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 2017 | 90.6 | 90.7 | 8.06 | 6.06 | AN A | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 4.6.1 | Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan % Olahraga | 2017 | 14.41 | 17.12 | 18.92 | 21.62 | AN P | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 4.6.2 | Angka partisipasi murni (APM) usia SMP | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 2017 | 80.05 | 80.1 | 80.15 | 80.2 | AN AN | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 4.7.1 | Persentase guru PAUD yang Bersertifikat | Dinas Pendidikan, Pemuda dan % Olahraga | 2017 | 68.77 | 69.46 | 71.25 | 73.03 | AN AN | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 4.8.1 | Persentase PD yang menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku | Persentase Perpustakaan % dengan Kategori baik | 2017 | 20% | %09 | %02 | %08 | A A | Persentase Perpustakaan dengan Kategori baik |
| 4.9.1 | Persentase Perpustakaan dengan Kategori baik | Persentase Perpustakaan % dengan Kategori baik | 2017 | 11.67 | 12.41% | 13,29 | 14,59 | A A | Persentase Perpustakaan dengan Kategori baik |

| , | 3 | , |
|---|---|---|
| i | | Ī |
| 7 | | |
| : | | |
| : | ۹ | |
| ; | | |
| ١ | ٠ | |
| 1 | , | , |
| : | 7 | ī |
| | 1 | : |
| 1 | ١ | |
| ٠ | | |
| : | 5 | ı |
| ! | | |
| ì | 7 | ì |
| ì | i | ľ |
| 3 | Š | į |
| 1 | | , |
| ı | 4 | ١ |
| | | , |
| • | | |
| : | | |
| | | |

| TUJUAN 5. K | UJUAN 5. KESETARAAN GENDER | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------|--------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|------|---|
| and of the state o | | 400 | 400 | | | Targ | Target Pencapaian | aian | | 000000000000000000000000000000000000000 |
| Node Indikat | ווטואמנטן אאט | Sumber Data | Satuan | Sumber Data Satuan Tanun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 2019 2020 2021 2022 Fendinggunglawab Felaksana |
| Target 5.2. Pe | arget 5.2. Pengembangan Otonomi Desa | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Persentase Penyusunan LPP Desa Tepat Waktu | DP3AKBPMD | % | 2017 | 09 | 65 | 65 70 | 80 | AA | DP3AKBPMD |
| 5.3.1 | Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi DP3AKBPMD | DP3AKBPMD | % | 2017 | 88.00 | 88.50 | 89.00 | 90.00 | NA | DP3AKBPMD |
| 5.4.1 | Cakupan PUS yang usia istrinya < 20 tahun | DP3AKBPMD | % | 2017 | 72 | 73 | 74 | 75 NA | | DP3AKBPMD |
| 5.5.1 | peningkatan jumlah alokasi APBDesa untuk pemberdayaan masyarakat | DP3AKBPMD | % | 2017 | 72 | 73 | 74 | 75 NA | | DP3AKBPMD |

| , | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ĺ | Į | J | | |
| ě | ١ | ١ | | Į |
| Į | | | | |
| ŝ | | | | |
| i | | ; | | |
| í | | ì | | |
| į | | | | |
| ١ | | • | | |
| ١ | ١ | | | Į |
| į | ĺ | | | |
| | | | | |
| ì | | | | |
| | | 4 | | |
| Į | | | | |
| ļ | | | | |
| ľ | | | | |
| J | ĺ | 3 | ĺ | |
| i | | ; | | |
| ĺ | | | | |
| ı | | 4 | | |
| ł | | | | |
| į | ١ | ٠ | | |
| į | | | | |
| ı | | | | |
| ۱ | ۱ | 4 | | |
| ì | | | | |
| į | | | | ĺ |
| ۰ | | | | ١ |
| į | | | | |
| ١ | | | | |
| | | | | |

| Kode | | | 1 | Tahun | | Targe | Target Pencapaian | | | Penanggungjawab |
|----------------|---|---------------------------|--------|-------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|------------------------|
| Indikator | indikator KAD | Sumper Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pelaksana |
| Target 6.2. Pu | Target 6.2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup pemasyarakatan olahraga | tan olahraga | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Persentase perusahaan yang taat terhadap Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | % | 2017 | 24% | 76% | 28% | 30% | Ą | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6.3.1 | Indeks Kualitas Air | Dinas Lingkungan Hidup | | 2017 | 52 14 parameter 56 14 Parmeter | 56 14 Parmeter | 5814 parameter | 60 14 parameter | Ą | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6.3.2 | Indeks Kualitas Udara | Dinas Lingkungan Hidup | | 2017 | 89 7 parameter | 81 7 parameter | 93 7 parameter | 95 7 parameter NA | Ą | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6.3.3 | Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif | Dinas Lingkungan Hidup | | 2017 | 5 klp. | 5 klp. | 5 klp | 5 klp. | A A | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6.4.1 | Persentase Kecamatan yang terlayani pengangkutan sampah | Dinas Lingkungan Hidup | % | 2017 | 24 | 26 | 28 | 30 | Ą | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6.5.1 | Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Mandiri pengelola sampah | Dinas Lingkungan Hidup | % | 2017 | 16,67% 3 kec. | 16,67% 3 kec. | 16,67% 3 kec. | 16,67% 3 kec. | A A | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6.6.1 | Penurunan luasan lahan kritis | Dinas Lingkungan Hidup | % | 2017 | 7800 ha | 7700 ha | 7600 ha | 7500 ha | Ą | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6.6.2 | Persentase geosite yang tertangani | Dinas Lingkungan Hidup | % | 2017 | 30.77 (4 geosites) | 46.15 (6 geosite) | 61.54 (8 geosite) | 69.23 (9 geosite) | A A | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6.7.1 | Persentase RTH Publik Perkotaan | Dinas Lingkungan Hidup | % | 2017 | 1% | 1% | 1% | 1% | Ą | Dinas Lingkungan Hidup |

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

| Kode | C 4 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 | of and and and | 400 | Tahun | | Targ | Target Pencapaian | | | and of the contract of the con |
|----------------|--|-----------------------------|--------|-------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------|--|
| Indikator | Indikator KAD | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Penanggungjawan Pelaksana |
| Target 8.2. Pe | Target 8.2. Pendidikan pelatihan tenaga kerja | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang | Dinas Tenaga Kerja dan | % | 2017 | 30% | 32% | 32% | 33% | AN | Dinas Tenaga Kerja dan |
| | terserap di pasar kerja | Transmigrasi | | | | | | | | Transmigrasi |
| 8.3.1 | Persentase pencari kerja yang terdaftar dan | Dinas Tenaga Kerja dan | % | 2017 | 32% | 33% | 33% | 34% | ΝΑ | Dinas Tenaga Kerja dan |
| | ditempatkan | Transmigrasi | | | | | | | | Transmigrasi |
| 8.4.1 | 1, Persentase Kasus ketenagakerjaan yang | Dinas Tenaga Kerja dan | % | 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | AN | Dinas Tenaga Kerja dan |
| | diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | Transmigrasi | | | | | | | | Transmigrasi |
| 8.4.2 | 2, persentase tenaga kerja yg mendapat jaminan | Dinas Tenaga Kerja dan | % | 2017 | 2% | 2% | 3% | 3% | ΝΑ | Dinas Tenaga Kerja dan |
| | ketenagakerjaan | Transmigrasi | | | | | | | | Transmigrasi |
| 8.5.1 | Persentase Penempatan transmigrasi sesuai | Dinas Tenaga Kerja dan | % | 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | Dinas Tenaga Kerja dan |
| | dengan Kesepakatan Kerja Antar Daerah (KSAD) | Transmigrasi | | | | | | | | Transmigrasi |
| 8.6.1 | Persentase UMKM dibina yang mampu | Dinas Koperasi, Usaha Kecil | % | 2017 | 21.91 | 23.41 | 24.75 | 25.46 | ΝA | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan |
| | mengimplementasika n pengelolaan UMKM | dan Menengah | | | | | | | | Menengah |
| 8.7.1 | Jumlah pertambahan koperasi sehat | Dinas Koperasi, Usaha Kecil | | 2017 | 2 | 33 | 3 | 4 | NA | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan |
| | | dan Menengah | | | | | | | | Menengah |
| 8.8.1 | Realisasi investasi nasional dan lokal | Dinas Penanaman Modal | & | 2017 | 110 M | 147 M | 195 M | 261 M | AN | Dinas Penanaman Modal dan |
| | | dan Pelayanan Terpadu | | | | | | | | Pelayanan Terpadu |
| 8.9.1 | Persentase Perizinan dan Non Perizinan Terlayani | i Dinas Penanaman Modal | % | 2017 | %08 | 85% | %06 | 95% | AA | Dinas Penanaman Modal dan |
| | tepat waktu | dan Pelayanan Terpadu | | | | | | | | Pelayanan Terpadu |
| 8.10.1 | Persentase ijin investasi yang tertindaklanjuti | Dinas Penanaman Modal | % | 2017 | %08 | %08 | 85% | %06 | ΝA | Dinas Penanaman Modal dan |
| | | dan Pelayanan Terpadu | | | | | | | | Pelayanan Terpadu |
| 8.11.1 | Nilai tambah sektor perdagangan | Dinas Perindustrian dan | Вр | 2017 | 70,501,745,000 | 71,193,008,000 | 71,842,401,000 | 72,590,090,000 | NA | Dinas Perindustrian dan |
| | | Perdagangan | | | | | | | | Perdagangan |
| 8.12.1 | 1.Nilai tambah pedagang pasar yang dibina | Dinas Perindustrian dan | % | 2017 | 46% | %89 | 85% | 100% | NA | Dinas Perindustrian dan |
| | | Perdagangan | | | | | | | | Perdagangan |

| Kode | CAG sections | o de Caracteria | T | ahun | | Ta | Target Pencapaian | | | 400000000000000000000000000000000000000 |
|-----------|--|-------------------------|-----|--------------|--------|----------|-------------------|----------|------|---|
| Indikator | Indikator KAD | Sumber Data | | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 Penanggungjawab Pelaksana |
| 8.12.2 | 2.Jumlah pasar pemerintah dengan daya dukung | Dinas Perindustrian dan | 201 | 2017 8 pasar | pasar | 10 pasar | 12 pasar | 14 pasar | ΑN | NA Dinas Perindustrian dan |
| | kelengkapan fasilitas memadai | Perdagangan | | | | | | | | Perdagangan |
| 8.13.1 | Nilai tambah sektor Industri | Dinas Perindustrian dan | 201 | 2017 21 | 21,048 | 21,097 | 21,124 | 21,152 | ΑN | Dinas Perindustrian dan |
| | | Perdagangan | | | | | | | | Perdagangan |

TUJUAN 9. INFRASTRUKTUR, INDUSTRI DAN INOVASI

| Kode | | open G | 400 | Tahun | | Targ | Target Pencapaian | u | | on only of the state of the sta |
|---------------|--|---|--------|-------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|--|
| Indikator | III GIKATOI NAD | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | renanggungjawab rejaksana |
| Target 9.2. F | Target 9.2. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan | an dan jembatan | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakvat dan Kawasan Demukiman | % | 2017 | 45 | 20 | 55 | 09 | NA | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Bakyat dan Kawasan Demukiman |
| 9.2.2 | Persentase iembatan dalam kondisi baik | Dinas Pekeriaan Umum. Perumahan | % | 2017 | 96.51% | 97.67% | 98.83% | 100% | ¥. | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan |
| | | Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 9.3.1 | Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan | % | 2017 | 75% | 100% | 100% | 100% | A | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan |
| | sistem pengelolaan air limbah | Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 9.3.2 | Persentase terlayani air minum layak | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan | % | 2017 | 83% | 100% | 100% | 100% | NA | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan |
| ,,, | | nanyat dali nawasali reliluniliali | ò | 1,00 | | | | | | Navyac dali kawasali relilukiliali |
| 9.4.1 | Persentase luas kawasan kumuh tertangani | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | % | 2017 | | | | | NA A | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 9.4.2 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tertangani | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | % | 2017 | 32.34 | 43.95 | 59.43 | 71.04 | NA | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 9.4.3 | Persentase Kawasan Perumahan Formal yang tertangani | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakvat dan Kawasan Pemukiman | % | 2017 | 40 (6 unit) | 60 (9 unit) | 80 (12 unit) 100 (15 unit) | 100 (15 unit) | NA | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakvat dan Kawasan Pemukiman |
| 9.5.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Penghuni Rumah Susun | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Indeks | 2017 | 72 | 74 | 76 | . 08 | NA | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 9.5.2 | Tingkat Hunian Rumah Susun | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | % | 2017 | 20% | 75% | %08 | 100% | NA A | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 9.6.1 | Persentase tertangani infrastruktur irigasi | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | % | 2017 | 74 | 76 | 78 | 80 | NA | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 9.7.1 | Persentase kondisi peralatan berat dan Laboratorium berfungsi baik infrastruktur irigasi | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | % | 2017 | 75% | %08 | 82% | 06 | NA | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 9.8.1 | Persentase keandalan bangunan gedung pemerintahan | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | % | 2017 | 84 | 98 | 88 | 06 | N A | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 9.9.1 | Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan, dan cermin tikungan) pada jalan Kabupaten Persentase kendanan wajib uji laik ialan | Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan | % % | 2017 | 30% | 35% | 40 | 45 | ₹ ₹ | Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan |
| 9.11.1 | Jumlah pendapatan retribusi kawasan parkir | Dinas Perhubungan | | 2017 | | | | | A | Dinas Perhubungan |
| 9.12.1 | Jumlah kawasan rawan kecelakaan dan kejahatan | Dinas Perhubungan | | 2017 | 30 | 35 | 40 | 45 | AN | Dinas Perhubungan |
| 9.13.1 | Pesentase tingkat ketaatan perijinan angkutan umum | Dinas Perhubungan | % | 2017 | 61 | 99 | 71 | 9/ | A | Dinas Perhubungan |
| 9.14.1 | Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif | Dinas Komunikasi dan Informatika | % | 2017 | 32.60% | 43.47% | 54.34% | 65.21% | Z V | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 9.15.1 | Persentase layanan keamanan informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika | | 2017 | 20% | %09 | 20% | 75% | Ν | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 9.16.1 | Persentase data dasar yang tersedian untuk perencanaan | Dinas Komunikasi dan Informatika | % | 2017 | 85% | %06 | %26 | %56 | NA | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 9.17.1 | Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika | % | 2017 | 75% | %08 | 83% | 87% | N V | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 9.18.1 | Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | menit | 2017 | 18 | 17 | 15 | 15 | A A | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Kode | CAG section is | de Caracian | 1000 | Tahun | | Tar | get Pencapai | an | | |
|-----------|---|---|--------|-------|-------------|----------|--------------|--|---------|--|
| Indikator | Indikatol KAD | | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | Satudii Dasar 2018 2019 2020 2021 2022 | 2022 | Penanggungjawan Pelaksana |
| 9.19.1 | Persentase Desa rawan bencana memiliki kemampuan | enanggulangan Bencana | % | 2017 | 71,90 | 78,51 | 85,20 | 91,31 | NA A | 2017 71,90 78,51 85,20 91,31 NA Badan Penanggulangan Bencana |
| | manajemen penanggulangan pencana | Daeran | | | | | | | | Daeran |
| 9.20.1 | Jumlah luasan lahan yang dibutuhkan untuk kepentingan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | m2 | 2017 | 2017 60,000 | 65,000 7 | 0,000 | 000'09 (| ₹ | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| | publik | | | | | | | | | |
| 9.21.1 | Persentase kawasan memiliki dokumen rinci | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | % | 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| 9.22.1 | Persentase Rekomendasi yang sesuai dengan tata ruang | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | % | 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | A | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |

TUJUAN 10. MENGURANGI KETIMPANGAN

| Kode | | | | Tahun | | Ta | Target Pencapaian | | | |
|-------------|--|------------------------|--------|-------|------------|------------|-------------------|------------|------|---------------------------|
| Indikator | Indikator KAD | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Penanggungjawab Pelaksana |
| Target 10.2 | arget 10.2 Pengelolaan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | Cakupan penerbitan KTP, KK dan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan | Dinas Kependudukan dan | desa | 2017 | 0 | 14 Desa | 30 Desa | 56 Desa | N | Dinas Kependudukan dan |
| | Mutasi Penduduk | Pencatatan Sipil | | | | | | | | Pencatatan Sipil |
| 10.3.1 | Persentase desa yang memiliki data base | Dinas Kependudukan dan | % | 2017 | 12,05% (18 | 12,05% (18 | 12,05% (18 | 12,05% (18 | A | Dinas Kependudukan dan |
| | kependudukan dan pencatatan sipil | Pencatatan Sipil | | | Desa) | Desa) | Desa) | Desa) | | Pencatatan Sipil |
| 10.4.1 | Cakupan penerbitan akta-akta catatan sipil | Dinas Kependudukan dan | % | 2017 | 39% | 41% | 43% | 45% | A | Dinas Kependudukan dan |
| | | Pencatatan Sipil | | | | | | | | Pencatatan Sipil |
| 10.5.1 | Jumlah OPD yang memanfaatkan data | Dinas Kependudukan dan | OPD | 2017 | 6 OPD | 6 OPD | 6 OPD | 6 OPD | A | Dinas Kependudukan dan |
| | | Pencatatan Sipil | | | | | | | | Pencatatan Sipil |

TUJUAN 14. MENJAGA EKOSISTEM LAUT

| - Hard - Mary | | | | | | Tar | Target Pencapaian | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|------|------------------------------|
| kode indika | Itor Indikator KAD | Sumber Data | Satuan | Satuan Tanun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Penanggungjawan Pelaksana |
| Target 14.2 P | engembangan Agribisnis Perikanan | | | | | | | | | |
| 14.2.1 | Nilai pendapatan perikanan budidaya | Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp/Th | 2017 | 4,380,033.00 | 4,403,906.00 | 4,469,136.00 | 4,534,103.00 | NA | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 14.3.1 | Nilai pendapatan nelayan | Dinas Kelautan dan Perikanan Rp/Th | Rp/Th | 2017 | 23,794,712 | 24,494,557 | 25,717,989 | 27,003,629 | NA | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 14.4.1 | Produksi perikanan budidaya (kg) | Dinas Kelautan dan Perikanan | kg/th | 2017 | 12,550,010.00 | 12,650,300.00 | 12,870,115.00 | _ | AA | Dinas Kelautan dan Perikanan |

TUJUAN 15. MENJAGA EKOSISTEM DARAT

| 4-1-1-2 | | 4 | 1 | | | Target | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|----------------|--|---------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|----------------------------|
| kode indikator | Indikator KAD | Sumper Data | Satuan | Satuan lanun Dasar — | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2 Pelaksana |
| Target 15.2 P | Target 15.2 Peningkatan Agribisnis Pertanian | | | | | | | | |
| 15.2.1 | Nilai pendapatan subsektor tanaman pangan | Dinas Pertanian dan | | 2017 | 1,556,608 | 2,135,882 | 1,127,203 | 1,151,284 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pangan | | | ,500 | ,500 | 000 | ,155 | |
| 15.3.1 | Persentase rekomendasi teknologi pertanian spesifik lokalita Dinas Pertanian dan | Dinas Pertanian dan | kelompok | 2017 | 620,702 | 982,980 | 1,078,660 | 1,259,100 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | yang diterapkan | Pangan | | | ,500 | 000 | 000 | ,833 | |
| 15.4.1 | Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan | Dinas Pertanian dan | | 2017 | 982,980 | 1,078,660 | 1,259,100 | 1,372,419 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pangan | | | 000 | 000 | ,833 | 706′ | |
| 15.4.2 | 1) Ketersediaan Beras (Pangan Pokok) | Dinas Pertanian dan | ton | 2017 | 5,100 | 5,150 | 5,200 | 5,250 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pangan | | | | | | | |
| 15.4.3 | 2) Harga pangan yang terjangkau dan terkendali | Dinas Pertanian dan | Кр | 2017 | 8,100 | 8,200 | 8,300 | 8,400 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pangan | | | | | | | |
| 15.4.4 | 3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan) | Dinas Pertanian dan | | 2017 | 85.80 | 87.20 | 90.00 | 92.20 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Pangan | | | | | | | |

| setolibal open | | C so desired | 400 | | | Target F | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|----------------|--|-------------------------------|--------|------------|------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| voue markato | _ | Sumper Data | Satuan | anni Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 | Pelaksana |
| 15.4.5 | 4) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan) | Dinas Pertanian dan Pangan | | 2017 | 91.30 | 92.70 | 95.00 | 95.70 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15.5.1 | Jumlah produksi hasil perkebunan dan hortikultura produk unggulan | Dinas Pertanian dan Pangan | | 2017 | | | | NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15.5.2 | kakao | Dinas Pertanian dan Pangan | Kg | 2017 | 364,000 | 413,000 | 465,000 | 520,000 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15.5.3 | Mete | Dinas Pertanian dan Pangan | Kg | 2017 | 548,191 | 575,600 | 604,380 | 634,600 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15.5.4 | Tembakau | Dinas Pertanian dan Pangan | Kg | 2017 | 468,157 | 491,565 | 516,143 | 541,950 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15.5.5 | Kelapa | Dinas Pertanian dan Pangan | ton | 2017 | 21,732,480 | 22,819,104 | 23,960,059 | 25,158,062 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15.5.6 | Bawang Merah | Dinas Pertanian dan Pangan | ton | 2017 | 463.60 | 470.56 | 477.61 | 484.78 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15.5.7 | Cabe | Dinas Pertanian dan Pangan | ton | 2017 | 480.08 | 487.29 | 494.60 | 502.01 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15.6.1 | Jumlah Populasi ternak : | Dinas Pertanian dan Pangan | | 2017 | | | | NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15.6.2 | 1. Sapi potong (ekor) | Dinas Pertanian dan Pangan | Ekor | 2017 | 151,573 | 153,008 | 154,619 | 156,165 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15.6.3 | 2. Kambing (ekor) | Dinas Pertanian dan Pangan | Ekor | 2017 | 191,094 | 195,528 | 199,438 | 203,427 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15.6.4 | 3. Ayam buras (ekor) | Dinas Pertanian dan Pangan | Ekor | 2017 | 1,150,109 | 1,161,610 | 1,173,263 | 1,184,956 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15.6.5 | 4. Daging | Dinas Pertanian dan Pangan | Kg | 2017 | 4,618,031 | 4,664,211 | 4,710,854 | 4,757,962 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15.6.6 | 5. Telur | Dinas Pertanian dan Pangan | Kg | 2017 | 3,417,314 | 3,451,487 | 3,486,002 | 3,520,862 NA | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 15.7.1 | Jumlah produksi tamanan pangan | | | 2017 | | | | NA | |
| 15.7.2 | Padi | | ton | 2017 | 290,817 | 291,195 | 291,572 | 292,488 NA | |
| 15.7.3 | Jagung | | ton | 2017 | 206,500 | 207,500 | 208,500 | 209,500 NA | |
| 15.7.4 | Kedelai | | ton | 2017 | 9000'9 | 6,500 | 2,000 | 7,500 NA | |
| 15.7.5 | Ubi Kayu | | ton | 2017 | 878,510 | 880,706 | 882,908 | 891,737 NA | |

| Ā |
|-------------------------|
| |
| 록 |
| G |
| ž |
| ⋖ |
| ≥ |
| 5 |
| > |
| õ |
| ٩ |
| ₽ |
| 2 |
| = |
| ₩ |
| = |
| 7 |
| DAN KELEMBAGAAN YANG KU |
| |
| , KEADILAN, |
| ⊒ |
| ۵ |
| ⋖ |
| ☲ |
| _` |
| ş |
| € |
| ₹ |
| ş |
| 2 |
| ~ |
| PERDAM |
| 16. PE |
| 16 |
| j |
| TUJUAN |
| ⊃ |
| 3 |
| F |
| |

| Kode | | 4 | | Tahun | | | Targ | Target Pencapaian | | | | Penanggungjawab |
|------------|--|-------------------------------|---------------|--------------|--------|----|------|-------------------|----|------|---------|-------------------------------|
| Indikator | indikator KAD | Sumber Data Satuan Dasar | Satuan | Dasar | 2018 | 80 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | Pelaksana |
| Target 16. | Target 16.2. Penegakan Peraturan Daerah Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan | , Rehabilitasi dan Per | neliharaan ja | llan dan jei | nbatan | | | | | | | |
| 16.2.1 | Persentase penegakan peraturan perundangan yang mengandung sanksi pidana | Satuan Polisi Pamong Praja | % | 2017 65 | 65 | 70 | | 75 | 80 | | Ą | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 16.3.1 | ase jumlah anggota satuan Linmas ndal dan tangguh | Satuan Polisi Pamong Praja | % | 2017 | 85 | 98 | | 87 | 68 | | NA V | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 16.4.1 | ntraman umum | Satuan Polisi Pamong Praja | % | 2017 | 92 | 93 | | 94 | 95 | | ¥. | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 16.5.1 | 1,Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP | Inspektorat Daerah Temuan | Temuan | 2017 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | A A | Inspektorat Daerah |

| Kode | | | | Tahun | | Targe | Target Pencapaian | | | Penanggungjawab |
|-----------|--|---|------------|-------|--|--|--|--|----------|---|
| Indikator | Indikator RAD | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pelaksana |
| 16.5.2 | 2,Persentase PD yang sudah melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan utama | Inspektorat Daerah | % | 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ā | Inspektorat Daerah |
| 16.6.1 | Persentase kesesuaian Program dalam RKPD terhadap RPJMD | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 16.7.1 | Persentase kesesuaian capaian dengan target kinerja dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | N A | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 16.8.1 | suaian Program dalam Fisik dan Prasarana Ian APBD, serta Program D terhadap RPJMD | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 2017 | Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100% | ∀ | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 16.9.1 | Persentase kesesuaian Program dalam Renja PD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya terhadap RKPD dan APBD, sertaProgram dalam Renstra PD terhadap RPIMD | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 2017 | Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100% | Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100% | Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100% | %0 | ĕ | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 16.10.1 | Persentase kesesuaianProgram dalam Renja PD Bidang Perekonomian terhadap RKPD dan APBD, sertaProgram dalam Renstra PD terhadap RPJMD | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 2017 | Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100% | N A | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 16.11.1 | Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Penelitian | 2017 | 6 penelitian | 8 penelitian | 10 penelitian | 12 penelitian | N A | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 16.12.1 | Persentase PD yang menyampaikan Laporan Keuangan dengan benar dan tepat waktu | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | % | 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | N A | Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 16.13.1 | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD (Minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya) | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | % | 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | N A | Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 16.14.1 | Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | % | 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ą | Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 16.15.1 | | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | % | 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 16.16.1 | ~ | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | % | 2017 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ā | Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 16.17.1 | Persentase desa di wilayah perkotaan yang memiliki data obyek pajak yang valid | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | % | 2017 | 00 | 00 | ∞ | 80 | Ϋ́ | Badan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 16.18.1 | Persentase kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pengangkatan dan pemindahan PNS yang sesuai formasi. | Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah | % | 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | N A | Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah |
| 16.19.1 | Persentase Pengiriman Peserta Diklat dan Tugas Belajar sesuai kebutuhan | | % | 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | N N | Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah |
| 16.20.1 | Persentase Pelanggaran dan Kasus PNS yang terselesaikan | Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah | % | 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | N A | Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah |
| 16.21.1 | Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Sekretariat Daerah | | 2017 | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | AA | Sekretariat Daerah |

| Kode | | 4 | 1 | Tahun | | Targ | Target Pencapaian | | | Penanggungjawab |
|-----------|---|--------------------|--------|-------|------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Indikator | Indikator KAD | Sumper Data | satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pelaksana |
| 16.22.1 | Nilai AKIP Pemerintah Daerah | Sekretariat Daerah | (N | 2017 | В | 88 | 88 | 88 | AA | Sekretariat Daerah |
| 16.23.1 | Persentase permasalahan Perbatasan yang tertangani | Sekretariat Daerah | (N | 2017 | 28% | 62% | %99 | 70% | Ą | Sekretariat Daerah |
| 16.24.1 | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti | Sekretariat Daerah | | 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | Ą | Sekretariat Daerah |
| 16.25.1 | Persentase Produk Hukum daerah yang ditetapkan | Sekretariat Daerah | ·N | 2017 | %06 | %06 | %06 | 95% | N A | Sekretariat Daerah |
| 16.26.1 | Persentase ketugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan Baik | Sekretariat Daerah | | 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | Ą | Sekretariat Daerah |
| 16.27.1 | Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang kesejahteraan rakyat yang dihasilkan | Sekretariat Daerah | . 7 | 2017 | 15 | 15 | 15 | 15 | ¥. | Sekretariat Daerah |
| 16.28.1 | Persentase PD Penyelenggara Pelayanan yang terbina | Sekretariat Daerah | | 2017 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | N A | Sekretariat Daerah |
| 16.29.1 | Persentase PD yang sudah melaksanakan Sekretariat Daerah tugas dan fungsinya | Sekretariat Daerah | | 2017 | 94% | %96 | %86 | 100% | N A | Sekretariat Daerah |
| 16.30.1 | Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang perekonomian dan Sumberdaya Alam | Sekretariat Daerah | | 2017 | 8 | 10 rumusan kebijakan | 12 rumusan kebijakan | 15 rumusan kebijakan | N A | Sekretariat Daerah |
| 16.31.1 | Persentase serapan anggaranProgram dan kegiatan | Sekretariat Daerah | (N | 2017 | %88 | %06 | 95% | 94% | N A | Sekretariat Daerah |
| 16.32.1 | Persentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan administrasi dan keuangan | Sekretariat DPRD | iv. | 2017 | %26 | 93% | 94% | %56 | A A | Sekretariat DPRD |
| 16.33.1 | Persentase konflik sosial yang diselesaikan dalam wilayah | | (N | 2017 | %92 | 85% | 87% | %06 | Ą | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16.34.1 | Persentase ormas dan LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan | | . 4 | 2017 | 20% | 55% | %09 | 65% | A A | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

| edalibal abay | | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10.40 | | | Tar | Target Pencapaiar | paian | | |
|-----------------|---|---|-------------|--------------------|------|------|-------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| Node Indikator | Indikator KAD | Sumber Data | Satuan | Satuan lanun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 2019 2020 2021 2022 | 022 Fenanggungjawan Pelaksana |
| Target 17.2. Pe | irget 17.2. Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi | | | | | | | | | |
| 17.2.1 | Jumlah rintisan desa budaya | Dinas Kebudayaan desa | desa | 2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | AA | 2 2 2 NA Dinas Kebudayaan |
| 17.3.1 | Jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya | Idaya Dinas Kebudayaan rekomendasi 2017 | rekomendasi | 2017 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 NA | Dinas Kebudayaan |
| 17.4.1 | Jumlah Desa yang telah memiliki dokumen sejarah desa dalam Bahasa Jawa. Dinas Kebudayaan desa | awa. Dinas Kebudayaan | desa | 2017 | 25 | 25 | 25 | 25 | AN | 25 25 25 NA Dinas Kebudayaan |

Matrik Program Kegiatan, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Gunungkidul

| | | Tabilit | | L | Torget Tabus | 5 | | indibatif Alabasi | | |
|--|------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|--------------------|-----------|--|
| Program / Kegiatan / Outout Kegiatan | Satuan | Dasar | | 2 | | | | Anggaran 5 Tahunan | Sumber | Instansi Pelaksana |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | (Rp. Juta) | Pendanaan | |
| Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR TPB 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | p di bawah garis kemis | skinan nasior | nal, menu | rut jenis | kelamin | dan kel | ompok ı | nmur. | | |
| PROGRAM 1:Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | |
| nan Perlindungan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ΑN | 13,653,834,500 | APBD | Dinas Sosial Kab. Gunungkidul |
| dan jaminan sosial secara ekonomi dan sosial | | | | | | | | | | |
| katan reh | | | | | | | | | | |
| garaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ΑĀ | 5,820,922,500 | APBD | Dinas Sosial Kab. Gunungkidul |
| rehabilitasi Sosial dan sosial | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 3: Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata | wisata | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pembinaan Kelembagaan Jumlah pembinaan, sosialisasi | Desa, Bimtek, | | 2 | 2 | 2 | 2 | NA | 3,691,626,900 | APBD | Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul |
| Pariwisata pengukuhan Pokdarwis, Penetapan | Pokdarwis, | | | | | | | | | |
| Desa Wisata Rekomendasi Kebijakan | Sosialisasi, Orientasi | | | | | | | | | |
| di Bidang Jaminan Sosial | Lapangan | | | | | | | | | |
| Keterangan | | | | | | | | | | |
| Tujuan 14 : Menjaga Ekosistem Laut | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's 14.2.1* Melindungi Lingkungan Pantai dan Laut | dan Laut | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengd. Sumberdaya Kelautan | gd. Sumberdaya Kelau | ıtan | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pembentukan Kelompok | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | AN | 395,788,450 | APBD | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| Masyarakat Swakarsa Pengamanan | | | | | | | | | | Kab.Gunungkidul |
| Sumberdaya Kelautan | | | | | | | | | |) |
| Kegiatan 2 : Pengendalian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ΑN | 523,818,850 | APBD | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| Pengawasan Pemanfaatan Perikanan | | | | | | | | | | Kab.Gunungkidul |
| Tangkap dan Budidaya | | | | | | | | | |) |
| PROGRAM 2: Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sdm kelautan | endayagunaan sdm ke | lautan | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penyuluh hukum dalam | . % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | AA | 233,578,000 | APBD | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| pendavagunaan sumber dava laut | | | | | | | | | | Kab.Gunungkidul |
| PROGRAM 3: Program Peningkatan mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan iklim Laut | klim Laut | | | | | | | | | |
| | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | 118.350.000 | APBD | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| Bencana Alam Laut dan Prakiraan | | | | | | | | | | Kab.Gunungkidul |
| Laut | | | | | | | | | | |
| Tujuan 15 : Menjaga Ekosistem Darat | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's 15.2.1* Melindungi Sumber Dava Alam dan Menjaga Keanekaragaman Hayati | dan Menjaga Keanek | aragaman Ha | ıyati | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | |) | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Kegiatan Pengelolaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | NA | 501,502,000 | APBD | Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gunungkidul |
| Keanekaragaman Hayati dan | | | | | | | | | | |
| Ekosistem | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 2 : Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Kegiatan Peningkatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ΝA | 2,180,480,500 | APBD | Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gunungkidul |
| Peran serta Masyarakat dalam | | | | | | | | | | |
| Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan | | | | | | | | | | |
| SDA | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 3:Program Peningkatan Pengendalian Polusi | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Program : Pengembangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ΑN | 108,565,000 | APBD | Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gunungkidul |
| Ekowisata & Jasa Lingkungan di | | | | | | | | | | |
| Kawasan Konservasi Laut dan Hutan | | | | | | | | | | |

| | | Tahun | | Tar | Target Tahunan | nan | | Indikatif Alokasi | 100 | |
|--|--------------------|---------------|-----------|----------|----------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 2020 2021 2022 | 2022 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Pendanaan | Instansi Pelaksana |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Pengembangan % Ekowisata dan Jasa Lingkungan di | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 NA | | 108,565,000 | APBD | Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gunungkidul |
| Kawasan Koncervasi | | | | | | | | | | |
| Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's 16.2.1* Menciptakan ruang damai bagi masyarakat, keadilan dan memastikan pemerintah bekerja secara efektif dan terbuka | asyarakat, keadila | n dan memas | tikan per | nerintah | n bekerja | secarae | fektif da | ın terbuka | | |
| PROGRAM 1: Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | lesaan | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Keg. Pembinaan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | A | 470,336,845 | APBD | Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
| Kelembagaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | Perlindungan Anak, dan Keluarga |
| | | | | | | | | | | Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Gunungkidul |
| Kegiatan 2 : Keg. Pembinaan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ΑN | 2.600.884.359 | APBD | Dinas Pemberdayaan Perempuan |
| | | | | | | | | | | Perlindungan Anak, dan Keluarga |
| Membangun Desa | | | | | | | | | | Berencana, Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | | | | | | dan Desa Kab.Gunungkidul |
| PROGRAM 2 : Program Pengembangan Otonomi Desa | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pembinaan Pengelolaan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | AA | 475,000,000 | APBD | Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
| Keuangan Desa | | | | | | | | | | Perlindungan Anak, dan Keluarga |
| | | | | | | | | | | Berencana, Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | | | | | | dan Desa Kab.Gunungkidul |

Matrik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kulon Progo

| Kode | | 4 | | Tahun | | Ľ | Target Pencapaian | ian | | |
|-------------------|--|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---|
| Indikator | Indikator KAD | sumber Data | satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Penanggungjawab Pelaksana |
| TUJUAN I M | TUJUAN I Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun. | | | | | | | | | |
| Target 1.2. F | i arget 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | i laki-laki, perempuan dan anak- | anak dari semua u | sia, yang hidu | ıp dalam kerr | iskinan di se | mua dimensi, | , sesuai deng | an definisi na | sional. |
| 1.2.1 | Angka kemiskinan | BPS | % | 20.03 | 18.25 | 17.25 | 16 | 14.75 | 13.25 | Bappeda |
| Target 1.3. I | Farget 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungar | perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan | termasuk kelompo | k yang paling | miskin, dan p | ada tahun 2 | 030 mencapa | i cakupan su | bstansial bag | i kelompok miskin dan rentan |
| 1.3.1(a) | | Dinas Kesehatan | % | 77.04 | 84.38 | 91.17 | 97.97 | 97.97 | 99.46 | Dinas Kesehatan |
| 1.3.1(c) | Jumlah PMKS yang memperoleh pemberdayaan sosial | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | Orang | 8,050 | 8,430 | 8,600 | 8,800 | 8,950 | 9,100 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan |
| | | Andk | | | | | | | | Andk |
| 1.3.1(d) | Jumlah PMKS yang menerima manfaat bantuan sosial | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Orang | 52,250 | 52,750 | 53,250 | 53,800 | 54,500 | 55,000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Target 1.4. N | larget 1.4. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungar | perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan | termasuk kelompo | k yang paling | miskin, dan p | ada tahun 2 | 030 mencapa | i cakupan su | bstansial bag | i kelompok miskin dan rentan |
| 1.4.1(c) | Meningkatnya cakupan CPR (Contraceptive Prevalence Rate) | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | % | 70,19 | 71,07 | 71,09 | 71,10 | 71,11 | 71,13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1.4.1(d) | Cakupan rumah tangga berakses air bersih | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Bermukinan | % | 90.47 | 88.83 | 87.21 | 85.40 | 83.61 | 81.84 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Bermuliman |
| | | | | | | | | | | |
| 1.4.1(e) | Cakupan rumah tangga dengan layanan air limbah | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan | % | 43.13 | 45.74 | 48.12 | 50.29 | 52.26 | 54.03 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| | | Permukiman | | | | | | | | Permukiman |

| Kode | | | | Tahun | | Ta | Target Pencapaian | naian | | |
|------------------|--|--|--|--|----------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|--|
| Indikator | Indikator RAD | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Penanggungjawab Pelaksana |
| 1.4.1(f) | Persentase penanganan kawasan kumuh | Dinas Pekerjaan Umum | % | 4.64 | 4.64 | 4.81 | 4.81 | 4.98 | 4.98 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Perumahan dan Kawasan | | | | | | | | Perumahan dan Kawasan |
| | | Permukiman | | | | | | | | Permukiman |
| 1.4.1(g) | Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat | Dinas Pendidikan Pemuda dan | % | 99.49 | 99.54 | 99.59 | 99.64 | 69.66 | 99.74 | Dinas Pendidikan Pemuda dan |
| 1.4.1(h) | Maningkataya Angka Dartisipasi Murni SMD/MTs/ | Dinas Pendidikan Pemuda dan | % | 98 18 | 98 21 | 08 24 | 98 27 | 08 30 | 98 33 | Dinas Dendidikan Demuda dan |
| () | Sederajat | Olahraga | | | 1 | | 1 | | | Olahraga |
| 1.4.1(j) | Persentase Penduduk usia 0-18 tahun dengan | Dinas Kependudukan dan | % | 92.22 | 92.77 | 93.32 | 93.88 | 94.44 | 95.01 | Dinas Kependudukan dan |
| 1 | Kepemilikan akte kelahiran | Pencatatan Sipil | | | | | | | | Pencatatan Sipil |
| 1.4.2 | Cakupan luas lahan bersertifikat | Dinas Pertanahan dan Tata | % | 78.93 | 80.64 | 82.34 | 84.05 | 85.75 | 87.46 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| | - | Ruang | | | | | | | | |
| Target 1.5. F | Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, | n dan mereka yang berada dala | m kondisi rentan, d | an mengurai | ngi kerentana | n mereka tei | rhadap kejad | ian ekstrim t | erkait iklim d | lan guncangan ekonomi, sosial, |
| lingkungan, | lingkungan, dan bencana. | | 1 | | : | | | | 0 | |
| 1.5.1 | Cakupan penanggulangan bencana | BPBU | | 70.88 | 70 | 74.61 | 55.// | 80.48 | 86.83 | BPBU |
| 1.5.1.(a) | Desa Tangguri bericana | brau. | III I | 00 02 | 30 | 47 | 23 | 94 | 7.0 | Bred |
| T-9. T-(D) | maeks Perimaungan Sosiai | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | a L | 22.38 | 52.98 | 9.5.9 | 24.42 | 24.9I | 22.08 | Dinas Sosiai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| TIMALITA | TIMES IN MARKET IN ACTION OF ACTION | ciri yang baik cotto maninghat | ducd actachon and | actuinele | | | | | | |
| Target 2.1 P | inangkan kelapatan, mencapai ketana ihun 2030, menghilangkan kelaparan | nan pangan uan gu yang ban, serta memingkatkan pertaman berkelanjuan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka | kan pertaman berk 1ya orang miskin da | n mereka ya | ng berada da | lam kondisi r | entan, term | ısuk bayi, ter | hadap makaı | nan pengan dan gari yang bah, serta meningkatkan petanian berkadanjakan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, term asuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup |
| sepanjang tahun. | thun. | | | | | | | | | |
| 2.1.1.(a) | indeks kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan | nilai | 58.35 | 64.40 | 67.16 | 69.93 | 72.70 | 74.80 | Dinas Kesehatan |
| 2.1.2 | Jumlah desa yang tidak rawan pangan | Dinas Pertanian dan Pangan | nilai | 81 | 82 | 83 | 84 | 82 | 98 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Target 2.2 P. | Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi | gizi, termasuk pada tahun 2025 | mencapai target y | ang disepaka | ti secara inte | rnasional unt | uk anak pen | dek dan kuru | s di bawah u | sia 5 tahun, dan memenuhi |
| kebutuhan g | kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | ıla. | | | | | | | | |
| 2.2.1 | jumlah balita stunting | Dinas Kesehatan | anak balita | 3670 | 3600 | 3500 | 3400 | 3100 | 2842 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2 | jumlah balita Bawah Garis Merah | Dinas Kesehatan | anak balita | 218 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | Dinas Kesehatan |
| | Jumlah balita kurus | Dinas Kesehatan | bayi | 1321 | 1189 | 1057 | 925 | 793 | 657 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2.(a) | Jumlah ibu hamil dengn anemia | Dinas Kesehatan | ibu hamil | 727 | 200 | 650 | 610 | 280 | 550 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2.(b) | | Dinas Kesehatan | bayi | 2807 | 2900 | 2950 | 3020 | 3050 | 3100 | Dinas Kesehatan |
| Target 2.4 P. | Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang be | rkelanjutan dan menerapkan p | raktek pertanian ta | ngguh yang r | neningkatkar | ı produksi da | n produktivi | tas, memban | tu menjaga e | pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas |
| adaptasi ter | adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. | lan bencana lainnya, serta seca | ra progresif mempe | erbaiki kualit | as tanah dan | lahan. | | | | |
| 2.4.1 | Cetak sawah baru | Dinas Pertanian dan Pangan | ha | 70 | 25 ha | 50 ha | 44 ha | 35 ha | 196 ha | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | Jumlah Alat Mesin budidaya tanaman pangan | Dinas Pertanian dan Pangan. | nnit | 3,567 | 3,597 | 3,632 | 3,672 | 3,717 | 3,767 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| TUJUAN III N | TUJUAN III Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia | teraan seluruh penduduk semu | a usia | | | | | | | |
| Target 3.1 P. | Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup | ga kurang dari 70 per 100.000 k | elahiran hidup. | | | | | | | |
| 3.1.1 | Angka kematian ibu | BPS | nilai per 100.000 | 56.26 | 55.8 | 55.35 | 54.92 | 54.74 | 54.55 | Dinas Kesehatan |
| T. C. towns | Taxonia de la companya de la company | | Kelaniran nidup | and and an | • | 10140000 | Monda | onial control of | 0 7 200 7 | 10 Maintenance (10 Maintenance) |
| Angka Kema | | batu iani dan bahat dicegah, bengan selutun negara berusaha menurunkan Angka nematian Neoriatan setuaknya iningka 12 per 12,000 na (neraniran muup) dari | n selurun negara D | erusana men | urunkan Ang | ka nematian | Neonatal set | idakinya ming | 8a 12 per 1.0 | oo kn (kelaniran niqup) dan |
| 3.2.2.(a) | Jumlah Kematian Bavi | BPS | BPS | 8.86 | 8.79 | 8.52 | 8.46 | 7.84 | 7.5 | Dinas Kesehatan |
| 3.2.2.(b) | Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang | Dinas Kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| | imunisasi dasar lengkap pada bayi | | | | | | | | | |
| Target 3.3 P | Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, ma | tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | terabaikan, dan me | merangi her | atitis, penyal | cit bersumbe | r air, serta p | enyakit menu | ılar lainnya. | |
| 3.3.1 | | Dinas Kesehatan | Kasus | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.2.(a) | prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk | Dinas Kesehatan | Kasus | 272 | 261 | 247 | 229 | 220 | 215 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.3 | Jumlah penderita DBD | Dinas Kesehatan | penderita | 186 | 166 | 146 | 136 | 146 | 150 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.5.(a) | | Dinas Kesehatan | desa/kel | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.5.(b) | Jumlah desa/ kelurahan dengan eliminasi filariasis | Dinas Kesehatan | desa/ kel | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | Dinas Kesehatan |
| | Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati | Dinas Kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |

| Kode | | | | Tahun | | Ľ | Target Pencapaian | aian | | |
|----------------------------|--|---|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| Indikator | Indikator RAD | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Penanggungjawab Pelaksana |
| | Proporsi kasus filariasis yang ditemukan dan diobati | Dinas Kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| Target 3.4 I | Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan | ian dini akibat penyakit tidak | menular, melalui pen | cegahan dan | pengobatan | ı, serta menir | ngkatkan kes | ehatan ment | al dan keseja | hteraan. |
| 3.4.1.(b) | Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi | Dinas Kesehatan | Kasus | 119,421 | 119,421 | 119,421 | 119,421 | 119,421 | 119,421 | Dinas Kesehatan |
| | Jumlah puskesmas yang melakukan skrining dan faktor | Dinas Kesehatan | Puskesmas | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Dinas Kesehatan |
| (0) 0 7 6 | Itsiko kesenatan jiwa | 200 | Durkanan | 7 | 7 | 3 | , | 7 | 7 | o charles |
| 3.4.5.(a) | menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa | Dilias resellatali | cpilicayen L | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Dilas resellatai |
| Target 3.5 l | arget 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. | zat, termasuk penyalahgunaa | n narkotika dan peng | gunaan alkol | nol yang men | nbahayakan. | | | | |
| 3.5.1.(a) | tersedianya perencanaan kegiatan pencegahan dan | Dinas Kesehatan | dokumen | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | Dinas Kesehatan |
| | pengendalian kesehatan jiwa dan napza | | | | | | | | | |
| Target 3.61 | Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas. | tian global dan cedera dari ke | celakaan lalu lintas. | | | | | | | |
| 3.6.1 | | Dinas Perhubungan | % | 33.77 | 41.84 | 47.69 | 52.43 | 59.39 | 65.25 | Dinas Perhubungan |
| Target 3.7 F | Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layana nasional | ın kesehatan seksual dan repr | oduksi, termasuk kelı | arga berenc | ana, informa | si dan pendid | likan, dan in | egrasi keseh | atan reprodu | terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan Program |
| 2.7.1 | Cy posset | Oinse Dombordsvasa | % | 13 37 | 10.26 | 001 | 0 | 0 | 0 | tederecon decreptation Decide |
| 1 | | Masvarakat Desa | 2 | 70,01 | 10,20 | 100 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | Desa Pengendalian Penduduk |
| | | Pengendalian Penduduk dan | | | | | | | | dan Keliarga Berencana |
| | | Keluarga Berencana | | | | | | | | dell'icidai Ba Del cilcalia |
| 3.7.1.(a) | Meningkatnya cakupan CPR (Contraceptive Prevalence | Dinas Pemberdayaan | % | 70.19 | 71.07 | 71.09 | 71.10 | 71.11 | 71.13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
| • | Rate) | Masyarakat Desa | | , | | , | | | | Desa Pengendalian Penduduk |
| | | Pengendalian Penduduk dan | | | | | | | | dan Keluarga Berencana |
| | | Keluarga Berencana | | | | | | | | |
| 3.7.1.(b) | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi | Dinas Pemberdayaan | % | 21.7 | 22.3 | 23.5 | na | na | na | Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
| | Jangka Panjang (MKJP) | Masyarakat Desa | | | | | | | | Desa Pengendalian Penduduk |
| | | Pengendalian Penduduk dan | | | | | | | | dan Keluarga Berencana |
| | | Keluarga Berencana | | | | | | | | |
| 3.7.2.(a) | Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) per WUS | Dinas Pemberdayaan | nilai | 2.33 | 2.31 | 2.23 | , | , | , | Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
| | (15-49 tahun) | Masyarakat Desa | | | | | | | | Desa Pengendalian Penduduk |
| | | Pengendalian Penduduk dan | | | | | | | | dan Keluarga Berencana |
| | | Keluarga Berencana | | | | | | | |) |
| Target 3 8 F | Taron 7 8 Moncanai rakinnan kecehatan minorsal termasuk nariknangan kacahatan dasar wana hali dan akakan dan wakin dasar wana angektif harunalikas dan | gan risiko kenangan akses ter | hadan nelavanan kes | ehatan dasa | r vang haik d | lan akses terl | hadan ohat. | v hatan dan v | aksin dasar v | ang aman ofoktif herkitalitas dan |
| terjangkau | terjangkau bagi semua orang, kesehatan reproduksi ke dalam strategi danProgram nasional. | lanProgram nasional. | | | and annie | | | | | מונים לבניתון את המונים לבנית המונים לבנית |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | BPJS | % | 76 | 06 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| TUJUANIV | TUJUAN IV Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belaiar sepanjang hayat untuk semua | a meningkatkan kesempatan | belajar sepanjang ha | vat untuk ser | nua | | | | | |
| Target 4.1 | Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin balwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biava, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang | dan laki- laki menyelesaikan l | pendidikan dasar dan | menengah ta | anpa dipungu | ut biaya, seta | ra, dan berk | ıalitas, yang ı | nengarah pa | da capaian pembelajaran yang |
| relevan dan efektif. | n efektif. | | | ı | | • | | | | |
| 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi A | Dinas Pendidikan Pemuda dan | % ui | 18.36 | 19.78 | 22.2 | 23.7 | 25.2 | 26.7 | Dinas Pendidikan Pemuda dan |
| | | Olahraga | | | | | | | | Olahraga |
| 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi A | Dinas Pendidikan Pemuda dan | % ui | 67.5 | 75.32 | 76.2 | 77.1 | 78 | 78.9 | Dinas Pendidikan Pemuda dan |
| | | Olahraga | | | | | | | | Olahraga |
| 4.1.1.(d) | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) | Dinas Pendidikan Pemuda dan | % u | 100.65 | 100.55 | 100.45 | 100.35 | 100.25 | 100.15 | Dinas Pendidikan Pemuda dan |
| | on/inil/seuerajar | Olalifaga | | | | | | | | Olalifaga |
| 4.1.1.(e) | Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | % u | 98.71 | 98.8 | 98.9 | 66 | 99.1 | 99.2 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| 4.1.1.(g) | Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun | BPS | tahun | 8.56 | 8.65 | 8.73 | 8.8 | 8.88 | 8.96 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Terret | and the factor of the factor o | ed seeds fulfilled on fulfalled with | one of many many and the other | 1 | The state of | and a distribution | | distinct and | alteriate desce | |
| larget 4.2 . mereka sia | l arget 4.2. Pada tanun 2050, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki memiliki akses temadap perkembangan dan pengasunan anak usia dini, pengasunan, pendidikan pra-sekolan dasar yang berkualitas, seningga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar | dan lakilaki memiliki akses te | madap perkembanga | n dan penga: | sunan anak u | ısıa dını, peng | gasunan, per | alaikan pra-s | ekolan dasar | ' yang perkualitas, seningga |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi PAUD | Dinas Pendidikan Pemuda dan | % u | 57.05 | 58.79 | 60.58 | 62.43 | 64.34 | 66.16 | Dinas Pendidikan Pemuda dan |
| | | Olahraga | | | | | | | | Olahraga |
| | | | | | | | | | | |

| Kode | : | | | Tahun | | Ta | Target Pencapaian | ian | | |
|----------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---|
| Indikator | Indikator RAD | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Penanggungjawab Pelaksana |
| Target 4.4 pada kewirausahaan | tahun 2030 meningkatkan secara signif | ikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki ketrampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dai | emiliki ketrampilan y | ang relevan | , termasuk k | eterampilan 1 | eknik dan ke | juruan untuk | pekerjaan, | oekerjaan yang layak dan |
| 4.4.1 | Jumlah peserta pelatihan | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | orang | 978 | 1008 | 1040 | 1040 | 1056 | 1088 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Target 4.6 Pa | farget 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi | rsi kelompok dewasa tertentu, | baik laki-laki maupu | ın perempua | n, memiliki k | emampuan | iterasi dan nu | ımerasi. | | |
| 4.6.1.(a) | Angka melek huruf | BPS | % | 96.62 | 97.48 | 98.33 | 99.19 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| 4.6.1.(b) | Persentase Angka Melek Aksara penduduk usia 15-24 tahun dan usia 15-59 tahun | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | % | 97.52 | 98.3 | 99.1 | 6.66 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| TUJUAN V M | TUJUAN V Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan | empuan | | | | | | | | |
| Target 5.1 M | Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun. | ıpuan di mana pun. | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutama an gender | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | % | 68.19 | 82.34 | 83.93 | 85.51 | 87.10 | 89.20 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Target 5.2 Me | Tareet 5.2 Menehlanekan seeala bentuk kekerasan terhadan kaum perempuan di ruane publik dan prihadi. termasuk perdasangan manusia dan eksoloitasi seksual. serta berbasai ienis eksoloitasi lainnva. | empuan di ruang publik dan pril | adi. termasuk perd | agangan ma | nusia dan ek | sploitasi seks | ual, serta ber | bagai ienis e | ksploitasi lai | nova. |
| 5.2.1 | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | kasus | 109 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.1.(a) | Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Target 5.5 Mi | Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yar | kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. | memimpin di semu | a tingkat per | gambilan ke | putusan dala | m kehidupan | politik, ekor | omi, dan ma | syarakat. |
| 5.5.1 | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.5.2 | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III). | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Target 5.6 M and the Beijii | Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. | produksi, dan hak reproduksi s rensi- konferensi tersebut. | eperti yang telah dis | epakati sesu | ıai denganPr | ogramme of , | Action of the | Internationa | l Conference | on Population and Development |
| 5.6.1.(a) | Menurunnya unmetneed kebutuhan ber-KB | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | % | 13,32 | 10,26 | 9,91 | na | na | na | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5.6.1.(b) | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis melalui sosialisai | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | kali | ъ | m | ю | e | ĸ | ĸ | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| TUJUAN VI N | TUJUAN VI Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua | itasi yang berkelanjutan untuk | semna | | | | | | | |
| Target 6.1 Pa | Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | adap air minum yang aman dan | terjangkau bagi sen | na. | | | | | | |
| 6.1.1.(a) | Cakupan rumah tangga berakses air bersih | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | % | 90.47 | 88.83 | 87.21 | 85.40 | 83.61 | 81.84 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 6.1.1.(b) | Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | liter/ tahun | 446,758 ,896 | 448,392 ,130 | 450,045 ,068 | 451,718 ,398 | 453,412 ,836 | 455,129 ,118 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 6.1.1.(c) | jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun) | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | liter/ tahun | 448,746 | 450,449 | 452,174 ,620 | 453,922 ,485 | 455,694 ,065 | 457,490 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| Kode | | | | Tahun | | - | Target Pencapaian | ajan | | |
|---|--|--|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---|
| Indikator | Indikator RAD | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Penanggungjawab Pelaksana |
| Target 6.2 P | Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | ersihan yang memadai dan me | rata bagi semua, dar | n menghenti | kan praktik k | uang air bes | ır di tempat t | erbuka, men | nberikan per | natian khusus pada kebutuhan |
| 6.2.1.(b) | Cakupan rumah tangga dengan layanan air limbah | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | % | 43.13 | 45.74 | 48.12 | 50.29 | 52.26 | 54.03 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanaka Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Dinas Kesehatan | desa/kel | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 20 | Dinas Kesehatan |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | Dinas Kesehatan | desa/kel | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | Dinas Kesehatan |
| Target 6.3 P. tidak diolah, | Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta pengunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. | engan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalka ang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global | mbuangan, dan men Jang yang aman sec | ninimalkan p ara global. | elepasan ma | terial dan ba | han kimia ber | bahaya, me | ngurangi sete | ngah proporsi air limbah yang |
| 6.3.2.(b) | Indeks Kualitas Air | Dinas Lingkungan Hidup | nilai | 34.13 | 34.27 | 34.54 | 34.81 | 35.07 | 35.34 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Target 6.5 Pa 6.5.1.(a) | Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. 6.5.1.(a) Jumlah DAS 3 3 3 3 3 3 3 3 1 | terpadu di semua tingkatan, te Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Kulon | ermasuk melalui kerj DAS | asama linta 3 | s batas yang 3 | tepat. 3 | æ | e | æ | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| 6.5.1.(g) | Cakupan kelembagaan petani pengelola air yang diberdayakan | Progo Tanun 2012-2032 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan | persen | 59.32 | 67.8 | 76.27 | 84.75 | 93.22 | 100 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 6.5.1.(h) TUJUAN VIII | 6.5.1.(h) Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup TUJUAN VIII Meningkatkan pertumbuhan ekonomi vang inklusif dan be | ngan hidup Dinas Lingungan Hidup % 47.38 51.4 55.02 58.24 55. Inklusif dan berkelainitan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. | % a vang produktif dan | 47.38 menyeluruh | 51.4 serta peker | 55.02 jaan yang lav | 58.24 ak untuk sem | 59.43 | 60.63 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 8.1 N di negara ku | | kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun | hususnya, setidakny | a 7% pertur | ıbuhan produ | ık domestik b | ruto per tahı | Ę | | |
| 8.1.1 | kapita | Dinas Komunikasi dan Informatika | juta rupiah | 16.39 | 16.87 | 17.39 | 17.9 | 18.41 | 18.92 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Target 8.3 N | Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung ke _l menengah, termasuk melalui akses terhadap iasa keuangan. | giatan produktif, penciptaan la | apangan kerja layak, | kewirausah | aan, kreativi | as dan inova | si, dan mendo | orong forma | isasi dan per | mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kedi, dan zan. |
| 8.3.1.(a) | Cakupan penempatan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | % | 71.56 | 72.10 | 72.45 | 72.89 | 73.06 | 73.61 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 8.3.1.(b) | Jumlah petani | Dinas Pertanian dan Pangan | orang | 139,228 | 139,428 | 139,567 | 139,767 | 139,846 | 140,000 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Target 8.5 Pad | | on pekerjaan yang layak bagi s | emua perempuan da | ın laki-laki, t | ermasuk bag | i pemuda da | penyandang | difabilitas, | dan upah yar | g sama untuk pekerjaan yang |
| 8.5.2 | Angka pengangguran terbuka | BPS | % | 3.2 | 3.05 | 5.9 | 2.75 | 2.5 | 2.25 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Target 8.6 Pages 18.6 Pages 19.6 | Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. 8.6.1 Cakupan penempatan dan pengembangan kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan % | ia muda yang tidak bekerja, tid Dinas Tenaga Kerja dan | dak menempuh pend % | idikan atau 71.56 | pelatihan. 72.10 | 72.45 | 72.89 | 73.06 | 73.61 | Dinas Tenaga Kerja dan |
| tenaga Target 8.8 Melindungi pekerjaan berbahava. | kerja hak-hak tenaga kerja dan mempro | Transmigrasi mosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam | rjamin bagi semua po | ekerja, term | asuk pekerja | migran, khus | usnya pekerj | a migran per | empuan, dar | Transmigrasi mereka yang bekerja dalam |
| 8.8.1.(a) | 8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. Dinas Tenaga Kerja dan unit 50 176 185 190 195 200 Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | nnit | 20 | 176 | 185 | 190 | 195 | 200 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 8.9.1.(a) | ada dalidi Kobu, iteliyasul dali ilelaksalidkali kebijakali di Jumlah kunjungan wisata | Dinas Pariwisata | orang | 723 .302 | 935 .450 | 1.075 .450 | 1.265 .450 | 1.495 .450 | 1.779 .586 | ar. Dinas Pariwisata |
| 8.9.2 Target 8.10 P | 8.9.2 Cakupan peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata Dinas Pariwisata orang 38.12 43.71 46.81 49.83 serta pengembangan kapakitak kelembagan dan SDM Tarzet 8.10 Memperkuat kapasitas lembara keuanzan domestik urtuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan lasa keuanzan badi semua. | Dinas Pariwisata mendorong dan memperluas a | orang | 38.12 ankan. asura | 43.71 | 46.81 | 49.83 | 51.98 | 52.46 | Dinas Pariwisata |
| 20.5 | Mellipel Netering in the Property of the Prope | | and damping contract | | | | | | | |

| Includence to the control membrane in a state of th | Dasar 2018 95.79 98.25 46.92 48.14 ong inovasi. r regional dan lintas batas, unt 76.60 78.81 | 2019 2020 98.95 99.3 49.51 50.96 | 2021 99.65 100 51.71 53. | Yenanggungjawan Petaksana Sekretariat Daerah Dinas Koperasi dan UMKM |
|--|---|--|--------------------------------|--|
| (a) Marchan BUMD dan lembaga keuangan beri (b) Indeks permodalan KUNKON MIX Membangun infrastruktur yang tanguh, meni tases yang terjangkau dan merata bagi semua. (a) Capalan panjang jalan penghubung antar wi kondisi balik kondisi balik kondisi balik ta 2. Mempromosikan industri aliang reurahaan s 19.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan s Lumlah nilai usah industri dan perusahaan s 19.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur o Jumlah nilai usah industri tahun ke-n Jumlah nilai usah industri tahun ke-n Jumlah nilai usah industri tahun ke-n Jumlah nilai usah pengembangan sesuan 19.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapab h pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta c AnggarahProgram Kerjasana Pengembangan AnggarahProgram Kerjasana Pengembangan 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapal di (a) Angka kemiskinan 10.3 Memjamin kesempatan yang sama dan mengu 10.3 Memjadian kesenjangan intra dan antarnegar 10.3 Memjadian kesenjangan seriah 10.4 Angka Perlindungan Sosial 10.5 Memgadopsi kebijakan, terutama kebijakan fita. (a) Angka penempatan tenaga kerja MX Memjadikan kota dan permukiman inklusif, am 11.1 Pada tahun 2030, menyaanin alsee bagi semua. (b) Jumlah penempatan tenaga kerja 200 Capalan penempatan tenaga kerja 200 Capalan penempatan tenaga kerja 201 Capalan penempatan tenaga kerja 2020, menjaanin alsee bagi semua. | 95.79 98.25 46.92 48.14 ong inovasi. r regional dan lintas batas, unt 76.60 78.81 | | | |
| 4.(b) Indeks permodalan KUMKM 4.x IX Menabangun infrastruktur yang Bangguh, meni akses yang terjangkan infrastruktur yang Bangguh, meni akses yang terjangkan infrastruktur yang berkualita akses yang terjangkan infrastruktur yang berkualita Capalan panjang jalan penghubung antar wi kondisi baik kondisi baik proporsisiva di negara kurang Indeks Pertumbuhan Industri dan perusahaan sumlah industri tahun ken Jumlah industri berizin 4.9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan sumlah industri berizin 4.9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur or ilingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuu ilingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesua ilin lah melaks kudiras udara Anggaran Program Kerjasama Pengembanga Na Memperluat riset ilmiah, meningkatkan kapab h pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta canggaran per 1 juta canggaran Program Kerjasama Pengembanga Na Memperluat riset ilmiah, meningkatkan kanggaran program kerjasana Pengembanga Na Mangarangi kesempatan yang sama dan mengu taga lahun 2030, secara progresif mencapal Gini ratio 4.(a) Anggaran kebijakan tersebut. 4.(b) Angka kemiskinan (10.2 Memjasiliasi migrasi dan mobilitas manusia) 4.(a) Anggaran kebijakan tersebut. 4.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja 4.(c) Jumlah penempatan tenaga kerja 4.(a) Capalan penempatan tenaga kerja 4.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja 4.(c) Jumlah penempatan tenaga kerja 4.(d) Capalan penempatan tenaga kerja 4.(e) Jumlah penempatan tenaga kerja 4.(e) Jumlah penempatan memberi penama. 4.(e) Persentase rumah layak huni 4.(e) Persentasa pagi semuan-layan aranan pensana perhun penamanan penaman p | 46.92 48.14 ong inovasi. rregional dan lintas batas, unt 76.60 78.81 katkan proporsi industri dalar | | | |
| NVI X Membangun infrastruktur yang tangguh, meni akses yang tengembangkan infrastruktur yang tangguh, meni akses yang terjangkau dan meratab bagi semua. Capalan panjang jalan penghubung antar wil kondisi baik capata an meratab bagi semua. Capalan panjang jalan penghubung antar wil mdeks yang terjangkau dan meratab bagi semuan mideks Pertumbuhan industri fahun ke-n Jumlah india usaha industri tahun ke-n Jumlah india usaha industri berizin nedeks kualitas udara hekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta o Anggaran-Program Kerjasama Pengembanga ANX Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapal din fatio Gini fatio Gini fatio Angka kemiskinan Angka kemiskinan Hegislasi dan kebijakan tersebut. (a) Angka kemiskinan terasebut. (b) Jumlah penempatan tenaga kerja hindeks Perlindungan Sosial Indeks Perlindungan Sosial Bundaks Persentase rumah layak huni (b) Jumlah penempatan tenaga kerja Capalan penempatan tenaga kerja Capalan penempatan memberi penampa persentase rumah layak huni (c) Jada tahun 2030, menyadiakan akses terhada oratasi umun, dengan memberi pentasan penama penyana pengana perhun contasi umun, dengan memberi pentasana pennama pensama penyana pengana | ong inovasi. r regional dan lintas batas, unt 76.60 78.81 | | | |
| 19.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitaa kises yang terjangkau dan merata bagi semua. (a) Capalan panjang jalan penghubung antar wi kondisi baik baika | r regional dan lintas batas, unt 76.60 78.81 katkan proporsi industri dalar | | | |
| akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Capalan panjang jalan penghubung antar wi Capalan panjang jalan penghubung antar wi Capalan panjang jalan penghubung antar wi Kondisi baik kondisi baik kondisi baik anda ata industri dan perusahaan sulanah nilau dasha industri tahun ke-n Jumlah industri bertzin Jumlah industri bertzin Jumlah industri bertzin dan pengara sesu ilingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesu ilingkungan yang dilaksanakan pengumbangah perekrija penelitian dan pengembangan per 1 juta o Anggaran Program Kerjasana Pengembangan XIX Mengurangi kesenjagan intra dan antarnegara to.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapal din fizitio din ratio mekerjakan tersebut. 1.0.1 Mengadopsi kebijakan tersebut, terutama kebijakan fit. 1.0.2 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia ya. 1.0.3 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, am ti.1.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua. 1.1.1 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhada oratasi umun, dengan memberi pentara perhana perhana pentana perhana pentana pent | 76.60 78.81 skatkan proporsi industri dalar | tuk mendukung pemba | angunan ekonomi dan | cesejahteraan manusia, dengan fokus |
| (a) Capalan panjang jalan penghubung antar wi kondisi baik kondisi baik kondisi baik kondisi baik kondisi baik penghubungan baran balan balan penghubungan kurang lundah nilal usaha industri dan perusahaan sumaha industri berizin Jumlah nilal usaha industri dan perusahaan sumaha industri berizin Jumlah nilal usaha industri dan perusahaan sesu di halah industri berizin ahaha barak kudisa waka darahun 2030, meningkatkan ingara sesu di halah peneritat riset ilmiah, meningkatkan kapab ha pekerja penelitan dan pengembangan per 1 juta cangaran nangaran kangaran penelitan dan antarnegaran X Mengarangi keserijanan tersebut. (a) Angka kemiskinan (sia mengatan yang sama dan mengu taga sama kebijakan tersebut. (b) Jumlah penempatan teraga kerja hidakan fisusa penempatan tenaga kerja munsia yang kuni nakas bagi semua. (d) Capalan penempatan tenaga kerja muna kunian bersentase rumah layak huni persentase rumah layak huni persentase rumah layak huni memberi pentatan pentan pentana pentan pentan pentana pent | 76.60 78.81 gkatkan proporsi industri dalar | | | |
| kondisi baik kondisi baik kondisi baik gikatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang Indeks Perturbuhuan Industri Juniah nilai usaha industri dahun ke-n Juniah nilai usaha industri dahun ke-n Juniah nilai usaha industri tahun ke-n Juniah nilai usaha semua negara sesu ingungan, yang dilaksanakan semua negara sesu ingurang ikasanakan semua negara sesu ingurang ikasenjangan intra dan antarnegara NA X Mengurang ikasenjangan intra dan antarnegara 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai d Gini ratio Gini ratio Angka kemiskinan 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengu 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fit (a) Tercedanya dokumen RANHAM 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fit (b) Jumlah penempatan tenaga kerja NA XI Menjadikan kota dan permukiman inklusif, am 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua (a) Persentase rumah layak huni (b) Jumlah memberi para mengara perhada 111.2 Pada tahun 2030, menyadiakan akses terhada 111.2 Pada tahun 2030, menyadiakan akses terhada 111.2 Pada tahun 2030, menyadiakan akses terhada | gkatkan proporsi industri dalar | 79.65 80.44 | 81.20 81.92 | 2 Dinas Pekerjaan Umum |
| 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan bee igkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang indeks Pertumbuhan industri dan perusahaan s. Juniah nilai usaha industri tahun ke-n Jumlah nida tahun 2030, meningkatkan infrastruktur of 11 lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesu. Indeks kualitas udara hengerkara riser infraih meningkatkan kapab hekerja penelitian dan pengembanga Angerja penelitian dan pengembanga Angerja penelitian dan pengembanga Angerja penelitian dan pengembanga NX Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegar (10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai din fatio Gin ratio Gin ratio Angka kemiskinan Angka kemiskinan tagis angerja dan kebijakan tersebut. (1a) Angka kemiskinan (1b) Angka kemiskinan mengurangi kebijakan terutama kebijakan fita (1b) Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fita (1b) Jumlah penempatan tenaga kerja Capaian penempatan tenaga kerja Capaian penempatan tenaga kerja Capaian penempatan tenaga kerja Cabaian penempatan tenaga kerja Cabaian penempatan memberi penampa kases terhada (1) Persentase rumah layak huni (1) Cakunan nepakanan sarana nepahana pentana pentana penum pengana penum pe | gkatkan proporsi industri dalar | | | Perumahan dan Kawasan |
| 19.2 Mempromoosikan industrialisasi inklusif dan bergatkan dua kali ilpat proporsinya di negara kurang indeks Pertumbuhan Industri an melas Pertumbuhan Industri dan perusahaan sulanah nilau dasha industri tahun ke-n Jumlah industri bertzin taya da tahun 2030, meningkatkan infrastruktur of ilingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesu. 19.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapab h pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta o Anggaran Program Rerjasana Pengembangan Naggaran Program Rerjasana Pengembangan Naggaran Program Resenjangan intra dan antarnegara to. 1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapal of Gini ratio 2.(a) Angka kemiskinan dan pengembangan per 1 juta o Gini ratio 2.(b) Tersedianya dokumen RANHAM 2.(c) Tersedianya dokumen RANHAM 2.(c) Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia ya indeks Perlindungan Sosial 2.(a) Indeks Perlindungan Sosial 2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja 2.(c) Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia ya Ku Menjadikan kota dan permukiman inklusif, am tu. 1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua. 2.(a) Persentase rumah layak huni 2.(b) Jumlah memberi penaman akses terhada oratasi umun, dengan memberi pentatan khusus pontasi umun, dengan memberi pentatan penama perlun pontasi umun, dengan memberi penama penama penun penaman penama penun penaman penama penun penaman penama penun penama penun penaman penama penun penama penama penun penaman penama penun penama penama penun penaman penama p | gkatkan proporsi industri dalar | | | Permukiman |
| gkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang ludaktan dua kali lipat proporsinya di negara kurang ludake Pertumbuhan Industri dan perusahaan s Jumlah industri bertian minah industri bertian nulah industri bertian nulah industri bertian nulah industri bertian indeks kualitas udara nulake kualitas udara nulake kualitas udara hekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta o AnggaranProgram Kerjasama Pengembanga NX Mengurangi kesenjangan intra dan antamegara 110.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai di Gini ratio Gini ratio Angka kemiskinan Gini ratio Angka kemiskinan Gini ratio Angka kemiskinan fultu Angka kemiskinan hekerja penelitian kesempatan yang sama dan mengu (10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengu (10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fit. (b) Jumlah penempatan transmigran (c) Indeks Perlindungan Sosial Indeks Perlindungan Sosial Capaian penempatan tenaga kerja NX XI Menjadikan kota dan permukiman inklusif, am ta 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua. (a) Persentase rumah layak huni Persentase rumah layak huni Oratsa umun, dengan memberi pentatan pentan p | | m lapangan kerja dan p | produk domestik bruto | sejalan dengan kondisi nasional, dan |
| Indeks Pertumbuhan Industri indeks Pertumbuhan Industri ian perusahaan s. Juniah nilai usaha industri tahun ke-n Juniah nilai usaha industri tahun ke-n Jumiah nilai usaha industri tahun ke-n Jumiah nilai usaha industri tahun ke-n Jumiah nilai usaha industri tahun Resanakan semua negara sesuu ja) indeks kualitas udara semua negara sesuu pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta of Anggara mProgram kerjasana Pengembanga NX Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegar (10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai din fatio din fatio din fatio din fatio din fatio din kebijakan tersebut. (a) Angka kemiskinan (10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengu (10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengu (10.4 Mengadopsi kebijakan, terutaha kebijakan fiti.) Tersedianya dokumen RANHAM (10.4 Mengadopsi kebijakan, terutaha kebijakan fiti.) Indeks Perlindungan Sosial indeks Perlindungan Sosial indeks Perlindungan Sosial (10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang Kanana perlum 2030, menjamin aisee bagi semua (1) Persentase rumah layak huni (1) Pada tahun 2030, menyadiakan akses terhada oratasi umum, dengan memberi perhatian khusus penchasian khuma paranan prasana perluana penuana penu | | | | |
| 19.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan s Junnlah inidu saha industri tahun ke-n Junnlah inidu saha industri tahun ke-n Junnlah inidu saha industri tahun ke-n Junnlah inidustri berkin te 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur of 18.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapab h pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta o Anggaran Program Rerjasana Pengembangan NX Meguraan Pengembangan intra dan antarnegar too. Pada tahun 2030, secara progresif mencapal of Gini ratio Gini ratio Gini ratio Gini ratio Hegislasi dan keempatan yang sama dan mengu tegsiasi dan keempatan yang sama dan mengu tegsiasi dan keenjakan tersebur. (a) Tersedianya dokumen RANHAM 1.10.4 Mengadopsi kebijakan tersebur. (b) Tersedianya dokumen RANHAM 1.10.4 Mengadopsi kebijakan tersebur. (c) Indeks Perlindungan Sosial Indeks Perlindungan Sosial Indeks Perlindungan Sosial Indeks Perlindungan tenaga kerja NX XI Menjadikan kota dan permukiman inklusif, am t.11.7 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua. (a) Persentase rumah layak huni ordasi ummumpengan memberi penhatan khusus portasi umm, dengan memberi penhatan khusus pangan pengan pengan pengan penjana | | 12.31 12.68 | 13.08 13.6 | Dinas Perdagangan |
| Jumlah nilai usaha industri tahun ke-n Jumlah nilai usaha industri tahun ke-n nilingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesu. (a) Indeks kualitas udara ni ndeks kualitas udara ni ndeks kualitas udara h pekerja penelitian dan pengembangan per 1 Juta o AnggaranProgram Kerjasama Pengembanga NX Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara NX Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara NA Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara NA Mengurangi kesempatan yang sama dan mengu (10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai d Gini ratio Gini ratio Jamenjamin kesempatan yang sama dan mengu (10.3 Menjamin kesempatan trabuh (10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fit (10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fit (10.5 Menfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia y (10.6 Jumlah penempatan transmigran (10.7 Mengadikan kota dan permukiman inklusif, am (11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua (13. Persentase rumah layak huni (14. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhada (15. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhada (16. Cakunan nenberi pentaran perman pentan permu pengan pentan pen | keuangan, termasuk kredit te | rjangkau, dan mengint | egrasikan ke dalam ra | tai nilai dan pasar. |
| 19.4. Pada tahun 100stri berizin lingkutan indrastruktur or lingkungan, yang dilaksanan semua negara sesuu (a) indeks kualgi dilaksanan semua negara sesuu nedes kualgi dakanan semua negara sesuu nedes kualitas dusanan semua negara sesua 19.5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapab h pekerja penelitian dan pengembangan kangara pengeranbangan kangaran Pengembanga NA X Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegarat 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapal din tatio. 1. (a) Angka kemiskinan 1. (b) Tersedianya dokumen RANHAM 1. (b) Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fita. 1. (a) Indeks Perlindungan Sosial 1. (b) Jumlah penempatan tenaga kerja 2. (c) Capalan penempatan tenaga kerja 2. (d) Resentase rumah layak huni 2. (e) Persentase rumah layak huni 2. (e) Persentase rumah layak huni 2. (e) Persentase rumah layak huni 2. (e) Persentasa rumah layak huni 2. (e) Persentasa rumah layak huni 3. (e) Persentasa rumah layak huni 3. (e) Persentasa rumah layak huni 3. (e) Persentasa rumah layak huni 4. (a) Persentasa rumah layak huni 5. (b) Jumlah memberi penempan perhunian nikusus papan permum, dengan memberi penempan perhunian penempanan perhunian penempanan p | 864.5 | 1186 1356 | 1531 1731 | Dinas Perdagangan |
| t 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur of iningkungan, yang dilaksanakan semua negara sesu. (a) Indeks yang dilaksanakan semua negara sesu. (a) Indeks yang dilaksanakan semua negara sesu. Anggaran Programbangan per 1 juta of Anggaran Program Kerjasana Pengembanga NAX Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara (10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai of Gini ratio Gini ratio Angka kemiskinan ersempatan yang sama dan mengu (10.3 Menjanin kesempatan yang sama dan mengu (10.3 Menjanin kesempatan yang sama dan mengu (10.4 Mengadopsi kebijakan tersebut. (a) Angka kemiskinan (10.4 Mengadopsi kebijakan fit (10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia) (10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia) (10.8 Jumlah penempatan tenaga kerja NAX XI Menjadikan kota dan permukiman inklusif, am (11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua (1.4) Persentase rumah layak huni contasi unum, dengan memberi pentatan khusus perportasi unum, dengan memberi pentatan khusus perportasi unum, dengan memberi pentatan khusus perpana perhun sana pentana perhun penamana perhun penamana perhun penamana perhun penamana perhun penamana perhun penamana penama perhun penamana perhun penamana perhun penamana perhun penamana penama perhun penamana penama pe | 718 | | 1183 1358 | |
| 1 lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesu. (a) Indeks kualtas udara 19.5. Memperkuat riset ilimiah, meningkatkan kapab h pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta o AnggaranProgram Kerjasama Pengembanga ANX Mengurangi kesenjangan intra dan antamegara (1.0.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai di cin ratio (a) Angka kemiskinan (b) Angka kemiskinan (c) Angka kemiskinan (c) Angka kemiskinan (d) Tersedianya dokumen RANHAM (1.0.4 Mengadopsi kebijakan tersebur. (d) Tersedianya dokumen RANHAM (1.0.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fit. (a) Indeks Perlindungan Sosial (b) Jumlah penempatan tenaga kerja (c) Jumlah penempatan tenaga kerja (d) Capalan penempatan tenaga kerja (a) Capalan penempatan tenaga kerja (a) Persentase rumah layak huni (b) Jumlah mangeri permukiman inklusif, am (11.1 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhada (c) Atunan nemberi penempan perman permunim, dengan memberi penempan permu penagan perlun contasa unum, dengan memberi penempan perlun penagana perlun contasa unum, dengan memberi penemban penagana perlun an penagana perlun angarana perluan penagana perluan penaganana perluan penaganan perluan penaganan perluan penaganan penagana perluan penaganan penagana perluan penaganan penagana perluan penaganana perluan penagananan penaganan pe | ngkatan efisiensi penggunaan | sumberdaya dan adops | si vang lebih baik dari 1 | eknologi dan proses industri bersih dan |
| (a) Indéks kualitas udara h pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta Anggaran/Pogann kengembangan per 1 juta Anggaran/Pogann kengembangan per 1 juta Anggaran/Pogann kengembangan per 1 juta Anggarangi kesenjangan intra dan antarnegar t 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai di fini ratio Gini ratio (a) Angka kemiskinan t 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengu t 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengu t 10.3 Menjadian tersebut. (b) Indeks Perlindungan Sosial indeks Perlindungan Sosial indeks Perlindungan Sosial indeks Perlindungan Sosial (b) Jumlah penempatan tenaga kerja AN XI Menjadikan kota dan permukiman inklusif, am t 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua (a) Persentase rumah layak huni contasi unum, dengan memberi pentatan kerbada t 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhada | 3 | | | |
| t 9.5 Memperkuat riset Ilmiah, meningkatkan kapab h pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta o Anggaran-Program Kerjasana Pengembanga NX X Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara t 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai d Gimi ratio Gimi ratio an Angka kemiskinan tersebut. 1.(a) Angka kemiskinan tersebut. 1.(b) Tersedianya dokumen RANHAM t 10.4 Mengadopsi kebijakan tersebut. 1.(b) Tersedianya dokumen RANHAM t 10.7 Memfaadipan sosial Indeks Perlindungan sonian indekse bagi semua t 11.1 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhada perlungan perlung | | 0 8887 0 8909 | 0.8935 0.8962 | 52 Dinas Lingkungan Hidun |
| To so neminganakan kapan tapan ha pekeja penelitian dan pengembangan pera 1 juta CAnggaranProgram Kerjasama Pengembanga ANX Menguangi kesenjangan intra dan antarnegarat 110.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai di cin ratio Gini ratio Gini ratio Angka mensiman kesempatan yang sama dan mengu (10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengu (10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengu (10.4 Menjamin kesempatan yang sama dan mengu (10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fit (10.4 Mengadopsi kebijakan posial indeks Perlindungan Sosial indeks Perlindungan Sosial (10.4 Mengadopsi kebijakan transmigran (10.4 Mengadopsi kebijakan terasa kerja menusia) (10.5 Mendadikan kota dan permukiman inklusif, am (11.1 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhada tuli. 2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhada cortasa unum, dengan memberi perhatan khusus perpengan perluna perluan | the partial carbon carbon | Soc andet chen dusemen | actioni naorobaom 06 | dan cocara cubritancial moningly ban |
| n pekerja perleutania ora pergemanagan per 1 Juta c Anggaran/Pogram Kerjasama Pengembanga ANX Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara t 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai d c Gini ratio Gini ratio Gini ratio Gini and kebijakan tersebut. (d) Angka kemiskinan t 10.3 Menjadian kesempatan Yang sama dan mengu t 10.6 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fit t 10.7 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fit (d) Indeks Perlindungan Sosial (e) Jumlah penempatan transmigran (e) Jumlah penempatan tenaga kerja ANX I Menjadikan kota dan permukiman inklusif, am t 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua (e) Persentase rumah layak huni t 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhada t 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhada contasi unum, dengan memberi pentatan kehusus pe | iegala-liegala Del Nellibalig, te | elillasur paga talluli 20. | so, menuorong movas | dali secala substalisiai illelillighathali |
| AnggaranProgram Kerjasama Pengembanga Nav X Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara to 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai din iratio Gini ratio Gini ratio Gini ratio Gini ratio Gini ratio Hosempatan yang sama dan mengu t 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengu t tegsiasi dan kebijakan tersebut. (a) Angka kemiskinan RANHAM 110.4 Mengadopsi kebijakan tersebut. (b) Tersedianya dokumen RANHAM 110.7 Menfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia y 1.20.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia y 1.20.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia w 1.20.7 Memjamin akses bagi semua 1.20.7 Memjamin akses bagi semua 1.20.7 Memin memberi perhatan hikusus portasa unum, dengan memberi pentatan kerbusus perhana nara-arana perhusus penana perhun an memberi pentatan perhusus penana perhun an engarana perhusus paga mana perhua parana perhuan sarana perhua parana perhua penana perhua parana perhua parana perhua parana perhua penana perhua parana perhua penana perhua parana parana perhua parana p | intuk penelitian dan pengemb | | | |
| TUJUAN X Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. 10.1.1 a Angka kemiskinan BPS Nilai 0.34 0.33 0.33 10.1.1.(a) Angka kemiskinan BPS Nilai 0.34 0.33 0.33 10.1.1.(a) Angka kemiskinan BPS Nilai 0.34 0.33 0.33 10.1.1.(a) Angka kemiskinan BPS Nilai BPS Nilai 0.34 0.33 0.33 10.1.1.(b) Angka kemiskinan BPS Nilai berah dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan tersebut. 10.3.1.(b) Tersedlanya dokumen RAVIHAM BPS Nilai Dearah dokumen Partanga doskumen RAVIHAM BPS Nilai Dinas Sosial Pemberdayaan nilai Sosial Pemberdayaan nilai Dinas Sosial Dinas Pekerjaan Umun Sosial Dinas Sosial Dinas Pekerjaan Umun Sosial Dinas Pekerjaan Umun Sosial Dinas Pekerjaan Umun Sosial Dinas Pekerjaan Umun Sosial Dinas Pekerjaan Dinas Dinas Pekerjaan Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas | | 342.29 329.8 | 356.63 429.64 | 64 Bappeda |
| Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pad 10.1.1 Gini ratio 10.1.1(a) Angka kemiskinan 10.1.1(b) Angka kemiskinan 10.1.1(b) Angka kemiskinan 10.1.1(c) Angka kemiskinan 10.1.1(b) Tersedianya dokumen RANHAM 10.1.1(b) Tersedianya dokumen RANHAM 10.1.1(a) Tersedianya dokumen RANHAM 10.1.1(b) Tersedianya dokumen RANHAM 10.1.1(a) Indeks Perlindungan Sosial Pembertangung jawah termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi dan kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. 10.1.1(b) Indeks Perlindungan Sosial 10.1.1(a) Persentiasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawah, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang teratur, aman, tangguh, dan bertanggung jawah, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yan 10.7.2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja 10.7.2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja 10.7.2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja 10.7.2.(c) Capalan penempatan tenaga kerja 10.7.2.(d) Capalan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan 10.7.2.(d) Capalan penempatan tenaga kerja 10.7.2.(d) Persentase rumah layak huni 10.7.2.(d) Perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses ta Dinas Tenaga kerja and Kawasan 11.1.1.(a) Persentase rumah layak huni 11.1.1.(a) Persentase rumah layak buni 11.1.1.(a) Persentase rumah layak huni 11.1.1.(a) Persentase rumah layak huni 11.1.1.(a) Persentase rumah layak huni 11.1.1.(a) Persentase rumah layak buni 11.1.1.(a) Persentase rumah layak bertalang bertala dan seka tahan persentan per | | | | |
| 10.1.1 Gini ratio 10.1.1(a) Angka kemiskinan 10.1.1(a) Angka kemiskinan 10.1.1(a) Angka kemiskinan 10.1.1(b) Angka kemiskinan 10.1.1(c) Tersedianya dokumen RANHAM 10.1.1(d) Tersediakan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan 11.1.1(a) Persentase rumah layak huni 11.1.1(a) Persentas | vang berada di bawah 40% da | ari populasi pada tingka | at vang lebih tinggi dar | rata-rata nasional. |
| 10.1.1(a) Angka kemiskinan Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif terkait legislasi dan kebijakan tersebut. 10.3.1(b) Tersedlanya dokumen RANHAM Target 10.4 Mengadopsi kebijakan tersebut. 10.4.1.(a) Indeks Perlindungan Sosial Perlempuan dan Perlindungan nilai 52.98 52.98 53.9 Perempuan dan Perlindungan 10.7.2.(a) Capaian penempatan transmigran 10.7.2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja 10.7.2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja 10.7.2.(c) Jumlah penempatan tenaga kerja 10.7.2.(d) Dumlah penempatan tenaga kerja 10.7.2.(e) Jumlah penempatan tenag | 0.34 0.33 | 0.33 0.32 | 0.31 0.29 | Dinas Komunikasi dan |
| 10.1.1(a) Angka kemiskinan Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif terkait tegislasi dan kebijakan tersebut. 10.3.1(b) Tersedianya dokumen RANHAM Target 10.4 Mengadopai kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. 10.4.1.(a) Indeks Perlindungan Sosial Anak Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, anah, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang teratur, anah, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang teratur, anah, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang teratur, anah, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang teratur, anah, berkala dan bertanggung jawab, termasuk menapan kebijakan migrasi yang berumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataanan kawasan kumuh, serta akses to Dinas Tenaga Kerja dan Penrumahan yang layak, aman, terjangkau, mendah layak huni Perumahan yang layak, aman, terjangkau, mundah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningk semua, meningk penrumahan yang aman, terjangkau, mundah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningk yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anah perumahan perubuhan merekeka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anah perubuhan merekeka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anah perubuhan merekeka yang berada dalam situan pelawanan sarana prakatana perubuhan merekeka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anah perubuhan merekeka yang berada dalam situan pelawanan sarana prakanan perubuhan merekeka yang berada dalam situan pelawanan sarana prakanan perubuhan merekeka yang berada dalam situasi rentan, perumahan sarana perubuhan merekeka yang berada dalam situan perubuhan merempagan berubuhan merekeka yang berada dalam situan perubuhan merempagan kanan perubu | | | | |
| Target 10.3 Menjadikan kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif terkafi legisladan tersebut. 10.4.1(a) Indeks Perlindungan Sosial pernerdanyaan nilai 52.98 52.98 53.99 Perempuan dan Perlindungan Anak Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yan 10.7.2(a) Capaian penempatan transmigran 10.7.2(b) Jumlah penempatan transmigran Transmigrasi 10.7.2(b) Jumlah penempatan transmigran Transmigrasi TUJUAN XI Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang jayak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses to perumahan yang jayak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, sengan member penataan kumuh apang ditabilitas dan serumahan akses terhadap sistem transportasi vang berada dalan situngan nember penataan kayang peruntungan gang terhangan kumun, dengan member penataan kumunan pang penatah kuman pang penatah pang penada dalam situngan penangan penatah kumang penatah kuman pang penada dalam situngan penatan pang penatah pang penada pang pe | | | | |
| Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif terkati tegislasi dan kebijakan tersebut. 10.4.1.(a) Tersedianya dokumen RANHAM Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. 10.4.1.(a) Indeks Perlindungan Sosial Permenuan dan Perlindungan Anak Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yan 10.7.2.(b) Jumlah penempatan transmigran 10.7.2.(b) Jumlah penempatan transmigran Transmigrasi TUJUAN XI Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Target 11.1.Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang jayak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses to perumahan yang jayak, aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelan untuk semua, meningk 11.1.1.(a) Persentase rumah layak huni Perumahan dan Rawasan Perumahan dan Rawasan Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelan jutan untuk semua, meningk Tarnoptrasi unum, dengan memberi perhataiah ikusus pada kekeka yang berada dalam situasi remtan, perempuan, anak, penyanangan gribalitas dan permunan naran parangan perhuhungan palayan perhuhungan palayan perhuhungan perhuhungan palayan perhuhungan palayan perhuhunan perkeka yang berada dalam situasi remtan, perempunan, anak penyanangan gribalitas dan permunan pangan pangan perhuhungan perhuhunan merangan perhuhungan perhuhungan perhuhungan perhuhungan palayanan perhuhungan | | 17.25 16 | 14.75 13.25 | |
| terkait legislasi dan kebijakan tersebut. 10.3.1.(b) Target 10.7.(b) Jumilah penempatan tenaga kerja man, terget 10.7.(b) Jumilah penempatan tenaga kerja man, terget 10.7.(c) Jumilah penempatan tenaga kerja man, terget 10.7.(d) Anak Tuju. N. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, berkelanjutan. 10.7.1.(a) Capaian penempatan transmigraa Transmigrasi Transmigrasi Dinas Tenaga kerja dan Dinas Tenaga kerja dan Orang 2.532 2,649 2,776 Transmigrasi Tuju. N. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 10.7.2.(b) Jumilah penempatan tenaga kerja Dinas Tenaga kerja dan Orang 2.532 2,649 2,776 Transmigrasi Tuju. N. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 10.7.2.(b) Jumilah penempatan tenaga kerja Dinas Tenaga kerja dan Orang 2.532 2,649 2,776 Transmigrasi Tuju. N. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 10.7.2.(b) Jumilah penempatan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 10.7.2.(d) Persentase rumah layak huni Permuahan yang jayak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses to Permukiman Permakan permukiman Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman Permakanan Permukiman Per | um, kebijakan dan praktik yan | ng diskriminatif, dan me | empromosikan legislas | , kebijakan dan tindakan yang tepat |
| 103.1(b) Tersedianya dokumen RANHAM Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, sera secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. 10.4.1(a) Indeks Perlindungan Sosial Perempuan dan Perlindungan nilai 52.98 52.98 53.9 Perempuan dan Perlindungan nilai 52.98 52.98 53.9 Perempuan dan Perlindungan nilai 52.98 52.98 53.9 Ansk Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yan 10.7.2.(a) Capaian penempatan transmigran Dinas Tenaga Kerja dan Orang 2.532 2.649 2.776 10.7.2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Orang 2.532 2.649 2.776 Tarasmigrasi TUJUAN XI Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelajutan. Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses ta Dinas Pekelajan Umum % 79.24 79.37 79.49 Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Kawasan Perumahan yang layak, man, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningk tansportasi umun, dengan member pembatah ankusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi remtan, perempuan, ana perhantah kuturan perbutuhan mereka yang berada dalam situasi remtan, permupuan, ana perhantah kuturan nelawanan perhantah kuturan nelawanan sarana perhantah kuturan merana perhantah kuturan nelawanan sarana perhantah kuturan merana perhantah kuturan merana sarana perhantah kuturan merana perhantah kuturan meranan sarana perhantah kuturan perhantah kuturan perhantah kuturan perhantah kutu | | | | |
| Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. 10.4.1.(a) Indeks Perlindungan Sosial Pemberdayaan nilai 52.98 52.98 53.9 Anak Anak Anak Anak Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yan 10.7.2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Orang 2,532 2,649 2,776 Target 11.1.Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses to Perumahan yang layak, aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningk Perumahan Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelan jutan untuk semua, meningk 12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2 2 | 2 2 | 2 2 | Sekretariat Daerah |
| 10.4.1.(a) Indeks Perlindungan Sosial Pemberdayaan nilai 52.98 52.98 53.9 Perempuan dan Perlindungan Anak Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yan 10.7.2.(b) Jumlah penempatan transmigran TLUDAN XI Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan herkelanjutan. Target 11.1.(a) Persentase rumah layak huni Permukiman Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelan untuk semua, meningk Permukiman Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelan untuk semua, meningk Taransportasi unuun, dengan member pembratah nikusu pada kebutuhan merekeka yang berada dalam situasi remtan, perempuan, anak, penyananga ditabilitas dar pananan perhantan kutusu pada pentahan kutungan nemberi pempuan, anak, penyananga ditabilitas dar pananan Taransportasi untun, dengan pungan memberi pempuan, anak, penyananga ditabilitas dar pananan Taransportasi untun, dengan pungan memberi pempanan memberi pempuan, anak, penyanangan pembanan memberi pempuan, anak, penyanangan pembangan pem | nencapai kesetaraan yang lebih | h besar. | | |
| Ansk dan berlindungan Ansk dan berlindungan Ansk dan berlindungan 10.7.2.(a) Capalan penempatan transmigran 10.7.2.(b) Lumlah penempatan tenaga kerja Transmigrasi T | | 53.9 54.42 | 54.91 55.68 | 8 Dinas Sosial Pemberdayaan |
| Anak 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yan 10.7.2.(a) Capaian penempatan transmigran Tonasningrasi 10.7.2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja Tonasningrasi Tona | | | | |
| Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yan 10.7.2.(a) Capaian penempatan transmigraai Dinas Tenaga Kerja dan % 100 100 100 100 100 100. Transmigrasi 10.7.2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja 10.7.2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja Transmigrasi TuJUAN XI Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses ta 11.1.1.(a) Persentase rumah layak huni Permukiman Permukan Permukiman Permukiman | | | | Anak |
| 10.7.2.(a) Capalian penempatan transmigran Dinas Tenaga Kerja dan % 100 100 100 10.7.2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan 0.732 2,649 2,776 10.7.2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan 0.732 2,649 2,776 10.7.2.(b) Jumlah penempatan kerasan inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tangguh, dan berkelanjutan. 79.24 79.37 79.49 11.1.1.(a) Persentase rumah layak huni Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Kawasan 79.24 79.37 79.49 Perumahan dan Kawasan 79.24 79.49 17.1.1.2 Pada tahun 2030, menyediakan akes terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningk 73.84 77.39 17.1.1.5 Cak inan nelakan arasan arasanan perhalahan keres terhadap sistem transportasi umum, dengan memberi perhalahan khusus pada kebutuhan merekan yang berada dalam situasi rentan, permapuan, anak, penyandang difabilitas dan perkelanjurah dan perhalahan keres terhadap dan perhalahan seranan prasanan arasan arasanan perhalahan seranan penyanan ara | suk melalui penerapan kebijak | kan migrasi yang terenc | cana dan terkelola den | gan baik. |
| Transmigrasi 10.7.2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja Pransmigrasi Transmigrasi Tr | 100 100 | 100 100 | 100 100 | Dinas Tenaga Kerja dan |
| 10.7.2.(b) Jumlah penempatan tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan orang 2,532 2,649 2,776 Transmigrasi Transmi | | | | Transmigrasi |
| Transmigrasi TUJUAN XI Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses tr 11.1.1.1(a) Persentase rumah layak huni Perumahan dinas Pekerjaan Umum % 79.24 79.37 79.49 Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Rawasan Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman permukiman kusus terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningk transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dar 12.1 (a) Cakunan nelavanan sarana perhuhungan Dinas Perhuhungan % 53.82 67.84 77.39 | | 2,776 3,000 | 3,100 3,200 | Dinas Tenaga Kerja dan |
| TUJUAN XI Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses to 11.1.1.(a) Persentase rumah layak huni Perumahan dan Kawasan Perumakiman Perumakiman Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningk transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dar 12.1.(a) Cakunan nelavanan sarana prastana perhubungan Dinas Perhubungan Sarana da dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dar 12.1.(a) Cakunan nelavanan sarana prastana perhubungan Dinas Perhubungan Sarana da dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dar | | | | Transmigrasi |
| Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses ta 11.1.1.(a) Persentase rumah layak huni Das Perumahan dan Kawasan Perumahan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelan jutan untuk semua, meningk 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelan jutan untuk semua, meningk 11.2 Pada tahun najayan memberi perhatahan kutusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi remtan, perempuan, anak, penyananga difabilitas dan 11.2 Pada 11.3. Cakunan najayanan sarana prasanan perhaluhungan Dinas Perhulungan S | | | | |
| 11.1.1.(a) Persentase rumah layak huni Dinas Pekerjaan Umum % 79.24 79.37 79.49 Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelan jutan untuk semua, meningk transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan 12.1.1.41 Cakunan nelavanan sarana prastana perhuhungan Dinas Perhuhungan 8, 53.82 67.84 77.39 | isuk penataan kawasan kumuh | h, serta akses terhadap | pelayanan dasar perk | staan. |
| Perumahan dan Kawasan Permukiman Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningk transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan 11.2 1.4a) Cakunan nelavanan sarana prastana perhulungan Dinas Perhulungan 8, 53,82 67,84 77,39 | 79.24 79.37 | 79.49 79.62 | 79.74 79.87 | 7 Dinas Pekerjaan Umum |
| Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningki 11. Tarnsportasi unumun, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan 11. 71 Zakunan nelavanan sarana prastana perhubungan Dinas Perhubungan S, 53.82 67.84 77.39 | | | | |
| Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportangan aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningka transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan 12.11.41 (Akinan nelavanan sarana nestana perhubingan Dinas Perhubingan 8, 53,82, 67,84,47,39 | | | | Permukiman |
| transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan 11.2.1.1a) Cakunan nelavanan sarana nasarana perhubingan Dinas Perhubingan % 63.82 67.84 77.39 | es dan berkelan jutan untuk se | mua, meningkatkan ke | selamatan lalu lintas. | erutama dengan memperluas jangkanan |
| 11.2.1(a) Cakunan nalayanan sarana prasarana perhiphungan Dinas Perhiphungan % 63.82 67.84 77.39 | erempuan, anak, penyandang | difabilitas dan orang tu | ua. | 0 |
| | 63.82 67.84 | 77 39 80 64 | 89 54 92 23 | 3 Dinas Perhuhungan |
| Control protein and make a production permanent protein and a protein protein and a protein a protein a protein a protein and a protein a protei | | | | |
| Cakupan terub iain iintas Jalan 53.77 41.64 | 33.// 41.84 | 47.09 52.43 | 59.39 65.50 | o Dinas Pernubungan |

| Kode | CAG sections | of a Charles | 400 | Tahun | | _ | Target Pencapaian | paian | | 400000000000000000000000000000000000000 |
|----------------------|---|--|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| Indikator | III III III III III III III III III II | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | renanggungjawab relaksana |
| 11.3.1 | Cakupan lingkungan sehat permukiman dan perumahan | Dinas Pekerjaan Umum | % | 54.37 | 54.65 | 54.91 | 55.03 | 55.15 | 55.18 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Perumahan dan Kawasan | | | | | | | | Perumahan dan Kawasan |
| | | Permukiman | | | | | | | | Permukiman |
| Target 11.4 | Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. | warisan alam dunia. | | | | | | | | |
| 11.4.1.(a) | Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya | Dinas Kebudayaan | % | 70,07 | 71,31 | 72,51 | 73,67 | 74,79 | 75,89 | Dinas Kebudayaan |
| Target 11.5 | Target 11.5 Pada tahun 2030, secara sigirifian mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan | natian dan jumlah orang terdaı | npak, dan secara su | bstansial mei | ngurangi ker | ugian ekonor | ni relatif terl | nadap PDB gl | obal yang dise | babkan oleh bencana, dengan |
| fokus melin | fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan | | | | | | | | | |
| 11.5.1.(b) | Jumlah Desa Tangguh Bencana | BPBD | desa/ kel | 28 | 30 | 42 | 53 | 64 | 75 | врво |
| Target 11.6 | pak ling | kungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. | termasuk dengan m | emberi perha | atian khusus | pada kualita | s udara, terr | nasuk penan | ganan sampah | kota. |
| 11.6.1.(a) | Persentase Sampah yang Tertangani | Dinas Pekerjaan Umum | % | 62.39 | 68.94 | 69.17 | 68.15 | 70.07 | 73.91 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Perumahan dan Kawasan | | | | | | | | Perumahan dan Kawasan |
| | | Permukiman | | | | | | | | Permukiman |
| 11.6.1.(b) | Persentase Taman Kondisi Baik | Dinas Pekerjaan Umum | % | 72.5 | 67.35 | 67.35 | 67.35 | 75.51 | 87.76 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Perumahan dan Kawasan | | | | | | | | Perumahan dan Kawasan |
| | | Permukiman | | | | | | | | Permukiman |
| Target 11.7 | Target 11.7 Pada tahun 2030, menvediakan ruang publik dan ruang ter | k dan ruang terbuka hijau vang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk berembuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas | dan mudah dijangk | an terutama | untuk perem | no nan dan an | ak. manula c | lan penyanda | ne difabilitas | |
| 1171(a) | | Dinas Dakariaan Hmum | % | 77.5 | 67.35 | 67.35 | 67.35 | 75.51 | 87.76 | Dinas Pokeriaan Hmum |
| (0):-: ::- | College Called Notices Daily | Dogumenton den Kompton | 2 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 1000 | | Domination day Kamara |
| | | Dermittimen | | | | | | | | Perunanan dan Nawasan Dermukiman |
| | | Permukiman | | | : | | | | | Permukiman |
| Target 11.b | Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi | kota dan permukiman yang m | engadopsi dan men | gimplementa | si kebijakan | dan perencai | naan yang te | rintegrasi ter | tang penyert | aan, efisiensi sumber daya, mitigasi |
| dan adapta | dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk | serta mengembangkan dan m | engimplementasika | n penangana | n holistik risi | iko bencana o | di semua lini, | sesuai deng | an the Sendai | Framework for Disaster Risk |
| Reduction 2015-2030. | :015-2030. | | | | | | | | | |
| 11.b.1 | Jumlah desa yang memiliki dokumen PRB | BPBD | dokumen | 18 | 24 | 29 | 35 | 44 | 51 | BPBD |
| 11.b.2 | Dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi | BPBD | dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Н | BPBD |
| TUJUAN XII | TUJUAN XII Menjamin pola produksi dan konsumsi vang berkelaniutan. | | | | | | | | | |
| Target 12 4 | Tarost 12.094 tshin, 7707 mercani nangalaan king ang ang ang ang ang ang ang ang ang a | emiia jenis limbah yang ramah | lingkungan di sena | niang cikluc h | idinawa se | ensi keranak: | a keria interr | acional vano | disenskati da | n secara signifikan mengurangi |
| nencemental and | rage to a control of the control of | untuk meminimalkan damak | migramigan, disepa | opatan man | isia dan ling | Tagin kalanga | | , no. | | 3,5,5,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, |
| A C C (-) | n barran kiling dan miliban tersebat ke adala, an, dan diran | מווימי וויפווווווווווווווווווווווווווווו | o an an reilliadap nes | 24.45 | 24 7F | of of | ., | 70.00 | 00 00 | |
| 12.4.1.(a) | Persentase usana atau kegiatan yang taat lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup | % | 31.45 | 31.75 | 31.96 | 32.13 | 37.76 | 33.98 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 12.4.2.(a) | Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu atau | Dinas Lingkungan Hidup | % | 59.38 | 60.27 | 60.27 | 09 | 09 | 09 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | baku kerusakan lingkungan | | | | | | | | | |
| Target 12.6 | Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. | ransnasional, untuk mengadop | osi praktek-praktek l | oerkelan jutar | ı dan mengir | ntegrasikan ir | nformasi keb | erlanjutan da | lam siklus pe | laporan mereka. |
| 12.6.1.(a) | Jumlah sertifikasi produk pangan industri rumah tangga | Dinas Kesehatan | sertifikat | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Dinas Kesehatan |
| Target 12.7 | Tareet 12.7 Memoromosikan oraktek bengadaan oublik vang berkelanjutan, sesuai dengan kebilakan dan orioritas nasional | iutan. sesuai dengan kebijakan | dan prioritas nasion | nal. | | | | | | |
| 12.7.1 (a) | Pengembangan padi menilih beras premilim organik | Dinas Pertanian dan Pangan | hektar | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Dinas Perdagangan |
| TITION XIII | TITION VIII Mengambil tindakan cenat untuk mengatasi neruhahan iklim dan dampakasa | lim dan dampaknya | | | | 2 | 2 | | | 100000000000000000000000000000000000000 |
| Target 12 1 | Tornot 10 1 Momentum tonneiter totalemen den adamentinationel | est per abandan kabawa terkait iklim dan koncana alam di comun noma | on cumos ilo mele co | CACE | | | | | | |
| 12.1.1 | Townships to deliver a Description Description Description | anaya terkart milli dan benca | delamen | gala. | , | , | , | , | , | Cood |
| 13.1.1 | i erseuranya dokumen kencana Penanggurangan bencana | | dokumen | T | ; i | ı i | 7 | 1 | 1 | brbu |
| 13.1.2 | Cakupan penanggulangan bencana | BPBD | % | 70.88 | 71.41 | 74.61 | 77.55 | 80.48 | 86.83 | ВРВД |
| Target 13.2 | Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional | lalam kebijakan, strategi dan p | erencanaan nasiona | _ | | | | | | |
| 13.2.1 | Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis | Bappeda | dokumen | н | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bappeda |
| 13.2.1.(a) | Jumlah Dokumen lingkungan yang diterbitkan | Dinas Lingkungan Hidup | dokumen | 206 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Dinas Lingkungan Hidup |
| TUJUAN XIV | TUJIUAN XIV Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. | mber daya kelautan dan samu | dera untuk pembang | gunan berkela | anjutan. | | | | | |
| Target 14.2 | Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindung ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi | ıt dan pesisir secara berkelanju | itan untuk menghind | dari dampak | buruk yang s | ignifikan, ter | masuk deng | an memperkı | ıat ketahanan | nya, dan melakukan restorasi |
| untuk mew | untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. | | | | | | | | | |
| 14.2.1.(a) | Tersedianya dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir | Dinas Pertaru | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| | dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | | | | | |
| 14.2.1.(b) | Target persentase sarana prasarana TPI kondisi baik | Dinas Kelautan dan Perikanan | % _ | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| Target 14.4 | ärset 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penankapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana | menghentikan penangkapan i | kan vang berlebihan | . penangkapa | an ikan ilega | I dan praktek | penangkapa | in ikan vang | nerusak. serta | a melaksanakan rencana |
| pengelolaar | pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan | n ikan secara layak dalam wak | tu yang paling singk | at yang mem | ungkinkan, s | etidaknya ke | tingkat yang | dapat mem | oroduksi hasil | maksimum yang berkelanjutan |
| sesuai kara | sesuai karakteristik biologisnya | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

b0

| Kode | | | | Tahun | | | Target Pencapaian | aian | | |
|---------------|--|---|-----------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| Indikator | Indikator RAD | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | — Penanggungjawab Pelaksana |
| 14.4.1 | Jumlah operasi terpadu di perairan umum | Dinas Kelautan dan Perikanan | kali | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| Target 14 6 | Tornet 11 E Dad sahin 2020 malaran hantuk hantuk cinkcidi sacikanan tastantu unan harkantikuci tarkadan kalahihan kanan katanti unan harkantikuci tarkadan kanan sananduan | tisiidirtaodaod pack iitaotaat ac | achidolog achedro | ch schoons | reduce on a | land action | nom achido | thilpacton c | heidi yang ho | achontribusi torbodas achondas |
| larget 14.0 | rada tanun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi pernah | all tertelltu yang berkolltribusi | ernada kelebinan | desites de | ii peilaligka | dii ikali Deli | eoman, men | gillalignali su | lusidi yang be | i kontribusi ternadap penangkapan |
| ıkan negal, | ikan legai yang trak dilaporkan & dak diam dan menanni lens suosid ban, dengan mengakui banwa periakuan knusus dan berbeda yang tebat dan erektir untuk negara berkembang & negara kurang berkembang narus menjadi | isidi baru, dengan mengakui bar | wa periakuan knus | is dan berb | eda yang tep | at dan erekti | r untuk negal | га регкетра | ng & negara r | kurang berkembang narus menjadi |
| pagian inte | bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization | Organization. | | | | | : | : | 1 | |
| 14.6.1.(a) | Jumlah anggota kelompok masyarakat pengawas yang | Dinas Kelautan dan Perikanan | orang | na | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | paham tentang perlindungan sumberdaya ikan | | | | | | | | | |
| Target 14.b | Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale a | (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar. | er daya laut dan pa | ar. | | | | | | |
| 14.b.1 | Jumlah perijinan usaha perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | dokumen | 1,003 | 2,500 | 2,000 | 7,500 | 10,000 | 11,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 14.b.1.(a) | Peningkatan modal usaha perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | juta rupiah | 213 | 220 | 226 | 231 | 238 | 241 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | 173 | 038 | 180 | 501 | 669 | 523 | |
| | | | | 5,4 | 5,0 | 001 | יי | 500, | 5,7 | |
| 10,777 | | | | 90. | 190 4 | .43 | 25. | .19 | 70. | 2 |
| 14.b.1.(b) | Jumlah nelayan yang teregistrasi | Dinas Kelautan dan Perikanan orang | orang | 1,843 | 1,867 | 1,891 | 1,916 | 1,940 | 2,042 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| TUJUAN XV | TUIDAN XV Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan | berkelanjutan ekosistem darata | n, mengelola hutan | secara lesta | ıri, menghen | ikan penggu | ırunan, mem | ulihkan degra | adasi lahan, s | erta menghentikan kehilangan |
| keanekarag | keanekaragaman hayati. | | | | | | | | | |
| Target 15.1 | Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, Jahan basah, pegunungan dan lahan | ıanfaatan berkelanjutan dari ek | sistem daratan dar | perairan da | ırat serta jası | lingkungan | nya, khususn | ya ekosisten | ı hutan, lahar | n basah, pegunungan dan lahan |
| kering, sejal | kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. | | | | | | | | | |
| 15.1.1(a) | Indeks tutunan hutan | Dinas Lingkungan Hidup | % | 65.34 | 65.48 | 65.75 | 66.02 | 66.28 | 66.55 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 15.7 | at untuk mengakhiri | perburuan dan perdasapaan janis finza dan fauna vang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan jiar secara jiaga | anna vang dilindung | serta mens | zatasi permir | taan dan pa | sokan produk | hidupan lia | secara ilegal | ١. |
| 15.7.1.(a) | lumlah lanoran/pengaduan masyarakat yang | Dinas Lingkungan Hidup | lanoran | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | Dinas Lingkungan Hidun |
| (5) | ditindaklaninti sesuai SOP | 455000000000000000000000000000000000000 | | 2 | 2 | 2 | ; | į | ? | 455 |
| THE PART OF | Indonesiation management of including day damai metalling | on actual colored accusaced and | sod social and cibour | Justan aclib | ach cumos | and design | - decoder | 44030 2000 | lodetande 3 | action in the second second second second |
| Target 16 1 | JONAN XVI VIEW HIGH THE WASHINGTON TO BE THE WORLD THE WASHINGTON | embangunan berkelanjutan, me terkeit angka kematian dimana | ıyediakan akses ked | allan untuk | semua, gan | nembangun | Kelembagaa | n yang erekt | і, акиптареі, | dan inklusir di semua tingkatan. |
| 101 136 101 | Consists and an annual limited and a second was a second and a second | Vestor Vestors because des | | 7. | G | S | C | 00 | C | No control of the con |
| | Capaian penanganan Kommk sosial | haritor nesatuan bangsa dan | 8 | 9/ | 00 | 90 | 00 | 00 | 90 | Nafitor Nesatuan Bangsa dan |
| | | Politik | | | | | | | | Politik |
| Target 16.2 | Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, | perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. | ın penyiksaan terha | dap anak. | | | | | | |
| 16.2.1 | Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap | Dinas Sosial Pemberdayaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial Pemberdayaan |
| | perempuan dan anak | Perempuan dan Perlindungan | | | | | | | | Perempuan dan Perlindungan |
| | | Anak | | | | | | | | Anak |
| Target 16.3 | Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasior | tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. | min akses yang san | a terhadap | keadilan bag | semna. | | | | |
| . | Cakupan penegakan hukum | Satuan Polisi Pamone Praia | · | 85.11 | 97.06 | 97.22 | 97.89 | 98.42 | 98.00 | Satuan Polisi Pamone Praia |
| Torget 16 E | Construction monarman of lower of the sound | account on a constant | 2 | 1 | | 1 | | | | 25.0 |
| larget 16.5 | larget 16.5 Secara Substansial mengurangi Korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya | am segala bentuknya. | | | , | | | | | |
| 16.5.1.(a) | Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai | Inspektorat Daerah | OPD | 7 | 7 | m | 2 | 7 | ი | Inspektorat Daerah |
| | Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | | | | | | | | | |
| Target 16.6 | Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | nsparan di semua tingkat. | | | | | | | | |
| 16.6.1.(a) | Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (opini BPK) | ВРК | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | BKAD |
| 16.6.1.(b) | Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Kementerian PAN dan RB | nilai | BB | BB | BB | BB | ۷ | ⋖ | Sekretariat Daerah |
| 16.6.1.(d) | Indeks Reformasi Birokrasi | Kementerian PAN dan RB | Nilai | 64 | 29 | 70 | 72 | 73 | 74 | Sekretariat Daerah |
| 16.6.2.(a) | Nilai indeks kepuasan masyarakat | Bagian Organisasi Setda Kab. | nilai | 77.15 | 77.65 | 78.15 | 78.65 | 79.35 | 79.65 | Sekretariat Daerah |
| | | Kulon Progo | | | | | | | | |
| Target 16.7 | Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan | partisipatif dan representatif d | setiap tingkatan. | | | | | | | |
| 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan | Dinas Sosial Pemberdayaan | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Dinas Sosial Pemberdayaan |
| | Perwakilan Rakvat Daerah (DRRD) | Perempilan dan Perlindingan | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Perempilan dan Perlindingan |
| | cowanian nanyar Dacian (Ding). | Appak | | | | | | | | Anak |
| 16 7 4 (14) | Dougoados a definition of a second of a se | Disco Cocial Dombood | /0 | ç | ç | 00 | OC. | Ç. | C. | Alian Disco Cocial Demokration |
| TO: / .T.(D) | reiseiltase keterwakilah perempuan sebagai | Dinas sosial Perinberdayaari | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Dinas sosial Perinberdayaan |
| | pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II | Perempuan dan Perlindungan | | | | | | | | Perempuan dan Perlindungan |
| | dan III). | Anak | | | | | | | | Anak |
| Target 16.9 | Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. | nua, termasuk pencatatan kelah | iran. | | | | | | | |
| 16.9.1 | Prosentnase anak yang memiliki akta kelahiran | Dinas Kependudukan dan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kependudukan dan |
| | | Pencatatan Sipil | | | | | | | | Pencatatan Sipil |
| Target 16.10 | Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindung | dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional | lengan peraturan na | I dan I | kesepakatan | internasiona | ÷ | | | |
| | | | - | | - | | | | | |

| - N- N | | | | F | | F | de de de | noi e | | |
|-------------------------------|---|---|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| None | Indikator RAD | Sumber Data | Satuan | | | - 1 | al get relicapaial | algii | | - Penanggungjawah Pelaksana |
| Indikator | dell'allandia | 201100 | 201001 | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | r changgangjawab r chansana |
| 16.10.2.(a) | Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dinas Komunikasi dan Informatika | OPD (Target OPD, BUMD& Pem Desa) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 16.10.2.(b) | Persentase tindak lanjut penanganan sengketa informasi publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 16.10.2.(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Dinas Komunikasi dan Informatika | PPID bersertifikat | 23 | 23 | 28 | 33 | 38 | 42 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| TUJUAN XVII | TUJUAN XVII Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. | raan global untuk pembangun | an berkelanjutan. | | | | | | | |
| Target 17.1 N | Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | ıelalui dukungan internasional | l kepada negara berk | embang, un | tuk meningk | atkan kapasit | tas lokal bagi | pengumpulai | n pajak dan p | endapatan lainnya. |
| 17.1.1 | Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) | ВКАД | milyar rupiah | 242 ,829 | 206 ,336 | 217 ,509 | 246 ,398 | 275 ,398 | 315 ,535 | ВКАD |
| 17.1.1.(a) | Proporsi PAD terhadap Pendapatan daerah | BKAD | % | 17 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | BKAD |
| Target 17.6 N berdasar kes | Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih balik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. | ın kerja sama triangular secara bih baik antara mekanisme ya | a regional dan interna ang telah ada, khusus | ssional terka nya di tingka | it dan akses at Perserikat | terhadap sai an Bangsa-Ba | ns, teknologi angsa (PBB), c | dan inovasi, d lan melalui m | dan meningk Iekanisme fa | atkan berbagi pengetahuan silitasi teknologi global. |
| 17.6.2.(a) | Persentase jaringan tulang | Dinas Komunikasi dan | % | . 0 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | Dinas Komunikasi dan |
| | punggung serat optik daerah | Informatika | | | | | | | | Informatika |
| | yang menghubungkan antar OPD dan Desa. | | | | | | | | | |
| Target 17.19 | Farget 17.19 Fada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan | ıntuk mengembangkan pengu | ıkuran atas kemajuan | pembangu | nan berkelar | jutan yang m | nelengkapi Pr | oduk Domest | ik Bruto, dan | ı mendukung pengembangan |
| Kapasitas sta | kapasitas statistik di negara berkembang. | | | | | | | | | |
| 17.19.1.(a) | Jumlah pejabat fungsional | ВКРР | orang | 9 | 6 | 6 | 6 | 14 | 23 | ВКРР |
| 17.19.1.(b) | Persentase perangkat | ВКРР | % | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | ВКРР |
| | Daerah yang memiliki jabatan fungsional pranata komultar | | | | | | | | | |
| 17 19 1 (c) | Persontase termenthinya | BKDD | % | 21.43 | 32 14 | 32 14 | 16 36 | 25.45 | 41.82 | акор |
| (2):1:61:71 | rei seritase cei periuminya kebutuhan pejabat fungsional pranata komputer | L | 8 | 64:17 | 32.14 | 32.14 | 10:30 | 64.67 | 41.02 | DIVI |
| 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi | Dinas Kependudukan dan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kependudukan dan |
| | terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | Pencatatan Sipil | | | | | | | | Pencatatan Sipil |
| 17.19.2.(e) | Jumlah data statistik dasar BPS dalam perencanaan dan | Dinas Komunikasi dan | jenis data | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dinas Komunikasi dan |
| | evaluasi pembangunan daerah | Informatika | | | | | | | | Informatika |

Matrik Program Kegiatan, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kulon Progo

| | | | ı | | Targ | Target Tahunan | _ | | Indikatif | | |
|---|---|----------------|------------------------|----------|------------|-----------------------|-----------|----------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Progr | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| TUJUAN I : Tanpa Kemiskinan | | | | | | | | | | | |
| | Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai | ki-laki, perem | puan dan | anak-ana | k dari ser | nua usia, | /ang hidι | ıp dalam | kemiskinan di | semua din | iensi, sesuai |
| | dengan definisi nasional. | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 1.2.1. Angka kemiskinan | | | | | | | | | | |
| 1.Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi | Ekonomi | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: | Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) | Dokume | 1 | _ | | . 1 | 1 | 5 | 537.237 | APBD | Bappeda |
| Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan | | c | | | | | | | | | |
| | Rencana Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | okume | 1 (| 0 | 0 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | c | | | | | | | | | |
| 2.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah | Terbayarnya premi peserta JKN APBD | jiwa | 0 | 37000 | 37000 | 37000 3 | 37000 3 | 37000 5 | 58,057 .790 | APBD | Dinas Kesehatan |
| | Terbayarnya klaim peserta jamkesda | pnlan | 12 | 12 | 12 1 | 12 12 | | 12 | | | |
| 3.Program Ketahanan Pangan Daerah | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Kegiatan Pengembangan dan Penganekragaman Konsumsi Pangan | sertifikat produk pangan olahan | PIRT | ∞ | 4 | 4 | 4 | 4 | ₩ ''! | 1,897 | APBD | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | fasilitas dan pendampingan pemanfaatan pekarangan | kelompo k | 30 | 10 | 10 1 | 10 10 | | 10 | | | |
| | sosialisasi B2SA | kali | | 7 | 2 2 | | 2 | | | | |
| | uji mutu dan keamanan pangan | led | 200 | 0 | 0 | 200 3 | 300 4 | 400 | | | |
| | penvediaan alat uii sampel hasil panen dan olahan pangan primer | | | 4 | | | - | | | | |
| | penylistinan nola nanga haranan | | | | | | - | | | | |
| 4.Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan | Jasil Peternakan | | | | | | ' | | | | |
| Kegiatan Peningkatan produksi peternakan | semen beku | dosis | 2900 | 3590 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 7 | 7,538 | APBD | Dinas |
| | | | | | | | | | .333 | | Pertanian dan Pangan |
| | bantuan hibah sapi | ekor | | 25 | 45 5 | | | 09 | | | |
| | bantuan hibah kambing | ekor | 318 2 | 224 | 204 1 | 120 2 | | 240 | | | |
| | bantuan hibah domba | ekor | 09 | 0 | | 9 09 | | 09 | | | |
| | bantuan hibah unggas (itik) | ekor | 066 | _ | | | 6 066 | 066 | | | |
| | bantuan hibah unggas (ayam) | ekor | 0 | 200 | 250 0 | | | 200 | | | |
| | bantuan hibah bahan kandang | kelompo | 13 (| 0 | 0 | 0 0 | | | | | |
| | | ¥ | | | | | | | | | |
| S. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | aya Tourselline to don't comply promite heart to a company of the filest | or conclosi | , | Ì | Ĭ | • | , | , | 900 | 000 | of colonial control |
| negiatali rengellibangali renkalan buuluaya | reiseulailya dari tersarui kaririya barituari sararia produksi (terpar, bibit, pakan) | | 2 | | | | - | n U | 000 | Ar BC | dan Perikanan |
| | Terlatihnya pembudidaya ikan dalam CBIB dan CPIB | Orang | 20 5 | 25 | 100 | 100 | 100 1 | 100 | | | |
| | Tersedianya dan tersalurkannya bantuan paket perbenihan ikan | kelompo | | | 0 | 0 0 | 0 | | | | |
| | | * | | | | | | | | | |
| 6.Program Pengembangan Industri | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Logam Kimia dan Aneka | Pemberian bantuan peralatan industri | kelompo k | m | o | 10 | 10 10 | | 10 2 | 2,634 .350 | APBD | Dinas Perdagangan |

| | | | | | Tar | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|---|----------------|------------------------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|--|-------------------------|---|
| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| 7.Program Pengembangan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Kerjatan Pelatihan ketrampilan bari pencari keria | ar ja iumlah nencari keria vane dilatih | oranø | 64 | 272 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | , 626 | 4.548 | APRD | Dinas Tenaga |
| | | | | | | | | | .031 | | Kerja |
| 8.Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Per penyediaan PSU lingkungan permukiman sambi | dan Permukiman Sehat sambungan listrik rumah bagi masyarakat miskin | titik | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 35,990 | APBD | Dinas PUPKP |
| | Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan | osial yang tep | at bagi se | emua, ter | masuk ke | lompok) | ang palir | g miskin, | dan pada tahu | n 2030 mei | ncapai cakupan |
| INDIKATOR SDG's | substatistat bagi kelonipuk niiskii dari lentari 1.3.1(a) Cakupan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah | Terbayarnya premi peserta JKN APBD | jiwa | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 58,057.790 | APBD | Dinas |
| | Terbayarnya klaim peserta jamkesda | pulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | Kesehatan |
| INDIKATOR SDG's 1.Program Pemberdavaan Sosial | 1.3.1(c) Jumlah PMKS yang memperoleh pemberdayaan sosial | | | | | | | | | | |
| Kegiatan peningkatan pelayanan distribusi rastra | Terlaksananya Koordinasi, Monev, ipaoran distribusi bantuan pangan (kali) | kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,935 .690 | АРВО | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | tersalurkannya bantuan pangan bagi keluarga miskin | 玄 | | 0 | 47323 | 47323 | 47323 | 47323 | | | |
| Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | | k k | 73 | 73 | 83 | 100 | 120 | 150 | 761 .260 | APBD | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | jumlah PMKS yang terentaskan menjadi sejahtera | orang | 0 | 0 | 200 | 009 | 700 | 800 | | | |
| | Tersediannya dan tersalurkannya bantuan sosial kepada PMKS | kelompo | _ | 73 | 83 | 100 | 120 | 150 | | | |
| | Pelatihan KUBE | kali | + | ~ | 4 | 9 | 10 | 14 | | | |
| | Terlaksannya Monitoring dan Evaluasi KUBE | kali | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Tersusunnya database KUBE | dokume n | T | 7 | н | н | н | T | | | |
| Peningkatan pelayanan PKH | Buku data penerima bantuan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas | dokume n | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1,076 .490 | АРВО | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Upaya pemberdayaan kleuarga FDS (family deevelopment sesion) | ¥. | 0 | 0 | 0000 | 00 | 000 | 40000 | | | |
| | Terlaksannya sosialisasi PKH | kali | | 9 | | | | 14 | | | |
| | Jumlah RTS yang diberikan pelayanan sosial Tarlakanasa koordinasi beu | ¥ ½ | 28071 | 28071 | 33500 | 36000 | 38500 | 41000 | | | |
| INDIKATOR SDG'S | 1.3.1(d) Jumlah PMKS yang menerima manfaat bantuan sosial | = D | 4 | 2 | 7 | ţ | 2 | 2 | | | |
| 1.Program Perlindungan Sosial | | | | | | | | | | | |

| Peningkatan kualitas pelayanan PMKS Terfasilitasinya pendampingan SLRT Terfasilitasinya pendampingan KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan Daserah) Tersoelianya dan tersalurannya bentuan bagi PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial Tersoelianya dan tersalurannya bantuan bagi PMKS yang mendapatkan pelayanan bagi PMKS yang mendapatkan pengelan bantuan PMKS yang mendapatkan pelayanan bagi PMKS yang mendapatkan pengelan bantuan PMKS yang mendapatkan pengelan bagi kelompok miskin dan nentan 1.4.1(c) Meningkatnya cakupan CRR (Contraceptive Prevalence Rate) 1.4.1(c) Meningkatnya cakupan Alkon diklinik KB Terkendalinya kualitas pelayanan KB Terchina dan terlayaninya kepersertaan KB Terchina dan terlayaninya kapersertaan kB Terchina dan terlayaninya kB Terc | inan gan sosi | Satuan Do | Tahun Dasar 2017 | 2018 2 | 2019 20 | 9 2020 2021 | 1 2022 | 1 | Sumber Pendana | Instansi |
|--|--|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| Program Mbinaan Kelua Alkon | r SLRT r KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan C yanan sosial a bantuan bagi PMKS a nasional sistem dan upaya perlindungan sosia kin dan tentan | <u> </u> | | | | | | | | Instansi |
| m binaan Kelua Alkon gan Sarana Pra | r SLRT r KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan con yanan sosia bantuan kayanan sosia bantuan ka bantuan bagi PMKS con an ansional sistem dan upaya perlindungan sosia kin dan rentan rCPR (Contracentive Prevalence Bate) | | | | | | | | | Peiansalia |
| a dan Pembinaan Kelua gelolaan Alkon gembangan Sarana Pra | i KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan ce pemberian bantuan kayanan sosial rayanan sosial an asional sistem dan upaya perlindungan sosia kin dan rentan ir CPR (Contracentive Prevalence Rate) | | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 5,545 .410 | АРВО | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| a dan Pembinaan Kelua gelokan Alkon gembangan Sarana Pra | he pemberian bantuan yanan sosial cabantuan bagi PMKS cabassonal sistem dan upaya perlindungan sosia kin dan rentan | orang 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | | | |
| a dan Pembinaan Kelua gelolaan Alkon Kembangan Sarana Pra | yanan sosial 7a bantuan bagi PMKS a nasional sistem dan upaya perlindungan sosia kin dan rentan | kali 2 | | | | | | | | |
| a dan Pembinaan Kelua gelolaan Alkon gembangan Sarana Pra | ra bantuan bagi PMKS a nasional sistem dan upaya perlindungan sosia kin dan rentan n CPR (Contracentive Prevalence Rate) | | | | | | | | | |
| a dan Pembinaan Kelua gelolaan Alkon gembangan Sarana Pra | a nasional sistem dan upaya perlindungan sosia .kin dan rentan n CPR (Contracentive Prevalence Rate) | orang 13 | 1357 14 | 1432 14 | 1489 1522 | 2 1552 | 1600 | | | - |
| a dan Pembinaan Keluz gelolaan Alkon gembangan Sarana Prs | n CPR (Contracentive Prevalence Rate) | l yang tepat | bagi sem | ıa, terma | suk kelom | pok yang _I | oaling misk | ın, dan pada tahı | un 2030 men | capai cakupan |
| a dan Pembinaan Keluc gelolaan Alkon gembangan Sarana Pra | | | | | | | | | | |
| gelolaan Alkon gembangan Sarana Pr | | | | | | | | | | |
| igembangan Sarana Pra | | puskesm 0 as | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | .580 .580 | АРВО | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| igembangan Sarana Pra | | puskesm 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | |
| ngembangan Sarana Pra | | as | | | | | 0 | | | |
| ngembangan Sarana Pra | | orang 0 | 300 | 0 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | ga dengan layanan air limbah si | | | | | | | | | |
| | | KK 10 | 07463 10 | 9213 110 | 0963 112 | 463 1135 | 107463 109213 110963 112463 113963 115463 6,507 .642 | .642 .642 | АРВО | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar Jumlah rumah tangga berakses air limbah | | KK 57 | 51228 56 | 228 61. | 228 662 | 28 7122 | 56228 61228 66228 71228 76228 | 2,334 | АРВО | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| INDIKATOR SDG's 1.4.1(e) Cakupan rumah tangga dengan layanan air limbah | a dengan layanan air limbah, | | | | | | | | | |

| | | | | | Target | Target Tahunan | | Indikatif | | |
|--|--|--------|------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------|---|
| Program/ | m/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 2 | 2020 2021 | 1 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah lokasi penyedotan lumpur tinja | lokasi | na | na 11 | 152 156 | 160 | 164 | .000 | APBD P | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| Pemeliharaan Kebersihan kota | Kebersihan kawasan perkotaan | bulan | 12 | 12 12 | 2 12 | 12 | 12 | 3,273 .121 | APBD F | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| Pengelolaan Persampahan | Persentase timbulan sampah yang teratangani | % | 62.39 | 68.94 6 | 69.17 68 | 68.15 70.07 | 7 73.91 | 7,902 .741 | APBD F | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| Pembangunan dan Pengelolaan Taman | Jumlah taman dalam kondisi baik | taman | 29 | 33 | 33 | 37 | 43 | 9,266 .518 | APBD L | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| INDIKATOR SDG's 1.Program Lingkungan Sehat Permukiman dan Pengembangan Perumahan Penyediaan prasarana sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan kumuh tertan | 1.4.1(f) Persentase penanganan kawasan kumuh embangan Perumahan Kawasan kumuh tertangani prasarana dan sarana utilitasnya | Ę | 13.644 | 13.644 1- | 1.144 14 | 144 14.6 | 13.644 13.644 14.144 14.644 14.644 | | APBD | Dinas |
| Lingkungan Permukiman | | | | | | | | | | Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Pemberdayaan peningkatan infrastruktur oleh komunitas | Jumlah rumah layak Huni | n H | 88777 | 89477 91 | 90177 903 | 90877 91577 | 7 92277 | 5,317 .710 | APBD | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| Pembangunan fasilitas lingkungan rusunawa | Infrastruktur Rusunawa terpelihara | bulan | 12 | 12 12 | 2 12 | 12 | 12 | 3,545 .130 | APBD P | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| INDIKATOR SDG's 1.Program Pembinaan sekolah dasar | 1.4.1(g) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat | | | | | | | | | |

| | | | | | Targ | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|---|---------------|------------------------|------|------|----------------|------|-------|--|-------------------------|---|
| rd | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| Pengadaan Sarana pendidikan SD | Peralatan pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan (prestasi) | Dokume 1 n | | _ | _ | _ | 1 1 | | 18,756 .000 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Tersedianya media pendidikan | | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | _ | | | |
| | Tersedianya Mebelair meja kursi | | | 4 | 1 | 1 | 1 1 | | | | |
| | Tersedianya koleksi perpustakaan | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | Tersedianya peralatan pendidikan (alat peraga) dan olahraga | olah | | | | 1 | 1 | | | | |
| Penyediaan BiayaPendidikan SD | Tersedianya biaya operasional sekolah pendidikan SD | SO | 337 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | .640 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SD | Terbangunnya/ terehabnya bangunan SD | Sekolah | 89 | ∞ | 2 | 2 | 2 | 2+125 | 30,044 | АРВО | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terbangunnya/terehabnya gedung gugus | Gedung | | | 1 | 1 | | _ | | | |
| Pengembangan Potensi Siswa SD | Terselenggaranya lomba-lomba di bidang akademik, keagamaan, olahraga, kesehatan, seni, budaya dan lainnya | Kategori | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,041 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Peningkatan Mutu Pendidikan SD | Terlaksananya peningatan pemahaman terhadap pendidkan kepramukaan Guru | | 350 | 200 | 200 | 200 | 500 | 200 | 1,555 .294 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terlaksananya peningkatan pemahaman kurikulum 2013 | | 168 | ~ | 168 | 168 | ω. | 168 | | | |
| | Terlaksananya pendampingan sekolah piloting SD berkarakter | ے | | | | 12 | | 12 | | | |
| PengembanganProgram pendidikan inklusif jenjang SD | Terfasilitasinya assesment siswa berkebutuhan khusus | Siswa | 225 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | .120 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terlaksananya Diklat penanganan anak berkebutuhan khusus bagi guru reguler, manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusif bagi kepala sekolah | Orang | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | |
| Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan SD | Terfasilitasinya bedah kisi kisi US/M, Diklat Penulisan Soal, Latihan US/M | Kegiatan 3 | | m | m | m | m | ю | 4,427 .752 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap pendataan ujian sekolah | | | 400 | | 400 | 400 | 400 | | | |
| | Terlaksananya peningkatan pemahaman tentang PPBD | | | | | 400 | 400 | 001 | | | |
| | Terlaksananya peningkatan pemahaman EDS Orang | | | | | 400 | | 400 | | | |
| Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Satuan Pendidikan SD | Terselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuan pendidikan SD | ے | | | | 120 | | | 1,421 .346 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terlaksananya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar | Kali | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 0 |

| | | | | | Targ | Target Tahunan | au | | Indikatif | | |
|---|---|-------------------|------------------------|--------|--------|----------------|---------------|----------|--|-------------------------|---|
| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| INDIKATOR SDG's 1 Program Dombinson Cakelah Manangah Dortama | 1.4.1(h) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat | | | | | | | | | | |
| Paring data Mulu Pendidikan SMP | Meningkatnya pemahaman terhadap implementasi K13, Terselenggaranya Diklat Teknis Mahir Dasar bagi Pembina Pramuka, Meningkatnya kualitas pelayanan UKS | a Sekolah | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | .784 | APBD I | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Pengembangan Potensi Siswa SMP | Terselenggaranya lomba-lomba di bidang akademik, keagamaan, olahraga, kesehatan, seni, budaya dan lainnya | , Sekolah | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 62 | 2,716 .184 | APBD I | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Penyediaan Biaya Pendidikan SMP | Terpenuhinya penyediaan biaya pendidikan SMP (36 sekolah negeri) dan fasilitasi penyediaan BRPD 43 SMP Swasta/MTs, terfasilitasinya operasional sekolah unggulan sains, olahraga dan seni budaya | Sekolah | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 62 | .000 | APBD II | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Pelaksanaan EvaluasiMutu Pendidikan SMP | Terfasilitasinya ujian SMP/MTs, tersosialisasikannya POS ujian, tersusunnya Sekolah Master Soal, terlaksananya bedah kisi-kisi ujian, terlaksananya PPDB Online, tersosialisasikannya SOP MOS | a Sekolah | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | . 62 | 2,299 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Pengadaan Sarana Pendidikan SMP | Sarana Pendidikan dan Media Pembelajaran Yang Lengkap dan Kondisi Baik Sekolah | k Sekolah | 28 | ∞ | 7 | 2 | 2 | 2 | 000. | APBD I | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP | Relokasi Sekolah | Sekolah | | н | н | н | н | ∺ | 13,000 | APBD I | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Pembangunan/ rehabilitasi Prasarana SMP | Sekolah | 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | þ |
| PengembanganProgram Pendidikan inklusif Jenjang SMP | Terlaksananya peningkatan pemahaman guru reguler terhadap pendidikan inklusi | | 108 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | .861 | APBD I | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Satuan Pendidikan SMP | Terlaksananya pembinaan dalam rangka pemenuhan akreditasi sesuai 8 standar nasional pendidikan | Sekolah | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 878 .109 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terlaksananya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar | Kali | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| INDIKATOR SDG's 1.Program Pelavanan Pendaftaran Penduduk | 1.4.1(j)Persentase Penduduk usia 0-18 tahun dengan Kepemilikan akte kelahiran | ahiran | | | | | | | | | |
| Pencatatan dan penerbitan Identitas Penduduk | Terbitnya KTP | Dokume 7,000 n | | 4,000 | 4,000 | н | н | н | .000 | APBD I | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | Terbitnya KIA | Dokume | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 20,000 | 20,000 | | | |
| | Terbitnya KK (DAK) | Dokume n | 15,500 | 15,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 1 | Target Tahunan | ueu | | Indikatif | | |
|--|---|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------|---|
| | | | Tahin | | | | | | Alokasi | Sumber | |
| Prograi | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
| | Terekamnya KTP-El | Dokume | 6,000 | 90009 | 6,000 | 9,000 | 000′9 | 000′9 | | | |
| | Terbitnya KK | Dokume | 4000 | 15500 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | | | |
| | Terbitnya KTP (DAK) | Dokume | 4,000 | 1,000 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | | | |
| Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan | Publikasi di pameran | Dokume | н | 1 | П | н | Н | н | 200 | APBD | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | Sosialisasi kebijakan Adminduk | Dokume | 200 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | | | |
| | Publikasi pelayanan adminduk (DAK) | Dokume | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | | | |
| 2.Program Administrasi Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | |
| Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran | Akta Kelahiran (DAK) | Dokume 1,000 n | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | .000 | APBD | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | Akta Kelahiran | Dokume n | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | |
| Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak | Akta Kematian | Dokume | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 332 | APBD | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | Akta Kematian (DAK) | Dokume 1,000 n | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 1.4.2. Cakupan luas lahan bersertifikat | | | | | | | | | | |
| 1.Program Pengelolaan Pertanahan | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Database Pertanahan | Luas lahan bersertifikat | m 2 | 462,74 3 ,000 | 4 472,74 3 ,024 | 472,74 3 ,024 | 492,74 3 ,024 | 502,74 3 ,024 | 512,74 3 ,024 | 303 .712 | APBD | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| Sertifikasi tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Luas Daerah | Luas aset pemda bersertifikat | m 5 | 199 ,619 | 219 ,619 | 239 | 259 ,619 | 279 ,619 | 279 ,619 | .835 | APBD | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| Sertifikasi Tanah Masyarakat | Luas tanah masyarakat bersertifikat | bidang | 412 | 453 | 497 | 499 | 548 | 603 | 2,262 .278 | APBD | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| Penyelesaian Permasalahan Pertanahan | Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan | kasus | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 375 | APBD | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |

| Property | | | | | | Targ | Target Tahunan | lan | | Indikatif | | |
|--|--|--|---------------|------------------------|----------|------------|----------------|----------|-----------|--|------------|---|
| Full continues destinated an investinated perturbation Transfer continues of perturbation Transfer continues Transfer c | Progra | m/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
| Trigies L. P. See below 2012 (Fig. 12) | Identifikasi dan inventarisasi pertanahan | Jumlah dokumen identifikasi dan inventarisasi | dokume n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | АРВО | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| Ing 400 250 150 150 200 182 APBD (000) (00 | | Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin di terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. | an mereka y | ang berac | la dalam | kondisi re | ntan, daı | n mengur | angi kere | ntanan merek | terhadap k | ejadian ekstrim |
| ng 400 250 150 150 150 200 182 APBD .000 | INDIKATOR SDG's | 1.5.1. Cakupan penanggulangan bencana | | | | | | | | | | |
| ng 400 250 150 150 150 200 182 APBD 182 | 1.Program Penanggulangan bencana | | | | | | | | | | | |
| ia 4 2 2 1 1 1 1088 APBD an 12 12 12 12 12 12 13 an 12 12 12 12 12 12 12 an 12 12 12 12 12 12 12 an 12 12 12 12 12 12 12 an 12 12 12 12 12 12 14.39 an 14 | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemadaman Kebakaran | Terselenggaranya sosialisasi pemadaman kebakaran | orang | 400 | 250 | 150 | 150 | 150 | 200 | 182 .000 | APBD | BPBD |
| sistan 4 4 % 3 3 3 3 4 APBD an 12 12 12 12 12 135 APBD an 12 12 12 12 12 1000 an 12 12 12 12 12 14239 APBD an 12 12 12 12 14,239 APBD smm 12 12 12 12 14,239 APBD kume 1 1 1 1 1 1000 APBD kume 1 | Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat | Terbentuknya DesaTangguh Bencana | desa | 4 | 2 | 2 | н | н | н | 1,088 | APBD | BPBD |
| an 12 12 12 12 12 12 13 1000 an 12 12 12 12 12 12 000 an 12 12 12 12 12 12 12 12 000 an 12 12 12 12 12 12 12 000 an 12 12 12 12 12 12 14,239 APBD cwme 1 1 1 1 1 1 1 1 1088 APBD cwme 2 2 2 1 1 1 1 1 1088 4 4% 3 3 3 3 3 150 250 400 250 250 250 620 APBD an official 4 5 4 4 4 4 4 intraa 4 4 5 4 4 4 4 4 intraa 4 4 5 4 4 4 4 intra 1 1 1 1 1 1 1 intra 1 1 1 1 1 1 1 intra 1 1 1 1 1 1 1 intra 1 1 1 1 1 1 1 1 intra 1 1 1 1 1 1 1 1 intra 1 1 1 1 1 1 1 1 intra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 intra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 intra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 intra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 intra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 intra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 intra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 intra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 intra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | Terlaksananya sosialisasi PRB, Temu Relawan dan Pertemuan Forum (+kajian) | Kegiatan | 4 | 4% | 33 | æ | 33 | æ | | | |
| an 12 12 12 12 12 12 12 an 12 12 12 12 12 12 12 12 an 12 12 12 12 12 12 1719 APBD an 12 12 12 12 12 14,339 APBD kume 1 1 1 1 1 1 1 1 1,088 APBD 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1,088 APBD 150 250 400 250 250 250 620 APBD intra 4 4 5 4 4 4 4 intra 4 4 5 4 4 4 4 intra 1 1 1 1 1 1 1 ing 150 150 150 150 150 ing | Penanganan Kedaruratan dan Logistik | Terfasilitasinya upah harian 8 orang tenaga PBK non PNS | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,975 | APBD | BPBD |
| an 12 12 12 12 12 12 12 1719 APBD an 12 12 12 12 12 1719 APBD an 12 12 12 12 12 14,239 APBD tume 1 1 1 1 1 1 1,088 APBD 4 2 2 1 1 1 1 1 1,088 APBD 150 250 400 250 250 620 APBD ret 1 1 1 2 2 1 1 1 ret 1 1 2 2 2 1 1 ret 1 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 1 1 1 ret 1 1 1 1 1 1 1 r | | Tertanganinya kejadian bencana, kebakaran dan tersedianya alat bantu penanganan bencana dan | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| APBD APBD APBD APBD APBD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN | | Tertanganinya manajemen distribusi logistik dan sarana penanggulangan bencana | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| APBD Nume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Penyelenggaraan PUSDALOPS | Terfasilitasinya Kegiatan PUSDALOPS (TRC dan Unsur Pengarah) | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,719 | APBD | врво |
| kume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 APBD 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 APBD 150 250 250 250 250 620 APBD APBD 710 APBD 150 250 400 250 250 250 620 APBD 710 APBD 151 | Penyelenggaraan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana | Tersusunnya dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 14,239 | APBD | врво |
| 4 2 2 1 1 1 1,088 APBD .000 4 4 4% 3 3 3 3 3 A .000 150 250 400 250 250 250 620 APBD .710 nitraa 4 4 5 4 4 4 4 4 4 ng 150 150 150 150 150 150 ng 150 150 150 150 150 150 ng 1 | | Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi | Dokume | 1 | 1 | н | П | н | ₽ | | | |
| 4 2 2 1 1 1,088 APBD | INDIKATOR SDG's | 1.5.1(a) Desa Tangguh Bencana | | | | | | | | | | |
| 150 250 400 250 250 620 APBD ritraa 4 4 5 4 4 4 4 ret 1 1 2 2 1 1 1 ring 150 150 150 150 150 ret 2 1 1 1 1 1 1 ring 150 150 150 150 150 rittaa 4 4 5 4 4 4 4 ret 1 1 1 1 1 1 rittaa 4 1 5 4 4 4 4 ret 1 1 1 1 1 1 rittaa 4 1 1 1 1 1 1 1 rittaa 4 1 1 1 1 1 1 1 rittaa 4 1 1 1 1 1 1 1 rittaa 4 1 1 1 1 1 1 1 rittaa 4 1 1 1 1 1 1 1 1 rittaa 4 1 1 1 1 1 1 1 1 rittaa 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rittaa 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rittaa 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rittaa 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | L.F.Oglani Penanggan Denkana Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat | Terbentuknya DesaTangguh Bencana | | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,088 | APBD | BPBD |
| 150 250 400 250 250 250 620 APBD Titraa 4 4 5 4 4 4 Tet 1 1 1 1 1 1 1 The 150 150 150 150 150 The 150 150 150 150 The 150 150 150 150 | | Terlaksananya sosialisasi PRB, Temu Relawan dan Pertemuan Forum (+kajian | | 4 | 4% | 8 | 8 | 8 | 8 | 000 | | |
| 150 250 400 250 250 620 APBD 710 | INDIKATOR SDG's 1 Program Perlindingan Social | 1.5.1(b) Indeks Perlindungan Sosial | | | | | | | | | | |
| ret 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Perindungan Sosial Bagi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Dibantu | 뀾 | 150 | 250 | 400 | 250 | 250 | | .710 | АРВО | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| tet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | Jumlah jejaring kemitraan yang dilaksanakan | kemitraa n | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | | | |
| i 1 1 2 2 1 ng 150 150 150 150 150 an 12 12 12 12 12 | | Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat yang tersedia | paket | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ng 150 150 150 150 150 an 12 12 12 12 12 | | Terselenggarannya apel siaga tagana | kali | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| an 12 12 12 12 12 | | Jumlah tagana yang aktif | orang | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | |
| | TIIIIAN II Menobijanokan kelanaran mencanaj keta | Operasional posko siaga bencana ahanan nangan dan gizi yang haik serta menjngkatkan nertanjan herkelani | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |

| | | | | | ŀ | | | | | | |
|--|---|---------------|------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Tar | Target Tahunan | Jan | | Indikatif | | |
| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| | Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. | es bagi semua | a orang, | chususny | a orang m | iskin dan | mereka y | ang bera | da dalam kond | isi rentan, te | rmasuk bayi, |
| INDIKATOR SDG's | 2.2.1.indeks kesehatan masyarakat | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| Penanggulangan permasalahan gizi masyarakat | Terlaksananya bimbingan teknisProgram gizi dalam rangka | puskesm | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 948 | APBD | Dinas |
| | penanggulangan permasalahan gizi | as. | | | | | | | .407 | | Kesehatan |
| | Terlaksananya Therapeutic Feeding Center (TFC) (balita) | balita | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Terlaksananya PMT pemulihan pada ibu hamil KEK | pnmil | 12 | 06 | 06 | 06 | 90 | 90 | | | |
| | Terlaksananya PMT pemulihan balita kurus | balita | 40 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 2.1.2. Jumlah desa yang tidak rawan pangan | | | | | | | | | | |
| 1.Program Ketahanan Pangan Daerah | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | Tumbuhnya dan terlatihnya kelompok afinitas | kelompo k | ₽ | н | н | ₽ | ₽ | H | 457 .603 | APBD | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | Koordinasinya dewan ketahanan pangan | kali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Tersusunnya Neraca Bahan Makanan dan Peta Rawan Pangan | dokume | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Township of the Parish of the | | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | lerpantaunya Gapoktan LDPM dan TOKO Tani Indonesia (TTI) | gapokta n | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | |
| | Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan | i, termasuk p | ada tahu | ın 2025 rr | encapai t | arget yar | g disepal | cati secar | a internasional | untuk anak | pendek dan |
| | kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | ıpuan, ibu ha | mil dan ı | nenyusui | serta ma | nula. | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 2.2.1. jumlah balita stunting | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| Penanggulangan permasalahan gizi masyarakat | Terlaksananya bimbingan teknisProgram gizi dalam rangka penanggulangan permasalahan gizi | puskesm as | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 948 .407 | APBD | Dinas Kesehatan |
| | Terlaksananya Therapeutic Feeding Center (TFC) | balita | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Terlaksananya PMT pemulihan pada ibu hamil KEK | pumil | 12 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | | | |
| | Terlaksananya PMT pemulihan balita kurus | balita | 40 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 2.2.2. jumlah balita Bawah Garis Merah, jumlah balita kurus | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| Penanggulangan permasalahan gizi masyarakat | Terlaksananya bimbingan teknisProgram gizi dalam rangka | puskesm | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 948 | APBD | Dinas |
| | periarigguiarigari perinasaranan gizi Terlaksananya Theranentic Feeding Center (TEC) | as halita | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | , O+. | | vesellatali |
| | Terlaksananya PMT nemulihan nada ihu hamil KEK | limid | 12 | 9 6 | 06 | 06 | 06 | 06 | | | |
| | Terlaksananya PMT pemulihan balita kurus | balita | 40 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 2.2.2(a) Jumlah ibu hamil dengn anemia | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| Penanggulangan permasalahan gizi masyarakat | Terlaksananya bimbingan teknisProgram gizi dalam rangka nananggulangan narmasalahan dizi | puskesm | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 948 | APBD | Dinas |
| | Terlaksananya Therapeutic Feeding Center (TFC) | balita | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ď. | | |
| | Terlaksananya PMT nemulihan nada ibu hamil KFK | limid | 12 | 6 | 6 | 06 | 06 | 06 | | | |
| | Terlaksananya PMT pemulihan balita kurus | balita | 40 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 2.2.2(b) Jumlah bavi mendapat ASI eksklusif | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan kesehatan keluarga | Terfasilitasinya monitoring dan supervisi pelayanan kesehatan bayi, balita, | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | APBD | Dinas |
| | remaja di Puskesmas | as | | | | | | | | | Kesehatan |

| | | | | | Targ | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| Prograi | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| | Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. | anjutan dar erubahan il | n menerap dim, cuac | ıkan prak a ekstrim | ek perta kekering | nian tang jan, banji | guh yang ir, dan be | meningk ncana lair | atkan produks nnya, serta sec | i dan produl ara progresi | ctivitas, f memperbaiki |
| INDIKATOR SDG's 2.4.1. Cetak saw: 1. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan | 2.4.1.Cetak sawah baru, Jumlah Alat Mesin budidaya tanaman pangan Tanaman Pangan | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | cetak sawah | Е | 0 | 25 | 20 | 44 | 35 | 196 | 5,589 | APBD | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Pengembangan Sarana dan Prasarana Mendukung Produksi Tanaman Pangan | Fasiltasi alat dan mesin pertanian | kelompo k | 0 | 14 | rv. | 5 | rv. | 50 | 6,948 .848 | APBD | Dinas Pertanian dan Pangan |
| TUJUAN III Menjamin kehidupan yang sehat dan me | TUJUAN III Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | urang dari 7 | 70 per 100 | .000 kela | hiran hid | ď | | | | | |
| INDIKATOR SDG's 1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | 3.1.1. Angka kematian ibu | | | | | | | | | | |
| Keselamatan ibu dan bayi | tersedianya rumah tunggu kelahiran untuk jampersal | lokasi | 0 | т | т | т | т | ₩. | 1,351 .268 | APBD | Dinas Kesehatan |
| | terbayarnya klaim pelayanan persalinan | pnlan | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. | yang dapat 1.000. | dicegah, | dengan s | eluruh ne | gara ber | usaha me | nurunkar | n Angka Kemat | ian Neonata | l setidaknya |
| INDIKATOR SDG's 1. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | 3.2.2(a) Jumlah Kematian Bayi | | | | | | | | | | |
| Keselamatan ibu dan bayi | tersedianya rumah tunggu kelahiran untuk jampersal | lokasi | 0 | 1 | 1 | н | н | П | 1,351 .268 | APBD | Dinas Kesehatan |
| | terbayarnya klaim pelayanan persalinan | pnlan | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| INDIKATOR SDG's 1.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 3.2.2(b) Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang imunisasi dasar lengkap pada bayi | ngkap pada | bayi | | | | | | | | |
| Imunisasi Dasar, Lanjutan, Khusus | terbinanyaProgram PD3I | puskesm 21 as | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 175 .932 | APBD | Dinas Kesehatan |
| INDIKATOR SDG's | Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.3.1. Kasus Baru Infeksi HIV | a, dan peny | akit tropis | yang ter | sbaikan, o | dan mem | erangi he | patitis, pe | enyakit bersun | nber air, ser | ta penyakit |
| 1.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | | | | | | | | | | | |
| Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung | Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular . Terlaksananya penanganan kasus penyakit menular langsung l angsung | kecamat an | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 562 .869 | APBD | Dinas Kesehatan |
| INDIKATOR SDG's 1 Program Pencecahan dan Pencendalian Pencekit | 3.3.2(a) prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk | | | | | | | | | | |
| Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung | arr og den envegarian och en genaan en grant. Pencegalan dan penanggulangan penyakit menular Terlaksananya penanganan kasus penyakit menular langsung Innssung | kecamat | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 562 | APBD | Dinas Kesehatan |
| INDIKATOR SDG's 1.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 3.3.3. Jumlah penderita DBD | | | | | | | | | | |
| Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik | Terlaksananya penanganan kasus penyakit tular vektor dan zoonotik | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2,490 .643 | APBD | Dinas Kesehatan |
| INDIKATOR SDG's 1. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 3.3.5(a) Jumlah desa/ kelurahan dengan eliminasi kusta | | | | | | | | | | |
| Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung | Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Terlaksananya penanganan kasus penyakit menular langsung langsung | kecamat an | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 562 .869 | APBD | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | F | Toront Tohing | | | tipolifoni | | |
|---|--|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | , 4, 4, | | 20 | i anun | E | | Markatii | Sumbor | |
| Progran | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Pendana an | Instansi Pelaksana |
| INDIKATOR SDG's | 3.3.5(b) Jumlah desa/ kelurahan dengan eliminasi filariasis ; Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati; Proporsi kasus filariasis yang ditemukan dan diobati | s kusta yang c | litemukar | dan diol | oati; Propo | rsi kasus | filariasis | yang dite | emukan dan di | obati | |
| 1.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | | | | | | | | | | | |
| Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Terla | Terlaksananya penanganan kasus penyakit menular langsung | kecamat 12 | | 12 | 12 1 | 12 | 12 | 12 | 295 | APBD | Dinas |
| langsung | | an | | | | | | | 698 | | Kesehatan |
| | graft 34 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan | dini akibat p | enyakit ti | dak men | ılar, melal | ui pence | gahan da | n pengob | atan, serta me | ningkatkan | cesehatan . |
| | mental dan Kesejanteraan. | | The second | the section | I william and | 1 | | | | | |
| INDIKATOR SDG'S | s.4.1b Ivienurunnya prevalensi tekanan daran tinggi ; Jumian puskesmas yang melakukan skrining dan taktor nsiko kesenatan jiwa | ang melakuka | an skrining | g dan tak | Or risiko k | esenatar | ewi r | | | | |
| 1.Program Penceganan dan Pengendalian Penyakit | | | | | | | | | | | |
| Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular | Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM | dokume n | ₽ | н | | | _ | | 246 .636 | APBD | Dinas Kesehatan |
| | Tersedianya data kasus PTM | Dokume | + | 4 | 1 | | | _ | | | |
| INDIKATOR SDG's | 3.4.2(a) Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa | ggarakan upa | ya keseha | atan jiwa | | | | | | | |
| 1.Program Penceganan dan Pengendanan Penyaku | | | | | | | | | į | | |
| Pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan | Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian | Dokume | 1 | 1 | 1 | | | | 151 | APBD | Dinas |
| | Terbinanya TPKJM | camat | 4 | 4 | 2 2 | | 2 | . 2 | | | |
| | | an | | | | | | | | | |
| | Tersedianya media KIE kesehatan jiwa | paket | 0 | 2 | 2 | | 2 | ۵. | | | |
| | Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. | , termasuk pe | enyalahgu | naan nar | kotika dar | ı penggui | naan alko | hol yang | membahayak | an. | |
| INDIKATOR SDG's | 3.5.1(a) tersedianya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan napza | kesehatan jiv | va dan na | pza | | | | | | | |
| 1.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | | | , | | , | Ì | Ì | | | 4 | |
| Pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan | Tersusunnya perencanaan Kegiatan pencegahan dan pengendalian | Dokume | - | - | | | _ | | 151 | APBD | Dinas |
| Napza | Kesenatan jiwa dan napza | | | | | | | | 256 | | Kesenatan |
| | Tersedianya data kasus penyakit kesehatan jiwa dan napza | Dokume n | H | | 1 | | _ | _ | | | |
| | Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas. | n global dan o | edera da | ri kecelak | aan lalu li | ntas. | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 3.6.1(a) Cakupan tertib lalu lintas | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan | | | | | | | | | | | |
| Pengendalian dan pengamanan lalu lintas | Usaha pengendalian pengamanan lalu litas | Kegiatan | 2 | ro. | r. | 5 | 5 | ω | 2,384 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Peningkatatan keselamatan LLAJ | Usaha peningkatan keselamatan LLAJ | kegiatan | 2 | ı, | <u>د</u> | 5, | 5, | ٠. | 1,887 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pemeliharaan fasilitas LLAJ | Perlengkapan jalan dalam kondisi baik | bulan | 12 | 12 | 12 1 | 12 1 | 12 1 | 12 1 | 1,828 | APBD | Dinas |
| | | | | | | | | | .419 | | Perhubungan |
| Pemeliharaan Rutin LPJU | LPJU dalam konsisi baik | titik | 1682 | 1807 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 2,623 | APBD | Dinas |
| 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 9 | | | | | | | .521 | 000 | Pernubungan |
| Pembangunan Penengkapan Jalan | Perlengkapan Jalan | Jenis | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥. | 6,2/4 .420 | AFBD | Dinas Perhubungan |
| Pembangunan LPJU | Lampu Penerangan Jalan Umum | titik | 278 | 193 | 450 4 | 490 | 520 | 530 | 22,750 .442 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Peningkatan Manajemen Lalu Lintas | Dokumen evaluasi Andalalin, Survey Lalu lintas & Saksi Ahli | dokume | 8 | 8 | 3 | | 8 | ε . | 1,055 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pengelolaan database | Database perhubungan | dokume | 1 | 1 | 1 | | | _ | 190 | APBD | Dinas |
| Perencanaan lalii lintas | Dokumen rencana induk & analisa | kıme | r c | 0 | 1 | | , | | 710 | APRD | Dinas |
| | | | | | | | | | 000 | | Perhubungan |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Target Tahunan | unan | | Indikatif | | |
|--|--|----------------|---|------------|----------------|-----------|-------------|--|-------------------------|--|
| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 ²⁰ | 2018 2019 | 9 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| 2. Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan | | | | | | | | | | |
| Pengelolalaan terminal | Terminal | unit 5 | 2 | 72 | 9 | 9 | 9 | 1,155 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pemeliharaan terminal | Fasilitas Terminal | unit 5 | .c | r | 9 | 9 | 9 | 1,667 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pengelolaan perparkiran | kendaraan parkir | unit 2 | 245933 260000 270000 280000 290000 300000 | 000 2700 | 00 28000 | 0 290000 | | 2,318 .345 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pengadaan dan pemeliharaan peralatan PKB | peralatan Pengujian | unit 1 | ₽ | н | н | 2 | 9 | 4,735 | APBD | Dinas |
| Pembinaan dan pengawasan angkutan | Kegiatan penyuluhan & data | kali 2 | æ | ю | æ | 8 | 33 | 1,170 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Penyelenggaraan pengujian kendaran bermotor | Kendaraan wajib uji | unit 7 | 7200 7500 | 0 7800 | 8100 | 8200 | 0006 | 2,365 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Analisa pemanfaatan terminal | dokumen | dokume 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Kajian prasarana perhubungan | dokumen kajian | dokume 0 | 0 | Н | ₽ | 0 | н | 940 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pembangunan terminal/halte | Kegiatan pembangunan | jenis 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5,955 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Targ INDIKATOR SDG's 3.7. 1.Program Reluanga Berencana dan Pembinaan Keluanga | Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi danProgram nasional. 3.7.1. Unmetneed KB 3.7.1. Unmetneed KB 1.0.1. Unmetn | esehatan seksı | ıal dan rep | oduksi, te | rmasuk ke | uarga ber | encana, inf | ormasi dan pen | didikan, dar | integrasi |
| Pembinaan masyarakat peduli KB | Terbinanya kelompok masyarakat peduli KB | kelompk 0 | ^ | r | _ | _ | _ | .440 .440 | APBD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Berencana |
| | Terlaksananya sosialisasi unmet need | kali 0 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Terlaksananya lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), KB lestari dan Penyuluh KB | kali 0 | | ю | ю | ю | ж | | | |
| INDIKATOR SDG's | 3.7.1(a) Meningkatnya cakupan CPR (Contraceptive Prevalence Rate) | | | | | | | | | |
| 1.Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Monev pelayanan KB dan pengelolaan Alkon Terb | luarga Terbina dan terlayaninya kepersertaan KB | orang 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | .090 | АРВО | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian |
| INDIKATOR SDG's | 3.7.1(b)Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | ng (MKJP) | | | | | | | | Berencana |
| 1.Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga | luarga | | | | | | | | | |

| | | | | | F | H 400 | 1 | | Attendibed. | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| | | | 40 | | 8 | larget lanunan | nan | | Alokaci | Sumpor | |
| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Pendana an | Instansi Pelaksana |
| Monev pelayanan KB dan pengelolaan Alkon | Terbina dan terlayaninya kepersertaan KB | orang | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | .090 | АРВО | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Retluara |
| INDIKATOR SDG's | 3.7.2(a) Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) per WUS (15-49 tahun) | Ê | | | | | | | | | |
| 1.Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga | targa | | | | | | | | | | |
| Pembinaan masyarakat peduli KB | Terbinanya kelompok masyarakat peduli KB | kelompk | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | .440 | APBD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Berencana |
| | Terlaksananya sosialisasi unmet need | kali | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Terlaksananya lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), KB lestari dan Penyuluh KB | kali | 0 | ъ | e | ю | ю | m | | | |
| | Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang, kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan Program nasional. | risiko keuan ang. kesehat | gan, akse an repro | es terhad duksi ke | ap pelay; dalam str | anan kese ategi dar | shatan da IProgram | sar yang k nasional. | aik, dan akses | terhadap ok | at- obatan dan |
| INDIKATOR SDG's | 3.8.2.(a)Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | | | | | | | | | | |
| L.Program Peningkatan Pelayanan Kesenatan | | : | | | | | | | | | |
| Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah | Terbayarnya premi peserta JKN APBD | | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 00 | 58,057 .790 | APBD | Dinas Kesehatan |
| | Terbayarnya klaim peserta jamkesda | pnlan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| TUJUAN IV Menjamin kualitas pendidikan yang inkl | TUJUAN IV Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua TUJUAN IV Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta menangan tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, | ntuk semua 1 laki- laki me | nyelesai | kan pend | lidikan da | ısar dan r | nenengal | h tanpa di | oungut biaya, s | etara, dan k | erkualitas, |
| INDIKATOR SDG's | yang mengaran pada dapatan pemberajaran yang retevan dan erektri. 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi A | | | | | | | | | | |
| 1.Program Pembinaan sekolah dasar | | | | | | | | | | | |
| Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Satuan Pendidikan SD | Terselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuan pendidikan SD | Sekolah | 20 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,421 .346 | АРВО | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terlaksananya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dagar | Kali | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi A | | | | | | | | | | |
| 2.Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | |
| Pembinaan dan Penlaian Kelembagaan Satuan Pendidikan SMP | Terfaksananya pembinaan dalam rangka pemenuhan akreditasi sesuai 8 standar nasional pendidikan | Sekolah | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 878 .109 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terlaksananya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar | Kali | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Targ | Target Tahunan | u. | | Indikatif | | |
|--|---|---------------|------------------------|------|------|-----------------------|-------|-------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| INDIKATOR SDG's | 4.1.1.(d) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat | | | | | | | | (name) | | |
| 3. Program Pembinaan sekolah dasar | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Sarana pendidikan SD | Peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (prestasi) | Dokume 1 n | | | _ | | _ | π. | 18,756 .000 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Tersedianya media pendidikan | Sekolah | 4 | - | 1 | _ | 1 | 1 | | | |
| | Tersedianya Mebelair meja kursi | Sekolah | 4 | 4 | 1 | _ | - | 1 | | | |
| | Tersedianya koleksi perpustakaan | Sekolah | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Tersedianya peralatan pendidikan (alat peraga) dan olahraga | | | | | | | 7 | | | |
| Penyediaan Biaya Pendidikan SD | Tersedianya biaya operasional sekolah pendidikan SD | | 37 | 4 | 334 | 334 | 334 | 334 | 72,391 .640 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan |
| | | | | | | | | | | | Olahraga |
| Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SD | Terbangunnya/ terehabnya bangunan SD | | 89 | ∞ | 2 | 2 | 7 | 2+125 | 30,044 .600 | АРВО | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terbangunnya/ terehabnya gedung gugus | Gedung | • | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Pengembangan Potensi Siswa SD | Terselenggaranya lomba-lomba di bidang akademik, keagamaan, olahraga, kesehatan, seni, budaya dan lainnya | Kategori | 10 | 01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,041 .824 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Peningkatan MutuPendidikan SD | Terlaksananya peningatan pemahaman terhadap pendidkan kepramukaan Guru | | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,555 .294 | АРВО | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terlaksananya peningkatan pemahaman kurikulum 2013 | | 168 | | | | | 168 | | | |
| | Terlaksananya pendampingan sekolah piloting SD berkarakter | | | | | | | 12 | | | |
| PengembanganProgram pendidikan inklusif jenjang SD | Terfasilitasinya assesment siswa berkebutuhan khusus | Siswa | 225 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 558 .120 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terlaksananya Diklat penanganan anak berkebutuhan khusus bagi guru reguler, manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusif bagi kepala sekolah | Orang | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | |
| Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan SD | Terfasilitasinya bedah kisi kisi US/M, Diklat Penulisan Soal, Latihan US/M | Kegiatan | e. | e e | e. | e. | en en | σ. | 4,427 .752 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap pendataan ujian sekolah Orang | | | 400 | | | | 400 | | | |
| | Terlaksananya peningkatan pemahaman tentang PPBD | | 400 | | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | Terlaksananya peningkatan pemahaman EDS | | | | | | | 400 | | | |
| Pembinaan dan Penilaian | Terselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuan pendidikan | _ | 20 | 120 | 120 | 120 | | | 1,421 | APBD | Dinas |
| Kelembagaan Satuan Pendidikan SD | SD | | | | | | | | .346 | | Pendidikan Pemuda dan |
| | | | | | | | | | | | Oldinaga |

| | | | | | Tar | Target Tahunan | Jan | | Indikatif | | |
|---|--|------------------|------------------------|------|------|----------------|------|------|--|-------------------------|---|
| Prograi | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| | Terlaksananya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar | Kali | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| INDIKATOR SDG's | | | | | | | | | | | |
| 1.Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Mutu Pendidikan SMP | Meningkatnya pemahaman terhadap implementasi K13, Terselenggaranya Diklat Teknis Mahir Dasar bagi Pembina Pramuka, Meningkatnya kualitas pelayanan UKS | Sekolah | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | .784 | APBD I | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Pengembangan Potensi Siswa SMP | Terselenggaranya lomba-lomba di bidang akademik, keagamaan, olahraga, Sekolah kesehatan, seni, budaya dan lainnya | Sekolah | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 2,716 .184 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Penyediaan Biaya Pendidikan SMP | Terpenuhinya penyediaan biaya pendidikan SMP (36 sekolah negeri) dan fasilitasi penyediaan BBPD 43 SMP Swasta/MTs, terfasilitasinya operasional sekolah unggulan sains, olahraga dan seni budaya | Sekolah | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 47,513 .000 | APBD P | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan SMP | Terfasilitasinya ujian SMP/MTs, tersosialisasikannya POS ujian, tersusunnya Sekolah Master Soal, terlaksananya bedah kisi-kisi ujian, terlaksananya PPDB Online, tersosialisasikannya SOP MOS | a Sekolah | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 2,299 | APBD I | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Pengadaan SaranaPendidikan SMP | Sarana Pendidikan dan Media Pembelajaran Yang Lengkap dan Kondisi Baik Sekolah | k Sekolah | 28 | ∞ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,300 | APBD F | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Pembangunan/RehabilitasiPrasarana SMP | Relokasi Sekolah | Sekolah | | н | П | П | 1 | н | 13,000 | APBD I | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Pembangunan/ rehabilitasi Prasarana SMP | Sekolah | 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| PengembanganProgram Pendidikan inklusif Jenjang SMP | Terlaksananya peningkatan pemahaman guru reguler terhadap pendidikan inklusi | Orang | 108 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | .861 | APBD I | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Pembinaan dan Penilalan Kelembagaan Satuan Pendidikan SMP | Terlaksananya pembinaan dalam rangka pemenuhan akreditasi sesuai 8 standar nasional pendidikan | Sekolah | 50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 878 .109 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terlaksananya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar | Kali | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| INDIKATOR SDG's 1. Program Pembinaan PAUD dan PNF | 4.1.1.(g) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun | hun | | | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan | Tersalurnya dana operasional pendidikan keaksaraan | Warga Belajar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1,553 | APBD G | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Tersalurnya dana operasionalProgram paket B dan Paket C | Warga Belajar | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | | | |

| | | | | | ļ | | | | A to a filter of | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------|-----------|----------|---------------|----------|----------|-------------------------------------|---------------|---|
| | | | Tahun | | 20 | arget lanunan | Ē | | Alokasi | Sumber | |
| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Pendana an | Instansi Pelaksana |
| | Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar | n lakilaki men Jh pendidikan | ılliki akse dasar | s terhada | p perken | bangan | dan peng | asuhan a | nak usia dini, p | engasuhan, | pendidikan |
| INDIKATOR SDG's 1.Program Pembinaan PAUD dan PNF | 4.2.2. (a) Angka Partisipasi PAUD | | | | | | | | | | |
| Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana PAUD dan PNF | Terbangunnya/terpeliharanya prasarana PAUD dan PNF | Lembaga | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 992 .200 | АРВО | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Pengadaan Sarana PAUD dan PNF | Tersedianya sarana PAUD dan PNF | Lembaga | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | .000 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Penyelenggaraan Kelembagaan PAUD dan PNF | Terlaksananya pembinaan kelembagaan PAUD dan PNF | Lembaga | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | .400 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Penyelenggaraan PAUD dan PNF | Terfaksananya gebyar PAUD | Orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3,056 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terlaksananya peningkatan pemahaman pendidikan karakter | Lembaga | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | | | |
| | Tersedianya data peserta didik PAUD dan PNF | Lembaga | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | | | |
| | Terlaksananya peningkatan pemahaman tentang BOP | Lembaga | | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | | | |
| | Terlaksananya peningkatan pemahaman tentang APBS/RKAS | Lembaga | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | | | |
| | Terlaksananya lomba sekolah sehat dan lomba kreatifitas anak | Lembaga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Terselenggaranya Program paket A, B, C dan kursus ketrampilan di SKB | Lembaga | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Tersalurnya dana BOP sekolah negeri | Lembaga | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | |
| Pemberdayaan Anak Putus Sekolah | Terfaksananya peningkatan ketrampilan bagi anak putus sekolah | Warga Belajar | 09 | | 09 | 09 | 09 | | .200 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan | Tersalurnya dana operasional pendidikan keaksaraan | Warga Belajar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1,553 | АРВО | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Tersalurnya dana operasionalProgram paket B dan Paket C | Warga Belajar | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | | | |
| Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Satuan PAUD dan PNF | Terselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuan PAUD dan PNF | Lembaga | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 303 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Ter Kurikukulum PAUD dan PNF | Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kurikulum PAUD dan PNF | Lembaga | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,321 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Terlaksananya Evaluasi Hasil Belajar (EHB) dan Ujian KesetaraanProgram Paket A, Paket B dan Paket C | Paket | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | | | |

| | | | | | Tar | Target Tahunan | Jan | | Indikatif | | |
|---|---|------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-------------|--|-------------------------|--|
| Progr | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| | Terlaksananya pelatihan implementasi Kurikulum Satuan PAUD dan PNF, Lomba kesetaraan, LKP, PKBM, TBM | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| INDIKATOR SDG's | Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. | kelompok de | ewasa ter | tentu, ba | ik laki-lal | i maupu | n peremp | uan, men | ıiliki kemampu | an literasi d | an numerasi. |
| 1.Program Pembinaan PAUD dan PNF | | | | | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan | Tersalurnya dana operasional pendidikan keaksaraan | Warga Belajar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1,553 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Tersalurnya dana operasionalProgram paket B dan Paket C | Warga Belajar | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | | |) |
| INDIKATOR SDG's | 4.6.1.(b) Persentase Angka Melek Aksara penduduk usia 15-24 tahun dan usia 15-59 tahun | ısia 15-59 tal | unu | | | | | | | | |
| arrogram Pendidikan Kesetaraan dan Reaksaraan | Tersalurnya dana operasional pendidikan keaksaraan | Warga Belajar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | .400 | APBD | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Tersalurnya dana operasionalProgram paket B dan Paket C | Warga Belajar | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | | | 1 |
| TUJUAN V Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan | perdayakan kaum perempuan | | | | | | | | | | |
| | Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun. | an di mana p | 'n. | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 5.1.1. Cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender | n dan pengarusutamaan gender | | | | | | | | | | |
| Pemberdayaan lembaga berbasis Gender | Tersusunnya laporan lembaga berbasis gender | dok | Ħ | H | н | н | Ħ | н | 266 .810 | АРВО | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | terkoordinasinya lembaga berbasis gender | kali | 3 | 3 | 3 | 3 | æ | 3 | | | |
| | Terfasilitasinya koordinasi GOW | kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Peningkatan Peran Wanita | Terbinanya kewirausahaan bagi perempuan miskin | desa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 286 .160 | АРВО | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Terbinanya kelompok P2WKSS dan desa prima serta pemberdayaan ekonomi perempuan | kali | ₽ | П | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Penguatan Pengarustamaan Gender | Tersusunnya profil pengarus utamaan gender (PUG) Kabupaten | dok | п | п | н | н | П | н | .520 | APBD | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Tersusunnya laporan evaluasi PUG, PP dan PA Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG | laporan kali | | | | | нн | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Targ | Target Tahunan | E | | Indikatif | | |
|--|---|--------------|------------------------|-----------|------------|----------------|---------|------------|--|-------------------------|---|
| Prograi | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| | Terselenggaranya Konsultasi PPRG dan ARG | kali | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | |
| | Target 5.2 Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai ienis eksploitasi lainnya. | uan di ruan | g publik da | ın pribad | i, terması | uk perdag | angan m | anusia dar | ı eksploitasi s | eksual, sert | ı berbagai |
| INDIKATOR SDG's | 5.2.1. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anal | an Anak | | | | | | | | | | |
| Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak orang | orang | 36 | 36 | 36 | 98 | 36 | 36 45 | 494.760 | APBD | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Terlaksananya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan | orang | | 100 | 105 | 110 | 10 | 120 | | | |
| | Jumlah Satgas TPPO yang dibentuk di desa rawan TPPO | kel | | 0 | 0 | | | 61 | | | |
| Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan | Terkoordinasikannya FPKK tingkat Kabupaten dan Kecamatan | forum | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 4. | .480 | APBD | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan |
| | Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kecamat an | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Tersusunnya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan | Perbup | п | 1 | 1 | | - | 1 | | | |
| | Terlatihnya kader perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat | orang | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | | | |
| INDIKATOR SDG's 5.2.1(| 5.2.1(a) Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | | | | | | | | | | |
| L.Frogram Fermigkatan Ferminungan Ferempuan da Pembinaan Kabupaten Layak Anak | an Anjan Terkoordinasikannya forum anak kulon progo dan forum anak kecamatan | kali | 7 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 26 | 264 | APBD | Dinas Sosial |
| | | | | | | | | Η. | .190 | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Terkoordinasikannya gugus tugas kabupaten layak anak | kali | | | | 4 | | _ | | | |
| | Terlaksananya pembinaan kabupaten layak anak | kali | 6 | 6 | 6 | | | 6 | | | |
| Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak orang | orang | | | | 10 | | 36 49 | .760 | APBD | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Terlaksananya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan Jumlah Satgas TPPO yang dibentuk di desa rawan TPPO | orang kel | 0 0 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 61 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Targe | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|
| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan | Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Terkoordinasikannya FPKK tingkat Kabupaten dan Kecamatan Anak korban kekerasan | forum | 13 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 | .480 | APBD | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan |
| | Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kecamat 12 an | kecamat 1 | 12 12 | 2 12 | | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Tersusunnya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan | dnq. | 1 1 | 1 | | 1 | T | 1 | | | |
| | Terlatihnya kader perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat orang 220 220 220 220 220 220 Terlatihnya kader perlindungan perempuan anak berbasis masyarakat orang 220 220 220 220 Terlatihnya kader perlindungan perempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, akanan anakan perempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik. | orang Z ma bagi pere | 220 2: rempuan ur | 220 2 untuk men | 220 mimpin d | 220 di semua | 220 tingkat p | 220 engambi | lan keputusan c | lalam kehic | upan politik, |
| INDIKATOR SDG's 5.5.J.Persyndan megyanakia: 1.Program Peningkatan pemberdayaan perempuan dan penansutamaan genderi | Scottoring an integrational. Society of the properties of the prop | rah (DPRD). | | | | | | | | | |
| Penguatan Pengarustamaan Gender | Tersusunnya profil pengarus utamaan gender (PUG) Kabupaten | do | 1 | 1 | | 1 | П | н | 247 .520 | APBD | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Tersusunnya laporan evaluasi PUG, PP dan PA | ran | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG | | 1 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Terselenggaranya Konsultasi PPRG dan ARG | kali (| 0 0 | 48 | | 48 | 48 | 48 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 5.5.2. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III). | di lembaga e | ksekutif (E | selon II c | an III). | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender | dan pengarusutamaan gender | | | ľ | | | | | | | |
| Penguatan Pengarustamaan Gender | Tersusunnya profil pengarus utamaan gender (PUG) Kabupaten | X Op | _ | П | `` | | н | н | 247 .520 | APBD | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Tersusunnya laporan evaluasi PUG. PP dan PA | laporan 1 | - | - | | - | _ | - | | | |
| | Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG | | | | | | | | | | |
| | ıRG | | 0 0 | 4 | 48 | 00 | 48 | 48 | | | |
| | Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. | duksi, dan ha latform serta | ak reprodu I dokumen | csi seper- dokume | ti yang te n hasil n | elah dise eviu dari | pakati se konfere | suai den nsi-konf | ganProgramme erensi tersebut. | of Action c | if the |
| INDIKATOR SDG's | 5.6.1(a) Menurunnya unmetneed kebutuhan ber-KB | | | | | | | | | | |
| 1.Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Pembinaan masvarakat peduli KB | iarga Terbinanya kelomook masyarakat peduli KB | kelombk | 0 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 417 | APBD | Dinas |
| | | | | | | | | | .440 | | Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| | | | | | Targe | Target Tahunan | | - | Indikatif | | |
|--|--|---------------------------|------------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2 | 2022 Ar | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| | Terlaksananya sosialisasi unmet need | | 0 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| | Terlaksananya lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), KB lestari dan Penyuluh KB | kali | 3 | | | | m | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 5.6.1(b) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis melalui sosialisai | (PUS) tentai | g metod | e kontrase | psi mode | rn minin | ıal 4 jenis ı | nelalui sos | ialisai | | |
| Arrogenia dan KIE Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) | Tersosialisasinya dan teradvokasinyaProgram KKBPK dengan metode KI E | Kali | 0 | m | m | m | m | .980 | | APBD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Terpromosikannya Program KKBPK melalui Harganas | | 0 | | | 1 | | | | | |
| | Terlaksananya lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), KB lestari dan Penyuluh KB | kali | | 3 | | æ | 3 | | | | |
| TUJUAN VI Menjamin ketersediaan serta pengelola: | TUJUAN VI Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua | | | | | | | | | | |
| | Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | air minum | ang ama | n dan terj | angkau ba | agi semua | ÷ | | | | |
| INDIKATOR SDG's 6.1.1(a) Cakupan rumah tangga 1. Program Pembangunan Pengembangan Sarana Pragrama Air Minum dan Sanitasi | 6.1.1(a) Cakupan rumah tangga berakses air bersih asarana Air Minum dan Sanitasi | | | | | | | | | | |
| Dominalizar Carana Air Boreik | I malak zumak tangan baraksas air baraih | 2 | 1 697201 | 1 61600 | 10062 1 | 1 2462 1 | 02762 112862 112862 112862 115862 | 703 2 6373 | | Uddy | Cinc |
| renyeuran salaha An bersin | Julina'i Tangka beraksis ali bersin | | 6 | 1 51760 | 5000 | T C460 | 11 60661 | | | | Pekerjaan Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| INDIKATOR SDG's | 6.1.1(b) Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani | | | | | | | | | | |
| 1.Program Pembangunan, Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi | rasarana Air Minum dan Sanitasi | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Sarana Air Bersih | Jumlah rumah tangga berakses air bersih | ¥ | 107463 1 | .09213 1 | 10963 1: | 12463 1 | 13963 11 | 107463 109213 110963 112463 113963 115463 6,507 642. | | APBD | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| INDIKATOR SDG's | 6.1.1(c) jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun) | | | | | | | | | | |
| 1. Program Pembangunan, Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi | rasarana Air Minum dan Sanitasi | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Sarana Air Bersih | Jumlah rumah tangga berakses air bersih | ¥ | 107463 1 | .09213 1 | 10963 1: | 12463 1 | 13963 11 | 107463 109213 110963 112463 113963 115463 6,507 .642 | £ | APBD | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| | Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | an yang mer ompok masy | nadai dar arakat re | ı merata k ıtan. | agi semu | a, dan m | enghentik | ın praktik | buang air be | sar di temp | at terbuka, |
| INDIKATOR SDG's 6.2.1(b) Cakupan rumah tangga 1 Program Pembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi | 6.2.1(b) Cakupan rumah tangga dengan layanan air limbah asarana Air Minum dan Sanitasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 3 | a Beet annual | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|------------------|------------|--|--------------|--|
| | | | Table | | | | | | Alokaci | Simpor | |
| Progran | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | _ | Instansi Pelaksana |
| Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar | Jumlah rumah tangga berakses air limbah | 춪 | 51228 | 56228 | 61228 | 66228 | 71228 | 76228 | 2,334 | АРВО | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| INDIKATOR SDG's | 6.2.1(c) Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanaka Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Masyarakat | (STBM) | | | | | | | | |
| 1. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penyehatan Sanitasi Lingkungan | Terfasilitasinya desa STBM | desa | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 545 | APBD | Dinas |
| NDIKATOR SDG's | 6.2.1(d) Iimlah desa/kelinahan yang Open Deferation Free (ODE)/ Ston Bijang Air Besar Sembarangan (SRS) | Hang Air Rec | ar Sembar | S) ueaues | RS) | | | | .645 | | Kesehatan |
| 1. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Secretary samples are all young oben conceasions of the property of the proper | | | 2) | | | | | | | |
| Penyehatan Sanitasi Lingkungan | Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi stop BABs/ STBM | DEsa | 6 | 6 | 6 | o o | 6 | 6 | 545 .645 | APBD | Dinas Kesehatan |
| INDIKATOR SDG's | Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. 6.5.1.(al) Jumlah DAS | rpadu di sem | nua tingka | tan, term | asuk mel | alui kerja | sama lint | as batas y | ang tepat. | | |
| 1.Program Perencanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| renyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci | Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Jumlah substansi dokumen perencanaan tata ruang | Dokume | 4 | r. | 13 | 15 | 18 | 18 | 3,134 | APBD | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| INDIKATOR SDG's | 6.5.1.(g) Cakupan kelembagaan petani pengelola air yang diberdayakan | | | | | | | | | | |
| 1.Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air | vasi Sumber Daya Air | | | | | | | | | | |
| Peningkatan pengeldiaan irigasi partisipatif | Pendampingan / Pemberdayaan P3A/GP3A | GP3A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9,228 .520 | АРВО | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| INDIKATOR SDG's | 6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan | i konservasi s | umber da | aya air di | daerah hi | ilu DAS s | erta sum | ur resapar | _ | | |
| olaan dan Konservasi lingkungan hi | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan konservasi lingkungan hidup | Pohon perindang jalan | batang | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 2,219 .800 | APBD | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Sumur resapan | nnit | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | | | |
| | Tanaman di daerah tangkapan, sekitar mata air dan sempadan sungai | batang | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| 'UJUAN VIII : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | TUJIAN VIII : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Tajeta 8.1. Tajeta 8.1. Tajeta 8.1. Tajeta 8.1. Tajeta 8.1. Tajeta 8.1. Tajeta 9.1. Tajeta | enyeluruh, s ngan kondisi i | erta peke nasional c | rjaan yar Ian, khus | ig layak u usnya, se | ntuk ser tidaknya [·] | iua. 7% pertu | mb uhan p | roduk domest | ik bruto per | tahun |
| INDIKATOR SDG's | 8.1.1 Pendapatan per kapita | | | | | | | | | | |
| 1. Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Data Informasi Statistik | ta Informasi Statistik | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Data Statistik Daerah | analisis ekonomi makro | dokume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 298 | APBD | Dinas |
| | | c | | | | | | | 5/8: | | Komunikası dan Informatika |
| | Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong | atan produkti | if, pencipt | aan lapar | ıgan keri | a layak, ke | ewirausa | haan, krea | tivitas dan inc | vasi. dan m | ndorong |

| | | | · | | Tar | Target Tahunan | nan | | Indikatif | | |
|---|--|-----------------|------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|------------|--|-------------------------|---|
| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| INDIKATOR SDG's | 8.3.1 Cakupan penempatan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja | | | | | | | | | | |
| 1. Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan penempatan tenaga kerja | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan | Orang | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 943 .107 | APBD | Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi |
| Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja | Jumlah pencaker yang dilatih | Orang | 64 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 4,548 .031 | APBD | Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi |
| INDIKATOR SDG's | 8.3.1(b) Jumlah petani | | | | | | | | | | |
| i.rrogram Pemberdayaan Peyuuhan Pemberdayaan Kelembagaan Tani | Peningkatan kelas kelompok | kelompo 60 k | 09 | 64 | 70 | 92 | 83 | 06 | 611 .225 | APBD | Dinas Pertanian dan |
| INDIKATOR SDG's | 8 3 1(c) lumlah modal HMKM dari kemitraan kenangan | | | | | | | | | | Pangan |
| 1. Pengembangan Permodalan KUMKM | מיני בייני ב | | | | | | | | | | |
| Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha KUMKM. | Sosialisasi/ koordinasi kemitraan dengan perbankan/BUMN/BUMD | KUMKM | 0 | 0 | 0 | 06 | 06 | 06 | 282 .010 | APBD | Dinas Koperasi dan UMKM |
| | Bantuan penguatan modal | KUMKM | 0 | 0 | 0 | 06 | 06 | 06 | 343 .640 | APBD | Dinas Koperasi dan UMKM |
| | Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | pekerjaan yar | ng layak t | oagi sem | a perem | puan dar | ı laki-laki, | termasu | k bagi pemuda | dan penyan | dang difabilitas, |
| INDIKATOK SDG's 1. Perlindungan Ketenagakerjaan | 8.5.2 Angka pengangguran terbuka | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Kebijakan Pengupahan | Jumlah dokumen usulan penetapan KHL dan UMK | dokume n | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 332 .871 | APBD | Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi |
| 2. Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) | Jumlah dokumen PTKD | dokume n | н | н | П | 1 | T- | н | 42 .515 | APBD | Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi |
| | Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. | muda yang tic | lak beker | ja, tidak | menemp | ıh pendi | dikan ata | u pelatiha | Ju. | | |
| INDIKATOR SDG's | 8.6.1 Cakupan penempatan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja | | | | | | | | | | |
| 1. Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pelayanan penempatan tenaga kerja | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan | Orang | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 943 | APBD | Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi |
| Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja | Jumlah pencaker yang dilatih | Orang | 64 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 4,548 .031 | APBD | Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi |
| | Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | k mempromo | sikan par | iwisata b | erkelanju | tan yang | mencipt | akan lapa | ngan kerja dan | mempromo | sikan budaya |
| INDIKATOR SDG's | 8.9.1(a) Jumlah kunjungan wisata | | | | | | | | | | |
| 1. Peningkatan Pemasaran Wisata Pengembangan Jaringan Kerjasama Pemasaran | Maningkatnya iumlah iaringan keria cama nemacaran nromosi dan edukasi | % | 33 | 3.4 | 20 | 28 | 3.4 | 34 | 658 | APRD | Dinac |
| Promosi dan Edukasi Pariwisata | pariwisata | : | | | 2 | } | | | .615 | | Pariwisata |
| Pemasaran dan Promosi Pariwisata | Meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata | % | 33 | 31 | 34 | 31 | 32 | 32 | 712 .091 | APBD | Dinas Pariwisata |

| | | | | | Targ | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------|------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana . an | Instansi Pelaksana |
| Pengelolaan Atraksi Wisata | Meningkatnya pengelolaan atraksi wisata | % | 33 | 34 | 35 | 40 | 34 | 34 | 812 | APBD | Dinas Pariwisata |
| INDIKATOR SDG's | 8.9.2 Cakupan peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM | nbangan kap | asitas kele | mbagaan | dan SDN | Ę | | | | | |
| Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kualitas kelembagaan | % | 20 | 18 | 37 | m | 22 | 27 | 1,086 | APBD | Dinas |
| Kwalitas Kelembagaan Pariwisata | pariwisata | ; | | | | | | | .311 | | Pariwisata |
| Peningkatan Kwalitas Usaha dan Jasa Pariwisata | Meningkatnya kualitas jasa usaha pariwisata | % | 00 | 16 | ത | 11 | 19 | 25 | 518 .251 | APBD | Dinas Pariwisata |
| INDIKATOR SDG's | Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. 8.10.1. Cakupan BUMD dan lembaga keuangan berkinerja baik | ndorong dan | memper | as akses | terhadap | perbanl | can, asur | ansi dan | jasa keuangan | bagi semua. | |
| 1. Peningkatan BUMD dan Lembaga Keuangan | | | | | | | | | | | |
| Monev pelaksanaan kebijakan bidang lembaga keuangan pedesaan | Dokumen monev pelaksanaan kebijakan bidang lembaga keuangan pedesaan | dokume | 88 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 235 | APBD | Sekretariat Daerah |
| Monev BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah (LKD) | Laporan hasil monev pelaksanaan kebijakan bidang BUMD, laporan hasil monev BUKP, laporan hasil pelaksanaan kegiatan TSP/CSR | dokume | 2 | en en | m | 8 | m | 8 | 665 .970 | APBD | Sekretariat Daerah |
| | Kajian tentang BUMD/BUKP/CSR | dokume | 0 | T | τ. | 1 | 4 | 1 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 8.10.1.(b) Indeks permodalan KUMKM | | | | | | | | | | |
| 1. Pengembangan Permodalan KUMKM | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha KUMKM. | Sosialisasi/koordinasi kemitraan dengan perbankan/BUMN/BUMD | KUMKM | 06 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 84 .640 | APBD | Dinas Koperasi dan UKM |
| Pemantauan pengelolaan penggunaaan dana pemerintah bagi KUMKM | Pemantauan pengelolaan dan koordinasi penggunaaan dana pemerintah bagi KUMKM | KUMKM | 30 | 30 | 30 | | 30 | 30 | 94 .140 | APBD | Dinas Koperasi dan UKM |
| | Pemantauan penyaluran modal bagi KUMKM | KUMKM | | 30 | 25 | | 20 | 30 | | | |
| PROGRAM: Pengembangan Permodalan KUMKM | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha KUMKM. | Sosialisasi/koordinasi kemitraan dengan perbankan/BUMN/BUMD | KUMKM | 06 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 84,640 .000 | APBD | Dinas Koperasi dan UKM |
| | Pembentukan jaringan kerja sama TOMIRA | jaringan | 0 | 0 | 1 (| 0 | 0 | 0 | | | |
| TUJUAN 9 : Membangun infrastruktur yang tanggul | TUJUAN 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, sera mendorong inovasi. Target 9.1 Megembangkan infrastruktur yang berkualitas, andbi berkualitas, andbi berkualitas, andbi berkualitas, andbi semasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan keselahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semasu. | asi. njutan dan ta ngkau dan me | ngguh, te erata bagi | masuk in semua. | frastrukt | ur region | al dan lir | ıtas batas | s, untuk mendı | ukung pemba | ngunan |
| INDIKATOR SDG's | 9.1.1(a) Capaian panjang jalan penghubung antar wilayah dalam kondisi baik | ÷ | | | | | | | | | |
| | Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. | pada tahun 2 ali lipat prop | :030, seca orsinya di | a signifik negara ku | an menin rang berl | gkatkan cembang | proporsi | industri | dalam lapanga | n kerja dan p | roduk |
| INDIKATOR SDG's | 9.2.1(a) Indeks Pertumbuhan Industri | | | | | | | | | | |
| 1. Pengembangan Industri | | | | | | | | | | | |
| Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Sandang,Kulit dan Kerajinan | Pendampingan/ Peningkatan Kapasitas Sentra | bulan/ sentra | | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2,550 .240 | APBD | Dinas Perdagangan |
| Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Agro,Makanan dan Minuman | Pendampingan/ Peningkatan Kapasitas Sentra | bulan/ sentra | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,259 .300 | APBD | Dinas Perdagangan |
| Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Logam, Kimia dan Aneka | Pendampingan/ Peningkatan Kapasitas Sentra | bulan/ sentra | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,634 | APBD | Dinas Perdagangan |
| | Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. | inya di negar | a berkem | ang, terh | adap jas | a keuang | an, term | asuk krec | dit terjangkau, | dan mengint | egrasikan ke |
| INDIKATOR SDG's | 9.3.1 Jumlah nilai usaha industri tahun ke-n | | | | | | | | | | |
| 1 Pengembangan dan permodalan KUMKM | | | | | | | | | | | |

| | | | | | F | Target Tahinan | nec | | Indikatif | | |
|--|---|-------------|---------------|----------|----------|----------------|-----------|----------|--|-------------------------|---|
| | | | 40 | | 5 | 200 | 5 | | Makadi | 3 | |
| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokası Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha KUMKM. | Sosialisasi/koordinasi kemitraan dengan perbankan/BUMN/ BUMD | KUMKM | 0 | 0 | 0 | 06 | 06 | 06 | 282 .010 | APBD | Dinas Koperasi dan UKM |
| | Bantuan penguatan modal | KUMKM | 0 | 0 | 0 | 06 | 06 | 06 | 343 | APBD | Dinas Koperasi dan UKM |
| 2. Pengembangan Industri | | | | | | | | | | | |
| Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Sandang,Kulit dan Kerajinan | Pengembangan jaringan usaha/temu usaha | orang | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2,550 .240 | APBD | Dinas Perdagangan |
| Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Agro,Makanan dan Minuman | Pengembangan jaringan usaha/temu usaha | orang | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4,259 | APBD | Dinas Perdagangan |
| Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Logam,Kimia dan Aneka | Pengembangan jaringan usaha/temu usaha | orang | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2,634 | APBD | Dinas Perdagangan |
| INDIKATOR SDG's 1. Pengembangan Industri | 9.3.2 Jumlah industri berizin | | | | | | | | | | |
| Penumbuhan dan pengembangan usaha industri berbasis sandang kulit dan kerajinan | Pembinaan manajemen produksi | orang | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2,550 | APBD | Dinas Perdagangan |
| | Sosialisasi legalitas usaha | orang | 0 0 | 09 | 09 | 90 | 90 | 06 26 | | | |
| Penumbuhan dan pengembangan usaha industri | Pengembangan Jaringan Usana Temu Usana Pembinaan manajemen produksi | orang | 78 | 25 | 70 | 20 20 | 20 20 | 20 | 4,259 | APBD II | Dinas |
| berbasis agro makanan dan minuman | Socialisasi lagalitas usaha | Orang | | 9 | 9 | G | G | G | .300 | | Perdagangan |
| | Pengembangan jaringan usaha/temu usaha | orang | | 3 , | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Logam,Kimia dan Aneka | Pembinaan manajemen produksi | orang | e | | | | | | 2,634 | APBD | Dinas Perdagangan |
| | Sosialisasi legalitas usaha | orang | 06 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | | | |
| | Pengembangan jaringan usaha/temu usaha | orang | | , | 15 | 20 | 20 | 20 | | | |
| TUJUAN X Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara | negara. | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | Targget 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi adi rata-rata nasional. 10.11 Gini ratio | nkan pertur | d upan b | endapata | n penduc | uk yang l | oerada di | bawah 40 | % dari popula: | si pada tingk | at yang lebih |
| 1. Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Data Informasi Statistik | ta Informasi Statistik | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Data Statistik Daerah | analisis ekonomi makro | dokume | н | 1 | 1 | н | н | П | 867 | APBD | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| INDIKATOR SDG's | 10.1.1(a) Angka kemiskinan | | | | | | | | | | |
| 1. Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Data Informasi Statistik | ta Informasi Statistik | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Data Statistik Daerah | analisis ekonomi makro | dokume | н | 1 | н | н | н | н | 867 | APBD | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2. Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan | Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) | Dokume n | П | T | 1 | П | 1 | 11 | 537 .237 | APBD | Bappeda |
| | Rencana Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | Dokume n | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | Tari | Target Tahunan | Jan | | Indikatif | | |
|--|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------|------------|------------|--|-------------------------|--|
| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| INDIKATOR SDG's | Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. 10.3.1(b) Tersedianya dokumen RANHAM | an hasil, tern tersebut. | nasuk den | gan men | ghapus h | ıkum, ke | bijakan d | an praktik | yang diskrimin | atif, dan me | mpromosikan |
| 1.Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum | an dan Bantuan Hukum | | | | | | | | | | |
| Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) | Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasil evaluasi | dokume n | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 114 | APBD | Sekretariat Daerah |
| | Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. | erlindungan s | osial, ser | a secara | progresif | mencapa | i kesetar | aan yang | ebih besar. | | |
| INDIKATOR SDG's | 10.4.1(a) Indeks Perlindungan Sosial | | | | | | | | | | |
| 1.Program Perlindungan Sosial Peningkatan kualitas nelayanan PMKS | Terfacilitacinya nendampingan SI RT | Orang | XX | 38 | 38 | 38 | 38 | 88 | 5 5.45 | APRD | Dinas Sosial |
| relingatein kaaliuss perayailaii riviko | יבו פאוונפאוואס לאובירמאוואי וקאון סבראו | 20 5 | e n | 0 | 0 | 0 | o n | | .410 | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Terfasilitasinya pendampingan KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah) | orang | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | | | |
| | Tersosialisasikannya mekanisme pemberian bantuan | kali | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial | orang | 2000 | 4362 | 4362 | 4362 | 4362 | 4362 | | | |
| | Tersedianya dan tersalurkannya bantuan bagi PMKS | orang | 1357 | 1432 | 1489 | 1522 | 1552 | 1600 | | | |
| | Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan | an, berkala d | an bertan | ggung jav | vab, term | asuk me | lalui pene | erapan kel | oijakan migrasi | ang terenca | ana dan |
| | terkelola dengan baik. | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 10.7.2(a) Capaian penempatan transmigran | | | | | | | | | | |
| L.Program Penempatan Iransmigrasi | | | | | | | | | , | | |
| Penyiapan Tansmigran | Juman sosiaisasi Program transmigrasi | k k | × | × | × | × | × | × | 41 <i>2</i> .553 | APBD | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Jumlah calon transmigran yang dibina | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Penyelenggaraan kerjasama transmigrasi | Jumlah KSAD bidang transmigrasi | Lokasi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 203 | APBD I | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Penem patan Transmigrasi | Jumlah transmigran yang ditempatkan | ž | 18 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 591 .743 | APBD I | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| INDIKATOR SDG's | 10.7.2(b) Jumlah penempatan tenaga kerja | | | | | | | | | | |
| 2. Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan penempatan tenaga kerja | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan | Orang | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 943 .107 | APBD | Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi |
| Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja | Jumlah pencaker yang dilatih | Orang | 64 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 4,548 .031 | APBD | Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi |
| TUJUAN XI : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. | usif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. | | | | | | | | | | |
| | Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. | mahan yang l | ayak, ama | n, terjan _i | gkau, terr | nasuk pe | nataan k | awasan ku | ımuh, serta aksı | es terhadap | pelayanan |
| INDIKATOR SDG's 11.1.1.(a).Persentase 1.Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat | 11.1.1.(a).Persentase rumah layak huni dan Permukiman Sehat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | F | Topret TopreT | 2 | | italibal | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | 1 1 | | 8 | ברומומ | Ē | | III di katil | 304 | |
| Progr | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokası Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Pendana an | Instansi Pelaksana |
| Pemberdayaan peningkatan infrastruktur oleh komunitas | Jumlah rumah layak Huni | unit | 88 777, | 89 ,477 | 90 | 90,877 | 91 ,577 | 92 772, | 5,317 .710 | АРВО | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. | ortasi yang ar gan memberi | nan, terja perhatiar | ngkau, m khusus p | udah dial ada kebu | ses dan tuhan m | berkelan ereka yar | jutan unt ng berada | uk semua, men ı dalam situasi ı | ingkatkan ke entan, perer | selamatan lalu npuan, anak, |
| INDIKATOR SDG's | 11.2.1.(a). Cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan | | | | | | | | | | |
| 1. Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Pengelolalaan terminal | Terminal | unit | 2 | | ıs | 9 | 9 | 9 | 1,155 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pemeliharaan terminal | Fasilitas Terminal | nnit | r. | 2 | ı, | 9 | 9 | 9 | 1,667 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pengelolaan perparkiran | kendaraan parkir | nnit | 245933 | 245933 260000 270000 280000 290000 300000 | 270000 | 280000 | 290000 | 300000 | 2,318 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pengadaan dan pemeliharaan peralatan PKB | peralatan Pengujian | nnit | 1 | 1 | н | 1 | 2 | 9 | 4,735 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pembinaan dan pengawasan angkutan | Kegiatan penyuluhan & data | kali | 2 | 3 | 8 | cc | 6 | 8 | 1,170 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Penyelenggaraan pengujian kendaran bermotor | Kendaraan wajib uji | nnit | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 | 8200 | 0006 | 2,365 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Analisa pemanfaatan terminal | dokumen | dokume n | m | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Kajian prasarana perhubungan | dokumen kajian | dokume | 0 | 0 | T- | 1 | 0 | 1 | 940 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pembangunan terminal/halte | Kegiatan pembangunan | jenis | 0 | 2 | ı, | 2 | 0 | 0 | 5,955 | APBD | Dinas Perhubungan |
| INDIKATOR SDG's 1.Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan | 11.2.1.(b).Cakupan tertib lalu lintas jalan | | | | | | | | | | |
| Pengendalian dan pengamanan lalu lintas | Usaha pengendalian pengamanan lalu litas | Kegiatan | r. | 2 | ıs | ıs | 2 | r. | 2,384 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Peningkatatan keselamatan LLAJ | Usaha peningkatan keselamatan LLAJ | kegiatan | .c | 2 | ıs | .c | 2 | S | 1,887 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pemeliharaan fasilitas LLAJ | Perlengkapan jalan dalam kondisi baik | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,828 | APBD | Dinas |
| Pemeliharaan Rutin LPJU | LPJU dalam konsisi baik | titik | 1682 | 1807 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 2,623 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pembangunan Perlengkapan Jalan | Perlengkapan jalan | jenis | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6,274 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pembangunan LPJU | Lampu Penerangan Jalan Umum | titik | 278 | 193 | 450 | 490 | 520 | 530 | 22,750 .442 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Peningkatan Manajemen Lalu Lintas | Dokumen evaluasi Andalalin, Survey Lalu lintas & Saksi Ahli | dokume n | ю | e | ю | æ | 6 | ю | 1,055 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Pengelolaan database | Database perhubungan | dokume n | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 190 | APBD | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | ' | | Targ | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|---|------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|-------------------------|--|
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| Perencanaan lalu lintas | Dokumen rencana induk & analisa | dokume n | na | 0 | 0 | 1 | 1 | τ | 710 | APBD | Dinas Perhubungan |
| Target 11.3 Pada tahu terintegrasi di semua iNDIKATOR SDG's 11.3.1.Cakupan lingku I.Proeram Peneembangan Lingkumaan Perumahan dan Perumukinan Sehat i | Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. 11.3.1. Cakupan sehat permukiman dan perumahan 11.3.1.dan jakungan sehat permukiman dan perumahan | kelanjutan sı | erta kapas | itas parti | sipasi, pe | rencana | an penan | ganan pe | rmukiman yang | ; berkelanju | tan dan |
| Penyediaan prasarana sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman | Kawasan kumuh tertangani prasarana dan sarana utilitasnya | 로 | 13.644 13.644 14.144 14.144 14.644 14.644 | 13.644 | 14.144 | 14.144 | 14.644 | | .860 | APBD | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| Pemberdayaan peningkatan infrastruktur oleh komunitas | Jumlah rumah layak Huni | unit | 88,777 89,477 90,177 90,877 91,577 92,277 | 89,477 | 90,177 | 90,877 | 91,577 | | 5,317 | APBD | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| Pembangunan fasilitas lingkungan rusunawa | Infrastruktur Rusunawa terpelihara | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3,545 | APBD | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| INDIKATOR SDG's | Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. 11.4.1. (a). Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya | an alam dun | ja. | | | | | | | | |
| 1.Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | | | | | | | | | | | |
| Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepurbakalaan/ cagar budaya/ warisan budaya | Peningkatan pemahaman masyarakat tentang cagar budaya | Event | | | | ₩ (| | | 659 .986 | APBD | Dinas Kebudayaan |
| Revitalisasi kearifan budaya lokal | retokumentasikannya cagar budaya di kabupaten kubir 170go Peningkatan pemahaman pemuda terhadap budi pekerti | Event | | o ↔ | D #1 | D 4 | D 11 | o ↔ | 343 | APBD | Dinas Kebudayaan |
| Pelestarian, pemberdayaan dan promosi budaya | Terselenggaranya Sermo Art Festival | Event | н | _ | | | | | 4,301 .523 | APBD | Dinas Kebudayaan |
| | Terselenggaranya Pesona Budaya di TMII Target 11,5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi iunjah kematian dan iumjah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi keruajan ekonomi relatif terhadap PDB | Event in dan jumlah | 0 h orang te | 1 erdampak | 0 k. dan sec | 0 cara subst | 0 tansial me | 0 engurangi | kerugian ekon | omi relatif t | erhadap PDB |
| INDIKATOR SDG'S | globel transference of the theorem, defined in the control of the | kin dan orang | -orang da | lam situa | si rentan | | | 5 5 0 | | | |
| Arri ogi ani i retani ggurangan berbasis Masyarakat Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat | Terbentuknya DesaTangguh Bencana | desa | 4 | 2 | 7 | П | H | ₩. | 1,088 | APBD | BPBD |
| | Terlaksananya sosialisasi PRB, Temu Relawan dan Pertemuan Forum (+kajian) | Kegiatan | 4 | 4 | m | 3 | e | m | | | |
| | Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. | er kapita yar | ıg merugil | an, term | asuk den | gan men | ıberi pert | atian khu | usus pada kuali | tas udara, t | ermasuk |
| INDIKATOR SDG's 1. Program Pengelolaan Kehersihan dan Pertamanan | 11.6.1(a). Persentase Sampah yang Tertangani | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Tar | Target Tahunan | nan | | Indikatif | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana . an | Instansi Pelaksana |
| Pengelolaan Persampahan | Sampah yang tertangani | % | 62.39 | 68.94 | 69.17 | 68.15 | 70.07 | 73.91 | 7,902 | APBD | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| INDIKATOR SDG's | 11.6.1(b). Persentase Taman Kondisi Baik | | | | | | | | | | |
| 1.Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Pembangunan dan Pengelolaan Taman | n Taman dalam kondisi baik | lokasi | 59 | 33 | 33 | 33 | 37 | 43 | 9,266 | APBD | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan |
| | Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas | ka hijau yang a | aman, in | klusif dan | mudaho | lijangkau | terutam | a untuk p | erempuan dan | anak, manu | la dan |
| INDIKATOR SDG's | | | | | | | | | | | |
| 1.Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan | | | | | | | | , | | | |
| Pembangunan dan Pengeldiaan Taman | Taman dalam kondisi baik | lokasi | 50 | 33 | 33 | 33 | 37 | 43 | 9,266 .518 | АРВО | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. | ta dan permul p perubahan i ii Framework | kiman ya iklim, ket for Disag | ing meng ahanan ti iter Risk F | adopsi da erhadap l eduction | n mengir sencana, 2015-20 | nplemen serta me 130. | tasi kebij ingembar | akan dan perer ngkan dan men | canaan yan gimplement | g terintegrasi asikan |
| INDIKATOR SDG's | 11.b.1.Jumlah desa yang memiliki dokumen PRB | | | | | | | | | | |
| 1.Program Penanggulangan Bencana Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat | | | 4 | 2 | 2 | н | + | ₩. | 1,088 | APBD | BPBD |
| | Terlaksananya sosialisasi PRB, Temu Relawan dan Pertemuan Forum (+kajian) | Kegiatan | 4 | 4 | e | e | e | m | | | |
| INDIKATOR SDG's | 11.b.2.*Dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi | | | | | | | | | | |
| Licrogram renangguangan bencana Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana | Tersusunnya dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi | a | 1 | 11 | 11 | 1 | н | н | 14,420 | APBD | врво |
| Terlaksananya tinc Tujuan XII : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. | Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi vang berkelanjutan. | pulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. | ua jenis limba Iimbah terse | ah yang r but ke u | amah ling dara, air, | kungan, dan tana | di sepanj n untuk r | ang siklu neminim | s hidupn) alkan dar | <i>r</i> a, sesuai kerar npak buruk ter | gka kerja int nadap keseh | emasional yang atan manusia |
| INDIKATOR SDG's | 12.4.1(a) Persentase usaha atau kegiatan yang taat lingkungan | | | | | | | | | | |
| 1. Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran | n anderimon/ radional | at of | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | 101 | 400 | 000 | i. |
| rengawasan nebijakan Pengelolaan | Junian Usana / Regiatan yang dilakukan | unn usaha/ | 00 | 5 | 2 | 9 | 9 | 501 | .520 | Arbu | Lingkungan |
| Lingkungan Hidup | pengawasan | kegiatan | | | | | | | | | Hidup |

| | | | | | Torch | Township Township | | | Indibatif | | |
|---|---|-----------------|---------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| | | | , q. | | 20 | 1000 | Ē | | Alokaci | Cumbor | |
| Prograi | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 A | Alokası Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| INDIKATOR SDG's | 12.4.2(a) Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu atau baku kerusakan lingkungan | rusakan ling | kungan | | | | | | | | |
| L.P.Ogram Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Pengawasan Kebijakan Pemantauan | Jenis kegiatan yang dilakukan | kegiatan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 9 | | 43 | APBD | Dinas |
| &Pemulihan Kualitas Lingkungan | | | | | | | | .860 | Đ | | Lingkungan Hidup |
| | Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. | snasional, ur | ıtuk meng | adopsi pı | aktek-pra | ktek ber | kelanjutar | dan meng | integrasikan | informasi ke | berlanjutan |
| INDIKATOR SDG's | 12.6.1(a) Jumlah sertifikasi produk pangan industri rumah tangga | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| Pengawasan dan pemantauan peredaran OMKABA | Terlaksananya sertifikasi pangan industri rumah tangga (PIRT) | lokasi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 2 | 50 216 .045 | رن بن ب | APBD | Dinas Kesehatan |
| | Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional | n, sesuai der | ıgan kebij | akan dan | prioritası | asional. | | | | | |
| INDIKATOR SDG's 1.Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan | 12.7.1(a) Pengembangan padi menuju beras premium organik Tanaman Pangan | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | Pengembangan padi menuju beras premium organik | Е | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 2 | 200 5,589 | 5,589 | АРВО | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | Sertifikasi organik | paket | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | | | | , |
| TUJUAN XIII: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya | gatasi perubahan iklim dan dampaknya | | | | | | | | | | |
| | Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. | ıya terkait ikl | im dan be | ncana ala | ım di sem | ua negar | ė. | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 13.1.1 Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | |
| 1.Program Penanggulangan Bencana Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat | Terbentuknya DesaTangguh Bencana | desa | 4 | 7 | 7 | П | 1 1 | | 1,088 | APBD | ВРВО |
| | Terlaksananya sosialisasi PRB, Temu Relawan dan Pertemuan Forum (+kajian) | Kegiatan | 4 | 4 | 8 | 8 | m | 3 | | | |
| Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana | Tersusunnya dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi | dokume | 1 | 1 | τ. | 1 | 1 1 | | 14,420 | APBD | врво |
| | Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi | pulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 1 | 12 | , | | |
| INDIKATOR SDG's 1 Program Penangeulangan Rengana | 13.1.2. *Cakupan penanggulangan bencana | | | | | | | | | | |
| Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat | Terbentuknya DesaTangguh Bencana | desa | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,088 | 1,088 | APBD | BPBD |
| | Terlaksananya sosialisasi PRB, Temu Relawan dan Pertemuan Forum (+kajian | Kegiatan | 4 | 4 | 3 | m | m | 3 | | | |
| Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi | Tersusunnya dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi | dokume | 7 | Н | | 1 | 1 1 | | 14,420 | APBD | врво |
| | Terlaksananya tindak laniut rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi | pulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 1 | 12 | • | | |
| Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemadaman kebakaran | Terselenggaranya sosialisasi pemadaman kebakaran | orang | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 182 | ~ O | APBD | врво |
| Penanganan kedaruratan dan logistik | Terfasilitasinya upah harian tenaga PBK non PNS | pulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 1 | 12 1,975 .000 | 75 0 | APBD | BPBD |
| | Tertanganinya kejadian bencana, kebakaran dan tersedianya alat bantu penanganan bencana | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 1 | 12 | | | |
| | Tertanganinya manajemen distribusi logistik dan sarana penanggulangan | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 1 | 12 | | | |
| - | bencana | | : | | | | | | | | |
| Penyelenggaraan PUSDALOPS | l erfasılıtasınya Kegiatan PUSDALOPS (TRC dan Unsur Pengaran) | pulan | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 1 | 12 1,7 | 1,719.000 | APBD | BPBD |

| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
|--|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---|
| INDIKATOR SPG's | Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional 13.2.1. *Dokumen Kailan Linekunaan Hiduo Strateeis | kebijakan, s | trategi d | an peren | anaan na | asional. | | | | | |
| 1 Program Derencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Dengembangan Wilayah | Ir dan Dengembangan Milayah | | | | | | | | | | |
| Arring ann retainanain tannanganan minasanan Perencanaan Pembanganan Sub Bidang Sumber Daya Alam | Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang SDA serta KLHS | dokume n | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 414 | APBD | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| INDIKATOR SDG's | 13.2.1(a) Jumlah Dokumen lingkungan yang diterbitkan | | | | | | | | | | |
| 1.Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran | | | | | | | | | | | |
| Pengawasan Kebijakan | Jumlah usaha / kegiatan | unit | 20 | 40 | 70 | 80 | 06 | 105 | 493 | APBD | Badan |
| Pengelolaan Lingkungan Hidup | yang dilakukan pengawasan | usaha/ kegiatan | | | | | | | .520 | | Perencanaan Pembangunan |
| Pengkajian Lingkungan | Dokumen lingkungan | dokume n | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 528 .360 | APBD | Dinas Lingkungan Hidun |
| TUTUAN XIV Melestarikan dan memanfaatkan secal | TUIIJAN XIV Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelaniutan sumber dava kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelaniutan. | berkelaniut | 'n. | | | | | | | | 2 |
| | Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. | pesisir seca utan yang s | ara berkel ehat dan | lanjutan u produktif | intuk me | nghindar | i dampak | buruk ya | ng signifikan, ¹ | ermasuk de | ıgan |
| INDIKATOR SDG's 1. Program Perencanaan Penataan Ruang | 14.2.1(a) Tersedianya dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | ulau Kecil | | | | | | | | | |
| and carried ach secul chat carried acquisitioned | i luminh cuhetanci dokumon noronenan tata runna | | Į, | | | 7.0 | 9 | 9 | 2 1 2 4 | Uddy | , cric |
| Penyusunan Kencana Tata Kuang dan Kencana Kinc | Penyusunan Kencana Lata Kuang dan Kencana Kinc i. Jumlan substansi dokumen perencanaan tata fuang | Dokume n | 4 | n | 13 | 15 | 18 | 8 | 3,134 .381 | APBU | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| INDIKATOR SDG's | 14.2.1(b) Target persentase sarana prasarana TPI kondisi baik | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan produksi perikanan tangkat | 1.Program Peningkatan produksi perikanan tangkap dan pengendalian sumber dava perikanan dan kelautan | | | | | | | | | | |
| Pengembangan sarana dan prasarana nelayan kecil dan pelelangan ikan | Pengembangan sarana dan prasarana nelayan kecil Terlaksananya pembangunan/rehab TPI (bugel, karangwuni, trisik, congot) unit dan pelelangan ikan | nnit | 11 | 11 | T | T | 0 | 0 | 1,833 | APBD | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Tersedia dan tersalurkannya peralatan TPI | unit | 0 | | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Terlaksananya penyampalan sistem informasi pelelangan ikan | ıme | | 0 | П | П | . [| . [| | | |
| | Penataan TPI dan kawasan sentra nelayan (DED, FS, dII) | dokume n | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | н | | | |
| | Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan jargal dan praktek penangkapan ikan yang menusak, seta melakskanakan rencaraa pengelodaan berbasa ilimu pengetahuan, untuk memulikah nersedaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ketingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesual karakrisik biologsinya. | ghentikan p ıan, untuk n lanjutan ses | enangkag nemulihk uai karak | oan ikan y an persec teristik bi | ang berk liaan ikar ologisnya | ebihan, p secara l s | enangkap ayak dala | oan ikan i m waktu | legal dan praki yang paling sir | ek penangk Igkat yang n | ıpan ikan yang emungkinkan, |
| INDIKATOR SDG's | 14.4.1.Jumlah operasi terpadu di perairan umum | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan produksi perikanan tangkat | 1.Program Peningkatan produksi perikanan tangkap dan pengendalian sumber dava perikanan dan kelautan | | | | | | | | | | |
| Perlindungan Nelayan Kecil dan Sumber Daya Ikan | Operasi terpadu di perairan um um | kali | 2 | 7 | 2 | 22 | 22 | 22 | 5,150 | APBD | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perkanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan | rtentu yang | berkontr | ibusi terh | adap kel | ebihan k | pasitas c | an penar | gkapan ikan b | erlebihan, m | enghilangkan |
| | suosal yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ingai, yang toak ulaporkan & toak diatur dan menanan jenis suosau baru, dengan mengakui bahwa penakuan knusus dan berberang ang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization. | ıporkan & ti berkembanı | dak diatu g harus m | r dan me ienjadi ba | nanan jer gian inte | gral dari | ıı baru, dı negosiasi | engan me subsidi p | ngakui banwa erikanan pada | periakuan k the World ⁻ | rade |
| INDIKATOR SDG's | 14.6.1(a) lumlah anggota kelomnok masvarakat pengawas yang paham tentang perlindungan sumberdaya ikan yang | ang perlind | ing an sin | mberday | ikan var | ٥ | | | | | |
| | T+:O:T(a) saminan anggora velonibon masyanana bengawas yang banam | | 2 | | ind in | 4 | | | | | |

| Program | 1 Variation / A. da. of Pariation | Catitan | Tahun | | | | | Alokasi | | Instansi |
|---|--|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | rrogram/ neglatan/ Output neglatan | | Dasar 2017 | 2018 2 | 2019 20 | 2020 2021 | 1 2022 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Pendana . an | Pelaksana |
| Perlindungan Nelayan Kecil dan Sumber Daya Ikan 🛮 E | Bimtek pokmaswas | orang (| 0 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5,150 .000 | APBD | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| , | Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecii (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar. | anal fishers) t | erhadap sı | umber day | a laut dan | pasar. | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 14.b.1.Jumlah perijinan usaha perikanan " | | | | | | | | | |
| kelautan p | ierikanan | | | | | | | į | | |
| Pengembangan Perijinan Usaha Perikanan | Terbitnya perijinan usaha perikanan | nnit | 750 1. | 1500 2500 | 2500 | 0 2500 | 1000 | 764 .000 | APBD | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| INDIKATOR SDG's | 14.b.1(a) Peningkatan modal usaha perikanan | | | | | | | | | |
| g produk kelautan p | ıerikanan | | | | | | | | | |
| Pengembangan Usaha Perikanan | erlaksananya pengembangan kulon progo fish centre | paket | 1 0 | Н | ₽ | 1 | т | 1,306 | APBD | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| INDIKATOR SDG's | 14.b.1b.*Jumlah nelayan yang teregistrasi | | | | | | | | | |
| PROGRAM : Program Peningkatan produksi perikanan | PROGRAM :Program Peningkatan produksi perikanan tangkap dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan | | | | | | | | | |
| Pemberdayaan Nelayan Kecil | Terselenggaranya pembinaan kelompok nelayan kecil | kelompo | 7 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 627 | APBD | Dinas Kelautan |
| | | · | | | | | | 000. | | dan Penkanan |
| TUJUAN XV Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. | kan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan | ara lestari, me | enghentik | an penggu | runan, m | emulihkan | degradası | lahan, serta mer | nghentikan | kehilangan |
| | Target 15 1 Dada tahun 2020 menjamin nelectarian restorasi dan nemanfaatan herkelaniutan dari eknsistem danatan dan nerairan dara seera jasa lingkungannya. Khususnya | aatan herkela | nintan dar | i ekosister | n daratan | dan nerair | an darat s | erta iasa lingkung | rannva khir | Sushva |
| 9 | ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional | an kewajiban | berdasark | an perjanj | an interna | sional. | | B | 6 | |
| INDIKATOR SDG's | 15.1.1(a) Indeks tutupan hutan | , | | | | | | | | |
| 1.Program Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidup | anp | | | | | | | | | |
| Peningkatan konservasi lingkungan hidup | Pohon perindang jalan | batang | 200 1 | 150 150 | 200 | 200 | 200 | 1,843 | APBD | Dinas |
| | | | | | | | | .540 | | Lingkungan Hidup |
| | Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan | erdagangan je | nis flora d | an fauna y | ang dilind | ungi serta | mengatasi | permintaan dan | pasokan pro | oduk hidupan |
| | liar secara ilegal. | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 15.7.1(a) Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai SOP | ai SOP | | | | | | | | |
| PROGRAM : Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran | icemaran | | | | | | | | | |
| Penanganan kasus lingkungan Hidup | Kasus lingkungan hidup yang ditangani | kasus | 10 10 | 0 10 | 12 | 14 | 15 | 278 | APBD | Dinas Lingkungan Hidun |
| TUJUAN XVI Menguatkan masyarakat yang inklusif da | TUJIAN XVI Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua ingkatan. | n untuk sem | ıa, dan me | mbangun | kelembag | gan yang | efektif, ak | untabel, dan inkl | usif di semu | ia tingkatan. |
| | Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. | sait angka ker | natian din | anapun. | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | Capaian penanganan konflik sosial |) | | | | | | | | |
| katan Wawasan Kebangsaan dan P | olitik Masyarakat | | | | | | | | | |
| Pembinaan keamanan daerah | Terselenggaranya dan terfasilitasinya pembinaan pertahanan wilayah, | fasilitasi 8 | 8 | ∞ | ∞ | œ | œ | 3,004 | APBD | Kantor |
| | komunikasi sosial. bakti sosial. karva bakti. FKDM. Kominda. PKS. | | | | | | | .687 | | Kesatuan |
| _ | Forkompimda, PKBN | | | | | | | | | Bangsa dan Politik |
| | Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. | segala bentu | k kekerasa | n dan pen | yiksaan te | rhadap an | ak. | | | |
| INDIKATOR SDG's | 16.2.1 Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan | | | | | | | | | |
| .0 | anak | | | | | | | | | |
| 1. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak | א Anak | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan/Output Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tersosialisasikannya pencegal Kekerasan Terlaksananya pendampingar Jumlah Satgas TPPO yang dibe Anak korban kekerasan | y/ Output Kegiatan | Satuan | _ Tahun | | 20 | 200 | | | Alokasi | Sumber | 1000 |
|--|---|--------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|--|
| Program an Perempuan dan Anak Korban Lembaga Perlindungan Perempuan dan in kekerasan | ı/ Output Kegiatan | | | | | | | | 2000 | | |
| an Perempuan dan Anak Korban Lembaga Perlindungan Perempuan dan In kekerasan | | | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 [#] | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | _ | instansi Pelaksana |
| | Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak orang | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 494 .760 | 60 | АРВО | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Terlaksananya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan Jumlah Satgas TPPO yang dibentuk di desa rawan TPPO | orang 0 kel 0 | 0 | 100 0 | 105 1 0 1 | 110 1 13 3 | 115 1 37 6 | 120 61 | | | |
| | natan | forum 1 | 13 | 13 | 13 1 | | 13 1 | 13 430 | 0.08 | APBD | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tersosialisa. | Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kecamat an | | 12 1 | 12 | 12 1 | 12 1 | 12 1 | 12 | | | |
| Tersusunnyā | ya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban | Perbup 1 | 1 | 4 | 1 1 | | П | _, | | | |
| Terlatihnya Target 16.3 | gan perempuan dan anak berbasis masyarakat egara berdasarkan hukum di tingkat nasional da | orang 2 in internasio | 220 2 onal dan m | 220 Z | 220 2 akses yan | 220 2 ing sama te | 220 2 terhadap k | 220 keadilan ba | agi semua. | | |
| INDIKATOR SDG's 1. Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah | Cakupan penegakan hukum | | | | | | | | | | |
| Pengawasan penertiban dan operasi non yustisi Terselengga rokok | Terselenggaranya monitoring, pengawasan, penegakan KTR dan cukai rokok | kali | 50 5 | 55 6 | 9 09 | 5 70 | | 70 1,4 11. | 1,474 | APBD | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Terbinanya | | _ | | | | | 12 13 | 12 | | | |
| Terselenggaranya operasi non yustisi Penyidikan dan penindakan pelanggaran perda dan Penyidikan dan penindakan proyustisia kasus pelanggaran perda ketentuan perundang-undangan | Terselenggaranya operasi non yustisi Penyidikan dan penindakan pro yustisia kasus pelanggaran perda | kali 1 kasus 5 | | 110 1 550 5 | 115 12 575 57 | 120 12 575 60 | | | 1,878 | APBD | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. | gala bentuk | nya. | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's 1.Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal | 16.5.1.(a).*Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | s Korupsi (W | BK) | | | | | | | | |
| | Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN | OPD 4 | 42 4 | 42 4 | 42 42 | 2 42 | 2 42 | | 1,614 | АРВО | Inspektorat Daerah |
| Terwujudny: integritas | Terwujudnya penetapan dan pendampingan SKPD percontohan zona integritas | OPD 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| Tersedianya | Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK | Dokume 1 n | 1 | | | 1 | н | | | | |
| Tersedianya | Ь | | | | | | | 2 | | | |
| Tersedianya | KJiP | | | 42 4 | 42 42 | | 2 42 | 2 | | | |
| Tersedianya | Tersedianya Laporan Saber Pungli | Dokume 4 n | 4 | 4 | | | | | | | |
| | Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | an di semua | tingkat. | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's 16.6.1.(a) Al | 16.6.1.(a) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (opini BPK) | | | | | | | | | | |

| | | | | | ŕ | Toward T | 2 | | - dibal | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|------------|----------|------|------|-------------------------------------|---------|---|
| | | | Tahun | | <u>-</u> | ger lan | 9 | | Alokasi | Sumber | |
| Progra | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Pendana | Instansi Pelaksana |
| Penyusunan Pertanggungjawaban APBD | Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan dokume tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban n pelaksanaan APBD | dokume n | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 461 .889 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD | Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD triwulanan, semester I dan prognosis. | dokume n | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 81 .714 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Sinkronisasi data realisasi APBD | Teridentifikasi dan terklasifikasinya data penerimaan dan pengeluaran APBD serta terselenggaranya koordinasi antar SKPD dan SKPKD | SKPD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 69 .742 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Pengelolaan SIMDA | Tersedianya data akuntansi keuangan daerah yang akurat. | SKPD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 541 .346 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| INDIKATOR SDG's 1. Program Periminsan dan Pengendalan Kehilakan Penguatan Kelembagaan | 16.6.1.(b) Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Penguatan Kelembapaan | | | | | | | | | | |
| Penyusunan dokumen SAKIP dan SPM | Dokumen Penyusunan SAKIP dan Monev Penerapan SPM | dokume n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 224 .443 | APBD | Sekretariat Daerah |
| 2. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah | ah | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran/Akhir Masa Jabatan | dokume n | 1 | П | П | ⊣ | П | 7 | 451 .404 | APBD | Sekretariat Daerah |
| Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Informasi Laporan Daerah | dokume | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 434 | APBD | Sekretariat |
| 3.Program Pengendalian Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | |
| Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah Daerah | dokume n | ın | 20 | ın | ro. | ro. | ro. | .104 | APBD | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| INDIKATOR SDG's | 16.6.1.(d) Indeks Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | |
| 1.Program Perumusan dan pengendalian kebijakan penguatan kelembagaan | | | | | | | | | | | |
| Monev Pelaksanaan RB dan SOP | Dokumen monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SOP | dokume n | 0 | ₽ | 7 | 7 | 7 | 7 | 97 | APBD | Sekretariat Daerah |
| INDIKATOR SDG's 1. Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelavanan Publi | 16.6.2.(a) Nilai indeks kepuasan masyarakat Publik | | | | | | | | | | |
| Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik | Dokumen pedoman pelayanan publik | dokume | 1 | н | 1 | 1 | 7 | н | 491 .499 | APBD | Sekretariat Daerah |
| | Dokumen laporan hasil evaluasi penerapan PPK BLUD | dokume | + | н | 1 | н | 1 | н | | | |
| | Dokumen pengiriman SKPD peserta kompetisi inovasi pelayanan publik | dokume n | 1 | н | 7 | 7 | 7 | 1 | | | |
| 2 Drogram Banjugkatan Balawanan Barizinan | Dokumen laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) | nnit | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | | | |
| 2.ri oğlanı remişkatan renayanan remizman Pelayanan administrasi perizinan | Terbitnya izin | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,042 | APBD | Sekretariat |
| | Taraat 16 7 Manjamin nangamhijan kanutusan wang rasnonsif inklusif narti | icinatif dar | ranrace | o itatif di c | otion ting | rkatan | | | .434 | | Daerah |
| INDIKATOR SDG's | rage, tao, retignim pragamanan kepataan yang tesponan, matan, partapatan dari teprastinani di setap tingkatan 16,71,(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Tar | Target Tahunan | nan | | Indikatif | | |
|--|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|
| Progran | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| 1.Program Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender | dan pengarusutamaan gender | | | | | | | | | | |
| Penguatan Pengarustamaan Gender | Tersusunnya profil pengarus utamaan gender (PUG) Kabupaten | dokume | н | н | П | Н | н | т | 247 .520 | APBD | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan |
| | | | | | | | | | | | Anak |
| | Tersusunnya laporan evaluasi PUG, PP dan PA | laporan | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | |
| | Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG | kali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Terselenggaranya Konsultasi PPRG dan ARG | kali | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III). | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender | dan pengarusutamaan gender | | | | | | | | | | |
| Penguatan Pengarustamaan Gender | Tersusunnya profil pengarusutamaan gender (PUG) Kabupaten | dokume n | н | Ħ | ∺ | н | H | Ħ | 247 .520 | АРВО | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Tersusunnya laporan evaluasi PUG, PP dan PA | laporan | 1 | 1 | + | + | 1 | 1 | | | |
| | Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG | kali | 7 | - | + | 7 | + | - | | | |
| | Terselengaaranva Konsultasi PPRG dan ARG | | 0 | ۰ 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | |
| | Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. | a, termasuk pe | encatataı | ı kelahira | ٠. | ! | ! | ! | | | |
| INDIKATOR SDG's 1.Program Pelayanan Pencatatan Sipil | 16.9.1.Prosentnase anak yang memiliki akta kelahiran | | | | | | | | | | |
| Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran | Akta Kelahiran | Dokume 1,000 1,000 1,000 n | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 1,000 | | 1,000 | .000 | АРВО | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | Akta Kelahiran | | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | |
| Target 16.10 Menjamin akses INDIKATOR SDG's 1.P. rersedianya Bada 1.Program Pengembangan komunikasi media massa dan Data/informasi/Statistik | Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. 16.10.2 (a).Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. dan Data/informasi/Statistik | cebebasan mel aimana diatur | ndasar, s dalam Ul | esuai der J No. 14 | igan pera Tahun 20 | turan na 08 tenta | sional dar ng Keterb | ı kesepak ukaan Inf | atan internasio ormasi Publik. | nal. | |
| Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Informasi | Laporan informasi dan pengaduan masyarakat | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | .657 | APBD | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| INDIKATOR SDG's 1.Program Pengembangan komunikasi media massa dan Data/informasi/Statistik | 16.10.2.(b).*Persentase tindak lanjut penanganan sengketa informasi publik dan Data/informasi/Statistik |)IIK | | | | | | | | | |
| Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Informasi | Laporan informasi dan pengaduan masyarakat | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | .657 | APBD | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| INDIKATOR SDG's | 16.10.2.(c)*Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | n Dokumentas | i (PPID) u | ntuk me | ıgukur kı | alitas PP | ID dalam | menjalar | kan tugas dan f | ungsi sebag | aimana diatur |
| 1.Program Pengembangan komunikasi media massa dan Data/informasi/Statistik | dan Data/informasi/Statistik | | | | | | | | | | |

| | | | ' | | Targ | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|---|--|----------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--|-------------------------|---|
| Progran | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Informasi | Laporan informasi dan pengaduan masyarakat | bulan | 12 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | .657 | APBD | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| TUJUAN XVII Menguatkan sarana pelaksanaan dan m | TUJUAN XVII Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi | ui dukungan | internasi | onal kep | ada nega | ra berke | nbang, u | ntuk mer | ningkatkan kapa | isitas lokal l | agi |
| | pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. 17.1.1 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan Pendapatan Daerah Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah | Tersusunnya database potensi pajak/retribusi | dokume n | ₩. | н | 1 | н | ₽ | н | 707 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | Tersusunnya target pendapatan daerah | dokume n | | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | | | |
| Evaluasi Pendapatan Daerah | Forkom pendapatan se-DI Y Terverifikasinya laporan pendapatan OPD | kali OPD | 17 | 2 17 | 2 17 | 2 17 | 2 17 | 2 17 | 173 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | Tersusunnya laporan pendapatan OPD Pengelola Pendapatan | dokume | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga | P elayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga Terwujudnya pengendalian karcis pajak dan retribusi yang sah | pulan | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 331 .321 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Pengembangan Pendapatan Daerah | Sosialisasi pendapatan daerah | kali | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1,121 .825 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 2.Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah | Kajian produk hukum tentang pendapatan daerah | dokume | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Rekonsiliasi data piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan | Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah | kecamat an | | m | m | m | æ | m | 544 .076 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Perekaman data dan Penetapan Pajak Daerah | Diterbitkannya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB, STPD Pajak Daerah Tahun 2018 dan Terlegalisasinya SPPT PBB | jenis pajak | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,844 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Penagihan Pajak Daerah | Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah | wajib pajak | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 4,122 .400 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Pembaharuan Basis Data PBB P2 | Terlaksananya pendataan Obyek dan Subyek PBB P2 Tahun 2018 | dokume | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 999 .263 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Pelayanan dan Validasi Data BPHTB | Terlayaninya masyarakat dalam mengurus perpajakan termasuk pembetulan, pembatalan, keberatan, mutasi, informasi dan validasi BPHTB | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,001 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Daerah | Data Subyek Pajak | wajib pajak | , 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 16,972 .339 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| | | | | | Tar | Target Tahunan | lan | | Indikatif | | |
|---|---|----------------|---------------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumber | |
| Prograi | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | _ | Instansi Pelaksana |
| | Data Obyek Pajak | wajib pajak | , | 860 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | | | |
| Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah | Distribusi dokumen PBB P2 tepat waktu di Tahun 2017 | desa | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 670 .035 | АРВО | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | Terwujudnya validasi dan akurasi data PPJ dan PBB P2 | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Terlaksananya intensifikasi pajak daerah | jenis pajak | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 17.1.1.(a) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah | | | | | | | | | | |
| 1.Program Peningkatan Pendapatan Daerah | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah | Tersusunnya database potensi pajak/retribusi | dokume n | ↔ | н | Н | н | П | ₽ | 707 .225 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | Tersusunnya target pendapatan daerah | dokume n | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Forkom pendapatan se-DIY | kali | | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Evaluasi Pendapatan Daerah | Terverifikasinya laporan pendapatan OPD | OPD | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 173 .006 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | Tersusunnya laporan pendapatan OPD Pengelola Pendapatan | dokume n | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga | Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga Terwujudnya pengendalian karcis pajak dan retribusi yang sah | bulan | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 331 .321 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Pengembangan Pendapatan Daerah | Sosialisasi pendapatan daerah | kali | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1,121 .825 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 2.Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah | Kajian produk hukum tentang pendapatan daerah | dokume | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Rekonsiliasi data piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan | Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah | kecamat | | m | æ | m | m | m | 544 .076 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Perekaman data dan Penetapan Pajak Daerah | Diterbitkannya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB, STPD Pajak Daerah Tahun 2018 dan Terlegalisasinya SPPT PBB | jenis pajak | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,844 .747 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Penagihan Pajak Daerah | Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah | wajib pajak | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 4,122 .400 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Pembaharuan Basis Data PBB P2 | Terlaksananya pendataan Obyek dan Subyek PBB P2 Tahun 2018 | dokume n | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 999 .263 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Pelayanan dan Validasi Data BPHTB | Terlayaninya masyarakat dalam mengurus perpajakan termasuk pembetulan, pembatalan, keberatan, mutasi, informasi dan validasi BPHTB | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,001 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| | | | | | Ī | Target Tahiinan | ueu | | Indikatif | | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------|------------|-------------|--|--------------------------|---|
| | | | T | | 2 | 900 | | | Alokaci | Sumber | |
| Progn | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | _ | Instansi Pelaksana |
| Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Daerah | Data Subyek Pajak | wajib pajak | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 16,972 .339 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | Data Obyek Pajak | wajib | , | 098 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | | | |
| Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah | Distribusi dokumen PBB P2 tepat waktu di Tahun 2017 | desa | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 670 .035 | APBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | Terwujudnya validasi dan akurasi data PPJ dan PBB P2 Terlaksananya intensifikasi pajak daerah | bulan jenis | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | pajak Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan akses terhadap sains, teknologi dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan akses terhadap sains at t | pajak kerja sama tr | iangular | ecara re | gional da | n interna | sional ter | -kait dan | akses terhadap | sains, tekno | ogi dan |
| INDIKATOB CDG! | tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalum kasilikatan fasilitati teknologi global. 17.6.2 (A) Dorostron circinata tinan tulang mungung mengatan kasilitati teknologi global. | asi teknologi g | lobal. | DD dan | 590 | yang ich | 5 | 5 | 2 Suite () | , | D DA 100 |
| 1. Program Pengembangan Aplikasi Informatika | 17.0.2.(d) retsetitase jamigan tulang punggung setat optin daetan yang me | icii giidauigni | | 2 | Cesa. | | | | | | |
| Pengelolaan Jaringan Komputer, Server dan Koneksi Internet | Terkelolanya ruang server, Jayanan koneksi internet untuk 42 Perangkat Daerah dan 2 ruang publik, koneksi antar Perangkat Daerah (Local Loop) | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11,812 .076 | APBD | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Pembangunan Jaringan Komputer Fiber Optic (FO) | paket | | 1 | 1 | | | | | | |
| | Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. | ıtuk mengeml gara berkemb | bangkan ang. | oenguku: | an atas | emajuar | pemban | gunan be | rkelanjutan yaı | ng melengka _l | i Produk |
| INDIKATOR SDG's 1. Program Pendavagunaan Aparatur | 17.9.1. (a) Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer | | | | | | | | | | |
| Mutasi dan Alih Jabatan Fungsional Tertentu | Terselenggaranya alih fungsi JFT | orang JFT | 865 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 344 | APBD | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| | Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar daerah | orang | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| 2.Program Pengembangan Aparatur Penyusunan formasi dan pengadaan PNS | Tersusunnya formasi pegawai PNS | Dokume | н | н | | | н | | 4,370 | APBD | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| | Terselenggaranya seleksi CPNS | orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| INDIKATOR SDG's 1.Program Pendayagunaan Aparatur | 17.9.1.(b) Persentase perangkat Daerah yang memiliki jabatan fungsional pranata komputer | pranata kom | puter. | | | | | | | | |
| Mutasi dan Alih Jabatan Fungsional Tertentu | Terselenggaranya alih fungsi JFT | orang JFT | 865 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 344 | APBD | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| 2.Program Pengembangan Aparatur | Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar daerah | orang | 57 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |

| Program Prog | | | | | | F | | | | 200-111-00 | | |
|--|--|--|------------------|------------------------|-------|----------|-----------|-------|-------|--|-------------------------|---|
| Satuan Dakume Satuan Dakume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | ā | get lanui | Jan | | Indikatif | | |
| 1 | | gram/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | | 2019 | 2020 | 2021 | | Alokası Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta) | Sumber Pendana an | Instansi Pelaksana |
| See terpenuthinya kebutuhan pejabat fungsional pranata komputer. April 1985 100 10 | Penyusunan formasi dan pengadaan PNS | Tersusunnya formasi pegawai PNS | Dokume | 11 | н | н | н | н | 1 | 4,370 | APBD | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| Frame Fram | | Terselenggaranya seleksi CPNS | orang | 200 | 200 | 200 | 200 | | 200 | | | |
| i pegawai PNS dari luar daerah orang 57 30 30 30 100 100 100 100 ii pegawai PNS dari luar daerah orang 57 30 30 30 30 30 ii pegawai PNS orang 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50 | INDIKATOR SDG's | 17.19.1.(c) Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional pranata | a komputer | | | | | | | | | |
| i pegawai PNS dari luar daerah orang 57 30 30 30 30 30 i pegawai PNS dari luar daerah n orang i pegawai PNS orang Soo orang CPNS CPNS CPNS | Arrog, an Tentanggangan Apalacu Mutasi dan Alih Jabatan Fungsional Tertentu | Terselenggaranya alih fungsi JFT | orang | 865 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 344 | APBD | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| Dokume | 2 Drogram Dangamhangan Anaratur | Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar daerah | orang | 57 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | | |
| Solution | z.r. og am rengemoangan Aparaun Penyusunan formasi dan pengadaan PNS | Tersusunnya formasi pegawai PNS | Dokume | | н | . | н | н | н | 4,370 | APBD | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| ruya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) S,000 5,000 | | Terselenggaranya seleksi CPNS | orang CPNS | 200 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | | |
| rbitan Akta Kenatian (dokumen) Dokume 5,000 5,0 | INDIKATOR SDG's 1.Program Pelayanan Pencatatan Sipil | 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vita | al Statistics R | egister) | | | | | | | | |
| rbitan Akta Kematian (dokumen) Dokume 5,000 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran | Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran | Dokume | | 5,000 | 5,000 | 2,000 | | | .100 | АРВО | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| rbitan Akta Kematian (DAK) (dokumen) n n n n n lata statistik dasar BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah kro dokume 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak | Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (dokumen) | Dokume | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | .400 | APBD | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Intern Covarinen pertugaren saeuz einen (Covarinen) Nata statistik dasar BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Ikro dokume 1 1 1 1 1 | | Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (DAK) (dokumen) Terlaksananya penerbitan Advirmon ponthaban tasing mel Ideki men | Dokume | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | |
| kro dokume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | INDIKATOR SDG's | renassarianiya penerbitan dokumen perubahan sadus ahak (dokumen) 17.19.2. (e) Jumlah data statistik dasar BPS dalam perencanaan dan evaluas | n si pembangu | nan daei | z dh | ٧ | 1 | ٧ | 7 | | | |
| | 1. Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Penyusunan Data Statistik Daerah | Data Informasi Statistik analisis ekonomi makro | dokume | н | н | н | 4 | 4 | | 867 | APBD | Dinas Komunikasi |
| | | | : | | | | | | | | | dan Informatika |

Matrik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDG's Kabupaten Sleman

TUJUAN 1. MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DI MANA PUN

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (vang | | | | | Target | Target Pencapaian | | Penanggungjawah |
|-----------|--|--|--------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Indikator | | disepakati) | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| Target 1. | . Pada tahun 2030, mengu | Target 1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional | proporsi laki-la | iki, perempuan | dan anak-anak dari sen | nua usia, yang hidup dala | am kemiskinan di semua c | limensi, sesuai dengan de | efinisi nasional. | |
| 1.1 | 1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%). | Persentase KK miskin | Dinas Sosial | % | 2017 | 9.35% | 8.68% | 8.50% | 8.00% | Dinas Sosial |
| 2.1 | 2.1 Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019. | Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan | Dinas Kesehatan | % | | 79 | 85 | 85 | 88 | Dinas Kesehatan |
| 2.2 | 2.2 Meningkatnya persentase pervandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: | | Dinas Sosial | orang | 2017 | | | | | Dinas Sosial |
| 2.3 | 2.3 Menurunnya Jumlah keluaga sangat miskin yang miskin yang mendapatka mendapatka mendapatka mendapatka mendapatka bantuan tunai bersyarat menjadi 2.8 Juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta). | Jumlah keluarga sangat : miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat | Dinas Sosial | orang | 2017 | | | | | Dinas Sosial |
| 3.1 | 3.1 Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%. | Cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Dinas Kesehatan | % | | 76 | 86 | 66 | 5.66 | Dinas Kesehatan |
| 3.2 | 3.2 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan | Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunization) | Dinas Kesehatan | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas kesehatan |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (yang | Cumbor Data | Cotion | Tokus | | Targe | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|-----------|--|---|---------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------|
| Indikator | . | disepakati) | onilloei Data | | I all ull Dasal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| | terbawah pada tahun 2019 menjadi 63% | | | | | | | | | |
| ຫ ຕ | 3.3 Meningkatnya cakupan angka pemakaiah kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%. | pemakajan kontrasepsi semua cara pada j perempuan usia 15-49 tahun | Dinas P3AP2KB | % | 2017 | 79,30 | 79,35 | 79,40 | 79,50 | Dinas P3AP2KB |
| ю. К | 3.6 Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18.6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah. | e | DPU РКР | % | 2017 | 97,87 | 100 | 100 | 100 | DPUPKP |
| 3.7 | 3.7 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%). | Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat | Dinas Pendidikan | % | <100% | <100% | <100% | <100% | <100% | Dinas Pendidikan |
| œ ri | | Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat | Dinas Pendidikan | % | <83,98% | <83,99% | ≤84% | 584,01% | ≤84,50% | Dinas Pendidikan |
| 3.10 | 3.10 Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%. | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia 0-18 tahun) ('umlah usia anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak) | Dinas Dukcapil | akte kelahiran | | 06 | 92,5 | 95 | 97,5 | Dinas Dukcapil |
| | | Cakupan penerbitan Akta Dinas Kelahiran (jumlah Dukcal penduduk yang lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di tahun bersangkutan dibagi jumlah kelahiran di tahun | Dukcapil | akte kelahiran | | 06 | 16 | 91,6 | 693 | Dinas Dukcapil |
| 4.1 | 4.1 Meningkatnya jumlah lokasi | Jumlah Desa Tangguh Bencana | врво | desa | 34 Destana | 37 Destana | 45 Destana | 53 Destana | 61 Destana | ВРВО |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator BAD (yang | | | | | Target Pc | Target Pencanajan | | Penangannaiawah |
|-----------|--|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------|
| Indikator | RPJMN 2015-2019 | disepakati) | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| | penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah). | Kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi | ban Dinas Sosial | | | | | | | Dinas Sosial |
| 4.4 | 4.4 Meningkatnya juniah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015:100). | Jumlah sistem peringatan BPBD dini (EWS) kebencanaan | ВРВО | sistem | 50 | 20 | 20 | | 20 | BP BD |
| 4.5 | 4.5 Menurunnya indeks risiko bencana | 4.5.a. Jumlah lembaga tangguh bencana | BPBD | Desa dan Sekolah | 34 Destana dan 46 SSB | 37 Destana dan 52 SSB | 45 Destana dan 60 SSB | 34 Destana dan 46 SSB 37 Destana dan 52 SSB 45 Destana dan 60 SSB 53 Destana dan 68 SSB 61 Destana dan 76 SSB BPBD | 61 Destana dan 76 SSB | BPBD |
| | pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4). | 4.5.b. Jumlah masyarakat BPBD terlatih pada daerah rawan bencana | врво | Orang | 7,918 | 8,548 | 9,408 | 10,268 | 11,128 | ВРВО |
| TUJUAN | GLOBAL 2. MENGHILA | TUJUAN GLOBAL 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN | MENCAPAI KI | ETAHANAN PA | ANGAN DAN GIZI YAN | JG BAIK, SERTA MENII | NGKATKAN PERTANI, | | | |
| 1.1 | 1.1 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %). | Cakupan status balita gizi buruk | gizi Dinas kesehatan | % | | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | Dinas Kesehatan |
| 2.1 | 2.1 Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013; 32,9%). | Cakupan balita pendek dan sangat pendek | Dinas kesehatan | % | 2017 | 12 | 11.5 | 11.2 | 17 | Dinas kesehatan |
| 2.3 | 2.3 Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%). | prevalensi anemia pada ibu hamil | Dinas kesehatan | % | | თ | က် | ∞ | 7.5 | Dinas kesehatan |
| 2.4 | 2.4 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%). | Cakupan bayi usia kurang Dinas dari 6 bulan yang keseh mendapat ASI eksklusif | Dinas kesehatan | % | | 83 | 84 | 88 | 98 | Dinas kesehatan |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (vang | | | | | Target | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|---------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------|---|
| Indikator | | disepakati) | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| 2.5 | 2 | Jumlah produksi ikan konsumsi | Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan | 39 | 2017 | | | m | | Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan |
| 3.1 | 3.1 Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan. | Luas sawah | Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan | ha | 2017 | 19,071 | 19,012 | 18,952 | 18,890 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan |
| | | luas lahan bukan sawah | Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan | ha | 2017 | 20,008 | 20,003 | 20,068 | 20,096 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan |
| TUJUAN 1.1 | I GLOBAL 3. MENJAMIN KEHIDU PAN YAN 1.1 Menurunnya angka angka kematian ibu kematian ibu per 100 100 ribu kelahiran hi ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: | TUUUNA GLOBAL 3. MENJAMIN KHIDUPAN YANG SERAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA 1.1 Menurunnya angka ematian ibu per Dinas per 100.000 KH 55.42 55.04 kematian ibu per 100 100 ribu kelahiran hidup kesehatan ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346). | EHAT DAN M Dinas kesehatan | ENINGKATKAN per 100.000 KH | N KESEJAHTERAAN SI | ELURUH PENDUDUK 55.42 | SEMUA USIA 55.04 | 47.83 | 47.51 | Dinas kesehatan |
| 1.2 | nan an hun | Cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Dinas kesehatan | % | | 97 | 86 | 66 | 99.5 | Dinas kesehatan |
| 1.3 | 1.3 Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%). | | Dinas kesehatan | % | | 97 | 86 | 66 | 99.5 | Dinas kesehatan |
| 2.1 | 2.1 Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012- 2013: 32). | | Dinas kesehatan | per 1.000 KH | | 4.23 | 4.13 | 4.03 | 3.94 | Dinas kesehatan |
| 2.2 | 2.2 Meningkatnya Cakupan desa/kelura persentase kabupaten/ UCI (Universal Child kota yang mencapai Imunization) 80% imunisasi dasar | Cakupan desa/kelurahan Dinas / UCI (Universal Child keseh Imunization) | Dinas kesehatan | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas kesehatan |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (yang | 200 | | | | | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|-----------|--|--|--------------------|--------|-------------|------|------|-------------------|------|-----------------|
| Indikator | | disepakati) | Sumber Data | Satuan | lanun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| | lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%). | | | | | | | | | |
| 3.1 | 3.1 Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%). | | Dinas kesehatan | % | | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 5'0> | Dinas kesehatan |
| 3.2 | 3.2 Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297). | Angka penemuan penderita TB Paru (CDR) | Dinas Kesehatan | % | | 30 | 35 | 32 | 40 | Dinas kesehatan |
| en en | 3.3 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212). | Angka kesakitan Malaria/ Dinas 1000 penduduk (API) keseha | Dinas Kesehatan | (00/0) | | ₹ | ₽ | ₹ | ₹ | Dinas kesehatan |
| e. Si | 3.5 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35. | Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun | Dinas Kesehatan | rate | | 82 | £ 73 | ₹3 | £4 | Dinas kesehatan |
| 4.1 | 4.1 Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%). | Prevalensi merokok pada Dinas usia ≤ 18 tahun keseh | Dinas Kesehatan | % | | 6.5 | 4.7 | ຫຼຸ່ | 5.2 | Dinas kesehatan |
| 5.5 | 4.2 Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%). | Pelayanan Penderita Hipertensi | Dinas kesehatan | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas kesehatan |
| 4.4 | 4.4 Meningkatnya jumlah kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019: menjadi 280 (2015: 80). | Cakupan kunjungan pasien gangguan jiwa di puskesmas | Dinas kesehatan | | | | | | | Dinas kesehatan |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (yang | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | 9000 | Tar | Target Pencapaian | 1000 | Penanggungjawab |
|--------|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 5.1 | N 7 9 X F 5 5 2 2 7 F 4 | disepakati) Penyalabgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan | BNNK, Dinas Kesehatan | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana BNNK, Dinas Kesehatan |
| 6.1 | 6.1 Menurunnya jumlah korban kematian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas. | Jumlah korban kematian POLRES dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas | POLRES | JML MD LR | 1,892 161 3 1,728 | 1,892 161 3 1,728 | 1,892 161 3 1,728 | 1,892 161 3 1,728 | 1,892 161 3 1,728 | POLRES |
| 7.1 | 7.1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6). | Total Fertility Rate (TFR) | Dinas P3AP2KB | % | 2017 | 2 | 7 | 2 | 7 | Dinas P3AP2KB |
| 7.2 | 7.2 Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%). | angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara | Dinas P3AP2KB | % | 2017 | 79,30 | 79,35 | 79,40 | 79,50 | Dinas P3AP2KB |
| 7.3 | 7.3 Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKIP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23.5% (2012- 2013:18,33%). | angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKLP) cara modern | Dinas P3AP2KB | % | 2017 | | | | | Dinas P3AP2KB |
| 8.2 | 8.2 Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%). | Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan | Dinas Kesehatan | % | | 79 | 82 | S | 88 | Dinas Kesehatan |
| TUJUAN | I GLOBAL 4. MENJAMI 1.4 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019 | TUJUAN GLOBAL 4. MENJAMIIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA 1.4 1.4 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar Dinas % ≥100% ≥100% ≥100% ≥100% | AN YANG INK Dinas Pendidikan | LUSIF DAN M | IERATA SERTA MENII ≥100% | NGKATKAN KESEMP ≥100% | >ATAN BELAJAR SEP ≥100% | 'ANJANG HAYAT UN ≥100% | VTUK SEMUA ≥100% | Dinas Pendidikan |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (yang | | | - | | Targ | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------------------|----------------|-------|-------|-------------------|-------|------------------|
| Indikator | RPJMN 2015-2019 | disepakati) | sumber Data | Satuan | lanun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| | menjadi 114,09% (2015: 108%). | | | | | | | | | |
| 1.5 | 1.5 Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%). | 1.5 Meningkatnya APK APK SMP/MTs/ sederajat SMP/MTs/sederajat pada tahin 2019 menjadi 106,9%. | Dinas Pendidikan | % | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% | Dinas Pendidikan |
| 1.7 | 1.7 Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun). | rata-rata lama sekolah | Dinas Pendidikan | tahun | 10.36 | 10.39 | 10.42 | 10.45 | 10.48 | Dinas Pendidikan |
| 2.1 | 2.1 Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%). | 2.1 Meningkatnya APK APK anak yang mengikuti Dinas anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dini (PAUD) pada Lahun 2019 menjadi 77,2% (2015; 70,06%). | Dinas Pendidikan | % | 78.23 | 78.26 | 78.29 | 78.32 | 78.35 | Dinas Pendidikan |
| 4.1 | 4.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender | Dinas Pendidikan | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| 4.2 | 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender | Dinas Pendidikan | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| TUJUAN | GLOBAL 5. MENCAPA | TUJUAN GLOBAL 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN | R DAN MEM | BERDAYAKAN | KAUM PEREMPUAN | - | | | | |
| 11 | Meningkatnya jumlah kebijakan jumlah kebijakan yang responsif gender responsif gender mendukung | jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung | Dinas P3AP2KB | Perda , Perbub, SK Bupati | | | | | | Dinas P3AP2KB |

| I KAUM PEREMPUAN | |
|--|---|
| | o Para C |
| GENDER DAN N | |
| APAI KESETARAAN GE | the second and the fact that the second |
| TUJUAN GLOBAL 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKA | A A hA market hands and |
| ₫ | , |
| | |

| , | 1 1 Manipulation | manufactured deleniti | O. Co. | 4 4 A Manufacture | | | 7/10/00/00/00/00 |
|-----|--|--|---------|-------------------|--|--|------------------|
| 7.7 | T.1 Meningkatnya | 1.1 Meningkatnya jumian kebijakan yang | Dinas | rerda, | | | DINAS PSAPZKB |
| | jumlah kebijakan yang responsif gender | responsif gender | P3AP2KB | Perbub, SK | | | |
| | responsif gender | mendukung | | Bupati | | | |
| | mendukung | pemberdayaan | | | | | |
| | pemberdayaan | perempuan | | | | | |
| | perempuan pada | | | | | | |
| | tahun 2019 bertambah | | | | | | |
| | sebanyak 16 (2015: | | | | | | |
| | 19). | | | | | | |
| 2.1 | 2.1 Menurunnya | kasus kekerasan | Dinas | anak | | | Dinas P3AP2KB |
| | prevalensi kasus | terhadap anak | P3AP2KB | | | | |
| | kekerasan terhadap | perempuan | | | | | |
| | anak perempuan pada | | | | | | |
| | tahun 2019 (2013: | | | | | | |
| | 20,48 %). | | | | | | |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (vang | | | | | | Target F | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|---------------|---|---|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|-------------------|------|-----------------|
| Indikator | | disepakati) | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| 2.2 | 2.2 Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%). | persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | Dinas P3AP2KB | % | 2017 | 100 | 100 | | 100 | 100 | Dinas P3AP2KB |
| 4.1 | 4.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%). | Persentae keterwakilan perempuan di DPR | Dinas P3AP2KB | % | 2017 | 30 | 30 | | 30 | 30 | Dinas P3AP2KB |
| 4.2 | 4.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%). | persentase keterwakian perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) | ВКРР | % | | | | | | | ВКРР |
| 5.1 TUJUAN | 5.1 Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012- 2013: 11,4 %). | 5.1 Menurunnya unmeet need kebutuhan Dinas % 2017 5.1 Menurunnya unmeet need kebutuhan Dinas % 2017 5.2 Summeet need ber-KB pad-2018 | Dinas P3AP2KB A PENGELOL | % AAN AIR BER | 2017 SIH DAN SANITASI YA | ING BERKELANJU | TAN UNTUK | SEMUA | | | Dinas P3AP2KB |
| 1.2 | 11.2 Meningkatnya kapasitas prasarana airi baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik dan penyediaan air baku | 1.2 Meningkatnya kondisi prasarana kapasitas prasarana air penyediaan air baku baku ubaku untuk melayani (jimlah prasarana rumah tangga, perkotaan dan industri terkelola dengan baik pada tahun 2019 dibagi dengan perkotaan dan industri terkelola dengan baik menjadi 118.6 dibagi dengan total manjadi 118.6 jumlah prasarana maj/detik (2015: 51,44 penyediaan air baku) penyediaan air baku untuk 60 pulau. | DPU PKP | % | 2017 | 75 | 80 | | 8 | 85 | Dinas DPUPKP |
| 2.1 | 2.1 Meningkatnya Cakupan bangunan akses terhadap sanitasi (rumah dan institusi) yang layak pada tahun yang bebas jentik (2014: 60,9%). | Cakupan bangunan (rumah dan institusi) yang bebas jentik nyamuk | Dinas kesehatan | % | | | | | | | Dinas kesehatan |
| 2.2 | 2.2 Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | 2.2 Meningkatnya Cakupan desa yang telah Dinas Jimah desa-kelurahan melaksanakan 5 pilar keseht yang melaksanakan STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Dinas kesehatan | % | | 15 | 20 | | 25 | 30 | Dinas kesehatan |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (vang | | | | | Target Pencanajan | ncanajan | | Penanggingiawah |
|-----------|--|--|-------------|-----------------|--|---|--|--|---|-----------------|
| Indikator | | disepakati) | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| | menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000). | | | | | | | | | |
| 3.1 | 3.1 Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem | jumlah infrastruktur air Iimbah dengan sistem terpusat skala kota, | DLH | SR | Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR | Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR | Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR | Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR | Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR | DLH |
| | terpusat skala kota, kawasan, komunal | kawasan, komunal (IPAL komunal) | | SR | Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR | Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR | Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR | Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR | Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR | |
| | pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota | | | lokasi | Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiyata 1 lokasi | Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiyata 1 lokasi | Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwivata 1 lokasi | Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiyata 1 lokasi | Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiyata 1 lokasi | |
| | | | | nnit | Pembangunan IPAL individual 50 unit | Pembangunan IPAL individual 50 unit | Pembangunan IPAL individual 50 unit | Pembangunan IPAL individual 50 unit | Pembangunan IPAL individual 50 unit | |
| 3.2 | 3.2 Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kahunaran/kota | tersedianya sarana prasana pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | DLH | | pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja 1 unit | Pelaksanaan pembinaan masyankat tentang tekrink pengelolaan jaringan 1 kali | Pelaksanaan pelatihan sedot lumpur tinja IPAL Komunal kali; Pelaksanaan pembinaan masyarakat tentang teknik pengelolaan jaringan 1 kali; Pelaksanaan FGD pengelolaan IPAL | Pengelolaan IPLT selama 12 bulan | Pelaksanaan pembinaan masyarakat tentang mekenik pengelolaan jaringan 1 kali | н |
| 3.3 | 3.3 Pengelolaan kualitas air, baik di | Terkelolanya kualitas air bersih, mata air, badan air air hujan tanah | ргн | titik H | Pengujian/pemeriksaa n kualitas air bersih pengujian/pemerikaa | Pengujian/pemeriksaa n kualitas air bersih Pengujian/pemerikaa | | Pengujian/pemeriksaa n kualitas air bersih Dengujian/nemeriksaa | Pengujian/pemeriksaa n kualitas air bersih Pengujian/pemeriksaa | РІΉ |
| | sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis | ar, air nujan, tanan pertanian, air embung, air limbah (Cakupan titik pantau kualitas lingkungan hidup) | | titik titik | rengujan/pemeriksaa n kualitas mata air Pengujian/pemeriksaa n kualitas badan air 50 titik | rengujian/pemeriksaa n kualitas mata air Pengujian/pemeriksaa n kualitas badan air 50 | rengujian/pemenksaa n kualitas mata air Pengujian/pemeriksaa n kualitas badan air 50 titik | Pengujian/pemenksaa n kualitas mata air Pengujian/pemeriksaa n kualitas badan air 50 titik | rengujian/pemeriksaa n kualitas mata air Pengujian/pemeriksaa n kualitas badan air 50 titik | |
| | dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai. | | | lokasi titik | Pengujan/pemeriksaa n kualitas air hujan 60 lokasi Pengujian/pemeriksaa n kualitas tanah | Pengujian/pemeriksaa n kualitas air hujan 60 lokasi Pengujian/pemeriksaa n kualitas tanah | 60 | Pengujan/pemeriksaa n kualitas air hujan 60 lokasi Pengujan/pemeriksaa n kualitas tanah | Pengujian/pemeriksaa n kualitas air hujan 60 lokasi Pengujian/pemeriksaa n kualitas tanah | |
| | | | | titik | Pertahanan 30 titik Pengujian/pemeriksaa n kualitas air embung 25 titik | perranahan 30 titik Pengujian/pemeriksaa n kualitas air embung 25 titik | | Pertandian 30 titik Pengujian/pemeriksaa n kualitas air embung 25 titik | Pertanahan 30 titik Pengujian/pemeriksaa n kualitas air embung 25 titik | |
| | | | | usana/kegiatan | Pengujian/pemeriksaa n kualitas air limbah 25 usaha/kegiatan | | Pengujan/pemeriksaa n kualitas air limbah 25 usaha/kegiatan | Pengujan/pemeriksaa n kualitas air limbah 25 usaha/kegiatan | | |
| | | Embung dan Sungai Terkelola Dengan Baik | DPUPKP | % | 2017 | 78 | 79 | 80 | 82 | DPUPKP |
| 3.4 | 3.4 Peningkatan kualitas air sungai | Terlaksananya gerakan Kebersihan Sungai, lokasi | DLH | kali | Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali | Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali | Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali | Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali | Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali | DLH |
| | sebagai sumber air baku menuju baku | bersih sungai | | lokasi | Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi | Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi | Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi | Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi | Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi | |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (vang | | | | | Target Pencapaian | ncapaian | | Penanggungiawab |
|-----------|--|---|---------------|--------|---|--|--|--|--|-----------------|
| Indikator | RPJMN 2015-2019 | disepakati) | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| | mutu rata-rata air sungai kelas II. | | | sungai | Penyisiran sungai 3 sungai | Penyisiran sungai 3 sungai | Penyisiran sungai 3 sungai | Penyisiran sungai 3 sungai | Penyisiran sungai 3 sungai | |
| | | | | kali | Pertemuan masyaraka peduli sungai 2 kali | Pertemuan masyarakat Pertemuan masyarakat Pertemuan masyarakat Pertemuan masyarakat Pertemuan masyarakat peduli sungai 2 kali peduli sungai 2 kali peduli sungai 2 kali peduli sungai 2 kali peduli sungai 2 kali | Pertemuan masyarakat peduli sungai 2 kali | Pertemuan masyarakat peduli sungai 2 kali | Pertemuan masyarakat peduli sungai 2 kali | |
| | | Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti | DPUPKP | % | 2017 | 87 | | 68 | 06 | DPUPKP |
| 5.4 | 4.2 Pemberian insentif perghematan air perghematan air pertanjan/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce. Managan pergembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture). | | рриркр | % | 2017 | 78 | 82 | 79 | 8 | РР ИРКР |
| 7.5 | 5.7 Melanjutkan penataan heartaan (daya air, antara lain dengaar: Mersinergikan pengaturan kewenangan dan kewenangan dan kewenangan dan kepentingan serta pemerintahan beserta pemerintahan beserta pemerintahan beserta pemerintahan beserta pemerintahan beserta kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningarkan kenampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi pengelolaan sumber daya air wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang terbeh tuki; dan Meningkatkan mengalakan pengelolaan sumber daya air yang terbeh tuki; dan Meningkatkan mengalakan pengelolaan sumber daya air yang terbeh tuki; dan Meningkatkan mengada meng | Embung dan Sungai | DPUPKP | % | 2017 | 78 | 62 | 08 | 8.5 | БР ИРКР |

| Kode | Kode SASARAN NASIONAL Indikator RAD (yan | Indikator RAD (yang | oto C sodowi | 10.40 | | | Target F | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|-----------|--|--|--------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Indikator | Indikator RPJMN 2015-2019 | disepakati) | Sumber Data | Satuan | lanun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| | kapasitas kelembagaan | | | | | | | | | |
| | pengelolaan sumber daya air | | | | | | | | | |
| 6.4 | 6.4 Mengurangi luasan | 6.4 Mengurangi luasan pengurangan luasan | ргн р | batang | Bibit tanaman | Pada kegiatan |
| | lahan kritis melalui | lahan kritis melalui | | | pemeliharaan hutan | Perlindungan dan |
| | rehabilitasi di dalam | rehabilitasi di dalam KPH | | | rakyat 2.000 batang | rakyat 1.000 batang | rakyat 1.000 batang | rakyat 1.000 batang | rakyat 1.000 batang | Konservasi SDA, |
| | KPH seluas 5,5 juta | | | | | | | | | dengan Kegiatan |
| | hektar pada tahun | | | | | | | | | Konservasi SDA |
| | 2019. | | | | | | | | | dan Pengendalian |
| | | | | | | | | | | kerusakan |
| | | | | | | | | | | Sumber-sumber |
| | | | | | | | | | | Air dan Kegiatan |
| | | | | | | | | | | Pengelolaan |
| | | | | | | | | | | Keanekaragaman |
| | | | | | | | | | | Hayati dan |
| | | | | | | | | | | Ekosistem |

TUJUAN GLOBAL 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN, DAN MODERN UNTUK SEMUA

TUJUAN GLOBAL 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

| 4.1 | 4.1 Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun. | Jumlah penganggur a | Dinas Tenaga % Kerja | \ 0 | 5.78 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | Dinas Tenaga Kerja |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 8.2 | 8.2. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta). | jumlah wisatawan mancanegara i | Dinas o Pariwisata | orang | | 4,323,000 | 4,561,000 | 4,834,000 | 5,149,000 | Dinas Pariwisata |

TUJUAN GLOBAL 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

| 11 | 1.1. Terbangunnya jalan tol sepanjang | Cakupan Pembangunan Jalan dan Jembatan | DPUPKP | % | 2017 | 27.735 | 28,180 | 29,400 | 30,800 | DPUPKP |
|-----|--|---|--------|----------------|--|--|--|--|--|--------|
| | 1.000 km pada tahun Proporsi Drainase 2019 (2014: 820 km). Gorong-Gorong Kabupaten Dalam Mantap | Proporsi Drainase dan Gorong-Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Mantap | DPUPKP | % | 2017 | 48.9 | 49 | 50 | 52 | DPUPKP |
| | | Cakupan Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jalan dan Jembatan | DPUPKP | % | 2017 | 35.86 | 36.53 | 37.75 | 38.42 | DPUPKP |
| | | Cakupan Ketersediaan Data Base Jalan dan Jembatan | DPUPKP | % | 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | DPUPKP |
| | | Proporsi Sarana Prasarana Kebinamargaan Dalam Kondisi Baik | DPUPKP | % | 2017 | 96 | 86 | 86 | 86 | DPUPKP |
| 3.1 | | | DLH | kali/kendaraan | lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali | kali/kendaraan lomba emisi kendaraan lomba emisi kendaraan lomba emisi kendaraan lomba emisi kendaraan DLH bermotor 1 kali | lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali | lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali | lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali | DUH |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (vang | | | | | Target Pe | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|-----------|--|--|----------------------|---------------------|---|---|---|---|---|----------------------|
| Indikator | RPJMN 2015-2019 | disepakati) | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| | 3.1. Berkurangnya emisi CO2 mendekati | Jumlah kendaraan yang Iulus melakukan uji emisi | | | dengan 80 kendaraan dinas | dengan 80 kendaraan dinas | dengan 80 kendaraan dinas | dengan 80 kendaraan dinas | dengan 80 kendaraan dinas | |
| | 26% pada tahun 2019. | | | kali/kendaraan | uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan | uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan | uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan | uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan | uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan | |
| TUJUAN | GLOBAL 10. MENGU | TUJUAN GLOBAL 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA | NTRA DAN AN | ITARNEGARA | | | | | | |
| 1.2 | 1.2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%). | Persentase KK miskin | Dinas Sosial | % | 2017 | 9.35% | 8.68% | 8.50% | 8.00% | Dinas Sosial |
| TUJUAN | TUJUAN GLOBAL 11. MENJADIKAN KOTA DAN PE | JIKAN KOTA DAN PERM | UKIMAN INKI | .USIF, AMAN, | RMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN | IKELANJUTAN | | | | |
| 11 | 1.1. Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019. | 1.1. Tersedianya akses Ketersediaan Rumah bagi 3,7 jura rumah Layak Huni tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga | DPU PKP | % | 2017 | 98.5 | 98.75 | 66 | 99.25 | DPUPKP |
| 2.1 | 2.1. Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: | pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan | Dinas Perhubungan | % | | 56 | 24 | 25 | 27 | Dinas Perhubungan |
| 5.1 | 5.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana | 5.1.a. Jumlah lembaga tangguh bencana | врво | Desa dan Sekolah | 34 Destana dan 46 SSB | 34 Destana dan 46 SSB 37 Destana dan 52 SSB 45 Destana dan 60 SSB | 45 Destana dan 60 SSB | 53 Destana dan 68 SSB | 61 Destana dan 76 SSB | врво |
| | (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019. | 5.1.b. Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana | врво | Orang | 7,918 | 8,548 | 9,408 | 10, 268 | 11,128 | ВРВО |
| 5.2 | 5.2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience). | 5.2 Jumlah lembaga tangguh bencana | ВРВО | Desa dan Sekolah | 34 Destana dan 46 SSB | 34 Destana dan 46 SSB 37 Destana dan 52 SSB 45 Destana dan 60 SSB 53 Destana dan 68 SSB 61 Destana dan 76 SSB | 45 Destana dan 60 SSB | 53 Destana dan 68 SSB | 61 Destana dan 76 SSB | BP BD |
| 5.3 | 5.3. Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | 5.3 Prosentase sistem peringatan dini (EWS) yang berfungsi baik | врво | % | 06 | 29 | 71 | 75 | 78 | BP BD |
| 6.1 | 6.1. Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada | Pelayanan sampah perumahan dan niaga | ргн | m3/hari | Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari | Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari | Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari | Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari | Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari | ргн |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (yang | | | | | Target Pe | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|-------------------|---|--|---------------------------|--|--|--|---|----------------------------------|--|---|
| Indikator | RPJMN 2015-2019 | | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| | tahun 2019 (2013: 46%). | | | | | | | | | |
| 7.1 | 7.1. Terwujudnya kota Persentase luasan RT hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan | Persentase luasan RTH | ргн | m2 | Pembangunan Taman Jl. Akses Stadion (lanjutan) | Penataan Lapangan Pembangunan Ta Denggung seluas 6.000 Layak Anak Desa m2 Sumberejo seluas 2.000 m2 | Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sumberejo seluas 2.000 m2 | | | Pada pencapaian Tahun 2017 diperoleh data penataan RTH |
| | ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 | | | m2 | Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan | Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul (lanjutan) seluas 1.450 m2 | Pembangunan Taman Layak Anak Desa Pondokrejo seluas 500 m2 | Penataan RTH seluas 18.000 m2 | Penataan RTH seluas 18.000 m2 | yang dikelola oleh DLH sampai dengan akhir Tahun 2017 |
| | kota sedang, hingga tahun 2019. | | | m2 | Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul | Pembangunan Taman Selokan Mataran seluas 450 m2 | Pembangunan Taman Layak Anak Lap. Raden Ronggo Kalasan seluas 2.182 m2 | | | adalah 12.343 m2 dan Sleman bukan kota metropolitan |
| | | | | m2 | Pembangunan Taman depan SDN Gamping | Pembangunan Taman Kencana Desa Kalitirto seluas 250 m2 | Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidokarto seluas 300 m2 | | | |
| | | | | m2 | Pembangunan Taman depan Kantor Imigrasi | | Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidoluhur 450 m2 | | | |
| | | | | m2 | Pembangunan Taman Seturan | | Pembangunan Taman Layak Anak Desa Tegaltirto Berbah 1.000 m2 | | | |
| | | | | m2 | Pembangunan Taman Ngancar | | Penataan Taman Denggung 2.500 m2 | | | |
| | | | | m2 | Penataan lingkungan kantor Kecamatan Kalasan | | Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul (lanjutan 2) seluas 1.450 m2 | | | |
| | | | | m2 | Penyempurnaan Lapangan Pemda | | Penataan RTH Lingkungan Kecamatan Depok 2.000 m2 | | | |
| | | | | m2 | Pembangunan Taman Pasar Ngijon | | Penataan Embung Ketingan 22.150 m2 | | | |
| | | | | m2 | Pembangunan Taman Pasar Ngijon | | Pembangunan Taman Colombo 130 m2 | | | |
| | | | | | | | Pembangunan Taman Beran - Ngancar 265 m2 | | | |
| TUJUAN | GLOBAL 12. MENJAN | TUJUAN GLOBAL 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN | AN KONSUMSI | YANG BERKE | ELANJUTAN | | | | | |
| Tujuan Glo 1.1 | obal 13. Mengambil Tind 1.1 Menurunnya Indeks Risiko Bencana | Tujuan Global 13. Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya 1.1 1.1 Menurunnya 1.1.a. Jumlah lembaga BPBD Desa dan 34.1 indeks Risko Bencana tangguh Pencana Sekolah | iasi Perubahan Ik BPBD | i im dan Dampa Desa dan Sekolah | iknya 34 Destana dan 46 SSB | 37 Destana dan 52 SSB | nya 34 Destana dan 46 SSB 37 Destana dan 52 SSB 45 Destana dan 60 SSB | | 53 Destana dan 68 SSB 61 Destana dan 76 SSB BPBD | ВРВО |
| | melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat | 1.1.b. Jumlah masyarakat BPBD terlatih pada daerah rawan bencana | | Orang | 7,918 | 8,548 | 9,408 | 10,268 | 11,128 | BPBD |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (yang | 1 | , | | | Target Pe | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|-----------|--|---|-------------|--------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Indikator | Indikator RPJMN 2015-2019 | disepakati) | sumber Data | satuan | l anun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| | nasional dan daerah hingga tahun 2019. | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2.1 Terwujudnya | inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta | DLH | usaha/ kegiatan | Pemantauan usaha/kegiatan | Pemantauan usaha/kegiatan | Pemantauan usaha/kegiatan | Pemantauan usaha/keøiatan | Pemantauan usaha/ke¤iatan | DLH |
| | inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), | monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK | | 900 | pengguna bahan perusak ozon pada 25 | |
| | pelaporan dan verifikasi Emisi GRK | dokumen Biennial Update Report (BUR) ke- | | kali | Pembinaan usaha/kegiatan | Pembinaan usaha/kegiatan | Pembinaan usaha/kegiatan | Pembinaan usaha/kegiatan | Pembinaan usaha/kegiatan | |
| | yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Undate Renort (RUR) | | | | pengguna bahan perusak ozon selama 1 kali | | pengguna bahan perusak ozon selama 1 kali | | | |
| | ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen | | _ | kali | Pembinaan Kampung Iklim 2 kali | Pembinaan Kampung Iklim 2 kali | Pembinaan Kampung Iklim 2 kali | Pembinaan Kampung Iklim 2 kali | Pembinaan Kampung Iklim 2 kali | |
| | BUR ke-1). | | | prestator | Lomba Kampung Iklim dengan 3 prestator | | | Lomba Kampung Iklim dengan 3 prestator | Lomba Kampung Iklim dengan 3 prestator | |
| | | | - | batang | Penghijauan Iingkungan dengan 2.000 batang | Penghijauan lingkungan dengan 2.000 batang | Penghijauan Iingkungan dengan 2.000 batang | Penghijauan lingkungan dengan 2.000 batang | Penghijauan lingkungan dengan 2.000 batang | |

TUJUAN GLOBAL 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TUJUAN GLOBAL 15. MELINDUNGI, MERESTORAS), DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN

| PENGG | PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LA | AN DEGRADASI LAHAI | N, SERTA ME | :NGHENTIKAN I | HAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI | RAGAMAN HAYATI | | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|--|--|---|---|-------------------------|-----|
| 1.1 | 1.1 Meningkatnya | Cakupan RTH yang | DLH | lokasi | taman dan lahan | taman dan lahan | taman dan lahan | taman dan lahan | taman dan lahan | DLH |
| | kualitas lingkungan | terpelihara | | | terbuka hijau sebanyak | terbuka hijau sebanyak 🛚 terbuka hijau sebanyak 🕇 terbuka hijau sebanyak 🕇 terbuka hijau sebanyak 🕇 terbuka hijau sebanyak | terbuka hijau sebanyak | terbuka hijau sebanyak | terbuka hijau sebanyak | |
| | hidup melalui | | | | 70 lokasi | 70 lokasi | 70 lokasi | 70 lokasi | 70 lokasi | |
| | peningkatan tutupan | | | m2 | Pembangunan Taman | | Pembangunan Taman Pembangunan Taman Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | |
| | lahan/hutan hingga | | | | Jl. Akses Stadion | Jl. Akses Stadion | Jl. Akses Stadion | Jl. Akses Stadion | JI. Akses Stadion | |
| | tahun 2019. | | | | (lanjutan) seluas 1.600 | (lanjutan) seluas 1.600 | (lanjutan) seluas 1.600 | (lanjutan) seluas 1.600 | (lanjutan) seluas 1.600 | |
| | | | | | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | |
| | | | | m2 | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman Pembangunan Taman Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | |
| | | | | | Batas Kota Prambanan | Batas Kota Prambanan | Batas Kota Prambanan Batas Kota Prambanan Batas Kota Prambanan Batas Kota Prambanan | Batas Kota Prambanan | Batas Kota Prambanan | |
| | | | | | seluas 3.800 m2 | seluas 3.800 m2 | seluas 3.800 m2 | seluas 3.800 m2 | seluas 3.800 m2 | |
| | | | | m2 | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | |
| | | | | | Terasering Beran Kidul | Terasering Beran Kidul | Terasering Beran Kidul Terasering Beran Kidul Terasering Beran Kidul Terasering Beran Kidul | Terasering Beran Kidul | Terasering Beran Kidul | |
| | | | | | seluas 4.187 m2 | seluas 4.187 m2 | seluas 4.187 m2 | seluas 4.187 m2 | seluas 4.187 m2 | |
| | | | | m2 | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | |
| | | | | | depan SDN Gamping | depan SDN Gamping | depan SDN Gamping | depan SDN Gamping | depan SDN Gamping | |
| | | | | | seluas 250m2 | seluas 250m2 | seluas 250m2 | seluas 250m2 | seluas 250m2 | |
| | | | | m2 | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | |
| | | | | | depan Kantor Imigrasi | depan Kantor Imigrasi | depan Kantor Imigrasi | depan Kantor Imigrasi | depan Kantor Imigrasi | |
| | | | | | seluas 500 m 2 | seluas 500 m2 | seluas 500 m2 | seluas 500 m2 | seluas 500 m 2 | |
| | | | | m2 | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | |
| | | | | | Seturan seluas 800 m2 | Seturan seluas 800 m2 🛭 Seturan seluas 800 m2 🐧 Seturan seluas 800 m2 🐧 Seturan seluas 800 m2 💮 Seturan seluas 800 m2 | Seturan seluas 800 m2 | Seturan seluas 800 m2 | Seturan seluas 800 m2 | |
| | | | | m2 | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman Pembangunan Taman Pembangunan Taman Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | Pembangunan Taman | |
| | | | | | Ngancar seluas 178 m2 | Ngancar seluas 178 m2 | Ngancar seluas 178 m2 | Ngancar seluas 178 m2 | Ngancar seluas 178 m2 | |
| | | | | m2 | Penataan lingkungan | Penataan lingkungan | Penataan lingkungan | Penataan lingkungan | Penataan lingkungan | |
| | | | | | kantor Kecamatan | kantor Kecamatan | kantor Kecamatan | kantor Kecamatan | kantor Kecamatan | |
| | | | | | Kalasan seluas 500 m2 | Kalasan seluas 500 m2 | Kalasan seluas 500 m2 | Kalasan seluas 500 m2 Kalasan seluas 500 m2 Kalasan seluas 500 m2 | Kalasan seluas 500 m2 | |

| Kode | SASARAN NASIONAL Indikator RAD (yang | Indikator RAD (yang | 4 | 1 | - | | Target Pe | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|-----------|--|---|--------------------|--------|---|--|--|--|---|-----------------|
| Indikator | Indikator RPJMN 2015-2019 | disepakati) | Sumper Data Satuan | satuan | lanun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| | | | _ | m2 | Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m2 | Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m2 | Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m2 | Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m2 | Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m 2 | |
| | | | - | m2 | Pembangunan Taman Pasar Ngijon seluas 28 m2 | Pembangunan Taman Pembangunan Taman Pembangunan Taman Pembangunan Taman Pembangunan Taman Pasar Ngijon seluas 28 Pasar Ngijon seluas 28 Pasar Ngijon seluas 28 Pasar Ngijon seluas 28 m2 m2 m2 | Pembangunan Taman Pasar Ngijon seluas 28 m2 | Pembangunan Taman Pasar Ngjjon seluas 28 m2 | Pembangunan Taman Pasar Ngijon seluas 28 m2 | |
| 3.1 | 3.1 Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilirasi seluas 5.5 juta hektar di dalam kesatuan Pemanangkuan Hutan (KeH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,2.5 juta hekta). | bibit tanaman untuk pengurangan luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas | н По | batang | Bibit tanaman sektar sumber air sebanyak 2.000 batang | Bibit tanaman sekitar sumber air sebanyak 1.000 batang | Bibit tanaman sekitar sumber air sebanyak 1.000 batang | Bibit tanaman sekitar sumber air sebanyak 1.000 batang | Bib it tanaman sekitar sumber air sebanyak 1.000 batang | НП |

TUJUAN GLOBAL 16. MENGUATKAN MASY YG INKLUSIF & DAMAI UTK PEMB. BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UTK SEMUA & MEMBANGUN KELEMBAGAAN YG EFEKTIF, AKUNTABEL

| | Dinas P3AP2KB | Dinas P3AP2KB | Bagian Hukum |
|-------------------------------|---|--|---|
| | 06'0 | v. | |
| | 0,92 | v. | |
| | 0,94 | v. | |
| | 96'0 | s. | • |
| | 2017 | 2017 | |
| | % | an a k | pelayanan bantuan hukum |
| | Dinas P3APZKB in | Dinas P3AP2KB | Bagian Hukum |
| ATAN | Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak | Jumlah kekerasan terhadap Anak | Jumlah pelayanan bantuan hukum |
| & INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN | 1.1 Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas. | 2.1 Menurunnya prevelensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak lak-laki dan 20,48% untuk anak perempuan). | 3.1 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang |
| & INKLU | <u> </u> | 2.1 | 3.1 |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (yang | | | | | Tar | Target Pencapaian | | Penanggungjawab |
|-----------|---|--|------------------------|-----------|-------------|------|------|-------------------|------|-------------------|
| Indikator | | disepakati) | Sumber Data | satuan | lanun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| | dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019. | | | | | | | | | |
| 1.0 | 5.1 Meningkatnya Opini BPK terhadap persentase opini Wajar Laporan Keuangan Tanpa Pengeculian Daerah (WTP) atas iaporan keuangan pada tahun keuangan pada tahun kementerian/Lembaga : 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota: 13%, Kota: 13%, Kota: 14%). | | ВКАД | Opini B(K | MTP | WTP | ФТ | МТР | WTP | BK A D |
| 5.2 | 5.2 Meningkatnya persentasa Skor B atas Sistem Adurabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) uurtuk Kementerian/Lembaga 85%, Provinsi; 75%, Kabupaten/Kotas. 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi; 30,30%, Rabupaten/Kotas: 2,38%). | Predikat Lakip Kabupaten Bagian Organis | n Bagian Organisasi | predikat | < | ⋖ | ٩ | ۷ | ۷ | Bagian Organisasi |
| 5.3 | 5.3 Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%). | | ВГР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | d18 |
| 4. | 5.4 Meningkatnya persentase instansi persentase instansi permerintah yang memilik rilai indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementan/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%, pada rahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA). | Indeks Reformasi Birokrasi | Organisasi | predikat | ۵ | മ | Ф | ۵ | ۷ | Organisasi |
| | | | | | | | | | | |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (vang | | | | | Tare | Target Pencapaian | | Penanggungiawah |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------------|-------------|------|------|-------------------|------|-----------------|
| Indikator | RPJMN 2015-2019 | disepakati) | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pelaksana |
| 5.5 | 5.5 Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinisi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019. | Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik | Organisasi | % | 67.33 | | | | | Organisasi |
| 6.1 | 6.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: | Persentase keterwakilan Perempuan di DPR | Dinas P3AP2KB | % | 2017 | 30 | 30 | 30 | 90 | Dinas P3AP2KB |
| 6.2 | 6.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I ada II) (2014: Eselon I = 16,39%). | persentase keterwakian perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II) | ВКРР | % | | | | | | ВКРР |
| 7.1 | 7.1 Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepe milikan akte lahir untuk pernduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 177,4% pada tahun 2019. | Jumlah akte lahir bagi Gakin | Dukcapil | akte kelahiran | | 400 | 300 | 150 | 100 | Dukcapil |
| 7.2 | 7.2 Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%). | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia O-18 tahun) (Jumlah usia anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak) | Dinas Dukcapil | akte kelahiran | | 06 | 92,5 | 95 | 97,5 | Dinas Dukcapil |
| | | Cakupan penerbitan Akta Dinas Kelahiran (jumlah Dukcal penduduk yang lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di tahun bersangkutan dibagi jumlah kelahiran di tahun bersangkutan) | Dinas Dukcapil | akte kelahiran | | 06 | 91 | 91,6 | 63 | Dinas Dukcapil |
| 8.1 | 8.1 Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan | Jumlah pelayanan pengaduan masyarakat/ pengaduan pelanggaran HAM | Bag. Hukum | Bag. Hukum jumlah aduan | | | | | | Bag. Hukum |

| Kode | SASARAN NASIONAL | Indikator RAD (yang | | | | | Targe | Target Pencapaian | | | Penanggungjawab |
|-----------------|---|---|------------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|----|------|------------------------|
| Indikator | Indikator RPJMN 2015-2019 | disepakati) | sumber Data | satuan | lanun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | Pelaksana |
| | dengan meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM. | | | | | | | | | | |
| e. 0 | 8.3 Terlaksananya Jumlah proses penyelesalan penyel sengketa informasi inform publik melalui mediasi mediasi dan/atau ajudikasi non ligitasi ditigasi dengan persentase 85% register per tahun berjalan. | Jumlah proses penyelesalan sengketa informasi publik melalui mediasi dat/ atau non ligitasi | Bag. Hukum sengketa | sengketa | E. | | | | | | Bag. Hukum |
| TUJUAN | GLOBAL 17. MENGU | TUJUAN GLOBAL 17. MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | SANAAN DAN | MEREVITAI | .ISASI KEMITRAAN GLC | OBAL UNTUK PEMBA | NGUNAN BERKELAP | NJUTAN | | | |
| 1.0 | 9.1 Tersedianya Perjanjian Kerjasam alternatif pembayaan dengan pihak ketigauntuk pembangunan melalui kema melalui kema Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Pemerintah dengan Pemerintah dengan Penyediaan Infrastruktur (KPBU). | Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga | Bagian Pe merintaha | Dokumen | 2017 | 55 | 25 | 25 | 25 | | Bagian Pemerintahan |

Matrik Program Kegiatan, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDG's Kabupaten Sleman

| Program / Keejatan / Outout Keejatan | erjatan | Satuan | Tahun Dasar | | Target | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|---|--|----------------|----------------------|---------------------|--------|----------------|--------|--|-------------------|--------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| TUJUAN 1. MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DI MANA PUN | IISKINAN DI MANA PUN | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | Persentase KK miskin | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Pemberdayaan Fakir Miskin Komuntas Adat Terpencii (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejanteraan Sosial (PMKS) Lainnya | kdat Terpencii (KAT) dan Penya | andang Masalal | ı Kesejanteraan sosi | ai (Piviks) Lainnya | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan calon | kelompok | က | | | | | 151.54 | APBD | Dinas Sosial |
| | warga binaan PRSE | | | | | | | | | |
| | Pembinaan lanjut bagi kelompok PRSE | kelompok | 9 | | | | | | | |
| Kegiatan 2: Bimbingan Sosial dan Bantuan Bagi Keluarga Miskin Non Potensial (kesrakat) dan Lansia | Bimbingan Sosial bagi KK miskin non potensial | orang | 06 | 06 | 09 | 09 | 09 | 388.23 | APBD | Dinas Sosial |
| Rentan Sosial Ekonomi | Bimbingan Sosial bagi kelg. Lansia rentan sosial ekonomi | orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| Kegiatan 3: Pembinaan Usaha Sosial Ekonomi | Bimbingan teknis USEP-KUBE | orang | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 1,650.34 | APBD | Dinas Sosial |
| Produktif (USEP/KUBE) | Evaluasi kelompok USEP- KUBE | kelompok | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan calon warga binaan PRSE | orang | | 08 | 140 | 160 | 180 | | | |
| | Pembinaan lanjut bagi kelompok PRSE | kelompok | 1 | 10 | 80 | ∞ | ∞ | | | |
| Kegiatan 4: Penyelenggaraan Distribusi Raskin | Pendistribusian beras RTS-PM | RTS-PM | | 66,534 | 66,534 | 66,534 | 66,534 | 2,161.91 | APBD | Dinas Sosial |
| Kegiatan 5: Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial | Verifikasi dan validasi permohonan JPS | permohonan | | 200 | 200 | 200 | 200 | 580.83 | APBD | Dinas Sosial |
| DROGRAM 3. DEI AVANAN DAN BEHARII ITASI KESEIAHT | | permohonan | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana | | KPM | 50,862 | 50,862 | 48,807 | 48,807 | 48,807 | 1,695.70 | APBD | Dinas Sosial |
| PMKS | Forum PKH tingkat kabupaten | kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Forum PKH tingkat kecamatan | kali | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | | | |
| Kegiatan 2: Penanganan dan Pembinaan Permasalahan | Identifikasi/penertiban anjal | kali | | 47 | 47 | 47 | 47 | 1,874.45 | APBD | Dinas Sosial |
| Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Masyarakat | Pemulangan/tukar informasi ke daerah asal (Jateng) | kali | 24 | 50 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Keamanan/penjagaan diperempatan/ pertigaan | kali | 15 | | | | | | | |
| | Bantuan orang terlantar/ kehabisan bekal di wilayah DIY | orang | 15 | | | | | | | |
| | Bantuan orang terlantar/ kehabisan bekal di luar Wilayah DIY | orang | 09 | | | | | | | |
| | Bantuan orang terlantar/ kehabisan bekal | orang | | 09 | 09 | 09 | 09 | | | |

| | | | | | | | | isodola disodibal | | |
|--|---|--------|-------------|------|-------|----------------|------|--|-------------------|--------------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | giatan | Satuan | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
| | • | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | Bantuan perawatan/ pengiriman ke RS | orang | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | Pengiriman orang terlantar ke RS/PS/PA | orang | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Pemakaman bagi orang terlantar | orang | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Pembelian pakaian lapangan | nnit | 20 | | | | | | | |
| Kegiatan 3: Penyediaan Beras Penyangga (Buffer Stock) | Beras untuk tanggap darurat dan antisipasi bencana | ton | ∞ | | ∞ | ∞ | ∞ | 1,406.34 | APBD | Dinas Sosial |
| | Lokasi sarana dapur umum | lokasi | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Bantuan Korban bencana meninggal dunia | orang | 38 | , | , | , | , | | | |
| | Bantuan Korban bencana rawat inap | orang | 36 | , | | , | | | | |
| | Bantuan Korban bencana rawat jalan | orang | 30 | | | | | | | |
| | Operasional gudang logistik | orang | 9 | | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Bantuan Lauk-pauk bagi korban bencana | X | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana | kali | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana | orang | 20 | | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Peningkatan kapasitas Rintisan Kampung Siaga Bencana | lokasi | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| Kegiatan 4: Penyelenggaraan Distribusi Raskin | Pendistribusian beras RTS- PM | RTS-PM | 66,534 | | | | | 426.97 | APBD | Dinas Sosial |
| PROGRAM 3: Pembinaan Anak Terlantar | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penanganan Penyelesaian Bayi/Anak Terlantar | Penanganan kasus bayi/anak kasus terlantar/ABH | kasus | 20 | 40 | 25 | 30 | 30 | 288.07 | APBD | Dinas Sosial |
| PROGRAM 4: Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Kegiatan 1: Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Pelatihan kerja non Institusi- | Pelatihan kerja non Institusi- | orang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,980.25 | APBD | Dinas Sosial |
| Cacat dan Eks Trauma | onal sub kejuruan Tata Boga Pelatihan kerja non Institusi- | orang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Pelatihan kerja non Institusi- onal sub kejuruan teknisi HP | orang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Pendampingan usaha bagi penyandang cacat | orang | | 100 | 110 | 120 | 130 | | | |
| | Pelatihan kerja non Institusi- onal sub kejuruan pranata cara boso jawa | orang | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Pelatihan sablon (PUPM Kec. orang Pakem) | orang | | 20 | | | | | | |

| | | | Tahun Dasar | | Targ | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber | Instansi |
|--|---|----------------|-------------|------|------|----------------|------|---------------------------------|--------|--------------|
| rogram/ neglatan/ Output neglatan | veglatan | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Tahunan (Rp. | aan | Pelaksana |
| | | | | | | | | nnta) | | |
| | Bimtek Rajut (PUPM Desa Condongcatur Kec, Depok) | orang | | 20 | | | | | | |
| Kegiatan 2: Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma | Bantuan bagi penyandang | orang | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,308.54 | APBD | Dinas Sosial |
| | Jejaring PPDI, FKKDA, HWDI | kali | | 25 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Pengadaan & penyerahan | nnit | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | alat bantu bagi penyandang cacat | | | | | | | | | |
| | Verifikasi data penca | kali | н | н | П | П | Н | | | |
| | Operasional jamkesus | | 1 | | | | | | | |
| | Pembinaan disabilitas Kec. | kali | ī | 4 | , | 1 | 1 | | | |
| | Nimggir (POPINI) Pembinaan disabilitas Kec. | kali | | 7 | | | | | | |
| | Moyudan (PUPM) | | | | | | | | | |
| PROGRAM 5: Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pelayanan Dasar bagi Anak Asuh Panti | Pembinaan panti | kali | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 177.79 | APBD | Dinas Sosial |
| Sosial | Penyaluran sebagian | LKSA | 38 | 34 | 38 | 38 | 38 | | | |
| | kebutuhan dasar anak panti | | | | | | | | | |
| di LKSA DEOGEAM 6: Dombardanan Kolombaraan Karaiahtaraan Sarial | di LKSA | | | | | | | | | |
| Vorintan 1. Doningkatan lainting Kariasama Dalaku | Domilihan DEVE hornzortagi | 1100 | , | , | | | | 2 050 67 | Cady | Iciaco acaio |
| neglacan 1. reningkatan Jejanng nerjasania renaka- Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | (KT.PSM.LKS.TKSK.WKSBM) | E DA | - | -1 | - | -1 | -1 | 3,036.07 | Ar Bu | Ulids 303idi |
| | Jejaring karang taruna | kali | 19 | 40 | 19 | 19 | 19 | | | |
| | Jejaring IPSM&Panitia HKSN | kali | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jejaring Komda lansia | kali | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jejaring LK3 | kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jejaring LK3 | lembaga | cc | 3 | 3 | e e | 3 | | | |
| | Jejaring WKSBM | kali | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | | | |
| | Jejaring TKSK | kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jejaring LKKS | kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jejaring Komite PRS ABH | kasus | 12 | | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jejaring PPDI Kab.Sleman | kall | 12 | | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jejaring FRKADR Sieman | Kall | ٥ | | 12 | 12 | 17 | | | |
| | Pengelolaan tetengel | Orang VT | | ۰, | , | , | , | | | |
| | Tire) | Banginkorto | | 04 | | | | | | |
| | Pelatiban kerajinan fiber | orang KT | ٠ | 20 | | | | | | |
| | (DIDM Kec Severas) | Margokaton | | 27 | | | | | | |
| POFM 7- Deningkatan nartisinasi Masyarakat dalam Membangun Desa | (FOFINITION SEYEGATI) | ivial gonatuii | | | | | | | | |
| Kegistan 1: Pembinaan Kelompok Masyarakat | Penguatan kelembagaan TPK | e de ca | 86 | | | | | 37 25 | APRD | Dinas Social |
| Pembangunan Desa | TPK award | | S | | | | | | 3 | |
| Kegiatan 2: Penvelenggaraan Tim Koordinasi | Penvelengaraan sekretariat | | | | | | | 125.62 | APBD | Dinas Sosial |
| Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) | TKPKD dan forum | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3: Penyelenggaraan Koordinasi | Penguatan kelembagaan TPK | | | 98 | 98 | 98 | 98 | 1,238.95 | APBD | Dinas Sosial |
| Penanggulangan Kemiskinan Daeran (TRPK-D) | I PR award | Kall | | . ; | 1 5 | -1 £ | 1 5 | | | |
| | FOIGHT FRO | dokumon | | 7 , | 17 | 77 | 17 | | | |
| | Laporari monev pronangnis | dokumen | | T | | | | | | |

| | 1 | | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber | Instansi |
|---|---|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|---|--------------|--------------------|
| riogiami, neglatan j Output neglatan | eglatati | Jamai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | Pembinaan TPKD Kec Denok | TPK | | | | | | (B) (F) | | |
| | | Maguwoharjo | | 1 | | | | | | |
| | Penguatan kelembagaan TPK desa Kec. Cangkringan (PUPM) | desa | | 2 | | r | | | | |
| INDIKATOR SDG's | Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan | menjadi pese | rta jaminan kese | ehatan | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan | Pelayanan Ambulance Jenazah bagi masyarakat miskin di kabupaten Sleman | bulan | | 12 | 12 | 12 | 12 | 40,090.59 | APBD, DAK | Dinas Kesehatan |
| | Pelayanan kesehatan Penduduk miskin dan rentan miskin (PBI APBD) | Jiwa | | 108.765 | 108.765 | 108.765 | 108.765 | | | |
| | Pelayanan kesehatan bagi : perangkat desa, keluarga | jiwa | | 21.421 | 21.421 | 21.421 | 21.421 | | | |
| | perangkat desa, tenaga honorer, Linmas/hansip, | | | | | | | | | |
| | GTT, Kader LKM/NKM, Kader | | | | | | | | | |
| | Sosiai, Kader Posyandu, Kader KB/IMP, Bayi Baru | | | | | | | | | |
| | Lahir, Mandiri (PBPU – Pe- kerja Bukan Pnerima Upah) | | | | | | | | | |
| | Pembinaan pelayanan | kali | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Pembinaan dan evaluasi | kali | | 2 | 2 | 2 | 25 | | | |
| | laporan Jamkes | | | | | | | | | |
| | Operasional Pelayanan Jampersal (DAK) | puskesmas | | 25 | 52 | 52 | 52 | | | |
| INDIKATOR SDG's | Jumlah penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | bilitas miskin (| dan rentan yang | menerima ban | tuan pemenul | han kebutuhan d | asar | | | |
| PROGRAM 1: Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | Trauma | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma | Bantuan bagi penyandang cacat berat | orang | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,308.54 | APBD | Dinas Sosial |
| | Jejaring PPDI, FKKDA, HWDI | kali | | 25 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Pengadaan & penyerahan | unit | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | alat bantu bagi penyandang cacat | | | | | | | | | |
| | Verifikasi data penca | kali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Operasional jamkesus | kali | 1 | | | | | | | |
| | Pembinaan disabilitas Kec. Minggir (PUPM) | kali | | 4 | | | | | | |
| | Pembinaan disabilitas Kec. | kali | | 7 | | | | | | |
| | Moyudan (PUPM) | | | : | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | Jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat | miskin yang m | nendapatkan bar | ntuan tunai ber | syarat | | | | | |
| PROGRAM 1: Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejanteraan Sosial Kegiatan 1: Deningkatan Kualitas Delayanan Sarana | ian Sosial Denvaluran hantuan Program KDM | KDM | 50.862 | 50.862 | 48 807 | 48 807 | 48 807 | 1 695 70 | APRD | Dinas Social |
| hegiatari 1. Perinigkatari Nuaritas Perayahari Saraha dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi | Keluarga Harapan bagi KPM | N N | | 20,007 | 40,007 | 46,007 | 40,007 | 1,693.70 | | Ulids Sosial |
| PMKS | Forum PKH tingkat | kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Program / Kegistan / Outnut Kegistan | ediatan | Satuan | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|--|---|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|---------|--|-------------------|--------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | Forum PKH tingkat kali 17 51 51 51 51 kecamatan | kali | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | | | |
| INDIKATOR SDG's | Cakupan pertolongan pe | rsalinan oleh | fasilitas kesehat | an yang memi | liki kompetensi | kebidanan | | | | |
| PROGRAM 1:Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | : | | : | : | | | |
| Kegiatan 1: Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan | Pelayanan Ambulance Jenazah bagi masyarakat miskin di kabupaten Sleman | bulan | | 12 | 12 | 12 | 12 | 40,090.59 | APBD, DAK | Dinas Kesehatan |
| | Pelayanan kesehatan Penduduk miskin dan rentan miskin (PBI APBD) | Jiwa | | 108.765 | 108.765 | 108.765 | 108.765 | | | |
| | Pelayanan kesehatan bagi : perangkat desa, keluarga perangkat desa, keluarga honorer, Limmas/hansip, GTT, Kader LKM/NKN, Kader Sosial, Kader Posyandu, Kader KB/MNP Bayi Baru Lahir, Mandiri (PBPU – Pe- | jiwa | | 21.421 | 21.421 | 21.421 | 21.421 | | | |
| | kerja bukan Pnerima Upan) Pembinaan pelayanan iaminan kesehatan | kali | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Pembinaan dan evaluasi Japoran Jamkes | kali | | 22 | ιν | īΩ | 22 | | | |
| | Operasional Pelayanan Jampersal (DAK) | puskesmas | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| Kegiatan 2: Peningkatan kesehatan masyarakat | Data PWS KIA | 19 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 15,394.06 | APBD, DAK | Dinas Kesehatan |
| | Audit Maternal Perinatal | 고 | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Sosialisasi rekomendasi AMP kl (Penyebab kematian Ibu dan atau Bayi) | ≖ | | က | ю | е | es. | | | |
| | Bimtek Sistem pencatatan pelaporan data kesga | Pusk | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | FKTP mampu memberikan pelayanan ANC Terpadu | Faskes | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Evaluasi Manual Rujukan | ≖ | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Faskes yg menyelenggarakan kelas ibu hamil | Faskes | | 45 | 45 | 45 | 45 | | | |
| | Sosialisasi program-program KIA | ∡ | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Kecamatan yg melaksanakan program PKK KB Kes | kec. | | 17 | 17 | 17 | 17 | | | |
| | Peringatan Hari Lansia Nasional | ≖ | | 1 | Ħ | н | П | | | |
| | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | Pusk | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Kelas Ibu Hamil (PUPM Kalasan) | Desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |

| Program/ Kegiatan/ Outout Kegiatan | epiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Target | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|--|---|------------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| | ì | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | Pelatihan Pijat Bayi dan Syaraf (PUPM Kalasan Desa Taman Martani) | Desa | | T | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Pelatihan Baby Sitter dan Perawatan orang jompo (PUPM Kalasan Desa Tamanmartani) | Desa | | Ħ | н | Ħ | н | | | |
| | Data PWS KB | bulan | | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Pembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes | Kec. | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Buku Raport Kesehatanku | Buku | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | | |
| | Anak Usia Pendidikan Dasar pertahun 1 kali (Kalas Idan VII) mendapat screening kesehatan sesuai standar | per tahun | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| INDIKATOR SDG's | Cakupan desa/kelurahan | UCI (Univer | sal Child Imuniza | tion) | | | | | | |
| n dan Penanggul | gan Penyakit menular | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Peningkatan Imunisasi | Pelayanan Imunisasi bayi | orang | | 14 | 14 | 14 | 14 | 130.32 | APBD | Dinas |
| | Pelayanan Imunisasi batita | orang | | 12 | 12 | 12 | 12 | | | Kesehatan |
| | Pelayanan Anak Sekolah | SD | | 256 | 256 | 256 | 256 | | | |
| | Pelayanan Imunisasi Calon Pengantin | orang | | 22 | 2 | 2 | 22 | | | |
| | Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil | orang | | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| INDIKATOR SDG's | pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun | emua cara p | ada perempuan | usia 15-49 tahun | _ | | | | | |
| 1. Program Pelayanan Kontrasepsi | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : Pelayanan KB medis Operasi | Penjaringan peserta KB | orang | 08 | Penjaringan KB MOW dan MOP (160 orang) | 398.71 | APBD | Dinas P3AP2KB |
| | Rakor Peningkatan orang 510 Partispasi Pria dalam berKB MOP melalui forum motivator KB Pria tkt Kecamatan | orang | 510 | Penjaringan pe- serta Kb Paska persalinan dan Paska keguguran (225 orang) | | | |
| INDIKATOR SDG's | Persentase kawasan kun | uh yang ter | tangani | | | | | | | |
| PROGRAM 1: LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN | | | | | | | | | | |
| Kegjatan 1: Penataan Kawasan Kumuh | Luasan kawasan kumuh yang tertangani dibagi luasan kawasan kumuh yang ada dikalikan 100 % | % | 2017 | 97.87 | 100 | 100 | 100 | 110,708 | APBD | DPUPKP |
| INDIKATOR SDG's | Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat | SD/MI/ Sede | rajat | | | | | | | |
| PROGRAM 1: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN Kegiatan 1: Penyediaan bantuan operasional BOSDA Bantu SMP o | TAHUN Bantuan operasional SD dan SMP dan data terpilah | siswa | 2017 | 02000 | 92000 | 02000 | 92000 | 160,838 | APBD | Dinas Pendidikan |
| | gender | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos) | pendampingan pengelolaan SD/ SMP bantuan operasional sekolah Negeri/Swasta | SD/ SMP Negeri/Swas | 616 ta | 616 | 616 | 616 | 616 | 1,012 | APBD | Dinas Pendidikan |

| December (Verlieben / District | a construction | 1 | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber | Instansi |
|--|--|--------------------------|-------------|-------|-------|----------------|-------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| riogianii, Neglatani Gutput N | egiataii | 2800 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Tahunan (Rp. lufa) | aan | Pelaksana |
| Kegiatan 3 : Penyediaan beasiswa pendidikan dasar | pendataan calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa miskin | dokumen | T- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,111 | APBD | Dinas Pendidikan |
| | bantuan pendidikan bagi sis-s wa miskin dan rentan miskin | siswa | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | | | |
| | pembentukan satgas putus sekolah | tim | н | П | 11 | н | н | | | |
| | beasiswa retrieval | siswa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Kegiatan 4 : Pengadaan sarana dan sarana sekolah SD | pengadaan buku induk SD | buku | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 23,605 | APBD, DAK | Dinas Pendidikan |
| | pengadaan komputer, laptop, printer, kamera, handycam, LCD | unit | | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | pengadaan meubeleir ruang kelas SD, ruang perpustaka- an, ruang guru, ruang UKS | paket | | 21 | 21 | 21 | 21 | | | |
| | pengadaan peralatan pendidikan matematika, IPA, IPS, bahasa indonesia, jasmani, OR, kesehatan, kesenian, TIK | paket | | 92 | 65 | 65 | 65 | | | |
| | pengadaan buku kepustakaan | paket | | 99 | 99 | 99 | 99 | | | |
| INDIKATOR SDG's | Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat | /MTs/ Sederaj | at | | | | | | | |
| PROGRAM 1: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN | TAHUN | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penyediaan bantuan operasional BOSDA | Bantuan operasional SD dan SMP dan data terpilah gender | siswa | 2017 | 00059 | 00059 | 02000 | 02000 | 160,838 | APBD | Dinas Pendidikan |
| Kegiatan 2 : Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos) | pendampingan pengelolaan bantuan operasional sekolah | SD/ SMP Negeri/Swasta | 616 a | 616 | 616 | 616 | 616 | 1,012 | APBD | Dinas Pendidikan |
| Kegiatan 3 : Penyediaan beasiswa pendidikan dasar | pendataan calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa miskin | dokumen | П | 1 | н | 1 | 1 | 1,111 | APBD | Dinas Pendidikan |
| | bantuan pendidikan bagi sis- wa miskin dan rentan miskin | siswa | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | | | |
| | pembentukan satgas putus sekolah | tim | ₽ | 1 | 17 | ₽ | ₽ | | | |
| Kegiatan 4 : Pengadaan sarana dan sarana sekolah | beasiswa retrieval | siswa buku | 20 | 50 | 20 | 50 | 50 | 29.384 | | Dinas |
| SMP | | | | , , | | | | | DAK | Pendidikan |
| | pengadaan komputer, laptop, printer, kamera, handycam, LCD | i i i | | 169 | 169 | 169 | 169 | | | |
| | pengadaan meubeleir ruang kelas SD, ruang perpustaka- an, ruang guru, ruang UKS | paket | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |

| Program / Keglatan / Outnut Keglata | Keriatan | Satuan | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|---|--|-----------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | pengadaan peralatan pendidikan matematika, IPA, IPS, bahasa indonesia, jasmani, OR, kesehatan, kesenian, TIK | paket | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| INDIKATOR SDG'S PROGRAM 1: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia 0-18 tahun) (Jumlah usia anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak) DUKAN | elahiran bagi A | ınak (Usia 0-18 tahu | n) (Jumlah usia a | nak yang memiliki | Akta Kelahiran di | ibagi jumlah usia ar | ıak) | | |
| Keglatan 1: Pelayanan Publik Bidang Catatan Sipil | Akta Kelahiran | Dokumen | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 1.831,897 | APBD, DAK | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan sipil |
| Kegiatan 2: Pelayanan Akta Pencatatan Sipil bagi Keluarga Miskin | Akta Kelahiran Bagi Gakin | Dokumen | 150 | 400 | 300 | 150 | 100 | 1.406,182 | APBD | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan sipil |
| INDIKATOR SDG's Cak PROGRAM 1: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Cakupan penerbitan Akta Kelahiran (jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di tahun bersangkutan dibagi jumlah kelahiran di tahun bersangkutan) | lahiran (jumlah | ı penduduk yang lah | ir dan mempero | leh Akta Kelahiran | di tahun bersang | kutan dibagi jumla | n kelahiran di tahun | bersangkut | (ue |
| Kegiatan 1: Pelayanan Publik Bidang Catatan Sipil | Akta Kelahiran | Dokumen | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 1.831,897 | APBD, DAK | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan sipil |
| Kegiatan 2: Pelayanan Akta Pencatatan Sipil bagi Keluarga Miskin | Akta Kelahiran Bagi Gakin | Dokumen | 150 | 400 | 300 | 150 | 100 | 1.406,182 | APBD | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan sipil |
| INDIKATOR SDG's December Department of the Department of the Beauting Alam | Jumlah Desa Tangguh Bencana | ъг | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Perungangan Risiko Bencana | Desa tangguh bencana | desa | 34 Destana | 37 Destana | 45 Destana | 53 Destana | 61 Destana | 4,095 | APBD | ВРВО |
| INDIKATOR SDG's | kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi | ncana terpenul | Ē | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penyediaan Beras Penyangga (Buffer Stock) | Beras untuk tanggap darurat dan antisipasi bencana | ton | ∞ | | ∞ | ∞ | ∞ | 1,406.34 | APBD | Dinas Sosial |
| | Lokasi sarana dapur umum Bantuan Korban bencana | lokasi orang | 38 | | - 5 | - 2 | - 5 | | | |
| | neiniggal duna Bantuan Korban bencana rawat inap | orang | 36 | | | | | | | |
| | Bantuan Korban bencana | orang | 30 | | | | | | | |
| | Operasional gudang logistik | orang | 9 | | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Bantuan Lauk-pauk bagi korban bencana | X | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | |

| | | | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi | Sumber | Instanci |
|---|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------|--------------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Kegiatan | Satuan | 2017 | | | | | Tahunan (Rp. | Pendan- | Pelaksana |
| | | | i | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Juta) | aan | |
| | Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana | kali | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana | orang | 20 | | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Peningkatan kapasitas Rintisan Kampung Siaga Bencana | lokasi | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| PROGRAM 2: Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korb | Korban Bencana Alam | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam | Sosialisasi penanganan | orang | 100 | | , | , | | 366.52 | APBD | Dinas Sosial |
| 200000000000000000000000000000000000000 | Pelatihan ketrampilan bagi | orang | 120 | | | | | | | |
| | Beras untuk tanggap darurat | ton | | 4.5 | | | | | | |
| | dan antisipasi bencana | ionici | | , | | | | | | |
| | Operasional gudang logistik | orang | | 7 9 | | | | | | |
| | Bantuan Lauk-pauk bagi korban bencana | × | | 100 | | | | | | |
| | Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana | kali | | 2 | | | | | | |
| | Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana | orang | | 100 | | | | | | |
| | Peningkatan kapasitas Rintisan Kampung Siaga Bencana | lokasi | | 2 | | | | | | |
| | Sosialisasi dan pelatihan ketrampilan satgassos | lokasi | | 2 | | | | | | |
| | Sosialisasi dan pelatihan ketrampilan satgassos | orang | | 100 | | | , | | | |
| INDIKATOR SDG's Jumlah sistem Drogram Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korhan Bencana Alam | Jumlah sistem peringatan dini (EWS) kebencanaan | i (EWS) keber | ıcanaan | | | | | | | |
| Kegiatan 2: Pengelolaan Early Warning System Kebencanaan | Jumlah system peringatan dini (EWS) Kebencanaan | System | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1,769 | APBD | врво |
| INDIKATOR SDG's | a. Jumlah lembaga tangguh bencana | encana | | | | | | | | |
| Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | oan Bencana Alam | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penguatan Kelembagaan Masyarakat | Desa tangguh bencana dan | desa dan | 34 destana dan | 37 destana dan | 45 destana dan | 53 destana dan | 61 destana dan | 4,095 | APBD | BPBD |
| INDIKATOR SDG's | b. Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana | pada daerah | rawan bencana | 200 | 255 | | | | | |
| Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | oan Bencana Alam | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Stimulasi dan sosialisasi penggunana sarpras pengurangan risiko bencana | Gladi lapang penanggulangan bencana | Orang | 6,860 | 630 | 630 | 930 | 630 | 3,044 | | |
| Kegiatan 2: Pengelolaan sarpras penanganan pengungsi | Pelatihan pengelolaan barak pengungsi dan pelatihan pengelolaan dapur umum | Orang | 1,000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,577 | | |
| | | | | | | | | | | |

| Drouran / Koniston / Ostost Koniston | neteino | Society | Tahun Dasar | | Tar | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber | Instansi |
|--|--|--------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|---------|---------------------------------|--------|--------------------|
| riogiani, neglatan, output n | -Biarai | 2808 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| Kegiatan 3: Peningkatan kapsitas masyarakat dalam pelaksanaan rehab rekon paska bencana | Pelatihan pertukangan | Orang | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,096 | | |
| TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN | ENCAPAI KETAHANAN PAR | IGAN DAN G | ZI YANG BAIK, S | ERTA MENING | SKATKAN PERT | ANIAN BERKELA | NJUTAN | | | |
| INDIKATOR SDG's | Cakupan status balita gizi buruk | ž | | | | | | | | |
| PKOGKAM 1: Program Perbaikan uzi Masyarakat Kegiatan 1: Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang | Sosialisasi Dalam Rangka Pemantauan Status Gizi | kali | | 1 | н | 1 | 1 | 511.74 | APBD | Dinas Kesehatan |
| yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat | (PSG) | <u>:</u> | | , | , | , | , | | | |
| gizi iliki O idililiya | Money Penerapan PMBA di | Puskesmas | | 1 25 | 1 25 | 1 25 | 1 25 | | | |
| | wilayah Puskesmas | | | ì | ì | ì | ì | | | |
| | Bimtek Perencanaan Program Percepatan penanganan Masalah Gizi | kali | | 2 | 2 | 2 | 5 | | | |
| | Seminar Suplementasi Gizi | kali | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Workshop Pemberian Makan Bayi dan Anak Balita (PMBA) | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Bimtek tatalaksana gizi buruk | kali | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Bimtek surveilans gizi | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Bimtek pemantauan pertumbuhan | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Screening Anemia Remaja | remaja putri | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Monev pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri anemia | Puskesmas | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Pemberian tambahan makanan dan vitamin Bumil dan balita (PUPM Minggir) | orang | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Pelatihan kader PMBA (PUPM Kalasan) | desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pemeriksaan Hb remaja Putri pemeriksaan Anemia setelah pemberian TTD | pemeriksaan | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Pengadaan Bahan Makanan Utk Pasien di TFC | Paket | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Kegiatan 2: Pemberdayaan masyarakat untuk | Bimtek Konselor ASI | kali | | 3 | 3 | 3 | 3 | 108.85 | APBD | Dinas |
| pencapaian keluarga sadar gizi | Sosialisasi dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional | kali | | T. | П | н | T | | | Kesehatan |
| | Lomba Posyandu | kali | | 1 | Н | н | н | | | |
| | Seminar dalam rangka Pekan ASI sedunia | | | П | п | П | ₽ | | | |
| | Monev Program -program kesehatan KIA & Gizi | faskes | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Lomba balita sehat (PUPM Kalasan) | desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| INDIKATOR SDG's | Cakupan balita pendek dan sangat pendek | angat pendek | | | | | | | | |

| | | | Tahun Dasar | | Targ | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber | Instansi |
|--|--|--------------|-------------|------|------|----------------|------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | (egiatan | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. | Pendan- aan | Pelaksana |
| DDOCDAM 1. December Dorbeiten Giri Manenalest | | | | | | | | nra) | | |
| registan 1: Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang vodium (GAKY) kurang vitamin A dan kekurangan zat | Sosialisasi Dalam Rangka Pemantauan Status Gizi (PSG) | kali | | 1 | 1 | 1 | Ħ | 511.74 | APBD | Dinas Kesehatan |
| gizi mikro lainnya | _ | kali | | н | | - | + | | | |
| | Money Penerapan PMBA di | Puskesmas | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Bimtek Perencanaan | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Program Percepatan penanganan Masalah Gizi | | | | | | | | | |
| | Seminar Suplementasi Gizi | kali | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Workshop Pemberian Makan Bayi dan Anak Balita (PMBA) | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Bimtek tatalaksana gizi buruk | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Bimtek surveilans gizi | kali | | 1 | 1 | П | 1 | | | |
| | Bimtek pemantauan pertumbuhan | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Screening Anemia Remaja | remaja putri | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Monev pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri anemia | Puskesmas | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Pemberian tambahan makanan dan vitamin Bumil dan balita (PUPM Minggir) | orang | | 50 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Pelatihan kader PMBA (PUPM Kalasan) | desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pemeriksaan Hb remaja Putri pemeriksaan Anemia setelah pemberian TTD | pemeriksaan | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Pengadaan Bahan Makanan Utk Pasien di TFC | Paket | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Kegiatan 2: Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi | Bimtek Konselor ASI | kali | | 8 | es. | m | æ | 108.85 | APBD | Dinas Kesehatan |
| | Sosialisasi dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional | kali | | T | н | ~ | 1 | | | |
| | Lomba Posyandu | kali | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Seminar dalam rangka Pekan ASI sedunia | kali | | 1 | н | Н | н | | | |
| | Monev Program -program kesehatan KIA & Gizi | faskes | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Lomba balita sehat (PUPM Kalasan) | desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| INDIKATOR SDG's | prevalensi anemia pada ibu hamil | amil | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan 1: Penanggulangan kurang energi protein | Sosialisasi Dalam Rangka | kali | | 1 | 1 | 1 | 1 | 511.74 | APBD | Dinas |
| (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang | Pemantauan Status Gizi (PSG) | | | | | | | | | Kesehatan |

| | | | | | | | | Indikatif Alokasi | Sumbor | |
|--|--|------------------|--------------------|------|-------|------------------|------|-------------------------|---------|---------------------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | large | l arget I anunan | | Anggaran 5 | Pendan- | Instansi |
| | | | 7107 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | – Ianunan (kp. Juta) | aan | relaksana |
| yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat | Desiminasi hasil PSG | kali | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| gizi mikro lainnya | Monev Penerapan PMBA di | Puskesmas | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | wilayah Puskesmas | <u></u> | | | , | • | , | | | |
| | Biritek Perencanaan | Kall | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Program Percepatan penanganan Masalah Gizi | | | | | | | | | |
| | Seminar Suplementasi Gizi | kali | | ₩. | н | ₽ | п | | | |
| | Workshop Pemberian Makan | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Bayi dan Anak Balita (PMBA) | | | | | | | | | |
| | Bimtek tatalaksana gizi buruk | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Bimtek surveilans gizi | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Bimtek pemantauan | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Screening Appenia Remaia | remais nutri | | 200 | 001 | 200 | 200 | | | |
| | Scientific Arientia Nemaja | remaja pum | | 200 | 200 | 000 | 200 | | | |
| | Monev pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri anemia | Puskesmas | | 52 | 7 | 5 | 52 | | | |
| | Domborian tambahan | prono | | 0 | C | C | C | | | |
| | makanan dan vitamin Bumil dan balita (PUPM Minggir) | 20 5 5 | | o, | S, | S, | R | | | |
| | Pelatihan kader PMBA (PUPM Kalasan) | desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | 41 | | | 007 | 000 | 007 | 007 | | | |
| | Pemeriksaan Hb remaja Putri pemeriksaan Anemia setelah pemberian TTD | pemeriksaan | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Pengadaan Bahan Makanan | Paket | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Utk Pasien di TFC | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif | i 6 bulan yang m | endapat ASI eksklı | usif | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pemberdayaan masyarakat untuk | Bimtek Konselor ASI | kali | | 3 | cc | c | 3 | 108.85 | APBD | Dinas |
| pencapaian keluarga sadar gizi | Sosialisasi dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional | kali | | ₽ | ₽ | 1 | ₽ | | _ | Kesehatan |
| | Lomba Posyandu | kali | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Seminar dalam rangka Pekan | | | 1 | П | 1 | 1 | | | |
| | ASI sedunia | | | | | | | | | |
| | Monev Program -program | faskes | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | kesenatan KIA & GIZI | | | | | | | | | |
| | Lomba balita senat (PUPM Kalasan) | desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| INDIKATOR SDG's | Jumlah produksi ikan konsumsi | isi | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Budidaya Perikanan | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul | Pembelian benih calon induk Lele | ekor | 3700 | 2000 | 10000 | 3700 | 3700 | 00:529 | APBD | Dinas Pertanian, |
| | - Pembelian pakan ikan Lele | sak | 100 | 200 | 135 | 100 | 100 | | | bangan dan |
| | - Pembelian benih calon | kg | 100 | 300 | 200 | 100 | 100 | | _ | perikanan |
| | induk Nila | | | | į | | | | | |
| | - Pembelian pakan ikan Nila | sak | 100 | 300 | 175 | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | | Indikatif Alokasi | | |
|--|--|----------|-------------|----------|------|----------------|------|-------------------|---------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Tar | Target Tahunan | | Anggaran 5 | Pendan- | Instansi |
| | | | 7707 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Juta) | aan | relarSalia |
| Kegiatan 2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan | - Kursus Unit Pembenihan Rakyat (UPR) | angkatan | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2,000.00 | APBD | Dinas Pertanian, |
| | - Demfarm Minapadi Kolam Dalam | На | 1 | 2 | 2 | П | п | | | pangan dan perikanan |
| | - Magang Pembudidaya Ikan dan Petugas Perikanan | angkatan | 1 | | | | | | | |
| | - Demonstrasi minapadi PUPM Sendangsari dan Sendangreio, Minggir | unit | 7 | | | | | | | |
| | Demplot pembesaran nila | m2 | | 1000 | | | | | | |
| | Demplot pembesaran gurami | bak | | 10 | | | | | | |
| | benih ikan nila | kg | | 1200 | | | | | | |
| | Pakan ikan | zak | | 440 | - | | | | | |
| | Domfarm nombecaran nila | m) | | | T 1 | | | | | |
| | dengan kincir | 711 | | | 0000 | | | | | |
| | Demplot minapadi | ha | | | 7 | | | | | |
| | Demplot budidaya ugadi | m2 | | | 2000 | | | | | |
| | Demplot mina mendong | m2 | | | 2000 | | | | | |
| | pelatihan pembibitan benih ikan | angkatan | | | н | | | | | |
| | pembinaan budidaya ikan | kg | | | 280 | | | | | |
| Kegiatan 3. Pengembangan Usaha dan Agribisnis | - Pengelolaan administrasi | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 200.00 | APBD | Dinas |
| Perikanan | usaha perikanan | | | | | | | | | Pertanian, |
| | - Pembuatan buletin tiga bulanan OVA | eks | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | pangan dan perikanan |
| | - Temu usaha UPP | kali | | 1 | + | 1 | | | | |
| | Workshop pemasaran | kali | | | П | | | | | |
| Kegiatan 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Parikanan | - Kolam penampungan hasil | buah | н | | | | | 10,000.00 | DAK dan | Dinas |
| | prasarana perikanan | paket | 1 | | 1 | Н | 1 | | | pangan dan |
| | - Perencanaan pembangunan paket /rehabilitasi BBI | paket | ₽ | | | | | | | perikanan |
| | - Perencanaan | paket | 1 | | | | | | | |
| | pembangunan/rehabilitasi kolam. UPI . Pasar | | | | | | | | | |
| | Perencanaan | paket | - | | | | | | | |
| | pembangunan kolam penampungan | | | | | | | | | |
| | Budidaya ikan dengan padi (minapadi) | На | | 20 | | | | | | |
| | Budidaya patin di kolam | paket | | 4 | | | | | | |
| | Pembangunan unit pengolah ikan | paket | | T | | | | | | |
| | Bak percontohan budidaya | paket | | 4 | | | | | | |
| | gurarni | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | Indikatif Alokasi | 1 | |
|---|--|--------------|-------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | giatan | Satuan | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Anggaran 5 | Pendan- | Instansi |
| | | | 707 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Juta) | aan | reiaksana |
| | pasar ikan | paket | | 1 | | | | | | |
| | Paket percontohan budidaya | paket | | 4 | | | | | | |
| | gurami | | | | | | | | | |
| | perluasan dan pendalaman n kolam budidaya | m2 | | | 2000 | | | | | |
| | Pembangunan/rehabilitasi | paket | | | 1 | | | | | |
| | BBI | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | Luas lahan Sawah dan luas lahan bukan sawah | nan bukan sa | wah | | | | | | | |
| Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1. Pengelolaan Lahan dan Air | - Adminstrasi WISMP | Paket | 1 | | | | | 10,000.00 | APBD | Dinas |
| | Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT menuju pertanian ramah lingkungan) WISMP | angkatan | 1 | | | | | | | Pertanian, pangan dan perikanan |
| | LOAN | | | | | | | | | |
| | - Adminsitrasi Kegiatan | Paket | 1 | | | | | | | |
| | - Revitalisasi P3A | | 4 | e . | ന | ന | ന | | | |
| | - Badan Hukum P3A | P3A | 2 | 3 | 3 | n | n | | | |
| | - Data kebutuhan Pengembangan Pengelolaan | Dokumen | 1 | T | + | 1 | Т | | | |
| | Lahan dan Air | | | | | | | | | |
| | - Sertifikasi lahan Pertanian | Bidang | 00 | 200 | | | | | | |
| | - Bak penampung air | Unit | | 5 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | - Traktor Roda 2 (rotari) | unit | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | - Traktor Roda 2 singkal | unit | | 15 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | - Kultivator | unit | 2 | | | | | | | |
| | - Sosialisasi LP2B | UPT BP3K | ∞ | | | | | | | |
| | - pengawasan jaringan irigasi | Kecamatan | 27 | | | | | | | |
| | - peta detail lahan pertanian | Dokumen | 1 | | | | | | | |
| | Sekolah lanang tata guna air | angkatan | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | pompa semprot hama | unit | | 20 | | | | | | |
| | elektrik | į. | | ¥ | ¥ | ų | 4 | | | |
| | evaluasi P3A | kali | | o ++ | o ++ | o ++ | o +- | | | |
| | Koordinasi keberlaniutan | kali | | 12 | 9 | 9 | . 9 | | | |
| | LP2B | | | | | | | | | |
| | Verifikasi proposal | dokumen | | 1 | 1 | 1 | + | | | |
| | illiastiaktal FLA | 4 | | | c | c | c | | | |
| | traktor dangir | nini t | | | 0 - | 0 6 | 0 - | | | |
| | chopper | ini. | | | 2 5 | 2 5 | 2 5 | | | |
| | pompa | i ii | | 2 | 2 2 | 2 | 2 | | | |
| | demplot reklamasi lahan | ha | | 2 | 1 | | | | | |
| | demplot reklamasi lahan | ha | | 2 | ₩. | | | | | |
| | tanaman kakao | ! | | ı | | | | | | |

| | | | | | | | | Indikatif Alokasi | Sumber | |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|---------|-------------------|--------------|--------------------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | larger | ı arget Tanunan | | Anggaran 5 | Pendan- | Instansi |
| | | | 1102 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Juta) | aan | dansalia |
| | data inventarisir alsin | paket | 1 | | | | | | | |
| | embling mini | init | 2 | | | | | | | |
| | sumur ladang | nnit | 7 | | | | | | | |
| | traktor dangir | unit | 7 | | | | | | | |
| TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT | 4AT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA | KESEJAHTERAAN S | ELURUH PEN | OUDUK SEMUA | USIA | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup | ibu kelahiran hidup | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan | Pelayanan Ambulance Jenazah bagi masyarakat miskin di kabumatan Glaman | bulan | 12 | | 12 | 12 | 12 | 40,090.59 | APBD, DAK | Dinas Kesehatan |
| | Pelavanan kesehatan | Jiwa | ī | 108.765 | 108.765 | 108.765 | 108.765 | | | |
| | Penduduk miskin dan rentan miskin (PBI APBD) | | | | | | | | | |
| | Pelayanan kesehatan bagi: | jiwa | 2 | 21.421 | 21.421 | 21.421 | 21.421 | | | |
| | perangkat desa, keluarga | | | | | | | | | |
| | honorer, Linmas/hansip, | | | | | | | | | |
| | GTT, Kader LKM/NKM, Kader | | | | | | | | | |
| | Sosial, Kader Posyandu, | | | | | | | | | |
| | Kader KB/IMP, Bayi Baru | | | | | | | | | |
| | Lahir, Mandiri (PBPU - | | | | | | | | | |
| | Pekerja Bukan Pnerima Upah) | | | | | | | | | |
| | Pembinaan pelayanan | kali | 7 | | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Jaminan Kesenatan | | 1 | | | | | | | |
| | Pembinaan dan evaluasi Iaporan Jamkes | kali | ιν | _, | 2 | ις | r. | | | |
| | Operasional Pelayanan | puskesmas | 25 | | 25 | 25 | 25 | | | |
| Kegiatan 2: Peningkatan kesehatan masyarakat | Data PWS KIA | ld | 12 | | 12 | 12 | 12 | 15,394.06 | APBD, | Dinas |
| | Audit Maternal Perinatal | ≖ | 9 | | 9 | 9 | 9 | | | nescilataii |
| | Sosialisasi rekomendasi AMP | ≖ | e | | 3 | 3 | 33 | | | |
| | (Penyebab kematian Ibu dan atau Bayi) | | | | | | | | | |
| | Bimtek Sistem pencatatan | Pusk | 25 | | 25 | 25 | 25 | | | |
| | pelaporan data kesga | | | | | | | | | |
| | FKTP mampu memberikan | Faskes | 30 | | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Evaluasi Manual Rujukan | ¥ | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Faskes yg menyelenggarakan Faskes | Faskes | 45 | | 45 | 45 | 45 | | | |
| | ram-program | ⊐ | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | KIA | | | | | | | | | |
| | Kecamatan yg melaksanakan kec. program PKK KB Kes | kec. | 17 | | 17 | 17 | 17 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | include Stanliber | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | egiatan | Satuan Tahun Dasar | asar | Targ | Target Tahunan | | Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
| | • | 707/ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Tanunan (Kp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | Peringatan Hari Lansia Nasional | ⊋ | П | 1 | 1 | T | | | |
| | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | Pusk | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Kelas Ibu Hamil (PUPM Kalasan) | Desa | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pelatihan Pijat Bayi dan Syaraf (PUPM Kalasan Desa Taman Martani) | Desa | П | н | п | П | | | |
| | Pelatihan Baby Sitter dan Perawatan orang jompo (PUPM Kalasan Desa Tamanmartani) | Desa | н | ₽ | Н | ₽ | | | |
| | Data PWS KB | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Pembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes | Kec. | П | 1 | 1 | + | | | |
| | Buku Raport Kesehatanku | Buku | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | | |
| | Anak Usia Pendidikan Dasar (Kelas I dan VII) mendapat screening kesehatan sesuai standar | per tahun | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| INDIKATOR SDG's | Cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | inan oleh fasilitas kesehatar | yang memiliki kom | petensi kebidanan | | | | | |
| PROGRAM 1:Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan | Pelayanan Ambulance Jenazah bagi masyarakat miskin di kabupaten Sleman | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 40,090.59 | APBD, DAK | Dinas Kesehatan |
| | Pelayanan kesehatan Penduduk miskin dan rentan miskin (PBI APBD) | Jiwa | 108.765 | 108.765 | 108.765 | 108.765 | | | |
| | Pelayanan kesehatan bagi : perangkat desa, keluarga perangkat desa, keluarga penorer, Linmas/hansip, GTT, Kader KKM/NKM, Kader Sosial, Kader Posyandu, Kader KB/NM, Bayi Baru Lahir, Mandiri (PBPU - Pekerja Bukan Pnerima | jwa | 21.421 | 21.421 | 21.421 | 21.421 | | | |
| | Pembinaan pelayanan jaminan kesehatan | kali | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Pembinaan dan evaluasi laporan Jamkes | kali | rv | ιΩ | ro. | ro. | | | |
| | Operasional Pelayanan Jampersal (DAK) | puskesmas | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| Kegiatan 2: Peningkatan kesehatan masyarakat | Data PWS KIA | Iq. | 12 | 12 | 12 | 12 | 15,394.06 | APBD, | Dinas Kesehatan |
| | Audit Maternal Perinatal | K | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | Tahun Dasar | | Targ | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber | Instansi |
|--|---|------------------|-------------|---------|---------|----------------|---------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | egiatan | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Tahunan (Rp. | Pendan- aan | Pelaksana |
| | | | | | | | | Juta) | | |
| | Sosialisasi rekomendasi AMP (Penyebab kematian Ibu dan atau Bayi) | - | | m | m | m | m | | | |
| | Bimtek Sistem pencatatan pelaporan data kesga | Pusk | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | FKTP mampu memberikan pelayanan ANC Terpadu | Faskes | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Evaluasi Manual Rujukan | ¥ | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Faskes yg menyelenggarakan Faskes kelas ibu hamil | Faskes | | 45 | 45 | 45 | 45 | | | |
| | Sosialisasi program-program KIA | 고 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Kecamatan yg melaksanakan kec. program PKK KB Kes | kec. | | 17 | 17 | 17 | 17 | | | |
| | Peringatan Hari Lansia Nasional | ≖ | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | Pusk | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Kelas Ibu Hamil (PUPM Kalasan) | Desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pelatihan Pijat Bayi dan Syaraf (PUPM Kalasan Desa Taman Martani) | Desa | | н | 11 | L 1 | н | | | |
| | Pelatihan Baby Sitter dan Perawatan orang jompo (PUPM Kalasan Desa Tamanmartani) | Desa | | 1 | н | ਜ | н | | | |
| | Data PWS KB | bulan | | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Pembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes | Kec. | | Н | н | Н | Ħ | | | |
| | Buku Raport Kesehatanku | Buku | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | | |
| | Anak Usia Pendidikan Dasar (Kelas I dan VII) mendapat screening kesehatan sesuai standar | per tahun | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| INDIKATOR SDG's | angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup | 0 kelahiran hidu | 2 | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan | Pelayanan Ambulance Jenazah bagi masyarakat miskin di kabupaten Sleman | bulan | | 12 | 12 | 12 | 12 | 40,090.59 | APBD, DAK | Dinas Kesehatan |
| | Pelayanan kesehatan Penduduk miskin dan rentan miskin (PBI APBD) | Jiwa | | 108.765 | 108.765 | 108.765 | 108.765 | | | |
| | | | | | | | | | 1 | |

| | | | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber | Instansi |
|--|--|-----------|-------------|--------|--------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | (egiatan | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | Pendan- aan | Pelaksana |
| | Pelayanan kesehatan bagi : perangkat desa, keluarga perangkat desa, tenaga honorer, Linmas/harsip, GTT, Kader LKM/NKM, Kader Sosial, Kader Posyandu, Kader RG/NNP, Bayi Baru Lahir, Mandiri (PBPU - | jiwa | | 21.421 | 21.421 | 21.421 | 21.421 | leng | | |
| | Pembinaan pelayanan jaminan kesehatan | kali | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Pembinaan dan evaluasi Iaporan Jamkes | kali | | 22 | rv. | r. | 22 | | | |
| | Operasional Pelayanan Jampersal (DAK) | puskesmas | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| Kegiatan 2: Peningkatan kesehatan masyarakat | Data PWS KIA | ld | | 12 | 12 | 12 | 12 | 15,394.06 | APBD, I | Dinas Kesehatan |
| | Audit Maternal Perinatal | ≖ | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Sosialisasi rekomendasi AMP (Penyebab kematian Ibu dan atau Bayi) | | | e. | e | es. | e e | | | |
| | Bimtek Sistem pencatatan pelaporan data kesga | Pusk | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | FKTP mampu memberikan pelayanan ANC Terpadu | Faskes | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Evaluasi Manual Rujukan | 고 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Faskes yg menyelenggarakan Faskes kelas ibu hamil | Faskes | | 45 | 45 | 45 | 45 | | | |
| | Sosialisasi program-program kl KIA | 고 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Kecamatan yg melaksanakan kec. program PKK KB Kes | kec. | | 17 | 17 | 17 | 17 | | | |
| | Peringatan Hari Lansia Nasional | ᠴ | | 1 | 1 | П | - | | | |
| | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | Pusk | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Kelas Ibu Hamil (PUPM Kalasan) | Desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pelatihan Pijat Bayi dan Syaraf (PUPM Kalasan Desa Taman Martani) | Desa | | 1 | 1 | П | П | | | |
| | Pelatihan Baby Sitter dan Perawatan orang jompo (PUPM Kalasan Desa Tamanmarfani) | Desa | | 1 | п | н | 1 | | | |
| | Data PWS KB | bulan | | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |

| | | Tahun Dasar | | Targ | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber | Instansi |
|---|---|--|----------------|--------|----------------|-----------------|--|--------|-----------|
| riogianii, negiatani Output negiatan | יבצומימוו | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | Pembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes | Kec. | 17 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Buku Raport Kesehatanku | Buku | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | | |
| | Anak Usia Pendidikan Dasar | per tahun | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | screening kesehatan sesuai | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | Cakupan desa/kelurahan UC | Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunization) | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular | gan Penyakit menular | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Peningkatan Imunisasi | Pelayanan Imunisasi bayi | orang | 14 | 14 | 14 | 14 | 130.32 | APBD | Dinas |
| | Pelayanan Imunisasi batita | orang | 12 | 12 | 12 | 12 | | | Kesehatan |
| | Pelayanan Anak Sekolah | SD | 256 | 556 | 556 | 256 | | | |
| | Pelayanan Imunisasi Calon Pengantin | orang | r. | ις. | r. | r. | | | |
| | Pelayanan Imunisasi Ibu | orang | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| INDIKATOR SDG's | Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko | hadap penduduk beresiko | | | | | | | |
| PROGRAM 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular | gan Penyakit menular | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pelayanan Pencegahan dan | Dusun yang dipantau angka | lokasi | 12 | 12 | 12 | 12 | 2,426.69 | APBD | Dinas |
| Penanggulangan Penyakit Menular | bebas jentik | - | | | | | | | Kesenatan |
| | Pemeriksaan serologi Antraks dan pes, | sample | 200 | 700 | 200 | 700 | | | |
| | Penyuluhan penyakit | lokasi | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Bersumber Binatang (P2B2) | | | | | | | | |
| | Penyuluhan Antraks dan Penyuluhan Pes | Lokasi, Lokasi | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | | | |
| | Audit kematian | kasus | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Cetak Leaflet | leaflet | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | |
| | format laporan | rim | ∞ | ∞ | ∞ | 8 | | | |
| | kartu PJB perumahan | Imbr | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | | | |
| | Form PJB 1 | E ! | ∞ ⁷ | 00 t | 00 t | 00 f | | | |
| | Pemantanan jentik oleh | kader | 420 | 420 | 420 | 420 | | | |
| | kader | | ! | | ! | ļ | | | |
| | Pembelian perangkap | hd | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | Kantong tikus | ph | 009 | 009 | 009 | 009 | | | |
| | Umpan tikus | ph | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | | |
| | Pelayanan Pencegahan dan | desa, anak | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | | | |
| | Penanggulangan Penyakit Menular | | | | | | | | |
| | Penyemprotan Insektisida/ Fogging Sarang Nyamuk di Inkasi nandarita DRD | focus | 380 | 380 | 380 | 380 | | | |
| | Pengadaan Larvasida | botol | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | | | |
| | Pengadaan insektisida untuk focus DBD | | 325 | 325 | 325 | 325 | | | |
| | Pengadaan pakaian kerja | buah | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | lapangan(penyempror) | | | | | | | | |

| | Instansi Pelaksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan | | | |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------|-------|-------|------------------|-------|----------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------|---|---|---|--|
| Sumber | Pendan- | aan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APBD | | | |
| Indikatif Alokasi | Anggaran S — Tahunan (Rn | Juta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 621.92 | | | |
| | | 2021 | 9 | 2 | 2 | | | 2 | 250 | | 2 | 2 | 1000 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 20 | 100 | 100 | 50 | 100 | 000 | 700 | 4 | 200 | 4 | 10,6 | т | 100 | 12 | 12 | 965 |
| Target Tahinan | | 2020 | 9 | 2 | 2 | | | 2 | 250 | | 2 | 2 | 1000 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100 | 000 | 700 | 4 | 200 | 4 | 10,6 | 1 | 100 | 12 | 12 | 965 |
| l ger | | 2019 | 9 | 2 | 2 | | | 2 | 250 | | 2 | 2 | 1000 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100 | | 700 | 4 | 200 | 4 | 10,6 | + | 100 | 12 | 12 | 965 |
| | | 2018 | 9 | 2 | 2 | | | 2 | 250 | | 2 | 2 100 E | 1000 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100 | 000 | 700 | 4 | 200 | 4 | 10,6 | 1 | 100 | 12 | 12 | 965 |
| | lanun Dasar 2017 | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Satuan | | buah | hd | ≖ | | | angkatan | sasaran | | Angkatan | angkatan | lb | qı | q | lbr | q | þķ | ě, | þķ | ă : | ž " | 0 | Orang | kali, | orang | desa | Kec, Lokasi | kali | % | bulan | bulan | jamaah haji |
| | giatan | | pengadaan mesin fogging | Pengadaan Mikroskup Binokuler | Konsultasi klinis TB, Validasi | data TB dengan aplikasi SITT online-offline. Pertemuan | jejaring PPM, pertemuan lintas sektor TB | Workshop Petugas TB | Aksi simpatik dan Sarasehan | IB Day dengan screening batuk | Worshop Ispa Pneumonia | Bimtek Kolaborasi TB - HIV | Cetak TB 01. | TB 01 Anak | TB 01 PP INH | TB 02 Kartu berobat TB | TB 01 PP INH | TB 03 Fasyankes | TB 05 | TB 06 | Buku Pedoman TB, | IB 04 | packulop | Keward Penemuan/ kesembuhan penderita TB | Uji cross chek TB ke BLK & RUS 1 | Pelatihan kader tanggap bo- cah (TABO) (PUPM Sleman) | Penanganan DBD (PUPM Kalasan) | Pokjanal Kecamatan, Pemberdavaan kader | Update knowledge Kusta | Pelacakan kasus dari investi- gasi wabah dan analisanya | Pencatatan Pelaporan Kasus- kasus epidemiologi (KLB) | Surveilans Terpadu Penyakit Berbasis Puskesmas (kasus baru) | Pemeriksaan kesehatan calon Jamaah haji dan pemantauan kesehatan pasca haji |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan 2: Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan KIB/wabah | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan 2: | | | |

| Program/ Kegiatan / Outout Kegiatan | Keriatan | Satuan | Tahun Dasar | | Targ | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|---|---|----------------|-------------|--------|-------|----------------|--------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| | • | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | Data HIV AIDS dan PIMS | bulan | | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Peningkatan Pengetahuan | lokasi | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Masyarakat ttg HIV dan AIDS | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pertemuan LKB | kali | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | KolaborasiTB HIV | kali | | 1 | 1 | 7 | 1 | | | |
| | VCT dan IMS Mobile | lokasi | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Sosialisasi HIV dan AIDS | kali | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| | Pertemuan LKB | puskesmas | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Lokakarya WPA | Desa | | 5 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Lokakarya Harm Reduction | kali | | 3 | 33 | 3 | 3 | | | |
| | Lokakarya PMTS | kali | | 3 | c | 3 | 33 | | | |
| | Penyuluhan Narkoba HIV dan AIDS (PUPM Depok) | desa | | 3 | ж | 8 | e | | | |
| | Penvilihan Narkoba HIV dan desa | desa | | | - | - | - | | | |
| | AIDS (PUPM Moyudan desa Sumberrahayu) | | | 1 | 1 | • | 1 | | | |
| | Penyuluhan Narkoba HIV dan desa AIDS (PUPM Pakem) | desa | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Sosialisasi HIV/IMS (PUPM Ngaglik) | desa | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | DOLL ach Will achilling | مامام | | | | ш | | | | |
| | (PUPM Cangkringan) | Psan | | n | n | n | n | | | |
| INDIKATOR SDG's | Angka penemuan penderita TB Paru (CDR) | B Paru (CDR) | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program Pencegahan dan Penanggulangan | ngan Penyakit menular | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pelayanan Pencegahan dan Penangsulangan Penyakit Menular | Dusun yang dipantau angka bebas jentik | lokasi | | 12 | 12 | 12 | 12 | 2,426.69 | APBD | Dinas Kesehatan |
| 0.000 | Pemeriksaan serologi | sample | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Antraks dan pes, | | | | | | | | | |
| | Penyuluhan penyakit Bersumber Binatang (P2B2) | lokasi | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Penyuluhan Antraks dan Penyuluhan Pes | Lokasi, Lokasi | | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | | | |
| | Audit kematian | kasus | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Cetak Leaflet | leaflet | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | |
| | format laporan | rim | | 80 | ∞ | ∞ | ∞ | | | |
| | kartu PJB perumahan | lmbr | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | | | |
| | Form PJB 1 | ii. | | σ : | ∞ ; | ∞ ; | ∞ ; | | | |
| | Form PJB 2 | E. | | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | Pemantauan jentik oleh kader | kader | | 420 | 420 | 420 | 420 | | | |
| | Pembelian perangkap | ph | | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | Kantong tikus | ф | | 009 | 009 | 009 | 009 | | | |
| | Umpan tikus | þ | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | | |
| | Pelayanan Pencegahan dan | desa, anak | | 5, 200 | 5,200 | 5,200 | 5, 200 | | | |
| | Penanggulangan Penyakit Menular | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | Tahu | Tahun Dasar | | Targ | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber | Instansi |
|---|---|-------------------|-------------|--------|--------|----------------|--------|--|--------|-----------|
| Program/ Neglatan/ Output Neglatan | ıt Neglatan | | 2017 — | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | Penyemprotan Insektisida/ Fogging Sarang Nyamuk di Iokasi penderita DBD | focus | 380 | 0 | 380 | 380 | 380 | | | |
| | Pengadaan Larvasida | botol | 12 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | | | |
| | Pengadaan insektisida untuk focus DBD | liter | 325 | Z. | 325 | 325 | 325 | | | |
| | Pengadaan pakaian kerja Iapangan(penyemprot) | buah | 30 | | 30 | 30 | 30 | | | |
| | pengadaan mesin fogging | buah | 9 | | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Pengadaan Mikroskup Binokuler | ph | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Konsultasi kinis TB, Validasi data TB dengan aplikasi SITT online-Offline, Pertemuan jejaring PPM, pertemuan lintas sektor TB | 고 | 2 | | 2 | 7 | 2 | | | |
| | Workshop Petugas TB | angkatan | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Aksi simpatik dan Sarasehan TB Day dengan screening batuk | sasaran | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | | | |
| | Worshop Ispa Phelimonia | Angkatan | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Bimtek Kolaborasi TB - HIV | angkatan | 2 | | 7 | 7 7 | 2 2 | | | |
| | Uji cacingan | sampel , lokasi | 10 | 100, 5 | 100, 5 | 100, 5 | 100, 5 | | | |
| | Cetak TB 01, | q | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| | TB 01 Anak | lb | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | TB 01 PP INH | qı | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | TB 02 Kartu berobat TB | lbr lh | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| | TB 03 Fasyankes | 2 ≾ | 200 | | 200 | 200 | 200 | | | |
| | TB 05 | bk | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | TB 06 | þķ | 10 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Buku Pedoman TB, | pk: | 20 | | 20 | 20 | 20 | | | |
| | TB 04 Backdrop | 3 & | 100 | 9 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Reward Penemuan/ | Orang | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Ujj cross chek TB ke BLK & RUS 1 | kali, | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pelatihan kader tanggap bo- | orang | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Penanganan DBD (PUPM | desa | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pokjanal Kecamatan, | Kec, Lokasi | 10 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | | | |
| | Pemberdayaan kader | kali | | | - | - | - | | | |
| INDIKATOR SDG's | Opdate hillowiedge hasta Angka kesakitan Malaria/ 1000 penduduk (API) | 00 penduduk (API) | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | |
| PROGRAM 1: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular | langan Penyakit menular | - | | | | | | | | |

| Progress (Voidens / Dienit Voidens | , | 3 | Tahun Dasar | | Targ | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber | Instansi |
|---|--|-----------------------|-------------|-------|--------|----------------|----------------|---------------------------------|--------|--------------------|
| المواقعين | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| Kegiatan 1: Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penvakit Menular | Dusun yang dipantau angka bebas ientik | lokasi | | 12 | 12 | 12 | 12 | 2,426.69 | APBD | Dinas Kesehatan |
| 3 | Pemeriksaan serologi Antraks dan pes, | sample | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Penyuluhan penyakit Bersumber Binatang (P2B2) | lokasi | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Penyuluhan Antraks dan Penyuluhan Pes | Lokasi, Lokasi | | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | | | |
| | Audit kematian | kasus | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Cetak Leaflet | leaflet | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | |
| | format laporan | rim . | | 000 | 00 0 | ∞ (| ∞ ⁽ | | | |
| | Kartu PJB perumanan Form PJB 1 | imbr | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | | | |
| | Form PJB 2 | rin | | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | Pemantauan jentik oleh kader | kader | | 420 | 420 | 420 | 420 | | | |
| | Pembelian perangkap | hd | | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | Kantong tikus | ph | | 009 | 009 | 009 | 009 | | | |
| | Umpan tikus | ph | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | | |
| | Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | desa, anak | | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5, 200 | | | |
| | Penyemprotan Insektisida/ Fogging Sarang Nyamuk di Iokasi penderita DBD | focus | | 380 | 380 | 380 | 380 | | | |
| | Pengadaan Larvasida | botol | | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | | | |
| | Pengadaan insektisida untuk focus DBD | liter | | 325 | 325 | 325 | 325 | | | |
| | Pengadaan pakaian kerja lapangan(penyemprot) | buah | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | pengadaan mesin fogging | buah | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Pengadaan Mikroskup Binokuler | hd | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Konsultasi klinis TB, Validasi data TB dengan aplikasi STTT online-offline, Pertemuan jejaring PPM, pertemuan lintas sektor TB | 고 | | 7 | 7 | 2 | 7 | | | |
| | Workshop Petugas TB | angkatan | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Aksi simpatik dan Sarasehan TB Day dengan screening batuk | sasaran | | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |
| | Worshop Ispa Pneumonia | Angkatan | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Bimtek Kolaborasi TB - HIV | angkatan | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Uji cacingan Cetak TB 01. | sampel , lokasi Ib | | 100,5 | 100, 5 | 100, 5 | 100, 5 | | | |
| | TB 01 Anak | qı | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | TB 01 PP INH | lb | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |

| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | (egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|---|---|------------------|-------------------|----------------|-------|----------------|--------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| | ì | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | TB 02 Kartu berobat TB | lbr | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| | TB 01 PP INH | q | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | TB 03 Fasyankes | ğ | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | TB 05 | ğ | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | TB 06 | ¥ | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Buku Pedoman TB, | ğ | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | TB 04 | þ | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Backdrop | 3 | | | | | | | | |
| | Reward Penemuan/ | Orang | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | kesembuhan penderita TB | 1 | | , | , | , | , | | | |
| | UJI Cross chek 18 ke BLN & RUS 1 | Kall, | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pelatihan kader tanggap bo- cah (TABO) (PUPM Sleman) | orang | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Penanganan DBD (PUPM Kalasan) | desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pokjanal Kecamatan, | Kec, Lokasi | | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | | | |
| | Pemberdayaan kader | = | | , | | , | | | | |
| | Update knowledge Kusta | kali | | 1 | 1 | - | 1 | | | |
| INDIKATOR SDG'S PROGRAM 1: Program Pencegahan dan Penanggulanga | CAKUPAN ACUTE FLACID PARALYSIS (AFP) RATE PER 100.000 PENDUDUK < 15 TAHUN gan Penyakit menular | KALYSIS (AFP) KA | TE PEK 100.000 PE | NDUDUK < 15 TA | NON | | | | | |
| Kegiatan 1: Pelayanan Pencegahan dan | | lokasi | | 12 | 12 | 12 | 12 | 2,426.69 | APBD | Dinas |
| Penanggulangan Penyakit Menular | pepas jentik | | | | ; | | ; | | | Kesenatan |
| | Pemeriksaan serologi Antraks dan pes, | sample | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Penyuluhan penyakit | lokasi | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Bersumber Binatang (P2B2) | | | | | | | | | |
| | Penyuluhan Antraks dan Penyuluhan Pes | Lokasi, Lokasi | | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | | | |
| | Audit kematian | kasus | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Cetak Leaflet | leaflet | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | |
| | format laporan | rim | | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | | | |
| | kartu PJB perumahan | Imbr | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | | | |
| | Form PJB 1 | E : | | × + | × + | × + | × + | | | |
| | Domontonian jontile oloh | lilli Sopor | | 430 | 770 | 730 | 730 | | | |
| | remantauan jentik olen kader | kaner | | 470 | 470 | 420 | 420 | | | |
| | Pembelian perangkap | hd | | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | Kantong tikus | ph | | 009 | 009 | 009 | 009 | | | |
| | Umpan tikus | ф | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | | |
| | Pelayanan Pencegahan dan | desa, anak | | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5, 200 | | | |
| | Penanggulangan Penyakit Menular | | | | | | | | | |
| | Penyemprotan Insektisida/ Fogging Sarang Nyamuk di | focus | | 380 | 380 | 380 | 380 | | | |
| | lokasi penderita DBD | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Larvasida | potol | | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | | | |

| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | t Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|--|---|----------------------|-------------|--------|--------|----------------|--------|-------------------------|-------------------|-----------|
| | | | 7107 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Ianunan (Kp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | Pengadaan insektisida untuk focus DBD | liter | 325 | 5 | 325 | 325 | 325 | | | |
| | Pengadaan pakaian kerja lapangan(penvemprot) | buah | 30 | | 30 | 30 | 30 | | | |
| | pengadaan mesin fogging | buah | 9 | | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Pengadaan Mikroskup | Чq | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Konsultasi klinis TB, Validasi | ⋾ | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | data TB dengan aplikasi SITT | | | | | | | | | |
| | Jejaring PPM, pertemuan | | | | | | | | | |
| | lintas sektor TB | | | | | | | | | |
| | Workshop Petugas TB | angkatan | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Aksi simpatik dan Sarasehan | sasaran | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | | | |
| | TB Day dengan screening | | | | | | | | | |
| | Worshop Ispa Pneumonia | Angkatan | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Bimtek Kolaborasi TB - HIV | angkatan | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Uji cacingan | sampel , lokasi | 10 | 100, 5 | 100, 5 | 100, 5 | 100, 5 | | | |
| | Cetak TB 01, | Q | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| | TB 01 Anak | q | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | TB 01 PP INH | q | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | TB 02 Kartu berobat TB | lbr | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| | TB 01 PP INH | മ : | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | IB 03 Fasyankes | ă | 50 | | 200 | 50 | 20 | | | |
| | TB 05 | ă I | 100 | 0 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | IB 06 | žă | 1001 | 5 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | TR 04 | 5 3 | 100 | | J0, | 100 | 100 | | | |
| | Backdrop | ž m | | | | | | | | |
| | Reward Penemuan/ | Orang | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | kesembuhan penderita TB | | | | | | | | | |
| | Uji cross chek TB ke BLK & | kali, | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | |
| | ROS I | | COC | | 000 | 000 | 000 | | | |
| | cah (TABO) (PUPM Sleman) | olding Olding | 02 | 5 | 700 | 2007 | 700 | | | |
| | Penanganan DBD (PUPM | desa | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Kalasan) | | | | | | | | | |
| | Pokjanal Kecamatan, | Kec, Lokasi | 10 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | | | |
| | Pemberdayaan kader | | | | | | | | | |
| SOUTH STORES | Update knowledge Kusta kali | kali 2 4 10 tahun | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| PROGRAM 1: Pencerahan dan Penanggulanasan penyakit tidak menular | envakit tidak menular | 10110101 | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pencegahan resiko dan pengendalian | Bimtek/Up date Knowledge | kali | 8 | | 3 | 3 | 3 | 187.64 | APBD | Dinas |
| penyakit tidak menular | PTM | | | | | | | | | Kesehatan |
| | Validasi data P2 PTM | kali | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Jambore Posbindu | kali | 1 | | ₩. | ↔ | 1 | | | |
| | Rimtek Kader Poshindu | | | | | | | | | |

| | | | | | P. C. | deninder tenner | | Indikatif Alokasi | Sumber | |
|--|---|------------------|---------------------|------|-------|-----------------|------|------------------------------|---------|-----------------------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | egiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | | 6 | | | Anggaran 5 — Tahunan (Rn. | Pendan- | Instansi Pelaksana |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Juta) | aan | |
| | Sosialisasi PTM dan Posbindu kali PTM | kali | | 5 | 5 | 5 | 2 | | | |
| | Pelayanan Posbindu Dinas Kesehatan & Institusi | kali | | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | Monitoring dan pembinaan P2PTM dan Posbindu | kali | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Pelatihan Posbindu (PUPM | desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| INDIKATOR SDG's | | isi | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Pencegahan dan Penanggulanagan penya | yakit tidak menular | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pencegahan resiko dan pengendalian | Bimtek/Up date Knowledge | kali | | 3 | 3 | 3 | 3 | 187.64 | APBD | Dinas |
| penyakit tidak menular | PTM Validasi data P2 PTM | kali | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | Kesehatan |
| | Jambore Posbindu | kali | | - 1 | н | ₽ | н | | | |
| | Bimtek Kader Posbindu | kali | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Sosialisasi PTM dan Posbindu PTM | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Pelayanan Posbindu Dinas Kesehatan & Institusi | kali | | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | Monitoring dan pembinaan | kali | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Deletiber Bechind: (DIDM | 200 | | | , | , | | | | |
| | Pelatinan Pospinau (PoPivi Kalasan) | desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| INDIKATOR SDG's | Cakupan kunjungan pasien gangguan jiwa di puskesmas | ngguan jiwa di p | uskesmas | | | | | | | |
| PROGRAM 3: Pencegahan dan Penanggulanagan penya | yakit tidak menular | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Peningkatan kesehatan jiwa masyarakat dan pengendalian penyalahgunaan napza | Monitoring penanganan gangguan jiwa, napza dan kesehatan jiwa | kali | | 25 | 25 | 25 | 25 | 264.34 | APBD | Dinas Kesehatan |
| | Bimtek Kesehatan Jiwa bagi Dokter, Psikolog dan Perawat | kali | | 3 | 8 | æ | æ | | | |
| | Bimtek Kader DSSJ | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Bimtek TPKJM | kali | | 1 | 1 | П | 1 | | | |
| | Bimtek Kader Sekolah Sehat Jiwa | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Sarasehan dalam rangka | kali | | 1 | 1 | + | 1 | | | |
| | peringatan hari kesehatan mental sedunia | | | | | | | | | |
| | Bimtek Pengelolaan Stress | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | bagi karyawan | <u>:-</u> | | , | , | , | , | | | |
| | ramily gathering keluarga penderita gangguan jiwa | Kall | | ٦. | 1 | ٦. | ٦. | | | |
| | Penanggulangan Penyalah- | kali | | н | 1 | П | 1 | | | |
| | gunaan Napza & Penggalang- an Komitmen Kesehatan Jiwa | | | | | | | | | |
| | Bimtek pengembangan pelayanan psikolog | kali | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | puskesmas | | | | | | | | | |
| | Sosialisasi NAPZA | ≖ | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | F | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | Indikatif Alokasi | Sumber | |
|--|--|-----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|------|-------------------|---------|------------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | 20 | rarget ranunan | | Anggaran 5 | Pendan- | Instansi |
| | | | 7107 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Juta) | aan | relarsalia |
| | Sarasehan dalam rangka peringatan HANI (Hari Anti Narkoba Internasional) | kali | | 1 | т | 1 | н | | | |
| | Bimtek bagi pengelola program Napza | kali | | 1 | 1 | 1 | 11 | | | |
| | Penyuluhan Napza bagi anak sekolah | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Sosialisasi penanggulangan Nanza (PHPM Nagalik) | desa | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | State of the state | desa | | П | ₽ | 1 | 1 | | | |
| | Sendangmulyo) | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's PROGRAM 3: Denceashan dan Denanggulanagan nenwaki | Penyalahgunaan narkotika ya | ng mengakses la | ayanan rehabilitasi | di fasilitas pelay | anan kesehatan | | | | | |
| Kegiatan 1: Peningkatan kesehatan iwa masyarakat | Monitoring penanganan | kali | | 25 | 25 | 25 | 25 | 264.34 | APBD | Dinas |
| | gangguan jiwa, napza dan kesehatan jiwa | | | ł | ł | ł | ł | | | Kesehatan |
| | Bimtek Kesehatan Jiwa bagi Dokter, Psikolog dan Perawat | kali | | æ | ю | m | ĸ | | | |
| | Bimtek Kader DSSJ | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Bimtek TPKJM | kali | | Н | 1 | П | П | | | |
| | Bimtek Kader Sekolah Sehat | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | DIWI | | | | | | | | | |
| | Sarasehan dalam rangka peringatan hari kesehatan mental sedunia | kali | | ₽ | ₽ | ₽ | П | | | |
| | Bimtek Pengelolaan Stress bagi karyawan | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Family gathering keluarga | kali | | 1 | 1 | 1 | П | | | |
| | Penanggulangan Penyalah- gunaan Napza & Penggalang- | kali | | 1 | н | п | 11 | | | |
| | an Komitmen Kesehatan Jiwa | | | | | | | | | |
| | Bimtek pengembangan pelayanan psikolog puskesmas | kali | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Sosialisasi NAPZA | ≖ | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Sarasehan dalam rangka peringatan HANI (Hari Anti Narkoba Internasional) | kali | | 1 | 17 | 11 | н | | | |
| | Bimtek bagi pengelola program Napza | kali | | 1 | T | П | 1 | | | |
| | Penyuluhan Napza bagi anak kali sekolah | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Sosialisasi penanggulangan Napza (PUPM Ngaglik) | desa | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |

| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Target | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|---|--|----------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| | • | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | Sosialisasi penanggulangan desa 1 Napza (PUPM Minggir Desa Sendangmulyo) | desa | | T- | T | 1 | 11 | | | |
| INDIKATOR SDG'S Jumlah korban kemat PROGRAM 1 : PEMELHARAAN KFAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT | Jumlah korban kematian dar FERTIBAN MASYARAKAT | luka berat ak | ibat kecelakaan lalu | lintas | | | | | | |
| Kegiatan 3133: Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Pelayanan Penegakan | n Pelayanan Penegakan | Lalu Lintas | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,952,006 | PNBP | Polres |
| Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas | Hukum Lalu Lintas | - | _ | | _ | | | ī | | Sleman |
| INDIRATOR SDG S 1 Program Keliarga Rerencana | iotai Fertility Kate (TFK), angka prevalensi pemakalan kontrasepsi suatu cara, angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (ViNLY) cara modem | gka prevalensi | pemakalan kontrasi | epsi suatu cara, an | gka penggunaan n | netode kontrasepsi | Jangka panjang (N | INP) cara modern | | |
| Kogiatan 1 · Dombinaan Koluarga Berencana | Rinkah (nembinaan DKB) | kali | ¥ | Demhinaan | Demhinaan | Demhinsan | Demhinaan | 2 127 40 | APRD | Dinas |
| Neglatali 1. rembilidali Neluaiga belembalia | Dilikab (pellibiliaali rkb) | II DV | Þ | Pelavanan KB | Pelavanan KB | Pelavanan KB | Pelavanan KB | 2,121.40 | | PAAPAKB |
| | | | | lintas sektor 35 | lintas sektor 35 | lintas sektor 35 | lintas sektor 35 | | | |
| | | | | orang | orang | orang | orang | | | |
| | Pembekalan Calon manten | kali | 2 | Rakor Tri | Rakor Tri | Rakor Tri | Rakor Tri | | | |
| | | | | Komponen 25 faskes | Komponen 25 faskes | Komponen 25 faskes | Komponen 25 faskes | | | |
| | Konsolidasi dan Koordinasi | kali | - | Updating data | Updating data | Updating data | Updating data | | | |
| | program KB dengan institusi | | | KB 86 desa | KB 86 desa | KB 86 desa | KB 86 desa | | | |
| | NB/Nadel dali PNB | | | Coffue | Coference | Cofuzoro | Coference | | | |
| | | | | Solware | Solware | Solware | Solware | | | |
| | | | | pengembangan | pengembangan | pengembangan | pengembangan | | | |
| | | | | pendataan Kelijarga 1 Daket | pendataan Keluarga 1 Daket | pendataan Keliarga 1 Baket | pendataan Keliarga 1 Bakat | | | |
| | | | | C-firm min | Cefinanga i ranci | | Cefuralga i ranci | | | |
| | | | | sorware rekap | sorware rekap | sorware rekap | sotware rekap | | | |
| | | | | paket | paket | paket | paket | | | |
| | | | | Rakor Program | Rakor Program | Rakor Program | Rakor Program | | | |
| | | | | KKBPK 17 Kec | KKBPK 17 Kec | KKBPK 17 Kec | KKBPK 17 Kec | | | |
| | | | | Refitalisasi RR | Refitalisasi RR | Refitalisasi RR | Refitalisasi RR | | | |
| | | | | bagi petugas klinik KB | bagi petugas klinik KB | bagi petugas klinik KB | bagi petugas Klinik KB | | | |
| | | | | penyuluh KB dan | _ | | penyuluh KB dan | | | |
| | | | | Kader 1 kali | Kader 1 kali | Kader 1 kali | Kader 1 kali | | | |
| Kegiatan 2 : Peningkatan sarana dan Prasarana KB | Pemangunan Balai Penyuluh | Unit | 4 | Penjaringan | Penjaringan | Penjaringan | Penjaringan | 21,499.08 | dan | Dinas |
| | KB | | | peserta KB Bakti | peserta KB Bakti | peserta KB Bakti | peserta KB Bakti | | DAK | P3AP2KB |
| | Carana Dracarana Balai | Dakat | ~ | sosial 680 orang | sosial 680 orang | sosial 680 orang | sosial 680 orang | | | |
| | Penvillih | raver | r | Pelavanan KB di | Pelavanan KB di | Pelavanan KB di | Pelavanan KB di | | | |
| | in i | | | non Puskesmas | non Puskesmas | non Puskesmas | non Puskesmas | | | |
| | | | | (840 orang) | (840 orang) | (840 orang) | (840 orang) | | | |
| | Biaya Operasional Balai | Balai | ∞ | Bakti sosial | Bakti sosial | Bakti sosial | Bakti sosial | | | |
| | Penyuluh KB | | | pelayanan KB | pelayanan KB | pelayanan KB | pelayanan KB | | | |
| | | | | TUD di | IUD di | TUD di | IUD di | | | |
| | | | | Puskesmas (160 | Puskesmas (160 | Puskesmas (160 | Puskesmas (160 | | | |
| | | | | Olailg) | Olang) | Olailg) | Olang/ | | | |

| | | | Togo C and c L | | Target - | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi | Sumber | 1000 |
|--|---|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | (egiatan | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | Pendan- aan | Pelaksana |
| | | | | Bakti sosial pela- | Bakti sosial pela- | Bakti sosial pela- | Bakti sosial pela- | | | |
| | | | | yanan KB Im- plant di Puskes- | | | |
| | | | | mas (160 orang) | mas (160 orang) | mas (160 orang) | mas (160 orang) | | | |
| | | | | Pembangunan balai Penvuluh | | | | | | |
| | | | | KB (5 Unit) | | | | | | |
| | | | | Peningkatan | Peningkatan | Peningkatan | Peningkatan | | | |
| | | | | sarana dan | sarana dan | sarana dan | sarana dan | | | |
| | | | | Prasarana balai | Prasarana balai | Prasarana balai | Prasarana balai | | | |
| | | | | Penyuluh KB 5 Paket | Penyuluh KB 5 Paket | Penyuluh KB 5 Paket | Penyuluh KB 5 Paket | | | |
| | | | | BOKB Distribusi | BOKB Distribusi | BOKB Distribusi | BOKB Distribusi | | | |
| | | | | Alkon | Alkon | Alkon | Alkon | | | |
| | | | | BOKB Balai | | | | | | |
| | | | | Penyuluh KB | | | | | | |
| Kegiatan 3: Pelayanan KB-KR dan Pengembangan | Pembinaan Pelayanan KB | orang | 89 | Rakor | Rakor | Rakor | | 1,930.90 | APBD | Dinas |
| Jaringan Kerja | bagi lintas sektor | | | kelembagaan | kelembagaan | kelembagaan | kelembagaan | | | P3AP2KB |
| | | | | dengan mitra | dengan mitra | dengan mitra | dengan mitra | | | |
| | | | | kerja 5 kali | kerja 5 kali | kerja 5 kali | kerja 5 kali | | | |
| | Rapat Koordinasi Klinik KB | orang | 100 | Bimbingan | Bimbingan | | Bimbingan | | | |
| | | | | lengkap bagi PKB | lengkap bagi PKB | lengkap bagi PKB | lengkap bagi PKB | | | |
| | : 1 | | | o vali | o raii | D Ndii | o raii | | | |
| | Rakor Trikomponen | orang | 1100 | Pembinaan Vadar IMB 17 | Pembinaan | Pembinaan Vadar IMB 17 | Pembinaan | | | |
| | | | | Kec Kec | Kec Kec | Kec Kec | Kec Kec | | | |
| | Rakor BPS/BPM | orang | 30 | Pembinaa KB | Pembinaa KB | Pembinaa KB | Pembinaa KB | | | |
| | | | | Pria 17 Kec | Pria 17 Kec | Pria 17 Kec | Pria 17 Kec | | | |
| | Evaluasi Bidan Praktek | orang | 20 | Pembinaan | Pembinaan | Pembinaan | Pembinaan | | | |
| | Mandiri | | | Kampung KB 17 | Kampung KB 17 | Kampung KB 17 | Kampung KB 17 | | | |
| | Rakor Pelayapan KB KB | Orang | 170 | Nec | Nec | אפר | Nec | | | |
| | Evaluaci Delayanan KB MKID | Orang | 200 | | | | | | | |
| | kategori Puskesmas | OI ding | 00 | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | Cakupan penduduk vang menjadi peserta jaminan kesehatan | niadi peserta ia | minan kesehatan | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan | Pelayanan Ambulance | bulan | | 12 | 12 | 12 | 12 | 40,090.59 | ΄, | Dinas |
| | Jenazah bagi masyarakat | | | | | | | | DAK | Kesehatan |
| | miskin di kabupaten Sleman | | | | | | | | | |
| | Pelayanan kesehatan Penduduk miskin dan rentan | Jiwa | | 108.765 | 108.765 | 108.765 | 108.765 | | | |
| | miskin (PBI APBD) | | | | | | | | | |

| K SEMUA 1000 160,838 APBD Dinas 1,012 APBD Dinas 1,111 APBD Dinas Pendidikan 1,111 APBD Dinas Pendidikan 1,111 APBD, Dinas Pendidikan 1,111 APBD, Dinas Pendidikan |
|---|
| |
| AYAT UNT |
| 7 7 7 5 25 25 25 27 1000 616 616 1 1 1 1 1 50 50 50 1000 14 14 14 14 |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| |
| |
| 1,012 1,111 1,111 |
| 1,012 1,111 23,605 |
| 65000 65000 160,838 APBD 1 1 1,012 APBD 3500 3500 3500 APBD 50 50 50 APBD, DAK 14 14 APBD, DAK 21 21 21 |
| 616 616 1,012 APBD 1 1 1,111 APBD 3500 3500 10 50 50 1000 1000 23,605 APBD, 14 14 21 21 |
| 3500 3500 1 1 1 50 50 73,605 APBD, 1000 1000 23,605 DAK |
| 3500 3500 1 1 50 50 23,605 APBD, 14 14 14 21 |
| 1 1 50 50 23,605 APBD, 0 1000 1000 23,605 APBD, 14 14 DAK |
| 50 50 APBD, 0 1000 23,605 APBD, 14 14 DAK 21 21 21 |
| 14 14 21 21 |
| 21 |
| |

| Program / Kegiatan / Outout Kegiatan | eglatan | Satuan | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|---|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | pengadaan buku kepustakaan | paket | | 99 | 99 | 99 | 99 | | | |
| INDIKATOR SDG'S PROGRAM 1: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN | APK SMP/MTs/ sederajat | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penyediaan bantuan operasional BOSDA | Bantuan operasional SD dan SMP dan data terpilah gender | siswa | 2017 | 65000 | 02009 | 65000 | 65000 | 160,838 | APBD | Dinas Pendidikan |
| Kegiatan 2 : Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos) | pendampingan pengelolaan bantuan operasional sekolah | SD/ SMP Negeri/Swasta | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 1,012 | APBD | Dinas Pendidikan |
| Kegiatan 3 : Penyediaan beasiswa pendidikan dasar | pendataan calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa miskin | dokumen | П | 1 | П | н | 11 | 1,111 | APBD | Dinas Pendidikan |
| | bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin | siswa | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | | | |
| | pembentukan satgas putus sekolah | tim. | 1 | 1 | 1 | T . | т : | | | |
| Kegiatan 4 : Pengadaan sarana dan sarana sekolah | beasiswa retrieval pengadaan buku induk SMP | siswa buku | 20 | 900 | 009 | 900 | 009 | 29,384 | APBD, | Dinas |
| SMP | pengadaan komputer, laptop, printer, kamera, handvram. LCD | unit | | 169 | 169 | 169 | 169 | | | Pendidikan |
| | pengadaan meubeleir ruang kelas SD, ruang perpustaka- an, ruang guru, ruang UKS | paket | | 6 | б | ō | o | | | |
| | pengadaan peralatan pendidikan matematika, IPA, IPS, bahasa indonesia, jasmani, OR, kesehatan, | paket | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| INDIKATOR SDG's | APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | didikan Anak U | sia Dini (PAUD) | | | | | | | |
| PROGRAM 1: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Keeliatan 1: Penvelenggaraan nendidikan anak usia dini Tomba Jembaga PAUD | i lomba lembaga PAIID | lembaga | 170 | 170 | 170 | 170 | 120 | 2 360 45 | APRD | Dinas |
| 600 | pembinaan dan evaluasi lembaga PAUD | lembaga | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | | | Pendidikan |
| | pembinaan PAUD model lembaga penerbitan buletin PAUD dan eksemplar | lembaga eksemplar | 4 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | | | |
| | gelar kreativitas anak usia dini | anak | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| Kegiatan 2 : Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran anak usia dini | | orang | | 51 | 51 | 51 | 51 | 533.52 | APBD | Dinas Pendidikan |
| | pendampingan kurikulum TK guru | guru | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | pentoinaan kurkuum satuan guru 100 pendidikan anak usia dini | nung | - | TOO | 001 | 001 | 001 | | | |
| RASIO PROGRAM 1: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN | Kasio Angka Partisipasi Mum FAHUN | (APIM) peremp | ıuan <i>y</i> laki-laki di SD | /ivii/paket A yang | g setara gender | | | | | |

| Program/Kegiatan/Outout Kegiatan | egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|--|--|--------------------------|----------------------|------------|-------|----------------|-------|--|-------------------|---------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| Kegiatan 1: Penyediaan bantuan operasional BOSDA | Bantuan operasional SD dan SMP dan data terpilah gender | siswa | 2017 | 65000 | 65000 | 02009 | 65000 | | APBD | Dinas Pendidikan |
| Kegiatan 2 : Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos) | pendampingan pengelolaan bantuan operasional sekolah | SD/ SMP Negeri/Swasta | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 1,012 | APBD | Dinas Pendidikan |
| Kegiatan 3 : Penyediaan beasiswa pendidikan dasar | pendataan calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa miskin | | н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,111 | APBD | Dinas Pendidikan |
| | bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin | siswa | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | | | |
| | pembentukan satgas putus sekolah | tim | 1 | 1 | - | T. | FT. | | | |
| | beasiswa retrieval | siswa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Kegiatan 4 : Pengadaan sarana dan sarana sekolah SD | pengadaan buku induk SD | buku | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 23,605 | APBD, DAK | Dinas Pendidikan |
| | pengadaan komputer, laptop, printer, kamera, handycam, LCD | unit | | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | pengadaan meubeleir ruang kelas SD, ruang perpustaka- an, ruang guru, ruang UKS | paket | | 21 | 21 | 21 | 21 | | | |
| | pengadaan peralatan pendidikan matematika, IPA, IPS, bahasa indonesia, jasmani, OR, kesehatan, kesenian, TIK | paket | | 65 | 65 | 65 | 65 | | | |
| | pengadaan buku paket 66 kepustakaan | paket | | 99 | 99 | 99 | 99 | | | |
| INDIKATOR SDG's | Rasio APM perempuan/laki-l | aki di SMP/MT | s/ Paket B yang set: | ara gender | | | | | | |
| PROGRAM 1: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHI | AHUN | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penyediaan bantuan operasional BOSDA | Bantuan operasional SD dan siswa SMP dan data terpilah gender | siswa | 2017 | 65000 | 65000 | 02000 | 92000 | 160,838 | APBD | Dinas Pendidikan |
| Kegiatan 2 : Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos) | pendampingan pengelolaan bantuan operasional sekolah | SD/ SMP Negeri/Swasta | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 1,012 | APBD | Dinas Pendidikan |
| Kegiatan 3 : Penyediaan beasiswa pendidikan dasar | pendataan calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa miskin | dokumen | 1 | 11 | н | Н | 1 | 1,111 | APBD | Dinas Pendidikan |
| | bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin | siswa | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | | | |
| | pembentukan satgas putus sekolah | tim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | beasiswa retrieval | siswa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Kegiatan 4 : Pengadaan sarana dan sarana sekolah SMP | pengadaan buku induk SMP | buku | | 009 | 009 | 009 | 009 | 29,384 | APBD, DAK | Dinas Pendidikan |

| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | atan | Satuan | Tahun Dasar | | Targ | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Sumber Anggaran 5 Pendan- | Sumber Pendan- | Instansi |
|------------------------------------|--|--------|-------------|------|------|----------------|------|--|-------------------|-----------|
| | | | 707 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | - I anunan (kp. Juta) | aan | relaksana |
| log en | pengadaan komputer, laptop, printer, kamera, nandycam, LCD | unit | | 169 | 169 | 169 | 169 | | | |
| rg pr | pengadaan meubeleir ruang paket kelas SD, ruang perpustaka- an, ruang guru, ruang UKS | paket | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| g di | pengadaan peralatan pendi paket dikan matematika, IPA, IPS, bahasa indonesia, jasmani, OR, kesehatan, kesenian, TIK | paket | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |

| NAN |
|------|
| ₹ |
| PERE |
| Σ |
| ΑX |
| Σ |
| DAYA |
| /BER |
| MEN |
| DAN |
| DERI |
| GENI |
| ۸ |
| ETAR |
| KES |
| APAI |
| JENC |
| 5. |
| IUAN |
| 5 |

| INDIKATOR SDG's | jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan, kasus kekerasan terhadap anak perempuan, persentase kasus kekerasan terhadap perempuan | nsif gender mer | dukung pemberda | yaan perempuan, | kasus kekerasan te | rhadap anak perer | npuan, persentase | kasus kekerasa | n terhadap | perempuan |
|---|---|------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|------------|-----------|
| | yang mendapat layanan komprehensif, Persentae keterwakilan perempuan di DPR, unmeet need kebutuhan ber-KB | prehensif, Perse | entae keterwakilar | perempuan di DPI | ર, unmeet need ke | butuhan ber-KB | | | | |
| 1. Program Keluarga Berencana | | | | | | | | | | |
| Kegitan : Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi | Pelayanan KIE lewat Multi | 3 jenis media | 1 jenis media | 1 jenis media | 1 jenis media | 1 jenis media | 1 jenis media | 1,527.95 | APBD | Dinas |
| (KIE) | media (Vidio tron , radio, | elektronik, 6 | elektronik, 4 | elektronik, 4 | elektronik, 4 | elektronik, 4 | elektronik, 4 | | | P3AP2KB |
| | leaflet, stiker, brosur, | jenis media | jenis media | jenis media | jenis media | jenis media | jenis media | | | |
| | spanduk, umbul-umbul, | cetak, 1 baliho | cetak, 1 baliho cetak, sosialisasi | cetak, sosialisasi | cetak, sosialisasi | cetak, sosialisasi | cetak, sosialisasi | | | |
| | roteks, baliho | | program KKBPK | program KKBPK | program KKBPK | program KKBPK | program KKBPK | | | |
| Kegiatan 2 : Evaluasi keluarga Berencana dan Keluarga | Pelaksanaan lomba dalam | kali | 8 | Pelaksanaan | Pelaksanaan | Pelaksanaan | Pelaksanaan | 2,095.86 | APBD | Dinas |
| Sejahtera | rangka hari keluarga | | | lomba dalam | lomba dalam | lomba dalam | lomba dalam | | | P3AP2KB |
| | | | | rangka hari | rangka hari | rangka hari | rangka hari | | | |
| | | | | keluarga 8 Kali | keluarga 8 Kali | keluarga 8 Kali | keluarga 8 Kali | | | |
| | Pendampingan prestator | | | Bakti TNI | Bakti TNI | Bakti TNI | Bakti TNI | | | |
| | | | | kesehatan | kesehatan | kesehatan | kesehatan | | | |
| | | | | Terpadu 1 kali | Terpadu 1 kali | Terpadu 1 kali | Terpadu 1 kali | | | |
| | | | | Kesatuan Gerak | Kesatuan Gerak | Kesatuan Gerak | Kesatuan Gerak | | | |
| | | | | KB Kesehatan 1 | KB Kesehatan 1 | KB Kesehatan 1 | KB Kesehatan 1 | | | |
| | | | | kali | kali | kali | kali | | | |
| 2. Program keserasian peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi | rempuan di bidang ilmu penget | ahuan dan tekn | ologi | | | | | | | |
| Kegiatan : Perumusan kebijakan peningkatan kualitas | Pembuatan Pusat Informasi | kab | 1 | Koordinasi | Koordinasi | Koordinasi | Koordinasi | 1,284.71 | APBD | Dinas |
| hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan | bagi perempuan | | | Forum Pening- | Forum Pening- | Forum Pening- | Forum Pening- | | | P3AP2KB |
| teknologi | | | | katan informasi | katan informasi | katan informasi | katan informasi | | | |
| | | | | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | | | |
| | | | | (Kab) | (Kab) | (Kab) | (Kab) | | | |
| | Bintek peningkatan kualitas | orang | 35 | Sosialisasi | Sosialisasi | Sosialisasi | Sosialisasi | | | |
| | hidup perempuan di Bidang | | | Peningkatan | Peningkatan | Peningkatan | Peningkatan | | | |
| | Ilmu Pengetahuan dan | | | Kualitas Hidup | Kualitas Hidup | Kualitas Hidup | Kualitas Hidup | | | |
| | teknologi | | | Perempuan (35 | Perempuan (35 | Perempuan (35 | Perempuan (35 | | | |
| | | | | orang) | orang) | orang) | orang) | | | |
| | | | | Pendidikan | Pendidikan | Pendidikan | Pendidikan | | | |
| | | | | Politik dan | Politik dan | Politik dan | Politik dan | | | |
| | | | | Pengembangan | Pengembangan | Pengembangan | Pengembangan | | | |
| | | | | Kapasitas Perem- | | Kapasitas Perem- Kapasitas Perem- | Kapasitas Perem- | | | |
| | | | | puan (3 kali) | puan (3 kali) | puan (3 kali) | puan (3 kali) | | | |
| | | | | Sasialisasi three | Sasialisasi three | Sasialisasi three | Sasialisasi three | | | |
| | | | | ends (1 kali) | ends (1 kali) | ends (1 kali) | ends (1 kali) | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan/ Outout Kegiatan | egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Target ' | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|---|--|------------|-------------|--|--|--|--|---------------------------------|-------------------|------------------|
| | 1 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| 3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaam Gender dan Anak | ım Gender dan Anak | | | | | | | | | |
| Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan PUG | Revitalisasi PUG | kab | П | APE kategori utama (Kab) | APE kategori utama (Kab) | APE kategori utama (Kab) | APE kategori utama (Kab) | 1,004.26 | APBD | Dinas P3AP2KB |
| | Evaluasi PUG | | | Pengembangan kapasitas PUG (10 driver PUG) | | | |
| 4. Program: Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | gender dalam pembangunan | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Organisasi Perempuan | Pembinaan lembaga organisasi perempuan | kali | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,152.79 | APBD | Dinas P3AP2KB |
| | Peringatan Hari Kartini | kali | - | ↔ | 1 | н | - | | | |
| | Peringatan Hari Ibu | kali | + | + | + | 1 | 1 | | | |
| | Peningkatan Kapasitas Tim PUG | kali | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| Kegiatan 2 : Pendidikan dan Pelatihan peningkatan | Bintek PPRG | orang | 98 | 110 | 110 | 110 | 110 | 2,825.74 | APBD | Dinas |
| Peran serta dan kesetaraan Gender | Pedidikan bagi perempuan calon BPD dan musrenbang bagi perempuan | orang | | 40 | 40 | 40 | 40 | | | РЗАР2КВ |
| | Pengembangan Kapasitas Tim PUG | kali | | ₽ | 1 | П | 1 | | | |
| Kegiatan 3 : Pelatihan Manajemen usaha bagi | Pembinaan, pelatihan dan | Desa Prima | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1,942.18 | APBD | Dinas |
| perempuan dalam mengelola usaha | monev | | | Peningkatan Produktivitas | Peningkatan Produktivitas | Peningkatan Produktivitas | Peningkatan Produktivitas | | | РЗАР2КВ |
| | | | | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi | | | |
| | | | | Perempuan (PPEP), 2 kali | Perempuan (PPEP), 2 kali | Perempuan (PPEP), 2 kali | Perempuan (PPEP), 2 kali | | | |
| | | | | Industri rumahan | | Industri rumahan Industri rumahan | _ | | | |
| | | | | 6 Desa | 6 Desa | 6 Desa | 6 Desa | | | |
| | | | | sekolah ibu/sekolah iumat 1 kali | sekolah ibu/sekolah iumat 1 kali | sekolah ibu/sekolah iumat 1 kali | sekolah ibu/sekolah iumat 1 kali | | | |
| | | | | PUPM 7 Kec | | | | | | |
| 5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | gan Perempuan | | | : | : | | | | | |
| Kegiatan :Pelaksanaan kebijakan perlindungan naramanan di daarah | Pelatihan Musrenbang bagi | orang | 40 | koordinasi forum | koordinasi forum | koordinasi forum | koordinasi forum koordinasi forum koordinasi forum 1,284.71 naningkatan | 1,284.71 | APBD | Dinas P3AP2KB |
| | | | | informasi | informasi | informasi | informasi | | | מאל וער |
| | | | | perempuan, 1 | perempuan , 1 | perempuan , 1 | perempuan, 1 | | | |
| | | | | Kabupaten | Kabupaten | Kabupaten | Kabupaten | | | |
| | Pelatihan Politik bagi | orang | 40 | sosialisasi | sosialisasi | sosialisasi | sosialisasi | | | |
| | Perempuan | | | peningkatan | peningkatan | peningkatan | peningkatan | | | |
| | | | | Kualitas hidup | Kualitas hidup | Kualitas hidup | Kualitas hidup | | | |
| | | | | orang | orang | orang | orang | | | |

| | | | Tahun Dasar | | Target | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber | Instansi |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------|----------------|-----------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | egiatan | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | Pendan- aan | Pelaksana |
| | | | | Pendidikan Politik dan Pengembangan kapasitas Perempuan 3 kali | Pendidikan Politik dan Pengembangan kapasitas Perempuan 3 | Pendidikan Politik dan Pengembangan kapasitas Perempuan 3 | Pendidikan Politik dan Pengembangan kapasitas Perempuan 3 kali | | | |
| | | | | sosialisasi Three ends 1 kali | sosialisasi Three ends 1 kali | sosialisasi Three ends 1 kali | sosialisasi Three ends 1 kali | | | |
| TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PER INDIKATOR SDG'S | PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA kondisi prasarana penyediaan air baku (jumlah prasarana penyediaan air baku yang terkelola dengan baik dibagi dengan total jumlah prasarana penyediaan air baku) | I DAN SANITASI n air baku (jumlah | YANG BERKEL prasarana peny | ANJUTAN UNTL ediaan air baku ya | UK SEMUA ng terkelola denga | ın baik dibagi deng | an total jumlah pras | arana penyediaar | n air baku) | |
| FROGRAM I.: PENTEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BANO Kegiatan 1: Pemeliharaan Prasarana Penyedia- | Inmlah Pracarana Penyedia- | % | 2017 | 75 | 80 | 282 | 28 | 1 394 | APRD | DPLIPKP |
| Saluran Pembawa | an Air Baku Yang Terkelola | | | 2 | 8 | 3 | | | | 2 |
| Kegiatan 2: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam dengan baik dibanding de- | dengan baik dibanding de- | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Air Kegiatan 3: Pembinaan dan Pengelolaan Air Baku | ngan total Jumlah prasarana penyediaan air baku di Kab | | | | | | | | | |
| Partisi Kawasan Rawan Kekeringan | Sleman dikalikan 100% | d nacy limititati aci | cym dituoi acdo | A. M. | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program Pencegahan dan Penanggulangan | cakupan bangunan (ruman c zan Penvakit menular | idn msutusij yang i | Jenas Jenak nya | Y DE | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pelayanan Pencegahan dan | Dusun yang dipantau angka | lokasi | | 12 | 12 | 12 | 12 | 2,426.69 | APBD | Dinas |
| Penanggulangan Penyakit Menular | bebas jentik | | | | | | | | | Kesehatan |
| | Pemeriksaan serologi Antraks dan pes, | sample | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Penyuluhan penyakit Bersumber Binatang (P2B2) | lokasi | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Penyuluhan Antraks dan | Lokasi, Lokasi | | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | | | |
| | Penyulunan Pes Audit kematian | kasus | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Cetak Leaflet | | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | |
| | format laporan | | | ∞ | 8 | ∞ | ∞ | | | |
| | kartu PJB perumahan | Imbr | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | | | |
| | Form PJB 1 | E E | | × + | 8 1 7 | 8 7 | 8 2 2 | | | |
| | Pemantauan jentik oleh | | | 420 | 420 | 420 | 420 | | | |
| | kader | | | | | | | | | |
| | Pembelian perangkap | | | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | Umpan tikus | ii d | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | | |
| | Pelayanan Pencegahan dan | | | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | | | |
| | Penanggulangan Penyakit Menular | | | | | | | | | |
| | Penyemprotan Insektisida/ | focus | | 380 | 380 | 380 | 380 | | | |
| | Fogging Sarang Nyamuk di Iokasi penderita DBD | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Larvasida | | | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | | | |
| | Pengadaan insektisida untuk focus DBD | liter | | 325 | 325 | 325 | 325 | | | |

| | | | | | | | | indibatif Alchael | | |
|--|--|--------------------|-------------|------|-------|----------------|------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
| | | | 7107 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | – Tanunan (Kp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | Pengadaan pakaian kerja | buah | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | pengadaan mesin fogging | buah | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Pengadaan Mikroskup | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Binokuler | | | | | | | | | |
| | Konsultasi klinis TB, Validasi | 고 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | data TB dengan aplikasi SITT online-offline, Pertemuan jejaring PPM, pertemuan | | | | | | | | | |
| | lintas sektor TB | | | · | , | , | c | | | |
| | workshop Petugas IB | digrataii | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Aksi simpatik dan Sarasehan TB Day dengan screening batuk | sasaran | | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |
| | Worshop Ispa Pneumonia | Angkatan | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Bimtek Kolaborasi TB - HIV | angkatan | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Oji caciligari | samper, lokasi | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| | TB 01 Apak | 2 € | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| | TR 01 PP INH | 2 £ | | 200 | 200 | 200 | 2006 | | | |
| | TB 02 Kartu berobat TB | i d | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| | TB 01 PP INH | Q | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | TB 03 Fasyankes | bk | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | TB 05 | þķ | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | TB 06 | bk | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Buku Pedoman TB, | bk | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | TB 04 | þķ | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Backdrop | co · | | | | | | | | |
| | Reward Penemuan/ kesembuhan penderita TB | Orang | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Uji cross chek TB ke BLK & RUS 1 | kali, | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pelatihan kader tanggap boorang cah (TABO) (PUPM Sleman) | orang | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Penanganan DBD (PUPM Kalasan) | desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pokjanal Kecamatan, Pemberdayaan kader | Kec, Lokasi | | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | | | |
| | Update knowledge Kusta | kali | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| INDIKATOR SDG's PROGRAM 1:Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan desa yang telah mel | laksanakan 5 pilar | STBM | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan | Pemantauan jentik berkala bagi institusi | puskesmas | | 25 | 25 | 25 | 25 | 1,374.80 | APBD | Dinas Kesehatan |
| | Pemeriksaan Air bersih (Bakteri dan Kimia) | sampel | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Pemeriksaan Air Minum Bakteriologis | sampel | | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | Indikatif Alokasi | Simber | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------|-----------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | alger | i ai get i aii ui aii | | Anggaran 5 | Pendan- | Instansi |
| | | | 707 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Juta) | aan | reiaksana |
| | Pemeriksaan Air Minum Kimia | sampel | | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | Pemeriksaan Rujukan ke BTKL | sampel | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Pembinaan penyehatan air | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Bimtek kualitas air minum | Kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Pembinaan kesehatan keria | kali | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pembinaan lingkungan | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Fasyankes Money limbah medis bagi | Kali | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pasyankes | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Chlorindefuser | h | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Pengadaan Safetybok | Ч | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| | Desa STBM | qs | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | pemeriksaan cholinesterase | kali | | ₩ (| ₩ (| ₩ (| ₩ (| | | |
| | Monev Klinik Sanitasi Pembinaan kabupaten sehat | Kali kabupaten. | | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | | | |
| | | kec | | i î | i | i | i | | | |
| | Jejaring Pengembangan Kabupaten Sehat | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Evaluasi kegiatan Lingkungan Lokasi Bersih Sehat (LBS) | Lokasi | | 17 | 17 | 17 | 17 | | | |
| | Tes Kebugaran | Orang | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Pembinaan POS UKK | Lokasi | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Pelatihan penguatan kelembagaan PAMDES (PUPM Turi) | desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pemicuan STBM (PUPM Kalasan) | desa | | П | П | П | T | | | |
| | Pemeriksaan rumah sehat (PUPM Kalasan) | desa | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| INDIKATOR SDG's jumlah infrastrukt PROGRAM 1: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah | jumlah infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal (IPAL komunal) - Minum dan Limbah | ah dengan sister | n terpusat skala k | ota, kawasan, kom | unal (IPAL komuna | • | | | | |
| Kegiatan 1: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah | jumlah infrastruktur air Iimbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal (Pembangunan | SR | Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR | 88,314.13 | APBD dan DLH DAK | ЛН |
| | jaringan servis dan SR, Pembangunan jaringan servis dan SR Kawasan Berbah, | SR | Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR | Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR | Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR | Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR | Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR | | | |
| | Pembangunan IPAL komunal sekolah, Pembangunan IPAL komunal, Pembangunan IPAL individu) | lokasi | Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiya- ta 1 lokasi | Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiya- ta 1 lokasi | Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiya- ta 1 lokasi | Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiya- ta 1 lokasi | Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiya- ta 1 lokasi | | | |
| | | nnit | Pembangunan IPAL individual 50 unit | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Program / Voristan / Outhurt Koristan | neteino | Control | Tahun Dasar | | Target ' | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber | Instansi |
|--|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------|-----------|
| Captan (magazini) Captan (magazini) | 200 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| INDIKATOR SDG's | TERSEDIANYA SARANA PRASANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN LUMPUR TIIJA PERKOTAAN DAN | ANA PENGELC | JLAAN AIR LIMBAH S | SISTEM SETEMPAT | MELALUI PENINGK | CATAN KUALITAS PI | ENGELOLAAN LUN | IPUR TINJA PERKO | TAAN DAN | |
| | | PENGOLAHAN | LUMPUR TINJA (IPL | £ | | | | | | |
| PROGRAM 1: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air M | ~ | | - | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur | | SK. | pembangunan | Pelaksanaan | Pelaksanaan | Pengelolaan IPLI | | 2,861.25 | APBD | DLH |
| Tinja (IPLT) | pengelolaan air limbah | | Instalasi | pembinaan | pelatihan sedot | selama 12 bulan | pembinaan | | | |
| | sistem setempat melalui | | Pengolah | masyarakat | lumpur tinja IPAL | | masyarakat | | | |
| | peningkatan kualitas | | Lumpur Tinja 1 | tentang teknik | Komunal 4 kalı ; | | tentang teknik | | | |
| | pengelolaan lumpur tinja | | nnit | pengelolaan | Pelaksanaan | | pengelolaan | | | |
| | perkotaan dan | | | Jarıngan 1 kalı | pembinaan | | Jarıngan 1 kalı | | | |
| | pembangunan Instalasi | | | | masyarakat | | | | | |
| | Pengolahan Lumpur Tinja | | | | tentang teknik | | | | | |
| | (IPLI) | | | | pengelolaan | | | | | |
| | | | | | Jailingali 1 Kali; Doloksopopo FCD | | | | | |
| | | | | | pengelolaan IPAL | | | | | |
| | | | | | Komunal 6 kali | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | Terkelolanya kualitas air bersih, mata air, badan air, air hujan, tanah pertanian, air embung, air limbah (Cakupan titik pantau kualitas lingkungan hidup) | sih, mata air, i | badan air, air hujan, t | tanah pertanian, ai | r embung, air limb | ah (Cakupan titik p | oantau kualitas lin | gkungan hidup) | | |
| PROGRAM 1: Perlindungan dan Konservasi SDA | | | | | 3 | | | | | |
| Kegiatan 1: Pemantauan kualitas lingkungan | Cakupan titik pantau kualitas titik | titik | Penguijan/peme | Penguijan/peme | Penguijan/peme | Penguijan/peme | Penguijan/peme | 1.221.88 | APBD | DLH |
| 9 | lipakungan hidun | | rikeaan kualitas | | | | rikeaan kualitae | | | |
| | (Penguijan/nemeriksaan | | air hersih | air hercih | air he reih | air hercih | air hercih | | | |
| | knalitas air hersih | titik | Penguijan/neme | | | | Penguijan/neme | | | |
| | Denginian/nemerikaan | | rikaan kualitas | | | | rikeaan kualitas | | | |
| | rengajan/pememsaan kualitas mata air | | mata air | mata air | mata air | mata air | mata air | | | |
| | Donanijan/homorikaan | 4:+:+ | Donguijan /nomo | | Donatiiin /nomo | | Donguijan/nomo | | | |
| | rengujian/pemenksaan | HUIN | rikaan kualitat | | rengajan/peme | | rengajan/peme | | | |
| | nualitas Daugil all, | | heden eigen titil. | | | | | | | |
| | Pengujian/pemeriksaan | | badan air 50 titik | | = 11 | | _ | | | |
| | kualitas air hujan, | lokasi | Pengujian/peme | | Pengujian/peme | | Pengujian/peme | | | |
| | Pengujian/pemeriksaan | | riksaan kualitas | riksaan kualitas | riksaan kualitas | riksaan kualitas | riksaan kualitas | | | |
| | kualitas tanah pertanahan, | | air hujan 60 | air hujan 60 | air hujan 60 | air hujan 60 | air hujan 60 | | | |
| | Pengujian/pemeriksaan | | lokasi | | lokasi | | lokasi | | | |
| | kualitas udara ambien, | titik | Pengujian/peme | | Pengujian/peme | | Pengujian/peme | | | |
| | Pengujian/pemeriksaan | | riksaan kualitas | riksaan kualitas | riksaan kualitas | riksaan kualitas | riksaan kualitas | | | |
| | kualitas emisi cerobong, | | tanah pertanah- | tanah pertanah- | tanah pertanah- | tanah pertanah- | tanah pertanah- | | | |
| | Pengujian/pemeriksaan | | an 30 titik | | an 30 titik | | an 30 titik | | | |
| | kualitas air embung, | titik | Pengujian/peme | | Pengujian/peme | _ | Pengujian/peme | | | |
| | Pengujian/pemeriksaan | | riksaan kualitas | riksaan kualitas | riksaan kualitas | riksaan kualitas | riksaan kualitas | | | |
| | kualitas air limbah) | | air embung 25 | air embung 25 | air embung 25 | air embung 25 | air embung 25 | | | |
| | | | titik | | titik | | titik | | | |
| | | usaha/ | Pengujian/peme | Pengujian/peme | Pengujian/peme | | Pengujian/peme | | | |
| | | kegiatan | riksaan kualitas | riksaan kualitas | riksaan kualitas | riksaan kualitas | riksaan kualitas | | | |
| | | | air limbah 25 | air limbah 25 | air limbah 25 | air limbah 25 | air limbah 25 | | | |
| | | | usaha/kegiatan | usaha/kegiatan | usaha/kegiatan | usaha/kegiatan | usaha/kegiatan | | | |
| INDIKATOR SDG's | EMBUNG DAN SUNGAI TERKELOLA DENGAN BAIK | ELOLA DENGA | IN BAIK | | | | | | | |
| PROGRAM : PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA | KONSERVASI SUNGAI, DANAU D | AN SUMBER | DAYA AIR LAINNYA | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pembangunan embung dan bangunan | | % | 2017 | 78 | 79 | 80 | 82 | 68,639 | APBD | DPUPKP |
| penampung air iainnya | | | | | | | | | | |

| Secretarian Rebersition 2017 2018 2019 2020 2021 Talunan Repetibilists 100 % 2021 2022 | Program/Keeiatan/Outout Keelatan | egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Target | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|--|---|---|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| rich standing geratan Kebershan Sungai, Johasi bercih sungai kalikan 100 % heribungan geratan Kebershan Sungai, Johasi bercih sungai kalikan 100 % heribungan kalikan sungai Johasi bercih sungai merjendidan kualisa dan kali Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan Sayandat masyandat li Johasi sungai 12 hokasi sungai 17 hokasi sungai 18 hokasi | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| reinksananya geralan Kebersihan Sungai, lokasi bersih sungai merjandan kebersihan Sungai, lokasi bersih sungai merjandan kebersihan Sangai, sepanjang sungai sungai sepanjang | Kegiatan 2 : Pemeilharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lannya | Jumlah embung terkelola baik dibagi jumlah embung dikalikan 100 % | | | | | | | | | |
| refaksanarya gerakan Kebersihan Sungai, lokasi bersih sungai regerdalian kulitas dan kela bersihan Sungai bersih sungai ROKASH. (Perholman Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan Sapalakat masyarakat peduli syarakat peduli syaraka | Kegiatan 3 : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya | | | | | | | | | | |
| eriaksananya geralam Kebersihan Sungal, Jokasi bersih sungal masyarakat perlujang sungal 1 Jokasi Jokasi sungal 1 Jokasi Gerakan Rebersihan Reb | Kegiatan 4 : Perencanaan embung dan bangunan | | | | | | | | | | |
| refustananya gerakan Kebersihan Sungai Jokasi bersih sungai antgari Sungai Jokasi bersih sungai antgari Sungai Tokasi ungai Sungai Tokasi sungai Benyisiran sungai Penyisiran sungai Penyi | Kegiatangan, Sebabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran sungai dan pembinaan penanganan penendalian dava rusak air | | | | | | | | | | |
| relakanannya gerakan Kebersihan Sungai, Jokasi bersih sungai antitas air kungai kepanjang sungai sepanjang sepanjang sungai sepanjang sungai sepanjang sepanjang sungai sepanjang sep | Kegiatan 6 : Pengelolaan Sempadan Sungai, Embung dan Mata Air | | | | | | | | | | |
| erlaksananya gerakan Kebersihan Sungai, lokasi bersih sungai engendelian kualitas dan kali Pembinaan Pembi | Kegiatan 7 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Wilayah Barat | | | | | | | | | | |
| Fereiksananya gerakan Kebersihan Sungai, lokasi bersih sungai antitatas dan kali Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan S93,750,000 APBD antitata air sungai ROKASIH. (Pembinaan sepanjang sungai sunga | Kegiatan 8 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Wilayah Tengah | E | | | | | | | | | |
| erafasaranya gerakan Kebersihan Sungai, Jokasi bersih sungai angarakat kebersihan sungai, jokasi bersih sungai angai, Gerakan kebersihan di Jokasi di Jokasi sungai 17 lokasi di Jokasi di Jokasi di Jokasi di Jokasi di Jokasi di Jokasi sungai 3 sungai asungai sungai sungai 2 keli sungai 2 | Kegiatan 9 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Wilayah Timur | | | | | | | | | | |
| APBD and sair sungal sepanjang sungai serakan ser | INDIKATOR SDG's | Terlaksananya gerakan Kebe | rsihan Sungai, | lokasi bersih sunga | | | | | | | |
| AckASILA (Pembinaan sepanjang sungai sepanjang sepanjang sungai sepanjang sepanja | PROGRAM 1: Perlindungan dan Konservasi SDA Kegistan 1: Pengelolaan PROKASIH/ SIIPERKASIH | Dengendalian kualitas dan | iis | Demhinaan | | Pembinaan | Demhinaan | | 593 750 000 | | Ξ. |
| ROKASIH. (Pembinaan sepanjang sungai jakai 1 kali 1 kabersihan kebersihan kebersihan kebersihan kebersihan kebersihan kebersihan kebersihan masyarakat 1 kali 1 kokasi 1 kali 1 kokasi 2 kungai 1 2 kokasi 1 kali 1 kokasi 3 kungai 2 kali 1 kokasi 3 kungai 3 kungai 3 kungai 3 kungai 3 kungai 3 kungai 3 kangai 3 kungai 3 kangai 3 kungai 3 kangai 3 kungai 2 kali 1 karan 1 kali 2 kali 1 karan 1 kali 2 kali 1 karan 1 kali 2 kali 1 kangaratan masyara- 2 2017 87 88 89 90 1.918 APBD APBD APBD ARAN I kalikan 100 % Sangai a kali a kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kungai 2 kali 2 kungai 2 kali 3 kungai 2 kali 4 kali | | kuantitas air sungai | | masyarakat | masyarakat | masyarakat | masyarakat | | | | |
| Ingail, Gerakan lokasi Likali | | PROKASIH. (Pembinaan | | sepanjang sunga | | | | | | | |
| Inggal, Gerakan kebersihan lokasi Gerakan Gera | | masyarakat sepanjang | | 1 Kalı | ı kalı | 1 Kalı | 1 Kalı | 1 kalı | | | |
| ingai J. Nebersinan kebersinan kepersinan kepersinan sungai J.7 lokasi dan merti sungai dan dan merti sungai dan dan merti sungai dan dan merti sungai d | | sungai., Gerakan kebersihan | lokasi | Gerakan | Gerakan | Gerakan | Gerakan | Gerakan | | | |
| retremulan masyarakat bringal J. Dokasi Sunggal J. Dokasi Sunggal J. Dokasi Sunggal J. Dokasi Sunggal dan merti sunggal pertykistran sunggal sunggal pertykistran sunggal pertyki | | sungai, Merti sungai, | | kebersihan | kebersihan | kebersihan | kebersihan | kebersihan | | | |
| sungai Benyisiran sungai Penyisiran sungai Pentemuan ma-Pertemuan ma- | | Penyisiran sungai, Pertemuan masyarakat | | dan merti sungai | | | | | | | |
| sungai Penyisiran sungai Bangai 3 sungai 3 saingai 3 saingai 3 saingai 3 saingai 3 sungai 3 saingai 3 sungai 3 saingai 3 saing | | peduli sungai) | | di 1 lokasi | | | | | | | |
| kali Sungal Sung | | | sungai | Penyisiran sunga | | | Penyisiran sungai | | | | |
| Syarakat peduli syarakat peduli syarakat peduli syarakat peduli syarakat peduli syarakat peduli sungai 2 kali sanga 2 kali sungai 2 kali sungai 2 kali sanga 2 kali sang | | | kali | s sungai Pertemuan ma- | s sungal Pertemuan ma- | s sungai Pertemuan ma- | s sungai Pertemuan ma- | s sungal Pertemuan ma- | | | |
| FRESENTAGE JUMICAH PENGADUAN MASYARAKTA AKIBAT ADDANNA DUGAAN PENCENJARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTT AAKAN LINGKUNGAN HIDUP Milah Pengaduan masyara- % 2017 87 88 89 90 1,918 APBD at akibat adanya dugaan encemaran dan/atau geti rakibat adanya dugaan milah pengaduan yang milah pengaduan yang gen hidup dalam satu tahun san hidup dalam satu tahun ARAIRAN 100% A | | | | syarakat peduli | | | |
| AAKAN LINGKUNGAN HIDUP milah Pengaduan masyara- % 2017 87 88 89 90 1,918 APBD ark deba dagaya dugaan neremaran dan/atau neremaran dan/atau neremaran dan/atau neremaran hidup milah pengaduan yang milah pengaduan yang milah pengaduan yang pan hidup dalam satu tahun san hidup dalam satu tahun kupan ketersediaan air untuk pertanian | INDIKATOR SDG's | PERSENTASE JUMLAH PENGA | DUAN MASY, | ARAKAT AKIBAT AD | INYA DUGAAN PEN | VCEMARAN DAN/A | TAU PERUSAKAN I | LINGKUNGAN HIDU | P YANG DITINDA | KLANJUTI | |
| Imilah Pengaduan masyara- % 2017 87 88 89 90 1,918 APBD at akibat adamya dugaan encemaran dan/atau encemaran dan/atau encemaran dan/atau encemaran hidup ang ditindaklanjuti dibagi milah pengaduan yang terima obeh instansi lingku- encemaran encemaran ingkungan hidup dalam satu tahun kalikan 100 % encemaran iruntuk pertamian encemaran iruntuk pertamian encemaran iruntuk pertamian encemaran iruntuk pertamian encemaran encemar | PROGRAM 1 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PE | ERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUF | 0 | | | | | | | | |
| Neglatan 2 : Permalan Kota Senat/Adipura Rat aktora danya dungaan percemaran dan/atau percemaran dan/atau percemaran dan/atau percemaran ingkugan hidup yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang diterima oleh instansi lingku-ngan hidup dalam satu tahun dikalikan 100 % Cakupan ketersediaan air untuk pertanian dikalikan 100 % Cakupan ketersediaan air untuk pertanian dikalikan 100 % Danian ketersediaan air untuk pentanian dikalikan 100 % Dania dania dan ketersediaan air untuk pentanian dikalikan 100 % Dania dania dan ketersediaan air untuk pentanian dania dani | Kegiatan 1: Pengkajian Dampak Lingkungan | Jumlah Pengaduan masyara- | | 2017 | 87 | 88 | 68 | | 1,918 | | DPUPKP |
| perusakan lingkungan hidup yang ditindakkanjuti dibagi jumlah pengaduan yang diterima oleh instansi lingku- ngan hidup dalam satu tahun dikalikan 100 % Cakupan ketersediaan air untuk pertanian | | kat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau | | | | | | | | | |
| yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang diterima oleh instansi lingku- ngan hidup dalam satu tahun dikalikan 100 % Cakupan ketersediaan air untuk pertanian | | perusakan lingkungan hidup | | | | | | | | | |
| Jumiah pengaduan yang diterima oleh instansi lingku- ngan hidup dalam satu tahun dikalikan 100 % Cakupan ketersediaan air untuk pertanian | | yang ditindaklanjuti dibagi | | | | | | | | | |
| ngen hidup dalam satu tahun dikalikan 100 % dalam satu tahun dikalikan 100 % Cakupan ketersediaan air untuk pertanian can ingen an air untuk pertanian dalam satu satu satu satu satu satu satu satu | | jumlah pengaduan yang | | | | | | | | | |
| dikalikan 100 % Cakupan keersedian air untuk pertanian Cakupan keersedian air untuk pertanian | | ngan hidup dalam satu tahun | | | | | | | | | |
| NIDIKATOR SDG'S Calupan keersediaan ali urtuk peertanjan Calupan keersediaan ali urtuk peertanjan | | dikalikan 100 % | | | | | | | | | |
| | INDIKATOR SDG's | Cakupan ketersediaan air un | tuk pertanian | | | | | | | | |

| | | | Tool | | | Targ | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi | Sumber | 100 |
|---|--|----------------|-------------------|-------------|-------|------|----------------|------|-------------------|----------------|-----------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | egiatan | Satuan | 2017 | 70 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. | Pendan- aan | Pelaksana |
| Kegiatan 1: Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Kegiatan 2: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Jumlah debit yang tersedia dibagi dengan debit yang dibutuhkan dikalikan 100 % | % | 2017 | 78 | 78 | | 79 | 80 | 184,756 | APBD | DPUPKP |
| neglatan si kenabilitasi/Pemelinaraan Petani Pemakai Air Kegiatan 4 : Pembangunan/Peningkatan Jaringan | | | | | | | | | | | |
| Irigasi Kegiatan 5 : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kegiatan 6 : Peningkatan Pengelolaan Irigasi | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 7 : Pengelolaan Perijinan Bidang Irigasi Kegiatan 8 : Pemutakhiran Data Jaringan Irigasi Keristan 0 : penatakhiran Mahambanan Kekislam | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan ligasi | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 10 : Operasi dan Pemelinaraan Jaringan Irigasi Wilayah Barat | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 11 : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Tengah | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 12 : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Iripasi Wilavah Timur | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | EMBUNG DAN SUNGAI TERKELOLA DENGAN BAIK | ELOLA DENGAN | N BAIK | | | | | | | | |
| PROGRAM : PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA | ONSERVASI SUNGAI, DANAU E | AN SUMBER D | AYA AIR LAINNYA | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya | Jumlah embung terkelola baik dibagi jumlah embung | % | 2017 | 78 | 79 | | 80 | 82 | 68,639 | APBD | DPUPKP |
| Kegiatan 2 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lannya | dikalikan 100 % | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air | | | | | | | | | | | |
| lainnya | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 4 : Perencanaan embung dan bangunan | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 5 : Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi | | | | | | | | | | | |
| Saluran sungai dan pembinaan penanganan pengendalian daya rusak air | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 6 : Pengelolaan Sempadan Sungai, Embung dan Mata Air | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 7 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Wilayah Barat | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 8 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Wilayah Tengah | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 9 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Wilayah Timur | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | PENGURANGAN LUASAN LAHAN KRITIS MELALUI REHABILITASI DI DALAM KPH | HAN KRITIS MEI | LALUI REHABILITAS | II DI DALAN | 1 KPH | | | | | | |
| PROGRAMI I: Perlindungan dan Konservasi SDA | | | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | . Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Target | Farget Tahunan | | Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|---|---------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| | | | 7107 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | l anunan (kp. Juta) | | relaksana |
| Kegiatan 1: Konservasi SDA dan Pengendalian | Meningkatny kualitas dan batang | batang | Bibit tanaman | Bibit tanaman | Bibit tanaman | | Bibit tanaman Bibit tanaman | 3,825.97 | APBD DLH | DLH |
| kerusakan Sumber-sumber Air | kuantitas SDA (Bibit tanamar | _ | pemeliharaan | pemeliharaan | | pemeliharaan | pemeliharaan | | | |
| | sekitar sumber air dan Bibit | | hutan rakyat | hutan rakyat | hutan rakyat | hutan rakyat | hutan rakyat | | | |
| | tanaman pemeliharaan | | 2.000 batang | 2.000 batang | | 2.000 batang | 2.000 batang | | | |
| | hitan rakvati | | | | | | | | | |

TUJUAN GLOBAL 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN, DAN MODERN UNTUK SEMUA

TUJUAN 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

| SEMUA | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------|------------|
| INDIKATOR SDG's | Jumlah penganggur | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Peningkatan Kualitas dan Produktivitas | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pendidikan dan pelatihan keterampilan | Pelatihan kerja 14 sub | paket | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 14,270.44 | APBD | Disnaker |
| pagi pencari kerja | kejuruan | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2: Pendidikan dan pelatihan bagi pen-cari | Pelatihan kerja non | paket | 23 | 46 | 46 | 46 | 46 | 23,583.67 | | |
| kerja melalui sistem non institusional/ MTU (mobile | institusional 7 kejuruan | | | | | | | | | |
| training unit) | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3: Pendidikan dan pelatihan bagi pencari | Pelatihan kerja 14 sub | orang | 10 | 7 pelatihan, 40 | 7 pelatihan, 40 | 7 pelatihan, 40 | 7 pelatihan, 40 | 495.08 | | |
| kerja melalui sistem swadana | kejuruan | | | orang | orang | orang | orang | | | |
| Kegiatan 4: Uji kompetensi & sertifikasi | Terlaksananya uji | orang | 48 | 16 orang, 3 | 16 orang, 3 | 16 orang, 3 | 16 orang, 3 | 475.68 | | |
| | kompetensi sub kejuruan | | | paket | paket | paket | paket | | | |
| Kegiatan 5: Pelayanan produktivitas kerja | Penyuluhan produktivitas | kali | 2 | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 238.21 | | |
| | bagi masyarakat dan | | | | | | | | | |
| | perusanaan kecii; Bimbingan | | | | | | | | | |
| | teknis peningkatan | | | | | | | | | |
| | produktivitas bagi | | | | | | | | | |
| | perusahaan kecil | | | | | | | | | |
| Kegiatan 5: Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang | Pelatihan kerja non | paket | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,121.77 | | |
| cacat dan eks trauma | institusional sub kejuruan | | | | | | | | | |
| Kegiatan 6: Penyelesaian Pemberian Perlindungan | Pembinaan pelaksanaan | perusahaan; | 40 perusahaan; | pembinaan 60 | pembinaan 60 | pembinaan 60 | pembinaan 60 | 1,663.50 | | |
| Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | program jaminan sosial bagi | orang | 129orang | perush, seminar | perush, seminar | perush, seminar | perush, seminar | | | |
| | pekerja penerima upah di | | | mengenai BPJS 2 | mengenai BPJS 2 | mengenai BPJS 2 | mengenai BPJS 2 | | | |
| | perusahaan; Pengurusan | | | angk 1 hari @50 | | | |
| | premi dan klaim BPJS | | | orang; 131 | orang; 131 | orang; 131 | orang; 131 | | | |
| | Ketenagakerjaan dan | | | orang | orang | orang | orang | | | |
| | kesehatan | | | | | | | | | |
| Kegiatan 7 : Pengembangan padat karya | Sosialisasi dan pelaksanaan | lokasi | 4 | 3 lokasi @ 44 | 3,330.60 | | |
| | padat karya produktif | | | orang, padat | orang, padat | orang, padat | orang, padat | | | |
| | | | | karya 132 orang | karya 132 orang | karya 132 orang | karya 132 orang | | | |
| INDIKATOR SDG's | jumlah wisatawan mancanegara | gara | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Pengembangan Kemitraan | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Kerjasama | Pelatihan dan Pendampingan desa wisata | desa wisata | 8 | 8 | 6 | 10 | 11 | 1,530.00 | APBD | Dinas |
| Desa Wisata | Pengelolaan Desa Wisata | | | | | | | | | Pariwisata |

TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

CAKUPAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

INDIKATOR SDG's PROGRAM 1: PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | (egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|---|--|---------------|------------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| | • | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| Kegiatan 1: Perencanaan pembangunan jalan | Jumlah jalan dan jembatan yang dibangun dibagi jumlah jalan dan jembatan yang seharusnya dibangun dikalikan 100% | % | 2017 | 27,735 | 28,180 | 29,400 | 30,800 | 964,182 | APBD | DPUPKP |
| Kegiatan 2: Perencanaan pembangunan jembatan | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3: Peningkatan jalan | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 4: Peningkatan jembatan dan gorong-gorong | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | PROPORSI DRAINASE DAN GORONG-GORONG KABUPATEN DALAM KONDISI MANTAP | RONG-GOROF | NG KABUPATEN DA | LAM KONDISI MA | NTAP | | | | | |
| PROGRAM 1: PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG | GORONG-GORONG | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Jumlah saluran drainase baik % dibagi jumlah total saluran dikalikan 100 % | % | 2017 | 48.9 | 49 | 20 | 52 | 113,471 | APBD | DPUPKP |
| Kegiatan 2: Pembangunan saluran drainase/gorong- | | | | | | | | | | |
| gorong | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3: Pemeliharaan Rutin saluran drainase | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | CAKUPAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | ELIHARAAN | LAN DAN JEMBATA | Z, | | | | | | |
| PROGRAM: REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | AN JEMBATAN | | | ł | | | | | | |
| Kegistan 1. Derencanaan rehahilitasi/nemeliharaan | limlah ialah dan iamhatan | % | 2017 | 35.86 | 36 53 | 37 75 | 38.42 | 799 887 | APRD | DPLIPKP |
| jalan | yang direhabilitasi dibagi jumlah jalan dan jembatan yang seharusnya direhabilitasi dikalikan 100% | 2 | } | | | | 1 | | | : : |
| Kegiatan 2: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3: Pemeliharaan Rutin jalan | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 4: Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam | | | | | | | | | | |
| pemeliharaan jalan dan jembatan | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | CAKUPAN KETERSEDIAAN DATA DASE JALAN DAN JEMBATAN | TA DASE JALAP | I DAN JEMBATAN | | | | | | | |
| PROGRAM: PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN | ATA BASE JALAN DAN JEMBATAN | _ | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penyusunan Sistem Informasi Data Base | Jumlah dokumen | % | 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5,488 | APBD | DPUPKP |
| jalan | ketersediaan data yang dihasilkan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan dikalikan 100 % | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | PROPORSI SARANA PRASARANA KEBINAMARGAAN DALAM KONDISI BAIK | NA KEBINAMA | RGAAN DALAM KO | NDISI BAIK | | | | | | |
| PROGRAM: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN | NA KEBINAMARGAAN | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium | Jumlah sarana prasarana kebinamargaan baik dibagi jumlah total alat dikalikan 100 % | % | 2017 | 96 | 86 | 86 | 86 | 30,853 | APBD | DPUPKP |
| Kegiatan 2: Pemeliharaan sarana prasarana kehinamaraan | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | IIIMI AH KENDARAAN YANG I I I I IS MEI AKUKAN I I II EMISI KENDARAAN BERMOTOR | ULUS MELAKI | IKAN UJI FMISI KEN | DARAAN BERMO. | TOR | | | | | |
| PROGRAM 1: Peningkatan Pengendalian Polusi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Target ⁻ | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|---|---|--------------------|---|--|--|--|--|---------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | 7107 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I anunan (Kp. Juta) | aan | Pelaksana |
| Kegiatan 1: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah | Jumlah kendaraan yang lulus melakukan uji emisi kendara- an bermotor (Lomba emisi kendaraan bermotor, Uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor | kali/ kendaraan | Terlaksananya lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan 80 | Terlaksananya lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan 80 kendaraan dinas | Terlaksananya lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan 80 kendaraan dinas | Terlaksananya Iomba emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan 80 kendaraan dinas | Terlaksananya lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan 80 kendaraan dinas | | АРВО | ргн |
| | Penneriksaan Pb dalam darah, Workshop hasil uji emisi) | kali/ kendaraan | Terlaksananya uji petik pengujan emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan | | | | | | | |
| TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA | TRA DAN ANTARNEGARA | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG'S PERSENTASE KK MISKIN PROFEDAM 1. Bombordansan Eakir Mishin Komunitas Ada Tarnon ill (KATI dan Bomandana Masalah Kassiahbanaan Sosial IDMKI) Jainwa | PERSENTASE KK MISKIN | desem preparent | h Kocojahteraan So | vanie I (DMKC) leis | a | | | | | |
| Kegiatan 1: Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan calon warga binaan PRSE | kelompok | 3 | | , ' | | | 151.54 | APBD | Dinas Sosial |
| | Pembinaan lanjut bagi kelompok PRSE | kelompok | 9 | | | | | | | |
| Kegiatan 2: Bimbingan Sosial dan Bantuan Bagi Keluarga Miskin Non Potensial (kesrakat) dan Lansia | Bimbingan Sosial bagi KK miskin non potensial | orang | 06 | 06 | 09 | 09 | 09 | 388.23 | APBD | Dinas Sosial |
| Rentan Sosial Ekonomi | Bimbingan Sosial bagi kelg. Lansia rentan sosial ekonomi | orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| Kegiatan 3: Pembinaan Usaha Sosial Ekonomi | Bimbingan teknis USEP-KUBE | orang | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 1,650.34 | APBD | Dinas Sosial |
| Produktif (USEP/KUBE) | Evaluasi kelompok USEP- KUBE | kelompok | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan calon warga binaan PRSE | orang | | 80 | 140 | 160 | 180 | | | |
| | Pembinaan lanjut bagi kelompok PRSE | kelompok | | 10 | ∞ | 8 | ∞ | | | |
| Kegiatan 4: Penyelenggaraan Distribusi Raskin | Pendistribusian beras RTS-PM | RTS-PM | | 66,534 | 66,534 | 66,534 | 66,534 | 2,161.91 | APBD | Dinas Sosial |
| Kegiatan 5: Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial | Verifikasi dan validasi permohonan JPS | permohonan | | 200 | 200 | 500 | 500 | 580.83 | APBD | Dinas Sosial |
| PROGRAM 2: Pelavanan dan Rehabilitasi Keseiahteraan Sos | Penyaluran bantuan JPS an Sosial | permohonan | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi | Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan bagi KPM | KPM | 50,862 | 50,862 | 48,807 | 48,807 | 48,807 | 1,695.70 | APBD | Dinas Sosial |
| PMKS | Forum PKH tingkat kabupaten | kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Forum PKH tingkat kecamatan | kali | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | | | |
| | /penertiban anjal | kali | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1,874.45 | APBD | Dinas Sosial |

| Page | Program / Keelatan / Outhuit Keelatan | egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Targ | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|---|--|--|--------|-------------|------|------|----------------|------|--|-------------------|--------------|
| Application and later a | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| monety testinated in with pertigation in congregation with pertigation with pertication with pert | Kegiatan 2: Penanganan dan Pembinaan Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Masyarakat | | kali | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| same bekal di wilayah 15 - | | Keamanan/penjagaan diperempatan/ pertigaan | kali | 15 | , | | | | | | |
| and befall flart cone 60 60 60 b DN befall flart cone 60 60 60 n power stratural corage 10 15 15 n power stratural corage 10 10 10 n power stratural corage 10 10 10 n man begi corage corage 1 10 10 10 n man begi corage corage 1 10 10 10 10 aman begi corage corage 1 10 10 10 10 aman begi corage corage 1 10 10 10 10 aman begi corage corage 1 10 10 10 10 aman begi corage corage 2 2 2 2 2 spat dumis corage 6 6 6 6 6 6 none corage 3 - - - < | | Bantuan orang terlantar/ kehabisan bekal di wilayah DIY | orang | 15 | | | | | | | |
| And the Result of Annal States of Annal Result of Annal States of Annal Result of Annal | | Bantuan orang terlantar/ kehabisan bekal di luar Wilavah DIY | orang | 09 | | | | | | | |
| Parameter Para | | Bantuan orang terlantar/ kehabisan bekal | orang | | 09 | 09 | 09 | 09 | | | |
| mean orang terlandsr orang 10 20 20 20 PS/PAR 1 10 10 10 10 Tambor bendrand aspangan unit to make bencrana astrand abpurumun kitigas of arrart ton make bencrana and make bencrana | | Bantuan perawatan/ pengiriman ke RS | orang | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | | | |
| aman bagi orang orang 1 10 10 10 alian baki orang orang 1 10 10 10 10 alian pakalan lapangan unitt 20 - | | Pengiriman orang terlantar ke RS/PS/PA | orang | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Ilan pakaian lapangan unit 20 -< | | Pemakaman bagi orang terlantar | orang | П | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| APBD APBD stripped partural ton stripped bencarial stripped bencarial stripped bencarial stripped bencarial stripped bencarial stripped bencarial in Korban bencarial orang 38 | | Pembelian pakaian lapangan | unit | 20 | | | | | | | |
| sarana dapur umum lokasi 2 2 2 nn korban bencana orang 38 - - - sgal dunia bencana orang 36 - - - - nn korban bencana orang 36 - - - - - nn korban bencana orang 30 - - - - - nn Lauk-pauk bagistik orang 6 - 6 6 6 6 nn Lauk-pauk bagistik kK 100 - 100 100 100 nn Lauk-pauk bagistik kM 100 - 2 2 2 2 n bencana stalan kapasitas kalif 2 - 2 2 2 2 n dalam antisipasi a - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Kegiatan 3: Penyediaan Beras Penyangga (Buffer Stock) | | ton | 80 | 1 | ∞ | ∞ | 80 | | APBD | Dinas Sosial |
| Notice Decision State | | Lokasi sarana dapur umum | lokasi | 2 | , | 2 | 2 | 2 | | | |
| sgal dunia sgal dunia 36 - | | Bantuan Korban bencana | orang | 38 | | | | | | | |
| in Korban bencana orang 36 - | | meninggal dunia | | | | | | | | | |
| in korban bencana orang 30 - | | Bantuan Korban bencana rawat inap | orang | 36 | | | ı | | | | |
| lating logistic orang 6 - 6 6 6 6 6 100 | | Bantuan Korban bencana | orang | 30 | | | | | | | |
| legical globishis of any color of the color | | rawat jalan | 9 9 | | | (| | · · | | | |
| bencana katan kapasitas kali 2 2 2 2 4 2 4 </td <td></td> <td>Bantuan Lauk-pauk bagi</td> <td>KK</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> | | Bantuan Lauk-pauk bagi | KK | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | |
| katan kapasitas kali 2 - 2 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | korban bencana | | | | | | | | | |
| katan kapasitas orang 50 50 50 dalam antisipasis a - 50 50 harmonic blaga 2 - 2 2 n Kampung Slaga n Kampung Slaga - - - 426.97 APBD rribusian beras RTS- RTS-PM 66,534 - - - - - 426.97 APBD ganan kasus bay/anak kasus 20 40 25 30 30 288.07 APBD | | Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana | kali | 2 | | 7 | 7 | 2 | | | |
| katan kapasitas lokasi 2 - 2 2 2 2 | | Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana | orang | 20 | | 20 | 20 | 20 | | | |
| tribusian beras RTS- RTS-PM 66,534 - - 426.97 APBD ganan kasus bay/anak kasus 20 40 25 30 30 288.07 APBD ar/ABH 30 30 288.07 APBD | | Peningkatan kapasitas Rintisan Kampung Siaga Bencana | lokasi | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | |
| ganan kasus bayi/anak kasus 20 40 25 30 30 288.07 APBD ar/ABH | Kegiatan 4: Penyelenggaraan Distribusi Raskin | Pendistribusian beras RTS-PM | RTS-PM | 66,534 | | | | | 426.97 | APBD | Dinas Sosial |
| ganan kasus bayi/anak kasus 20 40 25 30 30 288.07 APBD ar/ABH | PROGRAM 3: Pembinaan Anak Terlantar | | | | | | | | | | |
| refrants refrants/ABH | Kegiatan 1: Penanganan Penyelesaian Bayi/Anak | Penanganan kasus bayi/anak | kasus | 20 | 40 | 25 | 30 | 30 | 288.07 | APBD | Dinas Sosial |
| | Terlantar | terlantar/ABH | | | | | | | | | |

| | | | Tahun Dasar | | Targ | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi | Sumber | Instanci |
|--|---|---------|-------------|------|------|----------------|------|-------------------|---------|--------------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | egiatan | Satuan | 2017 | | | | | Tahunan (Rp. | Pendan- | Pelaksana |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Juta) | aan | |
| Kegiatan 1: Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma | Pelatihan kerja non Institusional sub kejuruan Tata Boga | orang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,980.25 | APBD | Dinas Sosial |
| | Pelatihan kerja non Institusional sub kejuruan bordir | orang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Pelatihan kerja non Institusional sub kejuruan teknisi HP | orang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Pendampingan usaha bagi penyandang cacat | orang | | 100 | 110 | 120 | 130 | | | |
| | Pelatihan kerja non Institusional sub kejuruan pranata cara boso iawa | orang | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Pelatihan sablon (PUPM Kec. Pakem) | orang | | 20 | | | | | | |
| | Bimtek Rajut (PUPM Desa Condongcatur Kec. Depok) | orang | | 20 | | | | | | |
| Kegiatan 2: Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma | Bantuan bagi penyandang cacat berat | orang | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,308.54 | APBD | Dinas Sosial |
| | Jejaring PPDI, FKKDA, HWDI | kali | | 25 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Pengadaan & penyerahan alat bantu bagi penyandang cacat | nnit | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | Verifikasi data penca | kali | ₽ | 1 | 1 | + | H | | | |
| | Operasional jamkesus | kali | + | | | | | | | |
| | Pembinaan disabilitas Kec. Minggir (PUPM) | kali | | 4 | | , | , | | | |
| | Pembinaan disabilitas Kec. Moyudan (PUPM) | kali | | 7 | | | | | | |
| PROGRAM 5: Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pelayanan Dasar bagi Anak Asuh Panti | Pembinaan panti | kali | 3 | 4 | 3 | က | 3 | 177.79 | APBD | Dinas Sosial |
| Sosial | Penyaluran sebagian kebutuhan dasar anak panti | LKSA | 38 | 34 | 38 | 38 | 38 | | | |
| PROGRAM 6: Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | raan Sosial | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku- Pelaku Itaha Kecejahteraan Secial Masyarakat | Pemilihan PSKS berprestasi | kali | П | П | ₽ | Н | Н | 3,058.67 | APBD | Dinas Sosial |
| | Jejaring karang taruna | kali | 19 | 40 | 19 | 19 | 19 | | | |
| | Jejaring IPSM&Panitia HKSN | kali | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jejaring Komda lansia | kali | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jejaring LK3 | kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jejaring LK3 | lembaga | e : | e : | en i | m | en i | | | |
| | Jejaring WKSBM | kali | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | | | |
| | Jejaring I KSK | Kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jejaring Komite PRS ABH | kasus | 12 | 77 - | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jejaring PPDI Kab.Sleman | kali | 12 | | 12 | 12 | 12 | | | |

| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Target | Target Tahunan | | Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|---|---|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | | 7107 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Iahunan (Kp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | Jejaring FKKADK Sleman | kali | 9 | | 12 | 12 | 12 | | | |
| ď | engelolaan tetenger | lokasi | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| 9. T | Bimtek sablon (PUPM Kec. Turi) | orang KT Bangunkerto | | 20 | | | | | | |
|)d d) | Pelatihan kerajinan fiber (PUPM Ker Sevegan) | orang KT Margokaton | , | 20 | , | , | | | | |
| PROGRAM 7: Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam I | Membangun Desa | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pembinaan Kelompok Masyarakat Pe | Penguatan kelembagaan TPK | desa | 98 | | | | | 37.25 | APBD | Dinas Sosial |
| | TPK award | kali | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan sekretariat | forum | 1 | | 1 | 1 | | 125.62 | APBD | Dinas Sosial |
| Vocietas 3: Descriptions (INPRD) | I NPKD dan Torum | 000 | | 20 | 20 | 20 | 90 | 1 230 05 | Odda | Iciaco acaio |
| (U-) | Penguatan kelembagaan IPN TPK award | | | 90 | 90 | 90 | 1 | 1,238.93 | APBU | Ulids Sosial |
| | Forum TPKD | bulan | | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| La | Laporan monev pronangkis | dokumen | | 1 | | | | | | |
| ď | Pembinaan TPKD Kec. Depok | TPK | | 1 | | | | | | |
| | | Maguwoharjo | | | | | | | | |
| r. Y. | Penguatan kelembagaan TPK Kec. Cangkringan (PUPM) | desa | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| NJADIKAN KOTA DAN PERMUK | AAN INKLUSIF, AMAN, T | ANGGUH, DA | IN BERKELANJU | AN | | | | | | |
| PROGRAM 1: PENGEMBANGAN PERLIMAHAN | NEIERSEDIAAN ROMAH LATAN HONI | IN TOTAL | | | | | | | | |
| Voristan 1. Donothana Vohilaban Ctratori dan Droggam Tumlah sumah lavak husi VV | Name of the state | /0 | 2017 | 3 00 | 75 00 | 9 | 30.00 | 74 650 | Odd v | a you loo |
| neglatan 1. Penerapan nebijakan sitategi dan Program Ju Perumahan Ki | Juman ruman layak num kk Miskin dibagi jumlah rumah KK miskin dikalikan 100 % | 8 | 7107 | 0.0 | 67.98 | n n | 33.55 | 74,650 | Arbu | 7 |
| Kegiatan 2 : Pembangunan sarana dan prsarana Rusunawa/Rusunami | | | | | | | | | | |
| Kepiatan 3: Pengelolaan Rusunawa/Rusunami | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 4: Penataan Kawasan Land Consoludation | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 5: Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan | | | | | | | | | | |
| Perumahan Masyarakat Kurang Mampu | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 6: Penyelenggaraan Stimulasi Pembangunan | | | | | | | | | | |
| akat Kurang Mampu | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | lumlah lembaga tangguh bencana | ıcana | | | | | | | | |
| orban | Sencana Alam | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penguatan Kelembagaan Masyarakat De | Desa tangguh bencana dan | desa dan | 34 destana dan | 37 destana dan | 45 destana dan | 53 destana dan | 61 destana dan | 4,095.00 | APBD | BPBD |
| | Sekolali siaga belicalia sekolali 40 SSD liimlah massarakat tarlatih nada dasrah rawan hencana | sekolari ada daerah ray | 40 SSD | 25.550 | 00.550 | 00 550 | 70 550 | | | |
| ned you do not need to be inited as | socono Alam | ממפומוומ | Adii Delicalia | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Stimulasi dan sosialisasi penggunana Gl | Gladi lapang | Orang | 6,860 | 630 | 630 | 630 | 630 | 3,044.00 | APBD | BPBD |
| | penanggulangan bencana | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2: Pengelolaan sarpras penanganan Pe | elatihan pengelolaan barak | Orang | 1,000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,577.00 | APBD | BPBD |
| | pengungal dan peraunan pengelolaan dapur umum | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3: Peningkatan kapsitas masyarakat dalam Pe pelaksanaan rehab rekon paska bencana | elatihan pertukangan | Orang | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,096.00 | APBD | врво |
| • | rosentase sistem peringatan dini (EWS) vang berfungsi baik | dini (EWS) va | ng berfungsi baik | | | | | | | |

| Proeram/ Kediatan/ Outout Kediatan | ziatan | Satuan | Tahun Dasar | | Target ⁻ | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|--|---|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-----------|
| 30 | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | Bencana Alam | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2: Pengelolaan Early Warning System | Jumlah system peringatan | System | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1,769.00 | APBD | врво |
| 99.8 | Omn (Evv.) Pelayapan sampah perumahan dan niaga | an dan niaga | | | | | | | | |
| ram Pengembangan Kineria Pengelo | aan Persampahan | 0 | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan | Pelayanan sampah | m3/hari | Terlaksananya | Terlaksananya | Terlaksananya | Terlaksananya | Terlaksananya | 41,147.70 | APBD | DLH |
| | perumahan dan Niaga 4 | | Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan | | | |
| | m3/hari, Penyapuan jalan | | Sampah | Sampah | Sampah | Sampah | Sampah | | | |
| | protokol 28 lokasi, | | Perumahan dan | Perumahan dan | Perumahan dan | Perumahan dan | Perumahan dan | | | |
| | Pemeliharaan transfer depo 4 lokasi | | Niaga 4 m3/hari | Niaga 4 m3/hari | Niaga 4 m3/hari | Niaga 4 m3/hari | Niaga 4 m3/hari | | | |
| INDIKATOR SDG's | Persentase luasan RTH | | | | | | | | | |
| g Terbuka Hija | 3 | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penataan ruang terbuka hijau | Pembangunan Taman dan | m2 | Pembangunan | Pembangunan | Pembangunan | Penataan RTH | Penataan RTH | 16,897.05 | APBD | DLH |
| | pentaan RTH | | Taman Batas | Taman | Taman Layak | seluas 18.000 | seluas 18.000 | | | |
| | | | Kota Prambanan | Terasering Beran | Anak Desa | m2 | m2 | | | |
| | | | | Kidul (laniutan) | Pondokrejo | ! | ! | | | |
| | | | | seluas 1.450 m2 | seluas 500 m2 | | | | | |
| | | | Pembangunan | Pembangunan | Pembangunan | | | | | |
| | | | Taman Batas | Taman | Taman Layak | | | | | |
| | | | Kota Prambanan | Terasering Beran | Anak Desa | | | | | |
| | | | | Kidul (lanjutan) | Pondokrejo | | | | | |
| | | | | seluas 1.450 m2 | seluas 500 m2 | | | | | |
| | | | Pembangunan | Pembangunan | Pembangunan | | | | | |
| | | | Taman | | Taman Layak | | | | | |
| | | | Terasering Beran | | Anak Lap. Raden | | | | | |
| | | | Kidul | 450 m2 | Ronggo Kalasan seluas 2.182 m2 | | | | | |
| | | | Pembangunan | Pembangunan | Pembangunan | | | | | |
| | | | Taman depan | Taman Kencana | Taman Layak | | | | | |
| | | | SDN Gamping | Desa Kalitirto | Anak Desa | | | | | |
| | | | | seluas 250 m2 | Sidokarto seluas | | | | | |
| | | | | | 300 m2 | | | | | |
| | | | Pembangunan | | Pembangunan Taman lauak | | | | | |
| | | | Kantor Imigraei | | Anak Desa | | | | | |
| | | | Named IIIIgrasi | | Sidolubur 450 | | | | | |
| | | | | | m2 | | | | | |
| | | | Pembangunan | | Pembangunan | | | | | |
| | | | Taman Seturan | | Taman Layak | | | | | |
| | | | | | Anak Desa | | | | | |
| | | | | | Tegaltirto | | | | | |
| | | | | | Berbah 1.000 m2 | | | | | |
| | | | Pembangunan Taman Mangar | | Penataan Taman | | | | | |
| | | | iailiaili Ngalicai | | m2 | | | | | |

| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Target | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|--|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-------------------|-----------|
| | • | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | | | Danataan | | Damhananan | | | | | |
| | | | lingkungan | | Taman | | | | | |
| | | | kantor | | Terasering Beran | | | | | |
| | | | Kecamatan | | Kidul (lanjutan 2) | | | | | |
| | | | Kalasan | | seluas 1.450 m 2 | | | | | |
| | | | Penyempurnaan | | Penataan RTH | | | | | |
| | | | Lapangan Pemda | | Lingkungan | | | | | |
| | | | | | Kecamatan | | | | | |
| | | | Downard | | Departer Fm | | | | | |
| | | | Taman Dasar | | hing Katingan | | | | | |
| | | | Neiion | | 22.150 m2 | | | | | |
| | | | Pembangunan | | Pembangunan | | | | | |
| | | | Taman Pasar | | Taman Colombo | | | | | |
| | | | Ngijon | | 130 m2 | | | | | |
| | | | | | Pembangunan | | | | | |
| | | | | | Taman Beran - Ngancar 265 m2 | | | | | |
| TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN | N KONSUMSI YANG BERKEI | ANJUTAN | | | | | | | | |
| TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNT | UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA | AHAN IKLIM | DAN DAMPAKNY | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | lumlah lembaga tangguh bencana | ncana | | | | | | | | |
| Drogram Depressable Dini den Departmentalismen Korhen | | 3 | | | | | | | | |
| riogianii renceganali Dilli dali renanggulangan Nol. | | deser des | | | AT ALLEST HER | | 1 | 00 100 4 | | |
| negiatan I.: Penguatan Nelembagaan Masyarakat dalam Perungangan Risiko Bencana | besa tanggun bentana dan sekolah siaga bencana | sekolah | 46 ssb | 57 destand dan 52 ssb | 60 ssb | 68 ssb | 76 ssb | 4,033.00 | | DrbD |
| INDIKATOR SDG's | Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana | oada daerah ra | wan bencana | | | | | | | |
| Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | oan Bencana Alam | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Stimulasi dan sosialisasi penggunana | Gladi lapang | Orang | 6,860 | 630 | 630 | 630 | 630 | 3,044.00 | APBD | врво |
| sarpras pengurangan risiko bencana | penanggulangan bencana | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2: Pengelolaan sarpras penanganan | Pelatihan pengelolaan barak | Orang | 1,000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,577.00 | APBD | врво |
| pengungsi | pengungsi dan pelatihan pengelolaan dapur umum | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3: Peningkatan kapsitas masyarakat dalam pelaksanaan rehab rekon paska bencana | Pelatihan pertukangan | Orang | 58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,096.00 | APBD | BPBD |
| INDIKATOR SDG's | inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 | ca (GRK), serta | monitoring, pelapora | n dan verifikasi E | misi GRK yang dila | porkan dalam dok | umen Biennial Up | date Report (BUR) | ke-3 | |
| PROGRAM 1: Perlindungan dan Konservasi SDA | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | Pemantauan usaha/kegiatan usaha/ | usaha/ | Pemantauan | Pemantauan | Pemantauan | Pemantauan | Pemantauan | 800.05 | APBD | DLH |
| | pengguna bahan perusak | kegiatan | usaha/kegiatan | usaha/kegiatan | usaha/kegiatan | | usaha/kegiatan | | | |
| | ozon terhadap 25 usaha/ | | pengguna bahan | pengguna bahan | pengguna bahan | | pengguna bahan | | | |
| | kegiatan, Inventarisasi gas | | perusak ozon | perusak ozon | perusak ozon | perusak ozon | perusak ozon | | | |
| | naan usaba/kagiatan nang- | | pada 23 usaha/kagiatan | paua 23 usaha/kagiatan | pada 23 usaha/kagiatan | pada 23 IIsaha /kagiatan | pada 23 usaha/kagiatan | | | |
| | guna bahan perusak ozon: | kali | Pembinaan | Rembinaan | Pembinaan | Pembinaan | Pembinaan | | | |
| | Pembinaan Kampung Iklim | | usaha/kegiatan | usaha/kegiatan | usaha/kegiatan | usaha/kegiatan | usaha/kegiatan | | | |
| | Lomba Kampung Iklim., | | pengguna bahan | pengguna bahan | pengguna bahan | | pengguna bahan | | | |
| | Penghijauan lingkungan | | perusak ozon | perusak ozon | perusak ozon | | perusak ozon | | | |
| | | | selama 1 kali | selama 1 kali | selama 1 kali | selama 1 kali | selama 1 kali | | | |

| ber Instansi Ian- | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|---------------|--|-----------|-------------|------------|--------------|--------|
| Indikatif Alokasi Sumber Anggaran 5 Pendan- | | | | | | | | | | |
| | 2021 | Pembinaan | Kampung Iklim 2 kali | Lomba Kampung | Iklim dengan 3 | prestator | Penghijauan | lingkungan | dengan 2.000 | batang |
| Target Tahunan | 2020 | Pembinaan | ƙampung Iklim 2 Kampung Iklim 2 Kampung Iklim 2 Kampung Iklim 2 Kampung Iklim 2 kali kali kali kali | Lomba Kampung | klim dengan 3 Iklim dengan 3 Iklim dengan 3 Iklim dengan 3 | prestator | Penghijauan | lingkungan | dengan 2.000 | batang |
| Target | 2019 | Pembinaan | Kampung Iklim 2 kali | Lomba Kampung | Iklim dengan 3 | prestator | Penghijauan | lingkungan | dengan 2.000 | batang |
| | 2018 | Pembinaan | Kampung Iklim 2 kali | Lomba Kampung | Iklim dengan 3 | prestator | Penghijauan | lingkungan | dengan 2.000 | batang |
| Tahun Dasar | 701/ | Pembinaan | Kampung Iklim 2 kali | Lomba Kampung | Iklim dengan 3 | prestator | Penghijauan | lingkungan | dengan 2.000 | batang |
| Satuan | | kali | | prestator | | | batang | | | |
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | | | | | | | | | | |

TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TUJUAN 15. MELINDUNGI, MERESTORASI, DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN,

| MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MEN | 1 TENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI | AN KEANEKA | RAGAMAN HAYA | = |) | | | | | |
|--|--|----------------|---|---|--|---|---|-----------|------|-----|
| INDIKATOR SDG's | Cakupan RTH yang terpelihara | ara | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau | Pemeliharaan taman dan lahan terbuka hijau dan Pemeliharaan tanaman perindang jalan | lokasi | Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau sebanyak 70 lokasi | Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau sebanyak 70 lokasi | | Terpeliharanya Terpeliharanya taman dan lahan taman dan lahan terbuka hijau terbuka hijau sebanyak 70 sebanyak 70 lokasi lokasi | Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau sebanyak 70 lokasi | 22,752.53 | APBD | ргн |
| | | m2 | Pembangunan Taman Jl. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2 | Pembangunan Taman JI. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2 | Pembangunan Taman JI. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2 | Pembangunan Taman JI. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2 | Pembangunan Taman JI. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2 | | | |
| | | m 2 | Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m2 | Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m2 | Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m 2 | Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m2 | Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m2 | | | |
| | | m 2 | Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul seluas 4.187 m2 | | | Pembangunan Pembangunan Tanan Tanan Terasering Beran Terasering Beran Kidul seluas Kidul seluas 4.187 m.2 4.187 m.2 | | | | |
| | | в д 5 | Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2 | Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2 | Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2 | Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2 | Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2 | | | |
| | | 7 | rembangunan Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2 | rembangunan Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2 | rennbangunan Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2 | renibarigunari Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2 | Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2 | | | |
| | | m ₂ | Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2 | Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2 | Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2 | Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2 | Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2 | | | |

| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | giatan | Satuan | Tahun Dasar | | Target | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|--|--|------------------|---------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------|-----------|
| | | | 7107 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | l anunan (kp. Juta) | aan | Pelaksana |
| | | m2 | Pembangunan | Pembangunan | Pembangunan | Pembangunan | Pembangunan | | | |
| | | | seluas 178 m2 | seluas 178 m2 | seluas 178 m2 | seluas 178 m2 | seluas 178 m2 | | | |
| | | m2 | Penataan | Penataan | Penataan | Penataan | Penataan | | | |
| | | | lingkungan kantor | lingkungan kantor | lingkungan kantor | lingkungan kantor | lingkungan kantor | | | |
| | | | Kecamatan | Kecamatan | Kecamatan | Kecamatan | Kecamatan | | | |
| | | | Kalasan seluas 500 m2 | Kalasan seluas 500 m2 | Kalasan seluas 500 m2 | Kalasan seluas 500 m2 | Kalasan seluas 500 m2 | | | |
| | | m2 | Penyempurnaan | | Penyempurnaan | Penyempurnaan | Penyempurnaan | | | |
| | | | Lapangan Pemda seluas 500 m2 | | | | Lapangan Pemda seluas 500 m2 | | | |
| | | m2 | Pembangunan | Pembangunan Taman Basar | Pembangunan Taman Basar | Pembangunan Taman Basar | Pembangunan Taman Basar | | | |
| | | | Ngijon seluas 28 m2 | Ngijon seluas 28 m2 | Ngijon seluas 28 m2 | Ngijon seluas 28 m2 | Ngijon seluas 28 m2 | | | |
| INDIKATOR SDG's | pengurangan luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas | itis melalui reh | abilitasi di dalam K | esatuan Pemangku | an Hutan (KPH) d | an Daerah Aliran Su | ngai (DAS) Priorita | S | | |
| PROGRAM 1: Perlindungan dan Konservasi SDA | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Konservasi SDA dan Pengendalian | Meningkatnya kualitas dan | batang | Bibit tanaman | Bibit tanaman | Bibit tanaman | Bibit tanaman | _ | 3,825.97 | APBD | DLH |
| kerusakan Sumber-sumber Air | kuantitas SDA (Bibit tanaman | | pemeliharaan | pemeliharaan | pemeliharaan | pemeliharaan | pemeliharaan | | | |
| | tanaman nemeliharaan | | 2.000 hatang | 2.000 hatang | 4.000 hatang | 2.000 hatang | 2 000 hatang | | | |
| | hutan rakyat) | | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | | | |
| TUJUAN 16. MENGUATKAN MASY YG INKLUSIF & DAMAI UTK PEMB. BERKELANJUTAN. MENYEDJAKAN AKSES KEADILAN UTK SEMUA & MEMBANGUN KELEMBAGAAN YG EFEKTIF. AKUNTABEL & | F & DAMAI UTK PEMB. BEF | KELANJUTA | N. MENYEDIAKA | N AKSES KEADIL | AN UTK SEMUA | & MEMBANGUI | N KELEMBAGAAI | N YG EFEKTIF. A | KUNTABE | 8 |
| INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak, Jumlah kekerasan terhadap Anak | kekerasan ter | hadap perempuan c | dan Anak, Jumlah k | ekerasan terhada | p Anak | | | | |
| 1. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak Keristan : Denvelongsanan Direst Belandan Terandi. Benvelongsanak kerist | maan Gender dan Anak | אטא אכא | 17 Hour | | 2000 | 20000 | ac ache | 000 000 200 0 | V DDD | 200 |
| Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | UPT P2TP2A | yan, | Tues, it need | pengaduan 12 bln | pengaduan 12 bln | pengaduan 12 bln | pengaduan 12 bln | | 3 | P3AP2KB |
| | sosialisasi lewat media | kali | 1 | Layanan | Layanan | Layanan | Layanan | | | |
| | | | | kesehatan dan nsikologi 12 bln | kesehatan dan nsikologi 12 hln | kesehatan dan nsikologi 12 hln | kesehatan dan nsikologi 12 hln | | | |
| | Temu FPK2PA kecamatan | kali | 17 | Layanan Bantuan | | | Layanan Bantuan | | | |
| | | | | Hukum 12 bln | Hukum 12 bln | Hukum 12 bln | Hukum 12 bln | | | |
| | Temu FPK2PA dan temu gugus tugas traficking | kec/kab | 17kec, 1 kab | Layanan Reintegrasi sosial 12 bln | Layanan Reintegrasi sosial 12 bln | Layanan Reintegrasi sosial 12 bln | Layanan Reintegrasi sosial 12 bln | | | |
| | home visit | kali | 30 | surveilance ISO 9001: 2015, 1kali | surveilance ISO 9001 : 2015, 1kali | surveilance ISO 9001 : 2015, 1kali | surveilance ISO 9001 : 2015, 1kali | | | |
| | pemulangan korban | kali | 10 | | | | | | | |
| | case conferrence | orang | 750 | | | | | | | |
| | surveilance ISO 9001: 2015 | UPT | | | | | | | | |
| 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | gan Perempuan | | | | | | | | | |

| Drogram / Voistan / Outhuit Konistan | *************************************** | Cotto | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber | Instansi |
|---|--|------------------------|---------------|----------|----------|----------------|---------|---------------------------------|--------|----------------------|
| בוספומווי אפנימיוי (מילימי אי | cgiara: | 38178 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| Kegiatan 1: Pencatatan dan Pelaporan KDRT | Pembekalan Teknis orang pencatatan dan pelaporan, validasi data KDRT | orang | 115 | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 299,860,500 | APBD | Dinas P3AP2KB |
| | Pelatihan aplikasi pencatatan dan pelaporan | orang | 25 | | | | | | | |
| | Validasi Data KDRT | orang | 25 | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | | | |
| Kegiatan 2: Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | Psikoedukasi | orang | 55x6 | 15 kali | 15 kali | 15 kali | 15 kali | 489,114,000 | APBD | Dinas P3AP2KB |
| | Pelatihan komunikasi efektif | orang | 25 | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | Pembekalan teknis pendamping korban kekerasan | orang | 110 | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | Pelatihan Paralegal | | 45 | | | | | | | |
| Kegiatan 3: Pelatihan Pendampingan korban KDRT | Pelatihan Konseling untuk Kader PKDRT Kecamatan | kali | | 1 | 1 | Т | 1 | 320.12 | APBD | Dinas P3AP2KB |
| | Pelatihan assesment korban kekerasan Unit PPA Polres dan Polsek | kali | | 1 | 1 | T-1 | 1 | | | |
| | Pelatihan paralegal untuk kader PKDRT Desa | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Pelatihan konseling untuk kader PKDRT Desa | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Pelatihan assesment korban kekerasan untuk kader pknrt | kali | | 1 | П | 1 | т | | | |
| INDIKATOR SDG's | Jumlah pelayanan bantuan hukum | mnyr | | | | | | | | |
| PROGRAM: PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM | AN HUKUM | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pelayanan Bantuan Hukum | Penanganan permasalahan hukum non ligitasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa | jenis bantuan hukum | | 20 | 20 | 20 | 20 | 530.2 | APBD | Bagian Hukum |
| Kegiatan 2 : Penyelesaian sengketa perdata/Tata Usaha Negara | kasus sengketa perdata, TUN, sengketa informasi yang ditangani | perkara | | 7 | 7 | 7 | 7 | 2499.845 | APBD | Bagian Hukum |
| INDIKATOR SDG's | Predikat Lakip Kabupaten | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGU | NGUNAN DAERAH | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Daerah | LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman | dokumen | П | + | + | 1 | П | 1003.00 | APBD | Bagian Organisasi |
| | Perjanjian Kinerja Pemkab Sleman | dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Pembinaan penyusunan LKjiP PD Perangkat Daerah | PD | | 48 | 48 | 48 | 48 | | | |
| | Pembinaan penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah | DO | | 48 | 48 | 48 | 48 | | | |
| | Pembinaan Entry Data e- SAKIP Perangkat Daerah | PD | | 48 | 48 | 48 | 48 | | | |
| INDIKATOR SDG's | penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan | terhadap bela | nja pengadaan | | | | | | | |

| State Stat | Program/ Kegiatan/ Outout Kegiatan | egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|--|---|--|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| 300.000 300.000 11448.51 1.000 1.000 11448.51 1 1 1 1 681.04 1 1 1 1 1 1558.70 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 400 17.000 19.000 21.000 1.831,897 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 | | ì | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — Tahunan (Rp. Juta) | aan | Pelaksana |
| 300.000 300.000 11448.51 1. | PROGRAM 1: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PU | UBLIK | | | | | | | | | |
| 1.000 1 1 1 1 1 681.04 1 1 1 1 1 1558.70 2 2 2 2 1 1 1 1 1 15.000 15.000 15.000 21.000 1.831,897 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 | Kegiatan 1: Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa melalui bagian layanan pengadaan | pelaksanaan pemilihan penyedia barang/iasa | paket | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 11448.51 | APBD | BLP |
| 1 1 1 1 1 681.04 1 1 1 1 1 1 1 1558.70 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 15.000 15.000 1.831,897 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 | | draft raperbup pengadaan | draft | | 1.000 | | | | | | |
| 1 1 1 1 681.04 1 1 1 1 1 1 1558.70 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 15.00 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 | INDIKATOR SDG's | Indeks Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | |
| 1 1 1 1 681.04 1 1 1 1 1 1558.70 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1558.70 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 | PROGRAM 1: PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN IN | INTERNAL DAN PENGENDALIAN | PELAKSANAA | N KEBIJAKAN KDH | | | | | | | |
| The state of the s | Kegiatan 1: Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi | si dokumen laporan | dokumen | 1 | П | П | П | П | 681.04 | APBD | Bagian |
| International dokumen 1 2 2 | | birokrasi | | | | | | | | | Organisasi |
| sing and dan pernantauan senant cformasi sanaan reformasi sanaan reformasi sanaan reformasi sanaan reformasi sasanan uU Pelayanan Publik 1 1 1 1558.70 sak kualitas pelayanan sana uu belaksanaan uu belayan nonitoring dan buku sanaan role model kali anaan role model kali sanaan publik sanaan publik sanaan publik hakte lahir bagi Gakin anaan publik hakte lahir bagi Gakin sanaan publik | | dokumen laporan | dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| rication of the partition of sal kualities pelayanan UV Pelayanan Dublik 1 1 1 1558.70 asi kualitas pelayanan Sal kualitas pelayanan dasi kualitas pelayanan Dublik 2 2 2 2 anan publik 2 2 2 2 2 2 anan publik 300 1 | | pembinaan dan pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi | | | | | | | | | |
| Standing dam | INDIKATOR SDG's | Persentase kepatuhan pelaks | anaan UU Pel. | ayanan Publik | | | | | | | |
| Lisporan monitoring dan buku 1 1 1 1558.70 Lusikualitas pelayanan likaran role model kali 2 | PROGRAM 1: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN P. | PUBLIK | | | | | | | | | |
| binaan role model kali 2 2 2 2 binaan role model 4xanan publik 1 1 1 1 Japonan publik vapalan SPM Perikab kali 1 1 1 1 Janana publik vapan publik vanan publik vanan publik shanan kate lahir bagi Gakin 15.000 17.000 17.000 15.000 1.406,182 Japan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia O-18 tahun) (Jumlah usia anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak) 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 | | buku laporan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik | buku | | 1 | 1 | T | 1 | 1558.70 | APBD | Bagian Organisasi |
| Lighoran pererapan dan dokumen 1 1 1 1 Japolan penerapan dan dokumen 4ali 1 1 1 Japalan pendik Ayanak (Lisia Dokumen 12.000 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 Kelehliran Bagi Gakin Dokumen 150 400 300 150 1.406,182 Iyana Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia O-18 tahun) (Jumlah usia anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak) 12.000 15.000 17.000 21.000 1.831,897 | | Pembinaan role model pelayanan publik | kali | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| binaan inovasi kali 1 1 1 yanan publik lah akte lahir bagi Gakin 12.000 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 Kelahiran Bagi Gakin Dokumen 150 400 300 150 100 1.406,182 Ipan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia O-18 tahun) (Jumlah usia anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak) Kelahiran 12.000 15.000 17.000 21.000 21.000 1.831,897 | | buku laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemkab Sleman | dokumen | | 1 | 11 | П | T | | | |
| Is Relahiran Bagi Gakin Dokumen 12.000 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 Is Relahiran Bagi Gakin Dokumen 150 400 300 150 100 1.406,182 Is pan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia D-18 tahun) (Jumlah usia anak Yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak) 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 | | pembinaan inovasi pelayanan publik | kali | | 1 | п | ਜ | ₽ | | | |
| Kelahiran Bagi Gakin Dokumen 15.000 15.000 19.000 21.000 1.831,897 Ikelahiran Bagi Gakin Dokumen 150 400 300 150 100 1.406,182 Inpan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia O-18 tahun) (Jumlah usia anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak) 15.000 15.000 15.000 1831,897 | INDIKATOR SDG's | Jumlah akte lahir bagi Gakin | | | | | | | | | |
| Kelahiran Bagi Gakin Dokumen 12.000 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 I Kelahiran Bagi Gakin Dokumen 150 400 300 150 100 1.406,182 I Pan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia O-18 tahun) (Jumlah usia anak Yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak) 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 | PROGRAM 1: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDU, | JKAN | | | | | | | | | |
| I Kelahiran Bagi Gakin Dokumen 150 100 1.406,182 I Jana Kelahiran Bagi Anak (Usia O-18 tahun) (Jumlah usia anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak) I Kelahiran Dokumen 12.000 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 | Kegiatan 1: Pelayanan Publik Bidang Catatan Sipil | Akta Kelahiran | Dokumen | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 1.831,897 | APBD, DAK | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan sipil |
| upan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia 0-18 tahun) (Jumlah usia anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak) Kelahiran Dokumen 12.000 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 | Kegiatan 2: Pelayanan Akta Pencatatan Sipil bagi Keluarga Miskin | Akta Kelahiran Bagi Gakin | Dokumen | 150 | 400 | 300 | 150 | 100 | 1.406,182 | APBD | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan sipil |
| Kelahiran Dokumen 12.000 15.000 17.000 19.000 21.000 1.831,897 | INDIKATOR SDG'S | Cakupan Kepemilikan Akta K | elahiran bagi / | Anak (Usia 0-18 tahu | ın) (Jumlah usia a | nak yang memilik | i Akta Kelahiran dil | oagi jumlah usia ar | nak) | | |
| Akta Relaniran Dokumen 12.000 15.000 15.000 1.831,897 | PROGRAM I: PENALAAN ADMINISIRASI REPENDUDU | JRAIN | - | | | 1 | 000 | 000 | 100 | | i |
| | Kegiaran 1: Pelayanan Publik bidang Latatan sipli | Akta Kelaniran | Dokumen | 17:000 | 15.000 | 17.000 | 19,000 | 71.000 | 1.831,897 | APBD, DAK | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan sipil |

| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | egiatan | Satuan | Tahun Dasar | | Targe | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi Anggaran 5 | Sumber Pendan- | Instansi |
|--|---|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | | 707 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | — I anunan (kp. Juta) | aan | Pelaksana |
| Kegiatan 2: Pelayanan Akta Pencatatan Sipil bagi Keluarga Miskin | Akta Kelahiran Bagi Gakin | Dokumen | 150 | 400 | 300 | 150 | 100 | 1.406,182 | APBD | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan |
| INDIKATOR SDG's | Cakupan penerbitan Akta Kelahiran (iumlah penduduk vang lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di tahun bersangkutan dibagi iumlah kelahiran di tahun bersangkutan di bagi sangkutan di sahun bersangkutan | lahiran (iumlah | penduduk vang la | hir dan mempero | eh Akta Kelahiran | di tahun bersang | kutan dibagi jumla | h kelahiran di tahun | bersangkut | an) |
| PROGRAM 1: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | JKAN | , | | | | | | | , | |
| Kegiatan 1: Pelayanan Publik Bidang Catatan Sipil | Akta Kelahiran | Dokumen | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 1.831,897 | APBD, DAK | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan sipil |
| Kegiatan 2: Pelayanan Akta Pencatatan Sipil bagi Keluarga Miskin | Akta Kelahiran Bagi Gakin | Dokumen | 150 | 400 | 300 | 150 | 100 | 1.406,182 | APBD | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan sipil |
| INDIKATOR SDG's | Jumlah pelayanan pengaduan masyarakat/ pengaduan pelanggaran HAM | n masyarakat/ | pengaduan pelang | garan HAM | | | | | | |
| PROGRAM 1: PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM | UAN HUKUM | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) | RANHAM | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 153.05 | APBD | Bagian Hukum |
| INDIKATOR SDG's | Jumlah proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dat/ atau non ligitasi | sengketa inforr | nasi publik melalui | mediasi dat/atau | non ligitasi | | | | | |
| PROGRAM 1: PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM | UAN HUKUM | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pelayanan Bantuan Hukum | Penanganan permasalahan hukum non ligitasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa | jenis bantuan hukum | | 20 | 20 | 20 | 20 | 530.2 | APBD | Bagian Hukum |
| TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NAAN DAN MEREVITALISA | \SI KEMITRA | IN GLOBAL UNT | UK PEMBANGU | NAN BERKELAN | JUTAN | | | | |
| INDIKATOR SDG's | Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga | n pihak ketiga | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: KERJASAMA PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak ketiga | laporan hasil koordinasi dengan pihak ketiga (lembaga pemerintah/ badan | dokumen | | 1 | 1 | 1 | П | 275.00 | APBD | Bagian Pemerintah an |

| TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NDIKATOR SDG's Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga | ROGRAM 1: KERJASAMA PEMBANGUNAN | (egiatan 1 : Kerjasama dengan pemerintah pusat dan laporan hasil koordinasi dokumen | ihak ketiga dengan pihak ketiga | (lembaga pemerintah/ badan | hukum/swasta) | draft kerjasama dengan | pihak ketiga | dokumen kerjasama dengan dokumen | pihak ketiga | dokumen hasil evaluasi | kerjasama dengan pihak |
|--|---|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 'ALISASI KEMITRAAN GLC | dengan pihak ketiga | | si dokumen | | badan | | n dokumen | | engan dokumen | | i dokumen | ¥ |
| JBAL UNTUK PEMBA | | | П | | | | 25 | | 20 | | 1 | |
| NGUNAN BERKEI | | | 1 | | | | 25 | | 20 | | 1 | |
| LANJUTAN | | | 1 | | | | 25 | | 20 | | 1 | |
| | | | 1 | | | | 25 | | 20 | | 1 | |
| | | | 275.00 | | | | | | | | | |
| | | | APBD | | | | | | | | | |
| | | | Bag | Per | au | | | | | | | |

Matrik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Yogyakarta

TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN Kode

| indilate. | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| " of orline | TO T | Indicator TPB Kota Yogyakarta | Sumber Data | Satisa | 3 | | | | | | |
| malkator | | marca in process of the second | | | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pelaksana |
| arget 1.2. I | Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional | perempuan dan anak-anak dari sen | nua usia, yang hic | lup dalam ke | emiskinan di | semua dir | nensi, ses | uai dengar | definisi na | isional. | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan | Angka kemiskinan | RPJMD Kota | % | 7.70 | 7.58 | 7.35 | 7.34 | 7.29 | 7.10 | Dinas Sosial |
| | nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | | Yogyakarta 2017-2022 | | | | | | | | |
| arget 1.3.1 | Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | ng tepat bagi semua, termasuk kelo | ompok yang palin | g miskin, da | n pada tahu | n 2030 me | ncapai cal | cupan subs | tansial bag | i kelompok | : miskin dan rentan. |
| 1.3.1 | Proporsi penduduk yang menerimaProgram perlindungan sosial, | Persentase PMKS yang | RPJMD Kota | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | Dinas Sosial |
| | menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuh- | memperoleh perlindungan dan | Yogyakarta | | | | | | | | |
| | an khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ jaminan sosial melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. | / jaminan sosial | 2017-2022 | | | | | | | | |
| arget 1.4. I | Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan | .hususnya masyarakat miskin dan re | entan, memiliki h | ak yang sam | a terhadap s | sumber da | ya ekonon | ni, serta ak | ses terhad | ap pelayana | an dasar, kepemilikan dan |
| ontrol atas | kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. | nologi baru, dan jasa keuangan yang | g tepat, termasuk | keuangan n | nikro. | | | | | | |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang | Persentase Ibu Bersalin | RPJMD Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| | proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Mendapatkan Pelayanan | Yogyakarta | | | | | | | | |
| | | Persalinan sesuai Standar | 2017-2022 | | | | | | | | |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada | CPR (Contraceptive Prevalence | RPJMD Kota | % | 73.66 | 73.72 | 73.77 | 73.83 | 73.94 | 74 | Dinas Pengendalian |
| | Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Rate) | Yogyakarta 2017-2022 | | | | | | | | Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 171(4) | Darcantaca una de pagas yang mamiliki aksas tarbadan darang mananan | Dercentage Kualitas Air Minum | PD IMD Kots | % | 85.7 | 7 28 | 25.6 | 87.0 | 98 | 2 98 | Dinas Kasahatan |
| (a) | resenteder inning tengga yang merimikanses tenadap uyanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | yang memenuhi Syarat Kesehatan | Yogyakarta 2017-2022 | ₹ | 4. | t o | 2 | | 3 | 4. | אבים ומים |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat | Angka Partisipasi Murni (APM) | RPJMD Kota | % | 128.98 | 129 | 129.02 | 129.04 | 129.06 | 129.06 | Dinas Pendidikan |
| | | SD/MI/sederajat | Yogyakarta 2017-2022 | | | | | | | | |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat | Angka Partisipasi Murni (APM) | RPJMD Kota | % | 141.11 | 141.17 | 141.22 | 141.31 | 141.39 | 141.5 | Dinas Pendidikan |
| | | SMP/MTs/sederajat | Yogyakarta 2017-2022 | | | | | | | | |
| rget 1.5. l gkungan, | Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana | reka yang berada dalam kondisi ren | tan, dan mengur | angi kerenta | ınan mereka | ı terhadap | kejadian e | ekstrim terl | cait iklim d | an guncang | an ekonomi, sosial, |
| 1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat | Persentase kampung tangguh | RPJMD Kota | % | 40 | 44 | 49 | 53 | 28 | 62 | BPBD |
| | pendidikan layanan khusus | bencana | Yogyakarta | | | | | | | | |

| ٠ | | | |
|---|---|---|--|
| : | | | |
| (| | ١ | |
| 4 | | | |
| | | | |
| | | | |
| i | | | |
| • | • | | |
| - | | | |
| • | | | |
| : | | | |
| : | | | |
| : | | | |
| : | | | |

| Kode | Kode | Indikator SDG's Kota | | | Tahun | | Target | Target Pencapaian | | Penanganngiawah |
|----------------------------|--|---|---|---------------------------|----------------|------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Indikator | Indikator | Yogyakarta | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 2 | 2020 2021 | 21 2022 | ı |
| Target 2.1 Pada ta | ahun 2030, menghilangkan kelaparan da | n menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup | iskin dan mereka yang be | erada dalam k | ondisi rentar | , terması | k bayi, terh | adap makar | nan yang a | man, bergizi, dan cukup |
| 2.1.1(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita | Prevalensi Balita gizi buruk dan kurang | RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 | % | 8.81 | 8.61 | 8.41 8.21 | 1 8.01 | 7.82 | Dinas Kesehatan |
| Target 2.2. | Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan | , termasuk pada tahun 2025 mencapai | target yang disepakati se | cara internasio | onal untuk a | nak pende | k dan kurus | di bawah u | usia 5 tahu | n, dan memenuhi kebutuhan |
| gizi remaja | gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.1* | di hausah Dewasi atuating | Troycopy CHON OWING | 8 | 5 | 0 27 | 1, 5, | 1,2,2 | ; | Discrete Vocabatas |
| 7.7.7 | rrevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawan lima tahun/balita | | 2017-2022 | 8 | CT | 17.0 | | | | Dilids Nesellatali |
| 2.2.2(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan | Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 | | 85.00 | 85.20 | 85.40 85 | 85.60 85.80 | 80 86.00 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| TUJUAN 3 | TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA | | | | | | | | | |
| Kode | Indikator | Indikator SDG's Kota Yogyakarta | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | 2018 | Target P 2019 20 | Target Pencapaian 19 2020 2021 | 21 2022 | Penanggungjawab 2 Pelaksana |
| Target 2.1 | Tarant 2 1 Bada tahun 2020 manunanani rasin anara kamata bamatan ihu hinama burana dari 20 nan 100 000 balahiran hidun | Arrian dari 70 nor 100 000 kelahiran hid | 91 | | | | | | | |
| 3.1.1* | rada tanun 2004, mengurang rasoo angka kemadan bu migga r Angka Kematian Ibu (AKI). | urang dan 70 per 100.000 keraniran ing Jumlah kematian ibu | RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 | Orang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Dinas Kesehatan |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang | Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan | В | % | 100 1 | 100 1 | 100 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| | proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | Pelayanan Persalinan sesuai Standar | Yogyakarta 2017-2022 | | | | | | | |
| Target 3.2 Kematian B | Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. | ı yang dapat dicegah, dengan seluruh ne | egara berusaha menurun | kan Angka Ker | natian Neon | atal setid | aknya hingg | 12 per 1.C |)00 KH (Kel | ahiran Hidup) dan Angka |
| 3.2.2(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Angka kematian bayi | | r 1.000 Iahiran Jup | 7.52 7 | 7.39 7 | 7.26 7.13 | 2 | 6.88 | Dinas Kesehatan |
| 3.2.2(b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 | % | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| Target 3.3 | Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | a, dan penyakit tropis yang terabaikan, | dan memerangi hepatitis | , penyakit ber | sumber air, s | serta peny | akit menula | r lainnya. | | |
| 3.3.1(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Persentase orang berisko terinfeksi HIV AIDS (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/ trans-gender,pengguna napaza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs | V RPJMD Kota Yogyakarta Ian 2017-2022 n) | % | 100 1 | 100 | 100 100 | 100 | | Dinas Kesehatan |
| 3.3.2 | Kejadian TB per 1000 orang | Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 | % | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| Target 3.4 | Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | dini akibat penyakit tidak menular, mela | ılui pencegahan dan pen | gobatan, serta | meningkatk | can keseh | tan mental | dan keseja. | hteraan. | |
| 3.4.1 | Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis | Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | RPJMD Kota suai Yogyakarta 2017-2022 | * | 1000 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 3.4.1(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Persentase penderita hipertensi mendapat- kan pelayanan kesehatan sesuai standar | RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 | % | 100 1 | 100 1 | 100 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 3.4.2(a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. | Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart | RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 | % | 100 1 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | 1 | | | | | | | |

| Kode | 1000 | | | Tahun | | Targ | et Pencap | aian | | Penanggungjawab |
|------------|--|--|-----------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Indikator | Indikator | Indikator SDG s Rota Togyakarta Sumber Data Satuan | Sumber Data Satus | n Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dasar 2018 2019 2020 2021 2022 Pelaksana |
| Target 3.7 | arget 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan Program | kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk l | keluarga berencana, informa | i dan pendidik | an, dan int | egrasi kes | ehatan rep | roduksi ke | e dalam st | ategi danProgram |
| nasional. | | | | | | | | | | |
| 3.7.1(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) CPR (Contraceptive Prevalence Rate) | CPR (Contraceptive Prevalence Rate) | RPJMD Kota % | 73.66 | 73.72 | 73.77 | 73.83 | 73.94 | 74 | 73.66 73.72 73.77 73.83 73.94 74 Dinas Pengendalian |
| | semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 | | Yogyakarta | | | | | | | Penduduk dan Keluarga |
| | tahun yang berstatus kawin. | | 2017-2022 | | | | | | | Berencana |
| 3.7.2(a) | 3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR). | Total Fertility Rate (TFR). | RPJMD Kota | 1.92 | 1.91 | 1.9 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.92 1.91 1.9 1.89 1.88 1.86 Dinas Pengendalian |

Yogyakarta 1.92 1.91 1.9 1.89 1.88 1.86 Dinas Pengendalian Yogyakarta Penduduk dan Keluarga 2017-2022 Penduduk dan Keluarga Berencana Berencana terjangkau bagi semua orang.

| anuguration. | colonia Branda and Santa a | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------|-------|---------|-------|--|
| 3.8.1 | Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai Persentase fasiitas kesehatan yang sesuai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk standar reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung) | Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar | RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 | 80 % | 82 | 84 | 98 | б 88 | 06 | Dinas Kesehatan |
| 3.8.1(a) | Unmet need pelayanan kesehatan. | Persentase pasangan usia subur yang ingin RPJMD Kota ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) Yogyakarta 2017-2022 | RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 | 11.4 | 11.34 | 11.28 | 11.22 | 11.16 | 11.1 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3.8.2(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Persentase penduduk yang mempunyai JKN RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 | RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 | 88 % | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| Target 3.9 | Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. | ı dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, | , serta polusi dan | kontaminasi udara, air | ', dan tanah. | | | | | |
| 3.9.1 | Angka kematian akibat tangga dan polusi udara ambien | Indeks Kualitas Udara | RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 | 66.85 | 67.05 | 67.25 | 67.45 | 9 29.29 | 67.85 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3.9.2 | Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis | Indeks Kualitas Air | RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 | 50.2 | 50.4 | 50.6 | 50.8 | 51 5 | 51.2 | Dinas Lingkungan Hidup |

aan Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau,

| ; untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaar emua. | % 85 90 90 90 90 90 Dinas Kesehatan | | |
|--|---|------------|-----------|
| ing untuk menggi ji semua. | RPJMD Kota | Yogyakarta | 2017-2022 |
| gaskan hak negara berkemba menyediakan akses obat bag | Persentase penggunaan obat rasional di | Puskesmas | |
| ne Doha Deciaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang mene; ual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, i | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | | |
| sesuai th Intelektu | 3.b.1(a) | | |

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

| Kode | 3 (| Indikator SDG's | ote Canadamir | 201403 | Tahun | | Ta | rget Penca | paian | | Penanggungjawab |
|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|---|
| Indikator | | Kota Yogyakarta | Sumper Data | Satuali | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ia Suniber Data Satuan Dasar 2018 2019 2020 2021 2022 Pelaksana |
| Target 4.1 F | arget 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan | yelesaikan pendidikan d | lasar dan menengah t | anpa dipung | ut biaya, sel | tara, dan be | rkualitas, y | ang menga | ırah pada c | apaian pem | oelajaran yang relevan |
| 4.1.1(a) | .1.1(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | Persentase SD | RPJMD Kota | % | 82 | 83 | 84 | 82 | 98 | 98 | Dinas Pendidikan |
| | | | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | |
| 4.1.1(b) | .1.1(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | Persentase SMP | RPJMD Kota | % | 74 | 74 | 74.5 | 74.5 | 75 | 75 | Dinas Pendidikan |
| | | akreditasi A | Yogyakarta 2017- | | | | | | | | |
| | | | 2022 | | | | | | | | |

| Kode | | Indikator SDG's | 4 | ; | Tahun | | Tar | get Pencap | ian | | Penanggungjawab |
|-----------|--|---------------------------------|--|--------|--------|--------|---------------|---------------------|--------|--------|--|
| Indikator | Indikator | Kota Yogyakarta | Sumber Data Satuan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dasar 2018 2019 2020 2021 2022 Pelaksana |
| 4.1.1(d) | .1.1(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | Angka partisipasi kasar SD | RPJMD Kota Yogyakarta 2017- | % | 142.61 | 142.64 | 142.67 | 142.7 | 142.73 | 142.76 | Dinas Pendidikan |
| 4.1.1(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | Angka partisipasi kasar SMP | 2022 RPJMD Kota Yogyakarta 2017- | % | 141.11 | 141.17 | 141.17 141.22 | 141.31 141.39 141.5 | 141.39 | 141.5 | Dinas Pendidikan |
| 4.1.1(g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur≥15 tahun. | Angka Rata-rata lama sekolah | 2022 RPJMD Kota Yogyakarta 2017- 2022 | tahun | 11.42 | 11.43 | 11.43 | 11.44 | 11.44 | 11.45 | Dinas Pendidikan |

Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi erentan.
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) RPJMD Kota APM SD 128.98 129 129.02 129.02 129.06 Dinas Pendidikan

| nununk e | ash, dan ahak-ahak dalam kondisi rentan. | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|----------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--------|------------------|--|
| 5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) | RPJMD Kota | S | 128.98 | 129 | 129.02 | 129.04 | 129.06 | 129.06 | Dinas Pendidikan | |
| | SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan | Yogyakarta 2017- | (%) | | | | | | | | |
| | (4) Rasio APK perempuan/laki- laki di Perguruan Tinggi. | 2022 | APM SMP 141.11 | 141.11 | 141.17 | 7 141.22 141.31 141.39 | 141.31 | | 141.5 | Dinas Pendidikan | |
| | | | | | | | | | | | |

(%)
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara

| perkempan | g kepulauan kecii. | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat | Persentase guru | RPJMD Kota | % | 92.37 | 92.47 | 92.57 | 92.67 | 92.77 | 92.87 | Dinas Pendidikan |
| | pendidik | sesuai kualifikasi | Yogyakarta 2017- | | | | | | | | |
| | | | 2022 | | | | | | | | |

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER

| Indikator arget 5.2 Menghapuskan seg 5.2.1 (a) Prevalensi kek | munator gala bentuk kekerasan terhada | III MATOL 3DG S NOTA 1 OSYANAI TA | משומים | | | | | | | | 000000000000000000000000000000000000000 |
|---|--|--|--------------------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------------------|------------|------------|-------------|---|
| get 5.2 Menghapuskan seg .1 (a) Prevalensi kek | gala hentuk kekerasan terhada | | | | Dasar | | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | relialigguligjawab relansalia |
| | The second secon | arget 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. | badi, termasuk perdaga | ingan orang | dan eksplo | itasi seksu | al, serta be | erbagai je | nis eksplo | itasi lainn | ya. |
| | Prevalensi kekerasan terhadap anak | Prevalensi kekerasan terhadap | RPJMD Kota | % | 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.6 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 9.0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, |
| perempuan. | | perempuan | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.2(a) Persentase kor | Persentase korban kekerasan terhadap | Persentase perempuan korban KDRT | RPJMD Kota | Persen | 74 | 9/ | 78 | 80 | 82 | 84 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, |
| perempuan yar komprehensif. | perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | yang tertangani | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | Perempuan dan Perlindungan Anak |
| get 5.6 Menjamin akses ur | Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan se | arget 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and | seperti yang telah disep | akati sesuai | denganPro _l | gramme of | Action of | the Inter | national C | onference | e on Population andDevelopment ar |

| 5.6.1(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Persentase pasangan usia subur yang RPIMD Kota % 11.4 11.34 11.28 11.16 11.1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Berencana/KB yang tidak terpenuhi). ingin ber-KB tidak terpenuhi Yogyakarta 2017- (unmetneed) 2022 | nie peiling k | Piatioriii serta dokumen-dokumen nasii revid da | all kollielelisi- kollielelisi telsebut. | | | | | | | | |
|--|---------------|---|--|------------------|---|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------|
| KB yang tidak terpenuhi). ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) | 5.6.1(a) | (Kebutuhan Keluar | Persentase pasangan usia subur yang | RPJMD Kota | % | 11.34 | 11.28 | 11.22 | 11.16 | 11.1 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| (unmetheed) 2022 | | KB yang tidak te | ingin ber-KB tidak terpenuhi | Yogyakarta 2017- | | | | | | | Keluarga Berencana |
| | | | (unmetneed) | 2022 | | | | | | | |

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

| Kode | | | | | Tahun | | Targ | et Pencap | aian | | Penanggungjawab |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|--|
| Indikator | Indikator | indikator suu s kota rogyakarta | Sumper Data | satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dasar 2018 2019 2020 2021 2022 Pelaksana |
| Target 6.1 P | arget 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | air minum yang aman dan terjangkau | bagi semua. | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang Persentase Kualitas Air Minum yang RPJMD Kota | g Persentase Kualitas Air Minum yan | g RPJMD Kota | % | 85.2 | 85.4 85.6 | | 85.8 | 98 | 86.2 | Dinas Kesehatan |
| | dikelola secara aman. | memenuhi Syarat Kesehatan Yogyakarta 2017-2022 | Yogyakarta 2017-2022 | | | | | | | | |
| Target 6.2. F | i anget 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum | an yang memadai dan merata bagi ser | nua, dan menghentikan p | raktik buang | g air besar d | i tempat t | erbuka, m | emberikar | η perhatia | n khusus | pada kebutuhan kaum |
| perempuan, | perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.(e) | 5.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air | Persentase cakupan saluran air | RPJMD Kota | % | 83.22 | 84 | 84.06 | 85.09 | 86.21 | 87.62 | 86.21 87.62 Dinas PUPKP |
| | limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan | limbah yang memadai | Yogyakarta 2017-2022 | | | | | | | | |
| | leanwood | | | | | | | | | | |

| ١ | | į | | |
|---|---|---|---|---|
| į | ı | • | | |
| į | ĺ | • | | ١ |
| ١ | | | | |
| | | • | | |
| į | ĺ | | | |
| į | ١ | : | | į |
| ١ | | | | |
| | | | | |
| ۰ | | | į | |
| ١ | | | | |
| i | | | | ļ |
| ١ | | 3 | ı | |
| ì | | | | |
| ١ | | • | | |
| Į | į | | | |
| ١ | | į | | |
| į | ı | • | | |
| ١ | | | | ١ |
| i | i | | | |
| Į | | | | |
| Į | ļ | | į | |
| Į | | 4 | ļ | |
| Į | į | | ١ | |
| | | | | |
| | | í | | |
| | i | ć | | ĺ |
| | | i | | ì |
| | | | | |
| | | | | į |
| ١ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 200 | | |
| | | 7000 | | |
| | | 200 | | |
| | | 200 | | |
| | | TO THE PERSON AND A PARTY | | |
| | | A V V V V V V V V V V V V V V V V V V V | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | A V V V V V V V V V V V V V V V V V V V | | |
| | | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | | |
| | | V V V V V V V V V V V V V V V V V V V | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Indikator | Indikator | Yogyakarta | Sumper Data | satuan | anun Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pelaksana |
|----------------------------|--|---|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--|
| Target 8.1 F | Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang | onomi per kapita sesuai dengan ko | andisi nasional dan, k | hususnya, se | tidaknya 7 perse | en pertumbuhai | n produk domest | tik bruto per tahu | un di negara kura | ing berkembang. | |
| 8.1.1. (a) | PDB per kapita | PDRB perkapita | RPJMD Kota | | 58,533,947 | 60,955,762 | 63,377,577 | 65,799,392 | 68,221,207 | 70,643,023 | Dinas Perindustrian dan |
| | | | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | Perdagangan |
| Target 8.3 I | Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kerativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan | ınan yang mendukung kegiatan pr | oduktif, penciptaan l | apangan kerj | a layak, kewirau | Isahaan, kreativi | tas dan inovasi, | dan mendorong | formalisasi dan p | pertumbuhan usal | ha mikro, kecil, dan |
| menengah, | menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | asa keuangan. | | | | | | | | | |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM | Persentase peningkatan omset | | % | 2 | 4 | 9 | 7 | ∞ | 6 | Dinas Koperasi, UKM, |
| | (Usaha Mikro, Kecil, dan | UKM yang dibina | Yogyakarta 2017- | | | | | | | | dan Nakertrans |
| | Menengah) ke layanan keuangan | | 2022 | | | | | | | | |
| Target 8.5 F nilainya. | Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan nilainya. | aan tetap dan produktif dan pekerj | jaan yang layak bagi s | semua peren | npuan dan laki-la | aki, termasuk ba | gi pemuda dan p | oenyandang difal | bilitas, dan upah | yang sama untuk | produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja Persentase peningkatan upah | Persentase peningkatan upah | RPJMD Kota | % | 2 | 5.5 | 9 | 6.5 | 7 | 7.5 | Dinas Koperasi, UKM, |
| | | minimum kota | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | dan Nakertrans |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka | Tingkat pengangguran terbuka Persentase jumlah penganggur | | % | 5.08 | 5.03 | 4.98 | 4.94 | 4.9 | 4.86 | Dinas Koperasi, UKM, |
| | berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | dan Nakertrans |
| Target 8.8 N berbahaya. | farget 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya. | an mempromosikan lingkungan ke | rja yang aman dan te | rjamin bagi s | emua pekerja, t | ermasuk pekerja | a migran, khusus | snya pekerja mig | ran perempuan, | dan mereka yang | bekerja dalam pekerjaan |
| 8.8.1.(a) | Jumlah perusahaan yang | Persentase Penyelesaian | | % | 80 | 85 | 06 | 95 | 86 | 100 | Satpol PP |
| | menerapkan norma K3 | Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan) | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | |
| Target 8.9 F | Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | elaksanakan kebijakan untuk mem | npromosikan pariwisa | ta berkelanjı | utan yang menc | iptakan lapanga | n kerja dan mem | npromosikan bud | laya dan produk | lokal. | |
| 8.9.1.(b) | | Jumlah kunjungan wisatawan | RPJMD Kota Yogyakarta 2017- 2022 | Kunjungan | Kunjungan 3,000,000 | 3,150,000 | 3,307,500 | 3,472,875 | 3,646,519 | 3,828,845 | Dinas Pariwisata |

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

| l shay | | 100 | 7 | 1 | | | 1 | | | Target Pencapaian | ncapaian | | Penanggungjawab |
|----------------|---|---|--|--------------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|--|
| node indikator | TOT INDIKATOR | Indikator | indikator SDG S Nota Togyakarta | Sumber Data | Data | Satuar | Satuan Tanun Dasar | | 18 20. | 2018 2019 2020 2021 | 0 202 | 1 2022 | Pelaksana |
| Target 9.1 № | farget 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas | | andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada | ıfrastruktur regional | dan lintas ba | atas, untuk | menduku | ng pembar | ngunan el | konomi d | an kesejał | hteraan man | nusia, dengan fokus pada |
| akses yang te | akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | emua. | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.(a) | Kondisi mantap jalan Persentase kual | Persentase kualitas sarana | litas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan | RPJMD Kota Yogyakarta | 3yakarta | % | 82 | 84 | 98 | 88 | 06 | 92 | Dinas PUPKP |
| | nasional | Bangunan Pelengkap Jalan | L. | 2017-2022 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN 10 | UJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN | NJANGAN | | | | | | | | | | | |
| Kode | | 1 | Indikator SDG's Kota | 4 | | Tahun | | Targe | Target Pencapaian | aian | | | 1 |
| Indikator | = | indikator | Yogyakarta | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | Penan | Penanggungjawan Pelaksana |
| Target 10.1 F | ada tahun 2030, secara pro | gresif mencapai dan memper | Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional | penduduk yang ber | ada dibawah | 40% dari p | opulasi pa | da tingkat | yang lebi | ih tinggi d | ari rata-ra | ata nasional. | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini | | Rasio gini R | RPJMD Kota | | 0.42 | 0.414 | 0.408 | 0.402 | 0.396 | 0.39 | Dinas Koper | 0.414 0.408 0.402 0.396 0.39 Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans |
| | | | 2 4 | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | | |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah | g hidup di bawah garis | Angka kemiskinan R | RPJMD Kota | % | 7.70 | 7.58 | 7.35 | 7.34 | 7.29 | 7.10 | Dinas Sosial | _ |
| | kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin kelompok umur | ıurut jenis kelamin dan | > 0 | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | | |
| | in in the second | | | | | | | | | | | | |

| Kode | , | Indikator SDG's Kota | 4 | | | | Targ | Target Pencapaian | ian | | |
|---------------|---|--|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------------|------------|------------|--|
| Indikator | Indikator | Yogyakarta | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2021 | 2022 | Penanggungjawab Pelaksana |
| 10.1.1.(e) | 0.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal | tertinggal Angka pertumbuhan ekonomi RPJMD Kota | RPJMD Kota | % | 5.13 | 5.16 | 5.19 | 5.2 | 5.21 | 5.23 | 5.13 5.16 5.19 5.2 5.21 5.23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | |
| Target 10.3 l | arget 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait egislasi dan kebijakan tersebut. | ngan hasil, termasuk dengan mer | nghapus hukum, kebija | akan dan pra | aktik yang d | iskriminati | f, dan mei | npromosi | an legisla | si, kebija | kan dan tindakan yang tepat terkait |
| 10.3.1.(c) | 10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan | Persentase perempuan RPJMD Kota korban KDRT yang tertangani Yogyakarta 2017- | RPJMD Kota Yogyakarta 2017- | Persen | 74 | 92 | 78 | 80 | 82 | 84 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| | terhadap perempuan. | | 2022 | | | | | | | | |

| Kode | a de de la companya d | | of of order | 10.140 | Tahun | | Tar | Target Pencapaian | oaian | | Penanggungjawab |
|--------------|--|---|--|------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Indikator | Indikator | indikator suus kota Yogyakarta | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pelaksana |
| Target 11.4 | Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. | isan alam dunia. | | | | | | | | | |
| 11.4.1.(a) | Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, | Persentase rintisan keluarahan budaya yang | RPJMD Kota | % | 44 | 20 | 26 | 61 | 29 | 72 | Dinas Kebudayaan |
| | kota besar, kota sedang dan kota kecil. | aktif | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | |
| Target 11.5 | Target 11.5 Pada tahun 2030, sceara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus | ian dan jumlah orang terdampak, dan secara su | bstansial mengurang | i kerugian | konomire | elatif terha | dap PDB g | lobal yang | disebabk | an oleh b | encana, dengan fokus |
| melindungi | melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. | | | | | | | | | | |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak | Persentase korban bencana skala kota yang | RPJMD Kota | % | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 82 | BPBD |
| | bencana per 100.000 orang. | dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | |
| 11.5.1.(b) | Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. | Persentase kampung tangguh bencana | RPJMD Kota Yogyakarta 2017- 2022 | % | 40 | 44 | 49 | 23 | 28 | 62 | врвр |
| 11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | Persentase edukasi proteksi kebakaran | RPJMD Kota Yogvakarta 2017- | % | 95 | 96 | 96 | 26 | 26 | 86 | Dinas Kebakaran |
| | | | 2022 | | | | | | | | |
| Target 11.6 | Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. | per kapita yang merugikan, termasuk dengan m | emberi perhatian kh | usus pada | kualitas uc | ara, terma | suk penai | ıganan sar | npah kota | _ | |
| 11.6.1 | Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara Persentase cakupan saluran air limbah yang | Persentase cakupan saluran air limbah yang | RPJMD Kota | % | 83.22 | 84 | 84.06 | 85.09 | 86.21 | 87, 62 | Dinas PUPKP |
| | teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total memadai limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota. | memadai | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | Persentasse pengangkutan sampah | RPJMD Kota Yogyakarta 2017- | % | 91.26 | 92.17 | 93.99 | 95.82 | 97.65 | 99.47 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 11.7. | Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkat terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. | ka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangk | au terutama untuk p | erempuan | dan anak, | manula da | n penyan | dang difab | ilitas. | | |
| 11.7.1 | Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut | Persentase luasan RTH Publik dari minimal | RPJMD Kota | % | 29.19 | 29.51 | 29.68 | 29.85 | 30.02 | 30.19 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas. | RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | |

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

| Kode | | attended to the state of the st | of a Charles | 10.4.0 | lahun | | arge | l arget Pencapaian | au | | Penanggungjawab |
|----------------------|---|--|------------------------|----------------|-------------|------------|----------|--------------------|-----------|-------------|---|
| Indikator | Indikator | indikator SDG S Nota Togyakarta | sumber Data Satuan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dasar 2018 2019 2020 2021 2022 Pelaksana |
| Target 12.4 Pada tal | get 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semu | menguri dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi | anjang siklus hidupnya | ı, sesuai kera | angka kerja | internasic | nal yang | isepakati | dan secar | a signifika | in mengurangi |
| pencemaran bahan | ncemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah unt | dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. | sehatan manusia dan | lingkungan. | | | | | | | |
| 12.4.1.(a) Jumla |) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking | Persentase usaha yang telah memiliki izin RPJMD Kota | RPJMD Kota | % | 5.65 | 0 | 10.08 | 11.98 | 13.7 | 5.28 | 8 10.08 11.98 13.7 15.28 Dinas Lingkungan Hidup |
| BIRU | | Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Yogyakarta 2017- | Yogyakarta 2017- | | | | | | | | |
| | | (11,100) | | | | | | | | | |

Hidup (PPLH)

Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.

| Indikator 12.5.1.(a) Jumlah Target 12.6 Mendoron 12.5.1.(a) | Indikator Indika | Dasar 2019 2020 2021 2022 | RPJMD Kota | Satuan | Dasar | 2010 | 0,00 | 0000 | | | |
|---|--|--|------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------------------|--|
| 12.5.1.(a) Jumlah Target 12.6 Mendoror | h timbulan sampah yang didaur ulang. ong perusahaan, terutama perusahaan besar dan tran In perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO | Persentase sampah yang dikelola secara 3R sanasional, untuk mengadopsi praktek-praktek Dersentase nentahan vang mentaati | RPJMD Kota | | | 7010 | 2019 | 7070 | 2021 | Dasar 2018 2019 2020 2021 2022 | Pelaksana |
| Target 12.6 Mendoror | ong perusahaan, terutama perusahaan besar dan tran In perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO | snasional, untuk mengadopsi praktek-praktek Percentasa nentsahaan vano mentaati | | % | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 3 | 17 | 12 13 14 15 16 17 Dinas Lingkungan Hidup |
| Target 12.6 Mendoror | ong perusahaan, terutama perusahaan besar dan tran: In perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO | snasional, untuk mengadopsi praktek-praktek Persentase nerusahaan yang mentaati | Yogyakarta 2017- | | | | | | | | |
| 12 6 1 (a) Inmlah | ong perusanaan, terutama perusanaan besar dan trans h perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO | snasional, untuk mengadopsi praktek-praktek Persentase neriisahaan vang mentaati | 2022 | | , | and the first | 1 | 110 | | - | |
| 12 6 1 (a) Limlah | h perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO | Percentace nericahaan yang mentaati | berkelanjutan dan me | engintegrasi | kan intorm. | ası keberli | injutan da. | am siklus | pelaporan | mereka. | |
| (5).1.0.1 | | i ci scilicase bei asalidani yang incilicasi | RPJMD Kota | % | 23.62 | 27.58 | 27.58 31.36 34.98 | 34.98 | 38.45 4 | 11.77 | 38.45 41.77 Dinas Lingkungan Hidup |
| 14001. | _: | dokumen lingkungan. | Yogyakarta 2017- | | | | | | | | |
| | | | 2022 | | | | | | | | |
| Target 12.b Mengemb | Target 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memanta | . untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal | dap pariwisata berkela | anjutan yan _t | 3 menciptal | can lapang | tan kerja d | in mempi | romosikan | budaya | fan produk lokal. |
| 12.b.1 Jumlah | Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan Indeks kualitas atraksi pariwisata | Indeks kualitas atraksi pariwisata | RPJMD Kota | | 80 | 81.59 | 83.18 | 84.77 | 86.36 | 37.95 | 81.59 83.18 84.77 86.36 87.95 Dinas Pariwisata |
| dan pel | dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat | | Yogyakarta 2017- | | | | | | | | |
| monito | monitoring dan evaluasi yang disepakati. | | 2022 | | | | | | | | |

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

| 4.4 | | | | | F | | ř | | | | 4 |
|-------------|---|--|---------------------|------------|------|------|------|----------|--------------------------------|--------|-----------------|
| Kode | a checillord | checker COC and a set of the last | Control Code | 200 | annu | | arg | et Penca | l arget Pencapalan | | Penanggungjawab |
| Indikator | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | marcol SDG s nota Togyanalta | Sumper Data | Satual | | 2018 | 2019 | 2020 | Dasar 2018 2019 2020 2021 2022 | 2022 | Pelaksana |
| Target 13.1 | rget 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi | ısi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. | ara. | | | | | | | | |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan | Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi | RPJMD Kota | % | 75 | 77 | 79 | 81 | 77 79 81 83 85 | S BPBD | PBD |
| | terkena dampak bencana per 100.000 | dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat Yogyakarta 2017-2022 | Yogyakarta 2017-202 | 6 1 | | | | | | | |
| | orang. | lengkap | | | | | | | | | |

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN

| Kode | 1000 | other leaves of the No. 1999 we tool the st | 400 | 1 | Tahun | | Target Pencapaian | t Pencapa | ian | | Penanggungjawab |
|----------------|---|--|-----------------------------|----------------|--|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Indikator | marator | IIIUIKALOI 3DO S NOLA TOBYAKATLA | Sumper Data | Satuan | Jacuari Dasar 2018 2019 2020 2021 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pelaksana |
| Target 15.1 P. | rget 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restor | orasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, | n daratan dan perairan dara | serta jasa lir | gkungannya | a, khususn | ya ekosist | m hutan, | lahan bas | ah, pegun | ungan dan lahan kering, |
| sejalan denga | ejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. | sional. | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | Kawasan hutan sebagai persentase dari | awasan hutan sebagai persentase dari Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH | RPJMD Kota Yogyakarta | % | 29.19 | 29.51 | 29.68 | 29.85 | 30.02 | 30.19 | 29.51 29.68 29.85 30.02 30.19 Dinas Lingkungan Hidup |
| | total luas lahan | Publik 20% luas Kota Yogyakarta | 2017-2022 | | | | | | | | |
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas | Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RPJMD Kota Yogyakarta | RPJMD Kota Yogyakarta | % | 41.58 | 41.92 | 42.25 | 42.57 | 12.9 | 43.22 | 41.92 42.25 42.57 42.9 43.22 Dinas Lingkungan Hidup |
| | lahan keseluruhan. | RTH Publik | 2017-2022 | | | | | | | | |

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

| Kode | | Indikator SDG's Kota | 4.0 | 1 | Tahun | | Ţaŗ | Target Pencapaian | aian | | |
|--------------|--|---|--------------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-----------------------------|
| Indikator | markator | Yogyakarta | Sumber Data Satuan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2019 2020 2021 | 2021 | 2022 | r Penanggungjawan Pelaksana |
| Target 16.15 | arget 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terk | kerasan dan terkait angka kematian dimanapun. | 'n. | | | | | | | | |
| 16.1.3.(a) | 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan | Angka kriminalitas | RPJMD Kota | Kejadian 1,660 | 1,660 | 1,628 | 1,596 | 1,564 | 1,532 | 1,500 | Kantor Kesbang |
| | kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | |
| Target 16.21 | Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. | segala bentuk kekerasan dan p | penyiksaan terhadap | anak. | | | | | | | |
| 16.2.1.(b) | 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak | Prevalensi kekerasan | RPJMD Kota | % | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 69.0 | Dinas Pemberdayaan |
| | perempuan. | terhadap anak | Yogyakarta 2017- | | | | | | | | Masyarakat, Perempuan, dan |
| | | | 2022 | | | | | | | | Perlindungan Anak |
| Target 16.31 | farget 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. | lan internasional dan menjami | n akses yang sama te | rhadap keac | dilan bagi se | emna. | | | | | |
| 16.3.1.(a) | 16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang Persentase perempuan | Persentase perempuan | RPJMD Kota | % | 74 | 9/ | 28 | 80 | 82 | 84 | Dinas Pemberdayaan |
| | melaporkan kepada polisi. | korban KDRT yang | Yogyakarta 2017- | | | | | | | | Masyarakat, Perempuan, dan |
| | | tertangani | 2022 | | | | | | | | Perlindungan Anak |

| Kode | The state of the s | Indikator SDG's Kota | | | Tahun | | Tar | Target Pencapaian | aian | | |
|-----------------------------|--|---|---|-------------|----------------------|----------------------|-------|-------------------|-------|-------|---|
| Indikator | Indikator | Yogyakarta | Sumber Data | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Penanggungjawab Pelaksana |
| 16.3.1.(b) | Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. | Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial | RPJMD Kota Yogyakarta 2017- 2022 | % | 70 | 02 | 75 | 75 | 08 | 08 | Dinas Sosial |
| Target 16.61 | Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | an di semua tingkat. | | | | | | | | | |
| 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran Indeks Pengelolalan yang disetujui. | Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah | RPJMD Kota Yogyakarta 2017- 2022 | | 89.37 | 90.44 | 91.54 | 92.63 | 93.72 | 94.81 | вркад |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | RPJMD Kota Yogyakarta 2017- 2022 | | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Sekretariat Daerah |
| 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah | RPJMD Kota Yogyakarta 2017- 2022 | | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 4 | Sekretariat Daerah |
| 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Indeks Reformasi Birokrasi | RPJMD Kota Yogyakarta 2017- 2022 | | 69.85 | 70.28 | 70.71 | 71.14 | 71.57 | 72 | Sekretariat Daerah |
| 16.6.2 | Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik. | Indeks pelayanan publik | RPJMD Kota Yogyakarta 2017- 2022 | | 79.75 | 08 | 80.25 | 80.5 | 80.75 | 81 | Sekretariat Daerah |
| Target 16.10 16.10.2.(a) | Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap Informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. 16.10.2.(a) Tersediamya Badan Publik yang menjalankan kewajiban indeks Layanan informasi RPJMD Kota 61.98 67.24 sebagainman diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Publik Yogyakarta 2017- Keterbukaan Informasi Publik. | ebasan mendasar, sesuai den Indeks Layanan Informasi Publik | gan peraturan nasiona RPJMD Kota Yogyakarta 2017- 2022 | ıl dan kese | pakatan int 61.98 | ernasional. 67.24 | 72.21 | 77.18 | 82.15 | 86.93 | Dinas Kominfo dan Persandian |

| UAN |
|--------|
| 5 |
| CAPA |
| K ME |
| JAN |
| ANI |
| EMITR/ |
| 117. K |
| TUJUAN |

| Indikator Target 17.1 Memperk 17.1.1* Total | | | | | Tahun | | Target | Target Pencapaian | uau | | GEWEIGH BANEDA |
|---|--|--|--|--------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|----------|------------|---------------------------|
| Target 17.1 Memperi 17.1.1* Total | Indikator | Indikator SDG's Kota Yogyakarta | Sumber Data | Satuan | Dasar | Dasar 2018 | 2 | 2020 | 2021 | 2022 | Pelaksana |
| | Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | iternasional kepada negara berkemb | ang, untuk meningka | tkan kapasi | tas lokal l | oagi peng | umpulan | oajak da | n penda | patan lair | nnya. |
| sumk | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut | Persentase peningkatan | RPJMD Kota | 7 % | 7.74 | 0.44 | 0.44 2.15 2.11 2.12 | .11 | 2.12 | 2.08 E | BPKAD |
| | sumbernya. | Pendapatan Asli Daerah | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | |
| 17.1.1.(a) Rasio | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD | RPJMD Kota Yogyakarta 2017- 2022 | % | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | вркар |
| Target 17.5 Mengado | Target 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang | i bagi negara kurang berkembang. | | | | | | | | | |
| 17.5.1 Jumla | Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi | Persentase peningkatan nilai | RPJMD Kota | % 1 | 1.04 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | Dinas Penanaman Modal |
| inves | investasi untuk negara-negara kurang berkembang. | investasi | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | Ü | dan Perizinan |
| Target 17.14 Mening | Target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan. | | | | | | | | | | |
| 17.14.1 Jumla | Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan | Indeks pelaksanaan | RPJMD Kota | 00 | 86.1 | 87.2 | 88.3 | 89.4 | 90.5 | 91.6 | Sekretariat Daerah |
| kebij | kebijakan pembangunan berkelanjutan. | pembangunan | Yogyakarta 2017- 2022 | | | | | | | | |
| Target 17.18 Pada tal | Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan | egara berkembang, termasuk negara | a kurang berkembang | g dan negara | a berkem | bang pula | u kecil, ur | tuk mer | ningkatk | an secara | ı signifikan ketersediaan |
| data berkualitas ting | data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional | spatan, gender, umur, ras, etnis, stat | us migrasi, difabilitas | , lokasi geo | grafis dan | karakter | stik lainn | /a yang ı | elevan c | lengan ko | onteks nasional. |
| 17.18.1 Propo | Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat 🛾 Indeks perencanaan | Indeks perencanaan | RPJMD Kota | 6 | 91 | 91.2 | 91.2 91.4 91.6 91.8 | 1.6 | | 92 E | Bappeda |
| nasio | nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan | pembangunan | Yogyakarta 2017- | | | | | | | | |
| targe | targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik | | 2022 | | | | | | | | |
| Resmi | ni. | | | | | | | | | | |

| Kode | | other leading Vetal and all the leading and th | C sodoni | 201403 | Tahun | | Targe | t Pencap | aian | | Penanggungjawab |
|------------------|--|--|-------------------|------------|--------------------------------|------------|--------|-------------|---------|--------|------------------------|
| Indikator | IIIIIIIIIIIII | III UIKATOL SDO S NOTA TOBYANTIA SUITIDEL DATA SALUATI | Sumper Data | Saruan | Dasar 2018 2019 2020 2021 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Pelaksana |
| Target 17.19 F | rrget 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas | ngkan pengukuran atas kemajuan pe | mbangunan berkela | njutan yan | g melengka | api Produl | Domest | k Bruto, | dan mer | dukung | oengembangan kapasitas |
| statistik di neg | tatistik di negara berkembang. | | | | | | | | | | |
| 17.19.1.(a) | 7.19.1.(a) Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada | Persentase perangkat daerah | RPJMD Kota | % | 19 | 28 | 38 | 48 | 92 29 | | Dinas Kominfo dan |
| | Kementerian/Lembaga. | yang melaksanakan prosedur | Yogyakarta 2017- | | | | | | | | Persandian |
| | | pengamanan informasi | 2022 | | | | | | | | |
| 17.19.2.(e) | Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) Persentase pemanfaatan data | S) Persentase pemanfaatan data | RPJMD Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 100 100 | 100 | | Dinas Kominfo dan |
| | dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. | untuk perencanaan | Yogyakarta 2017- | | | | | | | | Persandian |
| | | pembangunan | 2022 | | | | | | | | |

| ota Yogyakarta |
|------------------------|
| (TPB) K |
| nbangunan Berkelanjuta |
| Tujuan Pen |
| Indikator |
| Kegiatan, |
| MatrikProgram |

| | | • | | | - | Target Tahiinan | 20 | | Indikatif | | |
|---|--|---------|----------------|----------|----------------|-----------------|----------|-------|-------------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | 200 | | | | Sumbo | |
| | | | Tahun | | | | | | | ב | 100 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | 707 | | | | | | Tahunan n | naan | |
| Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan | | | | | | | | | (idu) | | |
| INDIKATOR TPB | 1.2.1*Angka kemiskinan | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program PERLINDUNGAN DAN JAMINAN | | | | | | | | | | ō | Dinas Sosial |
| Kegiatan 1: Kegiatan Perlindungan Sosial | | | | | | | | | 4,181,905, | | |
| | 1 Frakisanci Galar Potenci Anak Panti | iley | - | | | - | | - | 03/ | | |
| | 2. Flexuelist Gelal Potelist Atlah Fallti 2. Langan Hacil Evaluati Danvaluan Dantuan Korhan Dantan | 2 | , , | 1, 1 | , , | 1, | 1, 1 | 1 5 | | | |
| | 2. Laporan Hasii Evaluasi Penyaluran bantuan Norban bencana 3. Jaca Dikot Tagana | Orang | 717 | 71 22 | 71 | 71 22 | 71 22 | 71 22 | | | |
| | 4. Tumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mendanat pembinaan | |) oc |) oc | 3 00 | 000 |) oc | 000 | | | |
| | To control the control of the contro | 2 |) | o . | o | o . | o . | o . | | | |
| | 5. Frekuensi Workshop UEP Lanjut Usia Potensial | Kali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | 6. Frekuensi Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogvakarta | Kali | П | . | . | 1 | . | 1 | | | |
| | 7. Frekuensi Workshop Komisi Daerah Lansia | Kali | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | 8.Frekuensi Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas | Kali | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | 9. Laporan Seleksi Penghuni RPLU dan RPA | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 10. Laporan Workshop Pelopor Perdamaian | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Jaminan dan Bantuan Sosial | | | | | | | | | 4,872,356, 780 | | |
| | 1. Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlantar | Kali | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | 2. Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | 3. Frekuensi fasilitasi penyaluran BantuanProgram Keluarga Harapan (PKH) | Kali | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | 4. Laporan Pelayanan Santunan Kematian bagi Keluarga yang Memiliki KMS | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 5. Jasa Pelayanan Mobil Jenazah | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | 6. Laporan Jenazah Terlantar yang Dimakamkan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 7. Laporan fasilitasi pengaduan subsidi listrik | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 8. Laporan Penanganan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal dalam Perjalanan di Kota Yogyakarta | Laporan | н | H | T | T | H | н | | | |
| Kegiatan 3 : Kegiatan Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo | | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6,173,932, 256 | | |
| Kegiatan 4 : Kegiatan Pelayanan di | Lanjut usia yang dilayani | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9,714,018, | | |
| Kuman Pelayanan Sosial Lanjut Osia Terlantar Budhi Dharma | | | | | | | | | 386 | | |
| INDIKATOR SDG's | 1.3.1 Persentase PMKS vang memberoleh perlindungan dan jaminan sosial | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program ADVOKASI DAN REHABILITASI SOSIAL | EHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | | ā | Dinas Sosial |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Keselahteraan | | | | | | | | | 2,668,034, | | |
| Sosial (PMKS) | 1 Denvandang disabilitas dan keluarga nenyandang disabilitas yang | Orang | 40 | 7. | 7. | 7. | 7. | ř. | 4 | | |
| | mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | 2. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan | Orang | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | | | |
| | mendapatkan bantuan modal Usana serta pengantaran ke KSJ 2. Visa pempengalatan yang mengiluri polatikan dan kantuan medal yang Dang | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Korban tindak kekerasan yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan | | 50 70 | 4 4 | 4 4 | 40 | 4 4 | 6 4 | | | |
| | bantuan modal usaha | , | | | | | | | | | |

| | | | | | | larget lahunan | an | | | | |
|---|--|-----------------------|-------|----------|------|----------------|--------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----|
| | | | Tahun | | | | | | 3 | | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran r 5 Penda | instansi a Pelaksana | ana |
| | | | 7107 | | | | | | Tahunan naan (Rp.) | _ | |
| | Anak rentan hidup dijalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha | Orang | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | I | |
| | 6. Laporan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi | Laporan | 1 | - | н | 1 | - | ₽ | | | |
| | 7. Perempuan rawan sosial eknomi yang mengikuti pelatihan | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | 8. ODHA yang mengikuti penguatan sosial psikologis | | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah | | | | | | | | | 7,612,274, 051 | | |
| Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 1.Laporan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas | Laporan | 1 | | 1 | 1 | + | 1 | | | |
| | 2. Laporan penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 3. Laporan penanganan dan rekomendasi anak terlantar | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 4. Laporan advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS | Laporan | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | | | |
| | 5. Laporan pembinaan dan pendampingan KUBE dan USEP | Laporan | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | | | |
| | 6. Frekuensi Peringatan HDI | Kali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 7.Laporan Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA | Laporan | 1 | - | 1 | 1 | . | . | | | |
| | 8. Buku Profil KUBE yang tersusun | Dokumen 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 1.4.1. (a) Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar | Standar | | | | | | | | | |
| | 1 / 1 (d) Dercentace Kualitac Air Minum yang memenuhi Syarat Kecehatan | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT | 1.4.1. (4) retsentase naantas Ali Minum yang memenani syarat nesenatan SEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | Dinas | |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Kesehatan | | | | | | | | | 7,274,437, | Kesehatan | c |
| Keluarga dan Gizi Masyarakat | | | 707 | 707 | 707 | 20 | 707 | 5 | 407 | | |
| | Petugas mendapatakan update knowladge dalam pelayanan kiA Gizi | | 491 | 191 | 491 | 491 | 191 | 491 | | | |
| | Jumian kader yang mengikuti Peningkatan kapasitas pelayanan KIA Gizi | | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | | | |
| | Laporan Surveilans KIA Gizi | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | Kebijakan / Urat Kebijakan Pelayanan KIA Gizi | _ | , ; | , , | , , | , ; | , ; | , , | | | |
| | Jumiah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi | | 74 | 7 | 77 | 74 | 7 | 74 | | | |
| | DOKUMEN PERENCANAMI N.A. GIZI | Dokumen | ٠, | ٠, | ٦, | ٦, | ٠, | ٦, | | | |
| | Lapoi ari Shi erinig nipotifiota Norigerita Frekwensi lomba Ibu Hamil Sehat dan Baduta tingkat Kota Yk | Kali | 7 7 | 7 7 | 7 7 | 7 7 | 7 7 | 7 7 | | | |
| Kegiatan 2 : Promosi Kesehatan dan | | | | | | | | | 9,703,503, | | |
| Kesehatan | Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan | Institusi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | CT. | | |
| | Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan | Lokasi | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Section design in the section of the | | 0 | 0 | 6 | , | 0 | 6 | | | |
| | Frekwensi Siaran Radio. 1V dan media cetak mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| | Frekwensi Publikasi Program kesehatan melalui kegiatan massal | Kegiat-an | 1 | 7 | Ţ | 1 | 7 | . | | | |
| | | (Pa-meran Sekaten) | | | | | | | | | |
| | Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Profil PHBS | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Data layanan lansia di rumah sehat lansia | Dokumen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |

| | | | • | | ľ | Target Tahunan | an | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|---------------------|------|----------------|------|----------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | Tahin | | | | | | | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 Tahunan (Rp.) | r Penda naan | Instansi Pelaksana |
| | Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat | Kali 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Kegiatan 3 : Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Keria | | | | | | | | | 4,973,303, | | |
| | Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta | Sampel 2 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ł | | |
| | Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan | Dokumen | | 1 | | . ← | 1 | + | | | |
| | Data Kesehatan Lingkungan | Dokumen | | - | Ţ | + | 1 | 1 | | | |
| | Frekwensi Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Frekwensi pelaksanaan desinfo tentang penyehatan lingkungan | | . ~ | 2 | . ~ | . ~ | 2 - | 2 - | | | |
| | Data pengelolaan limbah medis cair | men | | | | | | | | | |
| | Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM | Kali | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya | kesma | 82 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan Indoor | Puskesma 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta | Dokumen 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Frekwensi sosialisai penerapan prinsip kesehatan kerja | Kali 2 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Dokumen kajian review EHRA | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 1.4.1 (c) CPR (Contraceptive Prevalence Rate) | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA | CANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA | | | | | | | | 11,447,01 7,898 | | Dinas Pengendalian |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Pelayanan | | | | | | | | | | Δ. | Penduduk dan |
| Keluarga Berencana | Pus yang Terlayani KB | PUS/ 1 | 1210 PUS 8 jenis | 8 jenis | 7 | 9 | 9 | 9 | | ~ ~ | Keluarga Berencana |
| | V Pariname V | Vogintan/ 1 | | 77 | 77 | 7 | 77 | 77 | | • | |
| | Rampung NB | keglatany i kampung k KB | | 14 kampung KB | 14 | T4 | 14 | 14 | | | |
| | Pembinaan dan EvaluasiProgram KB | Pertemua 16 Perte- | | 6 jenis | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | | n/Jenis | muan tingkat Kota, 62 pertemua n tingkat Kecamata | | | | | | | | |
| | Dombing Andrews Market | | | 2 ionic | , | , | , | , | | | |
| | Репріпаап кеютрок кв Рпа | > | iatan | z Jenis | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Pelatihan Konseling bagi Pendidik dan Konselor Sebaya | Orang 5 | 20 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | | | |
| | Sosialisasi Kesehatan Reproduksi melalui Media Cetak | Eksempla (r | | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Pertemuan Sosialisasi Kespro | Pertemua 26 | | 3 ienis | 4 | 4 | c | 2 | | | |
| | | .s | temua | | | | | | | | |
| | Lomba PIK R | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Dialog Remaja | Kegiatan 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | | | |

| | | | | | ř | Target Tahunan | ian | | Indikatif | | |
|--|---|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------|-------------|--------------------|-------|------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 1 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | Penda | Pelaksana |
| | | | 107 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Jumlah kegiatan pengukuhan dan pembentukan kampung KB | Kegiatan 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan yang disasar pembinaan dan evaluasi PIK R | Pertemua 204 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | lumlah yang disasar kegiatan lomba remaia dan PIK R | Kegiatan 3 | | 0 | c | 0 | c | c | | | |
| | Jumlah draft yang disasar penyusunan pedoman KIE Kespro wilayah | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Pembinaan | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Keluarga | Pembinaan Kegiatan Pembangunan Keluarga | е | | 3 jenis | e | cc | c | c | | | |
| | | n/ Jenis p | pertemua n | | | | | | | | |
| | Penguatan Kelompok BKS dan UPPKS | Kelompo C k | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pendampingan Kelompok BKS dan UPPKS | Jenis C | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Penguatan Jejaring Kegiatan Pembangunan Keluarga | Jenis 0 | _ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Pelatihan Kader BKS dan UPPKS | Pertemua 19 n/ Jenis per | 19 pertemua | 2 | æ | æ | æ | m | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Sosialisasi, motivasi dan pembinaan Ketahanan Keluarga (penerapan 8 fungsi Jenis keluarga)> keluarga muda (<5 tahun), anggota BKB, komunitas | | | - | - | - | ← | | | | |
| | Promosi hasil kelp. UPPKS | | | · . | m · | co · | co · | co · | | | |
| | Pembinaan dan seleksi bidang Pembangunan Keluarga | Kegiatan 0 | | - | 1 | | 1 | , | | | |
| | Jumlah pertemuan kelompok BKS | Pertemua 8 n BKB, BKR, BKL | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan pemantauan dan monitoring kelompok BKS | Kecamata 1 n | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan Forum BKB Kota dan Kecamatan | Pertemua 16 n | 9: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah Family Gathering BKL | Kegiatan 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah draft buku pegangan Program KKBPK | Draft 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan kelompok UPPKS | Pertemua 460 n | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah event kontak dagang kelompok UPPKS Kota Yogyakarta | Event 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan kelompok UPPKS dengan mitra kerja | Pertemua 1 n | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan pengurus BPC AKU Kota | Pertemua 17 n | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah kegiatan peningkatan kewirausahaan dan keterampilan kelompok UPPKS | Kegiatan 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 1.4.1. (g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat 1.4.1. (h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program PENINGKATAN | PROGRAM 1:Program PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL | | | | | | | | | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan | | | | | | | | | 10,963,98 1,391 | | Pendidikan |
| | Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket A, B dan C | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) A, B dan C | Kali 3 | | m r | m r | m r | m r | m r | | | |
| | Evaluasi nasil belajar (Enb) Paket A, b dan C | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |

| | | | | | F | Target Tahunan | ıan | | Indikatif | | |
|---|--|--------------------|-------|------|------|----------------|------|------|--------------------|-------|-----------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 1900 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 | Penda | Pelaksana |
| | | | | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Pengembangan Musyawarah Tutor Mata Pelajaran (MTMP) | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Pengelolaan insentif Tutor Kesetaraan | | 100 | 70 | | | | | | | |
| | Bimbingan Akreditasi lembaga PKBM | | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | | | |
| | Bimbingan Teknis Pengelola TBM | | 20 | 20 | 20 | 70 | 20 | 20 | | | |
| | Bimbingan TeknisProgram JBM | | 45 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah rombel Yang mendapat BOSDA SPNF SKB | | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |
| | Jumlah Pembentukan Kampung Sains | Kampung | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | |
| | Jumlah Pembentukan Kampung Literasi | Kampung | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Jumlah Peserta Diksar Kesakaan Saka Widya Budaya Bakti | Orang | | 320 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | | | | | | | | | 13,107,60 6,031 | | |
| | Pembinaan Layanan Lembaga PAUD | Jenis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | | an | | | | | | | | | |
| | Lomba Gugus PAUD dan PAUD berprestasi | | 15 | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD | | 949 | 820 | 875 | 006 | 918 | 918 | | | |
| | Pelatihan Pengelola PAUD | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
| | Peningkatan kompetensi pendidik PAUD | ∉ | 220 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | | | |
| | | asi | | | | | | | | | |
| | Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD SPS | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | | tersertifik asi | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan BOP PAUD | paga | 647 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | | |
| | Pendataan PAUD | | | 1 2 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | Gebvar PAUD | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| | Bimbingan uji kompetensi pendidik PAUD | | 100 | | | | | | | | |
| | Workshop dan Pendampingan Akreditasi PAUD | ю | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Frekuensi Pelaksanaan Jelajah Museum | | . 80 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 8 | | | |
| Kegiatan 3 : Pembinaan Lembaga | | | | | | | | | 3,444,911, | | |
| | Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus | Lembaga | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | F | | |
| | Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF | | 30 | 7 | 101 | 15 | 70 | 25 | | | |
| | Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Pendidikan Vokasional | | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | | | |
| | Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Dikmas | | 16 | | | | | | | | |
| | | Lomba | | | | | | | | | |
| | Jumlah Kejuaraan dalam Lomba Lembaga kursus Berprestasi | Kejuaraa n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Jumlah Kampung Kompeten | Kecamata | | 2 | æ | 4 | 2 | 9 | | | |
| | Lomba Rencana Bisnis | Juara | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 1.5.1 (d) Persentase kampung tangguh bencana | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program KESIAPSIAGAAN | PROGRAM 1:Program KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM | | | | | | | | 12,929,01 | ш | врво |
| | | | | | | | | | 4076 | | |

| | | | | | | Target Tahunan | nan | | Indikatif | | |
|---|--|--------|---------------|------|------|----------------|------|------|---------------------|-------|-----------|
| | | į | Tahun | | | | | | Alokasi Anggaran | Sumbe | Instansi |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ا د د | Penda | Pelaksana |
| | | | | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| Kegiatan 1 : Pencegahan Bahaya | | | | | | | | | | | |
| Bencana Alam | Rintisan Kampung Tangguh Bencana (KTB) | bund | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Pelatihan Penanggulangan bencana | | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Apel Siaga Bencana | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Kerja bakti kesiapsiagaan bencana | | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Kegiatan 2 : Penanganan Bencana Alam | | | | | | | | | | | |
| | Operasional Pusdalops PB | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Manajemen Logistik | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Pelatihan Kedaruratan Bencana | | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Assesmen dan Evakuasi Awal Bencana | _ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 3 : Rehabilitasi Dan | | | | | | | | | | | |
| Rekonstruksi Pasca Bencana | Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Monitoring daerah rawan bencana | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Kerja bakti pasca kejadian bencana | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 2.1.1. (a) Prevalensi Balita gizi buruk dan kurang | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1. Prevalensi stunting | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program PELAYANAN KESEHATAN DASAR | HATAN DASAR | | | | | | | | | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Upaya Kesehatan | | | | | | | | | 5,244,392, | | Kesehatan |
| Perorangan Puskesmas Danurejan I | | | | | | | | | 260 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-I | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 2 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II | | | | | | | | | 3,529,528, 533 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-II | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 3 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen | | | | | | | | | 7,103,793, 951 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GT | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 4 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I | | | | | | | | | 7,729,972, 976 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-I | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 5 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman | | | | | | | | | 4,636,534, 740 | | |
| = | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-II | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 6 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan | | | | | | | | | 5,136,493, 980 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GM | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 7 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis | Operasional Pelavanan Kesehatan Perorangan Puskesmas JT | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10,093,52 2,710 | | |
| Kegiatan 8 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I | | | | | | | | | 8,755,450, 550 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-I | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 9 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II | | | | | | | | | 5,288,579, 425 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-II | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | - | Towart Tohina | 5 | | ladilo+if | |
|---|--|-----------|---------------|------|------|---------------|------|----------|--------------------|-----------|
| | | | ' | | 2 | 19cr 1910 | | | Alokaci Sumbo | |
| | December / Mariates / Orthold Mariates | 200 | Tahun | | | | | | _ | Instansi |
| | Program/ neglatan/ Output neglatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 Penda | Pelaksana |
| | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 10 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton | | | | | | | | | 6,187,499, 136 | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KT | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Kegiatan 11 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron | | | | | | | | | 10,751,26 5,472 | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MJ | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Kegiatan 12 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan | | | | | | | | | 10,564,78 6,839 | |
| Kegiatan 13 : Upaya Kesehatan | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MG | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4,758,671, | |
| Perorangan Puskesmas Ngampilan | Operasional Pelavanaf Kesehatan Perorangan Puskesmas NG | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 214 | |
| Kegiatan 14 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman | | | | | | | | | 4,489,121, 702 | |
| , | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Kegiatan 15 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo | | | | | | | | | 14,929,15 1,860 | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas TR | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Kegiatan 16 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I | | | | | | | | | 13,338,94 8,885 | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-I | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Kegiatan 17 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II | | | | | | | | | 7,747,011, 337 | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-II | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Kegiatan 18 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan | | | | | | | | | 9,434,661, 196 | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas WB | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Kegiatan 19 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I | | | | | | | | | 5,585,854, 075 | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- I | Dokumen | ← - | н . | н . | | н . | н . | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesenatan keluarga | | | | | | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | | | П | 1 | 1 | н | н | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | + | + | 1 | | |
| Kegiatan 20 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II | | | | | | | | | 3,928,810, 920 | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- II | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | | | 7 | 7 | 1 | | . | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen | . | ₽ | ₽ | ↔ | ᆏ | ᆏ | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | | |
| Kegiatan 21 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtenge | | | | | | | | | 5,237,710, 520 | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

| | | | | | Ta | Target Tahunan | an | | | | |
|--|--|-----------|-------|------------|------|----------------|----------|--------------|-------------------|-------|-----------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | ionetani |
| _ | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 | Penda | Pelaksana |
| | | | 107 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | 4 | | | - | T | 7 | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | ₽ | | | - | 11 | 1 | | | |
| Kegiatan 22 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I | | | | | | | | | 4,571,022, 586 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I | Dokumen 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | 1 | | | 1 | 1 | н | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 23 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman | | | | | | | | | 6,636,749, 269 | | |
| = | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II | Dokumen 1 | 1 | | | | ₽ | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | 7 | | | 1 | 7 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | Η. | • | | П | ← | . | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | Т | • | | 1 | | 1 | | | |
| Kegiatan 24 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan | | | | | | | | | 3,708,903, 346 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM | Dokumen 1 | 1 | | | _ | 1 | 7 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | 1 | C 1 | | T | T | н | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | (-) | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 25 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis | | | | | | | | | 5,755,710, 865 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT | Dokumen 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 1 | , | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | 1 | (-) | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | 1 | | | 1 | T | 1 | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 26 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I | | | | | | | | | 2,246,487, 340 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I | | - | | | - | - | 7 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | - | | | - | ₩. | н | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | ₽ | . | | | н | ~ | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | | | - | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | *** | | |
|---|--|-----------|---------------|------|--------------|----------------|----------|----------|-----------------------------|---|-----------|
| | | | • | | | larget lanunan | ua l | | | | |
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi sumbe Anggaran r | | Instansi |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | _ | | Pelaksana |
| | | | i | | | | | | Tahunan naan (Rn) | _ | |
| Kegiatan 27 : Upaya Kesehatan | | | | | | | | | 3,801,674, | | |
| Masyarakat Puskesmas Kotagede II | | | | | | | | | 287 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II | Dokumen 1 | | _ | 1 | 7 | 1 | 7 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | | _ | 1 | 7 | 1 | 7 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | | П | T | ₽ | П | ₽ | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | | 1 | 1 | + | 1 | + | | | |
| Kegiatan 28 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton | | | | | | | | | 4,245,784, 130 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT | Dokumen 1 | | | 1 | + | 1 | + | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | | н | 1 | н | н | н | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 29 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron | | | | | | | | | 8,582,109, 200 | | |
| | Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ | Dokumen 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | | _ | н | П | н | П | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | | 1 | 1 | + | 1 | + | | | |
| Kegiatan 30 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan | | | | | | | | | 7,021,729, 656 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG | Dokumen 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | | | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | | _ | - | - | П | - | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 31 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan | | | | | | | | | 5,004,691, 104 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | | _ | 1 | T | T | T | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 32 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman | | | | | | | | | 3,244,675, 787 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | | 1 | 1 | . | 1 | . | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | | | , | | 1 | | | | |

| | | | | | Targe | Target Tahunan | | | Indikatif | | |
|---|--|-----------|-----------|------|-------|----------------|------|------|---------------------|-------|-----------|
| | | | | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | | 2018 | 2019 | 0202 | 1002 | 2022 | Anggaran 5 | Penda | Instansi |
| | | | 2017 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Taporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | ₽ | ₽ | П | П | П | | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Kegiatan 33 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo | | | | | | | | | 4,177,297, 605 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR | Dokumen 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | ₽ | 1 | ₽ | 1 | 1 | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | н | н | Н | Н | Н | | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | ₩ | П | ₩ | 1 | 1 | | | | |
| Kegiatan 34 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I | | | | | | | | | 3,042,973, 663 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I | | - | н | - | 1 | 1 | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | Н | 1 | - | 1 | 1 | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | 1 | ᆏ | ⊣ | ⊣ | ᆏ | | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Kegiatan 35 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II | | | | | | | | | 4,003,711, 163 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II | Dokumen 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | Н | 1 | - | 1 | 1 | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | н | н | н | н | н | | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | П | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Kegiatan 36 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan | | | | | | | | | 4,793,306, 906 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB | Dokumen 1 | н | - | - | Т | 1 | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | | - | 1 | - | 1 | 1 | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | Н | Н | н | Н | П | | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| PROGRAM 2 :Program PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | HATAN RUJUKAN | | | | | | | | | 莅 | Dinas |
| Kegiatan 1 : Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama" | | | | | | | | | 25,328,35 1,547 | ž | Kesehatan |
| | Operasional Pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama" | Bulan 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | | | |
| Kegiatan 2 : Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama" | | | | | | | | | 127,168,1 02,647 | | |
| | Oparasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama" | Dokumen 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | i | |
| PROGRAM 3 : Program UPAYA PELAYANAN KESEHATAN | IN KESEHATAN | | | | | | | | 0 | Ξ: | Dinas |
| kegiatan 1 : Pelayanan kesenatan Primer dan Rujukan | | | | | | | | | 64,605,30 2,641 | ž | Kesenatan |

| Program Prog | | | | ľ | | <u> </u> | Target Tahunan | au | | Indikatif | | |
|---|--|--|-----------------|---------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------|--------------------|
| Front Properties Properti | | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | Instansi |
| Treate the evactant of the contract of R. Parisa Pelayaran Necestration Appears to the contract of R. Parisa Pelayaran Necestration | | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 Tahunan (Bn.) | Penda naan | Pelaksana |
| Decimination host locordinate) & Evaluate Pelayorant Program Yankes Printer claim Pagiglatan Dust Hamber D | | Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melakkanakanPropram nelavanan kesehatan dasar | | 000 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | (1) | | |
| Data State Pelayaran Minimal kelegia darian kelegiaran kelentaras bada kelenasas bada kelenasas bada kelenasas bada kelenasan kelentaran kelentaran kelentaran kelentaran kelentaran kelentaran rujukan Sairt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan | | | н | T | 1 | T | T | | | |
| Dita Stand Region of Marine (ESM) Dokumen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | Data hasil Penilaian kinepja puskesmas | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Deportment Dep | | Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Runch Skift mendajarat kepitabaran keselatan kepatan keselatan tepakai KPG MTL Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | Data hasil ASPAK | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| State Control Section Co | | Laporan hasil sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL | | | ., | ., | , t | ., | , t | | | |
| Liporan Mesehann Liporan pelaksaman kegatan bersumberdana DAK Liporan Liporan Liporan Data National Puskesmas yang Memberikan pelayanan kesehatan hali kesehatan berjampan Bercana Bidang Kesehatan Kegiptan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | Kumah Sakit mendapatakan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan | _ | 7 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| 13: Pelayanan Kesehiatan Lumiah Puskesmas yang Memberikan pelayanan kesehiatan haji Laporan hadia Kesehiatan Laporan hadia Kesehiatan Dokumen MOU & Penyal Jamkesda Pengaman Pencana Bidang Kesehatan Frekversi Pempikanan Batra Komplementer Frekversi Pempikanan Kesehatan Frekversi Pempikanan Pempikanan Pempikanan Komplementer Frekversi Pempikanan Kesehatan Frekversi Pempikanan Kesehatan Pempikanan Komplementer Frekversi Pempikanan Kesehatan Frekversi Pempikanan Kesehatan Frekversi Pempikanan Kesehatan Frekversi Pempikanan Komplementer Frekversi Pempikan Pempikanan Komplementer | | Laporan pelaksanaan kegiatan bersumberdana DAK | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Unique Puckesmas yang Memberikan pelayanan kesehatan haji Suckesma 18 18 18 18 18 18 Laporan Nasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesus Laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Kegiatan 2 : Pelayanan Kesehatan Khusus | | | | | | | | | 2,289,766, 788 | | |
| Laboran hasi Kondinasi Residuan Pegaran Program Vankesus Laboran Laboran Laboran Batta Komplementer Laboran Labo | | Jumlah Puskesmas yang Memberikan pelayanan kesehatan haji | Puskesma 1 s | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| Terkversi Perekuran Kebaganah Samania Dokumen 1 | | Laporan hasil koordinasi & Evaluasi PelayananProgram Yankesus | Laporan 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Frekwensi Perdinan Penanganan Bernana Bidang Kesehatan Kegiatan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Prekwensi Pembinaan Battra Komplementer | | Frekwensi sosialisasi Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Dokumen MOU & Perwal Jankesda Dokumen Zarkewenis Jankesda Dokumen Zarkewenis Jankesda Dokumen Zarkewenis Jankesda Dokumen Zarkewenis Jankesda Jan | | Frekwensi Pembinaan Battra Komplementer | | _ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | |
| Sefanition Dokumen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | Kegiatan 3 : Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan | | | | | | | | | 114,255,6 31,546 | | |
| ekanisme pelayanan Lambead dan jaminan Kali 31 31 31 31 31 sehatan. Lintas Sektor dan masyarakat condrainsi perencranaan, pelaksanaan dan evaluasi Laporan 1 <td></td> <td>Dokumen MOU & Perwal Jamkesda</td> <td>neur</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> | | Dokumen MOU & Perwal Jamkesda | neur | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| koordinasi perencanaan. pelaksanaan dan evaluasi Laporan 1 1 1 1 1 nah nah 12 12 12 12 12 12 seperatan untuk masyarakat Kota Yk yang tidak Kegiatan 12 12 12 12 12 niksaan kesehatan bang bertama PSC 119 YES 13 1 | | Frekwensi sosialisasi mekanisme pelayanan Jamkesda dan jaminan persalinan. Petugas Kesehatan. Lintas Sektor dan masyarakat | | 11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | |
| esehatan untuk masyarakat Kota Yk yang tidak kegiatan 12 | | Lapoban hasil kegiatan koordinasi perencanaan. pelaksanaan dan evaluasi Jamkesda serta persalinan | Laporan 1 | _ | н | н | н | н | н | | | |
| instan belayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan sakase hatan bagic LIB YES dan sakase hatan bagi Anggota DPRD beserta and sakan kesehatan bagi Anggota DPRD beserta and sakan kesehatan bagi Anggota DPRD beserta and sakan kesehatan bagistem JKN Laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | Jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat Kota Yk yang tidak | | .2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| ig. evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN Laporan 1 | | memiliki jaminan kesehatan. pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan Sego Segawe dan pemeriksaan kesehatanbagi Anggota DPRD beserta keluarga Inti serta persalinan | | ı | ; | ! | ! | ! | ! | | | |
| now dan pendampingan akreditasi puskesmas Laporan 1 2 2211,048,972 372,11,048,972 | | Laporan hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN | Laporan 1 | | 7 | 7 | . | 7 | T, | | | |
| nev dan pendampingan akreditasi puskesmas Laporan 1 1 1 1 8,211,048, 972 sgiatan PSC 119 VES Dokumen 12 12 12 12 12 972 nupdate knowladge dalam pelayanan KIA Gizi Orang 491 491 491 491 491 491 491 407 | | Laporan hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah Kota Yk | Laporan 1 | | н, | н, | ₽ , | н, | н, | | | |
| egiatan PSC 119 YES Dokumen 12 12 12 12 12 972 PORTING A PORTING | enciseran O nee clanned . Lucteine X | Laporan sosialisasi. monev dan pendampingan akreditasi puskesmas | Laporan | | | | - | | - | 8 2 1 1 0 1 8 | | |
| Eglatan PSC 119 TrS DOKUMen 12 407 | negiatan 4 : Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119 | | | , | ç | ç | ç | ç | ç | 6,411,046, 972 | | |
| 1,224,437, and date knowladge dalam pelayanan KIA Gizi Orang 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 | | Laporan pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES | Dokumen | 7. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | | | |
| Orang 491 491 491 491 491 491 Orang 318 318 318 318 318 318 0rang 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | PROGRAM 4 :Program PENINGKATAN K Kegiatan 1 : Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat | ESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | 7,274,437, 407 | 0 7 | Dinas Kesehatan |
| Orang 318 318 318 318 318 318 318 0 | | Petugas mendapatakan update knowladge dalam pelayanan KIA Gizi | | 191 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | | | |
| Definition 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | | Jumlah kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas pelayanan KIA Gizi | ١, | 118 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | | | |
| Faskes 24 24 24 24 24 Dokumen 1 1 1 1 1 1 | | Laporati Sul Venatis N.A. Gizi Kebijakan / Draf Kebijakan Pelavanan KIA Gizi | | | CT 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Dokumen 1 1 1 1 1 | | Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | | Dokumen Perencanaan KIA Gizi | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | Target Tahunan | Jan | | | | |
|--|--|----------------------|---------------|------|------|----------------|-------------|------|-------------------|-------|-----------|
| | | | Tahun | | | | | | Anggaran | Sumbe | Instansi |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 | Penda | Pelaksana |
| | | | 707 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Laporan Skrening Hipotiroid Kongenital | ran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Frekwensi lomba Ibu Hamil Sehat dan Baduta tingkat Kota Yk | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Kegiatan 2 : Promosi Kesehatan dan Pemberdavaan Masvarakat di Bidang | | | | | | | | | 9,703,503, 719 | | |
| Kesehatan | Jumlah Institusi Kesehatan vang melaksanakan Promosi Kesehatan | Institusi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | | | |
| | Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | | (Masjid) | | | | | | | | | |
| | Frekwensi Siaran Radio. TV dan media cetak mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan | Kali | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| | Frekwensi PublikasiProgram kesehatan melalui kegiatan massal | Kegiatan | - | | | - | - | | | | |
| | | (Pameran Sekaten) | 1 | • | • | , | , | 1 | | | |
| | Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 7 | + | 1 | | | |
| | Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Profil PHBS | | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | | | |
| | Data layanan lansia di rumah sehat lansia | umen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat | Kali | 33 | ж | ж | 8 | ж | ж | | | |
| Kegiatan 3 : Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja | | | | | | | | | 4,973,303, 882 | | |
| | Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta | Sampel | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | |
| | Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan | Sekolah | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Data Kesehatan Lingkungan | ımen | 1 | 1 | 1 | , | 1 | 1 | | | |
| | Frekwensi Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | | | |
| | Frekwensi pelaksanaan desinfo tentang penyehatan lingkungan | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Data pengelolaan limbah medis cair | neur | 1 | T | T | - | | 1 | | | |
| | Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM | Kali | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya | Puskesma 18 s | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| | Jumlah Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor | | 2 | r. | r. | Ŋ | Ŋ | 2 | | | |
| | Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Frekwensi sosialisai penerapan prinsip kesehatan kerja | Kali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Dokumen kajian review EHRA | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| PROGRAM 5 : Program REGULASI DAN PE | PROGRAM 5 :Program REGULASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN | | | | | | | | | ۵ | Dinas |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang | | | | | | | | | 3,179,867, 601 | ž | Kesehatan |
| Kesehatan | Peserta Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Masyarakat di Kota Yogvakarta | Orang | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | | |
| | Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga | Orang | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | Sertifikasi masyarakat Pengelola Pedagang Kaki Lima Pangan. Pengelola jasa boga dan turnah makan. Pengelola Depot Alr Wilnum dalam kesmasan. | Orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | pengendia kantini sekolari di kota 108yakana | | | | | | | | | | |

| | | | | | | Target Tahunan | a | | Indikatif | | |
|---|---|-------------|--------|------|------|----------------|------------|------|--------------------|------------|-----------------------|
| | | | Tahiin | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| - | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | 707 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Orang | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | | | |
| | Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan Dokumen sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi | Dokumen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang manfaat SPP_IRT | Orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyeleggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan | Dokumen | н | ₽ | ₽ | н | П | н | | | |
| | Frekuensi sarasehan tentang Raperda regulasi dan sertifikasi sarana tenaga kesehatan | Kali | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | Laporan monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi antar kabupaten | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Produk Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | T | T | 1 | | | |
| Kegiatan 2 : Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya | | | | | | | | | 3,256,632, 395 | | |
| Manusia Kesehatan (SDMK) | Tenaga kesehatan teladan terpilih di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta | Orang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Fasilitasi PKL (Praktek Kerja Lapangan) mahasiswa institusi kesehatan di linakungan Dinkes Kota Yogvakarta | Bulan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Dokumen perencanaan SDMK | Dokumen | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Frekwensi pembinaan SDMK | Kali | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | |
| | Laporan hasil Penilaian kompetensi tenaga kesehatan | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Dokter puskesmas mendapat sertifikat ATLS dan atau sertifikat ACLS | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | |
| | Perawat mendapatkan sertifikat Pelatihan PPGD/BTCLS | | 10 | 10 | 9 2 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Tenaga kesehatan mendapatkan sertifikat pelatihan Erakuansi Dambarian Data SDAM tingkat Kota Vogyakarta | Orang | 52 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Laporan Monitoring dan evaluasi nakes UPT | Laporan | 1 2 | ٦ ٢ | ٦ ٢- | 1 2 | 7 — | 1 2 | | | |
| | Peserta seminar/kursus/workshop | Orang | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | | | |
| Kegiatan 3 : Pengelolaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | | | | | | | | | 56,273,96 0,771 | | |
| | Obat dan vaksin untuk layanan kesehatan tersedia | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Data Monitoring penggunaan obat rasional Data ketersediaan obat dan vaksin | Dokumen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jumlah tenaga kefarmasian di Kota Yogyakarta mendapatkan Bimbingan taknis tantang kefarmasian | Orang | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |
| | Jumlah tenaga analis lab Kesehatan yang mendapatkan update knowledge | Orang | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | tentang pengelolaan laboraturium sesuai standar | | | | | | | | | | |
| | Integrasi penggunaan aplikasi e-logistic obat | | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Data penghapusan obat. vaksin dan alat kesehatan rusak/kadaluarsa | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Alat kesehatan di Puskesmas dikelola dan dilakukan pemeliharaan sesuai | Puskesma 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| | standar Jumlah penjamah makanan dan minuman yang dibina | S Orang | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | | |
| | Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi keamanan pangan jajan anak sekolah | _ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Jumlah sample pangan jajan anak sekolah yang diperiksa | pel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Frekuensi Lomba Sekolah Dasar pangan jajanan anak sekolah | Kali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

| | | | | | F | Target Tahunan | an | | | | |
|---|--|---------------|-------|------------|------|----------------|------|------|--------------------|------------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | /107 | | | | | | Tahunan r (Rp.) | naan | |
| | Mobil distribusi farmasi tersedia | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Sarana pengolah data kefarmasian tersedia | Laporan | + | + | + | 1 | ₽ | 1 | | | |
| Mobil sampling makanan te | Mobil sampling makanan tersedia N PENGENDALIAN PENYAKIT | | ₽ | + 1 | ₽ | П | 1 | 1 | | č | Dinac |
| Kegiatan 1: Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | 1,431,615, | 2 % | Kesehatan |
| | Laporan survailens epidemiologi | Laboran | 3 | 3 | m | m | 8 | m | | | |
| | Laporan penyelidikan epidemiologi | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Laporan survailans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD31) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Buletin sistem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) | Edisi | 52 | 52 | 52 | 25 | 52 | 25 | | | |
| | Laporan sistem informasi kesehatan puskesmas dan rumah sakit | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Laporan penyebab kematian (couse of death) | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Laporan komunikasi data prioritas (KOMDAT) | Laporan | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | |
| | Laporan survey kepuasan masyarakat | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Data Profil kesehatan | L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | jumlah Aplikasi-server-database SIMPUS yang berjalan optimal | Sistem | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| | Websit kesehatan berjalan optimal | Sistem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 2 : Pencegahan. Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi | | | | | | | | | 15,738,11 2,374 | | |
| | Data DBD (Demam Berdarah Dengue) | c | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KTB | Fokus | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | l anoran survei angka hehas jentik kelurahan | lanoran | - | 1 | _ | , | - | , | | | |
| | Laboran pengendalian DBD | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Tanama DATE (managadalisa manaki tubasanlaris) | | 1 ; | 1; | 1 ; | 1 ; | ; | ; ; | | | |
| | Laporari P216 (perigenualiari periyakit tuberculosis) | | 12 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | | | |
| | Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB | Orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Data Permasalahan TB-HIV | _ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Jumlah petugas dalam penguatan jejaring internal petugas TB puskesmas dan RS | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | |
| | Jumlah petugas Lab TB di fasyankes yang mendapatkan on the job training | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Jumlah fasyankes yang mendapatkan on the job training TB MDR | Fasyanke s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan data diare | Dokumen | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | Laporan pelacakan kasus kusta | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Jumlah data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS | Data | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | | | |
| | Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual) | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Jumlah laporan Peningkatan kapasitas layanan HIV | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Data imunisasi. pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru | _ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) | | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | | | |
| | Jumiah Peserta penguatan layanan praktisi swasta | | ۶ , | ۶ , | ۷ ر | ۶ , | , ۶ | ۶ , | | | |
| | Data Audit kasus Kemarlah penyakir menular bagi KS dan puskesmas Erakupati potialisati tantang pagandalian panyakit manular | Dokumen | 25 | 25 | 2, | 2 2 | 2 | 2 2 | | | |
| | FIGNACIOS SOSIGISAST CETTAINS PRIBETINAMAI PETIVANIA | Nail | 6.7 | 67 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | | | |

| | | | | | Ta | Target Tahunan | u. | | Indikatif | | |
|---|--|-----------|-------|-----------|-----------|----------------|----------|-----------|-------------------|-------|-------------------------|
| | | | Tahun | | | | | | | Sumbe | |
| _ | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | Penda | instansi Pelaksana |
| | | | 7107 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya | Orang | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | | | |
| Kegiatan 3 : Pencegahan. Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan | | | | | | | | | 984,484,0 91 | | |
| Jiwa | Jumlah peserta Workshop Pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa | Orang | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | Jumlah WUS (Wanita Usia Subur) yang di periksa untuk deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA | Orang | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | | | |
| | jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular pada populasi resiko usia > 15 th | Orang | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | | | |
| | Masyarakat lintasProgram. petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM | Orang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Data evaluasi kegiatan suveilans PTM puskesmas | Dokumen | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jumlah Peserta Up date Knowledge penyakit tidak menular | Orang | 84 | 84 | 84 | 84 | | 84 | | | |
| | Peningkatan kapasitas POSBINDU | Orang | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 2.2.2. (c) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program PEMBINAAN KETAHANAN PANGAN | HANAN PANGAN | | | | | | | | | ۵ | Dinas |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan | | | | | | | | | 2,845,536, 432 | ه ه | Pertanian dan Pangan |
| | Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) | dokumen | T | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | | | |
| | | | | Analisa | Analisa | Analisa | Analisa | Analisa | | | |
| | | | | Pola | Pola | Pola | Pola | Pola | | | |
| | | | | Pangan | Pangan | Pangan | Pangan | Pangan | | | |
| | | | | Harapan | Harapan | Harapan | Harapan | Harapan | | | |
| | | | | (PPH) | (PPH) | (PPH) | (PPH) | (PPH) | | | |
| | Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) | dokumen 1 | 1 | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | | | |
| | | | | Analisa | Analisa | Analisa | Analisa | Analisa | | | |
| | | | | Sistem | Sistem | Sistem | Sistem | Sistem | | | |
| | | | | Kewaspa | Kewaspa | Kewaspa | Kewaspa | Kewaspa | | | |
| | | | | daan | daan | daan | daan | daan | | | |
| | | | | Pangan | Pangan | Pangan | Pangan | Pangan | | | |
| | | | | dan Gizi | dan Gizi | dan Gizi | dan Gizi | dan Gizi | | | |
| | | | | (SKPG) | (SKPG) | (SKPG) | (SKPG) | (SKPG) | | | |
| | Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan | kali | 3 | Frekwens | Frekwens | Frekwens | Frekwens | Frekwens | | | |
| | | | | _ | _ | | _ | _ | | | |
| | | | | Pameran, | Pameran, | Pameran, | Pameran, | Pameran, | | | |
| | | | | Promosi, | Promosi, | Promosi, | Promosi, | Promosi, | | | |
| | | | | dan | dan | dan | dan | dan | | | |
| | | | | Informasi | Informasi | Informasi | - | Informasi | | | |
| | | | | Pangan | Pangan | Pangan | Pangan | Pangan | | | |

| | | | | | Target Tahunan | nan | | Indikatif | | |
|--|--|-----------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------|------------|-----------------------|
| | | Ta | Tahun | | | | | | Sumbe | , |
| _ | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan Da | | 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | 4 | 1 10 | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman) | kali 7 | Sosia | Sosialisasi Sosialisasi | isi Sosialisasi | Sosialisasi | Sosialisasi | | | |
| | | | Pangan | | | _ | Pangan | | | |
| | | | B2SA | | | B2SA | B2SA | | | |
| | | | (Ber | Ξ | | (Beragam | (Beragam | | | |
| | | | Begizi | | | Begizi | Begizi | | | |
| | | | Seim | g | | Seimbang | Seimbang | | | |
| | | | Aman) | | Aman) | | Aman) | | | |
| | Lomba Bidang Ketahanan Pangan | kali 3 | Lomba | oa Lomba | Lomba | Lomba | Lomba | | | |
| | | | Ketal | 2 | ď | Ketahana | Bidalig Ketahana | | | |
| | | | n Par | | | | n Pangan | | | |
| | Bimtek Kampung Pangan Lestari | kali 14 | Bimtek | | | | Bimtek | | | |
| | | | Kam | Kampung Kampung | g Kampung | | Kampung | | | |
| | | | Pangan | | _ | Pangan | Pangan | | | |
| | | | Lestari | | | Lestari | Lestari | | | |
| | Penyuluhan Ketahanan Pangan | jenis 3 | Peny | Penyuluh Penyuluh | h Penyuluh | Penyuluh | Penyuluh | | | |
| | | | an | | | an | an | | | |
| | | | Keta | | | Ketahana | Ketahana | | | |
| | | | n Par | n Pangan n Pangan | n n Pangan | n Pangan | n Pangan | | | |
| Kegiatan 2 : Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan | | | | | | | | 672,248,7 49 | | |
| | Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan | dokumen 1 | Lapo | aporan Laporan | Laporan | Laporan | Laporan | | | |
| | | | Koor | | | Koordinas | Koordinas | | | |
| | | | i Dewan | an i Dewan | | | Dewan | | | |
| | | | Keta | _ | _ | Ketahana | Ketahana | | | |
| | | | n Par | | | n Pangan | n Pangan | | | |
| | Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | dokumen 1 | Doku | | | Dokumen | Dokumen | | | |
| | | | Peny | Penyusun Penyusun | | Penyusun | Penyusun | | | |
| | | | an N | ca | | an Neraca | an Neraca | | | |
| | | | Bahan | | | Bahan | Bahan | | | |
| | | | Mak | Ę. | | Makanan | Makanan | | | |
| | Cocializati Dieteribusi bosas pass | :ic3 | (NBM) Socialis | (NBM) (NBM) | (NBM) | (NBM) | (NBM) | | | |
| | | | Distr | | | Distribusi | Distribusi | | | |
| | | | beras | | | beras | beras | | | |
| | | | baru | | baru | baru | baru | | | |
| PROGRAM 2 :Program PEMBINAAN KEHEWANAN DAN PERIKANAN | WANAN DAN PERIKANAN | | | | | | | 11,021,80 | ٥ | Dinas |
| | | | | | | | | 3,913 | 4 | Pertanian dan |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Usaha dan | | | | | | | | | | Pangan |
| Budidaya Kehewanan dan Perikanan | Pelayanan Poliklinik Hewan | bulan 12 | Pela | Pelayana Pelayana | a Pelayana | Pelayana | Pelayana | | | |
| | | | : : | | | : : | - - | | | |
| | | | Poliklini | Poliklinik Poliklinik | k Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | |
| | | | awar. | | | newali | Lewall | | | |

| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|------------|------------|------------|---|---|------------------|-------|----------|
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa | | Tahin | | | | | | Alokası | Sumbe | |
| Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa | Satuan | | 9 | 0,00 | 0000 | 7000 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Anggaran | - 3 | Instansi |
| Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa | | 2017 | 2018 | 5019 | 2020 | 707 | 7707 | n . | 200 | reidksd |
| Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa | | | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | persen | 100 | Cakupan | Cakupan | | Cakupan | | | | |
| | | | Pengenda | Pengenda | | Pengenda Pengenda | Pengenda | | | |
| | | | lian | lian | lian | lian | lian | | | |
| | | | penyakit | penyakit | penyakit | penyakit | penyakit | | | |
| | | | zoonosa | zoonosa | zoonosa | zoonosa | zoonosa | | | |
| Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik | lokasi | 2 | Balai | Balai | Balai | Balai | Balai | | | |
| | | | Benih | Benih | Benih | Benih | Benih | | | |
| | | | Ikan yang | Ikan yang | Ikan yang | Ikan yang | Ikan yang | | | |
| | | | terkelola | terkelola | terkelola | terkelola | terkelola | | | |
| | | | dengan | dengan | dengan | dengan | dengan | | | |
| | | | baik | baik | baik | baik | baik | | | |
| Penguatan jejaring komunitas | ≖ | 2 | Penguata | Penguata | Penguata | Penguata | Penguata | | | |
| | | | n jejaring | n jejaring | n jejaring | n jejaring | | | | |
| | | | komunita | | | | | | | |
| | | | v | | | v | | | | |
| Dokumen Hudating Data Beternakan | L demission | - | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen Dokumen Dokumen | Dokumen | | | |
| Condition operating Card Common | | 1 | Ladating | Ladating | Ladating. | Ladating | Ladating | | | |
| | | | Updating | | Updating | Updating | | | | |
| | | | Data | Data | Data | Data | | | | |
| | | | Peternak | Peternak | Peternak | Peternak | | | | |
| | | | an | an | an | an | an | | | |
| Dokumen Updating Data Perikanan | dokumen 1 | n 1 | Dokumen | Dokumen | Dokumen | | Dokumen | | | |
| | | | Updating | | Updating | Updating | Updating | | | |
| | | | Data | | | | | | | |
| | | | Perikanan | Perikanan | Perikanan | Perikanan Perikanan Perikanan | Perikanan | | | |
| Restocking Ikan | bibit | 20,000 | Restockin | Restockin | Restockin | Restockin Restockin Restockin | Restockin | | | |
| | | | g Ikan | | g Ikan | g Ikan | g Ikan | | | |
| Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan | in kelompok | ok 2 | Peningkat | | Peningkat | Peningkat Peningkat Peningkat Peningkat | Peningkat | | | |
| | | | an | an | an | an | | | | |
| | | | Sumber | Sumber | Sumber | Sumber | Sumber | | | |
| | | | Daya | Daya | Daya | Daya | Daya | | | |
| | | | Kelompok | | Kelompok | Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok | Kelompok | | | |
| | | | Peternak | | Peternak | Peternak | Peternak | | | |
| | | | an | | | | | | | |
| Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan | Klp | 11 | Peningkat | Peningkat | Peningkat | Peningkat Peningkat Peningkat | Peningkat | | | |
| | | | an | an | an | an | an | | | |
| | | | Sumber | Sumber | Sumber | Sumber | Sumber | | | |
| | | | Dava | Dava | Dava | Dava | Dava | | | |
| | | | Kelompok | Kelompok | Kelompok | Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok | Kelompok | | | |
| | | | Perikanan | Perikanan | Perikanan | Perikanan Perikanan Perikanan | Perikanan | | | |

| | | Instansi a Pelaksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas | Pertanian dan | Pangan | | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|------|--|-----------------------------------|-------------------|----|----------|-------|--------|--------------------------------------|----------|---------|----------|---|-----------|-----------|----------|---------|----------|---------|-----------|--------|------------------------------|---------|--------|-------|----------------------|-----------------|--|-----------|------------|-----|----------|---------|----------|--------|-----------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--------|--|
| Indikatif | Alokasi Sumbe | Anggaran r 5 Penda | ⊑ | (Kp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,323,488, | 490 | | | | |
| | | 2022 | | Pembinaa | n dan | Pengawas Pengawas | au | Kualitas | Hewan | Qurban | | | Keamana | n Pangan | Jumlah | ha vang | dipantau. | dibina & | diawasi | mutu dan | keaman- | an pang- | annya | Pelayana | n Rumah | Potong | Hewan | | Laborator is | Frekuensi | Promosi, | Informasi, | dan | | n hasil | peternak | | perikanan | | | er deV | vang | terkelola | dengan | |
| nan | | 2021 | | Pembinaa Pembinaa Pembinaa Pembinaa | n dan | Pengawas | au | Kualitas | Hewan | Qurban | | _ | | n Pangan | Jumlan | ha vang | dipantau. | dibina & | diawasi | mutu dan | keaman- | an pan- | gannya | Pelayana | n Rumah | Potong | Hewan | | Laborator is | Frekuensi | Promosi, | Informasi, | dan | | n hasil | peternak | | perikanan | | | op. No. | vang | terkelola | dengan | |
| Target Tahunan | | 2020 | | Pembinaa | n dan | Pengawas Pengawas | a | Kualitas | Hewan | Qurban | | | | n Pangan | Jumlan | ha vang | dipantau. | dibina & | diawasi | mutu dan | keaman- | an pang- | annya | Pelayana | n Rumah | Potong | Hewan | | Laborator is | Frekuensi | Promosi, | Informasi, | dan | | n hasil | peternak | | perikanan | | | No. de N | vang | terkelola | dengan | |
| 1 | | 2019 | | Pembinaa | n dan | | | Kualitas | Hewan | Qurban | | | Keamana | n Pangan | Jumlan | ha vang | dipantau. | dibina & | diawasi | mutu dan | keaman- | an pang- | annya | Pelayana | n Rumah | Potong | Hewan | | Laborator is | | Promosi, | Informasi, | dan | | n hasil | peternak | | perikanan | | | Nob. is | vang | terkelola | dengan | |
| | | 2018 | | Pembinaa | n dan | Pengawas | au | Kualitas | Hewan | Qurban | Sosialisasi | Mutu dan | Keamana | n Pangan | Jumlah | ha vang | dipantau. | dibina & | diawasi | mutu dan | keaman- | an panga- | nnya | Pelayana | n Rumah | Potong | Hewan | Uji Mutu | Laborator is | Frekuensi | Promosi, | Informasi, | dan | pemasara | n hasil | peternak | an dan | perikanan | | | Nob. | Vang | terkelola | dengan | |
| | T 40 | Dasar | 2017 | 415 | 1 | | | | | | 7 | | | : | 149 | | | | | | | | | 12 | | | | 2200 | | 6 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | Satuan | | TPH | | | | | | | ≖ | | | | nut | | | | | | | | | bulan | | | | sambel | | kali | | | | | | | | | | | ion lo | IONASI | | | |
| | | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | | Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Ourban | | | | | | | Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan | | | | Jumlah unit usaha yang dipantau, dibina dan diawasi mutu dan keamanan | pangamiya | | | | | | | | Pelayanan Rumah Potong Hewan | | | | Uji Mutu Laboratoris | | Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan | perikanan | | | | | | | | RTANIAN | | I all a second a la la la second seco | heddil yalig telheldia deligali balik | | | |
| | | | | Kegiatan 2 : Pengawasan Mutu | Komoditas Kehewanan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROGRAM 3: Program PEMBINAAN PERTANIAN | Kegiatan 1 : Pembinaan Usaha dan | Budidaya Pertanian | | | | |

| | | | | | Ta | Target Tahunan | | | Indikatif | | |
|---|--|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 970 | 9706 | 000 | 1000 | ,,,,, | Anggaran | - 6000 | Instansi |
| | | | 2017 | 2018 | 5019 | 7070 | 707 | 7707 | n . | | Pelaksana |
| | | | | | | | | | (Rn.) | naan | |
| | Kelompok tani /Gapoktan yang dibina | poktan/ 1 | 153/45 | Kelombok | Kelombok | Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok | Kelombok | Kelombok | (1) | | |
| | | _ | ! | tani/ | tani/ | tani/ | tani/ | tani/ | | | |
| | | | | ktan | Gapoktan | tan | ktan | Gapoktan | | | |
| | | | | yang | yang | | yang | yang | | | |
| | | | | _ | dibina | | | dibina | | | |
| | Kontes tanaman hias | Kl 1 | | Kontes | Kontes | Kontes | Kontes | Kontes | | | |
| | | | | tanaman | tanaman | ıan | tanaman | tanaman | | | |
| | | | | hias | hias | hias | hias | hias | | | |
| | Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida | Kl 4 | | Monitorin | Monitorin | Ë | Monitorin | Monitorin | | | |
| | | | | g dan | | g dan | g dan | g dan | | | |
| | | | | gawas | gawas | gawas | pengawas | pengawas | | | |
| | | | | au au | au au | | an. | au . | | | |
| | | | | peredara | peredara | _ | peredara | peredara | | | |
| | | | | ¥ | n pupuk |)nk | n pupuk | n pupuk | | | |
| | | | | | dan | | dan | dan | | | |
| | | | | pestisida | pestisida | | pestisida | pestisida | | | |
| | Dokumen data statistik pertanian | dokumen 1 | | men | Dokumen | men | Dokumen | Dokumen | | | |
| | | | | | data | | data | data | | | |
| | | | | statistik | statistik | statistik | statistik | statistik | | | |
| | | | | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | | | |
| | Kampung Agro Rejowinangun | lokasi 1 | | Kampung | Kampung | Kampung | Kampung | Kampung | | | |
| | | | | Agro | Agro | | Agro | Agro | | | |
| | | | | ina | Rejowina | Rejowina | Rejowina | Rejowina | | | |
| | | | | | ugu | | ugu | ungu | | | |
| | Gelar Potensi Pertanian | kali 1 | | | Gelar | | Gelar | Gelar | | | |
| | | | | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi | | | |
| | | | | Pertanian | Pertanian | Pertanian | Pertanian | Pertanian | | | |
| Kegiatan 2 : Pengawasan Mutu | | | | | | | | | 547,384,7 | | |
| Komoditas Pertanian | | | | | | | | | 20 | | |
| | Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan | bulan 1 | 12 | nta | Pemanta | nta | Pemanta | Pemanta | | | |
| | | | | uan, | uan, | uan, | uan, | uan, | | | |
| | | | | pengawas pengawas | pengawas | 32 | pengawas | pengawas | | | |
| | | | | | an dan | | an dan | andan | | | |
| | | | | g | pembinaa | æ | pembinaa | pembinaa | | | |
| | | | | n mutu | n mutu | | n mutu | n mutu | | | |
| | | | | pangan | pangan | | pangan | pangan | | | |
| | Uji mutu bahan pangan | sambel | 250 | Uji mutu babaa | Uji mutu babar | Uji mutu bahar | Uji mutu babar | Uji mutu babar | | | |
| | | | | מפומות | Dangan | | Dallall | מפומנו | | | |
| Tijijan 3 - Kehidinan sehat dan sejahteraan | reco | | | Dailgail Bail | Daligali | parigari | Daligali | pa i ga i | | | |
| INDIVATOR CDC's | 0.4.1 * Liver Lynn Spires in the | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG S | 3.1.1* Jumian Kematian Ibu | | | | | | | | | | |
| | 3.1.2* Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar | Idar | | | | | | | | | |
| | 3.2.2. (a) Angka Kematian bayl 3.2.2. (h) Cabinana bolinnahan Hainomal Child Imminatation (1101) | | | | | | | | | | |
| | 2.1 (A) Description Residential Contraction (Contraction Contraction Contracti | a INAC | Juma / circ | and solver | | The contract of | ad accaid | , and a consider | actodes of the | Jackaca I | 203 |
| | 5.5.1. (a) Persentase Orang Density Cermiess my AiDs (100 Hammi, Pasien 16), 1 | dsiell livis, w | alia/ ualis | iad' ianiiag | ggana napz | d udii walgo | niidaii leii | naga bellid | asyalakatal | ı) memapo | ILVAII |
| | Pemeriksaan niv Aids | | | | | | | | | | |

| | | | | | Tai | Target Tahunan | <u></u> | | Indikatif | | |
|---|--|----------------|------------|-------------|------|----------------|---------|------|--------------------|-------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 1 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | 7107 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | 3.3.2 Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | | | | | | | | | | |
| | 3.4.1 Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | an sesuai star | ndar | | | | | | | | |
| | 3.4.1. (b) Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | sesuai standa | _ | | | | | | | | |
| | 3.4.2. (a) Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart | ıyanan keseh | atan sesua | ii standart | | | | | | | |
| | 3.8.1 Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar | | | | | | | | | | |
| | 3.8.2. (a) Persentase penduduk yang mempunyai JKN | | | | | | | | | | |
| | 3.b.1. (a) Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program PELAYANAN KESEHATAN DASAR | HATAN DASAR | | | | | | | | | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Upaya Kesehatan | | | | | | | | | 5,244,392, | _ | Kesehatan |
| Perorangan Puskesmas Danurejan I | | | | | | | | | 260 | | |
| Kegiatan 2 - Hnava Kesehatan | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-I | Bulan 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 5 2 9 5 2 8 | | |
| Perorangan Puskesmas Danurejan II | | | | | | | | | 533 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-II | Bulan 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 3 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen | | | | | | | | | 7,103,793, 951 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GT | Bulan 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 4 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman | _ | | | | | | | | 7,729,972, 976 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-I | Bulan 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 5 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman | | | | | | | | | 4,636,534, 740 | | |
| = | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-II | Bulan 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 6 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan | | | | | | | | | 5,136,493, 980 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GM | Bulan 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 7 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis | | | | | | | | | 10,093,52 2,710 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas JT | Bulan 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 8 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I | | | | | | | | | 8,755,450, 550 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-I | Bulan 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 9 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II | | | | | | | | | 5,288,579, 425 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-II | Bulan 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 10 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton | | | | | | | | | 6,187,499, 136 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KT | Bulan 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 11 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron | | | | | | | | | 10,751,26 5,472 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MJ | Bulan 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 12 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan | | | | | | | | | 10,564,78 6,839 | | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MG | Bulan 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 13 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan | | | | | | | | | 4,758,671, 214 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 12 | Target Tahunan | an | | Indikatif | |
|--|--|--|-------|------|------|----------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Z, | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Instansi Pelaksana |
| | | | 7107 | | | | | | Tahunan naan (Rp.) | |
| | Operasional Pelayanaf Kesehatan Perorangan Puskesmas NG | Bulan 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Kegiatan 14 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman | | | | | | | | | 4,489,121, 702 | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA | Bulan 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Kegiatan 15 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo | | | | | | | | | 14,929,15 1,860 | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas TR | Bulan 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Kegiatan 16 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I | | | | | | | | | 13,338,94 8,885 | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-I | Bulan 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Kegiatan 17 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II | | e le constant de la c | ć. | ć | ç | ç | ć | ţ | 7,747,011, 337 | |
| Kegiatan 18 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan | | | | y. | 71 | 77 | 71 | 77 | 9,434,661, 196 | |
| | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas WB | Bulan 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Kegiatan 19 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I | | | | | | | | | 5,585,854, 075 | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- I | Dokumen 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | | _ | 1 | 1 | н | ₽ | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Kegiatan 20 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II | | | | | | | | | 3,928,810, 920 | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- II | Dokumen 1 | | Ε. | τ. | ₽. | τ, | τ. | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | | - | | - | . | . | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | | τ, | τ, | Α, | τ, | τ, | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | | | п | П | н | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Kegiatan 21 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen | | | | | | | | | 5,237,710, 520 | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT | Dokumen 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | | _ | 1 | 1 | + | + | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Kegiatan 22 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman l | _ | | | | | | | | 4,571,022, 586 | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I | Dokumen 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | | τ, | τ, | Α, | . 1 | τ, | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

| | | | | | Targ | Target Tahunan | <u>=</u> | | | | |
|--|--|-----------|---------------|------------|------|----------------|---------------|---------------|---|---------|-----------------------|
| | | • | Tahun | | | | | | | Sumbe | 100 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran r 5 Pen Tahunan na: (Rp.) | Penda P | Instansi Pelaksana |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | ₽ | ₽ | 1 | | п | 1 | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | Η | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 23 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman | | | | | | | | | 6,636,749, 269 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II | Dokumen 1 | П | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | ₩ | ₩ | 1 | | + | + | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | ⊣ | ₽ | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | 1 | ₩ | 1 | | П | П | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 24 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan | | | | | | | | | 3,708,903, 346 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | ⊣ | ₽ | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | ₽ | П | П | | П | 1 | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 25 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis | | | | | | | | | 5,755,710, 865 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT | Dokumen 1 | н | П | 7 | | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | - | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | Н | ₽ | П | | ₽ | ₽ | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 26 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I | | | | | | | | | 2,246,487, 340 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-l | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | - | - | - | | - | - | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | | - - | | | . | . | | | |
| | iaporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen | 7 | 7 | 7 | | - | - | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 27 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II | | | | | | | | | 3,801,674, 287 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II | Dokumen 1 | П | - | 7 | | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | П | Η | Т | | 1 | - | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 28 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton | | | | | | | | | 4,245,784, 130 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT | Dokumen 1 | 1 | н | 1 | | 1 | 1 | | | |

| | | | ı | | <u> </u> | Target Tahunan | an | | | | |
|---|--|-----------|---------------|------|----------|----------------|----------|----------|-------------------|------------|-----------------------|
| | | • | Tahun | | | | | | | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesebatan | Dokumen 1 | П | | | 1 | 7 | 1 | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | + | | | |
| Kegiatan 29 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantriienon | | | | | | | | | 8,582,109, | | |
| | Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ | Dokumen 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | - | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 1 | | | 1 | + | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | ₽ | | П | . | ₽ | + | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 30 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan | | | | | | | | | 7,021,729, 656 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG | Dokumen 1 | 1 | | - | 7 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | ₽ | | п. | 1 | T | П | | | |
| | lanoran pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | - | | _ | | | | | | |
| Kegiatan 31 : Upaya Kesehatan Masvarakat Puskesmas Neampilan | | | | | | | | | 5,004,691, | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG | Dokumen 1 | 1 | | - | 1 | 7 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 1 | | | | | + | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | ₽ | | П | П | 1 | 1 | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 32 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman | | | | | | | | | 3,244,675, 787 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA | Dokumen 1 | 1 | | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 1 | | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | 1 | | 1 | 7 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | н | | п | н | н | T | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 33 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo | | | | | | | | | 4,177,297, 605 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR | Dokumen 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | 1 | | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | 1 | | - | . | ~ | ₩. | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | 7 | | + | T | ↔ | 1 | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

| | | | | | F | Target Tahunan | ue | | Indikatif | | |
|---|---|-----------|---------|------|------|----------------|------|------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| | | | l dideT | | | | | | - Alokasi Sumbe | | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran r 5 Penda | Instansi a Pelaksana | nsi ana |
| | | | 2017 | | | | | | E | | |
| 2 | | | | | | | | | (Rp.) | | |
| Kegiatan 34 : Upaya Kesenatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I | | | | | | | | | 3,042,973, 663 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I | Dokumen 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | | _ | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | | 7 | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | | 1 | П | П | П | 1 | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 35 : Upaya Kesehatan Masvarakat Puskesmas Umbulhario II | | | | | | | | | 4,003,711, 163 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II | Dokumen 1 | | 1 | - | - | 1 | - | | | |
| | Janoran penyelenggaraan maya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | | | | | | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | | | | | | | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kecehatan | Dokumen 1 | ., | н | | | - | F I | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 36 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan | | | | | | | | | 4,793,306, 906 | | |
| | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB | Dokumen 1 | | _ | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | Dokumen 1 | ., | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | Dokumen 1 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | Dokumen 1 | | | П | π- | 1 | 1 | | | |
| | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | Dokumen 1 | | _ | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| PROGRAM 2 : Program PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | EHATAN RUJUKAN | | | | | | | | | Dinas | |
| Kegiatan 1 : Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Dratama" | | | | | | | | | 25,328,35 | Kesehatan | _ |
| rujuvali vo ri ataliia | Operasional Pelayanan kesehatan ruiukan RS "Pratama" | Bulan 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,747 | | |
| Kegiatan 2 : Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama" | | | | | | | | | 127,168,1 02,647 | | |
| | Oparasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama" | Dokumen 9 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | i | |
| PROGRAM 3 :Program UPAYA PELAYANAN KESEHATAN | AN KESEHATAN | | | | | | | | | Dinas | |
| Kegiatan 1: Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan | | | | | | | | | 64,605,30 2,641 | Kesehatan | c |
| | Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakanProgram pelayanan kesehatan dasar | Orang 60 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | | | |
| | Laporan hasil koordinasi & Evaluasi PelayananProgram Yankes Primer dan Rujukan | Dokumen 1 | | Н | н | ₽ | П | П | | | |
| | Data hasil Penilaian kinepja puskesmas | Dokumen 1 | | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Dokumen 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Data hasil ASPAK | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Laporan hasil sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL Bumah Sakit mendanatakan pembinaan pelayanan besahatan miliuban | Dokumen 1 | | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, | | | |
| | nuilaii Sant illellaapatanali pelilullaali pelayallali nesellatali ujunali | | | | 71 | 77 | 77 | 71 | | | |
| | Laporan pelaksanaan kegiatan bersumberdana DAK | Laporan 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | F | Target Tahunan | 200 | | Indibatif | | |
|---|--|--------------|-------|----------|------|----------------|------|----------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | | - | ilger raila | | | Alokacii Cumbo | 9 | |
| | | | Tahun | | | | | | | | 1000 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Aligaran I 5 Penda | | Pelaksana |
| | | | 7107 | | | | | | Tahunan naan | <u>_</u> | |
| 3 | | | | | | | | | (Rp.) | ı | |
| Kegiatan 2 : Pelayanan Kesehatan Khusus | | | | | | | | | 2,289,766, 788 | | |
| | Jumlah Puskesmas yang Memberikan pelayanan kesehatan haji | Puskesma 18 | 83 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Laporan hasil koordinasi & Evaluasi PelayananProgram Yankesus | | | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani | _ | | , | 7 | 7 | 1 | 7 | | | |
| | Frekwensi sosialisasi Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan | Kegiatan 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Frekwensi Pembinaan Battra Komplementer | Kegiatan 4 | _ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Kegiatan 3 : Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan | | | | | | | | | 114,255,6 31,546 | | |
|) | Dokumen MOU & Perwal Jamkesda | Dokumen 2 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Frekwensi sosialisasi mekanisme pelayanan Jamkesda dan jaminan | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | |
| | persalinan. Petugas Kesehatan. Lintas Sektor dan masyarakat | | | | | | | | | | |
| | Lapoban hasil kegiatan koordinasi perencanaan. pelaksanaan dan evaluasi Jamkesda serta persalinan | Laporan 1 | _ | П | П | + | ₽ | + | | | |
| | Jamines and the personnel in the party of th | | _ | , | , | , | , | , | | | |
| | Janiman perinoloyaan kesehatan untuk nasyatakat kuta kryanig udak memiliki jaminan kesehatan, pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan Sego Segawe dan pemeriksaan kesehatanbagi Anggota DPRD beserta keluarga inti serta persalinan | r Legiaraii | 77 | 77 | 7 | 7 | 71 | 7 | | | |
| | Laporan hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN | Laporan 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Laporan hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah Kota Yk | | 1 | + | н | П | н | П | | | |
| | Laporan sosialisasi. monev dan pendampingan akreditasi puskesmas | Laporan 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 4 : Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119 | | | | | | | | | 8,211,048, 972 | | |
| | Laporan pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES | Dokumen 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| PROGRAM 4 :Program PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT | ESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | Dinas | 10 |
| Kegiatan 1: Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | 7,274,437, | Kesel | Kesehatan |
| • | Petugas mendapatakan update knowladge dalam pelayanan KIA Gizi | Orang 4 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | | | |
| | Jumlah kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas pelayanan KIA Gizi | | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | | | |
| | Laporan Surveilans KIA Gizi | _ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | Kebijakan / Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi | Dokumen 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | Dokumen Perencanaan KIA Gizi | Dokumen 1 | 1 | , | 7 | 7 | 1 | 7 | | | |
| | Laporan Skrening Hipotiroid Kongenital | Laporan 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Frekwensi lomba Ibu Hamil Sehat dan Baduta tingkat Kota Yk | Kali 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Kegiatan 2 : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang | | | | | | | | | 9,703,503, 719 | | |
| Kesehatan | Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan | _ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan | ısi sjid) | 00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Frekwensi Siaran Radio. TV dan media cetak mengenai Pemberdayaan Massarakat dan Promosi Kesehatan | Kali | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | F | Target Tahunan | 2 | | Indikatif | | |
|---|--|-----------------------|----------------|------|----------|----------------|----------|------|-------------------|-------|-----------|
| | | | 1 | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program / Kogistan / Outhurt Kogistan | Satuan | Tahun Dasar | | | | | | Anggaran | _ | Instansi |
| | riogianny neglatany output neglatan | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ٠. | Penda | Pelaksana |
| | | | | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Frekwensi PublikasiProgram kesehatan melalui kegiatan massal | Kegiatan 1 | 1 | | _ | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | (Pameran Seka-ten) | | | | | | | | | |
| | Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota | Dokumen 1 | - | | _ | 7 | 1 | 1 | | | |
| | Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | | - | | | | | 1 | | | |
| | Profil PHBS | | | | _ | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Data layanan lansia di rumah sehat lansia | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat | Kali 3 | | | m | 8 | es es | æ | | | |
| Kegiatan 3 : Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja | | | | | | | | | 4,973,303, 882 | | |
| | Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta | Sampel 20 | 2000 2 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | |
| | Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan | | _ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Data Kesehatan Lingkungan | men | | | _ | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Frekwensi Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Frekwensi pelaksanaan desinfo tentang penyehatan lingkungan | Kali 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Data pengelolaan limbah medis cair | nmen | | | _ | 1 | 7 | 1 | | | |
| | Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM | Kali 6 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya | Puskesma 18 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| | unish Diskasmas againeatises kahisinga dan danahan dan danahan dan danahan dan | Diskeema 5 | | | | | u | u | | | |
| | Julillan Fushesinas yang uipennsa nebisingan dan pendanayaan muool | rushesiiid J S | | | • | n | n | n | | | |
| | Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta | Dokumen 1 | Т | | _ | + | 1 | 1 | | | |
| | | Kali 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Dokumen kajian review EHRA | Dokumen 1 | | | _ | 1 | 1 | 1 | | | |
| PROGRAM 5 : Program REGULASI DAN PENGEMBANGAN | ENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN | | | | | | | | | | Dinas |
| Kegiatan 1: Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang | | | | | | | | | 3,179,867, 601 | _ | Kesehatan |
| Kesehatan | Peserta Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Masyarakat di Kota | Orang 12 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | | |
| | dustri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan | Orang 40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Sertifikasi masyarakat Pengelola Pedagang Kaki Lima Pangan. Pengelola jasa boga dan rumah makan. Pengelola Deptot Alf Minum dalam kesmasan. pangalah banti sebalah di Kata Vanabata | Orang 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | l layanan regulasi dibidang kesehatan sesuai | Orang 60 | 9 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | | | |
| | dengan ketentuan yang berlaku | | | | | | | | | | |
| | Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan Dokumen serrifikasi dalam sesuai dengan bidangnya | Dokumen 1 | н | | _ | . | П | ₽ | | | |
| | Dokumen penyelesajan permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam | Dokumen 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | IRT | | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyeleggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan | Dokumen 1 | | ⊣ | _ | П | ⊣ | ₽ | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | ۲ | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|---|---|------------------|-------|------|------|-----------------------|------|------|-------------------|-------|-----------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | ionetani |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Aliggalali 5 | Penda | Pelaksana |
| | | | Ì | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Frekuensi sarasehan tentang Raperda regulasi dan sertifikasi sarana tenaga kesehatan | Kali | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | Laporan monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi antar kabupaten | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Produk Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan | _ | Н | П | ₽ | Н | н | П | | | |
| Kegiatan 2 : Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya | | | | | | | | | 3,256,632, 395 | | |
| Manusia Kesehatan (SDMK) | Tenaga kesehatan teladan terpilih di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Fasilitasi PKL (Praktek Kerja Lapangan) mahasiswa institusi kesehatan di lingkungan Dinkes Kota Yogvakarta | Bulan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Dokumen perencanaan SDMK | Dokumen | 1 | 1 | T | + | Ţ | 1 | | | |
| | Frekwensi pembinaan SDMK | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | |
| | Laporan hasil Penilaian kompetensi tenaga kesehatan | Laporan | 1 | 1 | + | + | 1 | 1 | | | |
| | Dokter puskesmas mendapat sertifikat ATLS dan atau sertifikat ACLS | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | |
| | Perawat mendapatkan sertifikat Pelatihan PPGD/BTCLS | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Tenaga kesehatan mendapatkan sertifikat pelatihan | Orang | 52 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Frekuensi Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Laporan Monitoring dan evaluasi nakes UPT | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Peserta seminar/kursus/workshop | Orang | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 000 | | |
| Kegiatan 3 : Pengelolaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | | | | | | | | | 56,273,96 | | |
| | Obat dan vaksin untuk lavanan kesehatan tersedia | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,10 | | |
| | Data Monitoring penggunaan obat rasional | eu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Data ketersediaan obat dan vaksin | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jumlah tenaga kefarmasian di Kota Yogyakarta mendapatkan Bimbingan | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |
| | teknis tentang kefarmasian | | | | | | | | | | |
| | Jumlah tenaga analis lab Kesehatan yang mendapatkan update knowledge | Orang | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | tentang pengelolaan laboraturium sesuai standar Integrasi nanggunaan anlikasi a Jogistir ohat | Kagistan | - | - | - | | - | - | | | |
| | Data nenghanisan ohati yaksin dan alat kesehatan rusak/kadaluarsa | | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | | | |
| | Alat kesehatan di Puskesmas dikelola dan dilakukan pemeliharaan sesuai | Puskesma 18 | 18 | . 81 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| | standar | s | | | | | | | | | |
| | Jumlah penjamah makanan dan minuman yang dibina | Orang | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | | |
| | Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi keamanan pangan jajan anak | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Servidii | | 001 | 9 | 001 | 9 | 001 | 9 | | | |
| | Juliilali Saliipie paligali jajali aliak sekolali yalig uipeliksa | Sallipei K-I: | 700 | 100 | 3, | 700 | 100 | 30, | | | |
| | Frekuensi Lomba Sekolan Dasar pangan Jajanan anak sekolan Machil distribusi fazzasi tagadis | Kall | ٠, | ٦, | ٠, | ٠, ٠ | ٦, | ٦, | | | |
| | INIODII distribusi lai iliasi reisedia | | ٠. | н , | | ч . | ٠, | т т | | | |
| | sarana pengolan data kerarmasian tersedia Mohil sampling makanan tersedia | Laporan | | | | | | | | | |
| PROGRAM 5 : Program PENCEGAHAN DAN PENGENDAI | IN PENGENDALIAN PENYAKIT | | | | | | | | | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Pengelolaan Surveilans dan | | | | | | | | | 1,431,615, | | Kesehatan |
| Sistem informasi Resenatan | I mobile on ideal in including an increase in | 2000 | 0 | 0 | C | c | c | 2 | /8/ | | |
| | Laporan penyelidikan enidemiologi | | 12 | . 1 | 17 | 12 | 17 | 17 | | | |
| | Laporan survailans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD31) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | F | Towns Tohnson | | | distable | | |
|---|---|--------------|-------|------|------|---------------|------|------|------------------|-------|-----------|
| | | | | | | arget Tanur | | | Marketin | dan | |
| | | | Tahun | | | | | | Angaran | sumpe | Inctanci |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2 | Penda | Pelaksana |
| | | | 707 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Buletin sistem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) | Edisi | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | | |
| | Laporan sistem informasi kesehatan puskesmas dan rumah sakit | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Laporan penyebab kematian (couse of death) | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Laporan komunikasi data prioritas (KOMDAT) | Laporan | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | |
| | Laporan survey kepuasan masyarakat | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Data Profil kesehatan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | jumlah Aplikasi-server-database SIMPUS yang berjalan optimal | Sistem | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| | Websit kesehatan berjalan optimal | Sistem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 2 : Pencegahan. Pengendalian | | | | | | | | | 15,738,11 | | |
| Penyakit Menular dan Imunisasi | | | | | | | | | 2,3/4 | | |
| | Data DBD (Demam Berdarah Dengue) | Dokumen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jumlah pelaksanaan togging tocus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB | Fokus | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | Laporan survei angka bebas jentik kelurahan | Laporan | + | - | - | 1 | _ | 1 | | | |
| | | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Laporan P2TB (pengendalian penyakit tuberculosis) | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkarkan kesembirhan penyakit TB | Orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Data Dermacalahan TR-HIV | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | lumlah petugas dalam penguatan jejaring internal petugas TB puskesmas | Orang | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | |
| | dan RS | 0 | | | | | | | | | |
| | Jumlah petugas Lab TB di fasyankes yang mendapatkan on the job training | Orang | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Jumlah fasyankes yang mendapatkan on the job training TB MDR | Fasyanke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Data Infeksi Saluran Dani Akut (ISDA) dan data diara | Dokumen | 2.4 | 2.4 | 7/2 | 7/ | 2.4 | 7/2 | | | |
| | lanoran nelacakan kasus kusta | lanoran | | ; - | ; - | ; - | | : - | | | |
| | Lapoi ari peracanari nasas nasta | Pata Data | 000 | 020 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | | | |
| | Jumlan data nasii pemeriksaan spesimen daran risti pada pasien iivis dan HIV/AIDS | Data | | 370 | 320 | 320 | 320 | 320 | | | |
| | Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual) | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Jumlah laporan Peningkatan kapasitas layanan HIV | Laporan | 7 | 7 | | 1 | + | 1 | | | |
| | Data imunisasi. pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru | Dokumen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) | Sekolah | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | | | |
| | Jumlah Peserta penguatan layanan praktisi swasta | Orang | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | |
| | Data Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas | Dokumen | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Frekuensi sosialisasi tentang pngendalian penyakit menular | Kali | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya | Orang | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | | | |
| Kegiatan 3 : Pencegahan. Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan | | | | | | | | | 984,484,0 91 | | |
| Jiwa | Jumlah peserta Workshop Pencegahan penyakit tidak menular dan | Orang | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | kesehatan jiwa | į | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | | |
| | Jumlah WUS (Wanita Usia Subur) yang di periksa untuk deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA | Orang | 0006 | 0006 | 006 | 0006 | 006 | 006 | | | |
| | jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Memular nada nonulasi resiko usia > 15 th | Orang | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | | | |
| | the same population could be same as a same a | | | | | | | | | | |

Kegiata Penyaki Jiwa

| | | | | | F | Target Tahunan | Jan | | Indikatif | | |
|---|---|------------------|-------|------|------|----------------|------|------|-------------------|------------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | 2017 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Masyarakat lintasProgram. petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM | Orang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Data evaluasi kegiatan suveilans PTM puskesmas | u | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Jumlah Peserta Up date Knowledge penyakit tidak menular | | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | | | |
| | Peningkatan kapasitas POSBINDU | | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 3.7.1. (a) CPR (Contraceptive Prevalence Rate) | | | | | | | | | | |
| | 3.7.2. (a) Total Fertility Rate (TFK). | (boontoma) | | | | | | | | | |
| | 3.8.1. (a) Persentase pasangan usia subur yang Ingin ber-kb tidak terpenuni (unmetneed) | numetneed) | | | | | | | 000 | ۰ | |
| PROGRAM 1:Program PENGENDALIAN PENDUDUK | PENDUDUK | | | | | | | | 8,199,253, 081 | | Dinas Pengendalian |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Pengendalian | | | | | | | | | | | Penduduk dan |
| Penduduk | Jumlah penyusunan grand design kependudukan | Buku/ Kali | - | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | | ~ " | Keluarga Berencana |
| | Pertemuan FAPSEDU | Pertemua 18 n | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Pertemuan FAPSEDU Kecamatan | Kecamata I | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Peningkatan Kapasitas Anggota Fapsedu Kecamatan | Kecamata I | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Penvusunan Modul Edukasi Pengendalian Penduduk | Dokumen | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Penyusunan Parameter Kebijakan Kependudukan | Dokumen | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Penyusunan dan Penilaian Parameter Kependudukan | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Penyusunan SOP Pengendalian Penduduk | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | |
| | Penyusunan Evaluasi Kependudukan | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| | Penyusunan Modul FAPSEDU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Sosialisasi Isu-isu Strategis Kependudukan bagi Kader IMP | | 0 | 65 | 75 | 0 | 75 | 0 | | | |
| | Sosialisasi Isu-isu Strategis Kependudukan bagi PKK | | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | | | |
| | Sosialisasi Isu-isu Strategis Kependudukan bagi LPMK | | 0 (| 0 (| 0 (| 0 (| 75 | o 1 | | | |
| | Sosialisasi Isu-isu Strategis Kependudukan bagi Karang Taruna | | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | | | |
| | Sosialisasi Isu-isu Strategis Kependudukan bagi Mitra Keluarga | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 6 | 9 6 | 0 6 | | | |
| | Sosialisasi Isu-isu sulategis Neperlududkali bagi Perligulus rapsedu Sosialisasi Pengendalian Penduduk hagi Aparatur | Orang | | . 6 | | 2 0 | 2 0 | 2 0 | | | |
| | Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi PKK dan BP 4 | | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 82 | | | |
| | Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi Remaja | | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi BKB | | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | | | |
| | Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi BKR | | 0 | 0 | 0 | | 82 | 0 | | | |
| | Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi BKL | | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi PPKBD | | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 | | | |
| | Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi Sub PPKBD | | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 65 | | | |
| | Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi Tenaga Pengajar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Pembuatan Display Pojok Kependudukan | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah cetak modul kependudukan SMP | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi isi-isu strategis kependudukan bagi Camat, Lurah dan PKB | Orang | \$2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan yang diadakan dalam rangka peningkatan kapasitas | Kegiatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | FARSEDU | | | | | | | | | | |

| | | | | | La | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|---|---|----------------------------|--|---------------------|------|----------------|------|------|--------------------|-------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | Inctanci |
| _ | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2 | Penda | Pelaksana |
| | | | 707 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Pengelolaan Data, | | | | | | | | | | | |
| Advokasi, Komunikasi, Informasi dan | Jumlah pertemuan seleksi pembinaan KB KS tingkat Kota | Lomba | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Edukasi | Jumlah peringatan Hari Keluarga tingkat Propinsi | Kegiatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Updating data keluarga dan pencatatan pelaporan | Kegiatan | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Cetak formulir SIGA (Sistem Informasi Data Keluarga) | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Media promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan | | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Edukasi)Program KKBPK (media cetak, radio, televisi, Mobil Unit Penerangan, PMPS) | Media | | | | | | | | | |
| | Frekuensi pembinaan IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana) | Kali | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Pembinaan Paguyuban Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) | Kegiatan | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Jumlah lembaga pemerintah yang diadvokasi | Lembaga | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Frekuensi penguatan jejaringProgram KKBPK | Kali | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Jumlah hari KIE melalui Mupen | Hari | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah hari promosiProgram KB KS melalui PMPS | Hari | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan monitoring dan evaluasi TMKK (TNI Manunggal KB (Kesehatan) | Pertemua 15 n | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan KKG PKK KB Kesehatan | Pertemna 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | u | | | | | | | | | |
| | Jumlah pertemuan rakercab IPeKB | Pertemua 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | _ | | | | | | | | | |
| | Jumlah orang yang mendapatkan bantuan Operasional IMP | | 3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pembinaan paguyuban IMP | Kegiatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| PROGRAM 2:Program KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA | CANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA | | | | | | | | 11,447,01 7,898 | | Dinas Pengendalian |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Pelayanan | | | | | | | | | | | Penduduk dan |
| Keluarga Berencana | Pus yang Terlayani KB | PUS/ Jenis | 1210 PUS | 8 jenis | 7 | 9 | 9 | 9 | | | Keluarga Berencana |
| | Катрилд КВ | Kegiatan/ kampung KB | 1 kegiatan | 14 kampung KB | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | Pembinaan dan EvaluasiProgram KB | emua | 16 Perte- muan ting-kat Kota, 62 pert- emuan tingkat | 6 jenis | 7 | _ | _ | _ | | | |
| | Pembinaan Kelompok KB Pria | Kegiatan/ | n 32 | 2 ienis | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | <u> </u> | yz kegiatan | z Jems | ı | 1 | 1 | ١ | | | |
| | | | 20 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | | | |
| | Sosialisasi Kesehatan Reproduksi melalui Media Cetak | Eksempla | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | Target Tahunan | nan | | Indikatif | | |
|---------------------------------|--|--------------------|------------------|---------|------|----------------|----------|----------|------------------|-------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokası | sumpe | 1 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | 7107 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Pertemuan Sosialisasi Kespro | ē | 56 | 3 jenis | 4 | 4 | 3 | 2 | | | |
| | | n/ Jenis p | pertemua | | | | | | | | |
| | l omba PIK R | lenis | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Dialog Remaia | ran Lan | | 1 ← | ۰ - | 1 ← | 1 - | 1 ← | | | |
| | Jumlah kegiatan pengukuhan dan pembentukan kampung KB | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan yang disasar pembinaan dan evaluasi PIK R | - m | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | c | | | | | | | | | |
| | Jumlah yang disasar kegiatan lomba remaja dan PIK R | an | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah draft yang disasar penyusunan pedoman KIE Kespro wilayah | Draft 1 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Pembinaan | | | | | , | | , | , | | | |
| Pembangunan Keluarga | Pembinaan Kegiatan Pembangunan Keluarga | rememua /1 | /1 | 3 Jenis | n | n | n | n | | | |
| | | | per terrina n | | | | | | | | |
| | Penguatan Kelompok BKS dan UPPKS | Kelompo (| 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | | ~ | | | | | | | | | |
| | Pendampingan Kelompok BKS dan UPPKS | Jenis (| 0 | 1 | æ | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Penguatan Jejaring Kegiatan Pembangunan Keluarga | Jenis (| 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Pelatihan Kader BKS dan UPPKS | Pertemua 19 | 19 | 2 | 3 | 3 | n | 3 | | | |
| | | n/Jenis p | pertemua | | | | | | | | |
| | | | _ | | | | | | | | |
| | Sosialisasi, motivasi dan pembinaan Ketahanan Keluarga (penerapan 8 fungsi Jenis | | 0 | 7 | 7 | 7 | ~ | . | | | |
| | Keluarga)> Keluarga muda (< 5 tahun), anggota BKB, Komunitas | | | | | | | | | | |
| | Promosi hasil kelp. UPPKS | | m i | m · | m · | m · | m · | m · | | | |
| | Pembinaan dan seleksi bidang Pembangunan Keluarga | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Jumlah pertemuan kelompok BKS | ına | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | n BKB, BKR, BKL | | | | | | | | | |
| | Jumlah pertemuan pemantauan dan monitoring kelompok BKS | В | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan Forum BKB Kota dan Kecamatan | rtemna | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah Family Gathering BKL | Kegiatan 1 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah draft buku pegangan Program KKBPK | Draft 1 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan kelompok UPPKS | Pertemua 460 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | c | | | | | | | | | |
| | Jumlah event kontak dagang kelompok UPPKS Kota Yogyakarta | Event 1 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan kelompok UPPKS dengan mitra kerja | Pertemua 1 n | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan pengurus BPC AKU Kota | Pertemua 17 n | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah kegiatan peningkatan kewirausahaan dan keterampilan kelompok | Kegiatan 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 3.9.1. Indeks Kualitas Udara | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program PENATAAN DAN | PROGRAM 1:Program PENATAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN | | | | | | | | 9,237,000, | | |
| | | | | | | | | | 8 | | |

| | | | | | Ē | Tomat Tahinan | 2 | | Indibatif | | |
|--|---|-------------------------------|-------|------|------|---------------|------|------|-------------------|------------|------------|
| | | | ' !! | | | 200 | | | | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 0202 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | r Penda | Instansi |
| | | | 2017 | | } | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| Kegiatan 1 : Kajian Dampak Lingkungan | | | | | | | | | | | Dinas |
| | Kajian lingkungan hidup yang tersusun. | Dokumen 4 | | 2 | | 4 | 3 | 3 | | _ | Lingkungan |
| | Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan. | Dokumen 850 | | 850 | 09 | 850 | 850 | 850 | | | Hidup |
| Kogistan 2 · Dongondalian Dongomaran | Kebijakan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan. | Regulasi 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| dan Limbah B3 | Fasilitas konservasi air tanah vang dibangun. | | | 75 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang direrbit kan. | Izin 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dipantau. | Usaha/ 4 Kegiatan | 40 | 40 | 20 | 20 | 09 | 09 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 3.9.2. Indeks Kualitas Air | . | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP | KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | 13,151,00 | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Optimalisasi Sumber Daya | | | | | | | | | 2000 | , 1 | Hidup |
| Lingkungan Hidup | Sekolah dan PP yang dibina menjadi sekolah berwawasan lingkungan. | lah/ | 254 | 271 | 284 | 297 | 310 | 322 | | | |
| | Jumlah Kampung rintisan Kampung Iklim. | RW 6 | 65 | 79 | 93 | 107 | 121 | 135 | | | |
| | Penyuluhan dan penyebarluasan informasi lingkungan hidup. | Jenis 6 media publikasi | | _ | ∞ | 6 | 6 | 6 | | | |
| Kegiatan 2 : Penaatan dan Pemantauan | | | | | | | | | | | |
| Lingkungan | Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara. | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas air. | _ | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Kegiatan 3 : Penguijan Kualitas | Perusahaan telah berizin lingkungan yang dipantau. | Nsaha 8 | 08 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | | | |
| Lingkungan | Layanan pengujian parameter kualitas air. | Paramete 17 | | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | | | |
| | Layanan pengujian parameter kualitas udara. | Paramete 6 | | 7 | ∞ | o | 10 | 11 | | | |
| Tujuan 4 : Pendidikan berkualitas | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 4.1.1. (a) Persentase SD terakreditasi A 4.1.1. (b) Persentase SMP akreditasi A | | | | | | | | | | |
| | 4.1.1. (d) Angka partisipasi kasar SD | | | | | | | | | | |
| | 4.1.1. (e) Angka partisipasi kasar sivil 4.1.1. (p) Angka Rata-rata lama sekolah | | | | | | | | | | |
| | 4.5.1* Angka partisipasi murni SD dan SMP | | | | | | | | | | |
| | 4.c.1* Persentase guru sesuai kualifikasi | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program PENINGKATAN DA | PROGRAM 1:Program PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR | | | | | | | | | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD | | | | | | | | | 8,001,099, 144 | ш. | Pendidikan |
| | Pendalaman Materi Ujian Sekolah Dasar (USDA) | Kali 3 | | | | | 30 | 30 | | | |
| | Workshop penyusunan dok kurikulum 2013 | Dokumen 21 | | | | 164 | 164 | 164 | | | |
| | Pelatinan penulisan soal ujian | Guru | | | | | 9 2 | 09 | | | |
| | Pengembangan Literasi Sekolah Test Pendalaman Materi IISDA | Sekolan Kali 7 | | 30 | 30 | | 200 | 90 | | | |
| | | | | | | | | , | | | |

| | Instansi | Pelaksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Sumbe | Penda | naan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikatif | Alokasi | . 2 | Tahunan (Rp.) | | | | | | | | | 118,572,4 72,426 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,903,237, 209 | | | |
| | | 2022 | | | | 1 | 30 | 09 | 165 | 09 | 1 | | 164 | 40 | 4 | | н | | | | | | | 1000 | | | | | | 88 | 1 | 20 | н | | 100 | | | 6 | 2 |
| nan | | 2021 | | | | 1 | 30 | 09 | 165 | 09 | 1 | | 164 | 40 | 4 | | 1 | | | | | | | 1000 | | | | | | 88 | П | 20 | 1 | | 100 | | | 6 | 2 |
| Target Tahunan | | 2020 | | | | 1 | 30 | 09 | 165 | 09 | 1 | | 164 | 40 | 4 | | н | | | | | | | 1000 | | | | | | 88 | ₽ | 20 | 1 | | 100 | | | 6 | 2 |
| - | | 2019 | | | | 1 | 30 | 09 | 165 | 09 | 1 | | 164 | 40 | 4 | | 1 | | | | | | | 1000 | 200 | | | | | 68 | П | 20 | н | | 100 | | | 6 | 2 |
| | | 2018 | | | | 1 | 30 | 09 | 165 | 09 | 2 | | 166 | 40 | 2 | | + | | | | | | | 1000 | | | | 8 | | 06 | + | 20 | 1 | | 100 | | | 6 | 2 |
| | Tahun | Dasar 2017 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 165 | 15 | Z. | 4 | 5 | 165 | COT | | | o | 0 ~ | 800 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 06 | — | 20 | 1 | | 100 | | 9 | 69 | 9 |
| | | Satuan | | Kali | Mapel | Kali | Guru | Guru | Sekolah | Kali | Kali | | Sekolah | Sekolah | Sekolah | Kejuaraa | Kejuaraa | - 6 | Q. | | | Right | lanic | Riah | | Sekolah | Sekolah | Paket | Mobil | Sekolah | Kejuaraa | Sekolah | Kejuaraa | د | Buah | | Kejuaraa | Kejuaraa | Kejuaraa |
| | | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | | Ulangan Umum Bersama (UUB) kelas 3 | Ujian Sekolah IPS dan PKN | ujian Sekolah Daerah 3 mapel | Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian | Workshop Matrikulasi Matematika dan IPA | Jumlah Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi | Frekuensi Pendalaman Materi | Frekuensi tes Pendalaman Materi USDA | | Jumlah Sekolah peserta Workshop manajemen sekolah | Jumlah Sekolah yang terdampingi Akreditasi Sekolah | Jumlah Sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian penataan, dan | Lomba Sekolah sehat dan kantin sehat | Lomba gugus depan unggul SD | OND actions I/A | Sister School | Doman haman Budaya Lingkungan Sokolah | Pengelinangan budaya Lingkungan sekolan Dangadaan Madia Dambalajaran | Popuadaan Mahalair Dermittakaan | Pengadasan Menbelair Rusha auru | Pengadaan Meja Kirki siswa | Pengadaan Sarpras ABK | Pembangunan Green Room ABK | Pengadaan Sarpras Green Room ABK | Rehab Sekolah | Up-grade Mobil Pusat Sumber Inklusi | BOS SD Negeri | Jumlah kejuaraan lomba PPK | Jumlah Unit Pengadaan sarpras Sekolah | Lomba budaya mutu | | Pengadaan Almari kelas | | Lomba Penelitian Karya Ilmiah remaja | FLSSN Sekolah Dasar (SD) | Olimpiade Sain Nasional (OSN) |
| | | | | | | | | | | | | Kegiatan 2 : Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan 3 : Pengelolaan Kesiswaan SD | | | |

| | | | | | <u>-</u> | larget lanunan | au | | nalkatir | 1 | |
|--|---|------------------|---------------|------|----------|----------------|------|------|--------------------------|---------------|------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | sumpe | 1000 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 Tahunan | Penda naan | Pelaksana |
| | | | | | | | | | (Rp.) | | |
| | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD | Kejuaraa n | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |
| | Gebyar Seni SD | Kali | 1 | | | | | | | | |
| | MTQ.SD | Kejuaraa | 24 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | Jumlah Kejuaraan dalam Lom ba Dokter Kecil | Kejuaraa | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Kegiatan Klinik saint | n Kegiatan | | - | , | - | , | - | | | |
| | Jumlah Kejuaraan Lomba sekolah sehat | Kejuaraa | 33 | 8 | . 60 | c c | . 60 | . 60 | | | |
| PROGRAM 2 :Program PENINGKATAN D | PROGRAM 2 :Program PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | = | | | | | | | | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP | | | | | | | | | 10,155,18 7,558 | | Pendidikan |
| | Pendalaman materi UN SMP | Mapel | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Frekuensi Pendalaman Materi Ujian nasional (Bimbel) | Kali | | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | | | |
| | Tes Pendalaman Materi UN SMP | Sekolah/ Kali | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Bedah SKL UN SMP | Mapel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Workshp penyusunan dok Kurikulum | eu | 16 | 65 | | | | | | | |
| | Pelatihan penulisan soal ujian | | 20 | 06 | 120 | 150 | 160 | 180 | | | |
| | Jumlah Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi | | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | | |
| | Jumlah sekolah yg melaksanakan SPPSKS (Satuan Pendidikan Penyelenggara Satuan Kradit Semester) | Sekolah | 7 | 4 | Z. | 9 | 7 | ∞ | | | |
| | Penilaian akhir semester | Sekolah | | 000 | 82 | 82 | 85 | 000 | | | |
| | Jumlah sekolah pelaksana tes pendalaman materi UNBK SMP | Sekolah | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | | |
| Kegiatan 2 : Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP | | | | | | | | | 102,501,0 69,427 | | |
| | Workshop Manajemen SNP | | | | | | | | | | |
| | Diklat Penguatan Manajemen Sekolah | | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | | |
| | Pendampingan Akreditasi Sekolah | | 2 | 30 | 16 | 7 | 3 | 3 | | | |
| | Pemetaan Ketercapaian SNP | Sekolah | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | Workshop EDS Verifikasi Pendirian dan Penutupan Sekolah | | n n | 0 4 | ၀ က | ၀ က | o 6 | ၀ က | | | |
| | Pengadaan Sarpras Kids Atletik, Media Pembelajaran dan Meubelair | | 7 | | | | | | | | |
| | Perpustakaan Sekolah | Police | | | | | | | | | |
| | Neliab Sekolali | L : | 1 0 | 0 | | | | | | | |
| | Pengadaan Komputer SMP | Onit | 288 | 396 | , | , | , | , | | | |
| | BOS SMIP Negeri | sekolan | TP | 16 | TP | IP | 16 | 10 | | | |
| | Juillian Pengadaan Mesin Riso | Sekolah | | 7 | 6 | | | | | | |
| | Immlah IInit Dangadaan Carnas Sekolah | Sekolah | | 16 | n 00 | oc | œ | α | | | |
| | Jumlah Pemeliharaan Gedung Sekolah | Sekolah | | 2 | 2 0 | 5 6 | o m | o m | | | |
| Kegiatan 3 : Pengelolaan Kesiswaan SMP | | | | | | | | | 7,749,603, | | |
| | OSN SMP | Medali | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 757 | | |
| | OOSN SMP | Medali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Ľ | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|---|-----------------------------|-------|------|------|----------------|------|------|------------------|-------|------------|
| | | | Tahun | | | | | | | Sumbe | 1 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Pelaksana |
| | | | 707 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | FLSN | Medali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Jelajah Museum | Kali | | | | | | | | | |
| | MTQSMP | Medali | 2 | | | | | | | | |
| | Lomba Karya Tulis SMP | Medali | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | Pekan Budaya Jawa | Medali | 4 | | | | | | | | |
| | Liga Pelajar Indonesia | Medali | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Gelar Pelajar Jogja | Kali | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| | Pameran Pendidikan | Kali | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Pameran Sekaten | Kali | 1 | 1 | 1 | | | + | | | |
| | Jumlah kejuaraan dalam Lomba Penelitian Karya Ilmiah remaja | Kejuaraa n | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pengembangan Minat Bakat Siswa | Siswa | | 25 | 26 | | 26 | 26 | | | |
| | Jumlah siswa peserta Jembatan Persahabatan Pelajar | Siswa | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| AC INSTANCEMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | Jumlah Siswa SMP Peserta Soft Skill KMS Jumlah Siswa SMP Peserta Soft Skill KMS Jumlah Siswa SMP Peserta Soft Skill KMS | Siswa | | 1000 | 1000 | | 1000 | 1000 | | č | |
| Kegiatan 1 - Pengelolaan Pendidikan | AIN PEINERALAAIN NOALILAS PEINDIDINAIN NON FORIVIAL DAIN INFORMAL | | | | | | | | 10 963 98 | 5 & | Dendidikan |
| Masyarakat dan Kesetaraan | | | | | | | | | 1,391 | í | |
| | Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket A, B dan C | Kali | 3 | e | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) A, B dan C | Kali | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A, B dan C | Kali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Pengembangan Musyawarah Tutor Mata Pelajaran (MTMP) | MTMP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Pengelolaan insentif Tutor Kesetaraan | Orang | 100 | 70 | | | | | | | |
| | Bimbingan Akreditasi lembaga PKBM | Lembaga | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | | | |
| | Bimbingan Teknis Pengelola TBM | Lembaga | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Bimbingan TeknisProgram JBM | Keluraha | 45 | | | | | | | | |
| | Inmiah rombel Yang mendapat ROSDA SPNF SKR | Rombel | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |
| | Jumlah Pembentukan Kampung Sains | Kampiing | 1 | £ - | £ - | - F | - F | - F | | | |
| | Jumlah Pembentukan Kampung Literasi | Kampung | | 1 1 | | | | | | | |
| | Jumlah Peserta Diksar Kesakaan Saka Widya Budaya Bakti | Orang | | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | | | | | | | | | 13,107,60 | | |
| | Pembinaan Layanan Lembaga PAUD | Jenis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | | layanan | ļ | | | | | | | | |
| | Lomba Gugus PAUD dan PAUD berprestasi | Juara | 15 | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD | Orang | 949 | 820 | 875 | 006 | 918 | 918 | | | |
| | | Orang | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
| | Peningkatan kompetensi pendidik PAUD | Orang tersertifik asi | 220 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | | | |
| | Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD SPS | Orang tersertifik | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Pengelolaan BOP PAUD | paga | 647 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | | |
| | Pendataan PAUD | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Gebyar PAUD | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |

| | | | | | <u>1</u> 2 | Target Tahunan | ue | | Indikatif | | |
|---|--|-----------------|----------|--------------|------------------------------|----------------|---|-----------|--------------------|------------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | 707 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Bimbingan uji kompetensi pendidik PAUD | Orang | 100 | | | | | | | | |
| | Workshop dan Pendampingan Akreditasi PAUD | Lembaga | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Frekuensi Pelaksanaan Jelajah Museum | Kali | ∞ | ∞ | 8 | ∞ | 8 | ∞ | | | |
| Kegiatan 3 : Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan | | | | | | | | | 3,444,911, 448 | | |
| | Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus | Lembaga | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ! | | |
| | Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF | Lembaga | 30 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | | | |
| | Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan | Dokumen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Pendidikan Vokasional | Orang | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | | | |
| | Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus | Orang | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Dikmas | Cabang Lomba | 16 | | | | | | | | |
| | Jumlah Kejuaraan dalam Lomba Lembaga kursus Berprestasi | Kejuaraa n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Jumlah Kampung Kompeten | Kecamata n | | 7 | 33 | 4 | 2 | 9 | | | |
| | Lomba Rencana Bisnis | Juara | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| PROGRAM 3 : Program PENGEMBANGAN PENDIDIKAN | J PENDIDIKAN | | | | | | | | | □ | Dinas |
| Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan | | | | | | | | | 10,624,23 8,664 | ď | endidikan |
| Tenaga Kependidikan | Pengembangan Kompetensi Guru | Orang | 60 orang | 400 orang | 250 orang | 250 orang | 400 orang 250 orang 250 orang 250 orang 225 orang | 225 orang | | | |
| | Workshop MGMP/KKG | | 40 orang | | | | | | | | |
| | Kualifikasi Guru S1 dan S2 | Guru | 35 guru | | | | | | | | |
| | Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi | Juara | 4 juara | | | | | | | | |
| | Diklat Calon kepala sekolah | | | 50 orang | | | 50 orang | | | | |
| | Penilaian Kinerja Kepala Sekolah | Orang | 35 orang | 40 kasek | 40 kasek 40 kasek 40 kasek | 40 kasek | 40 kasek | 40 kasek | | | |
| | Pelatihan PTK | | 40 guru | | | | | | | | |
| | Pelatihan Administrasi Sekolah | | 40 orang | 120 orang | 120 orang 100 orang 90 orang | 90 orang | 70 orang | 60 orang | | | |
| | Pelatihan Guru UKS | Orang | 60 orang | | | | | | | | |
| | Diklat Penguatan Kepala Sekolah | Orang | 50 orang | | | | | | | | |
| | Diklat Asesor PKG | Orang | 30 orang | | | | | | | | |
| | Dikiat Penilai Angka Kredit | Orang | 15 orang | | | | | | | | |
| | Serminar Narya Guru Guru Dambalaiar | nung | 28 Girii | 600 orang | 600 orang | 600 orang | 600 orang 600 orang 600 orang | 600 orang | | | |
| | Limitsh parcetta Markethan Larran Studi | o dina | 5 50 07 | 30 011711 | 2E 011711 | 40 guru | AE GUELL | | | | |
| | Jumilah Peterta Workshop Lesson Staul | Suru | | on gara | 35 guru | 40 guru | 45 guru | on guru | | | |
| | Jumilan Kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kepsek dan Pengawas berprestasi dan Osn Guru. | rejuaraa | | 4 Loinola | 4 L3 | Loinman | L3 koji izman | | | | |
| | Colvedia Color Col | = . | | rejuardan | kejuaraan | | Kejuaraan | | | | |
| | Jumian peserta Kualifikasi tenaga Pendidik 52 | onun | | 5 guru | 10 guru | 10 guru | 10 guru | 10 guru | | | |
| | Jumian peserta Pembinaan Pegawal) guru | Orang | | 500 orang | Sou orang 400 orang | 500 orang | 500 orang 500 orang | 550 orang | | | |
| | Jumiah Peserta Pelatinan Karya Luis Ilmian | onun Girin | | 60 guru | | | /> guru | SO guru | | | |
| | Jumian Peserta guru Pembelajar | onun | | 500 guru | 300 guru | 450 guru | 300 guru | 300 guru | | | |
| | Jumilan peserta mengusukan Angka Kredit Krislifikasi Guru S1 | Orang | | 50 guru | 120 orang | 30 guru | 115 Orang 120 Orang 125 Orang 150 Orang 150 Orang | 150 orang | | | |
| Kegiatan 2 : Pengelolaan kesejahteraan | יימניייייייייייייייייייייייייייייייייי | 5 | | 2 2 2 | 2 2 2 | 200 | | | 56.126.32 | | |
| Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | 5,586 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | F | Tourse Tolking | | | Jiwali Irani | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|---|-----------------|---------------------|--------|-----------|
| | | | | | - | ilger lallull | = | | Maria | 4 | |
| | | | Tahun | | | | | | Alokası | sumpe, | 1000 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Allggalall 5 | Penda | Pelaksana |
| | | | ì | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Pengelolaan Insentif PTT Kota dan DIY | Guru | 3059 Guru | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Sertifikasi Guru | Orang | 178 orang | 100 orang | 105 orang | 110 orang | 178 orang 100 orang 105 orang 110 orang 115 orang 117 orang | 117 orang | | | |
| | Pengelolaan TPG dan TAMSIL PNSD | Orang | 3045 orang | | | | | | | | |
| | Pengelolaan dan Penyaluran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Naban | Orang | 329 | 328 orang | | | | | | | |
| | | . | Orang |) | | | | | | | |
| | Pengelolaan dan penyaluran TPP | Orang | 2750 Orang | 2750 orang | 2750 orang | 2740 orang | 2780 orang | 2785 orang | | | |
| | Penyaluran Tunjangan Profesi | Orang | 1838 orang | | | | | | | | |
| | Penyaluran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Naban | Orang | 329 orang | | | | | | | | |
| | Penyusunan Perwal Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY | Dokumen | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Jumlah penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dikelola | Orang | | 3000 | 3010 | 3015 | 3020 | 3025 | | | |
| | | | | orang | orang | orang | orang | orang | | | |
| | Pengelolaan TAMSIL PNSD Iumlah penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY APBD Kota vang dikelola | Orang | | 110 orang | 112 orang | 112 orang 114 orang 3000 | 116 orang 3015 | 118 orang | | | |
| | | o i | | orang | orang | orang | orang | orang | | | |
| | Jumlah penerima Insentif GTT Pusat yang dikelola | Orang | | 160 orang | 161 orang | 162 orang | 160 orang 161 orang 162 orang 163 orang 164 orang | 164 orang | | | |
| | Jumlah penerima Gaji Naban yang dikelola | Orang | | 328 orang | 327 orang | 327 orang | 328 orang 327 orang 327 orang 326 orang | 326 orang | | | |
| Kegiatan 3 : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan | | | | | | | | | 17,616,35 9,164 | | |
| | KBS Online | Kali | 216 kali | 216 kali | 216 kali | 216 kali | 216 kali | 216 kali | | | |
| | Rangkuman data Pendidikan | Dokumen | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | | | |
| | Pengelolaan DAPODIK | Sekolah | 443 SP | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | | | |
| | | Clampla | 240.004 | sekolan | sekolan | sekolan | sekolah | sekolah | | | |
| | Penyusunan buku intormasi | EKSEMPIA | | 400 eks | 400 eks | 400 eks | 400 eks | 400 eks | | | |
| | Penyusunan Liflet Dinas Pendidikan | Eksempla r | 500 eks | 500 eks | 500 eks | 500 eks | 500 eks | 500 eks | | | |
| | Penyusunan kalender Pendidikan | Eksempla r | 650 eks | 650 eks | 650 eks | 650 eks | 650 eks | 650 eks | | | |
| | Pengelolaan Wabsite Dinas | Bulan | 12 bl | 12 bl | 12 bl | 12 bl | 12 bl | 12 bl | | | |
| | Pendaftaran PPDB | Sekolah | 45 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | | | |
| | | | sekolah | sekolah | sekolah | sekolah | sekolah | sekolah | | | |
| | Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan | Aplikasi | 2 aplikasi | 10 anlikasi | 10 anlikasi | 10 anlikasi | 10 anlikasi | 10 anlikasi | | | |
| | Jumlah Aplikasi Yang Dikelola | Aplikasi | | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | | | |
| | | | | aplikasi | aplikasi | aplikasi | aplikasi | aplikasi | | | |
| Kegiatan 4 : Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah | | | | | | | | | 175,259,6 88,865 | | |
| | Pengelolaan dana JPD | Siswa | 14.500 | 15689 | 15499 | 15532 | 15530 asiswa | 15415 aciewa | | | |
| | Pengelolaan Beasiswa dan PIP | Siswa | 2000 | 12500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | | | |
| | | | siswa | siswa | siswa | siswa | siswa | siswa | | | |

| | | | | | Ta. | Target Tahunan | E E | | Indikatif | | |
|--|---|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------------|
| | | | Tahun | | | | | | | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | 707 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Pengelolaan Dana Tunggakan | Siswa | 150 siswa | 90 siswa | 75 siswa | 60 siswa | 45 siswa | 30 siswa | | | |
| | Pengelolaan PKH | Siswa | 1500 | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Retrivel | Siswa | siswa 15 siswa | 15 siswa | 15 siswa | 15 siswa | 15 siswa | 15 siswa | | | |
| Kegiatan 5 : Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA | | | | | | | | | 228,444,7 39,515 | | |
| | Pengelolaan APBS | Sekolah | 318 sekolah | 318 sekolah | 318 sekolah | 318 sekolah | 318 sekolah | 318 sekolah | | | |
| | Pengelolaan BOS | Sekolah | 318 sekolah | | | | | | | | |
| | Pengelolaan BOSDA Negeri | Sekolah | 129 sekolah | 109 sekolah | 109 sekolah | | | 109 sekolah | | | |
| | Pengelolaan BOSDA Swasta | Sekolah | | 349 sekolah | 349 sekolah | 349 sekolah | 349 sekolah | 349 sekolah | | | |
| | Pengelolaan Dana Bantuan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional | Sekolah | 318 sekolah | 231 sekolah | 231 sekolah | 231 sekolah | 231 sekolah | 231 sekolah | | | |
| | Pengelolaan Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan | Sekolah | 318 sekolah | 109 sekolah | 109 sekolah | 109 sekolah | 109 sekolah | 109 sekolah | | | |
| Kegiatan 6 : Pengelolaan Pendidikan Inklusi | | | | | | | | | 6,605,533, 693 | | |
| | Workshop Kurikulum ABK | Dokumen 1 | 1 . | 1. | 2 . | 2 | 4 . | | | | |
| | | - | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| | Workshop Pengelolaan Sekolan Penyelenggara Pendidikan Inklusi | Dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | ı dokumen | 1 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | ı dokumen | | | |
| | Workshop pemenuhan Sarpras pendidikan inklusi | Sekolah | 45 sek | 45 sek | 50 sek | 55 sek | 60 sek | 65 sek | | | |
| | AMTGPK | GPK | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Insentif GPK | GPK | | 110 GPK 115 GPK | 115 GPK | 120 GPK 125 GPK | 125 GPK | 130 GPK | | | |
| | Pendataan ABK di SPPI | Siswa | 150 siswa | 1 dokumen | 1 dokumen dokumen | 1 dokumen dokumen | | 1 dokumen | | | |
| | Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk guru/GPK | Guru | 100 guru 100 guru | 100 guru | | 160 guru | | 180 guru | | | |
| | Pelatihan pendidikan inklusi Tk lanjut untuk guru/GPK Assesman siswa | Guru Siswa | 150 ciewa | 150 ciswa | 150 guru 150 siswa | 150 guru 160 guru 170 guru 180 guru 170 siswa 150 siswa 160 siswa 160 siswa 170 siswa 180 siswa | 170 guru 170 siswa | 180 guru | | | |
| | Diklat vokasi membuat kue | Orang | | 15 orang | | | | | | | |
| | Diklat vokasi melukis kaca | Orang | 35 orang | | | | | | | | |
| | Diklat vokasi Batik ABK lambat belajar | Orang | 106 orang 35 orang | 35 orang | | | | | | | |
| | Diklat vokasi | Orang | | | 90 orang | 90 orang | 90 orang | 90 orang | | | |
| I ujuan 5 : Resetaraan gender INDIKATOR SDG's | 5 2 1 (a) Prevalensi kekerasan terhadan perempilan | | | | | | | | | | |
| | 5.2.2. (a) Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program PEMBERDAYAAN | PROGRAM 1:Program PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | | | | 6,666,935, 242 | io a | Dinas Pemberdayaan |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Pengarusutamaan Gender | | | | | | | | | | ≅ & | Masyarakat, Perempuan, |
| Kegiatan 2 : Pembinaan Partisipasi dan | | | | | | | | | | g | dan |
| Perindungan Perempuan | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | Target Tahunan | lan | | Indikatif | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---------------------|------|----------------|------|------|--------------------|-------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 1 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | 707 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| Kegiatan 3 : UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan | - | | | | | | | | | | Perlindungan Anak |
| INDIKATOR SDG's | 5.6.1. (a) Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) | unmetneed) | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 :Program KELUARGA BERE | PROGRAM 1 :Program KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA | | | | | | | | 11,447,01 7,898 | | Dinas Pengendalian |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Pelayanan | | | | | | | | | | | Penduduk dan |
| Keluarga Berencana | Pus yang Terlayani KB | PUS/ | 1210 PUS 8 jenis | 8 jenis | 7 | 9 | 9 | 9 | | | Keluarga Berencana |
| | Kampung KB | Kegiatan/ 1 kampung k KB | 1 kegiatan | 14 kampung KB | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | Pembinaan dan EvaluasiProgram KB | Pertemina 16 | 16 | 6 ienis | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | reliibilidali vali Evaluasiri vgi alii ND | n/Jenis F | ro Pertemua n tingkat Kota, 62 | olells | | | | | | | |
| | | | pertemua n tingkat Kecamata | | | | | | | | |
| | | | _ | | | | | | | | |
| | Pembinaan Kelompok KB Pria | Jue | 32 | 2 jenis | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | A - Latel. | | kegiatan | 9 | ç | 5 | 9 | 5 | | | |
| | Pelatihan Konseling bagi Pendidik dan Konselor Sebaya | | 20 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | | | |
| | Sosialisasi Kesehatan Reproduksi melalui Media Cetak | Eksempla (r | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | Pertemuan Sosialisasi Kespro | Pertemua 26 | 56 | 3 jenis | 4 | 4 | 3 | 2 | | | |
| | | n/Jenis | pertemua | | | | | | | | |
| | Lomba PIK R | Jenis (| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Dialog Remaja | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Jumlah kegiatan pengukuhan dan pembentukan kampung KB | Kegiatan 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan yang disasar pembinaan dan evaluasi PIK R | Pertemua 204 n | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah yang disasar kegiatan lomba remaja dan PIK R | Kegiatan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Jumlah draft yang disasar penyusunan pedoman KIE Kespro wilayah | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neglatan z : neglatan Pembinaan Pembangunan Keluarga | Pembinaan Kegiatan Pembangunan Keluarga | Pertemua 71 perte- | 71 perte- | 3 jenis | 33 | 8 | ж | 33 | | | |
| | | | muan | | | | | | | | |
| | Penguatan Kelompok BKS dan UPPKS | Kelompo (k | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pendampingan Kelompok BKS dan UPPKS | | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Penguatan Jejaring Kegiatan Pembangunan Keluarga | Jenis (| 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Pelatihan Kader BKS dan UPPKS | Pertemua 19 perte- n/ Jenis muan | 19 perte- muan | 2 | 33 | æ | m | 8 | | | |
| | Sosialisasi, motivasi dan pembinaan Ketahanan Keluarga (penerapan 8 fungsi Jenis | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Keluaiga)> Keluaiga IIIuua (< 3 taliuli), aliggota bnb, koliiuliitas | | | | | | | | | | |

| | | | | | Tar | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|---|--|-----------------------|---------------|------|------|----------------|------|------|---------------------|-------|--------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi Anggaran | Sumbe | Instansi |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 Tahunan | Penda | Pelaksana |
| | | | | | | | | | (Rp.) | | |
| | Promosi hasil kelp. UPPKS | | | | | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Pembinaan dan seleksi bidang Pembangunan Keluarga | Kegiatan 0 | Н | | | 7 | 7 | 1 | | | |
| | Jumlah pertemuan kelompok BKS | Pertemua 890 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | n BKB, BKR, BKL | | | | | | | | | |
| | Jumlah pertemuan pemantauan dan monitoring kelompok BKS | Kecamata 14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan Forum BKB Kota dan Kecamatan | Pertemua 16 n | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah Family Gathering BKL | Kegiatan 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah draft buku pegangan Program KKBPK | Draft 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan kelompok UPPKS | Pertemua 460 n | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah event kontak dagang kelompok UPPKS Kota Yogyakarta | Event 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan kelompok UPPKS dengan mitra kerja | Pertemua 1 n | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah pertemuan pengurus BPC AKU Kota | Pertemua 17 n | 0 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah kegiatan peningkatan kewirausahaan dan keterampilan kelompok UPPKS | Kegiatan 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Tujuan 6 : Air bersih dan sanitasi yang layak | yak | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG'S 6.1.1 Persentase Kualit PBOCBAM 4.0.0.0000 DENINGKATAN MEELATAN MAKSAABAKAT | 6.1.1 Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan | | | | | | | | | _ | 200 |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Kesehatan | DETIALIAN MASYAKAKAI | | | | | | | | 7,274,437, | | Dinas Kesehatan |
| Keluarga dan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | 407 | | |
| | Petugas mendapatakan update knowladge dalam pelayanan KIA Gizi | | | | | 491 | 491 | 491 | | | |
| | Jumlah kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas pelayanan KIA Gizi | | | 318 | | 318 | 318 | 318 | | | |
| | Laporan Survellans KIA Gizi Kebijakan / Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi | Dokumen 7 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi | Faskes 24 | | 24 2 | | 24 | 24 | 24 | | | |
| | Dokumen Perencanaan KIA Gizi | _ | | - | | 1 | 7 | 1 | | | |
| | Laporan Skrening Hipotiroid Kongenital | Laporan 1 | | 11 | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Promosi Kesehatan dan Demberdayaan Masyarakat di Bidang | ו באגנונים וסווסמ ומתן ומווון הכומר ממון ממממנת וופעמר צומם וא | | | | | 4 | 1 | 1 | 9,703,503, | | |
| Kesehatan | Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan | Institusi 20 | | | | 20 | 20 | 20 | ì | | |
| | Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan | Sekolah 30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan | Lokasi 20 (Masjid) | 200 2 | | | 200 | 200 | 200 | | | |
| | Frekwensi Siaran Radio. TV dan media cetak mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan | Kali 18 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| | Frekwensi Publikasi Program kesehatan melalui kegiatan massal | Kegiatan 1 | 1 | 1 | | 1 | τ- | 1 | | | |
| | | (Pameran Sekaten) | | | | | | | | | |
| | Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota | Dokumen 1 | Т | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | Dokumen 1 | Н | | | 1 | 1 | + | | | |

| Application Continue Contin | | | | | | Ĕ | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|--|---|---------------|--------|----------|--------------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|------------|-----------------------|
| Satuan Dasar Lange Lan | | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 1 |
| Tabluman | | rogram/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | r Penda | Instansi Pelaksana |
| Dokumen 1 | | | | 2017 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| Notemen 12 12 12 12 12 12 13 13 | | Profil PHBS | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kali | | Data layanan lansia di rumah sehat lansia | Dokumen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Sampel 2000 | | Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat | | 8 | 6 | cc | 33 | 33 | 8 | | | |
| Sampel 2000 < | Kegiatan 3 : Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Keria | | | | | | | | | 4,973,303, | | |
| Sekolah SO SO SO SO SO SO | | | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | |
| Section 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Naii | | Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kali 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | Data Kesehatan Lingkungan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kali 2 6 | | Frekwensi Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Dokumen | | Frekwensi pelaksanaan desinfo tentang penyehatan lingkungan | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Kali 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 Puskesma 18 <td></td> <td>Data pengelolaan limbah medis cair</td> <td>Dokumen</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> | | Data pengelolaan limbah medis cair | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | | | |
| Puskesma 18 18 18 18 18 18 18 18 s | | Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM | Kali | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| Puskesma 5 6 6 6 7 1 2 2 | | Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya | Puskesma s | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| Kali 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 | | Jumlah Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor | Puskesma | 5 | 2 | ıs | 2 | .c | 22 | | | |
| Kali 2 3 | | Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Dokumen 1 | | Frekwensi sosialisai penerapan prinsip kesehatan kerja | Kali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| SR 262 SR 262 SR 262 SR 262 SR 262 SR 55.38 meter 82,6 m 90 m 9 | | Dokumen kajian review EHRA | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| SR 262 SR 262 SR 262 SR 262 SR 262 SR 263 SR 2538 meter 82,6 m 90 m 9 | INDIKATOR SDG's | 6.2.1. (e) Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai | | | | | | | | | | |
| SR 262 SR 262 SR 262 SR 262 SR 262 SR 253 8 meter 82,6 m 90 m 9 | PROGRAM 1:Program PENATAAN PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN TATA BANGUNAN | | | | | | | | | | ۵ | inas PUPKP |
| SR 262 SR 262 SR 262 SR 262 SR 262 SR 5538 meter 82,6 m 90 m 9 | Kegiatan 1 : Peningkatan kualitas sarana | | | | | | | | | 73,394,37 | | |
| ## 202.3N 202.3N 202.3N 202.5N | prasarana dasar permukiman | Danahan an rang Casah masan Disasah | | 9000 | 9000 | 90.000 | 9000 | 92.55 | 93.030 | 5,538 | | |
| % 83,22% 84% 85,09% 86,21% 87,62% 9 kali - - - 919 4 kali - - - 919 1 kali - - - - 2 kali - - - - 2 kali - - - - 2 kali - - - - matan matan matan matan matan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | | 82.6 m | 90 m | 90 m | 90 m | nc 202 | 90 m | | | |
| \$456,633, 919 9 kali | | pan saluran air limbah yang memadai | | 83,22% | 84% | 84,06% | 85,09% | 86,21% | 87,62% | | | |
| SydSe,633, 9 kali | Tujuan 8 : Pekerjaan layak dan pertumbu | | | | | | | | | | | |
| 5,456,633, 9 kaii | INDIKATOR SDG's | 8.3.1. (c) Persentase peningkatan omset UKM yang dibina | | | | | | | | | | |
| Pengembangan Kemitraan dan Pembiayaan UMK 9 kali -< | PROGRAM 1: Program PENGEMBANGAN I | KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MIKRO | | | | | | | | | | inas Koperasi, |
| 9 kali | Kegiatan 1 : Kemitraan dan Pembiayaan UMK | | | | | | | | | 5,456,633, 919 | 5 Z | KM, dan akertrans |
| 4 kali | | Pengembangan Kemitraan dan Pembiayaan UMK | | 9 kali | | | | | | | | |
| 1 kali | | UMK Promo dan peluang investasi | | 4 kali | | | | | | | | |
| 2 kali | | Gebyar UMK | | 1 kali | | | | | | | | |
| 14 Keca | | Inovasi Pengembangan dan Pemasaran UMK | | 2 kali | | | | | | | | |
| - 14 keca- 1 | | Penjajagan, Pengembangan, Kerjasama, Kemitraan dan Tindaklanjut UMK | | 2 kali | | | | | | | | |
| - 5 kali - 6 kali 1 kali 1 draft 1 draft 1 draft 1 draft 1 draft 1 draft | | Pendampingan Izin usaha Mikro (IUM) | | | 14 Keca- | 14 Keca- | 14 Keca- | 14 Keca- | 14 Keca- | | | |
| ik dan Media Cetak - 7 kali 6 kali 1 draft | | Dameran dan Promosi Produk 11MK | | I. | Fkali | rilataii 5 kali | F kali | riataii 5 kali | F kali | | | |
| - 6 kaii 8 kali 8 kali 8 kali - 1 draft 1 draft 1 draft 1 draft | | Keriasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak | | | 7 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | | | |
| - 1 draft 1 draft 1 draft 1 draft | | Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK | | l. | 6 kali | 8 kali | 8 kali | 8 kali | 8 kali | | | |
| | | Penyusunan Mekanisme Tentang UMK | | | 1 draft | 1 draft | 1 draft | 1 draft | 1 draft | | | |

| | | | | | F | Target Tahunan | an | | ١. | | |
|--|--|---------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|--------------------|-------|-----------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi Su | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Pelaksana |
| | | | 707 | | | | | | Tahunan r (Rp.) | naan | |
| | Fasilitasi Legalitas bagi UMK | | | 0 | 10 pelaku UMK | 10 pelaku UMK | 10 pelaku 10 pelaku 10 pelaku UMK UMK UMK UMK | 10 pelaku UMK | | | |
| | Kemitraan dengan Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) dan Perguruan Tinggi | | , | 2 draft | | | | , | | | |
| | Kemitraan dengan lembaga Pemerintah/Lembaga swasta | | ļ | | 1 draft | 1 draft | 1 draft | 1 draft | | | |
| | Pengembangan UMK melalui Inovasi dan Kreasi | | | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| Kegiatan 2 : Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdavaan UMK | | | | | | | | | 6,653,515, 482 | | |
| | Pelatihan Bisnis Rumahan/HBC (Home Bussiness Camp) IV" | | 1 kali/ | | | | | | | | |
| | II observed on the second of the second on t | | paket | | | | | | | | |
| | Cathoring tomitation moments defended | | U Kall | | | | | | | | |
| | "Aiang promosi dekranas pameran" | | ı kalı 2 kali | | | | | | | | |
| | "Pemasaran Produkdalam Kota member Dekranas" | | 4 orang,2 | | | | | | | | |
| | "Cotak Buku Hacil Lomba Disain Batik Khas logia" | | 250 ak- | | | | | | | | |
| | Cetan Duna Hashi Lolling Disalli Datin Nilas Jogla | | semplar | ı | , | | ı | | | | |
| | "Cetak Buku batikwama alam" | | 250 ek- semplar | , | | | , | | | | |
| | Pendampingan IUM | | 14 Kec | | | | | | | | |
| | "Operasional Pusat Pengembangan UMKM" | | 5 ore/11bln | | | | | | | | |
| | "Konsultasi Bisnis dan Managemen bagi UMKM" | | 3 org x 11 | | | | | | | | |
| | Pengembangan produk UMKM di luar Daerah" | | 3 kali | | | | | | | | |
| | Indonesia Fashion Week (IFW) | | 3 paket | | | | | | | | |
| | Gebyar Potensi Usaha Mikro kecil | | 0 paket | | | , | | , | | | |
| | Kajian Pola Distribusi dan Wilayah Pemasaran Produk UMKM | | 1 paket | | | | | | | | |
| | Pemantapan Regulasi dan Pengembangan UMKM | | 3 kali | | | | | | | | |
| | Studi Komparasi Kajian | | 3 kali | | | | | | | | |
| | Penumbuhan Wirausaha Baru | | | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| | Permunaan dan Pengermangan Permangan Apparate dan Manajamen hagi | | | 2 Kali 1 kali | 1 kali | 1 kali | 2 kall | 2 Kall | | | |
| | Usaha Mikro | | | | | | | | | | |
| | Promosi Produk UMK | | | 6 lokasi | 8 lokasi | 8 lokasi | 8 lokasi | 8 lokasi | | | |
| | Kajian Promosi Usaha Mikro | | | 1 kali | | | | | | | |
| | Pelatihan Manajemen Pemasaran | | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | Updating Database UMK | | 1 paket | , | | | | | | | |
| PROGRAM 1-Program PERLINDLINGAN | INDIKATOK SUG S BEOGRAM 1-DEGREE BELINDLINGAN DAN BENGEMBANGAN TEMBAGA TENAGA KERIA | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pembinaan. Pengembangan | | | | | | | | | 1.568.159. | ō | Dinas Koperasi. |
| Pekerja dan Pengupahan | | | | | | | | | 456 | 5 | UKM, dan |
| | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ž | Nakertrans |
| | | | 11 | 0, | 0 , | 0 , | 0, | 0 , | | | |
| | Hasii Survey Kebutunan Hidup Layak (KHL) | Laporan | | | | | | | | | |

| | | | | | = | larget lanunan | E | | | 1 | |
|---|---|-------------------------|---------------|-------------|------|----------------|------|------------|-------------------|-------------|-----------------|
| | | | Tahun | | | | | | Anggaran S | equino L | Instansi |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Pelaksana |
| | Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial | perusaha 4 an | 40 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja | perusaha 4 an | 40 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | Pembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 | kali/ per- 3 usahaan | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | Pemantauan THR Keagamaan dan uang servis | kali/per- 1 usahaan | _ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | Sosialisasi Penetapan UMK 2019 | kali/per- 1 usahaan | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| Kegiatan 2 : Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga | | | | | | | | | 2,267,523, 000 | | |
| Kerja | Pengembangan Hubungan Industrial bagi Siswa klas 3 SMKN . | Siswa | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Lokakarya terhadap Pengusaha/SP/Buruh | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Pembinaan Syarat Rerja di Perusanaan. | perusana u an | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial | Kasus | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Deteksi Dini Ketenagakerjaan | Perusaha (an | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB | perusaha (an | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah | Kesepaka (tan | 0 | es es | e | æ | es | e | | | |
| | Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY. | nen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Verifikasi SP/SB | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain | Dokumen (| 0 | 1 | 1 | 1 | н | - 1 | | | |
| INDIKATOR SDG's | INDIKATOR SDG's 8.5.2* Persentase jumlah penganggur | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pelatihan Produktifitas Tenaga Keria dan Pemhinaan Lembaga | U DAN TENENTATATA TENANGA NENDA DAN TRANSMININAS | | | | | | | | 12,739,25 | <u>`</u> ā∃ | Dinas Koperasi, |
| Pelatihan Kerja | Pencari Kerja yang dilatih melalui: | | | | | | | | ! | ž | Nakertrans |
| | Pelatihan MTU: | | | | | | | | | | |
| | Pelatihan Teknisi HP | | 20 orang | | | | | | | | |
| | Pelatihan Sablon/Percetakan | 13 | 20 orang | | | | | | | | |
| | Pelatihan Audio Visual & Multimedia Fotografi | | 20 orang | | | | | | | | |
| | Pelatihan Bengkel Mobil | | 20 orang | | | | | | | | |
| | Pelatihan Membatik (Kec. Gedongtengen) | ' | | 20 orang | | | | | | | |
| | Pelatihan Membatik Lanjutan (Kec. Jetis & Kec. Kotagede) | | | 20 orang | | | | | | | |
| | Pelatihan Institusional: | | | 20 01 811 8 | | | | | | | |
| | Pelatihan Akupresur Lanjutan | | 20 orang | | | | | | | | |
| | Pelatihan Teknik Pendingin | (4 | 20 orang | | | | | | | | |
| | Pelatihan Cleaning Service | | 20 orang | | | | | | | | |

| | | | | | ! | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | | Target Tahunan | a | | Indikatif | 4 | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Tahun Satuan Dasar | II 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | _ | | Instansi Pelaksana |
| | | 2017 | | | | | | Tahunan naan (Rp.) | | |
| | Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Sablon | 20 orang | - Br | | | | | | | |
| | Pelayanan Perdagangan Retail | 20 orang | - Br | | , | | | | | |
| | peserta sertifikasi kompetensi Akupresur | 20 orang | - 8 | | | | | | | |
| | Peserta Bimtek Persiapan Sertifikasi Kompetensi Instruktur LPK | 20 orang | - gr | | | | | | | |
| | Peserta Bimtek Metode Mengajar dan Pembuatan Kurikulum/Silabus bagi | 20 orang | - 60 | | | | | | | |
| | Instruktur LPK | | , | | | | | | | |
| | Peserta Bimtek Administrasi Perkantoran bagi LPK | 20 orang | - B(| | | | | | | |
| | Satpam | 20 orang | ng 20 orang | ı | | | | | | |
| | Stir Mobil dan SIM A | 120 orang | | - 50 | , | | | | | |
| | Perhotelan | 25 orang | | , | | | | | | |
| | Front Office | 40 orang | | י מ | | | | | | |
| | Travel Agent | 20 orang | | , | | | | | | |
| | Pembliatan Kije Roti | 40 orang | | י ו | | | | | | |
| | Tata Boga | An orang | | | | | l. | | | |
| | Tata Bias Korantikan | 20 orang | | 0.00 | | | | | | |
| | Tata Disc Descentinal | 20 orang | | | | | | | | |
| | lata Rias Pengantin | 20 ora | | , | | | | | | |
| | Tata Rias Pengantin Paes Ageng | 20 orang | | , | | | | | | |
| | Pelatihan Menjahit Dasar | 20 orang | | , | , | | | | | |
| | Menjahit Mahir | 20 orang | | , | | | | | | |
| | Menjahit kebaya dan Surjan | 20 orang | | , | | | | | | |
| | Spa Terapis | 20 orang | | , | | | | | | |
| | Pelatihan untuk Difabel | 20 orang | | , | | | | | | |
| | Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Website | , | | , | , | | | | | |
| | Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R | 20 orang | | , | , | , | | | | |
| | Peserta Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan | 20 orang | ng 20 orang | ı bn | , | | | | | |
| | Calon Peserta Pelatihan yang mendapat SosialisasiProgram Pelatihan dan | 50 orang | | - Bu | | | | | | |
| | Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | |
| | Peserta Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya | 30 orang | ng 30 orang | , | , | , | | | | |
| | Peserta Sertifikasi Kompetensi Perhotelan | 20 orang | ng 20 orang | ı ı | , | | | | | |
| | Peserta Bimtek Customer Service Excelent bagi LPK | | 20 orang | , | | | | | | |
| | Peserta Bimtek Persiapan Akreditasi bagi LPK | , | 20 orang | , | , | | | | | |
| | Peserta Bimtek Jurnalistik bagi LPK | , | 20 orang | , | , | | | | | |
| | LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi | 5 LPK | | 5 LPK | 5 LPK | | 5 LPK | | | |
| | LPK yang memperoleh penilaian Kinerja | 20 LPK | 20 LPK | 20 LPK | 20 LPK | 20 LPK | 20 LPK | | | |
| | LPK yang memperoleh pembinaan | 20 LPK | 20 LPK | 20 LPK | 20 LPK | 20 LPK | 20 LPK | | | |
| | Pelatihan Institusional | | , | 700 orang | 3 720 orang | 720 orang | 700 orang | | | |
| | Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R | | | 20 orang | | | 20 orang | | | |
| | Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan | | | 20 orang | | 20 orang | 20 orang | | | |
| | Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | 100 orang | | 100 orang | 100 orang | | | |
| | Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya | , | , | 50 orang | 50 orang | | 50 orang | | | |
| | Sertifikasi Kompetensi Perhotelan | | | 20 orang | | 20 orang | 20 orang | | | |
| | Sertifikasi Kompetensi Komputer | | | 20 orang | | | 20 orang | | | |
| | Bimtek dan Pelatihan bagi LPK | | | 60 orang | | 60 orang | | | | |
| Kegiatan 2 : Pembinaan dan | | | | | | | • | 6,517,579, | | |
| Penempatan Tenaga Kerja | | | | | | | , | 415 | | |
| | Tenaga kerja ditempatkan melalui antar kerja | 350 orang | ang - | | | | | | | |

| Program/ (Egybann/) Outpark Egybann/) Outpark | | | | | _ | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|-----------|
| Satura Dasat Das | | | | | | | | | Alokasi | Sumbe | isactsu |
| Secondario Sec | _ | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Allggalall 5 | Penda | Pelaksana |
| 15 100 100 1200 1300 1400 1300 1400 1400 1500 1400 1500 | | | 7107 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| 1500 crang 1500 crang 1500 1200 1300 14 | | Data penganggur Kota YK yang tersedia | 1 dokume | , E | | | | | | | |
| Sek Olah Sek Olah 1000 1200 1300 1400 On Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, - 1000 07ang | | Peserta didik SMK yang diberi sosialisasi PBJ dan IPK Online | 15 | | | | | | | | |
| SOO orang \$00 orang \$100 1300 1300 1400 | | | sekolah | | | | | | | | |
| No. | | Calon tenaga kerja terseleksi | 500 ora | ng 500 orang | 1100 orang | 1200 orang | 1300 | 1400 orang | | | |
| Note | | Pembekalan Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| Note 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | orang | orang | orang | orang | orang | | | |
| KKS 4 Ispocran 4 Ispocran <td></td> <td></td> <td>7 lokasi</td> <td></td> <td>7 lokasi</td> <td>7 lokasi</td> <td>7 lokasi</td> <td>7 lokasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | 7 lokasi | | 7 lokasi | 7 lokasi | 7 lokasi | 7 lokasi | | | |
| terbentuk 7 angkat- 7 angkat- 6 angkat- 9 an | | Temu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS | 4 lapora | | | | 4 laporan | 4 laporan | | | |
| 14 kgc 300 org 300 o | | Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk | 7 angka an @16 orang | | | | 6 angkat- an | 6 angkat- an | | | |
| 10 10 100 | | Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAL, AKAD dan AKAN | 14 kec | 300 org | 300 org | 300 org | | 300 org | | | |
| 100 | | Data penganggur Kota YK yang tersedia | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| Petrusaria petrusaria perusaria pe | | Perusahaan yang diberi Bimtek tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) | 100 | | | 40 | | 40 | | | |
| 1 15 15 15 15 15 15 15 | | | perusan an | | | | σ | perusana an | | | |
| Ackumen Dokumen Doku | | Sosialisasi PBJ dan IPKOn Line di BKK | | 2200org/ 15BKK | 15 BKK | 15 BKK | | 15 BKK | | | |
| Table Tabl | | Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001-2015 | н | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 1 kali 1 kali 2 | | | dokume | | | | | Dokumen | | | |
| busi Perpanjangan IMTA - 12 12 12 12 12 - 13 0 40 - 3 0 40 - 4 0 50 - 5 | | Bursa kerja (Job Fair) | 1 kali | 1 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| busi Perpanjangan IMTA - 30 - 40 - 40 - 50 - 40 - 50 - | | Data IPK Kota Yk yang tersedia | | 12 Janoran | 12 Janoran | 12 Janoran | 12 Janoran | 12 Japoran | | | |
| 1 | | Sosialisasi/Desiminasi Perda Retribusi Pernanjangan IMTA | | 30 | 40 | 40 | 200 | 200 | | | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | מספונים פספול הכסוווווונים זו בכוסס ואבת והספון בהלאמון וונונים | | perusaha | | | perusaha | perusaha an | | | |
| 48 orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | Perencanaan Tenaga Kerja Daerah | 1 dokume | | 1 dokumen | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | |
| peranggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan) 1000 | | Padat Karya Infrastruktur | 48 oran | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | |
| operasi Pelanggaran Perda pro yustisi Tersangk 1000 </td <td>INDIKATOR SDG's</td> <td>8.8.1. (a) Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman,</td> <td>dan keindahan)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | INDIKATOR SDG's | 8.8.1. (a) Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, | dan keindahan) | | | | | | | | |
| In Peraturan Jumiah tersangka yang terjaring Operasi Pelanggaran Perda pro yustisi Tersangk 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10 | PROGRAM 1: Program PENEGAKAN PERA | TURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | | | | | 0, | Satpol PP |
| Jumlah tersangka yang terjaring Operasi Pelanggaran Perda pro yustisi Tersangk 1000 | Kegiatan 1: Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi | | | | | | | | 2,296,846, 191 | | |
| Sidang pelanggaran perda di pengadilan Dokumen 700 70 | | Jumlah tersangka yang terjaring Operasi Pelanggaran Perda pro yustisi | Tersangk 1000 a | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| Penyidikan kasusu dengan berita acara singkat/biasa Kasus 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 | | Sidang pelanggaran perda di pengadilan | kumen | 200 | 200 | 700 | 200 | 700 | | | |
| Penegakan hukum terhadap saksi/tersangka yang berdomisili di luar daerah Kasus 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | | | ∞ | ∞ | ∞ | 8 | ∞ | | | |
| Penjemputan tersangka dalam daerah Kasus 24 | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Operasi Gugus Ramadhan terlaporkan Laporan 20 20 20 20 20 | Kegiatan 2 : Operasi Ketertiban Umum | Penjemputan tersangka dalam daerah | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19.357.54 | | |
| Laporan 20 20 20 20 20 | | | | ; | ; | ; | | | 5,538 | | |
| | | Operasi Gugus Ramadhan terlaporkan | | 20 | 50 | 20 | 50 | 50 | | | |

| | | | | | i " | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|--|---------|---------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------|------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi Anggaran | Sumbe | Instansi |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2 | Penda | Pelaksana |
| | | | 107 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Operasi Penindakan Hukum Terpadu terlaporkan | Laporan | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | | |
| | Operasi Jogobaran terlaporkan | Laporan | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | | |
| | Operasi penertiban gabungan terlaporkan | Laporan | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | | | |
| | Praktek Kerja Lapangan ke luar daerah | Orang | 20 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Operasi Penertiban Mandiri di Kawasan Jogia Utara dan Jogia Selatan | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | terlaporkan | | | | | | | | | | |
| | Operasi Jogja Tertib Rokok terlaporkan | Laporan | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 8.9.1. (b) Jumlah kunjungan wisatawan | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA | N DAN PEMASARAN PARIWISATA | | | | | | | | | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Pengelolaan dan | | | | | | | | | 5,013,549, | | Pariwisata |
| Pengembangan Obyek Daya Tarik | | | | | | | | | 143 | | |
| Wisata | Pengembangan ODTW unggulan | Kali | | 7 kali | 7 kali | 7 kali | 7 kali | 7 kali | | | |
| | Pengembangan jenis dan pemaketan ODTW | Dokumen | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | | | | dokumen | | | dokumen dokumen | dokumen | | | |
| | Sadar wisata | Kali | , | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | | | |
| | Monitoring dan inventarisasi ODTW | Dokumen | | 7 | | 7 | 1 | 7 | | | |
| | | | | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| | Pengembangan kampung wisata | Kali | 1 kali | 11 kali | 11 kali | 11 kali | 11 kali | 11 kali | | | |
| | Calender event mingguan | Kali | 52 kali | | | | | | | | |
| | Calender event tahunan | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Gelar potensi | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Sosialisasi Kampung Wisata/Pokdarwis | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Workshop Kampung Wisata | Kali | 1 kali | , | , | | , | | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Promosi dan Pemasaran Wisata | | | | | | | | | 14,527,59 9.589 | | |
| | Application and a series of the series of th | Dokumen | | , | , | , | , | 2 | | | |
| | Alialisa pasal Wisalawali | | | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| | Dengembangan jaringan kerjasama nariwisata | Kali | | 10 kali | 10 kali | 10 kali | 10 kali | 10 kali | | | |
| | r engemosinasingan jamingan ke jasama paniwisata Dzamosi nariwitata dalam dan luar nagari | ilcy | | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | | | |
| | Front nariwitata unamilan | iley | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | Evelit paliwisata dilgguali | Jan J | | I Nall | I Nall | ı valı | I Ndil | ı valı | | | |
| | Pelayanan intormasi pariwisata | Laporan | 7 Jenis | 21 Japoran | 21 Japoran | 21 Japoran | 21 Iaporan | 21 Japoran | | | |
| | Pameran pariwisata | Kali | 3 kali | | | | | | | | |
| | Travel dialog | Kali | 2 kali | | | | | | | | |
| | Jogja Night Carnival (Pawai Budaya Jogja) | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Famtrip | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Jogia Day | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Pembuatan materi pariwisata | Jenis | 6 jenis | | | | | | | | |
| | Promosi media massa | Kali | 3 kali | | | | | | | | |
| | Pemilihan Dimas Diajeng Kota Yogvakarta | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Pameran Pariwiswata Luar Negeri | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Promosi media massa Luar Nagari | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | TPO | Kali | ı kali | | | | | | | | |
| | Java Promo | Kali | 3 kali | | | | | | | | |
| | Pengiriman Misi Promosi Pariwisata | Kali | 2 kali | | | | | | | | |
| | Perikatan keriasama Pariwisata | Kali | 2 kali | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Ta | Target Tahunan | u. | | Indikatif | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | instansi Pelaksana |
| | | | 7107 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Penjajagan Pariwisata | Kali | 2 kali | | | | | | | | |
| | Workshop dan Seminar Pariwisata | Kali | 7 kali | | | | | | | | |
| | Perhitungan jumlah kunjungan wisatawan | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Jogja Kreatif | Kali | 11 kali | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Kegiatan Pengelolaan Kawasan Malioboro | | | | | | | | | 24,668,66 6,328 | | |
| | Pengamanan Kawasan Malioboro / Jaga Kawasan Malioboro | Orang | 80 orang | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| | Pengawasan CCTV | Laporan | 12 bendel | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | | | laporan | laporan | laporan | laporan | laporan | laporan | | | |
| | Penyapuan Jl. Ahmad Yani (Margo Mulyo), Jl. Malioboro dan TKP ABA | Bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| | Pemeliharaan laringan Listrik kawasan Malioboro | Paket | 1 naket | 222 rdii 222 titik | 222 Kall | 222 Kall | 222 Kall | 222 rail | | | |
| | Pemeliharaan CCTV | Ruang | 1 ruang | 1 ruang | 1 ruang | 1 ruang | 1 ruang | 1 ruang | | | |
| | | Kendali | kendali, | kendali, | kendali, | kendali, | kendali, | kendali, | | | |
| | O control in the Charles of the Char | dan cctv | 22 cctv | 22 cctv | 22 cctv | 22 cctv | 22 cctv | 22 cctv | | | |
| | rememaran studio nadio dan jamigan bawan tahan | dan iar- | dan ia- | dan jar- | dan ia- | dan jar- | dan jar- | dan jar- | | | |
| | | ingannya | ringannya | ingannya | ringannya | ingannya | ingannya | ingannya | | | |
| | Prunning | Kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| | Pengelolaan Radio Kawasan Wisata Malioboro | Dokumen 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | | | |
| | | | bulan/lap | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| | Tip I work of the second seconds of the second secon | - | oran 1 pakat | 10 500 | 20,140 | 1. hl.n | 12 bules | 10 500 | | | |
| | IIC dall Layallali Peligaduali dali Pelijiliali | Dulali C-1-1 | ı paket | 12 Dulaii | 12 Dulaii | 12 Dulaii | 12 Dulaii | 12 Dulaii | | | |
| | Cetak bianko | Сетак | 8 Jenis cetak | 8 Jenis cetak | 8 Jenis cetak | 8 Jenis cetak | 8 Jenis cetak | 8 jenis cetak | | | |
| | Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2 | Dokumen 12 bulan | 12 bulan | 12 | 12 | | 12 | 12 | | | |
| | | | | dokumen | dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| | Pengurus Frekuensi Radio Pancar ulang/HT | ljin | 1 kali ijin | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Taman dan Pergola | Paket | 1 paket | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Panggung mobile | Buah | 1 buah | | | | | | | | |
| | Pembinaan PKL | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Pembinaan Angkutan Non mesin | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Pembinaan Lesenan | Kalı | 1 kalı | | | | | | | | |
| | | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Pembinaan guide Kawasan Malloboro | Kall | ı kalı | | | | | | | | |
| | Laporan hasil kunjungan konsultasi/undangan/promosi | Undanga | 4 laporan | | | | | | | | |
| | | = | KOIISUILASI / | | | | | | | | |
| | | | , undangan | | | | | | | | |
| Tujuan 9 : Industri, inovasi dan infrastruktur | truktur | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 9.1.1. (a) Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan | ngunan Peleng | kap Jalan | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program PENINGKATAN | PROGRAMI 1:Program PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | | | | | | | | 234,035,5 76,399 | ā | Dinas PUPKP |
| Kegiatan 1 : Peningkatan Jalan dan | | | 000 | | 000 | | 000 | 000 | | | |
| Jembatan | Peningkatan Jalan | 7 Ш | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | ı | | Ē | Target Tahunan | 2 | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|------------------|----------|------|----------------|------|------|------------------|------------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | İ | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| Kegiatan 2 : Pemeliharaan Jalan dan | Peningkatan Jembatan B | Buah 1 | | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | | | |
| Jembatan | Trotoar | m2 53 | 5370 | 5470 | 5570 | 2670 | 5770 | 5870 | | | |
| Kegiatan 3: Pengelolaan Penerangan | F . | | | | | | | 000 | | | |
| Jalan Omum | | | | | | | | 830 | | | |
| | | Titik 12 | 1276 1 | 1276 | | 1276 | 1276 | 1276 | | | |
| | PJU JI Protokol (pemeliharaan) | | | | 200 | | | 200 | | | |
| Iujuan 10: Berkurangnya kesenjangan | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 10.1.1* Rasio Gini | | | | | | | | | | : |
| PROGRAM 1:Program PENGEMBANGAN | PROGRAM 1: Program PENGEMBANGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | | | | Δ: | Dinas Koperasi, |
| Kegiatan 1: Pelatihan Produktifitas | | | | | | | | | 12,739,25 |) | UKM, dan |
| lenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga | | | | | | | | | 4,242 | 2 | Nakertrans |
| Pelatinan Kerja | Pencari Kerja yang dilatin melalui: | | | | | | | | | | |
| | Pelatinan MTU: | | | | | | | | | | |
| | Pelatihan Teknisi HP | 20 | 20 orang - | | | | | | | | |
| | Pelatihan Sablon/Percetakan | 20 | orang - | | | | | | | | |
| | Pelatihan Audio Visual & Multimedia Fotografi | 20 | 20 orang - | | | | | | | | |
| | Pelatihan Bengkel Mobil | 20 | orang - | ľ | | | | | | | |
| | Pelatihan Membatik (Kec. Gedongtengen) | • | | 20 orang | | | | | | | |
| | Pelatihan Membatik Laniutan (Kec. Jetis & Kec. Kotagede) | | | 20 orang | | l. | | l. | | | |
| | Pelatihan Pembuatan Kue Roti (Kec. Umbulhario) | ٠ | 14 | 20 orang | | | | | | | |
| | Pelatihan Institusional : | | | , | | l. | | l. | | | |
| | Pelatihan Akupresur Lanjutan | 20 | 20 orang - | | | | | | | | |
| | Pelatihan Teknik Pendingin | 20 | orang - | ľ | | | | | | | |
| | Pelatihan Cleaning Service | 20 | 20 orang - | · | | | | | | | |
| | Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Sablon | 20 | 20 orang - | | | | | | | | |
| | Pelavanan Perdagangan Retail | 20 | 20 orang - | | | | | | | | |
| | peserta sertifikasi kompetensi Akupresur | 20 | 20 orang - | ľ | | ١. | | | | | |
| | Peserta Bimtek Persianan Sertifikasi Kompetensi Instruktur LPK | 20 | orang - | | | | | | | | |
| | Deserta Bimtek Metode Mengalar dan Dembuatan Kurikulum/Silahus bagi | 2 02 | 20 orang - | ľ | | l. | | l. | | | |
| | Peserta biinten Metode Mengajar dan Penbuatan Numkulun/Silabus Dagi Instruktur LPK | 02 | - 8 8 8 | | | | | | | | |
| | Peserta Bimtek Administrasi Perkantoran bagi LPK | 20 | 20 orang - | | | | | | | | |
| | Satpam | 20 | 20 orang 2 | 20 orang | | | | | | | |
| | Stir Mobil dan SIM A | 12 | - | 20 orang | | | | | | | |
| | Perhotelan | 25 | | 20 orang | | | | | | | |
| | Front Office | 40 | | 20 orang | | | | | | | |
| | Travel Agent | 20 | | 20 orang | | | | | | | |
| | Pembuatan Kue Roti | 40 | | 40 orang | | | | | | | |
| | Tata Boga | 40 | | 40 orang | | | | | | | |
| | Tata Rias Kecantikan | 20 | | 40 orang | | | | | | | |
| | Tata Rias Pengantin | 20 | | 40 orang | | | | | | | |
| | Tata Rias Pengantin Paes Ageng | 20 | | 40 orang | | | | | | | |
| | Pelatihan Menjahit Dasar | 20 | 20 orang 2 | 25 orang | | | | | | | |
| | Menjahit Mahir | 20 | | 40 orang | | | | | | | |
| | Menjahit kebaya dan Surjan | 20 | 20 orang 2 | 20 orang | | | | | | | |
| | Spa Terapis | 20 | | 20 orang | | | | | | | |
| | Pelatihan untuk Difabel | 20 | | 20 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Target Tahunan | Jan | | Indikatif | | |
|---|--|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|-----------------------|
| | | Tał | Tahun | | | | | Alokasi | Sumbe | 1 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan Dasar | iar 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | Penda | instansi Pelaksana |
| | | 3 | : | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Website | | 20 orang | - 8 | | | | | | |
| | Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R | 20 orang | | - 8 | | | | | | |
| | Peserta Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan | 20 orang | | - 8 | , | , | | | | |
| | Calon Peserta Pelatihan yang mendapat SosialisasiProgram Pelatihan dan | 50 orang | ang 100 orang | - Bu | | | | | | |
| | Produktivitas Tenaga Netja | C | | | | | | | | |
| | Peserta Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya | 30 orang | | | | | | | | |
| | Peserta sertifikasi Kompetensi Perhotelan | Z0 orang | | - | | | | | | |
| | Peserta Bimtek Customer Service Excelent bagi LPK | | 20 orang | - 8 | | | | | | |
| | Peserta Bimtek Persiapan Akreditasi bagi LPK | | 20 orang | - 8 | | | | | | |
| | Peserta Bimtek Jurnalistik bagi LPK | | 20 orang | - 8 | | | | | | |
| | LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi | 5 LPK | | | 5 LPK | 5 LPK | 5 LPK | | | |
| | LPK yang memperoleh penilaian Kinerja | 20 LPK | | 20 LPK | 20 LPK | 20 LPK | 20 LPK | | | |
| | LPK yang memperoleh pembinaan | 20 LPK | K 20 LPK | 20 LPK | 20 LPK | | 20 LPK | | | |
| | Pelatihan Institusional | | | 700 oran | | | 700 orang | | | |
| | Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R | | | 20 orang | | 20 orang | 20 orang | | | |
| | Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan | | | 20 orang | 20 orang | 20 orang | 20 orang | | | |
| | SosialisasiProgram Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | 100 oran | | 100 orang | | | | |
| | Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya | , | , | 50 orang | 50 orang | 50 orang | 50 orang | | | |
| | Sertifikasi Kompetensi Perhotelan | | | 20 orang | | 20 orang | 20 orang | | | |
| | Sertifikasi Kompetensi Komputer | | , | 20 orang | | | 20 orang | | | |
| | Bimtek dan Pelatihan bagi LPK | | | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 60 orang | | | |
| Kegiatan 2 : Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja | | | | | | | | 6,517,579, 415 | | |
| | Tenaga keria ditempatkan melalui antar keria | 350 0 | 350 orang - | | | | | | | |
| | Data negranging Kota Wiyang tercedia | | | | | | | | | |
| | Data penganggu nota in yang terseura | dokumen | - nen | | | | | | | |
| | Peserta didik SMK yang diberi sosialisasi PBJ dan IPK Online | 15 | | | | | | | | |
| | Calon tenaga keria terseleksi | Sekol 2005 | Sekulari SOO orang SOO orang 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | | | |
| | | | 0 | orang | orang | orang | orang | | | |
| | Pembekalan Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, | ٠ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| | AKL, dan AKAN | | orang | orang | orang | orang | orang | | | |
| | Job Canvasing | 7 lokasi | ısi 7 lokasi | | 7 lokasi | 7 lokasi | 7 lokasi | | | |
| | Temu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS | 4 laporan | ran 4 laporan | an 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | | | |
| | Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk | 7 angkat- | ٨. | | | | 6 angkat- | | | |
| | | an @16 | 16 an | au | au | an | an | | | |
| | Socialisasi Donastan Torana Koria AKAN AKAN | orarig 14 kgc | | 2000 | 200 000 | 200 000 | 2000 | | | |
| | Data nanganggir Kata VK yang tercadia | T4 VC | 300.018 | | 300 018 | 2000 UIB | 300 UI B | | | |
| | Data penganggur nota in yang tersetia | | dokimen | T an dokumer | dokumen dokumen dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| | Perusahaan vang diberi Bimtek tentang Informasi Pasar Keria Online (IPKOL) | 100 | 20 S | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | | perusaha | aha perusaha an | na perusaha an | perusaha | perusaha an | perusaha an | | | |
| | Sosialisasi PBJ dan IPKOn Line di BKK | | 2200org/ | | 15 BKK | 15 BKK | 15 BKK | | | |
| | | | 15BKK | | | | | | | |

| | | | | | = | Target Tahiinan | 5 | | Indikatif | | |
|---|---|----------------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------|---|----------------|--------------------|-------|------------------------|
| | | | | | 2 | Ber land | | | | Sumbo | |
| | | į | Tahun | | | | | | _ | | Instansi |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Pelaksana |
| | | | i | | | | | | Tahunan n (Rp.) | naan | |
| | Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001-2015 | | 1 dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | |
| | Bursa kerja (Job Fair) | | | 1 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| | Data IPK Kota Yk yang tersedia | · | | 12 | 12 | 12 | | 12 | | | |
| | | | | laporan | laporan | laporan | ran | laporan | | | |
| | Sosialisasi/Desiminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA | | | 30 perusaha | 40 perusaha | 40 perusaha | 50 perusaha | 50 perusaha | | | |
| | | | | an | an | | an | an | | | |
| | Perencanaan Tenaga Kerja Daerah | 0 | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Padat Karya Infrastruktur | • | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 1 1 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | |
| PROGRAM 2 : Program PERLINDUNGAN L | PROGRAM 2 :Program PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA | | | | | | | | | ä | Dinas Koperasi, |
| Kegiatan 1 : Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan | | | | | | | | | 1,568,159, 456 | y s | UKM, dan Nakertrans |
| | FGD Jaminan Sosial | Kali | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta | Bulan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial | perusaha 4 an | 40 | 24 | 24 | | 24 | 24 | | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja | saha | 40 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | Pembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 | kali/pe- | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | Pemantauan THR Keagamaan dan uang servis | kali/pe- rusahaan | _ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | Sosialisasi Penetapan UMK 2019 | kali/pe- rusahaan | _ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| Kegiatan 2 : Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga | | | | | | | | | 2,267,523, 000 | | |
| Kerja | Pengembangan Hubungan Industrial bagi Siswa klas 3 SMKN . | Siswa | 2100 | | 0 | | | | | | |
| | Lokakarya terhadap Pengusaha/SP/Buruh | Buah | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan. | perusaha (an | 0 | | 20 | | | 20 | | | |
| | Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Deteksi Dini Ketenagakerjaan | Perusaha (an | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB | perusaha (an | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah | Kesepaka (| 0 | 8 | æ | 3 | æ | æ | | | |
| | Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta | _ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY. | umen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Verifikasi SP/SB | Kali (| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

| | | | | | " | Target Tahunan | ian | | Indikatif | | |
|--|---|--------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------------------|
| | | | Tahiin | | | | | | | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan Jain | Dokumen 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| PROGRAM 3 :Program PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI | UALITAS KOPERASI | | | | | | | | | | Dinas Koperasi, |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | 1,718,685, 610 | | UKM, dan Nakertrans |
| | - Diklat Akuntansi bagi Pengurus/ Pengawas Koperasi | 2 3 | 25 koperasi | | | | | | | | |
| | Sosialisasi Dewan Pengawas Syariah | 2 3 | 20 kopsvah | | | | | | | | |
| | - Bintek Standart Operasional Manajemen bagi KSP | 2 3 | 25 koperasi | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | - Bintek Administrasi Keuangan bagi Pengawas Koperasi | 2 3 | 25 koperasi | | | | | | | | |
| | Pelatihan TMT bagi Koperasi Syariah | <u> </u> | 20 kopsyah | | ı | r | | | | | |
| | Pelatihan bagi Pengawas Manajemen Koperasi Syariah | <u> </u> | 20 kopsyah | | | | | | | | |
| | Pelatihan Sistem Manajemen Koperasi bagi koperasi syariah | <u> </u> | 20 kopsyah | | r | r | , | | | | |
| | Monev Koperasi Pasif menjadi Aktif | 4 × | 10 koperasi | | | | | | | | |
| | Sosialisasi BPJS dan Perpajakan | Ř | 0 orang | | 25 orang | 25 orang | 25 orang | 25 orang | | | |
| | Bimbingan Kelembagaan Koperasi | <u> </u> | 20 koperasi | 20 koperasi | 20 koperasi | 20 koperasi | | 20 koperasi | | | |
| | Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi | ₩ ¥ | | 10 kelompok | 10 kelompok | 10 kelompok | | 10 kelompok | | | |
| | Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan | • | | | 14 kelompok | 14 kelompok | 14 kelompok | 14 kelompok | | | |
| | Bimtek bagi Pengurus Koperasi Konvensional | • | | 25 koperasi | 25 koperasi | 25 koperasi | 25 koperasi | | | | |
| | Bimtek bagi Pengurus Koperasi Syariah | | | 20 koperasi | 20 koperasi | | 20 koperasi | | | | |
| | Bimtek bagi Pengawas Koperasi Konvensional | 1 | | 20 koperasi | 20 koperasi | | 20 koperasi | 20 koperasi | | | |
| | Bimtek bagi Pengawas Koperasi Syariah | | | 20 koperasi | 20 koperasi | 20 koperasi | 20 koperasi | 20 koperasi | | | |
| | Sosialisasi Perkoperasian | ↔ <u>₹</u> ⊆ | 14 kecamata n | 7 kec | | | | 1 | | | |
| | Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok | 5.5 | 5 kopera- si 4 jenis | 20 koperasi | 20 i koperasi | 20 koperasi | 20 koperasi | 20 koperasi | | | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas | 2 3 | 2 koperasi | 2 koperasi | 2 koperasi | 2 koperasi | | 2 koperasi | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | - | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|-------|-----------|
| | | 4°E | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan Dasar | | | | | | Anggaran | _ ; | Instansi |
| | | | , 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2 40 | Penda | Pelaksana |
| | | | | | | | | (Rp.) | | |
| | Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian | 15 siswa SMP, 15 siwa | /a 15 SMP, 5 15 SMA, 5 PT | 3 jenis 5 | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | | | |
| | 7 | SMA, 5 PT | | 007 | 000 | 000 | 00 | | | |
| | Workshop /sarasehan dalam Rangka Harkop | 50 orang | | 250 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang | 100 orang | 100 orang | 100 orang | | | |
| | Monev Koperasi Syariah | 15 koperasi | | 15 koperasi | 15 koperasi | 15 koperasi | 15 koperasi | | | |
| | Monev Koperasi yang belum RAT | 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Monev Kantor Cabang KSP/USP Koperasi | , | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Kegiatan 2 : Pembinaan dan | | | | | | | | 2,278,692, | | |
| reigemuaigai noperasi | Monitoring dan Evaluasi: | 17 | | | | | | +07 | | |
| | 1. Program Dana Bergulir APBD | 11 LKM | · : _ | | | | | | | |
| | 2.Program BBM | 21 LKM/ Kop | - /- | | | | | | | |
| | 3.Program MAP | 2 LKM/ Kop | , | | | | | | | |
| | 4. Program Agribisnis | 2 LKM/kop | - 00 | | | | | | | |
| | 5.Program P3KUM | 21 LKM/kop | , ac | | | | | | | |
| | 6. Program DB Syariah | 5 Kop | | | | | | | | |
| | 7.Program Mitigasi | 7 LKM/ Kop | , | | | | | | | |
| | 8.Program PERKASA | 1 LKM/kop | , ac | | | | | | | |
| | 9. Monev DB APBD dan APBN ke lapangan | 72 LKM/ Kop | - /- | | | | | | | |
| | 10. Pinjaman Daerah MKPL | 5 Kop | | | | | | | | |
| | 11.Program Dana Bergulir DIY | 30 Kop | | | | | | | | |
| | 12. Program Pinjaman Tendanisasi PKL | 8 Kec | ' | | | | | | | |
| | 13. UED SP | 25 UED SP | ' | | | | | | | |
| | 14. BUKP | 14 BUKP | - - | | | | | | | |
| | 15.Program Bansos Koperasi Perkotaan / Perdesaan | 20 Kop | | | | | | | | |
| | 16. UKM Mart, Smesco Mart, TPKU | 5 Kop | | | | | | | | |
| | 17. Penerima LPDB Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM | 9 KOP 5 | | | | | | | | |
| | | Kegiatan | LE. | | | | | | | |
| | Pengawasan Koperasi : | | | | | | | | | |
| | - Pengawasan Koperasi dilapangan | 20 Konerasi | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | |

| | | | | | Target Tahunan | nan | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------|------------------------|
| | | | 5 | | | | | Alokasi : | Sumbe | Instansi |
| υ. | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan Sa | Satuan Dasar 2017 | ar 2018 | 8 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Pelaksana |
| | | i | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | - Pembinaan dan pengawasan koperasi head to head | 5 Koperasi | - asi | | | | | | | |
| | - Forum updating data KKS | 100 koperasi | , | | | | | | | |
| | - Penvusunan studi kebijakan pembukaan kantor cabang kantor cabang | 1 paket | · | | | | | | | |
| | pembantu dan kantor kas | | | | | | | | | |
| | - Forum komunikasi pembina, assosiasi, dan lembaga gerakan koperasi | 4 kali | | | | | | | | |
| | Monitoring dan Evaluasi | | 17 macam | 17 | 17 macam | 17 macam | 17 macam | | | |
| | Penilaian Kesehatan Koperasi | 75 | 75 | | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | koperasi | | | | koperasi | koperasi | | | |
| | Pengawasan Koperasi | | 30 koneraci | 30 koperaci | 30 koneraci | 30 koneraci | 30 koneraci | | | |
| | Forum Pembina Koperasi | | 2 kali | | | | | | | |
| | Klinik Koperasi Sehat (KKS) | 1 Kegiatan | 2 kali an | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | | | |
| | Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP | 1 Kegiatan | 1 kali an | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | Cooperative Fair | 6 Konerasi | 2 asi konerasi | 2 sci koneraci | 2 koneraci | 2 koneraci | 2 konerasi | | | |
| | Gelar Produk Koperasi dan UKM | 8 | | | | 4 | 4 | | | |
| | | Koperasi | asi Koperasi | ısi Koperasi | Koperasi | Koperasi | Koperasi | | | |
| | Jogja Expo | 4 | | 2 Fonografi | | 2 konoraci | 2 konomi | | | |
| | Demaringkatan Konerasi | roper | asi koperasi 100 | | 100 | koperasi 100 | koperasi 100 | | | |
| | relief ingnatal noperasi | | koperasi | | _ | koperasi | koperasi | | | |
| PROGRAM 4 : Program PENGEMBANGAN KEWIRAUSA | KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MIKRO | | | | | | | | ō | Dinas Koperasi, |
| Kegiatan 1 : Kemitraan dan Pembiayaan UMK | | | | | | | | 5,456,633, 919 | Ξž | UKM, dan Nakertrans |
| | Pengembangan Kemitraan dan Pembiayaan UMK | 9 kali | | | | | | | | |
| | UMK Promo dan peluang investasi | 4 kali | | | | | | | | |
| | Gebyar UMK | 1 kali | | | | | | | | |
| | Inovasi Pengembangan dan Pemasaran UMK | 2 kali | | | | | | | | |
| | Penjajagan, Pengembangan, Kerjasama, Kemitraan dan Iindaklanjut UMK Dandampingan Jaja nesha Mikra (IIIM) | 2 Kali | 14 Kaca- | - 14 Kaca- | 14 Kecs. | - 14 Kecs- | - 14 Kecs | | | |
| | | | matan | 3 | | matan | matan | | | |
| | Pameran dan Promosi Produk UMK | | 5 kali | | 5 kali | 5 kali | 5 kali | | | |
| | Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak | | 7 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | | | |
| | Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK | | 6 kali | | 8 kali | 8 kali | 8 kali | | | |
| | Penyusunan Mekanisme Tentang UMK | | 1 draft | | | 1 draft | 1 draft | | | |
| | Fasilitasi Legalitas bagi UMK | | 0 | 10 pelaku UMK | | 10 pelaku 10 pelaku UMK UMK | 10 pelaku UMK | | | |
| | Kemitraan dengan Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) dan Perginjan Tinggi | | 2 draft | , | | | | | | |
| | Kemitraan dengan lembaga Pemerintah/Lembaga swasta | | | 1 draft | 1 draft | 1 draft | 1 draft | | | |
| | Pengembangan UMK melalui Inovasi dan Kreasi | | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | ř | Target Tahunan | lan | | Indikatif | | |
|--|---|-----------|--------------------|----------|----------|----------------|--------------|----------|-------------------|------------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 1 |
| _ | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | 7107 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| Kegiatan 2 : Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK | | | | | | | | | 6,653,515, 482 | | |
| | Pelatihan Bisnis Rumahan/HBC (Home Bussiness Camp) IV" | - | 1 kali/ naket | | | | | | | | |
| | "Pengembangan wawasan Dekranasda" | . 0 | 0 Kali | | | | | | | | |
| | Gathering kemitraan member dekranas | 1 | 1 kali | | | | | | | | |
| | "Ajang promosi dekranas pameran" | 2 | 2 kali | | | | | | | | |
| | "Pemasaran Produkdalam Kota member Dekranas" | 4 - | 4 orang,2 | | | | | | | | |
| | | = (| OKASI | | | | | | | | |
| | "Cetak Buku Hasil Lomba Disain Batik Khas Jogja" | C1 v | 250 ek- semplar | | | | | | | | |
| | "Cetak Buku batikwama alam" | 2 | 250 ek- | | | | | | | | |
| | | S | semplar | | | | | | | | |
| | Pendampingan IUM | 1 | 14 Kec | | | | | | | | |
| | "Operasional Pusat Pengembangan UMKM" | 5 4 | 5 org/ 11bln | | | | | | | | |
| | "Konsultasi Bisnis dan Managemen bagi UMKM" | 6. 1 | 3 org x 11 bln | | | | | | | | |
| | Pengembangan produk UMKM di luar Daerah" | m | 3 kali | | | | | | | | |
| | Indonesia Fashion Week (IFW) | m | 3 paket | | | | | | | | |
| | Gebyar Potensi Usaha Mikro kecil | 0 | 0 paket | | | | | | | | |
| | Kajian Pola Distribusi dan Wilayah Pemasaran Produk UMKM | - | 1 paket | | | | | | | | |
| | Pemantapan Kegulasi dan Pengembangan UMKM | 7) (| 3 Kall | | | | | | | | |
| | Studi Komparasi Kajian | *1 | 3 Kall | - C | , C | iled C | , c | , c | | | |
| | Penumbunan Wirausana baru | | | 2 KdII | 2 Kall | 2 Kall | 2 Kdll | 2 Kall | | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda | ' | | 2 Kall | 2 Kall | 2 Kali | 2 Kall | 2 Kali | | | |
| | Uperasional Pusat Pengembangan, Konsuitasi Bisnis dan Manajemen bagi | ' | | ı kalı | ı kalı | ı kalı | ı kalı | ı kalı | | | |
| | Usana Mikro Promosi Produk UMK | · | | 6 lokasi | 8 lokasi | 8 lokasi | 8 lokasi | 8 lokasi | | | |
| | Kajian Promosi Usaha Mikro | ľ | | 1 kali | | | | | | | |
| | Pelatihan Manajemen Pemasaran | • | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | Updating Database UMK | 1 | 1 paket | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 10.1.1. (a) Angka kemiskinan | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | AN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | | | - | Dinas Sosial |
| Kegiatan 1: Kegiatan Perlindungan Sosial | | | | | | | | | 4,181,905, 037 | | |
| | 1. Frekuensi Gelar Potensi Anak Panti | Kali 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 2. Laporan Hasil Evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana | Laporan 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | | | |
| | 4. Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mendapat pembinaan | 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | 6. Frekuensi Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota الاصماعة التقافية الت | Kali 1 | T | ₽ | П | ₩. | . | Η. | | | |
| | Workshop Komisi Daerah Lansia | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | 3B dan Komunitas | Kali 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | ۳ | Target Tahunan | nan | | Indikatif | | |
|--|--|----------|-------|----------|------|----------------|------|----------|--------------------|-------|----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 1000 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | A118841411 5 | Penda | Pelaksana |
| | | | ì | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | 9. Laporan Seleksi Penghuni RPLU dan RPA | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 10. Laporan Workshop Pelopor Perdamaian | Laporan | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Jaminan dan Bantuan Sosial | | | | | | | | | 4,872,356, 780 | | |
| | 1. Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlantar | Kali | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | 2. Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Kali | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | 3. Frekuensi fasilitasi penyaluran BantuanProgram Keluarga Harapan (PKH) | Kali | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | 4. Laporan Pelayanan Santunan Kematian bagi Keluarga yang Memiliki KMS | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 5. Jasa Pelayanan Mobil Jenazah | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | 6. Laporan Jenazah Terlantar yang Dimakamkan | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 7. Laporan fasilitasi pengaduan subsidi listrik | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 8. Laporan Penanganan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal dalam Perialanan di Kota Yowakarta | Laporan | ₽ | ₽ | 1 | т | ₽ | T | | | |
| Kegiatan 3 : Kegiatan Pelayanan Anak di | | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6,173,932, | | |
| Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo | | | | | | | | | 256 | | |
| Kegiatan 4 : Kegiatan Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma | Lanjut usia yang dilayani | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9,714,018, 386 | | |
| INDIKATOR SDG's | 10.1.1. (e) Angka pertumbuhan ekonomi | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program PEMELIHARAAN S. | PROGRAM 1:Program PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KEBERSIHAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN PASAR | | | | | | | | | _ | Dinas |
| Kegiatan 1 : Pengelolaan Kebersihan Pasar | | | | | | | | | 29,480,37 | | Perindustrian dan |
| | Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya | Pasar | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | Perdagangan |
| | Jumlah pasar yang dipantau kebersihannya | Pasar | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Jumlah pasar yang dipelihara tamannya | Pasar | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| | Peralatan kebersihan pasar yang dibutuhkan | paket | 2 | 7 | + | | 1 | 1 | | | |
| | Pengolahan dan Pemilahan Sampah yang dikelola | pasar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 2 : Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar | | | | | | | | | 13,246,16 0,268 | | |
| | Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar | kali | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | Pengamanan dan penertiban pasar | pasar | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Pelatihan penanggulangan/ penanganan kejadian bencana/bahaya | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | Pengetahuan pengamanan dan penertiban pasar bagi pedagang yang ditingkatkan | kegiatan | 27 | | | | | | | | |
| | Tenaga teknis pengamanan dan penertiban pasar yang direkrut | orang | 80 | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta | | | | | | | | | 9,106,671, 297 | | |
| | Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara | pasar | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Instalasi air dan listrik yang dipelihara | pasar | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | |
| | Alat listrik dan elektronik yang dibutuhkan | paket | | | 1 | 1 | | 7 | | | |
| | Genset pasar yang dipelihara | pasar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| PROGRAM 2 :Program PENATAAN, PENGEMBANGAN, DA | SEMBANGAN, DAN PENDAPATAN PASAR | | | | | | | | | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendapatan Pasar | | | | | | | | | 1,242,284, 690 | | Perindustrian dan |
| | Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang dikelola Pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang dikonrdinasikan | pasar | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | Perdagangan |
| | r engerorgan i en basi perayanan pasar yang andoo an asikan | ugu . | 2 | ţ | F | ŧ | ļ. | ļ | | | |

| | | | | | ř | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|---|--------------|----------------|------|------|----------------|------|------|-----------------------|---------------|-----------|
| | Proeram/ Keejatan/ Outout Keejatan | Satuan | Tahun Dasar | | | | | | Alokasi Anggaran | Sumbe | Instansi |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 Tahunan (Rp.) | Penda naan | Pelaksana |
| | Cetak sarana administrasi pedagang | kali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Pakaian Juru Parkir | | | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Pelayanan administrasi pedagang pasar yang dikelola | pasar | 31 | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Penataan Lahan dan Pedagang | | | | | | | | | 4,795,161, 025 | | |
| | Penataan Fasilitas Penunjang Pasar | kali | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Pemutakhiran data pedagang pasar | pasar | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Sosialisasi pedagang pasar | pasar | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | Pelayanan Administrasi Pedagang | kali | | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | | | |
| | Workshop Peningkatan SDM | orang 2 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | Keg | | | | | | | | | |
| | Sewa Tanah Pasar | pasar | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Pra Revitalisasi pasar tradisional | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Penataan lahan dan pedagang pasar yang dikelola | | 31 | | | | | | | | |
| | Penataan pemanfaatan lahan penunjang dan fasilitas pasar yang dikelola | pasar | 20 | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Optimalisasi Pemungutan | | | | | | | | | 6,130,709, | | |
| | Dotainici accountant accountant | 1000 | - | 16 | 16 | 16 | 31 | | 2 | | |
| | Petriggs pringit vang dibina | | 36 | 7 E | F 15 | 7.5 | 5 5 | | | | |
| | r etugas pangura yang ulbina Tumlah Pengguna listrik nasar yang dikelola | | £ - | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | |
| | Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan | | . m | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code | pasar | | 2 | 7 | 7 | 2 | | | | |
| Kegiatan 4 : Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelavanan Pasar Wilayah II | | | | | | | | | 4,699,090, | | |
| | Retribusi pasar yang dinungut | | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |
| | Petrigas pringit vang dibina | orang | 37 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 | | | |
| | Trengas pangat yang dibina Tumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola | | , 2, | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |
| | Pendanatan Retribusi Pelavanan pasar yang di MOLI kan | | . ~ | | | | 'n | | | | |
| | Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis guick response code | pasar | | 2 | 2 | 2 | 2 0 | 2 | | | |
| Kegiatan 5 : Optimalisasi Pemungutan | | | | | | | 1 | | | | |
| Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah III | Retribusi pelayanan pasar yang dipungut | pasar | 12 | | | | | | | | |
| | Petugas pungut yang dibina | | 31 | | | | | | | | |
| | Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola | | 12 | | | | | | | | |
| | Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan | | 2 | | | | | | | | |
| Kegiatan 6 : Optimalisasi Pemungutan | | | | | | | | | | | |
| Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah IV | Retribusi pelayanan pasar yang dipungut | pasar | 10 | | | | | | | | |
| | Petugas pungut yang dibina | orang | 48 | | | | | | | | |
| | Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola | pasar | 10 | | | | | | | | |
| | Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan | jenis | 2 | | | | | | | | |
| Kegiatan 7 : Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias | | | | | | | | | 6,754,734, | | |
| Yogvakarta | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Pasar | kepiatan | 00 | 9 | 9 | · c | 9 | 9 | 1 | | |
| | Pelatihan dan Pembinaan Pedagang PASTY | ъ. | 160 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | | | |
| | Pelayanan dan Promosi Pasar | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Pendapatan Retribusi pelayanan pasar yang dipungut | pedagang 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | | | |
| | Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan | jenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | ۳ | Target Tahunan | nan | | Indikatif | | |
|--|--|--------------|-------|------------|------|----------------|------------|------|-------------------|-------|------------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 1 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | Penda | Pelaksana |
| | | | 7107 | | | | | | Tahunan | naan | |
| | Implementaci cictam nelavanan ratribuci nacar harbacic muistr racnonca codo | 10000 | | - | - | - | | | (Rp.) | | |
| | Instalasi pasar vang dipelihara | kegiatan | 7 | - | 4 | - | 4 | - | | | |
| Kegiatan 8 : Pengembangan Pasar Tradisional | | | | | | | | | 8,582,609, | | |
| | Promosi melalui berbagai kegiatan | kegiatan | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Kajian pasar tradisional | | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Pengelolaan data pedagang menggunakan SIM Pasar | | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Pengelolaan radio pasar | pasar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Sarasehan pedagang pasar | keg | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Pelatihan bisnis bagi pedagang | keg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | FGD Pedagang Pasar Tradisional | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Grand desain Pengembangan Pasty | Dokumen | | ← ι | T . | τι. | . . | ₩. | | | |
| | Sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code | pasar | | n | n | n | n | n | | | 9 |
| Kegiatan 1: Ontimalisasi Pelayanan | POSAL BISINIS | | | | | | | | | | Dinas Perindustrian |
| BLUD UPT Pusat Bisnis | Optimalisasi pelavanan BLUD UPT Pusat Bisnis vanø dilaksanakan | kepiatan | | - | , | - | | _ | 31.032.39 | | dan |
| | Optimization being an area of the against young an area of the against an area of the again | | | | 1 | | 1 | | 5,219 | , | Perdagangan |
| PROGRAM 4 :Program PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERDAGANGAN | PENGENDALIAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Usaha Berdagangan | | | | | | | | | 11,106,70 | | Perindustrian dan |
| - ci cagailgai | Dameran dan gelar notenci di 10 lokaci | Dongiesh 173 | 123 | 137 | 133 | 132 | 137 | 137 | 2,7,70 | | Derdagan |
| | raincian dan Beiar potensi di 12 lokasi | r engusan | 777 | 707 | 707 | 707 | 701 | 701 | | - | ci dagaiigaii |
| | Kontak Dagang Potensi Bisnis bagi UMKM | UMKM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS | hari | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | |
| | Pemanfaatan lahan di area PMPS | zona | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Pengembangan Kemitraan Pedagang dengan Distributor/Toko Modern | kali | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Operasi pasar | kecamata | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | Pengembangan Kemitraan UMKM dengan Toko Modern | kali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Sosialisasi Konsumen Cerdas | kali | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Pasar Rakyat | kali | | 1 | 1 | 1 | ₽ | + | | | |
| | Pelatihan usaha perdagangan | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Pelatihan Tata Cara Ekspor | kali | | 7 | | | | | | | |
| | Pelatihan Pemasaran Online | kali | | 1 | | | | | | | |
| | Pelatihan Manajemen dan Pemasaran warung Kelontong | kali | | 2 | | | | | | | |
| | Pelatihan Diversifikasi usaha bagi pedagang | | 9 | | | | | | | | |
| | Pelatihan Manajemen dan Pemasaran warung Kelontong | | 2 | | | | | | | | |
| | Sosialisasi Hasil Kajian | | 7 | | | | | | | | |
| | Penyusunan Perubahan Perwal | Dokumen | 1 | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri | | | | | | | | | 1,791,337, 463 | | |
| | Monitoring harga bahan pokok | L | | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | | | |
| | Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Monitoring Penggunaan BTM/P | kali | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |

| | | | | | ř | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|---|---|------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | | | | | Alokasi | Sumbe | Inctanci |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 | Penda | Pelaksana |
| | | | | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Monitoring LPG 3 Kg dan BBM | | 12 agen, 40 | 12 agen, 40 | 12 agen, 40 | 12 agen, 40 | 12 agen, 40 | 12 agen, 40 | | | |
| | | | pangkalan | | pangkala | pangkala | pangkala | pangkala | | | |
| | | | , Ib SPBU | n, 16 SPBU | n, 16 SPBU | n, 16 SPBU | n, 16 SPBU | n, 16 SPBU | | | |
| | Monitoring Distributor dan Pergudangan | | 12 | | 12 | | 12 | | | | |
| | | | distributo | | distributo | | | | | | |
| | | | r, 30 | r, 30 | r, 30 | r, 30 gudang | r, 30 gudang | r, 30 gudang | | | |
| | Pengendalian Harga | | Data | Data | Data | Data | Data | Data | | | |
| | | | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga | | | |
| | | | Sembilan | Sembilan | Sembilan | Sembilan | Sembilan | Sembilan | | | |
| | | | Bahan | Bahan | Bahan | Bahan | Bahan | Bahan | | | |
| | | | Pokok | | | | | | | | |
| | | | l erkendal i | lerkendal i | l erkendal i | lerkendal i | l erkendal i | l erkendal i | | | |
| | Pengawasan UTTP | | Pasar, | | Pasar, | Pasar, | Pasar, | Pasar, | | | |
| | | | Perorang | Perorang | Perorang | Perorang | Perorang | Perorang | | | |
| | | | au, | | | au, | au, | | | | |
| | Corinitari Dantana DVI | 1111 | Lembaga | Lembaga | Lembaga | Lembaga 1 | Lembaga 4 | Lembaga 1 | | | |
| | Donal John Cill Doll Kott Von State | CINA DVI | , t | , t | , t | t - | , t | , t | | | |
| | Perigeroladii SiMi Phr. Nota Togyakalid | SIIVI P.N. | ٠, | ٠, | ٠, ٠ | ٠, | ٠, | ٦, | | | |
| | Lomba Penataan Penagang Naki Lima di Necamatan se Nota 1K | Kdll I | ٦, | - | - | - | - | - | | | |
| | | ח | ‡ | | | | | | | | |
| | Penyusunan draft Raperwal tentang Penataan PKL | Dokumen | -1 | | | | | | | | |
| | | Paket | 1 | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Metrologi | | | | | | | | | 3,645,697, | | |
| regal | Penvuluhan dan Sosialisasi Kemetrologian | kali | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | † | | |
| | Pengawasan UTT dan BDKT | kali | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP | kali | 47 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | | | |
| | Ketertelusuran standar untuk jaminan mutu standar | jenis | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Updating Data Potensi UTTP | Dokumen | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Penyusunan Draft Raperda Pelayanan Metrologi | Dokumen 1 | 1 | | | | | | | | |
| PROGRAM 5 : Program PEMBINAAN PEMBINAAN PERINDU | ABINAAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Teknis Perindustrian | | | | | | | | | 6,719,325, 901 | | Perindustrian dan |
| | Pelatihan teknis industri bagi IKM | jenis | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | Perdagangan |
| | Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Sertifikasi Halal dan Merk | orang | 30 orang 3 hr 2 kali | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | | | |
| | Ekspo Produk Sentra, Produk Unggulan Daerah dan OVOP | MK | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Pendataan Industri Mikro Kecil | IMK | | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | | | |
| | Pengembangan Teknis Industri Bagi IKM | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Pengembangan Sentra produksi Batik | Sentra | | 1 | | | | | | | |

| | | | | Ta | Target Tahunan | au | | | 1 | |
|---|------------|----------------------------|------|------|----------------|------|------|------------------|-------|-----------|
| | | Tahun | | | | | | Angearan | Sumbe | Instansi |
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Pelaksana |
| | | ì | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| Pengembangan Sentra Produksi Kulit | Sentra | | 1 | | | | | | | |
| Pengembangan OVOP Produk Batik | OVOP | | 7 | | | | | | | |
| Pengembangan OVOP Produk Kulit | OVOP | | 1 | | | | | | | |
| Pengembangan Produk Unggulan Batik | PUD | | 1 | | | | | | | |
| Pengembangan Produk Unggulan Kulit | PUD | | 1 | | | | | | | |
| Pelatihan teknik membatik di kelurahan Pandeyan dan Kelurahan Sorosutan | 7 47 | 40 orang 5 hr 1 kali | | | | | | | | |
| Pelatihan pengemasan produk olahan makanan di Kelurahan Notoprajan | (4 (,) | 20 orang 3 hr 1 kali | | | | | | | | |
| Pelatihan Membuat Tas Rajut di Kelurahan Purbayan | (4 0) | 20 orang 5 hr 1 kali | | | | | | | | |
| Pelatihan Peningkatan Mutu Dan Desain Produk Keraj Kulit di Kel Keparakan (RW 8) | ., 0 | 20 orang 6 hr 1 kali | | | | | | | | |
| Pelatihan Membatik di Kelurahan Pringgokusuman | (4 0) | 20 orang 5 hr 1 kali | | | | | | | | |
| Pelatihan jumputan di Kelurahan Suryatmajan | (4 2) | 20 orang 5 hr 1 kali | | | | | | | | |
| Pelatihan jumputan di Kelurahan Purbayan RW 11 | (4 0) | 20 orang 5 hr 1 kali | | | | | | | | |
| Pelatihan sablon di Kelurahan Suryatmajan | (4 2) | 20 orang 5 hr 1 kali | | | | | | | | |
| Pelatihan Dasar Pembuatan Desain Grafis | (4 2) | 20 orang 5 hr 1 kali | | | | | | | | |
| Pelatihan Industri di Kecamatan Jetis | (4 2) | 20 orang 5 hr 1 kali | | | | | | | | |
| Pelatihan menjahit busana Jawa Surjan Gagrak Yogyakarta | ., . | 20 orang 6 hr 1 kali | | | | | | | | |
| Pameran Industri Kreatif Berbasis Budaya | 7 - | 4 IKM 3 Kali | | | | | | | | |
| Pembentukan Sentra Baru di Kelurahan Warungboto (shuttle cock) | \\ _ _ | 1 sentra baru 1 kali | | | | | | | | |
| Pemberdaayan Sentra Produksi Batik | | 1 Sentra 1 kali | | | | | | | | |
| Pemberdaayan Sentra Produksi Kulit | | 1 Sentra 1 kali | | | | | | | | |
| Pemberdaayan dan Pengembangan OVOP Produk Batik | (<u>-</u> | 1 OVOP 1 kali | | | | | | | | |
| Pemberdaayan dan Pengembangan OVOP Produk Kulit | | 1 OVOP 1 kali | | | | | | | | |
| Pengembangan Produk Unggulan Batik | | 1 PUD 1 kali | | | | | | | | |
| Pengembangan Produk Unggulan Kulit | | 1 PUD 1 kali | | | | | | | | |
| Expo Produk Sentra Produksi Batik | 7 - | 4 IKM 1 kali | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | ı | | Į. | Target Tahunan | L | | Indikatif | | |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|------|------|----------------|------|------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 Tahunan | r Penda naan | Instansi Pelaksana |
| | Expo Produk Sentra Produksi Kulit | 4 - | 4 IKM 1 | | | | | | (Kp.) | | |
| | Pelatihan sablon di Kelurahan Purwokinanti | Σ (2 | kalı 20 orang | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Pembinaan Sarana Produksi | | | 0 | | | | | | 12,916,04 5,424 | | |
| | Laporan Survey Monitoring kelompok PEW oleh fasilitator | dokumen 19 orang, 11 bulan | 19 orang, 4 11 bulan | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | KoordinasiProgram dan Pengembangan PEW di Kecamatan | kali 3 | 30 orang, 14 1 hari, 14 kali | | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | | alat | 4 | | | | | 4 | | | |
| | Penyuluhan Penerapan Gemba Kaizen IKM Aluminium | IKM | 10 | | 10 | _ | 10 | 10 | | | |
| | Kajian Analisa Kebangkrutan IKM Aluminium Kota Yogyakarta berdasar Siklus dokumen Hidup Produk dan Trend Pasar | dokumen | 1 | | П | | 4 | П | | | |
| | ok PEW menjadi Koperasi Induk berbasis | dokumen | 7 | | П | 1 | П | П | | | |
| | Kajian Benchmarking Produktivitas IKM Fashion dan Konveksi Jogja, Solo dan dokumen | dokumen | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Pekalongan Dalatihan Sarana Produksi Radi IKM | | | | | | | Ľ | | | |
| | Pameran/Expo Industri Kreatif | | | , (| | | | | | | |
| | | IKM 3 | 20 orang, 80 3 hari, 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Pelatihan Managemen Resiko Bencana Bagi IKM | ŘΜ W C A | 30 orang, 90 2 hari, 3 kali | 0 | | | | | | | |
| | Pelatihan Kewirausahaan Lanjut | E E A | 30 orang, 90 3 hari, 3 kali | 0 | | | | | | | |
| | Pelatihan Pengolahan Makanan | IKM a T a | 30 org, 3 1 hr, 5 angkatan | 120 | | | | | | | |
| | Pelatihan Intensif Industri Kreatif Berbasis TI/Animasi | Orang 3 | 20 orang, 30 30 hari,1 kali | 0 | | | | | | | |
| | Pameran/Expo Industri Kreatif TI (Animasi, Film, DKV) | IKM A | 4 IKM, 1 4 Kali | | | | | | | | |
| | Pameran/Expo Industri Kreatif Fesyen dan Kerajinan | IKM 4 A | 4 IKM, 4 16 kali | 10 | | | | | | | |
| | Bimbingan Teknis dan Administrasi Pembukuan Kelompok PEW | ю н ю | 30 orang, 1 hari, 3 angkatan | | | | | | | | |
| | SosialisasiProgram dan Pengembangan Kelompok PEW di Kelurahan | 4 | 45 kali | | | | | | | | |
| | Pilot Project 5 Kelompok PEW Untuk Menjadi Koperasi | n z | 5 kelompok | | | | | | | | |
| | | | 20 orang | | | | | | | | |

| | | | | | Te | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|---|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | ionetanei |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | All 88 al all | Penda | Pelaksana |
| | | | | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Pengembangan Wawasan Kemasan Produk ke Luar Daerah dalam Jawa | | 30 org, 3 hr, 1 kali | | | | | | | | |
| | Pengembangan Wawasan Produk Olahan Makanan dan Kerajinan ke Luar Daerah luar Jawa | | 30 org, 3 hr, 1 kali | | | | | | | | |
| | Pelatihan Total Motivation Training (TMT) | | 30 orang, 3 hari, 3 kali | | | | | | | | |
| | Penyusunan Perda Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA) | | 1 Paket | | | | | | | | |
| | Penyusunan Naskah Akademik RIPIDA | | 1 Paket | | | | | | | | |
| PROGRAM 6 : Program PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM | V INDUSTRI LOGAM | | T Pakel | | | | | | | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam | | | | | | | | | 7,488,468, | | Perindustrian dan |
| | Operasional Pelayanan UPT Logam | bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | Perdagangan |
| | Pemeliharaan dan penggantian sparepart mesin UPT Logam | | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Pendampingan tenaga ahli untuk revitalisasi pelayanan UPT Logam | _ | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | Pengadaan Komputer | kali | | ₽ ₹ | Α, | ← ₹ | | | | | |
| | Pengadaan rurniture Dangadaan Drojactor dan kelengkanannya | Kall | | ٦. | | ٦. | ٦. | ٦. | | | |
| | Pengadaan Mesin dan Peralatan UPT Logam | | 1 paket | | | | | | | | |
| | Pelatihan Inovasi Produk rumah tangga | | 10 orang, | | | | | | | | |
| | | | 1 angkat- | | | | | | | | |
| | Caultin David actual Tours + Caultin Tours | | , а | | | | | | | | |
| | renentian relatati nelja repat Guna | | 2 penelitian | | | | | | | | |
| | Sewindu UPT Logam | | 1 paket | | | | | | | | |
| | Pameran INAPA 2017 | | 2 IKM | | | | | | | | |
| | Sosialisasi dan promosi dalam rangka meningkatkan pendapatan UPT Logam Pendampingan Klasikal IKM Logam | | 12 bulan 10 IKM 6 | | | | | | | | |
| | | | kali | | | | | | | | |
| | Pendampingan Lapangan IKM Logam | | 10 IKM 5 kali | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Optimalisasi Pelayanan UPT Lozam | | | | | | | | | 8,749,522, | | |
| | Pameran INAPA 2018 | ΙΚΜ | | 3 | e | 3 | 8 | e | | | |
| | MOU Kerjasama dengan industri besar untuk market share produk IKM I naam | MOU | | ıs. | 2 | 22 | 2 | 2 | | | |
| | Pelatihan Casting Injeksi IKM Logam | ΙΚΜ | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Pengadaan Mesin dan Peralata PROGRAM 7:Program PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA | Pengadaan Mesin dan Peralatan UPT Logam I DAN PEMASARAN PARIWISATA | kali | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Jinas |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik | | | | | | | | | 5,013,549, | | Pariwisata |
| Wisata | Pengembangan ODTW unggulan | Kali | | 7 kali | 7 kali | 7 kali | 7 kali | 7 kali | | | |
| | Pengembangan jenis dan pemaketan ODTW | Dokumen - | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Sadar wisata | Kali | | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 12 | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | 707/ | | | | | | Tahunan I (Rp.) | naan | |
| | Monitoring dan inventarisasi ODTW | Dokumen | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Pengembangan kampung wisata | Kali | 1 kali | 11 kali | | 11 kali | | 11 kali | | | |
| | Calender event mingguan | Kali | 52 kali | | | | | | | | |
| | Calender event tahunan | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Gelar potensi | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Sosialisasi Kampung Wisata/Pokdarwis | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Workshop Kampung Wisata | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Promosi dan Pemasaran Wisata | | | | | | | | | 14,527,59 9,589 | | |
| | Analisa pasar wisatawan | Dokumen | | 2 dokiimen | 2 2 2 dokumen | | 2 2 2 | 2 dokumen | | | |
| | Dengembangan jaringan keriasamanariwisata | Kali | | 10 kali | 10 kali | | | 10 kali | | | |
| | Promosi pariwisata dalam dan luar negeri | Kali | | 12 kali | 12 kali | 12 kali | | 12 kali | | | |
| | Event pariwisata unggulan | Kali | | 1 kali | | | |
| | Pelayanan informasi pariwisata | Laporan | 2 jenis | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | |
| | Dance committee in the committee of the | :102 | :led c | apolaii | apol all | aporali | aporan | apol all | | | |
| | Fallerali pariwisata Traval dialog | Kall i | o Kall | | | | | | | | |
| | Iogia Night Carnival (Pawai Budaya Iogia) | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Famtrip | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Jogia Day | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Pembuatan materi pariwisata | Jenis | 6 jenis | | | | | | | | |
| | Promosi media massa | Kali | 3 kali | | | | | | | | |
| | Pemilihan Dimas Diajeng Kota Yogyakarta | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Pameran Pariwiswata Luar Negeri | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Promosi media massa Luar Negeri | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | TPO | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Java Promo | Kall Kall | 3 kali | | | | | | | | |
| | Periginian ivisi Plomosi Paliwisata | II N | Z Kall | | | | | | | | |
| | Perikatan kerjasama Pariwisata Danisianan Dariwisata | Kall i | 2 kali | | | | | | | | |
| | Workshop dan Seminar Pariwisata | Kali | 7 kali | | | | | | | | |
| | Perhitungan jumlah kunjungan wisatawan | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Jogia Kreatif | Kali | 11 kali | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Kegiatan Pengelolaan Kawasan Malioboro | | | | | | | | | 24,668,66 6,328 | | |
| | Pengamanan Kawasan Malioboro / Jaga Kawasan Malioboro | Orang | 80 orang | 12 bulan | | | |
| | Pengawasan CCTV | Laporan | 12 bendel | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| | | | laporan | laporan | laporan | laporan | | laporan | | | |
| | Penyapuan Ji.Ahmad Yani (Margo Mulyo), Ji.Malioboro dan TKP ABA Penyemprotan Jalan dan trotoar | Bulan Kali | 12 bulan 300 kali | 12 bulan 225 kali | | | |
| | Pemeliharaan Jaringan Listrik kawasan Malioboro | Paket | 1 paket | 222 titik | 222 titik | 222 titik | | 222 titik | | | |
| | 00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | F | Target Tahinan | | | Indikatif | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------|------------|
| | | | | | | | | | | Sumbe | |
| | | į | Tahun | | | | | | _ | _ | Instansi |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Pelaksana |
| | | | 707 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Pemeliharaan CCTV | | 1 ruang | 1 ruang | 1 ruang | 1 ruang | 1 ruang | 1 ruang | | | |
| | | Kendali dan cety | kendali, 22 cctv | kendali, 22 cctv | kendali, 22 cctv | kendali, 22 cctv | kendali, 22 crtv | kendali, 22 cctv | | | |
| | Pemeliharaan Studio Radio dan iaringan bawah tanah | Studio | 1 studio | 1 studio | 1 studio | 1 studio | 1 studio | 1 studio | | | |
| | | | dan | dan | dan | dan | dan | dan | | | |
| | | ann | jaringann | jaringann | jaringann | ann | u | jaringann | | | |
| | | | ya | ya | ya | , ek | | уа | | | |
| | Prunning | Kali | | 2 kali | 2 kali | | | 2 kali | | | |
| | Pengelolaan Radio Kawasan Wisata Malioboro | Dokumen 12 bulan/ | | 12 | 12 | 12 | | 12 | | | |
| | | | laporan | dokumen | dokumen | dokumen | | dokumen | | | |
| | II.C dan Layanan Pengaduan dan Perijinan Catak bianko | Bulan | 1 paket 8 ianis | 12 Dullan 8 ienis | 12 bulan 8 ienis | 12 bullan 8 ienis | 12 bulan 8 ienis | 12 bullan 8 ianis | | | |
| | | | | cetak | cetak | | | cetak | | | |
| | Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2 | Dokumen | 12 bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Donatum Francis Dadio Danes Hall | | 107 | aokumen | dokumen dokumen | aokumen | aokumen aokumen aokumen | aokumen | | | |
| | reignius riekuelisi naulo railcai ulalig/mi | E 2 | ı Kalı ijili | | | | | | | | |
| | Pemelinaraan Taman dan Pergola | | 1 paket | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Panggung mobile | | 1 buah | | | | | | | | |
| | Pembinaan PKL | Kali | 1 kali | | | | | | | | |
| | Pembinaan Angkutan Non mesin | | 1 kali | | | | | | | | |
| | Pembinaan Lesehan | | 1 kali | | | | | | | | |
| | Pembinaan seniman Malioboro | | 1 kali | | | | | | | | |
| | Pembinaan guide kawasan Malioboro | | 1 kali | | | | | | | | |
| | Laporan hasil kunjungan konsultasi/undangan/promosi | Undanga | 4 laporan | , | | | | , | | | |
| | | ч | konsultasi | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | |
| TIME MANAT MACINAGEMENT MEDICAL COMACTOR | | | undangan | | | | | | | č | |
| Kegiatan 1: Kegiatan Operasional | I FINITAL FINITAL | | | | | | | | | 2 2 | Pariwisata |
| Layanan BLUD Taman Pintar | Terlaksananya layanan kepada pengunjung Taman Pintar | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 7 | 76,982,46 | | |
| PROGRAM 9 : Program PENINGKATAN KUALITAS ATRAI | JALITAS ATRAKSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | | | | ! | ō | nas |
| Kegiatan 1: Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | .,, 1- | 3,611,438, 761 | Pa | Pariwisata |
| • | Pembinaan Usaha Pariwisata | | 40 kali | 30 kali | 30 kali | 30 kali | 30 kali | 30 kali | | | |
| | Survey Kepuasan Wisatawan | | | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | E | 1 laporan | | | |
| | | | Dokumen Laporan | | | | | | | | |
| | Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata | | 40 kali | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata | | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | dokumen | dokumen | dokumen dokumen | | dokumen | | | |
| | Jogja Kreatif | | | 10 kali | 10 kali | 10 kali | | 10 kali | | | |
| | Festival Ekonomi Kreatif | | | : | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| | Gelar potensi ekonomi kreatif | | 3 kali | 2 kali | | | | | | | |
| | Najian Ekonomi Nreatii | | T Kall | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 3 | | |
|--|---|-------------------|--------------------|---------|----------------|---------------|----------|-------------------|---------|-----------------------|
| | | | | | larget lanunan | nan | | | 1 | |
| | | Ta | Tahun | | | | | | sumpe , | 1 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan Da | Dasar 2018 | 8 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | instansi Pelaksana |
| | | 1 | 3 | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Perhitungan lama tinggal wisatawan | | | | | | | | | |
| | | Dokume Laporan | Dokumen Laporan | | | | | | | |
| | Penyusunan Dossier Jogja Kreatif City | | | | | | | | | |
| | | Dokume Laporan | Dokumen Laporan | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata | | | | | | | | 8,007,546, | | |
| 3332 | Pentas Kangen Jogja | 10 kali | ali 8 kali | 8 kali | 8 kali | 8 kali | 8 kali | 1 | | |
| | PMPS | 1 kali | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | Pentas Kawasan | 7 kali | | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | | | |
| | Event Khusus | 40 kali | | | 15 kali | 15 kali | 15 kali | | | |
| | Pengiriman misi kesenian luar DIY | 1 kali | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | Pengiriman misi kesenian dalam DIY | 1 kali | i 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | | | |
| | Kajian Pengembangan Kualitas Atraksi Pariwisata | | | 1 | 1 dok::mor | 1 1 1 1 | 1 | | | |
| | Doubles Abrellet Mission of Lesson man mission | 100 | | novalie | novon II | donalien | novalien | | | |
| | Pentas Atraksi Wisata di kampung Wisata | 14 Kall | · = . | | | | | | | |
| SOS BOTANIONI | FGD Atraksi Wisata 10.3.1 (r) Dercentace perempiyan Kopt yang tertangani | T Kall | | | | | | | | |
| TION TO THE PROPERTY OF THE PR | TO.3. I.(c) reiselikase peleliipuali kolbali kolbali kolki yalig teltaligalii | | | | | | | 10000 | č | 4 |
| PROGRAM 1:Program PEMBERDAYAAN I | DAN PEKLINDUNGAN PEKEMPUAN | | | | | | | 6,666,935, 242 | 5 & | Dinas Pemberdayaan |
| Kegiatan 1 : Pembinaan | | | | | | | | | Σ | Masyarakat, |
| Pengarusutamaan Gender | | | | | | | | | Pe | Perempuan, |
| Kegiatan 2 : Pembinaan Partisipasi dan | | | | | | | | | ö | dan |
| Perlindungan Perempuan | | | | | | | | | P. | Perlindungan |
| Kegiatan 3 : UPT Pusat Pelayanan | | | | | | | | | Ā | Anak |
| Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan | | | | | | | | | | |
| Arian Tujuan 11 : Kota dan komunitas berkelanjutan | ıjutan | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 11.4.1.(a) Persentase rintisan keluarahan budaya yang aktif | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program PELESTARIAAN WARISAN DAN NILAI BUDAYA | ARISAN DAN NILAI BUDAYA | | | | | | | 4,010,956, | Ö Ý | Dinas |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Pelestarian dan | | | | | | | | 200 | ž | enada aari |
| Pengembangan Warisan Budaya, | 1. Frequensi Updating Data Kebudayaan Kali | - | Н | 1 | + | + | 7 | | | |
| Pengetahuan dan Teknologi | | Dokumen 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 3. Frequensi Kemitraan Kebudayaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Pelestarian Tata | | | | | | | | | | |
| Nilai Budaya | la l | Laporan 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Budaya | Dokumen | П | 1 | 7 | 1 | 7 | | | |
| | | Laporan 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | |
| | kis Bersama | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Tata Nilai Budaya | | н | П | - | 1 | . | | | |
| | 7. Desiminasi Tata Nilai Budaya | Laporan 0 | ⊣ | ₩ | - | - | — | | | |
| Kegiatan 3 : Kegiatan Pelestarian | ייין ייין אין אין אין אין אין אין אין אי | | • | • | , | , | , | | | |
| vepulbavalaali uali reliilaseullali | | rapolali | - | 1 | 4 | 7 | , | | | |

| | | | | | re | Target Tahunan | an | | | | |
|--|--|-----------------|------------|------------|------------|----------------|----------|----------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | | ē | 1 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 P | r Penda P | instansi Pelaksana |
| | | | /107 | | | | | | Tahunan r (Rp.) | naan | |
| | 2. Jumlah Penghargaan Pelestari Bangunan Heritage | Orang 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | 3. Perencanaan Revitalisasi Lingkungan Kawasan Cagar Budaya | Dokumen 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 4. Pelestarian BCB | | | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 5. Penyusunan Road map Pelestarian Herittage | Dokumen 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 6. Kajian Permuseuman | _ | | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | | | |
| | 7. Publikasi Budaya | Laporan 0 | | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | | | |
| PROGRAM 2 :Program PELESTARIAAN WARISAN DAN NILAI BUDAYA | VARISAN DAN NILAI BUDAYA | | | | | | | | 2,218,225, 747 | Dinas | Dinas Kebudayaan |
| Kegiatan 1: Kegiatan Pelestarian dan | | | | | , | | , | c | | | |
| Pengembangan sejaran | T. Juman Agian Sejaran | _ | | - | 7 | n · | n · | n · | | | |
| | 2. Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah dan Budaya | | | 0 | — | - | . | 7 | | | |
| | 3. Inventarisasi Data Kesejarahan | _ | | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | | | |
| | 4. Lomba Kesejarahan | Laporan 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 5. Pameran Kesejarahan | Laporan 0 | | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Pelestarian dan | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan Bahasa dan Sastra | 1. Lomba/Festival Bahasa dan Sastra | ran | | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | | | |
| | 2. Frequensi Gelar Macapat | | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | 3. Publikasi Bahasa dan Sastra | Media 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 4. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra | Laporan 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 5. Event Bahasa dan Sastra | Event 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| PROGRAM 3 :Program PELESTARIAAN D. | PROGRAM 3 :Program PELESTARIAAN DAN PENGEMBANGAN SENI DAN TRADISI | | | | | | | | 5,603,665, | Dinas | Dinas Kebudayaan |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Pelestarian dan | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan Seni dan Film | 2. Dialog Budaya | Kali 18 | | 0 | 1 | 1 | _ | + | | | |
| 0.00 | 3. Aktualisasi Seni Budava | oran | | . 0 | . 0 | . 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4 Dembustan Fiture Seni Rudaya | | | | | | | | | | |
| | 5. Gelar Seni Budava | | | | | · - | ٠ - | , - | | | |
| | 6 Workshop Seni dan Eilm | | | | | ٠. | | ٠. | | | |
| | 7 Timlah Film Dokimenter | Film | | o - | | ٠. | ٠. | - ، | | | |
| | 8 limlah Data Seni dan Eilm | men | | | | ٠. | | ٠. | | | |
| | 9. Laboran Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film | | | | 1 0 | . 0 | . 0 | . 0 | | | |
| | 10. Jumlah Kajian Seni | _ | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | |
| | 11. Pembinaan Seni Tradisi | | | 1 | 1 | | + | 1 | | | |
| | 12. Partisipasi Event Seni dan Film | Laporan 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 13. Lomba/Festival Seni dan Film | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Pelestarian dan | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan Adat dan Tradisi | 1. Laporan Pelestarian Upacara Adat dan Tradisi | Laporan 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 2. Laporan Pelestarian Busana Adat | Laporan | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 3. Laporan Revitaliisasi Budaya | Laporan 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 4. Laporan Kampanye Sadar Budaya | Laporan 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 5. Festival Seni Budaya | Laporan 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 6. Kajian Adat dan Tradisi | Dokumen | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 7. Partisipasi Event Adat dan Tradisi | Event | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 8. Publikasi Seni Adat dan Tradisi | Media 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 9. Gelar Adat Tradisi | Laporan 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 11.5.1* Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap | ggunakan sarana | a dan pras | arana tang | gap darura | : lengkap | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | - | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|---|--|---------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--|------------------|-------|---------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 100 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | A118841411 | Penda | Pelaksana |
| | | | 107 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | 11.5.1.(b) Persentase kampung tangguh bencana | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program KESIAPSIAGAAN I | PROGRAM 1.Program KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM | | | | | | | | 12,929,01 | _ | врво |
| Kegiatan 1 : Pencegahan Bahaya | | | | | | | | | | | |
| Bencana Alam | Rintisan Kampung Tangguh Bencana (KTB) | Kampung | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Pelatihan Penanggulangan bencana | | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Apel Siaga Bencana | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Kerja bakti kesiapsiagaan bencana | Kali | 0 | 50 | 20 | 20 | 50 | 50 | | | |
| Kegiatan 2 : Penanganan Bencana Alam | | | | | | | | | | | |
| | Operasional Pusdalops PB | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Manajemen Logistik | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Pelatihan Kedaruratan Bencana | Kali | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Assesmen dan Evakuasi Awal Bencana | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 3 : Rehabilitasi Dan | | | | | | | | | | | |
| Rekonstruksi Pasca Bencana | Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Monitoring daerah rawan bencana | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Kerja bakti pasca kejadian bencana | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 11.5.1.(c) Persentase edukasi proteksi kebakaran | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program PENCEGAHAN KEBAKARAN | BAKARAN | | | | | | | | 4,659,527, | _ | Dinas |
| | | | | | | | | | 763 | | Kebakaran |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Penanganan Kebakaran | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Pengelolaan | | | | | | | | | | | |
| Sarana Prasarana Kebakaran | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 11.6.1. Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program PENATAAN PERU. | PROGRAM 1.Program PENATAAN PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN TATA BANGUNAN | | | | | | | | | | Dinas PUPKP |
| Kegiatan 1: Peningkatan kualitas sarana | | | | | | | | | 73,394,37 | | |
| prasarana dasar permukiman | | | | ; | | į | | ; | 5,538 | | |
| | Pembangunan Sambungan Rumah | | 262 SR | × : | 262 SR | % : | 262 SR | × : | | | |
| | Penanganan Talud Permukiman | meter | 82,6 m | 90 m | 90 m | 90 m | 90 m | 90 m | | | |
| INDIKATOR SDG's | 11 6.1 (a) Descentase penganghitan sampah | | 53,22% | 84% | 84,00% | 82,03% | 80,21% | 01,0270 | | | |
| MOINALOR 300 3 | TT.O.T.(a) reisentase pengangnutan sampan | | | | | | | | 00 000 | | 0 0 0 |
| PROGRAM I:Program PengeLOLAAN PERSAMPAHAN | KSAMPAHAN | | | | | | | | 0,369,00 | | Dinas Lingkungan |
| Kegiatan 1 : Pengurangan Sampah | | | | | | | | | | Ī | Hidup |
| | Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R). | | 433 | 448 | 463 | 478 | 493 | 208 | | | |
| | | | kelompok | kelompok | kelompok | kelompok | kelompok | kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok | | | |
| | Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola. | | 1 lokasi | 2 lokasi | 3 lokasi | 4 lokasi | 5 lokasi | 6 lokasi | | | |
| Kegiatan 2 : Penanganan sampan | | | | | | | | | | | |
| | Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang telah menggunakan teknologi modern. | | 1 unit | 7 unit | 8 unit | 10 unit | 2 unit | 2 unit | | | |
| | Sarana prasarana TPS/Depo/Landasan container yang direnovasi. | | 7 unit | 8 unit | 8 unit | 9 unit | 10 unit | 10 unit | | | |
| Kegiatan 3 : Pemungutan Retribusi | | | | 1 | : | ; | : | : | | | |
| Kebersihan | Wajib Retribusi yang dipungut retribusi kebersihan/ persampahan. | | 50.507 WR | 51.153 WR | 51.808 WR | 52.471 WR | 53.143 WR | 53.823 WR | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | F | Target Tahunan | ian | | Indikatif | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|------------------|-------|---------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 1 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Allggalall 5 | Penda | Pelaksana |
| | | | 107 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| Kegiatan 4 : Operasional Pembersihan | | | | | | | | | | | |
| dan Pengangkutan Sampah | Rata-rata sampah yang diangkut dari TPS ke TPA. | H | 173.9 | 170.4 | 166.9 | 163.4 | 159.9 | 154.9 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 11.7.1. Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta | | nynari | ton/nari | ton/nari | tonynari | ton/ nari | tonynari | | | |
| PROGRAM 1:Program PENGELOLAAN RUANG TERBUKA | IANG TERBUKA HIJAU PUBLIK | | | | | | | | 40,327,00 | | Dinas Lingkungan |
| Kegiatan 1 : Pengelolaan RTH Publik | | | | | | | | | | | Hidup |
| | Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang dibangun. | 2 | | 3 lokasi | 3 lokasi | 3 lokasi | 3 lokasi | 3 lokasi | | | |
| | Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang kondisinya terpelihara. | 3. | | 35 lokasi | 38 lokasi | 41 lokasi | 44 lokasi | 47 lokasi | | | |
| | Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang direnovasi dengan penambahan elemen taman. | 33 | 3 lokasi | 4 lokasi | 4 lokasi | 4 lokasi | 5 lokasi | 5 lokasi | | | |
| Kegiatan 2 : Pertamanan dan Perindang | | | | | | | | | | | |
| Jalan | Taman kota yang kondisinya terpelihara. | H | 54 lokasi | 154 lokasi | 154 lokasi | 154 lokasi | 154 lokasi 154 lokasi 154 lokasi 154 lokasi 154 lokasi | 154 lokasi | | | |
| | Taman kota yang direnovasi dengan penambahan elemen taman dekoratif. | 9 | 6 lokasi | 6 lokasi | | | |
| | Pot taman, pergola dan elemen taman yang kondisinya terpelihara. | κi | 3.052 unit | 3.132 unit | 3.212 unit | 3.292 unit | 3.372 unit | 3.452 unit | | | |
| | Pot taman, pergola dan elemen taman yang dipasang. | ∞ | 80 unit | 80 unit | | | |
| Tujuan 12 : Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab | bertanggung jawab | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 12.4.1.(a) Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | an Lingkun | gan Hidup | (PPLH) | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program PENATAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN | ENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN | | | | | | | | 9,237,000, | | Dinas Lingkungan |
| Kegiatan 1 : Kajian Dampak Lingkungan | | | | | | | | | | Ī | Hidup |
| | | Dokumen 4 | | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | |
| | ., SPPL) yang dinilai dan diverifikasi | Dokumen 850 | 20 | 850 | 850 | 850 | 850 | 820 | | | |
| | lingkungan hidup yang diterbitkan. | Regulasi 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Kegiatan 2 : Pengendalian Pencemaran | | | | | | | | | | | |
| dan Limbah B3 | | Unit 1 | 100 | 75 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | an Hidup (PPLH) yang | Izin 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dipantau. U | Usaha/ 40 Kegiatan | 0 | 40 | 20 | 20 | 09 | 09 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 12.5.1.(a) Persentase sampah yang dikelola secara 3R | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | RSAMPAHAN | | | | | | | | 97,369,00 | | Dinas Lingkungan |
| Kegiatan 1 : Pengurangan Sampah | | | | | | | | | | | Hidup |
| | Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R). | 4. | 433 | 448 | 463 | 478 | 493 | 208 | | | |
| | Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola. | ž H | kelompok 1 lokasi | kelompok 2 lokasi | kelompok 3 lokasi | kelompok 4 lokasi | kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok 1 lokasi - 2 lokasi - 3 lokasi - 4 lokasi - 5 lokasi - 6 lokasi | kelompok 6 lokasi | | | |
| Kegiatan 2 : Penanganan Sampah | | | | | | | | | | | |
| | Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang telah menggunakan teknologi modern. | н | 1 unit | 7 unit | 8 unit | 10 unit | 2 unit | 2 unit | | | |
| | Sarana prasarana TPS/Depo/Landasan container yang direnovasi. | 7 | 7 unit | 8 unit | 8 unit | 9 unit | 10 unit | 10 unit | | | |
| Kebersihan | Wajib Retribusi yang dipungut retribusi kebersihan/ persampahan. | in : | 50.507 | 51.153 | 51.808 | 52.471 | 53.143 | 53.823 | | | |
| | | S | ¥ | X | XX | × | WK | XX | | | |

| | | | | | - | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------|------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 1 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Tahunan | Penda naan | Pelaksana |
| | | | | | | | | | (Rp.) | | |
| Kegiatan 4 : Operasional Pembersinan | | | | | | | | | | | |
| dan Pengangkutan Sampah | Rata-rata sampah yang diangkut dari TPS ke TPA. | | 173.9 ton/hari | 170.4 ton/hari | 166.9 ton/hari | 163.4 ton/hari | 159.9 ton/hari | 154.9 ton/hari | | | |
| INDIKATOR SDG's | 12.6.1.(a) Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan. | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP | KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | 13,151,00 | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Optimalisasi Sumber Daya | | | | | | | | | 9996 | | Hidup |
| Lingkungan Hidup | Sekolah dan PP yang dibina menjadi sekolah berwawasan lingkungan. | Sekolah/ ; | 254 | 271 | 284 | 297 | 310 | 322 | | | |
| | Jumlah Kampung rintisan Kampung Iklim. | RW | 92 | 79 | 93 | 107 | 121 | 135 | | | |
| | Penyuluhan dan penyebarluasan informasi lingkungan hidup. | Jenis media publikasi | 9 | 7 | ∞ | 6 | б | 6 | | | |
| Kegiatan 2 : Penaatan dan Pemantauan | | | | | | | | | | | |
| Lingkungan | Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara. | Laporan 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Laboran pemantauan dan hasil analisa kualitas air. | | e | 33 | 8 | c | c | 6 | | | |
| : | Perusahaan telah berizin lingkungan yang dipantau. | | 80 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | | | |
| Kegiatan 3 : Pengujian Kualitas | | | | 9 | 2 | 6 | | 9 | | | |
| LingKungan | Layanan pengujan parameter kualitas air. | Paramete 17 | 1 | 19 | 7.7 | 73 | 57 | 87 | | | |
| | Layanan pengujian parameter kualitas udara. | Paramete 6 | 9 | 7 | ∞ | 6 | 10 | 11 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 12.b.1. Indeks kualitas atraksi pariwisata | _ | | | | | | | | | |
| PROGRAM 9 : Program PENINGKATAN KL | PROGRAM 9 :Program PENINGKATAN KUALITAS ATRAKSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | | | | | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Pembinaan dan | | | | | | | | | 3,611,438, | | Pariwisata |
| Pengembangan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | 761 | | |
| | Pembinaan Usaha Pariwisata | , | 40 kali | 30 kali | 30 kali | 30 kali | 30 kali | | | | |
| | Survey Kepuasan Wisatawan | | | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan 1 laporan 1 laporan | 1 laporan | | | |
| | | | Dokumen | | | | | | | | |
| | Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata | 7 | 40 kali | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata | | | H | | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | donainei 1 | | | |
| | | | | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen dokumen dokumen | | | | |
| | Jogja Kreatif | | | 10 kali | 10 kali | 10 kali | 10 kali | 10 kali | | | |
| | Festival Ekonomi Kreatif | | | | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| | Gelar potensi ekonomi kreatif | , | 3 kali | 2 kali | | | | | | | |
| | Kajian Ekonomi Kreatif | | 1 kali | | , | , | , | | | | |
| | Perhitungan lama tinggal wisatawan | | 1 | | | | | | | | |
| | | | Dokumen | | | | | | | | |
| | Penvusunan Dossier Jogia Kreatif City | | | | | | | | | | |
| | 3 | _ | Dokumen | | | | | | | | |
| | | _ | Laporan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | ř | Table | 9 | | 41+01 | | |
|--|--|--------------|------------|-------------|------------|---|---|------------|------------------|-------|-----------|
| | | | | | _ | alger lallullall | | | Make | 9 | |
| | | | Tahun | | | | | | Alokası | sumpe | inctonci |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | Penda | Pelaksana |
| | | | 707 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata | | | | | | | | | 8,007,546, | | |
| | | | 1 0 | 1100 | 1 | 17.10 | - | 11-10 | 771 | | |
| | Pentas Kangen Jogja | | TO Kall | 8 Kali | 8 Kall | 8 Kali | 8 Kall | 8 Kall | | | |
| | PMPS | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | Pentas Kawasan | • | 7 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | | | |
| | Event Khusus | , | 40 kali | 15 kali | 15 kali | 15 kali | 15 kali | 15 kali | | | |
| | Pengiriman misi kesenian luar DIY | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | Donairiman mici kecanian dalam DIV | | 1 kali | 3 kali | 3 kali | 2 kali | 3 kali | 3 kali | | | |
| | Kalian Dangambangan Kualtas Atraksi Dariwisata | | II Vall | 2 Nall | J Nall | J Vall | J Nail | J Vall | | | |
| | najian rengembangan naantas Atransi ranwisata | | | | dokumon | dokiimon | dolumon dolumon dolumon | T dokumon | | | |
| | | | 0.1 | | novalien | and | novon novon | donaliei | | | |
| | Pentas Atraksi Wisata di kampung wisata | | 14 Kall | | | | | | | | |
| Tujuan 13 : Penanganan perubahan iklim | | | I KdII | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 13.1.2* Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap | gunakan sara | na dan pra | sarana tang | gap darura | t lengkap | | | | | |
| ROGRAM 1:Program KESIAPSIAGAAN I | PROGRAM 1:Program KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM | | | | | | | | 12,929,01 | ш. | врво |
| Kegiatan 1 : Pencegahan Bahaya | | | | | | | | | | | |
| Bencana Alam | Rintisan Kampung Tangguh Bencana (KTB) | Kampung | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Pelatihan Penanggulangan bencana | | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Apel Siaga Bencana | | | + | 1 | + | 1 | 1 | | | |
| | Keria bakti kesiapsiagaan bencana | | 0 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| Kegiatan 2 : Penanganan Bencana Alam | - | | | | | | | | | | |
| | Operasional Pusdalops PB | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Manajemen Logistik | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Pelatihan Kedaruratan Bencana | | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Assesmen dan Evakuasi Awal Bencana | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Kegiatan 3 : Rehabilitasi Dan | | | | | | | | | | | |
| Rekonstruksi Pasca Bencana | Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Monitoring daerah rawan bencana | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Kerja bakti pasca kejadian bencana | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Tujuan 15 : Ekosistem daratan | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 15.1.1. Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta | ogyakarta | | | | | | | | | |
| | 15.1.1.(a) Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK | JANG TERBUKA HIJAU PUBLIK | | | | | | | | 40,327,00 | | Dinas |
| Kegiatan 1 : Pengelolaan RTH Publik | | | | | | | | | 0000 | , 1 | Hidup |
| | Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang dibangun. | | 2 lokasi | 3 lokasi | 3 lokasi | 3 lokasi | 3 lokasi | 3 lokasi | | | |
| | Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang kondisinya terpelihara. | .,, | 33 lokasi | 35 lokasi | 38 lokasi | 41 lokasi | 44 lokasi | 47 lokasi | | | |
| | Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang direnovasi dengan penambahan | | 3 lokasi | 4 lokasi | 4 lokasi | 4 lokasi | 5 lokasi | 5 lokasi | | | |
| Kegiatan 2 : Pertamanan dan Perindang | elemen taman. | | | | | | | | | | |
| lalan | Taman kota yang kondisinya ternelihara | ľ | 154 lokasi | 154 lokasi | 154 lokasi | 154 lokasi | 154 lokasi 154 lokasi 154 lokasi 154 lokasi 154 lokasi 154 lokasi | 154 lokasi | | | |
| | Taman kota yang diranoyasi dangan panambahan alaman taman dakoratif | | 6 lokaci | 6 lokasi | 6 lokasi | 6 lokasi | 6 lokasi | 6 lokasi | | | |

| | | | ' | | Ľ | Target Tahunan | an | | | | |
|--|---|--------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | Instansi |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Pelaksana |
| | | | 7107 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Pot taman, pergola dan elemen taman yang kondisinya terpelihara. | 3.0 | 3.052 unit 3.132 | 3.132 unit | 3.212 unit | 3.292 unit | 3.372 unit | 3.452 unit | - | | |
| | Pot taman, pergola dan elemen taman yang dipasang. | 80 | 80 unit | 80 unit | 80 unit | 80 unit | 80 unit | 80 unit | | | |
| Tujuan 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh | elembagaan yang tangguh | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG S 16.1.5.(d) Angka Kriminalii PROGRAM 1:Program PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN | TO.T.3.(4) Angka kriminalitas WAWASAN KEBANGSAAN | | | | | | | | 6.929.326. | ž | Kantor |
| | | | | | | | | | 256 | 2 2 | Kesbang |
| Kegiatan 1 : Pemantapan Ideologi dan | | | | | | | | | | | |
| Kewaspadaan Nasional | Sosialisasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan masvarakat | 10 | 10 kali | 11 kali | 12 kali | 13 kali | 14 kali | 15 kali | | | |
| | Peringatan Serangan Umum 1 Maret | 1 | 1 kali | kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | | | |
| | Koordinasi komunitas intelejen daerah (kominda) Kota Yogyakarta | 24 | _ | 24 kali | 24 kali | 24 kali | 24 kali | 24 kali | | | |
| | Koordinasi forum kewaspadaan dini masyaralat (FKDM) Kota Yogyakarta | 7 | | 7 kali | 7 kali | 7 kali | 7 kali | 7 kali | | | |
| | Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta | 4 | | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | | | |
| | Koordinasi penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah | 21 | | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| | Pendidikan dan tasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik | 10 | _ | 11 kali | 12 kali | 13 kali | 14 kali | 15 kali | | | |
| | Pengawasan orang asing (PORA) Dangmatan organicasi kompanyakatan di Kota Vogoshata | 14 | 4 Kalı 4 | 4 kalı | 4 Kali | 4 Kalı | 4 kalı | 4 Kall | | | |
| | r enguaran oiganisasi nemasyaranaran ur nora rogyanara | 7 | | IIDV C | T+ Vall | T+ vall | T+ Vall | TO Vall | | | |
| | Sarasenan bagi pengnayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta | Ä | ı kalı | ı kalı | ı kalı | Z Kalı | Z Kali | z Kali | | | |
| INDIKATOR SDG's | Koordinasi antar forum yang ada di Kota Yogyakarta 16.2.1 (h) Prevalensi kekerasan terbadan anak | 18 | 18 kali | 18 kali | 18 kali | 18 kali | 18 kali | 18 kali | | | |
| PROGRAM 1: Program PERLINDUNGAN ANAK | NAK | | | | | | | | 9,076,955, | ۵ | Dinas |
| | | | | | | | | | 405 | ā | Pemberdayaan |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak | | | | | | | | | | 2 4 | Masyarakat, |
| Kegiatan 2 · Pembinaan Partisinasi dan | | | | | | | | | | | dan |
| Perlindungan Anak | | | | | | | | | | 5 6 | Perlindungan |
| Kegiatan 3 : UPT Pusat Pelayanan | | | | | | | | | | ⋖ | Anak |
| Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 16.3.1. (a) Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN | DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | | | | 6,666,935, | ۵ ۵ | Dinas Pemberdayaan |
| Kegiatan 1: Pembinaan | | | | | | | | | | . ≥ ċ | Masyarakat, |
| Kegistan 7 · Dembinaan Participasi dan | | | | | | | | | | 2 70 | dan dan |
| Perlindungan Perempuan | | | | | | | | | | 5 6 | gan Perlindungan |
| Kegiatan 3 : UPT Pusat Pelayanan | | | | | | | | | | 4 | Anak |
| Ierpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG's | 16.3.1. (b) Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial | lal | | | | | | | | | - |
| PROGRAM 1: Program ADVOKASI DAN REHABILITASI SOSIAL | EHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | | ٥ | Dinas Sosial |
| | | | | | | | | | 2,668,034, 791 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | F | Target Tahunan | au | | Indikatif | | |
|--|--|---------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | Inctanci |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Tahunan (Rp.) | Penda naan | Pelaksana |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan | Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha | Orang | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | | | |
| Sosial (PMKS) | Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha serta pengantaran ke RSJ | Orang | 75 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | | | |
| | 3. Klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha | Orang | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | Korban tindak kekerasan yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha | | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | Anak rentan hidup dijalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha | Orang | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Laporan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi | Laporan | 1 | П | Н | 1 | П | 1 | | | |
| | Perempuan rawan sosial eknomi yang mengikuti pelatihan ODHA yang mengikuti penguatan sosial psikologis | Orang | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah | | • | | | | | | | 7,612,274, | | |
| Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 1.Laporan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 2. Laporan penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas | Laporan | т, | ₩, | | т, | τ, | т, | | | |
| | 3. Laporan penanganan dan rekomendasi anak terlantar | Laporan | | | | | _ , | | | | |
| | 4. Laporan advokasi dan surat rekomendasi bagi Piviks | Laporan | ٦, | ٦, | ٦, | ٠, | ٦, | ٦, | | | |
| | 5. Laputali penintali dan pendampingan Nobe dan Oser 6. Fraknansi Daringatan HDI | Kali | | | ٠. | | | | | | |
| | 2. Hendelist reinigatailibi | Nail I | | ٠, | - - | ٠. | + | | | | |
| | 7.Laporan Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasunan Anak) bagi LKSA | Laporan | | | - - | - | . | | | | |
| | 8. Buku Profil KUBE yang tersusun | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| INDIKATOR SDG's | 16.6.1* Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN | DAN PENGENDALIAN ANGGARAN | | | | | | | | 1,933,828, 376 | ш | BPKAD |
| Kegiatan 1 : Perencanaan Anggaran | | | | | | | | | | | |
| | Dokumen tentang Perda APBD TA. 2019 dan Perwal tentang Penjabaran | | 2 | | | | 2 | 2 | | | |
| | APBD TA, 2019 | | dokumen | dokumen | dokumen | | dokumen dokumen | dokumen | | | |
| | Dokumen Perda Perubahan APBD TA. 2018 dan Perwal tentang Penjabaran ספורה אביויים | | 2 dokumon | 2 dokiimon | | 2 dokumen | 2 dokumon | 2 dokumon | | | |
| | Dokumen tentang Nota Keusagan Deruhahan RADBO TA 2018 dan Nota | | donument 2 | donument 2 | donaliieii 2 | | | donaliieii 2 | | | |
| | Keuangan RAPBD TA. 2019 | | 2 dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | 2 dokumen | | | |
| | Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2018 | | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | | 3 dokumen | 3 dokumen | | | |
| | Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2018 dan RKA-SKPD dan | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | |
| | RKA-SKPKD TA. 2019 | | kegiatan | kegiatan | kegiatan | kegiatan | kegiatan | kegiatan | | | |
| | Dokumen tentang Kode Rekening | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Kegistan 2 · Dengendaljan Anggaran | | | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| | SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPDdan DPA- | | 44 SKPD | 44 SKPD | 44 SKPD | 44 SKPD | 44 SKPD | 44 SKPD | | | |
| | SKPKD TA. 2018 | | 4 | 4 | 44 | 44.0 | 44 | 4 | | | |
| | SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA- SKPKD TA. 2018 | | 44 SKPD | 44 SKPD | 44 SKPD | 44 SKPD | 44 SKPD | 44 SKPD | | | |
| | Fasilitasi pencairan dana hibah | | 22 SKPD | 22 SKPD | 22 SKPD | 22 SKPD | 22 SKPD | 22 SKPD | | | |

| | | | | | Target Tahunan | nan | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------|-------|-----------------------|
| | | Tahun | = | | | | | | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan Dasar | ar 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | instansi Pelaksana |
| | | 701/ | | | | | | Tahunan n (Rp.) | naan | |
| | Fasilitasi pencairan dana Bantuan Sosial | 2 SKPD | 2 SKPD | 2 SKPD | 2 SKPD | 2 SKPD | 2 SKPD | | | |
| | Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas | 2 dokumen | 2 Jen dokum | 2 an dokume | 2 dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen | 2 dokumen | | | |
| | ljin diatas/diluar SHBJ | 10 SKPD | D 10 SKPD |) 10 SKPD | 10 SKPD | 10 SKPD | 10 SKPD | | | |
| PROGRAM 2 :Program PENGENDALIAN B | PROGRAM 2 :Program PENGENDALIAN BELANIA DAERAH DAN PENGELOIAAN DANA TRANSFER | | | | | | | 3,222,759, 084 | ВР | BPKAD |
| Kegiatan 1 : Pengendalian Anggaran | | | | | | | | | | |
| Belanja Daerah | OPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Belanja Daerah | 44 OPD | 0 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | | | |
| | Dokumen TPTGR | 9 - | 9 - | 9 - | 9 | . 9 | . 9 | | | |
| | | dokun | en dokum | en dokume | n dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen | dokumen | | | |
| | Penyusunan Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara untuk pelaporan SPT tahunan Tahun | 1 dokumen | 1 ien dokum | 1 en dokume | 1 n dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | 2017 dan persiapan Penyusunan Form 1721 Tahun 2018 | | | | | | | | | |
| | Laporan proses pengembalian kelebihan Gaji | dokumen o | 12 en dokum | 12 en dokume | 12 n dokumen | 12 12 12 12 12 dokumen dokumen dokumen | 12 dokumen | | | |
| | Dokumen Laporan pemotongan, penvetoran, dan pelaporan PFK (IWP, | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Taperum 3% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan dan 0,54% iuran Pemda | dokumen | | en dokume | n dokumen | dokumen dokumen dokumen | dokumen | | | |
| | Japonan SKPD vang diterhitkan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | בקלים מו כונו למוף מיכן מינים | dokumen | | dokumen dokumen | | | dokumen | | | |
| | Cakupan OPD yang mendapat pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah | 44 OPD | | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | | | |
| Kegiatan 2 : Pengelolaan Dana | | | | | | | | | | |
| Perimbangan dan Dana Tranfer | Laporan Dana perimbangan dan dana transfer yang dikelola | 9 | 9 | 9 40611200 | 9 | 6 6 6 6 6 6 6 6 dokuman dokuman dokuman | 9 | | | |
| PROGRAM 3 :Program PENGELOLAAN PE | PROGRAM 3 :Program PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD | 000 | | | | O. C. | | 3,222,759, | ВР | BPKAD |
| Kegiatan 1 : Penyusunan | | | | | | | | 100 | | |
| Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2017 | 1 dokur | 1 dokum | 1 on dokume | 1 dokumen | 1 1 1 1 1 1 1 dekimen dekimen dekimen dekimen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2017 | 1 dokumen | 1 ien dokum | 1 en dokume | 1 n dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen LRA, LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah | 1 dokumen | 1 ien dokum | 1 en dokume | 1 n dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Neraca, LO, LPE dan Calk Pemerintah Daerah | 1 dokumen | | 1 en dokume | 1 n dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan Realisasi APBD TA.2018, Semester I | 1 dokumen | | 1 en dokume | 1 n dokumen | 1 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan Realisasi APBD TA.2017 Tribulan Iv dan TA. 2018 Tribulan I, II, III | 4 . | 4 . | 4 . | 4 . | 4 . | 4 . | | | |
| | 1 | dokumen | | | | | dokumen | | | |
| | cakupan Pelayanan implementasi SiPKD berbasis akrual | 44 OPD, 1 SKPKD/O PD |), 1 44 OPD, 1 /O SKPKD/O PD | , 1 44 OPD, 1 O SKPKD/O PD | 1 44 UPD, 1) SKPKD/O PD | SKPKD/O | 44 OPD, 1 SKPKD/O PD | | | |
| | Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit | 2 kali | | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| | Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat | 12 | 5 | 12 | | | 12 | | | |
| | | dokumen | ien dokumen | en dokumen | u gokumen | dokumen | dokumen | | | |

| | | | | ľ | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|-----------|
| | | | | | larget lanunan | au | | | | |
| | | Tahun | _ | | | | | Alokası Sumbe | | Inctanci |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ۵ | | Pelaksana |
| | | 7017 | | | | | | Tahunan naan (Rp.) | _ | |
| | Pendampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) | 44 OPD, 1 | ,1 44 OPD,1 | 1 44 OPD, 1 | 44 OPD, 1 44 OPD, 1 44 OPD, 1 | 44 OPD, 1 | 44 OPD, 1 | (.d.) | | |
| | berbasis akrual | SKPKD/O | | SKPKD/O | SKPKD/O | SKPKD/O | SKPKD/O | | | |
| Kegiatan 2 : Pengelolaan Pembiavaan | | 7 | 5 | J. | 2 | מ | 2 | | | |
| dan Dombinasa Dola Domololasa | Activation of the state of the second | 16 101 | 16 121 | 16 (2) | 16731 | 16 121 | 16 kali | | | |
| Voussess Blib | Frequencial Perientipatan daria luce di bann Peniennan | 20 kali | 20 kali | 20 kali | 20 kali | 20 kali | 20 kali | | | |
| Nedaligali BLOD | FIGURE IS EVALUASI IIIVES LASI D'ALIA D'ACTALL | 20 kall | 20 Nall | 20 Nall | 20 kali | 20 kdii | 20 kall | | | |
| | Penyusunan Laporan Kealisasi Penyertaan Modal | dokumen | | 24 24 dokumen dokumen | dokumen | 24 dokumen | dokumen | | | |
| | Penyusunan Laporan perforasi | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | | dokumen | | n dokumen | dokumen dokumen dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| | Penyusunan Laporan piutang daerah | 4 | 4 dokumen | 4 | 4 dokiimon | 4 | 4 | | | |
| | | dOkullie 43 | | | dokumen | | | | | |
| | Penyusunan Laporan nasii Kerjasama dengan Pinak Kes | 12 dokumen | 12 en dokumen | 12 n dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | | | |
| | Penyusunan Laporan pendapatan diterima di muka | 12 | | | | | | | | |
| | | dokumen | | | | | | | | |
| | Penyusunan Laporan Dana Cadangan | 2 kali | | | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| | Cakupan Pengesahan laporan bulanan BLUD | 23 BLUD | _ | | 23 BLUD | 23 BLUD | 23 BLUD | | | |
| | | (1 OPD, | | (1 OPD, | (1 OPD, | (1 OPD, | (1 OPD, | | | |
| | | 22 unit | | 22 unit | 22 unit | 22 unit | 22 unit | | | |
| | | kerja) | | kerja) | kerja) | kerja) | kerja) | | | |
| | Cakupan OPD yang mendapat Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan | 23 BLUD | _ | 23 BLUD | 23 BLUD | 23 BLUD | 23 BLUD | | | |
| | Layanan Umum Daerah (BLUD) | (1 OPD, | | (1 OPD, | (1 OPD, | (1 OPD, | (1 OPD, | | | |
| | | 22 unit keria) | 22 unit keria) | 22 unit keria) | 22 unit keria) | 22 unit keria) | 22 unit keria) | | | |
| | Kajian divestasi penyertaan modal pada PT Radio Swara Adhiloka | 0 | 0 | 0 | 0 (20) | 0 | 0 | | | |
| PROGRAM 4 :Program PERENCANAAN, I | PROGRAM 4 :Program PERENCANAAN, PEMANFAAATAN, DAN INVENTARISASI ASET | | | | | | | 29,190,96 | BPKAD | Q |
| | | | | | | | | 856'0 | | |
| Kegiatan 1 : Perencanaan, Pengadaan | | | | | | | , | | | |
| dan Distribusi Aset | Dokumen KkbiviD Pengadaan | 2 dokumen | | ر م dokumen | dokumen dokumen dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | | | |
| | Dokumen RKBMD Pemeliharaan | 2 | | 2 | deliment deliment deliment deliment | 2 | 2 | | | |
| | Dokimen RKBMD Pemanfaatan | 2 Condition | | 2 | donumen 2 | donument 2 | donalineii 2 | | | |
| | | dokumen | en dokumen | | dokumen dokumen dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| | Dokumen RKBMD Pemindahtanganan | 7 | | 2 . | 2 . | | | | | |
| | MAN | dokumen | en dokumen | dokumen | dokumen dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| | Dokumen knowi Pengnapusan | dokumen | 2 on dokumen | 2 dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| | Buku Agenda | 800 buah | | 800 buah | | | | | | |
| | Kalender | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| | | eksempla | ıla eksempla | a eksempla | eksempla eksempla | eksempla | eksempla | | | |
| | | | | | - 4 | 7 4 | - 4 | | | |
| | Alat Tulis Naticul | 1 paket | | | 1 paket | 1 paket | 1 paket | | | |
| | Bendera Meran Putin dan Umbul-umbul | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | | | |
| | Gambar Walkota Gali wakii walikota | T pdnet | | T paker | I paket | T paket | T paket | | | |

| | | | | | Ta | Target Tahunan | Ę | | Indikatif | | |
|--|--|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|---|--------------|-------------------|-------|-------------|
| | | | - Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | | | | į | | Anggaran | _ ; | Instansi |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 7070 | 2021 | 7077 | 5 Tahunan | renda | Pelaksana |
| | | | | | | | | | (Rp.) | | |
| | Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta Station | 2 | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | | | |
| | Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogvakarta Sepeda motor | cr) | 34 unit | 34 unit | 34 unit | 34 unit | 34 unit | 34 unit | | | |
| | Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. Yogyakarta Perlengkapan Kantor | . 4 | | | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | | | |
| | Barang Cetakan | 4 | | | 4 paket | | 4 paket | 4 paket | | | |
| Kegiatan 2 : Pemanfaatan dan | | | | | | | | | | | |
| Optimalisasi Aset | Dedaktible klaim asuransi | 1 | | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | | | |
| | Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintahan | 1 | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | | | |
| | Jasa asuransi bangunan gedung Kesehatan | 1 | | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | | | |
| | Jasa asuransi bangunan gedung Perekonomian | 1 | paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | | | |
| | Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta | 1 | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | | | |
| | Penataan dan Penyelesaian Status Barang Milik Daerah | 1 | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | | | |
| | Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah | ₩ 0 | 1 dokumen g | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Penilaian Barang Milik Daerah | H 7 | | deminde | 1 dokumen | 1 dokumen | | 1 dokimen | | | |
| | Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 5 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jasa Penilaian Tuniangan Perumahan Bagi Anggota DPRD | 0 | | . 0 | . 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Kegiatan 3 : Inventarisasi Aset dan | | | | | , | | , | , | | | |
| Pengelolaan Barang Persediaan | Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot | 4 | | _ | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | Yogyakarta | ۵ | | | bangunan | bangunan | bangunan bangunan | bangunan | | | |
| | Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset | 4 C | 44 SKPD/ | 44 SKPD/ | 44 SKPD/ | 44 SKPD/ | 44 SKPD/ | 44 SKPD/ | | | |
| | |) (| | | | د 5 ر | | | | | |
| | Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK KI dalam rangka e- audit | 2 0 | 2 Dokumen I | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | | |
| | Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD | 4 (| PD/ | PD/ | 44 SKPD/ | 44 SKPD/ | 44 SKPD/ | 44 SKPD/ | | | |
| | | 5 6 | | OPD 1 | OPD : | OPD : | OPD | 040 | | | |
| | Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta | 2 | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| | Pengujian fisik kendaraan yang akan dihapus | ਜ | 1 | 1 | 1 dokumon | 1 dokumon | 1 dokumon | 1 dokumon | | | |
| | Pemasangan dan penggantian panan nama OPD dan Panan RTHP yang rusak | 5 6 | | | 22 unit | 22 unit | | 22 unit | | | |
| | Pelaksanaan Sensus Barang Daerah | н 7 | | | | - | т - | 1 | | | |
| | Langua Darradian Damariath Vota Vanalas | 3 + | okumen | okumen | dokumen 1 | dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen | dokumen 1 | | | |
| | Laporan barang Perseulaan Pemerintan Nota Togyakarta | - 5 | dokumen | okumen | dokumen dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| INDIKATOR SDG's | 16.6.2 Indeks pelavanan publik | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program PENINGKATAN KA | • | | | | | | | | | S | Sekretariat |
| Kegiatan 1 : Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur | | | | | | | | | 3,013,864, 696 | | Daerah |
| | Pelaksanaan Analisa Jabatan Konversi | 4 (| . 49 | | , | , | , | | | | |
| | |) <u>\$</u> | OrD/unit kerja | | | | | | | | |
| | Penyusunan informasi jabatan dinas | 7 | 21 OPD/ | | | | | | | | |
| | | 5 | 2 | | | | | | | | |

| | | | | F | ŀ | | | 314-111 | | |
|---|------|-------------|---|--|----------------------|--|----------------------|-----------------------|-------|-----------|
| | | 1 | | - | larget Lanunan | E . | | Alokaci | Sumbo | |
| | | Tahun | | | | | | Anggaran | _ | Instansi |
| Program, Kegiatan, Output Kegiatan | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 Tahunan (Rp.) | Penda | Pelaksana |
| penyusunan evaluasi jabatan dinas dan kecamatan | 50 | 50 OPD - | | | | | | - | | |
| | 1 5 | 1 laporan - | | | | | | | | |
| penyusunan sistem pengukuran kinerja pegawai | 1 18 | 1 laporan | | | | | | | | |
| Laporan Pembinaan Analisa jabatan | • | 401 | 1 dokumen | 1 dokumen dokumen lanoran | | dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| Laporan Pembinaan pendayagunaan aparatur | ٠ | | 96 | 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 1 1 40kimon | defined defined defined defined defined | 1 40kimon | | | |
| Laporan penyelarasan hasil analisa jabatan | | , , , | a de la | 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| Laporan analisa jabatan evaluasi dinas | • | | 21 PD/ | 18 PD/ | | 18 PD/ | 18 PD/ | | | |
| Laporan analisa jabatan evaluasi badan, setda dan setwan | | , , | unit kerja 13 PD/ | unit kerja 14 PD/ | unit kerja 14 PD/ | unit kerja 14 PD/ | unit kerja 14 PD/ | | | |
| | | _ | unit kerja | unit kerja | unit kerja | unit kerja | unit kerja | | | |
| Laporan analisa jabatan evaluasi kecamatan | | | 14 PD/ unit kerja | 14 PD/ unit kerja | 14 PD/ unit kerja | 14 PD/ unit kerja | 14 PD/ unit kerja | | | |
| Laporan analisa jabatan komprehensif | • | 7 | 12 PD/ unit kerja | 4 PD/ unit kerja | 4 PD/ unit kerja | 4 PD/ unit kerja | 4 PD/ unit kerja | | | |
| Laporan evaluasi jabatan | • | - 0 | lokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| laporan analisa jabatan fungsional tertentu | | - 0 | okumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokume | 1 dokumen | | | |
| laporan informasi jabatan badan, setda, dan setwan | | 7 | 15 PD/ unit kerja | | | | | | | |
| Laporan pengembangan aparatur | | - 0 | okumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| Laporan Implementasi dan Pengembangan sistem pengukuran kinerja | • | (0 | lokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 2 2 2 2 dokumen doku | 2 dokumen | | | |
| Laporan evaluasi pola karier | | - 0 | lokumen | 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| laporan Informasi jabatan kecamatan | • | ' | | 14 PD/ unit kerja | | | | | | |
| laporan informasi jabatan UPT | | ľ | | | 14 PD/ unit kerja | 14 PD/ 15 PD/ unit kerja unit kerja | 15 PD/ unit kerja | | | |
| buku pedoman anjab | | | | 1 dokumen | | | | | | |
| buku pedoman evaluasi jabatan | • | ' | | 1 dokumen | | | | | | |
| laporan standar norma waktu kerja kecamatan | • | ' | | 1 dokumen | , | | , | | | |
| laporan resiko jabatan non kesehatan | • | ' | | 1 dokumen | | | | | | |
| Laporan standar norma waktu kerja TU SMP | | | | | 1 dokumen | | | | | |
| laporan resiko jabatan non kesehatan | • | ' | | | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | Та | Target Tahunan | ur. | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|-------------|------|----------------|--------------|------|------------------|-------|-----------|
| | | Tahun | = | | | | | Alokasi | Sumbe | Inctanci |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan Sa | Satuan Dasar | ar 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2 | Penda | Pelaksana |
| | | | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Laporan standar norma waktu kerja surveilance | | | | | 1 dokumen | | | | |
| Kegiatan 2 : Pemantapan pelayanan | | | | | | | | | | |
| publik | pembinaan pelayanan publik | 1 doku- | | | | | | | | |
| | | poran pe- | bd | | | | | | | |
| | | nyelengga raan PP | igga P | | | | | | | |
| | Monev Pelayanan Publik | 1 doku- | | | | | ļ | | | |
| | | men mo- | -01 | | | | | | | |
| | | pelayana | ina ¥ | | | | | | | |
| | Evaluasi SPP Kecamatan | 14 | , | | | | | | | |
| | | kecamata | ata | | | | | | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM | 2 Laporan | ran - | | | | | | | |
| | | Pencapaia | paia | | | | | | | |
| | dil dina acasur loa incustisi internasia | IN COOL | | | | | | | | |
| | persiapan kompetisi movasi perayanan publik | S OPD Pelayana | . na | | | | | | | |
| | | n publik | ¥ | | | | | | | |
| | Evaluasi PPK - BLUD | 1 dokumen | , | | | | | | | |
| | accipiant according in lands in lands | novan | 100 | | | | | | | |
| | evaluasi regulasi pelayanan penzinan | penyeder hanaan, | n, | | | | | | | |
| | | penyatua n regulasi | tua Iasi | | | | | | | |
| | | jenis dan | an | | | | | | | |
| | | persyarat an | rat | | | | | | | |
| | | perizinan | lan | | | | | | | |
| | Survey Pengaduan Masyarakat | 16 sekolah | ۰ ۔ | | | | | | | |
| | pelaksanaan survey kepuasan masyarakat utilitas kota | 4 jenis lavanan | ' = | | | | | | | |
| | monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta | . ←1 | | | | | | | | |
| | | dokumen | nen | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Pemantapan kelembagaan | | | | | | | | | | |
| perangkat daerah | evaluasi kelembagaan | 1 dokumen | - nen | | | | | | | |
| | evaluasi penyusunan rincian tugas | 37 OPD | . 0 | | | | | | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM Organisasi | 1 laporan | ran - | | | | | | | |
| | Penataan kelembagaan UPT Badan/ Dinas | 62 UPT | | | | | | | | |

| | | | | | Ta | Target Tahunan | ue | | Indikatif | | |
|-------------------------------------|---|------------------|-------------------------|------|------|----------------|------|------|--------------|-------|-----------|
| | | | 1 | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Out put Kegiatan | Satuan Da | Ianun Dasar | | | | | | Anggaran | | Instansi |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 Tahunan | Penda | Pelaksana |
| | | | | | | | | | (Rp.) | | |
| | Kajian Kelembagaan | 5 | 1 Dokumen | | | | | | | | |
| | | kajian | an | | | | | | | | |
| | Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan | Η - | | | | | | | | | |
| Kegiatan 4 : Pemantapan reformasi | | dok | dokumen | | | | | | | | |
| hirokrasi dan akuntahilitas daerah | Evaluaci dan Dendamningan nelaksanaan RB | S area | ď | | | | | | | | |
| | Lvarioosi dari Feridaniipingan perassanaan no | per | perubaha | | | | | | | | |
| | Workshop Reformasi Birokrasi | 1 kali | = | | | | | | | | |
| | penyusunan roadmap RB | 11 2 | 1 - dokumen | | | | | | | | |
| | | YON . | i i i | | | | | | | | |
| | Evaluası kinerja SKPD melalui SPEKOP | 1 dok lapo | 1 dokumen laporan | | | | | | | | |
| | Penyusunan LKIP Kota Yogyakarta | dok | 1 - dokumen | | | | | | | | |
| | Evaluaci I KID | 1 kali | j. | | | | | | | | |
| | Pendampingan LKIP | 1 kali | · | | | | | | | | |
| | pengukuran capaian data LKIP | 1 P | 1 - dokumen | | | | | | | | |
| | evaluasi E-LKIP | 1 | ' | | | | | | | | |
| | | dok | dokumen | | | | | | | | |
| | pendampingan E-LKIP | 1 kali | · | | | | | | | | |
| | penyusunan perjanjian kinerja | dok | 1 - dokumen | | | | | | | | |
| | pendampingan penyusunan perjanjian kinerja | 1 kali | :E | | | | | | | | |
| | penyusunan perubahan perjanjian kinerja | dok | 1 - dokumen | | | | | | | | |
| | monev pengukuran capaian perjanjian kinerja | H 2 | 1 | | | | | | | | |
| Kegiatan 5 : Pemantanan | | NO. | | | | | | | | | |
| ketatalaksanaan, hubungan kerja dan | penyusunan sistem, dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah | 4 draft | aft - | | | | | | | | |
| standarisasi | | per | perwal/ | | | | | | | | |
| | penvelenggaraan ForkomPAN Tingkat propinsi dan Kota | 2 kali | - iii | | | | | | | | |
| | | pen | penyelen ggaraan | | | | | | | | |
| | evaluasi standar sarana dan prasarana kerja | do dok | 1 - dokumen | | | | | | | | |
| | peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa | 1 dok | 1 - dokumen | | | | | | | | |
| | peraturan walikota tentang Analisa Standar Belanja | 1 dok | 1 - dokumen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Tar | Target Tahunan | _ | | Indikatif | | |
|--|--|-----------|---------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | 707 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | pendampingan penyusunan SOP | 98 P 9 | 48 - OPD/unit keria | ' | ľ | | | | | | |
| | Pengembangan Budaya kerja | # H B | 1 - dokumen | ľ | ľ | | | | | | |
| Kegiatan 6 : Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan | | | | | | | | | 4,800,296, 586 | | |
| akuntabilitas | draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan Pemerintah | | 10 | | 1 draft | | | 1 draft | | | |
| | | | ke pe | perw <i>al)</i> p kepwal k | _ | perwai/ kepwal | perwal/ kepwal | perwai/ kepwal | | | |
| | ForkomPAN Tingkat propinsi dan Kota | | 2 k | 2 kali 2 | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| | | | D 88 | | | | | ggaraan | | | |
| | Workshop Hospitality Management | • | 1, pe | _ | | | | | | | |
| | rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa | | 10 | | 1 draft | 1 draft | 1 draft | 1 draft | | | |
| | | | be | | | | | perwal | | | |
| | rancangan peraturan walikota tentang Analisa Standar Belanja | • | 10 | 1 draft | | | | 1 draft | | | |
| | | | be : | | | | | perwal | | | |
| | Laporan pendampingan penyusunan SOP | | S . | SOP 45 S | 20 | 9 | SOP 90 | | | | |
| | | | ke | kelurahan UPT | | SMP | SD dan 3 TK | | | | |
| | Laporan pendampingan tatalaksana | | 15 | 15 PD/ 1 | 15 PD/ | 10 PD/ | 10 PD/ | | | | |
| | | | un | it kerja u | nit kerja 🛚 ı | unit kerja unit kerja unit kerja | unit kerja | | | | |
| | Laporan Pembinaan Pelayanan Publik | • | 4 b | 1 kumen d | okumen | lokumen | $1 \hspace{1cm} 1 \hspace{1cm} 1$ dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan Monev ketatalaksanaan dan pelayanan publik | | П | 1 | | | _ | 1 | | | |
| | | | ဓ | E C | eu | E. | e | dokumen | | | |
| | | | E 3 | monev n | monev I | monev | monev | monev | | | |
| | | | 2 5 | | | Sanaan | sanaan | Sanaan | | | |
| | | | g | | | | | dan PP | | | |
| | Laporan pendampingan SPP | • | Ϊ. | Ħ | Ħ | ij | Ħ | 1 PD/unit | | | |
| | and a second section of the second se | | ke | | | | | kerja | | | |
| | Laporan monitoring dan evaluasi pencapalan SPIVI | ' | 17 | z iaporan z nencanai n | z iaporan , | z iaporan | z iaporan | z iaporan nencanai | | | |
| | | | an | | | | | an SPM | | | |
| | frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti | • | 1, | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | Laporan Grand design regulasi pelayanan perizinan | • | 10 | 1 doku- | | | | | | | |
| | | | Ĕ : | men pela- | | | | | | | |
| | | | ya pe | yanan perizinan | | | | | | | |
| | Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta | • | 1 | 1 | | _ | _ | 1 | | | |
| | | | op | kumen d | okumen | lokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen | dokumen | | | |

| | | | | | Īa | Target Tahunan | <u>=</u> | | Indikatif | | |
|---|--|--------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------|-------|-----------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokası | Sumbe | Inctanci |
| • | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | . 5 | Penda | Pelaksana |
| | | | i | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Dokumen LKIP Kota Yogyakarta dan Laporan Pendampingan LKIP OPD | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 2 2 2 dokumen dokumen dokumen | 2 dokumen | | | |
| | dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja | • | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 2 2 2 dokumen dokumen dokumen | 2 dokumen | | | |
| | laporan monev pengukuran capaian perjanjian kinerja | • | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Kajian Regulasi perizinan | 1 | | | 1 dokumen kajian | | | | | | |
| | Review Analisa Standar Belanja | ' | | | 1 dokumen | | | | | | |
| Kegiatan 7 : Pemantapan kelembagaan | 7.00 | | | | | | | | | | |
| perangkat daerah dan reformasi birokrasi | dokumen evaluasi kelembagaan KSUD | ' | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | dokumen evaluasi kelembagaan pengelolaan taman pintar dan pasar | • | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | dokumen evaluasi kelembagaan kantor kesatuan bangsa | • | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Laporan evaluasi rincian tugas dinas | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokume | 1 dokumen | | | |
| | Laporan evaluasi rincian tugas setda dan setwan | | | 1 dokumen | 1 Jokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan evaluasi rincian tugas badan, inspektorat dan kecamatan | • | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan monitoring dan evaluasi penerapan SIM Organisasi | Ì | | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | | 1 laporan | | | |
| | Dokumen kajian kelembagaan | • | | 1 dokumen kajian | 1 dokumen kajian | 1 dokumen kajian | 1 1 1 dokumen dokumen dokumen kajian kajian kajian | 1 dokumen kajian | | | |
| | Laporan penataan kelembagaan UPT | | | 1 dokumen | 1 Jokumen | 1 dokumen | _ | 1 dokumen | | | |
| | Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area managemen perubahan | • | | 1 dokumen | 1 Jokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan organisasi | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen 1 1 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan peraturan perundang-undangan | • | | 1 dokumen | 1 Jokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan ketatalaksanaan | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan pelavanan publik | • | | 1 dokumen | 1 Jokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area akuntabilitas | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area pengawasan | • | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan dan managemen SDM Aparatur | • | | 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | ľ | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|---|---------------|---|---------------------|----------------|--|---------------|-------------------|------------|-----------------------|
| | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan Satuan | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | 707 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Laporan evaluasi kinerja organisasi | , | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan kajjan kebijakan | , | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan pengukuran indeks kualitas kebijakan | • | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan pengukuran indeks kualitas kebijakan | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 dokumen dokume | 1 dokumen | | | |
| | Laporan pengukuran indeks administrasi pemerintahan yang baik | ı | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| PROGRAM 2 :Program PENINGKATAN PI Kegiatan 1 : Pelayanan Kerumahtanggaan | PROGRAM 2 .Program PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH, DAN KERUMAHTANGGAAN Kegistan 1 : Pelayanan Kerumahtangaan | HTANGGAAN | | | | | | 11,741,94 | .,_ | Sekretariat Daerah |
| | Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah | 1 Dokumer | 1 1 1 1 1 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | |
| | Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 Dokumen | _ | | | | | | | |
| | Pelayanan Insidentil Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 Dokumen | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk | 1 lokasi | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Kebersihan Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar | 7 lokasi | | | | | | | | |
| | Pembayaran PBB Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota | 2 Lokasi | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Kebersihan dan Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakii Walikota | 2 Lokasi | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota | 2 Lokasi | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing- | 1 kompleks | | | | | | | | |
| | masing | balaikota | | | | | | | | |
| | Peralatan kerja dan rumah tangga yang tersedia untuk Walikota dan Wakil Walikota | 21 jenis | | | | | | | | |
| | Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 1 1 1 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen | 1 Dokumen | | | |
| | Laporan Pelayanan Insidentil Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta | | 1 Dokumen | 1 1 Dokumen Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | |
| | Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos, ajag pintu masuk dan keluar, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota | | 10 Lokasi | 10 Lokasi | 10 Lokasi | 10 Lokasi | 10 Lokasi | | | |
| | Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar | | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 2 Lokasi | | | |
| | Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | 12 bulan | | | |
| | Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota | | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 2 Lokasi | | | |
| | Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing- | | 1 Kompleks | 1 Kompleks | 1 Kompleks | 1 Kompleks | 1 Kompleks | | | |
| | masing | | Balaikota | | | Balaikota | Balaikota | | | |
| Kegiatan 2 : Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah | | | | | | | | 2,330,295, 483 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | ľ | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|----------------|----------------|--|--------------|---------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | larget lanunan | Jan | | | - | |
| | | Tahun | _ | | | | | | e | 1000 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan Satuan | uan Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | _ | instansi Pelaksana |
| | | | | | | | | Tahunan na (Rp.) | naan | |
| | Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda | 1 Dokumen | ien | | | | | | | |
| | Optimalisasi Kegiatan untuk Pelaporan Akuntansi Setda | 1 Dokumen | ien | | | | | | | |
| | Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Setda | 1 Dokumen | ien | | | | | | | |
| | Pelayanan Perjalanan Dinas | 75 kali | | | | | | | | |
| | Dokumen Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah | 1 Dokumen | ien | | | | | | | |
| | Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda | | 1 Dokume | 1 n Dokumer | 1 Dokumen | 1 1 1 Dokumen Dokumen Dokumen | 1 Dokumen | | | |
| | Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas | | 1 Dokume | 1 n Dokumer | 1 Dokumen | 1 1 1 1 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen | 1 Dokumen | | | |
| Kegiatan 3 : Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta | | | | | | | | 121,279,2 44 | | |
| | Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 dokumen | en | | | | | | | |
| | Pengendalian Persuratan Dinas Setda Kota Yogyakarta | 1 dokumen | e | | | | | | | |
| | Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta | | 1 Dokume | 1 n Dokumer | 1 Dokumen | 1 1 1 1 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen | 1 Dokumen | | | |
| PROGRAM 3 :Program PELAYANAN KEDIN | PROGRAM 3 : Program PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, DAN KEPROTOKOLAN PEMERINTAH DAERAH | FAF AHU, DA | N KEPROTOK | OLAN PEME | RINTAH DAE | ERAH | | | Sekr | Sekretariat |
| Kegiatan 1 : Pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah | | | | | | | | 1,441,615, 629 | Daerah | rah |
| | Frekuensi Pemanduan Walikota dan Wakil Walikota di luar jam kerja | 300 kali | | i 1.104 kali | 1.104 kali | = | 1.104 kali | | | |
| | Medical check up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga | 8 Orang | 8 Orang | 8 Orang | 8 Orang | 8 Orang | 8 Orang | | | |
| Kegiatan 2 : Penyelenggaraan upacara | resears) perer intagri addresss dan stadustrin | BN 167 | | | 000 | 100 Nai | 100 Pg | 7,022,034, | | |
| Yogyakarta | Frekuensi Latihan korps musik | 20 kali | 17 kali | 20 kali | 20 kali | 20 kali | 20 kali | | | |
| ; | Frekuensi Apel dan upacara | 13 kali | | 13 kali | 13 kali | 13 kali | 13 kali | | | |
| | Frekuensi Penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta | 180 kali | | 180 kali | 180 kali | 180 kali | 180 kali | | | |
| | Frekuensi Kegiatan seremoniai Pemerintah Kota Yogyakarta Jumlah naskah sambutan | 45 kalı 560 | 40 kalı | 40 kalı | 40 kalı | 40 kalı | 40 kalı | | | |
| | | naskah | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli | Frakııansi Koordinasi Sakda Asistan Stəf Ahli dan Tanana Ahli | 176 kali | 176 kali | 176 kali | 176 kali | 176 kali | 176 kali | 712,839,5 03 | | |
| | Freknensi Demandian Sekda Asisten dan Staf Ahli | 232 kali | | 240 kali | 240 kali | 240 kali | 240 kali | | | |
| | rrewensi renianudan Sekad, Asisten dan Staf Ahli Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli | 92 kali | | 70 kali | 70 kali | 70 kali | 70 kali | | | |
| INDIKATOR SDG's 16.19.2.(a) Ir PROGRAM 1:Program PENGELOLAAN INFORMASI DAN | 16.19.2.(a) indeks Layanan informasi Publik ORMASI DAN DATA STATISTIK | | | | | | | 20,017,53 | Dina | Dinas Kominfo |
| | | | | | | | | 2,988 | dan | dan Persandian |
| kegiatan 1: Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi | 1. Pameran Sekaten | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Progran 2. Per | | | | | Target Tahunan | nan | | Indikatif | | |
|--|--|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Program 2. Per | | | S | | | | | Alokasi Anggaran | Sumbe | Instansi |
| 2. Per 3.Per | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan Dasar 2017 | ar 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 Tahunan (Rp.) | Penda naan | Pelaksana |
| 3.Pen | 2. Penerbitan Media Pemerintah | 8 kali | 8 kali | | 8 kali | 8 kali | 8 kali | | | |
| | 3.Pengelolaan Website Jogjakota.go.id | 12 bulan | lan 12 bulan | in 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| 4. Per | 4. Pengelolaan KIM | 12 bulan | lan 12 bulan | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| 5. Sos | 5. Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Radio | 1515 kali | kali 1515 kali | ali 1515 kali | 1515 kali | 1515 kali | 1515 kali | | | |
| 6. Sos | 6. Sosialisasi Kebijakan pemkot Melalui Media Televisi | 538 kali | | | | 538 kali | 538 kali | | | |
| 7. 508 | 7. Sosialiasi kebilakan Pemkot Melalui Media Luar Ruang | 425 kali | | | 425 kali | 425 kali | 425 kali | | | |
| 8 | Sosialisti kahijakan Pemkot Malalui Pertunra | 3 kali | | | 3 kali | 3 kali | 3 kali | | | |
| 400.6 | o. Josianiasi kebijakan reminot interania 9.Dokumentasi kegiatan pemerintah Kota Yk | | | | 9 | | 9 years | | | |
| | | dokumen | nen dokumen | en dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| Kegiatan 2 : Pengelolaan Informasi dan | | | | | | | | | | |
| Data Statistik 1 Pem | 1 Pembuatan Buku Statistik Kota Yogyakarta | 14 jenis statitik | iis 14 jenis k statitik | s 14 jenis statitik | 14 jenis statitik | 14 jenis statitik | 14 jenis statitik | | | |
| PROGRAM 2 :Program PENINGKATAN KOMUNIKASI PUBLIK | KASI PUBLIK | | | | | | | 6,202,897, | | Dinas Kominfo |
| Kegiatan 1 : Kehumasan dan Pelavanan | | | | | | | | ł | | |
| | 1. Pengkajian Berita | 1 tahun | ın 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | | | |
| 2. Des | 2. Deseminasi Perda/Perwal | 2 kali | | | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| 3. Des | 3. Deseminasi LPPD akhir tahun | 2 kali | | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| 4. Sos | 4. Sosialiasi APBD | 2 kali | | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| 5. Sos | 5. Sosialiasi Hasil Audit BPK | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| 6. Sos | 6. Sosialiasi melalui ILM | 2 kali | | | 2 kali | 2 kali | 2 kali | | | |
| 7. Ker | 7. Kerjama Penulisan | 100 kali | <u>=</u> | | 100 kali | 100 kali | 100 kali | | | |
| 8 Adv | 8 Advertorial | 1 kali | | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| 9. Uci | 9. Ucapan Selamat | 17 kali | | | 17 kali | 17 kali | 17 kali | | | |
| 10. Ju | 10. Jumpa Pers Wartawan | 55 kali | | | 55 kali | 55 kali | 55 kali | | | |
| | 11. Peliputan Wartawan | 44 kali | i 44 kali | 44 kali | 44 kali | 44 kali | 44 kali | | | |
| an Z : Pengelolaan Kelunan dan | | | | | | | | | | |
| Aduan 1. Per | 1. Pengelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) | 12 bulan | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| Z. Pel | 2. Pengelolaan PPID | 12 bulan | | | | 12 bulan | 12 bullan | | | |
| 3. Dia | 3. Dialog Interaktif Walikota Menyapa | 432 kalı | = | | 432 kali | 432 kalı | 432 kalı | | | |
| 4. De | 4. Deseminasi PPID | 6 kali | | | | 6 kalı | 6 kalı | | | |
| 5. Per | 5. Pengelolaan Call Center | 12 bulan | lan 12 bulan | ın 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| OGRAM 3 :Program OPTIMALISASI DAN PEM, | PROGRAM 3 :Program OPTIMALISASI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA | | | | | | | 6,202,897, | | Dinas Kominfo |
| Kegiatan 1 : Pengelolaan Aplikasi | | | | | | | | 101 | 3 | |
| Teknologi Informasi dan Telematika 1. E-G | 1. E-Gov Terkelola | 26 unit | | | 26 unit | 26 unit | 26 unit | | | |
| 2. Apl | Aplikasi Publik Yang terkelola | 24 unit | it 24 unit | 24 unit | 24 unit | 24 unit | 24 unit | | | |
| 3. Per | Perawa- tan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi | 10 | | | | 10 | 10 | | | |
| | | aplikasi | si aplikasi | | | aplikasi | aplikasi | | | |
| 4. Per | 4. Pembangunan dan pengembangan redisain aplikasi | 5 aplikasi | | | | | 5 aplikasi | | | |
| | | | | | | | | | | |
| gan Teknologi Intormasi | 1. Monitoring Jaringan Informasi | 12 kalı | | | 12 kalı | 12 kalı | 12 kalı | | | |
| dan Telematika 2. Per | Perawatan dan Perbaikan Perangkat Keras dan jaringan TI | 3 jenis | s 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | | | |

| | | | | | - | Target Tahunan | <u>_</u> | | Indikatif | | |
|--|--|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------|-------|-----------|
| | | _ | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 1000 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Pelaksana |
| | | • | 107 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | b. Perbaikan dan perawatan Computer Client | ot bul | 10 unit/ 1 bulan b | 10 unit/ bulan | 10 unit/ bulan | 10 unit/ bulan | 10 unit/ bulan | 10 unit/ bulan | | | |
| | c. Perbaikan dan Perawatan Jaringan Internet intranet | 45 kel/ | bulan | 45 kel/bulan | 45 kel/bulan | 45 kel/bulan | 45 kel/bulan | 45 kel/bulan | | | |
| | 3. Pengadaan Belanja Modal Komputer Pendukung E Gov | 4 je | | | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | | | |
| | 4. Pengadaan LCTV 5. Pengadaan hardware Ruang Riset Teknologi | 3 10 | 3 lokasi 3 4 jenis 4 | | 3 lokasi 4 ienis | 3 lokası 4 ienis | 3 lokasi 4 jenis | 3 lokasi 4 jenis | | | |
| | 6. Pengadaan Perangkat Free Hotspot | 20 2 | | | 20 lokasi | 20 lokasi | 20 lokasi | 20 lokasi | | | |
| | 7. Jasa Koneksi Internet | 8 je | | | 8 jenis | 8 jenis | 8 jenis | 8 jenis | | | |
| | 8. Pengadaan Lisensi Pengaman Jaringan | 4 je | | | 4 jenis | 4 jenis | | 4 jenis | | | |
| | 9. Pengadaan Virtual Privat Server 10. Pengembangan jaringan optik Luar kompleks | 37 | 12 bulan 1 37 lokasi 3 | 12 bulan 37 lokasi | 12 bulan 37 lokasi | 12 bulan 37 lokasi | 12 bulan 37 lokasi | 12 bulan 37 lokasi | | | |
| neglatan 3 : Pengeloalaan uan Pengembangan Smart City | 1. Perencanaan Infrastruktur ruang smart city operation center | ₩ 2 | T 7 | 200 | 1 | 1 | debinnes debinnes debinnes debinnes debinnes | 1 | | | |
| | 2. Implementasi dan sosialiasi aplikasi smart city | 45 | 4 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | |
| | | kel | | elurahan | | kelurahan | kelurahan kelurahan | kelurahan | | | |
| | 3. Perangkat lunak aplikasi yang terintegrasikan 4. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi Egovermen | 2 ap | likasi | | | | z aplikasi 46 | z apiikasi 46 | | | |
| | | lde , | aplikasi a | aplikasi | aplikasi | aplikasi | aplikasi | aplikasi | | | |
| | 5 Pelayana Call Center | - 19g | 1 dokumen d | okumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai tujuan | ujuan | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SDG'S | 17.1.1* Persentase peningkatan Pendapatan Asii Daerah | | | | | | | | | | |
| BBOGBAM 1.Brown BELAVANAN BENE | 17.1.1.1.d) Persentase Kontribusi pajak daeran ternadap PAU | | | | | | | | 10 262 05 | | CANGO |
| PROGRAM I:Program PELATAINAN, PEN | PROGRAMI IFFOGRAM PELAYANAN, PENDAPTARAN, DAN PENELAPAN PAJAN DAENAH | | | | | | | | 3,377 | | FRAD |
| Kegiatan 1 : Pelayanan Pajak Daerah | OF THE STATE OF THE PROPERTY O | 700 | ר אסואס טער | אסיאס סער אסיאס סער | Joido Ob C | Joido Obc | אייאי טור אייאי טור אייאי טור | Joido Obc | | | |
| | Jiini Oilisasi Data Obyen rajan rabit z deligali bri i ib | paj paj | | pajak | 240 objen pajak | 240 objen pajak | 240 objek pajak | 240 objek pajak | | | |
| | Pemeliharaan Obyek PBB-P2 Hasil Penilaian Individu | 12 jed | 12 objek 1 | ¥ | 12 objek | 12 objek | 12 objek | 12 objek | | | |
| | Pemeliharaan Data SISMIOP dan Data SIG PBB-P2 | 30. | ě | * | 300 objek | 300 objek | 300 objek 300 objek | 300 objek | | | |
| | Pemeliharaan Data SIMPADA | 20 S | ٩ | ٩ | 500 waiib | 500 waiib | 500 waiib | pajar 500 wajib | | | |
| | | paj | | | pajak | pajak | pajak | pajak | | | |
| | Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan Pelaporan Pajak Hotel dan Pajak | 100 | ajip | dij | 100 wajib | 100 wajib | 100 wajib | 100 wajib | | | |
| Kegiatan 2 : Pendaftaran dan Pendataan | Restoran secara Online | baj | pajak p | | pajak | pajak | pajak | pajak | | | |
| Pajak Daerah | Pemantauan SPTPD yang dikirim | 22. | 22.000 2 SPTPD S | 22.000 SPTPD | 22.000 SPTPD | 22.000 SPTPD | 22.000 SPTPD | 22.000 SPTPD | | | |
| | Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan WP | 09 | | | 60 WP | 60 WP | 60 WP | 60 WP | | | |
| Kegiatan 3 : Penetapan Pajak Daerah | Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah baru | 200 | | | 500 WP | 500 WP | 500 WP | 500 WP | | | |
| | WP BPHTB yang diteliti | 200 | 0 | O00 WP | 2000 WP | 2000 WP 2000 WP 2000 WP | 2000 WP 2000 WP | 2000 WP | | | |
| | WP Hotel yang diperiksa secara lengkap | 14(| 140 WP | 40 WP | 140 WP | 140 WP | 140 WP | 140 WP | | | |

| | | | | | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|--|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------|-------|-----------|
| | | i | | | | | | | Sumbe | |
| | Program / Kogistan / Outnut Kogistan | Tahun | | | | | | Anggaran | ٢ | Instansi |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Pelaksana |
| | | i | | | | | | Tahunan r | naan | |
| | WP Hotel vang diperiksa secara sederhana | 25 WP | 25 WP | 25 WP | 25 WP | 25 WP | 25 WP | (idu) | | |
| | WP Restoran vang dineriksa secara lengkan | 110 WP | 110 WP | 110 WP | 110 WP | 110 WP | 110 WP | | | |
| | WP Restoran vang diperiksa secara sederhana | 30 WP | 30 WP | 30 WP | 30 WP | 30 WP | 30 WP | | | |
| | WP Hiburan yang diperiksa secara lengkap | 20 WP | 20 WP | 20 WP | 20 WP | 20 WP | 20 WP | | | |
| | WP Hiburan yang diperiksa secara sederhana | 20 WP | 20 WP | 20 WP | 20 WP | 20 WP | 20 WP | | | |
| | WP Parkir yang diperiksa secara lengkap | 20 WP | 20 WP | 20 WP | 20 WP | 20 WP | 20 WP | | | |
| | WP Parkir vang diperiksa secara sederhana | 20 WP | 20 WP | 20 WP | 20 WP | 20 WP | 20 WP | | | |
| | WP vang dilakukan nenilalan individu | 12 WP | 12 WP | 12 WP | 12 WP | 12 WP | 12 WP | | | |
| | WP vang dilakukan pendataan & penilaian massal (Kec. Ngampilan) | 4000 WP | 4000 WP | 4000 WP | 4000 WP | 4000 WP | 4000 WP | | | |
| | Denvisor Sirat Ketetanan Daiak Daerah | 002 6 | 9 500 | 9 500 | 0 500 | 9 500 | 9 500 | | | |
| | | Surat | Surat | Surat | Surat | Surat | Surat | | | |
| | | Ketetana | Ketetana | Ketetana | Ketetana | Ketetana | Ketetana | | | |
| | | _ | 2 | 2 | ٥ | n c | ا دردنالم | | | |
| | Penyampaian SPPT PBB-P2 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | | | |
| | | SPPT PBB- P2 | - SPPT PBB-P2 | SPPT PBB-P2 | SPPT PBB-P2 | SPPT PBB-P2 | SPPT PBB-P2 | | | |
| PROGRAM 2 : Program PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN | J PENAGIHAN PAJAK DAEBAH | | | | | | | 19.355.82 | 88 | BPKAD |
| | | | | | | | | 9,423 | 5 | 2 |
| Kegiatan 1 : Pengelolaan Penagihan, | | | | | | | | | | |
| Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah | Tunggakan pajak daerah yang ditagih | 500 WP | 500 WP | 500 WP | 500 WP | 500 WP | 500 WP | | | |
| | Buku kendali wajib pajak yang dilaporkan | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | | | |
| | | laporan | laporan | laporan | laporan | laporan | laporan | | | |
| | Surat Teguran Pajak Daerah yang dikirim ke WP | 3000 WP | 3000 WP | 3000 WP | 3000 WP | 3000 WP | 3000 WP | | | |
| | Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah | 600 WP | 600 WP | 600 WP | 600 WP | 600 WP | 600 WP | | | |
| | SPPT PBB-P2 yang ditagih | 7500 WP | 7500 WP | 7500 WP | 7500 WP | 7500 WP | 7500 WP | | | |
| | WP yang mendapat pembinaan | 750 WP | 750 WP | 750 WP | 750 WP | 750 WP | 750 WP | | | |
| | WP yang mendapat kompensasi /Pengembalian kepada WP Hotel dan WP Restoran | 425 WP | 425 WP | 425 WP | 425 WP | 425 WP | 425 WP | | | |
| | WP yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada WP PBB-P2 BCB dan | 325 WP | 325 WP | 325 WP | 325 WP | 325 WP | 325 WP | | | |
| | BWB | | | | | | | | | |
| | WP daerah yang mendapat penghargaan | 30 WP | | | 30 WP | | 30 WP | | | |
| | WP yang mendapat penyuluhan | 3250 WP | 3250 WP | 3250 WP | 3250 WP | 3250 WP | 3250 WP | | | |
| Kegiatan 2 : Pembukuan dan Pelaporan Paiak Daerah | Waiib paiak PBB yang teryerifikasi | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | | | |
| | | waiih | dijew | dijew | diiew | waiih | waiih | | | |
| | | wajib pajak | wajib pajak | pajak | pajak | pajak | pajak | | | |
| | Wajib pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Reklame yang terverifikasi | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| | | wajib | wajib | wajib | wajib | wajib | wajib | | | |
| | | pajak | pajak | pajak | pajak | pajak | pajak | | | |
| | Laporan realisasi penerimaan pajak daerah | 24 | | | 24 | 24 delimen | 24 | | | |
| | To control of the con | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| | relaan resutusi pajak daeran | dokumen | | 12 12 dokumen dokumen | dokumen | 12 12 12 dokumen dokumen | dokumen | | | |
| | Janoran jaminan hongkar reklame | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | | dokumen | | dokumen | dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen | dokumen | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | ľ | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | | larget lanunan | au | | | - | |
| | | Tahun | _ | | | | | | sumpe, | 1000 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | æ | Pelaksana |
| | | 707 | | | | | | Tahunan n (Rp.) | naan | |
| | Laporan realisasi tunggakan pajak daerah | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | | | |
| | Perforasi karcis, tiket, bill dll | 27.000 | | | | | 27.000 | | | |
| | Pengoperasian komputer POS PBB | 62 Kompute | | | | 62 Kompute | 62 Kompute | | | |
| | Laporan rekonsiliasi PPJ dan PBB | Ar 24 dokumen | Ar 24 n dokumen | Ar 24 dokumen | Ar 24 dokumen | Ar Ar Ar Ar Ar 24 24 24 24 24 dokumen dokumen dokumen | Ar 24 dokumen | | | |
| INDIKATOR SDG's | 17.5.1. Persentase peningkatan nilai investasi | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Kegiatan 1: pelaksanaan koordinasi dan nanan nanalitan banafirin lanaran | INAMAN MODAL DAN PERIZINAN | | | | | | | 1,114,983, | Pe Pi | Dinas Penanaman Modal dan |
| | pengecekan permohonan izin oleh tim penelitian lapangan dan pengendalian perbinan | 400 izin | 400 izin | 400 izin | 400 izin | 400 izin | 400 izin | | Pe | Perizinan |
| | 2. penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di Dinas PMP | 2798 izin | n 2798 izin | 2798 izin | 2798 izin | 2798 izin | 2798 izin | | | |
| | 3. analisa gambar situasi di dinas PM dan perizinan | 950 GS | | 900 GS | 900 GS | 900 GS | 900 GS | | | |
| | 4. analisa struktur bangunan gedung | 129 IMB | | 129 IMB | 129 IMB | 129 IMB | 129 IMB | | | |
| | 5. pengolahan berkas permohonan IMB | 1.300 berkas | 1.300 berkas | 1.300 berkas | 1.300 berkas | 1.300 berkas | 1.300 berkas | | | |
| | 6. klinik pelayanan perizinan | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | | | |
| | | berkas | berkas | berkas | berkas | berkas | berkas | | | |
| | 7. koordinasi pengesahan gambar dan uraian pertelaan rumah susun 8. koordinasi pangamatan dan panditian dakuman partelaan | 10 dok | 10 dok | 10 dok | 10 dok | 10 dok | 10 dok | | | |
| Kegiatan 2 : pelaksanaan operasional | o. Noordinasi parteennaan dan pertanaan dokumen pertenaan | | 5 | 200 | | | | 233,814,3 | | |
| | 1. pelayanan pemohon izin | 8000 | | | | | | | | |
| | | pemohon | | | | | pemohon | | | |
| | 2. Pelaksanaan pencermatan berkas pendaftaran izin | 8000 berkas | 8000 berkas | 8000 berkas | 8000 berkas | 8000 berkas | 8000 berkas | | | |
| | 3. pelaksanaan Pencermatan Permohonan Advice Planing | 500 berkas | 500 berkas | 500 berkas | 500 berkas | 500 berkas | 500 berkas | | | |
| | 4. laporan hasil pengendalian administrasi perizinan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | | | |
| | 5. pelaksanaan pencermatan permohonan SKKTR | | | 200 herkas | 200 berkas | 200 herkas | 200 berkas | | | |
| | 6. pelaksanaan koordinasi izin PM | | 50 izin | 50 izin | 50 izin | 50 izin | 50 izin | | | |
| Kegiatan 3 : pelaksanaan Penerbitan perizinan | | | | | | | | 443,419,0 23 | | |
| | 1. pelaksanaan pencermatan berkas permohonan izin | 8000 | | | | | | | | |
| | 2. laporan hasil tindak lanjut dan pengendalian pasca penerbitan izin | pemonon 12 kali | _ | | | | pemonon 12 kali | | | |
| | | laporan | | | laporan | laporan | laporan | | | |
| | penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak | 8 kel izin | א א מ | 8 kel izin | 8 kel izin | 8 kel izin | 8 kel izin | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | F | F 4- 1 | | | A second | | |
|--|--|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---|---|---------------|------------|---------|-------------------------|
| | | | I | | 5 | Sec raining | | | | 4 | |
| | | - | Tahun | | | | | | | sumpe , | 100 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Pelaksana |
| | | • | 7107 | | | | | | Tahunan | naan | |
| Charles and the charles and the charles are the charles and the charles are the charles and the charles are th | TANK TOTAL MACHINE MANAGEMENT AND TOTAL MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE PROP | | | | | | | | (wb.) | | |
| FROGRAM 2 .P. OBLAIN PENGAWASAN DA | IN PENANGANAN PENGADOAN PENANANAN WOODAL DAN PENLINAN | | | | | | | | | י כ | Spin |
| Kegiatan 1 : pengawasan perizinan Kota | | | | | | | | | 193,634,8 | 2 2 | Penanaman Madal dari |
| yogyakarta | | | | | | | | | TO. | ≥ 1 | lodal dan |
| | 1. pelaksanaan pengawasan izin yang diterbitkan Dinas PM dan Perizinan | 120 | 00 izin 1 | 500 izin 1 | .500 izin | 1500 izin | 1200 izin 1500 izin 1500 izin 1500 izin 1500 izin 1500 izin | 1500 izin | | ď | Perizinan |
| | 2. Analisa dan tindak lanjut hasil pengawasan izin | Η - | - | | | | | | | | |
| | | g | kumen d | okumen | okumen | dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen | dokumen | | | |
| | 3. Evaluasi Pelaksanaan Perizinan di Kota Yogyakarta | - − ₹ | 7 | | | 1 | 1 Johnson | 1 | | | |
| | | 000 | n Hallin | okullell . | OKUIIEII | dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen | dokumen | | | |
| | 4. Proses permononan sertifikat laik tungsi (SLF) | 35 | 35 S | 50 permoho | 50 permoho | odomona. | 50 permoho | 50 permobo | | | |
| | | nar | | | | | | nan | | | |
| Kegiatan 2 : pengelolaan pengaduan | | | | | | | | | 106,193,3 | | |
| Periting in Note you you wante | 1. pelayanan pengaduan perizinan | 09 | ٠. | | | -Bued 09 | | ho. | ţ | | |
| | | adı | aduan a | adnan | adnan | | adnan | adnan | | | |
| | 2. analisa permasalahan pengaduan perizinan | +1 6 | 1 dokumen d |) ykumen | 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | 1 Jokumen | 1 dokumen | | | |
| | 3. nengerekan lokasi nengadilan | 2 | | 30 neng- | 30 neng- | 30 neng- | 30 neng- 30 neng- 30 neng- | 30 neng- | | | |
| | o. pengecenan longs pengadaga | ag 9 | | | | aduan | aduan | aduan | | | |
| | 4. evaluasi permasalahan perizinan | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | | | kumen d | okumen o | lokumen | dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen | dokumen | | | |
| PROGRAM 3 :Program PENGUATAN REGL | PROGRAM 3 :Program PENGUATAN REGULASI DAN PENGEMBANGAN KINERJA LAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN | | | | | | | | | ۵ | Dinas |
| Kegiatan 1 : pengkajian dan sosialisasi neraturan nerizinan | | | | | | | | | 1,019,258, | ∡ ≥ | Penanaman Modal dan |
| | acuirized acaeyelen pachidih aczustanea aciica t | | | | | c | | | 1 | 2 0 | Dorizinan |
| | 1. Najian peraturan unitang parayanan pentiman | n = | y y | dokumen dokumen | | dokumen dokumen | | dokimen | | | 1181117112 |
| | | 5 | 1 N | kajian | | kajian | | kajian | | | |
| | 2. draft rancangan peraturan daerah/beraturan walikota/keputusan kepala | 4 dok | | | | | | 4 dok | | | |
| | dinas | draft | | | | | | draft | | | |
| | | | 0.0 | peraturan p | peraturan | peraturan peraturan peraturan peraturan | | peraturan | | | |
| | 3. sosialisasi peraturan perizinan melalui : | | | | | | | | | | |
| | - dialog interaktif melalui radio | 3× | siaran 3 | x siaran | xsiaran | 3 x siaran | 3 x siaran 3 x siaran 3 x siaran 3 x siaran | 3 x siaran | | | |
| | - sosialisasi/dialog dengan kecamatan dan kelurahan | 2x | | | | | | | | | |
| | | per | pertemua | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | | | |
| | - Iklan Layanan Masyarakat | 2 p | 2 paket | | | | | | | | |
| | - penyederhanaan perizinan IMB dan izin gangguan | 2 iz | 2 izin | | | | | | | | |
| | - penyelenggaraan izin IMB dan HO di Kec. Sesuai dengan ketentuan | 7 k | 7 keca- | | | | | | | | |
| | | ma | | | | | | | | | |
| *perubahan di tahun 2018 | - sosialisasi/dialog tatap muka | X E | 2x perte- 2 muan n | , | , | | 2x perte- muan | | | | |
| | - pembinaan teknis perizinan di Kecamatan | 7 | | 7 | 7 | | 7 | | | | |
| | | kec | amata k | ecamata | ecamata | kecamata kecamata kecamata kecamata | secamata s | | | | |
| | | _ | L | _ | _ | _ | _ | | | | |

| | | | | | Target Tahunan | an | | | | |
|--|--|------------------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------------|
| | | | 5 | | | | | Angearan | sumpe - | Instanci |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan Sai | Satuan Dasar | ar 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Pelaksana |
| | | | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | - percepatan pelayanan perizinan SIUP dan TDP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| | | kecan n | nata kecam n | kecamata kecamata kecamata kecamata n n n n | n kecamata n | kecamata n | | | | |
| Kegiatan 2 : pengukuran kinerja | | | | | | | | 0 112 0 | | |
| pelayanan | | | | | | | | 467,511,8 81 | | |
| | 1. pengukuran kinerja melalui : | | | | | | | | | |
| | - survey IKM | 0009 | esp 6000 r | 5000 resp 6000 resp 6000 resp 6000 resp 6000 resp | 6000 resp | 6000 resp | 6000 resp | | | |
| | - pelaksanaan evaluasi pelayanan penanaman modal dan perizinan Kota | 12 | | | 12 | 12 | 12 | | | |
| | Yogyakarta | laporan | _ | laporan | laporan | laporan | laporan | | | |
| 2. pemantapan pelem | L. pemantapan pelembagaan ISO pada Dinas PINIP Kota Yogyakarta LENAMANAN M.C.A. | 1 dok | 1 dok | | 1 dok | 1 dok | T dok | | - | |
| PROGRAM 4 :Program PENGEMBANGAN | A PENANAMIAN MODAL | | | | | | | | 2 | Dinas |
| Kegiatan 1: pengelolaan data dan | | | | | | | | 1,240,506, | ă 2 | Penanaman Model den |
| 2 | - pemeliharaan : | | | | | | | 071 | 2 6 | Perizinan |
| | - aplikasi SIM PM dan Perizinan, SPIPISE, SIPO, Simjaki | 4 aplikasi | | 4 aplikasi 4 aplikasi | | | 4 aplikasi | | | |
| | | | | SIM | SIM | SIM | SIM | | | |
| | - sub domain Dinas PM dan Perizinan | 1 sub | | | 1 sub | 1 sub | 1 sub | | | |
| | The Control Lordina of the Control o | domain | | | domain | domain | domain | | | |
| | - pengembangan SIMI PMI dan Perizinan, SPIPISE, SIPO, SIMJAKI | I unit | | | | 1 unit | 1 unit | | | |
| | - penyediaan hardware | 2 macam | _ | _ | | 2 macam | 2 macam | | | |
| | a. printer dot matrik | 4 unit | | | 4 unit | 4 unit | 4 unit | | | |
| | b. monitor | 10 unit | | | 10 nuit | 10 nuit | 10 unit | | | |
| | - berkas arsip perizinan terkelola dengan baik | 31 jenis | is 31 jenis | | 31 jenis | 31 jenis | 31 jenis | | | |
| | | izin | | | izin | izin | izin | | | |
| | - ahli media (scan & entri) dokumen gambar pada berkas IMB | 19.482 Jember | 2 19.482 r lembar | 19.482 lembar | 19.482 lember | 19.482 Jembar | 19.482 Jembar | | | |
| | - penvusutan arsip perizinan sesuai prosedur | 7500 | | | 7500 | 7500 | 7500 | | | |
| | | berkas | | _ | berkas | berkas | berkas | | | |
| | - duplikat dan legalisir proses izin sesuai prosedur | 220 | | 220 | | 220 | 220 | | | |
| | | pemohon | hon pemohon | on pemohon | pemohon | pemohon | pemohon | | | |
| Kegiatan 2 : Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman | | | | | | | | 1,367,367, 928 | | |
| Modal | identifikasi potensi PM | 1 dok | | | 1 dok | 1 dok | 1 dok | | | |
| | bahan Promosi | 1 jenis | | | 1 jenis | 1 jenis | 1 jenis | | | |
| | pelayanan informasi PM | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | | | |
| | updating Informasi Perkembangan Investasi | | 18 | | 18 | 18 | 18 | | | |
| | | | update | update | update | update | update | | | |
| Kegiatan 3 : pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PM | | | | | | | | 377,479,5 56 | | |
| | pengendalian pelaksanaan PM | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | | | |
| | monev kegiatan PM | 1 dok | | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | | | |
| | sosialisasi dan forum komunikasi di bidang PM | 2 kali | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | | | |
| INDIKATOR SDG's | 17.14.1. Indeks pelaksanaan pembangunan | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | ELAKSANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | • | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------------|---------------------|--|---|--|---------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.) | Sumbe r Penda naan | Instansi Pelaksana |
| Kegiatan 1 : Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda | | | | | | | | | 266,398,1 53 | | Sekretariat Daerah |
| | Renstra Setda | 4 b | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Review Renstra Setda | | | L Jokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 1 dokumen doku | 1 dokumen | | | |
| | RUP Setda | 1 | laporan 1 | Llaporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan | 1 laporan | | | |
| | SOP PEP | 2 dg | 2 dokumen | | | | | | | | |
| | Petunjuk teknis | н _В | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | LKIP Setda | | () | L Jokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Laporan koordinasi penataan sanitasi | | (-) | Llaporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan 1 laporan 1 laporan | 1 laporan | | | |
| | Kenja Setda | | | L Jokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Perjanjian kinerja Setda | + 6 | kumen | L Jokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Pengukuran kinerja Setda | 1 9 | 1 dokumen | L | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | KAK perangkat daerah | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| Kegiatan 2 : Pengendalian Administrasi | | | | | | | | | | | |
| dan Pelaksanaan Kegiatan | Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi | 1 | poran | Llaporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan | 1 laporan | | | |
| | Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan | 12 lap | oran | 12 laporan | 12 laporan | 12 Iaporan | 12 Iaporan | 12 laporan | | | |
| | Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | 4 | _ | | 4 laporan triwulana | | 4 laporan triwulana | | | | |
| | Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan | 20 | oran | aporan | 1 laporan | 1 laporan 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | | | |
| | Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi | 1 | _ | 1 laboran | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan 1 laporan | 1 laporan | | | |
| | Laporan pengendalian kontrak kritis | · ਜ | | | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan 1 laporan 1 laporan | | | | |
| | Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi | 1 | | | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan 1 laporan | 1 laporan | | | |
| | Laporan peta pembangunan berbasis digital | 12 | 12 bulan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan 1 laporan 1 laporan | 1 laporan | | | |
| Kegiatan 3 : Penyusunan Pedoman Dongondalian Kegiatan | raporari esapose irasii penerjaari noristronsi | 4 | | iapolari apolari | a de la composition de la comp | 1 | 1 200 | T I I I I | 1,223,714, | | |
| | Pedoman pelaksanaan kegiatan APBD | 1 do | 1 dokumen c | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya Buku Saku Pelaksanaan Kegiatan | | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan 1 laporan | 1 laporan 1 laporan 1 laporan | 1 laporan | | | |
| | Buku Daftar Registrasi | • | | | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | | | | |
| | Laporan Evaluasi AHS | 1 | 1 laporan | Llaporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan 1 laporan 1 laporan | 1 laporan | | | |
| | Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan | 1 | | 1 1 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

| Program's Registant/Output Registant Program's Registant Program's Registant Program's Registant Setupo Data Setupo Data Dat | | | | | Targ | Target Tahunan | | | Indikatif | | |
|--|---|--|----------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|-------|------------|
| Program / Nogleban / Dougout Registan Satural Dougout Registan / Dougout Registan Re | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 100 |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 4nggaran 5 | Penda | Pelaksana |
| Sook Name Liboran | | | 7107 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | PROGRAM 2 - Program PEI AVANAN PEN | Sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan | 1 laporar | 1 laporan 1 | laporan 1 | aporan 1 | aporan 1 | aporan | | | pkrotariat |
| Liborary Programming Liborary Pendinipides Methodist Peletal M | Kegiatan 1: Pengelolaan Sistem Aplika | ופרוני (שימיות שימיות ש | | | | | | - | 1,047,925, | , | aerah |
| Lapocra Habboran Laboran Lab | reigadaan barang/sasa | Laporan Pengendalian Pelaksanaan aplikasi SPSE | 1 Laporar | | | | | , | à | | |
| Laporan Liporan Intension Intension Intension Liporan Lipora | | Laporan Pendampingan SIRUP | 1 Laporar | 1 laporan | | | | | | | |
| Laporan Hasil Surveillance Bedding/Helpdesk 11 Laporan Laporan Hasil Surveillance Bedding Pletped | | Laporan Pendampingan Institusi | 1 Laporar | 1 laporan | | | | | | | |
| Laporan Nerifikati Berles SD | | Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk | 1 Laporai | 1 laporan | | | | | | | |
| Laboran Verifieds Berkeis Laboran Petithian Berkeis Laboran Petithian Berkeis Laboran Petithian Berkeis Laboran Petithian Berkeis Laboran | | Laporan Hasil Surveilance ISO | 1 Laporai | | | | | | | | |
| Applicasi SPSE yang terkendal Imporant pelathian apilkasi pengadaan banag/jasa Peserta Iaporant Iaporan | | Laporan Verifikasi Berkas | 1 Laporai | - | | | | | | | |
| Applications Pergada | | Laporan pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa | 120 Peserta | | | | | | | | |
| Percentification Percentific | | Aplikasi SPSE yang terkendali | | 1 laporan | | | | | | | |
| Berkas Penyelia Barang/Jasa yang gerverifitasi Baparan Bapar | | Implementasi Surveilance ISO | | 1 laporan 1 | laporan 1 | aporan 1 | aporan 1 | aporan | | | |
| Operasional Pengadaan Peletihah Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan 1 Laporan | | Berkas Penyedia Barang/Jasa yang terverifikasi | | | laporan 1 | aporan 1 | aporan 1 | aporan | | | |
| Operazional Pengadaan Pengembangan Aplikasi Stefan IAplikasi IAplican Iaporan | | Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa | | 1 Laporan 1 | Laporan 1 | -aporan 1 | Laporan 1 | -aporan | | | |
| Monitoring Pelaksanaan Apilkasi SPSE Laporan Pendampingan Bidding Laporan Pendampingan RPP dan RUP Laporan Pendampingan RPP dan RUP Kajian Kebijakan pengadaan barang/jasa Paket konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Laporan pengembangan UP percontohan Laporan pengembangan ULP pengadaan barang/jasa Sosialisasi perwal pengadaan barang/jasa Sosialisasi penganaan Ratalog Daenh Pengwusunan SOP Pengadaan Pengwusunan SOP Pengadaan Pengkanaan Khaliga Pengadaan Pengwusunan SOP Pengadaan Pengwusunan SOP Pengadaan Pengkanaan khalisa Survey Penyusunan SOP Pengadaan Pengambangan ULP Pencontohan Pengambangan ULP Pencontohan Pengambangan ULP Pencontohan Pengambangan ULP Pencontohan Pengambangan ULP Pengadaan Pengambangan ULP Pencontohan Pengambangan ULP Pengadaan Peng | | Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan | | 1 Aplikasi 1 | Aplikasi 1 | Aplikasi 1 | Aplikasi 1 | Aplikasi | | | |
| Operational Pengadaan Laporan Pendampingan RPP dan RUP A8 SKPD/Laporan Laporan Ilaporan Ila | | Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE | | • | laporan 1 | aporan 1 | aporan 1 | aporan | | | |
| Laporan Pendampingan RPP dan RUP Laporan Pendampingan RPP dan RUP Laporan Pendampingan RPP dan RUP Kajian Kebijakan pengadaan barang/jasa Paket konsoidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Laporan pengembangan ULP percontohan Laporan Katalog Daerah Laporan Liaporan Liaporan Liaporan Liaporan Liaporan Liaporan Liaporan Pengusunan Kherig Pengadaan Penyusunan Kherig Pengadaan Penyusunan Kherig Pengadaan Penyusunan SOP Pengadaan Penyusunan SOP Pengadaan Penyusunan SOP Pengadaan Penyusunan Kherig Pengadaan Penyusunan SOP Pengadaan Penyusunan SOP Pelaksanaan Pengadaan Brig/Jasa Liaporan Liaporan Liaporan Liaporan Liaporan Liaporan Liaporan Liaporan Laporan Pengamaan lelang Calain | | Laporan Pendampingan Bidding | | | laporan 1 | aporan 1 | aporan 1 | | | | |
| 48 SKP D/ Unit Kerja barang/jasa pemerintah 1 perwal 1 perwal 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 kali 2 kali 2 kali an Barang/jasa Pemerintah ang | Kegiatan 2 : Operasional Pengadaan Barang/Jasa | | | | | | | | .,456,917, .48 | | |
| onti kerja a 1 Perwal 1 barang/jasa pemerintah 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali an Barang/jasa Pemerintah | | Laporan Pendampingan RPP dan RUP | 48 SKPD/ | 1 Laporan | | | | | | | |
| 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Doporan 1 Dopo | | I sandamajaman DDD | Unit kerj | | 1 acroacl | 40000 | , acroac | 2000 | | | |
| 1 Dokumen ia 1 Perwal I Japoran I Kali | | Laporan Pendampingan KPP | | | Laporan | -aboran 1 | Laporan | aporan | | | |
| barang/jasa pemerintah 1 laporan 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali an Barang/jasa Pemerintah 2 kali an Barang/jasa Pemerintah 1 | | Kajian Kebijakan pengadaan barang/jasa | 1 Dokumer | _ | | | | | | | |
| t barang/jasa pemerintah 1 laporan 1 kali 1 kali 2 kali an Barang/jasa Pemerintah 2 kali 2 kali an Barang/jasa Pemerintah 1 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 4 kali 4 kali 4 kali 5 kali | | Peraturan walikota pengadaan barang/jasa | 1 Perwal | | | | | | | | |
| talporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 kali 2 Kali 2 kali 2 sadaan Brg/Jasa Pemerintah ang | | Paket konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah | 1 laporar | | | | | | | | |
| 1 Japoran 1 Laporan 1 Laporan 1 Kali 1 Kali 2 Kali 2 Ali 3 Adaan Barang/Jasa Pemerintah 3 Adaan Brg/Jasa | | Laporan pengembangan ULP percontohan | 1 laporar | | | | | | | | |
| I Japoran 1 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali san Barang/Jasa Pemerintah 2 dali 2 adaan Brg/Jasa | | Laporan analisa Survey | 1 laporar | | | | | | | | |
| sdia/POKJA/PPK 1 Kali 1 Kali 2 Kali ian Barang/jasa Pemerintah sadaan Brg/Jasa ang | | Laporan penyusunan SOP pengadaan | 1 laporar | | | | | | | | |
| 1 Kali 2 Kali lan Barang/jasa Pemerintah 3 adaan Brg/Jasa ang | | FGD evaluasi pelaksanaan lelang dg penyedia/POKJA/PPK | 1 Kali | | | | | | | | |
| 2 Kali ian Barang/jasa Pemerintah jadaan Brg/jasa | | FGD kebijakan pengadaan barang/jasa | 1 Kali | | | | | | | | |
| | | sosialisasi perwal pengadaan barang/jasa | 2 Kali | | | | | | | | |
| | | Laporan Pelaksanaan Katalog Daeran | | 1 Laporan 1 | Laporan 1 | aporan 1 | Laporan 1 | -aporan | | | |
| 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan naan lelâng 1 dokumen | | Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah | | 1 Laporan 1 | Laporan 1 | -aporan 1 | Laporan 1 | -aporan | | | |
| 1 Laporan naan Pengadaan Brg/Jasa 1 anaan lelang 1 dokumen | | Pengembangan ULP Percontohan | | | | | | | | | |
| 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 dokumen | | Pelaksanaan Kinerja Pengadaan | | | Laporan 1 | -aporan 1 | Laporan 1 | -aporan | | | |
| 1 Laporan I Laporan Iaksanaan lelang 1 dokumen | | Penyusunan Analisa Survey | | 1 Laporan 1 | Laporan 1 | -aporan 1 | Laporan 1 | -aporan | | | |
| iksanaan Pengadaan Brg/Jasa 1 Saksanaan lelang dokumen | | Penyusunan SOP Pengadaan | | | | | | | | | |
| elaksanaan lelang | | Penyusunan SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Brg/Jasa | | | Laporan 1 | -aporan 1 | Laporan 1 | -aporan | | | |
| | | Evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan lelang | | dokumen o | 1 okumen de | 1 kumen d | 1 skirmen de | kıımen | | | |
| dokumen dokumen dokumen | | Evaluaci Pelaksanaan Jelang | | | - | | | | | | |
| | | | | , 0 | okumen de | kumen de | | kumen | | | |

| | | | | | ř | Tomat Tahinan | | | indibatif | | |
|--|---|----------------|---|--------------|---------|---------------|---|--------------|-------------------|-------|-----------|
| | | | | | 5 | ger I allulla | | | I I I I | 1 | |
| | | _ | Tahun | | | | | | Alokası | sumpe | 1000 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | All 8841411 5 | Penda | Pelaksana |
| | | | | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| Kegiatan 3 : Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan | | | | | | | | | 1,384,870, | | |
| Barang/Jasa | Laporan penyelesaian permasaslahan pengadaan | 11 | 1 Laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan | aporan 1 | laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | | | |
| , | Laporan pelaksanaan klinik pengadaan barang/jasa | 11 | 1 laporan | | | | | | | | |
| | Laporan Pengelolaan resiko pengadaan | 11 | 1 laporan | | | | | | | | |
| | Laporan pembekalan PPKom,PA,Pejabat Pengadaan PPHP | 2 4 | 2 Kali | | | | | | | | |
| | Bimtek peningkatan kompetensi POKJA | 11 | 1 Laporan | | | | | | | | |
| | Kebijakan katalog lokal | 11 | 1 Laporan | | | | | | | | |
| | Kontrak payung dengan penilik barang/jasa lokal | 17 | 1 laporan | | | | | | | | |
| | Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa | | = | aporan 1 | laporan | 1 laporan | 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan | 1 laporan | | | |
| | Laporan Manajemen Resiko Pengadaan | | 1 | aporan 1 | laporan | 1 laporan | llaporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan | 1 laporan | | | |
| | Laporan Peningkatan Kapasitan SDM Pengadaan | | 11 | aporan 1 | laporan | 1 laporan | 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan | 1 laporan | | | |
| | Laporan Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang/jasa | | 1 0 | 1 kumen D | okumen | 1 Jokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | |
| | Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang/jasa | | - | 1 | | _ | 1 1 1 1 | 1 | | | |
| | | | DC | kumen D | okumen | Jokumen | Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen | Dokumen | | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan | | | 2 | laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | | | |
| INDIKATOR SDG's | 17.14.1. Indeks pelaksanaan pembangunan | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Program PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG EKONOMI | AN PENGENDALIAN BIDANG EKONOMI | | | | | | | | | | Bappeda |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, | | | | | | | | | 2,412,465, 064 | | |
| Perdagangan, Pertanian dan Pangan | Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral | ч. | | | | | | | | | |
| | | ОВ | dokumen | | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral | 1 9 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Pendampingan Penvusunan Renia Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral | - | | | | | | | | | |
| | | , 9 | dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral | 1 g | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral | H 7 | 1 | | | | | | | | |
| | Varifilati Dangandalian dan Erahani Dangtan CVDD Caktoral | 3 + | Validin | | | | | | | | |
| | VETIIIKASI PENBENDAHAN DAN EVANDASI REDSITA SAPU SEKUDA | - 8 - | ı dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral | 1 do | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral | 1 b | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renia SKPD Sektoral Triwulan | 4 | | | | | | | | | |
| | VI,II,II dan IV | op | dokumen | | | | | | | | |
| | Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan | | 1 8 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Tahun 2019 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pansan | | 4 5 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Sektor Perindustrian, Perdagangan, | | - 8 | | | | | | | | |
| | Pertanian & Pangan | | 8 | dokumen | | | | | | | |

| | | | | | Таг | Target Tahunan | £ | | Indikatif | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------|--------|----------------|-------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------------------|
| | | | _ Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | 2017 | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | | H D | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Tirukulan I, III dan IV OPD Sektor Perindustrian, Renjaanaan Pertanian dan Panaan | | 4 9 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional | | 1 p | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Perencanaan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | | | | okumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | | | () | okumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | | | () | okumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, | | | | | | | | | 497,873,7 67 | | |
| Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral | п 5 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral | ਜਰ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral | ő H Ö | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral | п ў | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral | п ў | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral | H 70 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral | й н ў | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral | пŏ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV | t p | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Perencanaan Pariwisata Berbasis Budaya | чĕ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Ketenagakerjaan | чĕ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Dokumen Review Renstra Pariwisata, Koperasi UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 4 5 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | 'Dokumen Renja Tahun n + 1 OPD Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transminrasi | | - 7 | 1 dokimen | | | | | | | |
| | Donnerson, Den Tananan Tahun n OPD Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | 9 17 19 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hacil Ranet a Dariwicata, Konorasi HKM, Tenana Koria dan Transmierasi | | ₩ 7 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | المالية | | | | | | | | | | |

| | | | | | Tar | Target Tahunan | ٦ | | Indikatif | | |
|--|--|---------|---------------------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi Anggaran | Sumbe | Instansi |
| | Program, Neglatan, Output Neglatan | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 Tahunan | Penda naan | Pelaksana |
| | | | | | | | | | <u>\$</u> | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Rebijakan Kerija, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV sektor Pariwisata, Koperasi | | дŏ | 1 dokumen | | | | | | | |
| | UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Kampung Wisata | | Н. | 1 laporan | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Ekonomi Kreatif | | - | 1 laporan | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pelatihan Bersertifikasi | | | 1 laporan | | | | | | | |
| | Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan | | | Η. | | | | | | | |
| | Transmigrasi | | | Ď, | okumen c | okumen | dokumen dokumen dokumen | dokumen | | | |
| | Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub | | | Η. | | | | | | | |
| | bid Pariwisata, Koperasi UKMi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | ธ์ | okumen c | okumen | dokumen dokumen dokumen | dokumen | | | |
| | Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Keria dan Transmigrasi | | | H Å | , skumen g | okumen c | 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| Kegiatan 3 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah | | | | | | | | | 627,468,7 10 | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral | ਜ : | | | | | | | | | |
| | | op | dokumen | | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral | t ģ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral | 1 db | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral | 1 do | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral | 1 do | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral | t do | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral | H 2 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV | 4 b | dokumen | | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Perencanaan Penguatan Ekonomi Kerakyatan | 1 g | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Dokumen Review Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah | | ਜ ਚੱ | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Tahun n + 1 OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah | | чĄ | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Perubahan Tahun n OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah | | ਜ ਚੱ | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuanaan Daerah | | ⊣ ŏ | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, III, III dan IV OPD Sektor Ekonomi dan | | п | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Keuangan Daerah | | | | | | | | | | |
| | Analisa Fiskal Daerah | 11 | 1 laporan 1 laporan | laporan | | | | | | | |
| | najian rotensi mvestasi ui nota Tugyanai ta | | - ŏ | dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | Ta | Target Tahunan | L | | | | |
|---|--|--------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|------------------|-------|-----------------------|
| | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 100 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | Penda | Instansi Pelaksana |
| | | ì | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Laporan Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah | 1 lapora | 1 laporan 1 laporan | | | | | | | |
| | Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Daerah | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Ekonomi Daerah | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| PROGRAM 2 :Program PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG FISIK | AN PENGENDALIAN BIDANG FISIK | | | | | | | 2,7700 | | Bappeda |
| kegiatan 1 : kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo | | | | | | | | 400,554,2 10 | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral | 1 dokumen | _ | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral | 1 dokumen | _ | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral | 1 dokumen | _ | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral | 1 dokumen | c | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral | 1 dokumen | _ | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral | 1 dokumen | c | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral | 1 dokumen | _ | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral | 1 dokumen | _ | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV | 4 dokumen | _ | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Perencanaan Transportasi dan Jalan | 1 dokumen | _ | | | | | | | |
| | Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Perhubungan | 1 dokumen | - | | | | | | | |
| | Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perhubungan dan Kominic | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Laporan Strategis Perhubungan | | 1 laporan | | | | | | | |
| | Laporan Strategis Kominfo | | 1 laporan | | | | | | | |

| | | | ı | | Ē | Target Tahunan | = | | Indikatif | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------|---------|----------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokası Anggaran | sumpe r | Instansi |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 Tahunan (Rp.) | | Pelaksana |
| | Laporan Koordinasi Pokja Smartcity | 1 | 1 laporan 1 laporan | laporan | | | | | | | |
| | Dokumen Perencanaan Sektor Perhubungan dan Kominfo | | | | lokumen | 1 dokumen | dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perhubungan dan Kominfo | | | | lokumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid perhubungan dan kominfo | | | | dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan | | | | | | | | | 1,628,220, 636 | | |
| Permukiman | Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral | чŏ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral | п | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral | чĕ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral | п | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral | ηŏ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral | г 5 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral | чĕ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral | чĕ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV | 4 Q | 4 dokumen | | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Perencanan Sarpras Permukiman | ਜ ਰੱ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Dasar permukiman | чŏ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Kajian Kelayakan Rumah Susun (Rusun) | чĕ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Laporan Pengendalian Strategis Perkotaan | чŏ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Dokumen Pendampingan Review Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | | 4 5 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | | 4 2 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | | 4 5 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | | 4 5 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pekerjaan Umum | | 4 2 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | dan Permukiman | | | | | | | | | | |

| | | | | | Target Tahunan | nuan | | Indikatif | | |
|--|--|---|----------------|------------|----------------|---|--------------|-------------------|-------|-----------|
| | | | | | 200 | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program / Kegiatan / Outnut Kegiatan | Satuan | Tahun Dasar | | | | | Anggaran | | Instansi |
| | | | | 2018 2019 | 9 2020 | 2021 | 2022 | 2 1 | Penda | Pelaksana |
| | | | | | | | | (Rp.) | | |
| | Laporan Koordinasi Strategis Sektor PU | | 1 laporan | oran | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Strategis Sektor Permukiman | | 1 laporan | oran | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Sanitasi | | 1 laporan | | | | | | | |
| | luran Sekber Kartamantul | | 1 kali | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | | | |
| | Dokumen Perencanaan Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | | | H 7 | 1 | deliminate deliminate deliminate deliminate | 1 | | | |
| | Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pekeriaan Umum dan Permukiman | | | dokur 1 | ien dokum 1 | n dokumen 1 | dokumen 1 | | | |
| | | | | dokun | en dokum | dokumen dokumen dokumen | dokumen | | | |
| | Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub | | | ⊣ | 7 | 1 | 1 | | | |
| | bid Pekerjaan Umum dan Permukiman | | | dokun | ien dokum | dokumen dokumen dokumen | dokumen | | | |
| Kegiatan 3 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang. Pertanahan | | | | | | | | 2,767,686, 476 | | |
| dan Lingkungan Hidup | Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral | + ₹ | 1 | | | | | | | |
| | Pendampingan Penvisinan Renia Tahun 2018 SKPD Sektoral | - 20 | | | | | | | | |
| | rendanipnigan renjyasanan wenja tahan kota swi U sewolal | , | dokumen | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral | 11 gg | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral | 4 5 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral | 1 do | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral | 4 g | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral | t dol | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral | + £ | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I II III dan IV | 4 5 | 4 dokumen | | | | | | | |
| | Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah | 1 T | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang | t do | 1 dokumen | | | | | | | |
| | luran Sekber Kartamantul | 1 gg | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Laporan Penataan Kawasan Sungai | 1 do | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Penataan Sanitasi | 1 lob | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup | 1 dol | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Laporan Pengendalian Evaluasi Tata Ruang | 1 dol | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Laporan Pengendalian Evaluasi Lingkungan | 11 B | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | I | | Tang | Target Tahunan | _ | | Indikatif | | |
|--|--|--------|---------------------|--------------|----------|----------------|--|--------------|-----------------|-------|-----------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | Instansi |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 Tobings | Penda | Pelaksana |
| | | | | | | | | | (Rp.) | E 8 | |
| | Penyusunan dokumen KLHS RPJMD | 1 d | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Sungai | H 70 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Busan Trushinakwas | . 4 | 1 laporan 1 laporan | laporan | | | | | | | |
| | ndang (Turbinianwas) Dokumen Review Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan | | - | | | | | | | | |
| | Lingkungan Hidup | | | dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Linekungan Hidub | | - | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkingan Hiding | | , | 1 dokumen | | | | | | | |
| | dan Emgrangan mody Dokumon Vovifikari Dangandalian dan Evaluari Dolakesanan Benefita dan | | , , | | | | | | | | |
| | Dokumen verrikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan kenstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | | 7 0 | ı dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan | | | 1 | | | | | | | |
| | herija, dan nashi nenja mwaani, ii, iii dan iy Or D Sentor nata naang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | | , | | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Strategis Pertanahan | | | 1 laporan | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Strategis Tata Ruang | | | 1 laporan | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Strategis Lingkungan Hidup | | - | 1 laporan | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Ecodistrict | | 7 | 1 laporan | | | | | | | |
| | Laporan Pengendalian Evaluasi Strategis Lingkungan | | - | 1 laporan | | | | | | | |
| | Kajian Perhitungan Karbon Footprint Kota Yogyakarta | | T 0 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Lanoran Koordinasi Monitorina Alih Funasi Lahan | | | 1 lanoran | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Tata Ruang Kawasan Strategis | | | 1 laporan | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim | | - | 1 laporan | | | | | | | |
| | Dokumen Perencanaan Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | | | пō | okumen o | lokumen | 1 1 advision of the second sec | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan | | | 11 | | | | | | | |
| | Lingkungan nidup | | | ā | okumen c | lokumen | aokumen aokumen aokumen aokumen | nokumen | | | |
| | Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Tata ruang. Pertanahan dan Lingkungan Hidup | | | ΗŌ | okumen o | lokumen | 1 dokumen dokumen dokumen dokumen | I dokumen | | | |
| PROGRAM 3 : Program PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG SOSIAL | AN PENGENDALIAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | Bappeda |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan | | | | | | | | | 404,178,1 38 | | |
| Kebudayaan | Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral | ₩ 7 | 1 | | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral | 3 4 | D Kallie | | | | | | | | |
| | | ō | dokumen | | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral | H 0 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral | H 5 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral | 4 6 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | Targ | Target Tahunan | | | Indikatif | | |
|--|---|----------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------|-------------------|------------|-----------------------|
| | | | 1 | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | r Penda | Instansi Pelaksana |
| | | | 707/ | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral | η ŏ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral | п | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral | п ў | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV | 4 g | 4 dokumen | | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Sektor Pendidikan | 1 | 1 laporan 1 laporan | laporan | | | | | | | |
| | Dokumen Review Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | | чō | okumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | | ਜਰ | uo mindo | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | | ō H ō | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudavaan | | H 0 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan | | ; , , | | | | | | | | |
| | Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pendidikan dan | | ō | dokumen | | | | | | | |
| | kebudayaan Laboran Koordinasi Sektor Kebudayaan | | 1 | 1 laboran | | | | | | | |
| | Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub | | | | - | | | | | | |
| | bid Pendidikan dan Kebudayaan | | | ф | okumen d | okumen | dokumen | dokumen | | | |
| | Dokumen Perencanaan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | | | H 5 | 1 kumen d | okumen | 1 1 1 1 1 dokumen dokumen | 1 Jokumen | | | |
| | Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | | | िल रे | 1 Tourney | domina | 1 1 1 1 dokuman dokuman dokuman | 1 | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat | | | | 3 | | | | | 3,232,069, 684 | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral | н <u>б</u> | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral | н о | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral | H 7 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral | ਜ ਹੋ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral | ਜਰ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral | त्न र | 1 | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral | 5 Η δ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral | Ε | | | | | | | | | |
| | | ŏ | dokumen | | | | | | | | |

| | | | | Tar | Target Tahunan | _ | | Indikatif | | |
|--|--|--------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|-------|--|
| | | i H | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | | 9506 | 0,00 | 0000 | 100 | ,,,,, | Anggaran | - 5 | Instansi |
| | | 2017 | | 5013 | 2020 | 707 | 7707 | Tahunan (Rp.) | naan | a de la composition della comp |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV | 4 dokumen | | | | | | | | |
| | Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) | 1 dokumen | <u>_</u> | | | | | | | |
| | Evaluasi pelaksanaan pendampingan pilot project Rapor Keluarga dan Segoro Amarto | 1 dokumen | _ | | | | | | | |
| | Renstra Kemiskinan Tahun 2017-2021 | 1 dokumen | c | | | | | | | |
| | Laporan Kota Sehat | 1 dokumen | c | | | | | | | |
| | Laporan Kota Inklusi | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Pengendalian Evaluasi Kesejahteraan Rakyat | 1 dokumen | c | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Sektor Kesehatan | 1 lapora | 1 laporan 1 laporan | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Sektor Sosial | 1 laporan | n 1 laporan | | | | | | | |
| | Laporan Kampung Taqwa Mrican | 1 laporan | u | | | | | | | |
| | Dokumen Review Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | | 1 | | | | | | | |
| | | | dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan | | 1 | | | | | | | |
| | Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | | dokumen | | | | | | | |
| | Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) | | 1 laporan | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Implementasi Segoro Amarto | | 1 laporan | | | | | | | |
| | Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Perencanaan Sektor Kesejahteraan Rakyat | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Kesejahteraan Rakyat | | | 1 1 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 | | | |
| | Dokumen perencanaan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Resejahteraan Rakyat | | | dokumen | dokumen | dokumen dokumen dokumen | dokumen | | | |
| Kegiatan 3 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur | | | | | | | | 288,624,7 97 | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral | | , | | | | | | | |
| | Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral | dokumen | = 9 | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral | 1 dokumen | : c | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | 1 | | Ī | Target Tahunan | _ | | | | |
|---|--|--------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | | | Alokasi | Sumbe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 | | Instansi Pelaksana |
| | | | | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral | 1 | | | | | | | | | |
| | | ъ | dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral | 4 5 | okumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral | 4 5 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral | чъ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,II dan IV | 4 D | 4 dokumen | | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Pemerintahan | 4 2 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban | 4 2 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Pengendalian Evaluasi Pemerintahan | 4 2 | | | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | 1 laporan | | | | | | | |
| | Dokumen Review Renstra OPD Sektor Aparatur | | 0 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Aparatur | | ., 0 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Aparatur | | 0 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Aparatur | | 0 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Aparatur | | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Perencanaan Sektor Aparatur | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen c | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Aparatur | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Aparatur | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| PROGRAM 4 :Program PERENCANAAN D | PROGRAM 4 :Program PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | ш | Beppeda |
| Kegiatan 1 : Kegiatan PerencanaanProgram Pembangunan | | | | | | | | | 5,732,865, 903 | | |
| Daerah | Penyusunan Raperda RPJMD 2017-2021 | 4 5 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Dokumen RKPD Tahun 2018 | 4 2 | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017 | чъ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2018 | чъ | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | ř | Target Tahunan | an | | | | |
|--|--------|---------------|--------------|--------------|----------------|--|--------------|------------------|-------|-----------|
| | | Tahun | | | | | | | sumpe | Instansi |
| Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan | Satuan | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Penda | Pelaksana |
| | | Ì | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017 | | 1 dokumen | | | | | | | | |
| Dokumen Renja SKPD | | 1 dokumen | | | | | | | | |
| Dokumen Renstra SKPD | | 1 dokumen | | | | | | | | |
| Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD 2017 - 2021 | | 1 dokumen | | | | | | | | |
| Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2018 | | 1 dokumen | | | | | | | | |
| Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta 2018 | | 1 dokumen | | | | | | | | |
| Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2018 | | 1 dokumen | | | | | | | | |
| Musrenbang RPJMD | | 1 kali | | | | | | | | |
| Dokumen Hasil Forum SKPD | | 1 dokumen | | | | | | | | |
| Dokumen Hasil Forum Gabungan SKPD | | 1 dokumen | | | | | | | | |
| Perencanaan Usulan Dana APBN, DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, Perentaan Usulan Dana Keistimewaan, APBD i/Bantuan Khusus Keuangan dan Raaninan Kananaan | | 1 dokumen | | | | | | | | |
| Dokumen Penyusunan Pedoman RPJMD Kelurahan Kota Yogyakarta 2017 - 2021 | | 1 dokumen | | | | | | | | |
| Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD | | 1 dokumen | | | | | | | | |
| Dokumen Analisis "Money FollowProgram" dalam RPJMD 2017-2022 | | | 1 dokumen | | | | | | | |
| Dokumen Analisis Tindak Lanjut Perencanaan Teknokratis | | | 1 dokumen | | | | | | | |
| Dokumen SDG's Kota Yogyakarta | | | 1 dokumen | | | | | | | |
| Dokumen Review RPJMD 2017-2022 | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| Dokumen RKPD Tahun (n+1) | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| Dokumen RKPD Perubahan Tahun (n) | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun (n+1) | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 dokumen | | | |
| Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun N | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| Dokumen Renja OPD | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| Dokumen Review Renstra OP D | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | Tar | Target Tahunan | _ | | Indikatif | | |
|---|--|-----------|----------------|--------------|----------|--|--------------|--------------|-------------------|-------|-----------|
| | | Ĭ, | hun | | | | | | Alokasi | Sumbe | 1 |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan Sat | Satuan Di | Dasar 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Allggalall 5 | Penda | Pelaksana |
| | | • | ì | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| | Dokumen Review Indikator Kinerja Utama OPD 2017 - 2022 | | 4 b | 1 kumen d | skumen | 1 1 1 1 1 dokumen doku | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Laporan Hasil Pendampingan RPJMD Kelurahan | | 4 8 | 1 kumen d | ckumen | okumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Yogyakarta N+1 | | 11 do | 1 kumen d | ckumen | 1 1 1 dokumen dokumen dokumen | 1 Jokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta N+1 | | 4 b | 1 kumen d | okumen | okumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun N+1 | | 4 g | 1 kumen d | Skumen | okumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Hasil Forum OPD | | 4 g | 1 kumen d | ckumen | okumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Hasil Forum Gabungan OPD | | 4 g | 1 kumen d | ckumen | okumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana APBN, DAK, dan Dekon dan Tugas Pembantuan | | 4 8 | 1 kumen d | ckumen | 1 1 1 1 1 dokumen doku | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan, APBD I/Bantuan | | П | н. | • | | _ | П | | | |
| | Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan Buku Dedoman Musankang BKBD M.1 | | 용 - | kumen d | okumen | lokumen | dokumen | dokumen | | | |
| | BUKU PEUDINAH WUSI EMBANG NAPU N+1 | | - 6 | ı kumen d | . uamnyc | ı ı ı ı ı dokumen dokumen dokumen | ı dokumen | ı dokumen | | | |
| | Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD | | 4 b | 1 kumen d | ckumen | 1 1 1 1 dokumen dokume | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Dokumen perencanaan teknokratis, top down-bottom up sub bid Perencanaan | | | 4 5 | okumen | 1 1 1 dokumen dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan | | | | | | | | | 3,058,928, 678 | | |
| Daerah | Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil RPJPD | dok | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Evaluasi Kebijakan RPJMD | 1 dok | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Evaluasi Pelaksanaan RPJMD | dok | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD | 1 dok | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Evaluasi Kebijakan RKPD | 1 dok | nmen | | | | | | | | |
| | Evaluasi Pelaksanaan RKPD | 1 dok | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV | 4 dok | 4 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD | 1 dok | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD | 1 dok | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD | 1 dok | 1 dokumen | | | | | | | | |

| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | | | | | Targ | Target Tahunan | | | Indikatif | | |
|--|---|---|-----------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-------|-----------|
| Nontroing dan Evaluasi Rebijakan Pelakamaan Ren Jakup Baruan Kegataan Kedalakan Pelakamaan Ren Jakup Baruan Kedalakan Pelakamaan dan Hasil Ren Jakup Baruan Kedalakan Pelakamaan Kedalakan Pelaka | | | Ta | hun | | | | | | Alokasi | Sumbe | istopo |
| Verificas Pergendalian dan Evaluasi Kebijatan Renja SKPD dokumen Verificas Pergendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Montoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan IJIII dan IV dokumen Montoring dan Evaluasi Papa Repo Triwulan IJIII dan IV dokumen Sinkroniasi Peregendalian Pembarganan Sinkroniasi Peregendalian Pembarganan Kota Yogyakarta Tahun 2016 Dokumen Evaluasi Pergendalian Pembarganan Kota Yogyakarta Tahun 2016 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RRPD Triwulan IJIIII dan IV Dokumen Verifikasi Pengendalian Pembarganan Kota Yogyakarta Tahun 2016 Dokumen Verifikasi Pengendalian Penganganan Dokumen Verifikasi Pengendalian Penganganan Kepatan Peraksanaan dan Hasil Renja Berlaksanaan Kepatan Berlaksanaan dan Hasil Renja Berlaksanaan Kepatan Berlaksanaan dan Hasil Renja Berlaksanaan Kepatan Berlaksanaan dan Kepatan Berlaksanaan dan Ingoran I goran I Ingoran I Ingoran I Ingoran Informasi Peregengan dan Kegitan Pembarguan Apat Perubahan Informasi Peregenbargan Dan Relaksi Rela | ă | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2 | Penda | Pelaksana |
| Verificas Pergendalian den Evaluasi Rebjakan Renja SKPD Verifikasi Pergendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Verifikasi Pergendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Montoring dan Evaluasi JAPBN, DAV, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Montoring dan Evaluasi JAPBN, DAV, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Montoring dan Evaluasi JAPBN, DAV, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Montoring dan Evaluasi JAPBN, DAV, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sinkroniasi Perencranaan - Penganggaran Sinkroniasi Perencranaan - Penganggaran Dokumen Kapulasi Pengangalian Penbasanaan dan Hasil RRPD Tiwulan JIJJIII dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RRPD Tiwulan JIJJIII dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RRPD Tiwulan JIJJIII dan Dokumen Kapulasi Arbai Maria Pengengalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RRPD Tiwulan JIJJIII dan Dokumen Verifikasi Pengengalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Rentra SkOD Dokumen Verifikasi Pengengalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Rentra SkOD Dokumen Verifikasi Pengengalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Rentra SkOD Dokumen Verifikasi Pengengalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Laporan Montoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegidan Bersumber dan Pusat Laporan Montoring dan Evaluasi Pendalasi Maria Bersumber dan Pusat Laporan Montoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegidan Pendanguan Daerah Laporan Montoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegidan Pendanguan Daerah Laporan Montoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegidan Internal Laporan Montoring dan Kegidan Pembanguan APBD Muni Dokumen evaluasi Leknokatis, bop down-bottom up sub bid Pengendalian dan Kegidan Pembanguan APBD Muni Dokumen evaluasi Leknokatis, bop down-bottom up sub bid Pengendalian Laporan Montoring dan Kegidan Pembanguan APBD Muni Dokumen Pelaksanaan dan Kegidan Pembanguan APBD Muni Tahun 2018 Dokumen Pelak | | | 1 | ì | | | | | | Tahunan (Rp.) | naan | |
| Verificas Pergendalan dan Evaluasi Peaksanaan Renja SKPD dokumen Montoring dan Evaluasi APBN, DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dokumen dokumen dokumen Sinkronissis Derencanaan - Penganggaraan dan Bantuan Keuangan dokumen dokumen dokumen dokumen Sinkronissis Pergendalian Pembangunan Koria Yogyakarta Tahun 2016 dokumen | | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD | 1 doku | nem | | | | | | | | |
| Verifiese Pengendalian dan Evaluasi Assi Renja SKPD Triwulan I JI III dan IV dokumen Montroring dan Evaluasi APBN, Dak', Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dokumen dokumen dokumen sinkronisasi Perencenaan - Penganggaran dan Bantuan Ketangan 1 dokumen Sinkronisasi Perencenaan - Penganggaran Bantuan Ketangan 1 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen berantasi Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016 1 dokumen Dokumen Penganggaran Regitar Stop | | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD | 1 dokt | nmen | | | | | | | | |
| Monitoring dan Evaluasi APBN, DAX, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dokumen Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan, dan Bantuan Keuangan dokumen Sinkronisasi Perencanaan - Penganggaran Sinkronisasi Perencanaan - Penganggaran Keta Yogyakarta Tahun 2016 dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016 dokumen Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016 dokumen Dokumen Peraluasi Pengandalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016 dokumen Odkumen dokumen dokumen Odkumen dokumen dokumen Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Triwulan I,I,III dan Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Triwulan I,I,III dan Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Triwulan I,I,III dan Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Triwulan I,I,III dan Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Triwulan I,I,III dan Dokumen Odkumen dokumen dokumen dokumen Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Regitan Bersumber dari Pusat Diporan I Iaporan I | | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV | 4 dokt | neur | | | | | | | | |
| Okumen Silvcoriasa Perencanaan - Penganggaran dokumen dokumen dokumen Dokumen Kata Daerah Hasil RPID Trivusan Kodinasi Perencanaan - Penganggaran dokumen Ababangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016 1 1 | | Monitoring dan Evaluasi APBN, DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan | 1 dok | ımen | | | | | | | | |
| Sinkronisasi Perencanaan - Penganggaran Sinkronisasi Perencanaan - Penganggaran Sinkronisasi Percencanaan - Penganggaran Sokumen Laporan Koodinasi Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016 Dokumen Evaluasi Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016 Dokumen Evaluasi Rebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Trikwulan IJIJII dan Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Hasil RKPD Trikwulan IJIJII dan Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja SKPD Trikwulan IJIJIII dan IV Laporan Monitoring dan Foulasi Program Regiatan Bersumber dari DV Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Regiatan Bersumber dari DV Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Profritas Pembangunan Daerah Laporan Insporan Ilaporan Ilaporan Ilaporan Ilaporan Ilaporan Ilaporan Ilaporan Ilaporan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Profritas Pembangunan APBD Mumi Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Mumi Tahun 2018 Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Mumi Tahun 2018 Dokumen Pengembangan Data dan Informasi Dokumen Pengembangan Data dan Informasi Dokumen Dokumen Informasi Program Ilaporan Il | | Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan, dan Bantuan Keuangan Gubernur | 1 dok | men | | | | | | | | |
| Sinkronisasi Prioritaa Pusat Daerah Laporan Koodinasi Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016 Laporan Koodinasi Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016 Dokumen Evaluasi Rebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Trwulan I,II,III dan Dokumen Evaluasi Rebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Trwulan I,III,III dan Dokumen Perifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renstra SKPD Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Benstra SKPD Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Benstra SKPD Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Benstra SKPD Hasil Rensi SKPD Trwulan I,III,III dan IV Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Registan Bersumber dari Pusat Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Registan Bersumber dari Pusat Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kinerja Pembangunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kajaran Internal Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kajara Pembangunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kajara Pembangunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Laporan Laporan I Japoran I Japoran I Japoran I Japoran I Japoran Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Laporan Laporan Laporan Laporan I Japoran I Japor | | · <u>S</u> | 1 dokt | neur | | | | | | | | |
| Dokumen Evaluasi Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016 1 Dokumen Evaluasi Penjakanaan dan Hasil RRPD Triwulan I,II,III dan Dokumen Gokumen Hasil RRPD Triwulan I,II,III dan IV Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Rebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RRPD Triwulan I,II,III dan IV Benstra SKPD Triwulan I,III dan IV Benstra SKPD Triwulan I,III dan IV Benstra SKPD Triwulan I,IIII dan IV Benstra SKPD Triwulan I,III dan IV Benstra SKPD Triwulan I I dan III dokumen I I dokumen I I dokumen I I laporan I I lapor | | Sinkronisasi Prioritas Pusat Daerah | 1 dokt | nem | | | | | | | | |
| Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPMD Dokumen Peraluasi Rebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RPMD Triwulan [JI]III dan Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Arbo Triwulan [JI]III dan N. W. Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Arbo Triwulan [JI]III dan Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Repisatan Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Rebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Repisatan Bersumber dari Pusat Laporan Monitoring dan Evaluasi Pogram Kegiatan Bersumber dari Pusat Laporan Monitoring dan Evaluasi Pogram Kegiatan Bersumber dari DIY Laporan Monitoring dan Evaluasi Pogram Kegiatan Bersumber dari DIY Laporan Monitoring dan Evaluasi Pogram Kegiatan Perupangunan Daerah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengen Megiatan Internal Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengen Pengendalian Internal Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengen Pengendalian Internal Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Internal Laporan Laporan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Internal Laporan Japoran Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Internal Laporan | | Laporan Koodinasi Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016 | 1 doku | nem | | | | | | | | |
| Dokumen Verifikasi Pergendalian dan Evaluasi Rebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Okumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Okumen Okumen dokumen laporan Ilaporan Ilap | | Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD | | 2 dok | 2 umen do | 2 kumen du | 2 okumen d | okumen d | okumen | | | |
| Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil dokumen kegiatan Bersumber dari DIY laporan daporan pengendalian Kinerja Pembangunan Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan kajian Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Internal laporan lapor | | Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV | | 9 dok | 9 quant | 6 kumen de | e b uemnyc | okumen d | okumen | | | |
| Pecularian dokumen dok | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil | | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | - | | | |
| Hasil Renja SKPD Triwulan I, Jili Idan IV Laporan Monitoring dan EvaluasiProgram Kegiatan Bersumber dari Diy Laporan Monitoring dan EvaluasiProgram Regiatan Bersumber dari Diy Laporan Monitoring dan EvaluasiProgram Prioritas Pembangunan Daerah Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Regiatan Internal Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Program Regiatan Internal Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Program Regiatan Internal Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Monitoring dan Evaluasi Program Program Monitoring dan Evaluasi Program Haporan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Monitoring dan Evaluasi Program Haporan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Jahan Laporan | | Renstra SKPD Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kehiiakan Delaksanaan dan | | do do | umen do | kumen d | okumen c | okumen c | Jokumen | | | |
| Laporan Monitoring dan EvaluasiProgram Kegiatan Bersumber dari Dusat Laporan Nonitoring dan EvaluasiProgram Kegiatan Bersumber dari Duy Laporan Nonitoring dan EvaluasiProgram Kegiatan Bersumber dari Duy Laporan Nonitoring dan EvaluasiProgram Kegiatan Bersumber dari Duy Laporan Nonitoring dan EvaluasiProgram Regiatan Bersumber dari Duy Laporan Nonitoring dan EvaluasiProgram Profritas Pembangunan Daerah Laporan Nonitoring dan Evaluasi Program Regiatan Internal Laporan Nonitoring dan Evaluasi Program Profritas Pembangunan Daerah Laporan Nonitoring dan Evaluasi Program Profritas Pembangunan Regiatan Internal Laporan Nonitoring dan Evaluasi Program Profritas Pembangunan Regiatan Internal Laporan Nonitoring dan Evaluasi Program Profritas Pembangunan Regiatan Internal Laporan Nonitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Laporan Lapora | | Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV | | dok | umen do | kumen di | b namnyc | okumen a | lokumen | | | |
| Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Kestimewaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Kestimewaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pergam Regiatan Bersumber dari DIY Laporan Monitoring dan Evaluasi Pergam Regiatan Perangen Bersumber dari DIY Laporan Monitoring dan Evaluasi Pergam Prioritas Pembangunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pergam Prioritas Pembangunan Daerah Laporan | | Laporan Monitoring dan EvaluasiProgram Kegiatan Bersumber dari Pusat | | 118 | poran 11 | aporan 1 | laporan 1 | | laporan | | | |
| Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Laporan Liaporan Liapo | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan | | 2 - | poran 11 | aporan 1 | laporan 1 | | laporan | | | |
| Laporan Monitoring dan EvaluasiProgram Prioritas Pembangunan Daerah Laporan Ilaporan | | Laporan Monticomig dan Evandasir Ogram Neglatan bersamber dan Dir Laporan Pengendalian Kinerja Pembangunan | | 113 | poran 11. | aporan 1 | laporan 1 | laporan 1 | laporan | | | |
| Laporan Ilaporan Ilap | | Laporan Monitoring dan EvaluasiProgram Prioritas Pembangunan Daerah | | 116 | poran 11 | aporan 1 | laporan 1 | laporan 1 | . Iaporan | | | |
| Evaluasi RPJPD Ookumen evaluasi teknokratis, top down-bottom up sub bid Pengendalian Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 Informasi Program dan Murni | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Internal Kajian Evaluasi Hasil Musrenbang | | 11 12 | poran 11 | aporan 1 | laporan 1 | laporan 1 | . laporan | | | |
| Dokumen evaluasi teknokratis, top down-bottom up sub bid Pengendalian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | Evaluasi RPJPD | | | 4 do | kumen | | | | | | |
| InformasiProgram dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni dokumen 1 dokumen 1 1 dokumen 1 I dokumen 1 I dokumen I I dokumen InformasiProgram dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 1 dokumen 2 2 | | Dokumen evaluasi teknokratis, top down-bottom up sub bid Pengendalian | | | 1 do | 1 kumen dı | 1 okumen d | okumen d | okumen | | | |
| | | | | | | | | | | 3,119,696, 515 | | |
| | | InformasiProgram dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni | 1 dokt | neur | | | | | | | | |
| | | InformasiProgram dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan | 1 dokt | neur | | | | | | | | |
| | | InformasiProgram dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018 | 1 dokt | nem | | | | | | | | |
| dokumen | | Pengembangan Data dan Informasi | 2 doki | neur | | | | | | | | |

| | | | | ř | Target Tahunan | _ | | | | |
|---|--|-----------------|--|----------------------|---|---------------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| | | Tahun | | | | | | | Sumpe | |
| | Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan Satuan | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran 5 Pe Tahunan n (Rp.) | r Penda naan | Instansi Pelaksana |
| | Dokumen Pendataan Jamban Tidak Aman Kota Yogyakarta | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Dokumen Data Kewilayahan | 1 dokumen | u | | | | | | | |
| | Dokumen Data Sektoral | 1 dokum | 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | l Jokumen o | 1 dokumen | | | |
| | Analisa Data | 1 dokum | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 dokumen | 1 dokumen | l Jokumen d | 1 Jokumen | | | |
| | Data Series SIPD | 1 dokum | 1 1 1 1 1 dokumen dokumen dokumen dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | L 1 Jokumen d | 1 dokumen | | | |
| | InformasiProgram dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan dan RencanaProgram dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni I anoran Pemetaan Data Bembangunan Reprasis, GiS | | dokumer 1 lanorar | 1 dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen 1 Janoran 1 | dokumen c | 1 dokumen 1 Japoran | | | |
| PROGRAM 5 :Program PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | PENGEMBANGAN | | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | | Ba | Bappeda |
| Kegiatan 1: Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah | | | | | | | | 2,627,317, 173 | | |
| • | Buku Jurnal Jarlit 2017 | 5 dokumen | G | | | | | | | |
| | Buku Inventarisasi Hasil Penelitian | 80 Buku | | | | | | | | |
| | Anugerah Penelitian | 1 dokumen | ue | | | | | | | |
| | Kajian Keuangan Daerah | 1 dokumen | u. | | | | | | | |
| | Laporan E-jarlit dan E-jurnal | 1 laporan | иe | | | | | | | |
| | Dokumen Penelitian | 5 dokum | 5 5 5 dokumen dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen c | 5 dokumen | | | |
| | Buku Jurnal Jarlit | | 1 jenis buku | 1 jenis buku | 1 jenis buku | 1 jenis 1 buku b | 1 jenis buku | | | |
| | Buku Inventarisasi Hasil Penelitian | 1 jenis buku | | 1 jenis buku | | 1 jenis buku | | | | |
| | Dokumen Penelitian Strategis Tematik | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Laporan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penelitan di OPD | | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Jumal Jarlit Kota Yogyakarta | | 1 dokumer | 1 dokumen dokumen | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan | | | | | | | 7 0 | 4,334,914, 698 | | |
| Isu Strategis | Dokumen Analisa Kebijakan | 1 dokum | 1 4 4 4 4 4 4 4 dokumen dokumen dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | t dokumen c | t dokumen | | | |
| | Kajian Smart City Tahap II | 1 dokumen | u | | | | | | | |
| | Masterplan Transportasi Perkotaan | 1 dokumen | L. | | | | | | | |
| | Kajian Review Pemanfaatan Aset Daerah | | 1 dokumen | _ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Tahun Dasar 2018 2019 2020 2021 | | 2 Isakola | Sumbe |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Rajian Optimalisasi Aset Daerah (Idle Strategis) Rajian Optimalisasi Aset Daerah (Idle Strategis) Dokumen Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Dokumen Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Dokumen Data Kewilayahan Semester I dan II Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida) Anugenah Inovasi dan Penelitian Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi 1.1249 Liap Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan Informasi A. Pengamanan Sinyal Frekwensi 2. Perengamanan Sinyal Frekwensi 3. Pengamanan Sinyal Frekwensi 4. Pengamanan Sinyal Prekwensi 4. Pengamanan Sinyal Prekwensi 5. Laporan Peranatan Peranata | | | , |
| Kajian Optimalisasi Azet Daerah (Idle Strategis) Dokumen Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis Dokumen Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis Dokumen Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis Anugerah Inovasi dan Penelitian Isaboran Perancangan Inovasi Daerah (Sida) Anugerah Inovasi dan Penelitian Isaboran Perancangan Inovasi Daerah Isabanan Perancangan Inovasi Daerah Isabanan Perancangan Inovasi Daerah Isabanan Perancangan Inovasi Daerah Isabanan Perancangan Inovasi Daerah (SiDa) IZ-19.1.(a) Persentasa Perandian Isabanan Perangantan Perangan telepun Isabanan Perangantan dan Perangan telepun Isabanan Perangantan dan Perangan telepun Isabanan Perangan Perangan Inovasi Daerah (SIDa) Isabanan Pengadaan Perangan Inovasi Daerah (SIDa) Isabanan Pengadaan Perangan Inovasi Daerah (SIDa) Isabanan Pengadaan peralatan Sandi Isabanan Pengadaan perangan perangan persandian Isabanan Pengadaan peralatan Sandi Isabanan Pengadaan perangan pengawasan persandian Isabanan Pengadaan perangan pengawasan persandian Isabanan Pengadaan Perangan Pengawasan persandian Isabanan Pengadaan Perangan Pengamasan persandian Isabanan Pengadaan Perangan Pengamasan persandian Isabanan Pengadaan Perangan Pengamasan Pengamanan Pengamanan Pengamasan Pengamasan Pengamanan Pengamanan Pengamasan Pengamasan Pengaman Pengamasan Pengamanan Pengamasan Pengamasan Pengamasan Pengaman Pengamanan Pengamasan Pengamanan Pengamanan Pengamanan Pengaman Pengamanan Pengamanan Pengamanan Pengamanan Pengamanan Pengaman | | _ | r Instansi |
| Kajian Optimalisasi Aset Daerah (Idle Strategis) Dokumen Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis Dokumen Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis Dokumen Data Kewilayahan Semester I dan II Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida) Anugerah Inovasi dan Penelitian Laporan bendampingan Seleksi Lomba Inovasi Daerah Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi Daerah Kajian Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah (SiDa) 17.19.1.(a) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi AYANAN PERSANDIAN 1. Pengamanan Sinyal Frekwensi 3. Perupakan dan Perangkat Telekomunikasi 4. Pengamanan Sinyal Frekwensi 3. Perpaganan Pajak Komunikasi Persandian 4. Pengamanan Penalatan Sandi 4. Laboran forum Komunikasi Persandian 5. Pengadaan Peralatan Sandi 6. Laboran Peralatan Sandi 7. Laboran Peralatan Sandi 7. Laboran Pengawasan pengawasan dan pengendalian komunikasi 7. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online 7. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online 8. Seminar pembinaan pengawasan persandian 7. Seminar pembinaan pengawasan data untuk perencanaan pembangunan 7. Pengadaan peralatan Sandi 7. Pengadaan peralatan Pengawasan data untuk perencanaan pembangunan 7. Seminar pembinaan beralatan Badia autuk perencanaan pembangunan 7. Pengadanan peralapan Pengamanan Pengawasan dan beralatan Sadaten 7. Seminar pembinaan beralatan Badia autuk perencanaan pembangunan 7. Pengadaan peralatan Redia Penerintah 8. Pengadaan peralatan Media Penerintah 8. Pengadaan Peralatan Sadatan 9. Pengadaan Peralatan Redia Penerintah 9. Pengadaan peralatan Redia Benerintah 9. Pengadaan Peralatan Redia | 2019 2020 | 2022 5 | _ |
| Rajian Optimalisasi Aset Daerah (Idle Strategis) Dokumen Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis Dokumen Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis Dokumen Data Kewilayahan Semester I dan II Anugerah Inovasi dan Penelitan Laporan Perdampingan Selekis Lomba Inovasi Daerah Laporan Forum Inovasi Daerah Kajian Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah (SiDa) 17.19.1 (a) Persentasa Perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi AYANAN PERSANDIAN 1. Pengamanan Sinyal Frekwensi 3. Pengamanan Persandan Persandian 4. Pengamanan Persandan Persandian 5. Pengadaan Peralatan Sandi 1. Laoran Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi Gandi Internal Penkot Yogyakarta 2. Laporan Forum Komunikasi Sandi Internal Penkot Yogyakarta 3. Pengadaan Peralatan Sandi 4. Laboran Peryelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi 4. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online 5. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online 7. Seminar pembinaan operasional warnet dan data untuk perencanaan pembangunan 7. Seminar pembinaan data untuk perencanaan pembangunan 7. Seminar beneralatan Sadata 7. Pengadaan peralatan Pengadaan data untuk perencanaan pembangunan 7. Seminar beneralatan Benerintah 8. Pengadaan Peralatan Benerintah 9. Pengadaan Peralatan Benerintah 12. Pameran Sekaten 9. Pengadaan Website Jogjakota gold 12. Pameran Sekaten 13. Pengadaan Website Jogjakota gold 14. Pameran Sekaten 15. Pengadaan Website Jogjakota gold 15. Pengadaan Peralatan Pengadaan Peralatan Benerintah 16. Pameran Sekaten 17. Pengadaan Peralatan Pengadaan Peralatan Pengadaan Peralatan Medala Penerintah 18. Pengadaan Peralatan Pengadaan Perala | | Tahunan I (Rp.) | naan |
| Dokumen Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis Pervusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida) Anugerah Inovasi dan Penelitian Anugerah Inovasi dan Penelitian Anugerah Inovasi Daerah Laporan Perdampingan Seleksi Lomba Inovasi Dokumen Perancangan Inovasi Daerah Laporan Forum Inovasi Daerah Laporan Forum Inovasi Daerah 17.19.1.(a) Persentasa perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi AANANAN PERSANDIAN 1. Pengamanan Sinyal Frekwensi 2. Pemeliharan Peralatan Perangkat Telekomunikasi 3. Perbakan dan Perangkat Perangkat Telekomunikasi 4. Penggantian dan Perangkat Perangkat Telekomunikasi 5. Laporan forum Komunikasi Persandian 1. Laooran forum Komunikasi Persandian 3. Penggadaan Peralatan Sandi 1. Laooran Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi 3. Pengadaan peralatan pengawasan persandian 2. Semiinar pembinaan operasional Warnet dan Game online 3. Pengadaan peralatan pengawasan persandian 2. Semiinar pembinaan operasional warnet dan Game online 3. Pengadaan peralatan pengawasan persandian 4. Laboran Astatristrik 3. Pengadaan peralatan pengawasan persandian 4. Laboran Media Pemerintah 5. Pengadaan peralatan pengawasan dan untuk perencanaan pembangunan 6. Seminar pembinaan Sekaten 7. Pameran Sekaten 8. Pengadaan 8. Pengadaan 9. Pengadaan Persentase pemerintah 1. Pameran Sekaten 1. Labaneran Sekaten 9. Pengadaan peralatan gengawasan dan berangan berangan pengakota golid 1. Pameran Sekaten 1. P | umen | | |
| Dokumen Data Kewilayahan Semester I dan II Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida) Anugerah Inovasi dan Penelitian Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi Daerah (SiDa) 17.19.1.(a) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi AYANAN PERSANDIAN 1. Pengamanan Sinyal Frekwensi 2. Pemeliharaan Peralatan Persandian 3. Perbakan dan Peranatan Perangkat Telekomunikasi 4. Pengamtian dan Peranatan Perangkat Telekomunikasi 4. Pengamanan Sinyal Frekwensi 5. Laporan forum Komunikasi Persandian 6. Laporan forum Komunikasi Persandian 7. Laboran forum Komunikasi Persandian 7. Laporan forum komunikasi Persandian 7. Laporan forum komunikasi Persandian 8. Pengadaan peralatan pengawasan dan pengendalian komunikasi 9. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online 9. Seminar pembinaan Sekaten 9. Penerana S | 1 1 1 dokumen dokumen dok | 1 cumen dokumen | |
| Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida) Anugerah Inovasi dan Penelitian Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi Dokumen novasi Daerah Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi Daerah Laporan Pengamanan Informasi Laporan Pengamanan Informasi Laporan Pengamanan Informasi Laporan Pengamanan Informasi Layanan Persandian Laporan Pengamanan Informasi Layanan Persandian Laporan Pengamanan Sinyal Frekwensi Laporan Persandian Persandian Laporan Pengamanan Sinyal Frekwensi Laning Komunikasi Padi (HT) Laning Komunikasi Sandi Internal Permkot Yogyakarta Laning Komunikasi Sandi Internal Persandian Laning Komunikasi Bandi Laning Kangadan penagawasan dan pengamasan pengamanan Internativa Bandi Laning Kangadan Pengamaning Bandi Laning Kangadan Laning Maning Maning Maning Man | 2 2 2 2 cumen dokumen dol | 2 cumen dokumen | |
| Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida) Anugerah Inovasi dan Penelitian Laporan Perdamapingan Seleksi Lomba Inovasi Dokumen Perancangan Inovasi Daerah Laporan Pendamapingan Seleksi Lomba Inovasi Daerah Laporan Pendamapingan Seleksi Lomba Inovasi Daerah Laporan Perum Inovasi Daerah Kajian Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 1.7.19.1.(a) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi AYANAN PERSANDIAN 1. Pengamanan Sinyal Frekwensi S. Permaliharaan Peralatan Perangkat Telekomunikasi S. Permaliharaan Peralatan Perangkat Telekomunikasi S. Perpakan dan Penataan Jaringan telepun Pembayaran Pajak Komunikasi Persandian J. Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta Pembayaran Pajak Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta S. Laporan forum Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta J. Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta S. Pengadaan Peralatan Sandi J. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online Depeserta S. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online C. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online S. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online S. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online S. Seminar pembinaan baya STATISTIK S. Penerbitan Media Pemerintah S. Penerbi | | 2,546,679, | |
| Anugerah Inovasi dan Penelitian Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi Daerah Laporan Pengamanan Inovasi Daerah Laporan Pengamanan Iniformasi Layawan Persandan Laporan Pengamanan Iniformasi Layawan Persandan Laporan Persandan Persandian Lahawan Persandian Lahawan Persandian Persandian Lahawan Persandian Persandian Lahawan Persandian Penangkat Telekomunikasi Layawan Persandian Bah Penangkat Telekomunikasi Lahawan Penalahan Persandian Lahawan Penalahan Persandian Lahawan Penalahan Bahawan Penangawasan dan pengaman pengaman penalahan pengamasan pengawasan dan pengaman pengamasan pengaman pengamasan pengamasan pengaman laserta Layaman Sekaten Layaman | | | |
| Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi Daerah Laporan Perancangan Inovasi Daerah Laporan Perancangan Inovasi Daerah Kajian Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 17.19.1.(a) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi LAYANAN PERSANDIAN 1. Pengamanan Sinyal Frekwensi 3. Perbaikan dan Peranatan Jaringan Helpun 4. Perpagamtian dan Peranatan Jaringan Helpun 5. Perpagamtian dan Peranatan Jaringan Helpun 6. Permbayaran Pajak Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta 7. Laporan forum Komunikasi Persandian 7. Laporan forum Komunikasi Persandian 7. Laporan Peryelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi 7. Laporan peryelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi 7. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online 8. Pengadaan peralatan Sekaten 7. Pameran Sekaten 8. Kali B. Pengelolaan Website Logjakota gold 8. Laboran Sekaten 9. Peneretitan Media Pemerintah 9. Peneretitah Media Pemerintah 9. Peneretitah Medi | 2 jenis 2 jenis | inis 2 jenis | |
| Laporan Ferancangan Inovasi Daerah Laporan Forum Inovasi Daerah (SiDa) 17.19.1.(a) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi AYANAN PERSANDIAN 1. Pengamanan Sinyal Frekwensi 2. Pemeliharaan Peralatan Perangkat Telekomunikasi 3. Perbakan dan Perawatan Perangkat Telekomunikasi 3. Perbakan dan Perawatan Perangkat Telekomunikasi 4. Pengagantian dan Penakatan Jerigan telepun 5. Pembayaran Pajak Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta 7. Laporan forum Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta 7. Laporan forum Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta 7. Laporan peralatan Sandi 7. Laporan peralatan pengawasan dan pengendalian komunikasi 7. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online 8. Pengadaan barta Statistik 7. Pameran Sekaten 7. Pameran Sekaten 8. Rali 7. Penerbitan Media Pemerintah 8. Rali 7. Penerbitan Media Pemerintah 9. Penerbitan Media Pemerintah 9. Penerbitan Sekaten 1. Penerbitan Media Pemerintah 9. Penerbitan Sekaten 9. Penerbitan Media Pemerintah 9. Penerbitan Media Pemerintah 9. Penerbitan Sekaten 9. Penerbitan Media Pemerintah 9. Penerbitan Media Pemerintah 9. Penerbitan Sekaten 9. Penerbitan Media Pemerintah 9. Pener | ıporan 1 laporan 1 laporan 1 la | poran 1 laporan | |
| Laporan Forum Inovasi Daerah (SIDa) 17.19.1.(a) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi 17.19.1.(a) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi 17.19.1.(a) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi 17.19.1.(a) Perengamanan Sinyal Frekwensi 2. Pemeliharaan Peralatan Jersandian 3. Perbaikan dan Peralatan Jaringan telekomunikasi 4. Penggahan dan Peralatan Jaringan telekomunikasi Persandian 5. Laporan forum Komunikasi Persandian 7. Laporan forum Komunikasi Persandian 7. Pengadaan Peralatan Sandi 7. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online 7. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online 8. Seminar pembinaan pengawasan data untuk perencanaan pembangunan 1. Pameran Sekaten 2. Penerbitan Media Pemerintah 3. Pengelolaan Website Jogjakota go.id 3. Pengelolaan Website Jogjakota go.id 4. Debaran Sekaten 4. Debaran Sekaten 5. Debaran Sekaten 6. Debaran Sekaten 7. Debaran Sekaten 8. Rali 8. Pengelolaan Website Jogjakota go.id 9. Debaran Sekaten 9. Debaran Sekaten 1. | 1 dokumen | 1 cumen dokumen | |
| 1.15 Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi 1.15 Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi 1.15 Pengamanan Sinyal Frekwensi 1.25 Pengamanan Sinyal Frekwensi 1.25 Pengamanan Perangkat Felekomunikasi Perangkat Felekomunikasi Perangkat Felekomunikasi Perangkat Felekomunikasi Perangkat Pengaman Penangkat Pengaman Penangkat Perangkat Pengaman Penangkat Pengaman Penangkat Pengaman Penangkat Perangkat Pengaman Penangkat Perangkat Pengaman Penangkat Perangkat Pengaman Penangkat Pengaman Penangkat Pengaman Penangkat Pengaman Penangkat Pengaman Penangkat Pengaman P | iporan 1 laporan 1 laporan 1 la | poran 1 laporan | |
| LYADNAN PERSANDIAN LAYANAN PERSANDIAN LYADNAN PERSANDIAN 11 bulan 2. Pemeliharaan Persandian 3. Perupakan an Persandian 1. Bet an | men | | |
| Lyengamanan Sinyal Frekwensi 11 bulan 12 bulan 13 bulan 13 bulan 13 bulan 13 bulan 30 unit | | | |
| 1. Pengamana Sinyal Frekwensi 1. Ibulan 1.1 bulan 1.2 b | | 4,901,719, 365 | Dinas Kominfo dan Persandian |
| 1. Pengamanan Sinyal Frekwensi 1. Ibulan 1. Bulan 3. Unit 1. Dulan 1. Bulan 1. Bulan 3. Unit 3. Unit 3. Unit 3. Unit 3. Unit 3. Unit 2. Unit 3. Unit< | | | |
| 2. Pemeliharaan Persandian 30 unit 30 u | 11 bulan 11 bulan | | |
| 3. Per balkan dan Perawatan Penagkat Telekomunikasi 1.2 bulan 1.2 bulan< | 30 unit 30 unit | | |
| 4. Penggantian dan Penataan Jaringan telepun 1 set 2 unit 3 unit 4 unit </td <td>ın 12 bulan 12 bulan</td> <td>_</td> <td></td> | ın 12 bulan 12 bulan | _ | |
| 1 | 1 set 1 set | et 1set | |
| 1 Jaring Komunikasi Persandian 59 JKS 50 JKS | 2 unit 2 unit | nit 2 unit | |
| 2. Laporan forum Kandinkasi Derivation 1 | 20 11/2 | NC 50 IVC | |
| 3. Pengadaan Peralatan Santian 3. Pengadaan Peralatan Santian 3. Pengadaan Peralatan Santian 3. Pengadaan Peralatan Santian 3. Pengadaan Pengadaan Pengawasan dan pengamaganan pengawasan dan pengamaganan pengawasan dan pengamagan pengamagan pengawasan persantian Pengadaan peralatan pengawasan persantian pengawasan pengawasan pengawasan pengamagan pengawasan penga | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| 3. Pengadaan Peralatan Sandi 1. Laooran Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi 1. Laooran Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi 1. Laooran Penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan dan informatika 1. Laooran dokumen do | tumen dokumen dokumen dol | tumen dokumen | |
| 1. Laooran Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | et 1set 1set 1se | et 1 set | |
| 1. Lacoran Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi 1 | | | |
| Sociation Society So | 1 1 dokumen dokumen | 1 Ilmen dokiimen | |
| wasan persandian peserta peserta peserta peserta peserta peserta peserta peserta faatan data untuk perencanaan pembangunan 1 set 2 set 3 s | 50 50 | | |
| was an persandian 1 set | peserta peserta | erta peserta | |
| faatan data untuk perencanaan pembangunan 1 kali 1 | 1 set 1 set | et 1 set | |
| 1 kali sali ali ali ali ali ali ali ali abago.id 12 bulan 13 bulan 14 bulan 15 b | | 20,017,53 | Dinas Kominfo |
| 1. Pameran Sekaten1 kali1 kali1 kali1 kali2. Penerbitan Media Pemerintah8 kali8 kali8 kali8 kali8 kali3. Pengelolaan Website Jogjakota.go.id12 bulan12 bulan12 bulan12 bulan | | 2,988 | dan Persandian |
| T. Frailestand Sexateria 1 radii 1 radii 1 radii 1 radii 1 radiii 1 radii 1 radii 1 radii 1 r | 1001 | :: | |
| 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan | z kali | | |
| | an 12 hulan 12 hulan | ue | |
| 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | | |
| 1515 kali 1515 kali 1515 kali 1515 kali | 1515 kali 1515 kali | | |

| | | | | F | Target Tahunan | an | | Indikatif | | |
|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|----------|--|-----------------------------|-----------------------|
| • | orogram/ Kegiatan/ Output Kegiatan Sa | Tahun Satuan Dasar 2017 | un ar 2018 .7 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alokasi (Anggaran 5 Tahunan (Rp.) | Sumbe r Penda naan | Instansi Pelaksana |
| | 6. Sosialisasi Kebijakan pemkot Melalui Media Televisi | 538 k | 538 kali 538 kali 538 kali 538 kali 538 kali | 538 kali | 538 kali | 538 kali | 538 kali | | | |
| | 7. Sosialiasi kebijakan Pemkot Melalui Media Luar Ruang | 425 kali | | 425 kali 425 kali 425 kali | 425 kali | 425 kali 425 kali | 425 kali | | | |
| | 8. Sosialiasi kebijakan Pemkot Melalui Pertunra | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | | | |
| | 9.Dokumentasi kegiatan pemerintah Kota Yk | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | | dokur | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen | n dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | | | |
| Kegiatan 2 : Pengelolaan Informasi dan | | | | | | | | | | |
| Data Statistik | 1 Pembuatan Buku Statistik Kota Yogyakarta | 14 jer | | 14 jenis 14 | 14 jenis | 14 jenis 14 jenis | 14 jenis | | | |
| | | statitik | statitik | statitik | atitik | statitik | statitik | | | |

Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Sosial

| | | - | Tahun | Tar | Target Tahunan | Indibati | Indibatif Alabasi | | |
|--|--|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|---|
| Nama Program / Kegiatan / Output | egiatan / Output | Satuan D | Dasar 2018 (2017) 2018 | 8 2019 | 2020 2021 | 2022 Anggar | Anggaran (Rp) | Sumber Pendanaan Lokasi | si Lembaga Pelaksana |
| TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN | | | | | | | | | |
| Indikator TPB/ SDGS: | Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun | und | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Pendampingan intensif pemerintan desa dalam tata kelola dana desa | lesa dalam tata Kelola dana desa | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan penguatan ekonomi | Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui unit kegiatan non pelatihan penguatan ekonomi | i unit kegiatan non fisik | | | | 200.000.000,- | | swadaya (hibah, sponsor MAMPU,dII) | Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dll) |
| Kegiatan 2 : Peningkatan jumlah organisasi komunitas dalam fungsi tara kelola sumber air bersih mandiri secara berkelanjutan. (pamsikarta/ pengelola air minum berbasis komunitas) | Pendampingan kelompok-kelompok usaha ekonomi (rumah kreasi yang ada di masyarakat | unit kegiatan non fisik | | | | 200.000.000,- | | swadaya (hibah, sponsor MAMPU,dll) | Mitrawacana .PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dII) |
| Kegiatan 3 : Meningkatkan promosi produksi usaha yang ada di masyarakat, kelompok keluarga (rumah kreasi dll.) | Peningkatan kegiatan promosi produksi usaha ekonomi keluarga yang ada di masyrakat, kelompok keluarga | unit kegiatan non- fisik | | | | 200.000.000,- | | swadaya (hibah, sponsor,dll) | Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dII) |
| Kegiatan 4: Pemda menciptakan ruang ker-ja dan ekonomi untuk masyarakar marginal Mennigkarnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan | Terciptanya ruang kerja dan ekonomi untuk masyrakat marginal | | | | | 100.000.000,- | | swadaya (hibah, sponsor,dll) | Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dll) |
| Kegiatan S: Mendorong peran serta masya-rakat untuk melakukan pengembangan pertanian berkelanjutan (Ubi, pertanian organik, pemanfaatan lahan) Kegiatan | | | | | | 200.000.000,- | | swadaya (hibah, sponsor,dll) | Mitrawacana .PEKKA, 'Aisyiyah, KPI, dinas pertanian, dll) |
| Kegiatan 6: Meningkatkan persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan | Data peningkatan RS yang bekerjasama dengan BPIS beserta jumlah masing-masing kamar disetiap RS, dan Jumlah peserta BPIS di DIV meningkat | | | | | 50.000.000, | | Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas | Mitrawacana PEKKA, 'Aisyiyah, KPI, Puskesmas, Dinas Kesehatandll) |
| | Peningkatan perusahaan/lembaga untuk memberikan program SJSN ketenagakerjaan kepada para pekerja | | | | | 50.000.000,- | | Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas | Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI, Puskesmas, Dinas kesehatandII) |
| Kegiatan 7; Wilayah /Daerah Siaga: Melaksanakan pelatihan siaga bencana kepada semua desa di DIY | Meningkatnya desa-desa yang siap menghadapi bencana , desa memiliki komunitas yang terlatih dalam bencana | | | | | 100.000.000,- | | Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas dan perangkat desa | Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas dan perangkat desa |
| Kegiatan B. Meningkatkan Pelatihan mengatasi trauma psikologis pasca bencana terutama pada perempuan dan anak pada tenaga Puskesmas, ISM dan Ormas 9. GACA. | Meningkatnya tenaga ahli yang siap membantu mengatasi trauma psikologis pasca bencana | | | | | 100.000.000, | | Dinas kesehatan, LSM, Ormas, pekerja sosial | Dinas kesehatan, LSM, Ormas dan perangkat desa, Ormas 'Aisyiyah |
| Indikator TPB/ SDGS: PROGRAM 2: Penyediaan sistem transportasi yang aman, terjangkau, terakses dan berkelanjutan bagi semua orang | Membuat kota dan hunian yang inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan aman, terjangkau, terakses dan berkelanjutan bagi semua orang | , kuat dan berkelanjutan agi semua orang | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penataan Zona manajemen dan Penyediaan Bus Sekolah Terjangkau di Seluruh DIY | Output: a) DIY memiliki sistem dan manajemen transportasi publik bagi anak anak sekolah b). Pemerintah dan swasta mengembangkan proyek pengadaan bus sekolah bagi warga DIY | Unit kegiatan fisik dan non fisik | | | | | 3220 | Dinas Jalan Raya, Dinas Pendidikan, Kampus, Pemda dan Swasa | Dinas Jalan Raya, Dinas Pendidikan, Kampus, Pemda dan Swasa |
| Kegiatan 2: Penataan Kembali Manajamen Parkir Kota dan Pejalan Kaki | 1). Mengadopsi sistem elektronik modern untuk Unit kegiatan fisik manajemen revenues dari perparkiran jalan manajemen revenues dari perparkiran jalan reya. 2), Para Pekerja Parkir mendapatkan pelatihan dan penataan sistem karir, kepi dan insentif baru. 3), Jalan raya memiliki jalur pejalan kabi dan sistem "speed imrit" dengan lawendrocement bagi pelanggar lalu lintas yang makir andal | . Unit kegiatan fisik dan non fisik | | | | | - - | Polisi, Pemda, Kampus, Swasta | Polisi, Pemda, Kampus, Swasta |
| Indikator TPB/ SDGS: Mengalkhiri Kelaparan dan Memastikan Akses bagi semua Warga, terutama yang miskin dan rentan terutama balita, pada keamanan, gizi, dan makanan yang cukup sepanjang tahun | Mengurangi Kelaparan, Mencapai Keamanan Pangan, Peningkatan Gizi dan Mempromosikan Pertanian yang Berkelanjutan an Akses bagi semua Warga, terutama yang miskin dan rentan terutama balita, pada keamanan, gizi, dan makanan yang cuku | angan, Peningkatan Gizi dar in dan rentan terutama bali | ո Memproma ta, pada kea | osikan Perta manan, gizi, | ınian yang Berkek dan makanan ya | njutan ng cukup sepanja | ing tahun | | |

| | | | Tahun | Target Tahunan | Indikatif Alokasi | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|--|--|
| Nama Program / Þ | Nama Program / Kegiatan / Output | Satuan | Dasar (2017) | 2018 2019 2020 2021 2022 | | Sumber Pendanaan Lol | Lokasi Lembaga Pelaksana |
| Kegiatan I. Penguatan Sistem Jaminan Sosiai Nutrisi Output: a). Terciptanya komitmen dan regulasi dan Perlindungan dari Kelaparan bagi Warga Miskin skema keringanan pajak bagi pengusaha dan Rentan restoran dan hotel hotel papan atas yang terlibar dalam program donasi makanan tak terlibar dalam program donasi makanan tak tergunakan bi. Terbertukmya elembaga sosial yang elektif untuk penggul dan redistributor bantuan sosial penyediaan jaminan nutri dan makanan bagi waga miskin dan rentan yang membutukan | si Output: a). Terciptanya komitmen dan regulasi n skemak eleringanan pajak bagi pengusaha restoran dan hotel hotel papan atas yang terlibat dalam program donasi makanan tak tergunakan b). Terbertuknya elembaga sosial yang efektif untuk pengepul dan redistributor bantuan sosial penyediaan jaminan nutri dan makanan bagi warga miskin dan rentan yang | Unit kegiatan fisik dan non fisik | | | | | |
| PROGRAM 4: Menjamin kehidupan yang sehat dan | PROGRAM 4: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia | semua usia | | | | | |
| Kegiatan 1. meningkatkan Biaya gratis untuk persalinan di fasilitas kesehatan. | 1.1 Output Kegiatan: Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (tahun 2010: 346) | unit kegiatan fisik | | | 150.000.000,- | Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas | Dinas kesehatan, Puskesmas, LSM, Ormas dan perangkat desa |
| | 1.2 Output Kegiatan : adanya program BPJS mengcover Jaminan persalinan, dan meningkatnya persentase persalin-an di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015; 75%). | unit kegiatan fisik | | | 150.000.000,- | Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas, PKBI | Dinas kesehatan, LSM, Ormas dan perangkat desa |
| Kegiatan 2. Suami mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mendampingi istrinya menjelang dan sesudah persalinan | | unit kegiatan non- fisik | | | Rp 100.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dII) |
| Kegiatan 3. Pemberian layanan persalinan yang ramah kepada semua masyarakat tanpa memandang status pernikahan | Output Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan pada perempuan yang belum menikah untuk mengalkes layanan persalinan dan adanya jaminan kerahasiaan pasen. ((TD) | unit kegiatan fisik | | | 200.000.000,- | | Mitrawacana .PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dlI) |
| Kegiatan 4. Pelatihan untuk provider khususnya penanganan persalinan Ibu dengan HIV positif | S Output kegiatan:Meningkatnya per-sentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%). | unit kegiatan non- fisik | | | 100.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | Dinkes, PKBI, Mitra Wacana, 'Aisyiyah |
| | Adanya SOP penanganan persalinan Ibu dengan HIV postif, 2. Semua provider mampu memberikan layanan persalinan ibu dengan HIV postif (KTD) | unit kegiatan non- fisik | | | 100.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | Ikelompok pengajian, gereja, paguyuban sosial, PKK |
| PROGRAM 5: Pada tahun 2030, mengakhiri kemati | PROGRAM S: Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapatdicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal | engan seluruh negara be | erusaha me | enurunkan Angka Kematian Neonatal | | | |
| Kegiatan 1. melakukan sosialisasi dan mengawal Biaya gratis untuk persalinan di fasilitas kesehatan. | 1.1 Output Kegiatan: 2.1 Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32). | unit luasan fisik | | | 150.000.000,- | Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas | Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI, Puskesmas, Dinas Kesehatan dll) |
| Kegiatan 2 . Suami mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mendampingi istrinya selama proses persalinan, dan mampu merawat bayi yang | 2.1 Output Kegiatan: meningkatnya pemahaman dan dan kesadaran suami untuk mendampingi istri saat melahirkan, dan | unit kegiatan non- fisik | | | 150.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | Dinkes, Puskesmas, Kader kesehatan, PKBI, Mitra Wacana, 'Aisyisyah |
| sudah lahir. | perawatan bayi. | unit kegiatan non- fisik | | | | | Dinkes, LSM, Ormas, Puskesmas |
| Kegiatan 3. Memberikan edukasi pentingnya imunisasi dan pendampingan kepada kelompok yang menolak terhadap program imunisasi | 2. Output Kegiatan/Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015 : 71,2%). | unit non -fisik | | | 100.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas, Dispenbud |
| Kegiatan 4. Pengelolaan kantin sehat disekolah- sekolah dan pemberian makanan tambahan, susu dan vitamin . 5. Gerakan GACA | 2.1 Output Kegiatan: Menurunnya Prevalensi stanting (pendek dan sangat pendek pada anak dibawah 2 tahun atau baduta)dan pada anak dibawah 5 tahun. | unit non fisik | | | 250.000.000,- | Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas | Dispenbud, Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas |
| Kegiatan 5. Sosialisasi Pola pangan sehat dan gizi selimbang.2. Penyediaan kantin sehat di sekolah. 3. Penyadaran makanan sehat untuk anak | | | | | 250.000.000,- | Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas, Dispenbud | Dinas pertanian, Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas |
| PROGRAM 6: Pada tanun 2030, mengakniri epiden | FRUGKAMIN E. Pada tahun 2030, mengaknin Epidemi Alubs, tuderkulosis, malaria, dan penyakit tudpis yang terabakan, dan memerangi nepatus, penyakit bersumber air, serta penyakit menular almnya. | yang terabaikan, dan me | emerangi n | lepatitis, penyakit bersumber air, sert | a penyakit menular ia | ınnya. | |

| | | | Tahun | Target Tahunan | inditatif Alabari | -2 | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---|--------|---|
| Nama Program / Kegiatan / Output | (egiatan / Output | Satuan | Dasar (2017) | 2018 2019 2020 2021 | 2022 Anggaran (Rp) | Sumber Pendanaan | Lokasi | Lembaga Pelaksana |
| Kegiatan 1. Provider memberikan Pendidikan Kesehatatan tentang TB | 1.1 Output Kegiatan : Adanya upaya pencegahan penyakit TB pada keluarga, sehingga Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297). | unit luasan fisik | | | 300.000.000,- | | - 6 | Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas, dll |
| Kegiatan 2 : Provider memberikan informasi kepatuhan minum obat dan pencegahan penularan | | unit kegiatan non- fisik | | | 200.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | - 6 | Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas, care giver |
| pada keluarga maupun masyarakat | 2.2 Output Kegiatan : tidak adanya pasien yang tidak patuh menum obat dan putus obat | unit kegiatan non- fisik | | | 250.000.000,- | | | |
| Kegiatan 3. Provider memberikan Pendidikan Kesehatatan Reproduksi yang sehat dan aman klien | | unit kegiatan non- fisik | | | 250.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | - p | Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas |
| Kegiatan 4. Provider memberikan informasi fungsi kondom sebagai alak kontrasepsi dan pencegah penularan IMS kepada setiap masyarakat rentan | 4.1. output kegiatan: Meningkatnya penggunaan kondom sebagai alat kontrasepsi dan pencegah penularan IMS kepada setiap masyarakat rentan | | | | 200.000.000,- | Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas/'Aisyiyah, Dispenbud, PKBI | ם ס | Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas, care giver |
| Kegiatan S. Pemberian informasi perencanaan keluarga bagi remaja belum menikah (10-24 tahun) dan PUS (Pasangan Usia Subur), | | | | | 250.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | ם פ | Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas/'Aisyiyah, KUA |
| Kegiatan 6, Pemberian wewenang kepada kader desa/kelurahan untuk memberikan informasi dan distribusi alat kontrasepsi, Mendorong pelibatan laki-lak dalam KB, dan Setiap desa/kelurahan memiliki produk kebijakan kampanye PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), 2. Setiap desa memiliki organisasi PKR (Pusat Informasi dan komunikasi Remaja), 3. Adamya alokasi APBDes untuk kegilaan kampanye PUP. | Terjadinya penturuan perinkahan di usia dini (kurang dari 21 untuk perempuan dan kurang dari 25 untuk laserbanan dan kurang dari 25 untuk laserbang. Zegadinya penturuan angka unmeer reed, Serlap desa memiliki organisasi Pikr (Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja), 3. Adanya alokasi APBDes urtuk kegiatan kampanye PUP. | | | | 300,000,000, | swadaya (hibah, sponsor,dli) | u > 0 | Dinkes, Posyandu, Mitra Wacana, PKBI dan Ormas/'Aisyiyah, KUA |
| Kegiatan 7. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan layanan ari bersih untuk masyarakat berpendapat rendah melalui kebijakan yang ramah dan murah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Memaksimalkan potensi sumber mata air lokal untuk dimanfautan masyarakat bersama secara partisioatif. | Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100% | unit non fisik | | | 350.000,000,- | | | Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas, Dispenbud, PKBI |
| Indikator TPB : Pendidikan yang berkualitas Bonesson 7. Manimaharana Anaka Bashirinani Malumi (SNB/MT-/Ecolomia SNA/KMII/MA nada tahun3010 manindi DA 70%/ (2016: 01.23%) | CMD/MATE/Codorain+ CMA /CMAII/MA | 7 70% 10 ibcinom 01.00° | 0015: 01 23 | 1% | | | | |
| Menguatkan/sosilaisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar untuk mencerdaskan bangsa, dan mendorong pemerintah untuk | Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/M/ unit luasan fisik Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%). | unit luasan fisik | | | 200.000.000,- | | пΑ | Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah. |
| memberikan layanan pendidikan gratis pada pendidikan dasar, dan menengah pertama serta menengah atas. Kegiatan 2 : Peningkatan | Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 MENJADI 82,2% (2015:79,97%) | | | | 200.000.000,- | | חא | Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah. |
| pemahaman dan pengetahuan literasi, penyediaan taman bacaan/pustaka | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA / SMK/MA /Sederajat paa tahun 2019 menjadi 91,63% (2015 : 82,42%) | | | | 200.000.000,- | | חא | Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah. |
| | Output Kegiatan : Adanya kegiatan kampanye minat baca dan pemahaman litersi | unit luasan fisik | | | 500.000.000,- | | חא | Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah. |
| | Output Kegiatan : Adanya peningkatan taman bacaan/pustakaan di setiap pedukuhan dan desa dilindungi berbasis masyarakat (perdes pelestarian alam, dll) | unit luasan fisik | | | 500.000.000,- | | ם א | Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah. |
| Program 8: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. | iberdayakan kaum perempuan. | | | | | | | |

| | | | Tahun | | Target Tahunan | hunan | | Indibatif Alabasi | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|--------|------|--|---------------------------------|--------|---|
| Nama Program / Kegiatan / Outpu | Kegiatan / Output | Satuan | Dasar (2017) | 2018 2 | 019 2020 | 0 2021 | 2022 | 2018 2019 2020 2021 2022 Anggaran (Rp) | | Lokasi | Sumber Pendanaan Lokasi Lembaga Pelaksana |
| Pemerintah daerah menyediakan ruang jaring Mengakhiri segala bentuk diskriminasi pendapat dalam rangka penyusunan kebijakan yang terhadap kaum perempuan di mana pun. | Mengakhiri segala bentuk diskriminasi ng terhadap kaum perempuan di mana pun. | unit kegiatan non- fisik | | | | | | 300.000.000,- | | | Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI |
| responsif gender | Setiap Desa mempunyai pelayanan dan pendampingan hukum dan pendampingan pasca trauma kekerasan (community crisis center) | unit kegiatan non- fisik | | | | | | 750.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | | Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI |
| Pendidikan politik untuk perempuan .2. Mening Pemberian kesempatan bagi perempuan untuk peremp berpolitik .3. Adanya produk kebijakan yang pada tal mendukung peningkatan keterwakilan permpuan di tahun). DPR. | Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 di tahun). | | | | | | | 300.000.000,- | | | Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI |
| | Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR unit kegiatan non- (Hasil nemiju 2014: 16.6%). | unit kegiatan non- fisik | | | | | | 250.000.000,- | swadaya (hibah, | | Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI |

| | Matrik Keg | giatan Non Pe | merint | Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Ekonomi | | | | | |
|--|---|-------------------|------------|--|----------|--------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|
| Monay Description / Orithmist | 3 | Tahun Dasar | | Target Tahunan | _ | Indikatif Alokasi | i Sumber | inchel | Lembaga |
| Nama Flogram / Neglatan / Output | Satuali | (2017) | 2018 | 2019 2020 2 | 2021 2 | 2022 Anggaran (Rp) | Pendanaan | CORAS | Pelaksana |
| TUJUAN 7 Energi Bersih dan Terjangkau | | | | | | | | | |
| Indikator TPB/ SDGS: | Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua | gi yang terjangka | u, andal, | berkelanjutan, dan | modern u | ntuk semua | | | |
| PROGRAM 1: OPTIMALISASI PEMANFAATAN ENERGI BERSIH | | | | | | | | | |
| 1) ADVOKASI MEKANISME DISTRIBUSI ENERGI YANG TEPAT SASARAN. 2) MENDORONG | unit kegiatan | | | | | 100,000,000 | swadaya (hibah, sponsor | DΙΥ | LKY |
| PENGGUNAAN ENERGI BERSIH SECARA BERTAHAP MENGGANTIKAN ENERGI KOTOR | non fisik | | | | | | MAMPU,dII) | | |
| PROGRAM 2: Penyiapan tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan pasar. Indikator : TPB | :TPB | | | | | | | | |
| 1) Penyiapan tenaga kerja yang mampu menghadapi tantangan era digital ekonomi. 2) | | | | | | | 1) setahun 1x @ 10.000.000 2) | DΙΥ | Ciqal, Yasanti, |
| peningkatan kualitas produk s/d packaging | | | | | | | setahun 2x @ 10.000.000 | | |
| PROGRAM 3: peningkatan pertumbuhan UMKM | | | | | | | | | |
| Training, Chanelling, networking | | | | | | | sekali setahun @ Rp 10.000.000 | DΙΥ | Kadin |
| PROGRAM 4: peningkatan pertumbuhan UMKM | | | | | | | | | |
| Penyediaan pusat layanan korban di tempat kerja | | | | | | | | | Yasanti |
| PROGRAM 5: Penyelenggaraan fasilitas umum yang aksesible dan tenaga kerja bisa melayani dengan perspektif ramah konsumen | ani dengan perspektif | ramah konsum | eu | | | | | | |
| pelatihan assertifitas | | | | | | | sekali setahun @ Rp 10.000.000 | | Ciqal, Yasanti, |
| PROGRAM 6: 1) Penyediaan fasilitas umum yang aksesible. 2) adanya rambu2 bagi Penyandang Disabilitas. 3) informasi (running teks, braille) | dang Disabilitas. 3) in | formasi (runnin | g teks, br | aille) | | | | | |
| advokasi fasilitas umum yang aksesibel, Pelatihan aksesibilitas | | | | | | | sekali setahun @ Rp 10.000.000 | | Ciqal |
| PROGRAM 7: mendorong tumbuhnya industri kreatif dan inklusif | | | | | | | | | |
| 1) pemberdayaan bahan baku lokal maupun kearifan lokal. 2) monitoring implementasi | | | | | | | 1) setahun 1x @ 5.000.000 2) | | Ciqal, LKY, Yasanti |
| perda disabilitas bidang tenaga kerja disabilitas | | | | | | | 3bln sekali @ 1.000.000 | | |
| PROGRAM 8: a) penerapan standar skala upah secara menyeluruh di segala sektor. B) peningkatan akses masyarakat miskin ke lembaga keuangan | ingkatan akses masya | rakat miskin ke | lembaga | keuangan | | | | | |
| advokasi mengawal penyusunan standar skala upah (Workshop, Loby, Audiensi, | | | | | | | sekali setahun @ Rp 10.000.000 | | Kadin, Ciqal, Yasanti, LKY, KPI |

| | | | | Targ | Target Tahunan | u. | Pu | | mhor | | cochmol |
|---|-------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------|------|----------|--------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Nama Program / Kegiatan / Output | Satuan | Tahun Dasar (2017) | | 2019 | 2018 2019 2020 2021 2022 | 2021 | | Alokasi Pend | Pendanaan | Lokasi | Pelaksana |
| TUJUAN 7 Energi Bersih dan Terjangkau | | | | | | | g. | | | | |
| Indikator TPB/SDGS: Jumlah Penduduk Berakses Air Minum | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | nerata terhadap air n | ninum yang aman dan t | erjangkau | bagi serr | ına. | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Peningkatan jumlah organisasi komunitas dalam fungsi tata kelola sumber air bersih mandiri 1x 1x | ıgsi tata kelola sumbe | r air bersih mandiri | 1× | 1× | | | 90 juta | ta | Kota Yo | Kota Yogyakarta | Forum Merti Code, dll |
| secara berkelanjutan. (pamsikarta/pengelola air minum berbasis komunitas) | s komunitas) | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan sanitasi | air bersih berkelanju | air bersih berkelanjutan melalui integrasi | 2x 4x | 4× | | | 175 juta | uta | Kota Yo | Kota Yogyakarta | Hijan |
| kurikulum pembelajaran pendidikan dasar di sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah. (sekolah sehat, | olah dasar luar biasa/n | nadrasah. (sekolah sehat | ٠, | | | | | | | | |
| sekolah bersih hijau sehat, dll) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | Targe | Target Tahunan | _ | Indikatif | 204000 | | - |
|---|--|--|------------|----------|--------------------------|-----------|------------------------|-----------------|---|---|
| Nama Program / Kegiatan / Output | Satuan | Tahun Dasar (2017) | 2018 | 2019 | 2018 2019 2020 2021 2022 | 021 20 | 22 Alokasi Anggaran | Pendanaan | Lokasi | Lembaga Pelaksana |
| Kegiatan 4: Peningkatan pemahaman mengenai sanitasi air bersih berkelanjutan dan pengelolaan tata kelola sumber air bersih mandiri bagi kelompok rentan seperti Penyandang Disabilitas, warga di lingkungan kumuh | sih berkelanjutan dan p ndang Disabilitas, warg | h berkelanjutan dan pengelolaan tata kelola 1x 3x dang Disabilitas, warga di lingkungan kumuh | 1× | 3× | | | 125 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Gunungkidul, Kab Bantul | Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll |
| dan perempuan | | | | | | | | | | |
| Indikator TPB/SDGS: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanaka Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | aka Sanitasi Total Berb | asis Masyarakat (STBM) | | | | | | | | |
| PROGRAM 2: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasam material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proponsi air ilmbah yang tidak diolah, dan | gan mengurangi polus | si, menghilangkan pembu | angan, da | n memin | imalkan p | elepasan | material dan I | ahan kimia berb | ahaya, mengurangi setengah p | roporsi air limbah yang tidak diolah, dan |
| secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan l | kembali barang daur | cembali barang daur ulang yang aman secara global. | global. | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Peningkatan peran serta organisasi komunitas sekitar sungai dalam fungsi tata kelola limbar cair 3x | tar sungai dalam fungs | i tata kelola limbar cair | | 7× | | | swadaya | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Forum Komunikasi Winongo Asri, Forum |
| secara berkelanjutan (organisasi/paguyuban/forum komunikasi/kelompok pemerhati pelestari sungai) | /kelompok pemerhati | pelestari sungai) | | | | | | | Kab Bantul, Kab Kulonprogo, | Merti Code, Forum Gajahwong, Forum Kali |
| | | | | | | | | | Kab Gunungkidul | Mbedog, dll |
| Kegiatan 4 : Peningkatan peran serta komunitas masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah padat secara mandiri (program bank sampah, | lam kegiatan pengelola | aan sampah padat secara | mandiri (p | rogram k | ank samp | ah, | swadaya | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, | Bank Sampah Sukunan, Bank Sampah |
| komposting, pemilahan sampah, dll) | | | | | | | | | Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kab Gunungkidul | Badogan Bantul, dll |
| Kegiatan 5: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pelestarian sumber daya lingkungan sejak usia dini malalu integrasa pembelajaran pendidikan dasar, melalui kegiatan praktik daur ulang mengurangi polusi dan limbah (program sekolah adiwiyata) | arian sumber daya ling tan-kegiatan praktik da | kungan sejak usia dini aur ulang mengurangi | , 2× | 4× | | | 125 juta | | Kota Yogyakarta | Hijau |
| PROGRAM 3: Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah dan danau. | kosistem terkait sumb | er daya air, termasuk pe | gunungan, | hutan, l | ahan bas | h, sungai | air tanah dan | danau. | | |

| | | • | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------|------|-------|----------------|--------|---|--|--------------------|--------|--------------------|
| | | | Tahun | | Targe | Target Tahunan | E | | inditatif Alabai | Cumbor | | cocdeno |
| Nama Program / I | Nama Program / Kegiatan / Output | Satuan | Dasar | 2018 | 2019 | 0202 | : 1202 | | 2018 2019 2020 2021 2022 Angearan (Rb) | Pendanaan | Lokasi | Pelaksana |
| | | | (2017) | 2 | - | 2 | | - | (du)99 | | | |
| TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN | | | | | | | | | | | | |
| Indikator TPB/SDGS: | Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun | = | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Pendampingan intensif pemerintah desa dalam tata kelola dana desa | esa dalam tata kelola dana desa | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Meningkatkan pemberdayaan | Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui unit kegiatan non | unit kegiatan non | | | | | | 2 | 200.000.000,- | swadaya (hibah, | 2 | Mitrawacana.PEKKA, |
| perempuan melalui pelatihan penguatan ekonomi | pelatihan penguatan ekonomi | fisik | | | | | | | | sponsor MAMPU,dII) | | Aisyiyah, KPI dll) |
| Kegiatan 2 : Peningkatan jumlah organisasi | Pendampingan kelompok-kelompok usaha | unit kegiatan non | | | | | | 2 | 200.000.000,- | swadaya (hibah, | 2 | Mitrawacana.PEKKA, |
| komunitas dalam fungsi tata kelola sumber air | ekonomi (rumah kreasi yang ada di masyarakat | fisik | | | | | | | | sponsor MAMPU,dII) | | Aisyiyah, KPI dll) |
| bersih mandiri secara berkelanjutan. (pamsikarta/ | | | | | | | | | | | | |
| pengelola air minum berbasis komunitas) | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Meningkatkan promosi produksi usaha | Peningkatan kegiatan promosi produksi usaha | unit kegiatan non- | | | | | | 2 | 200.000.000,- | swadaya (hibah, | 2 | Mitrawacana.PEKKA, |
| yang ada di masyarakat, kelompok keluarga (rumah ekonomi keluarga yang ada di masyrakat, | ekonomi keluarga yang ada di masyrakat, | fisik | | | | | | | | sponsor,dll) | | Aisyiyah, KPI dII) |
| kreasi dll.) | kelompok- kelompok keluarga | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 4: Pemda menciptakan ruang ker-ja dan | Terciptanya ruang kerja dan ekonomi untuk | | | | | | | Ţ | 100.000.000,- | swadaya (hibah, | 2 | Mitrawacana.PEKKA, |
| ekonomi untuk masyarakat marginal Meningkatnya | masyrakat marginal | | | | | | | | | sponsor,dll) | ٩ | Aisyiyah, KPI dll) |
| persentase penduduk yang menjadi peserta | | | | | | | | | | | | |
| jaminan kesehatan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 5: Mendorong peran serta masya-rakat | Peningkatan peran masyarakat untuk melakukan | | | | | | | 2 | 200.000.000,- | swadaya (hibah, | 2 | Mitrawacana.PEKKA, |
| | | | | | | | | | | **** | | |

Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Sosial

'Aisyiyah, KPI, Puskesmas, Dinas KesehatandII)

Mitrawacana.PEKKA,

Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas

50.000.000,-

pengembangan pertanian berkelanjutan (ubi,

pertanian organik, pemanfaatan lahan)

berkelanjutan (Ubi, pertanian organik, pemanfaatan

yang menjadi peserta jaminan kesehatan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan

Kegiatan 6: Meningkatkan persentase penduduk untuk melakukan pengem-bangan pertanian

lahan) Kegiatan

Data peningkatan RS yang bekerjasama dengan BPJS beserta jumlah masing-masing kamar

disetiap RS. dan Jumlah peserta BPJS di DIY Peningkatan perusahaan/lembaga untuk

meningkat

sponsor,dll)

'Aisyiyah, KPI, dinas

pertanian, dll)

mas, Dinas kesehatandII) Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas dan 'Aisyiyah, KPI, Puskes-

perangkat desa

Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas dan Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas

100.000.000,-

Meningkatnya desa-desa yang siap menghadapi bencana , desa memiliki komunitas yang terlatih

Kegiatan 7; Wilayah /Daerah Siaga: Melaksanakan pelatihan siaga bencana kepada semua desa di DIY

dalam bencana

memberikan program SJSN ketenagakerjaan

kepada para pekerja

50.000.000,-

perangkat desa

Mitrawacana.PEKKA,

| | | | Tahun | Targe | Target Tahunan | | include Standings | | | and description of |
|--|---|--|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|---|--------|---|
| Nama Program / Kegiatan / | Kegiatan / Output | Satuan D | Dasar 2018 (2017) | 2019 | 2020 2021 | 1 2022 | Anggaran (Rp) | Sumber Pendanaan | Lokasi | Lembaga Pelaksana |
| Kegiatan 8. Meningkatkan Pelatihan meng-atasi trauma psikologis pasca bencana ter-utama pada perempuan dan anak pada te-naga Puskesmas, LSM dan Ormas 9, GACA | Meningkatnya tenaga ahli yang siap membantu mengatasi trauma psikologis pasca bencana | | | | | | 100.000.000,- | Dinas kesehatan, LSM, Ormas, pekerja sosial | ∆ O ₹ | Dinas kesehatan, LSM, Ormas dan perangkat desa, Ormas 'Aisyiyah |
| Indikator TPB/ SDGS: | Membuat kota dan hunian yang inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan | uat dan berkelanjutan | | | | | | | | |
| PROGRAM 2: Penyediaan sistem transportasi yang a Kegiatan 1: Penataan Zona manajemen dan | PROGRAM 2: Penyediaan sistem transportasi yang aman, terjangkau, terakses dan berkelanjutan bagi semua orang Kesiatan 1- Penataan Zona manajemen dan Outnut: al Dif memilik istem dan | i semua orang Unit kegiatan fisik | | | | | | Dinas lalan Rava | | Dinas Ialan Bava, Dinas |
| Penyediaan Bus Sekolah Terjangkau di Seluruh DIY | transportasi publik bagi anak anak sekolah bi. Pemerintah dan swasta mengembangkan proyek pengadaan bus sekolah bagi warga DIY | dan non fisik | | | | | | Dinas Pendidikan, Kampus, Pemda dan Swasa | ه ۵ م | Pendidikan, Kampus, Pemda dan Swasa |
| Kegiatan 2: Penataan Kembali Manajamen Parkir Kota dan Pejalan Kaki | 1). Mengadopsi sistem elektronik modern untuk manajemen revenues dari perpar-kiran jalan raya. 2). Para Pekerja Parkir mendapatkan pelatihan dan penataan sistem karir, keja dan insentif baru. 3). Jalan raya memiliki jalur pejalan kaki dan sistem "speed limit" dengan law enforce-ment bagi pelanggar lalu lintas yang makin andal | Unit kegiatan fisik dan non fisik | | | | | | Polisi, Pemda, Kampus, Swasta | g Q | Polisi, Pemda, Kampus, Swasta |
| Indikator TPB/SDGS: | Mengurangi Kelaparan, Mencapai Keamanan Pangan, Peningkatan Gizi dan Mempromosikan Pertanian yang Berkelanjutan | ıgan, Peningkatan Gizi dan | Mempromosi | kan Pertani | an yang Berl | celanjutan | | | | |
| PROGRAM 3: Mengakhiri Kelaparan dan Memastika | PROGRAM 3: Mengakhiri Kelaparan dan Memastikan Akses bagi semua Warga, terutama yang miskin dan rentan terutama balita, pada keamanan, gizi, dan makanan yang cukup sepanjang tahun | dan rentan terutama balit | a, pada keam | anan, gizi, d | an makanan | yang cuku | sepanjang tahun | | | |
| Kegiatan 1: Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nutrisi. Output : a). Terciptanya komitmen dan regulasi dan Perlindungan dari Kelaparan bagi Warga Miskin skeram kernaman pajak bagi pengushah restoram dan Rentan dan hotel hotel papan atas yang terlibat dalam program donasi makanan tak tergunakan b). Terlemtuknya hembaga sosial anyang efektif nnutk pengepu dan redistributro bantuan sosial penyediaan jaminan nutri dan makanan bagi penyediaan jaminan nutri dan makanan bagi waga miskin frair membukunkan pROGRAM 4: Menjamin kehidupan yang sekhat dan meningkatan kesajahteraan seluruh penduutikan | kegiatan 1: Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nutrisi Output : a). Terciptanya komitmen dan negulasi Unit keg dan Perlindungan dari Kelaparan balgi Wanga Miskin iswan kerindungan natak pagi penguasha restoran dan non dan hereitan pagan atas yang terlibat dalam program dan hotel botel pagan atas yang terlibat dalam program donasi makanan tak tergunakan b). Terbertukun perbagan yang sekirl funtuk pengepel dan redistributor bantuan sosiati untuk pengepel dan redistributor bantuan sosiati untuk pengediaan jaminan nutri dan makanan bagi wanga miskin dan rentan yang membutukukan wanga miskin dan rentan yang membutuk kemua usia PROGRAM 4; Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia | Unit kegiatan fisik dan non fisik mua usia | | | | | | | | |
| Kegiatan 1. meningkatkan Biaya gratis untuk persalinan di fasilitas kesehatan. | 1.1 Output Kegiatan : Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (tahun 2010 : 346) | unit kegiatan fisik | | | | | 150.000.000,- | Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas | ÖΞÖ | Dinas kesehatan, Puskesmas, LSM, Ormas dan perangkat desa |
| | 1.2 Output Kegiatan : adanya program BPJS mengrover Jaminan persalinan, dan meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%). | unit kegiatan fisik | | | | | 150.000.000,- | Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas, PKBI | 0 O T | Dinas kesehatan, LSM, Ormas dan perangkat desa |
| Kegiatan Z. Suami mempunyai pengetahuan dan 13. Output Kegiatan Progra ketranpilan untuk mendampingi istrinya menjelang kapasitas untuk suami siaga dan sesudah persalinan | 3. Output Kegiatan :Program peningkatan kapasitas untuk suami siaga | unit kegiatan non- fisik | | | | | Rp 100.000.000,- | Rp 100.000.000, - swadaya (hibah, sponsor,dll) | ≥ - | Mitrawacana.PEKKA, Aisyiyah, KPI dII) |
| Kegiatan 3. Pemberian layanan persalinan yang ramah kepada semua masyarakat tanpa memandang status pernikahan | 1.4. Output Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan pada perempuan yang belum menikah untuk mengakses layanan persalinan dan adanya jaminan kerahasiaan pasien. (KTD) | unit kegiatan fisik | | | | | 200.000.000,- | | ≥ ⁴ | Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dII) |
| Kegiatan 4. Pelatihan untuk provider khususnya penanganan persalinan Ibu dengan HIV positif | Soutput Kkegiatan:Meningkatnya per-sentase persalinan oleh tenaga kesehat-an terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%). | unit kegiatan non- fisik | | | | | 100.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dII) | Δ ≶ | Dinkes, PKBI, Mitra Wacana, 'Aisyiyah |
| | Adanya SOP penanganan persalinan Ibu dengan HIV postif, 2. Semua provider mampu memberikan layanan persalinan ibu dengan HIV postif (KTD) | unit kegiatan non- fisik | | | | | 100.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | ₹ 20 € | Ikelompok pengajian, gereja, paguyuban sosial, PKK |
| PROGRAM 5: Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapatdicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal | an bayi baru lahir dan balita yang dapatdicegah, de | ngan seluruh negara berus | aha menurun | kan Angka l | ematian Ne | onatal | | | | |

| | | | Tahun | Targ | Target Tahunan | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------------|---|--------|--|
| Nama Program / K | Nama Program / Kegiatan / Output | Satuan | Dasar 2018 | 8 | 2020 2021 | 21 2022 | Indikatif Alokasi Anggaran (Rp) | i Sumber Pendanaan | Lokasi | Lembaga Pelaksana |
| Kegiatan 1. melakukan sosialisasi dan mengawal Biaya gratis untuk persalinan di fasilitas kesehatan. | 1.1 Output Kegiatan : 2.1 Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32). | unit luasan fisik | (2017) | | | | 150.000.000,- | Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas | | Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI, Puskesmas, Dinas Kesehatan dll) |
| Kegiatan 2 . Suami mempunyai pengetahu-an dan ketrampilan untuk mendampingi istrinya selama proses persalinan, dan mampu merawat bavi vang | 2.1 Output Kegiatan : meningkatnya pemahaman dan dan kesadaran suami untuk mendampingi istri saat melahirkan, dan perawatan bavi. | unit kegiatan non- fisik | | | | | 150.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | | Dinkes, Puskesmas, Kader kesehatan, PKBI, Mitra Wacana, 'Aisvisvah |
| sudah lahir. | | unit kegiatan non- fisik | | | | | | | | Dinkes, LSM, Ormas, Puskesmas |
| Kegiatan 3. Memberikan edukasi pentingnya imulisasi dan pendampingan kepada kelompok yang menolak terhadap program imunisasi | 2.2 Output KegiatanMeningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%). | unit non -fisik | | | | | 100.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | | Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas, Dispenbud |
| Kegiatan 4. Pengelolaan kantin sehat disekolah- sekolah dan pemberian makanan tambahan, susu dan vitamin . 5. Gerakan GACA | 2.1 Output Kegiatan: Menurunnya Prevalensi stanting (pendek dan sangat pendek pada anak dibawah 2 tahun atau baduta) dan pada anak dibawah 5 tahun atau baduta) dan pada anak dibawah 5 tahun. | unit non fisik | | | | | 250.000.000,- | Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas | | Dispenbud, Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas |
| Kegiatan 5. Sosialisasi Pola pangan sehat dan gizi seimbang. 2. Penyediaan kantin sehat di sekolah. 3. Penyadaran makanan sehat untuk anak | | | : | : | | | 250.000.000,- | Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas, Dispenbud | | Dinas pertanian, Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas |
| PROGRAM 6: Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi 1.105, kutek kutosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber alir, serta penyakit menulariannnya. Kegiatan 1. Provider memberikan Pendidikan 1.1 Output Kegiatan 1. Adanya upaya pencegahan unit luasan fisik Kesehatatan temang TB menyakit TB pada keluanga, sehingga Menurun- mapa prevalensi Tuber-culosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: | 1 ADS, Uberkuloss, malaria, dan penyakit trops yi 11 Output Kegiatan : Adanya upaya pencegahan penyakit TB pada keluarga, sehingga Menurun- nya prevalensi Tuber-culosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297). | ang terabaikan, dan me unit luasan fisik | merangi hepat | tis, penyakit | persumper: | air, serta pei | yakit menular lai 300.000.000,- | nnya. | | Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas, dll |
| Kegiatan 2 : Provider memberikan informasi kepatuhan minum obat dan pencegahan penularan | barnya informasi fungsi kondom sebagai alat kontrasepsi dan mencegah IMS ke masuarakat | unit kegiatan non- fisik | | | | | 200.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | | Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas, care giver |
| pada keluarga maupun masyarakat Kegiatan 3. Provider membenkan Pendidikan Kesehatatan Reproduksi yang sehat dan aman kilen | | unit kegiatan non- fisik unit kegiatan non- fisik | | | | | 250.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | | Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas |
| Kegiatan 4. Provider memberikan informasi fungsi kondom sebagai alat kontrasepsi dan percegah penularan IMS kepada setiap masyarakat rentan | 4.1. output kegiatan: Meningkatnya penggunaan kondom sebagai alat kontrasepsi dan pencegah penularan IMS kepada setiap masyarakat rentan | | | | | | 200.000.000,- | Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas/'Aisyiyah, Dispenbud, PKBI | | Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas, care giver |
| Kegiatan S. Pemberian informasi peren-canaan keluarga bagi remaja belum meni-kah (10-24 tahun) dan PUS (Pasangan Usia Subur), | Menurunnya Total Fertility Rate(TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6). | | | | | | 250.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | | Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas/'Aisyiyah, KUA |
| kegiatan G. Pemberian wewenang kepada Kader desylekulurhan untuk memberikan informasi dan distribusi alat kontrasepsi, Mendorong pelibatan laki-laki dalam KB, dan Setiap desaykelurahan memiliki produk kebijakan kampanye PUP (Pendewasan Usia Perfawinan), Z. Setiap desa memiliki organisasi PIK-R (Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja), 3. Adanya alokasi APBDes untuk kegiatan kampanye PUP. | Terjadinya penurunan pernikahan di usia dini (kurang dari 2 untuk perempuan dan kurang dari 25 untuk laki-laki), 2. Terjadinya penurunan angka unmeer treed, Setiap desa memiliki organisasi PIK-R (Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja), 3. Adanya alokasi APBDes untuk kegiatan kampanye PUP. | | | | | | 300.000.000, | swadaya (hibah, sponsor,dll) | | Dinkes, Posyandu, Mitra Wacana, PKBI dan Ormas/Aisyiyah, KUA |

| yyarakat ge ramah an hata air ama sa sa Murni , S si Murni , S si Murni , S si Adkan rdaskan as serta | giatan / Output Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100% | Satuan unit non fisik | Dasar 2018 (2017) | 2019 2020 2021 | 2022 Anggaran (Rp) | (p) Pendanaan | Lokasi | Pelaksana Dinas kesebatan. |
|--|---|--|--------------------|---|--------------------|--|---------------------|--|
| Kegiatan 7 Mendorong pemerintah untuk meningakatan layana ari bersih untuk meningakatan layana ari bersih untuk masyarakat penduduk berpe berpendapat rendah melalui kebijakan yang ramah dan murah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Memakimalkan potensi sumber mata air lokal untuk dimaritaakan masyarakat bersama secara partisipatif. Indikator TPB: Pendidikan yang berkualitas Program 7: Meningkatnya Angla Partisipasi Murni, SMP/MTs/Seder Menguatkan/sosilaisasi kepada masyarakat akan Menguatkan/sosilaisasi kepada masyarakat akan Menguatkan/sosilaisasi kepada masyarakat akan Menguatkan/sosilaisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar untuk mencerdaskan memberikan layanan pendidikan garatis pada Meningkannya Angla Partisipasi Murni, SMP/MTS/Seder | akses air minum layak untuk 40% endapatan terbawah pada tahun .00% | unit non fisik | | | | | ocai.C | kecehatan |
| recar a pur unjadur. Indikator TPB: Pendidikan yang berkualitas Program 7: Meningkatnya Angka Partisipasi Murmi, SNP/MTs/Seder: Mengukatan/Sodilasiasi kepada mayarakata akan Meningkatnya Apendidikan dasar untuk mencerdaskan Sederajat pada tabangsa, dan mendorong pemerintah untuk mencerdaskan Sederajat pada tabangsa, dan mendorong pemerintah untuk mencerdaskan ya Meningkatnya Apendidikan dasar, dan menengah pertama serta SL2% (2015:79). | | | | | 350.000.000, | s. | Disper | posyandu, LSM, Ormas, Dispenbud, PKBI |
| Program 7: Meningkatnya Angka Partisipasi Murmi, SMP/MTs/Seder. Menguatkan/Sosillassia Kepada mayashatat akan Meningkatnya Apenthigkan dasar untuk mencerdaskan Sederajat pada trabangsa, dan mendorong pemerintah untuk (2015: 91,23%). menberikan layanan pendidikan garatis pada Meningkaniya Apendidikan dasar, dan menengah pertama serta SMP/MTs/Seder menengah atas. | | | | | | | | |
| | erajat, SMA/SMU/MA pada tahun2 | 019 menjadi 94,78% (20 | 15: 91,23%). | | | | | |
| | %8. /IW/QS | unit luasan fisik | | | 200.000.000, | ۵. | Dindik KPI, 'A | Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah. |
| | Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 MENJADI 82,2% (2015:79,97%) | | | | 200.000.000, | | Dindik KPI, 'A | Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah. |
| Kegiatan 2 : Peningkatan pemahaman dan Meningkatnya Angka Pe pengerabuan literasi, penyediaan taman SMK/MA /Sederajat paa bacamp/ ustaka (2015 : 82,A28) | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA / SMK/MA /Sederajat paa tahun 2019 menjadi 91,63% (2015 : 82,42%) | | | | 200.000.000,- | <i>5</i> | Dindik KPI, 'A | Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah. |
| Output Kegiatan minat baca dan p | Output Kegiatan : Adanya kegiatan kampanye minat baca dan pemahaman litersi | unit luasan fisik | | | 500.000.000, | 5 | Dindik KPI, 'A | Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah. |
| Output Kegiatan : Ad bacaan/pustkaan di diindungi berbasis m pelestarian alam, dii | Output Kegiatan : Adanya peningkatan taman bacaan/pustakaan di setiap pedukuhan dan desa dilindungi berbasis masyarakat (perdes peleskarian alam, dil) | unit luasan fisik | | | 500.000.000. | ۵ | Dindik KPI, 'A | Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah. |
| Program 8: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. | n perempuan. | | | | | | | |
| Pemerintah daerah menyediakan ruang jaring Mengakhiri segala bentuk diskr pendapat dalam rangka penyusunan kebijakan yang kaum perempuan di mana pun. | Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun. | unit kegiatan non- fisik | | | 300.000.000 | 5 | Aisyiyah dan KPI | Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI |
| responsif gender 2. Setiap Desa m pendampingan h trauma kekerasa | Setiap Desa mempunyai pelayanan dan pendampingan hukum dan pendampingan pasca trauma kekerasan (community crisis center) | unit kegiatan non- fisik | | | 750.000.000,- | ,- swadaya (hibah, sponsor,dII) | Aisyiyah dan KPI | Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI |
| Pendidikan politik untuk perempuan. Meningkatnya m Pemberian kesempatan bagi perempuan untuk perempuan (jeen berpoitik apada tahun 2019) Adanya produk kebilakan vane mendukune tahun! | Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 rahun). | | | | 300.000.000 | .s | Aisyiyak dan KPI | Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI |
| | Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil pemilu 2014: 16,6%). | unit kegiatan non- fisik | | | 250.000.000,- | swadaya (hibah, sponsor,dll) | Aisyiyah dan KPI | Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI |
| | M | Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Ekonomi | emerintah Pilar | . Ekonomi | | | | |
| Nama Program / Kegiatan / Output | Sa | Satuan Tahun Dasar | 00.00 | Target Tahunan | Indikatif Alokasi | Sumber | Lokasi | Lembaga |
| TUIUAN 7 Energi Bersih dan Terjangkau | | (170-) | 6107 6107 | 1707 | 13 13 99 117 | | | |
| Indikator TPB/ SDGS: PROGRAM 1: OPTIMALISASI PEMANFAATAN ENERGI BERSIH | Menjamin a | kses energi yang terjang | kau, andal, berkel | Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua | ık semua | | | |
| 1) ADVOKASI MEKANISME DISTRIBUSI ENERGI YANG TEPAT SASARAN. 2) MENDORONG PENGGUNAAN ENRGI BERTAN SECARA BETTAHAP MENGGAMITIKAN ENRGI KOTT PENGGUNAAN AMA 7. DAAN 1982 KATA 1982 AMA 1982 KATA 1983 K | ARAN. 2) MENDORONG unit kegiatan IKAN ENERGI KOTOR non fisik Kebutuhan nasar Indikator TBR | giatan k | | | 100,000,000 | swadaya (hibah, sponsor MAMPU,dII) | n Ald | ГКУ |
| Penylapan tenaga kerja yang mampu menghadapi tantangan era dig peningkatan kualitas produk s/d packaging | era digital ekonomi. 2) | | | | (1 0) | 1) setahun 1x @ 10.000.000 2) setahun 2x @ 10.000.000 | DIY | Ciqal, Yasanti, |
| PROGRAM 3: peningkatan pertumbuhan UMKM Training Obanelling petuorking | | | | | | akali setahun @ Rn 10 000 000 | ž | Kadin |
| PROGRAM 4: peningkatan pertumbuhan UMKM | | | | | , | senali setaliuli @ hp 10.000.000 | 5 | |
| Penyediaan pusat layanan korban di tempat kerja | | 3.4 | į | | | | > | Yasanti |
| rnouram s. rehyeenggaraan tasiitas umum yang aksesible dan tenaga kerja bisa melayani dengan perspektir raman konsumen pelatihan assertifitas | enaga kerja bisa melayani dengan p | erspekur raman konsur | | | 01 | sekali setahun @ Rp 10.000.000 | | Ciqal, Yasanti, |

| | | Tahun Dasar | Target Tahunan | nuan | Indikatif Alokasi | Sumber | | Lembaga |
|--|---|-------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Nama Program / Kegiatan / Output | Satuan | (2017) | 2018 2019 2020 | 2021 2022 | ı | Pendanaan | Lokası | Pelaksana |
| PROGRAM 6: 1) Penyediaan fasilitas umum yang aksesible. 2) adanya rambu2 bagi Penyandang Disabilitas. 3) informasi (running teks, braille) | lang Disabilitas. 3) i | ıformasi (runnin | g teks, braille) | | | 000 000 01 v8 @ minkton ilrapo | 000 00 | ارمار |
| PROGRAM 7: mendorong tumbuhnya industri kreatif dan inklusif | | | | | | Schail Schail Griph 10.00 | 0000 | i i |
| 1) pemberdayaan bahan baku lokal maupun kearifan lokal. 2) monitoring implementasi | | | | | | 1) setahun 1x @ 5.000.000 2) | 0.2) | Ciqal, LKY, Yasanti |
| perda disabilitas bidang tenaga kerja disabilitas | | | | | | 3bln sekali @ 1.000.000 | | |
| PROCAMAN 8: a) penerapan katada skala upah secara menyelurun di segala sektor. B) peningkatan akses masyarakat Advokaci mencawal nenvusunan standar skala unah U Morkshon Toho Aurila ekilon. | katan akses masyara | ıkat miskin ke len | nbaga keuangan | | | sekali setahun @ Rn 10 000 000 | 000 00 | Kadin Cigal Vasanti |
| devendan mengawan penyasanan saanaa shari (** oraniop), boby, padiensi, | | | | | | مدست در المستحدد | | LKY, KPI |
| | Matrik Keg | iatan Non Pen | Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Lingkungan | ıgan | | | | |
| |) F | Tahun | Target Tahunan | Indikatif | | | - | |
| Nama Program / Kegiatan / Output | Satuan D | Dasar 2018 (2017) | 2019 2020 2021 | 2022 Anggaran | j Sumber i Pendanaan an | Lokasi | Len | Lembaga Pelaksana |
| Indikator TPB/SDGS: | Jumlah Penduduk Berakses Air Minum | Berakses Air Min | - un | | | | | |
| PROGRAM 1: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | ang aman dan terja | ngkau bagi semu | ia. | | | | | |
| Peningkatan jumlah organisasi komunitas dalam fungsi tata kelola sumber air bersih mandiri soom barkalanistasi (amerikata komunikata) | | Ţ, | Ť, | 90 juta | | Kota Yogyakarta | Forum Merti Code, dll | E E |
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan sanitasi air bersih berkelanjutan melalui | | 2x | 4x | 175 iuta | | Kota Yogvakarta | Hijan | |
| integrasi kurikulum pembelajaran pendidikan dasar di sekolah dasar/sekolah dasar luar hiasa/madrasah (sekolah sehat sekolah bersih hijan sehat dili | | | | | | 5 | | |
| Kegiatan 4. Peningkatan nemahaman mengenai sanitasi air hersih herkelanintan dan | | , | 34 | 125 juta | | Kota Yogyakarta Kab | Ohana Cinal Sand | Dinsos Iogia |
| pengelolaan tata kelola sumber air bersih mandiri bagi kelompok rentan seperti Penyandang Disabilitas, warga di lingkungan kumuh dan perempuan | | | | | | Gunungkidul, Kab Bantul | Berdaya, YEU, Yakkum, dll | um, dll |
| Indikator TPB/SDGS: | Jumlah desa/ kelui | ahan yang melal | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanaka Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | basis Masyaraka | t (STBM) | | | |
| PROGRAM 2: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara sienifikan meninekatkan daur ulang. serta pengeunaan kembali barang daur ulang wang aman secara global. | hilangkan pembuai ang aman secara gk | ıgan, dan memin bal. | imalkan pelepasan mate | rial dan bahan ki | mia berbahaya, me | ngurangi setengah propors | i air limbah yang tic | ak diolah, dan |
| Deningkatan peran serta organisasi komunitas sekitar sungai dalam fungsi tata kelola | | 3× | ×Z | swadaya | | Kota Yogvakarta Kah | Forum Komunikasi Winongo Asri | Winongo Asri |
| in the gradient per unit of the control of the cont | | | | | | Sleman, Kab Bantul, Kab | Forum Merti Code, Foru | Forum Merti Code, Forum Gajahwong, |
| periner had perestan sungar) | | | | | | Gunungkidul | Name and the second | |
| Peningkatan peran serta komunitas masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah padat | | | | swadaya | | Kota Yogyakarta, Kab | Bank Sampah Suku | Bank Sampah Sukunan, Bank Sampah |
| secara mandiri (program bank sampah, komposting, pemilahan sampah, dll) | | | | | | Sleman, Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kab Gunungkidul | Badogan Bantul, dll | |
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pelestarian sumber daya lingkungan sejak usia dini melalui integrasi pembelajaran pendidikan dasar, melalui kegiatan-kegiatan praktik daur ulang mengurangi polusi dan limbah (program sekolah adiwiyata) | | న | 4x | 125 juta | | Kota Yogyakarta | Hijan | |
| PROGRAM 3: Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah dan danau. | air, termasuk pegu | nungan, hutan, l | ahan basah, sungai, air ta | nah dan danau. | | | | |
| Peningkatan peran serta komunitas/masyarakat dalam perlindungan dan restorasi eksistem lahan basah, serta berbasis budaya lokal (komunitas mangrove, komunitas mutara, komunitas merti telaga, merti tuk/sumber air, dll) | | Ą | 3× | 390 juta | | | Hijau | |
| Peningkatan kegiatan advokasi dan audit sosial penegakan hukum pengendalian penggunaan air tanah untuk kepentingan komersial dan proteksi kawasan resapan air dari kepentingan komersial (penegakan prosedur perjinan, implementasi perda/pergub/hukum | | Ä | 4x | 650 juta | | | LBH, Walhi, dll | |
| adacum and service | erbuka hijau, palin | sedikit di 12 ka | wasan perkotaan metrop | olitan dan 20 kot | a sedang, hingga ta | hun 2019. | | |
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pengurangan risiko bencana melalui integrasi kurikulum pembelajaran pendidikan sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah. (program sekolah siaga bencana/sekolah aman, adaptasi perubahan iklim , dll) | | ** | 16x | 830 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul, Kab | Hijau, anggota-ang dll | Hijau, anggota-anggota Forum PRB DIV, dll |
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan | | ×9 | 16x | 250 juta | | Kota Yogyakarta, Kab | PSBA UGM, PSL SA | DHAR, PSMB UPN, |
| risiko bencana dalam lingkungan pembelajaran akademisi perguruan tinggi (pusat studi bencana, pusat kajian pembangunan berkelanjutan, KKN ESD, dil) | | | | | | Sleman, Kab Bantul | PSBA UMY, PSL UAD, dll |), dll |
| | | | | | | | | |

| | | Tahun | | Target Tahunan | hunan | | Indikatif | Cumber | | enedmo |
|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|------------|-----------|-----------------|------------------|--|--|
| Nama Program / Kegiatan / Output | Satuan | Dasar (2017) ² | 2018 2 | 2019 2020 | 0 2021 | 2022 | | Pendanaan | Lokasi | Pelaksana |
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan risiko bencana dan ketahanan iklim melalui irovasi nedia pembelajaan publik dan kegiatan program terkait (kampung hijau, kampung islaga, kampung klim, dll) | | 4x | x 16x | .× | | | 570 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Hijau, anggota-anggota Forum PRB DIY, FPRB Desa, Kominfo, |
| Kegiatan 6. Melakukan penelitian mengenai kebutuhan terkait sistem transportasi publik dan aksesibilitas ruang publik | | ţ | × × | | | | 90 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll |
| Kegiatan 7. Advokasi sistem dan kebijakan layanan kursi roda yang mendukung akses perkotaan dan layanan publik yang aksesibel | | ţ. | , 4x | | | | 45 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll |
| Kegiatan 8: Safari PRB bagi Penyandang Disabilitas Netra | | ţ | ğ | | | | 120 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll |
| | | X, | ğ | | | | 60 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll |
| Kegiatan 10: Tersedianya sistem pedestrian yang akses bagi Penyandang Disabilitas | | X | š | | | | 35 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll |
| Kegiatan 11: Kampanye Publik bagi tersedianya ruang hijau yang aksesibel | | X | š | | | | 97 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll |
| PROGRAM 5. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darta serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional | an dari ekosist | em daratan | dan pera | iran darta | serta jas: | a lingkun | gannnya, khusı | ısnya ekosister | ı hutan, lahan basah, pegu | unungan dan lahan kering, sejalan |
| Peringkatan jumlah unti keglatan peran serta organisasi komunitas peduli dalam upaya perindungan, pelekatan, restorasi dan pemanfatan berkelanjutan keanekaragaman hayati (flora endemik fauna endemik, pangan, obat, dll) | | Ķ | , 16x | × | | | swadaya | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Forum Masyarakat Peduli Muara Jangkaran, FKWA, FMCU, Pasag Merapi, Masyarakat Hutan Adat Wonosadi, dll |
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan konservasi perlindungan, pelestarian, restorasi dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan melalui integrasi kurikulum pembelajaran pendidikan dasar/menengah, pendidikan publik, dengan menghargai kearifan lokal. | | 4 | 12% | × | | | 273 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Walhi, Hijau, Kutilang, Arupa, Javlec, Kanopi, Lestari, Damar, Kappala Indonesia, dll |
| PROGRAM 6: Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna dilindungi serta mengata si permintaan dan pasokan hidupan liar secara ilegal | lora dan fauna | dilindungi s | serta me | ngata si per | mintaan | dan pasc | kan hidupan li | ır secara ilegal | | |
| Kegiatan I.; Peningkatan inovasi kegiatan-kegiatan kampanye regulasi/peraturan deerah unuk mengakhir perburuan dan perdagangan jenis fora/benih endemik dan satwa ilar dilindungi/endemik serta mengatasi permintaan dan pasokan hidupan lar secara ilegal | | ž | × × | | | | 265 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | BKSDA, TNGM, Hijau, Kanopi, Kutilang, WRC, COP, dll |
| Peningkatan inovasi kegiatan-kegiatan penindakan hukum atas perburuan dan perdagangan jenis flora/benih endemik dan sawa lar dilindungi/endemik serta mengatasi permintaan dan pasokan indupan ilar secara lagal | | ž | | | | | swadaya | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | BKSDA, TNGM, Kepolisian, dll |
| Peningkatan inovasi kegitara-kegitan penelitan dan pengambangan kelestarian jenis flora dan sasua lara dian sawa lasa sera mengatasi permintaan dan pasokan hidupan liar secara legal (program breeding sawa liar endemik atau dilindungi, pemuliaan flora, pemberdayaan pendampingan komunitas hobi, dili, yang melibatkan secar aktif peran serta komunitas mayavarakat. | | ä | ž | | | | 975 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | BKSDA, Hijau, Komunitas Ular/Reptil, Komunitas Raptor, Komunitas Mamalia, dll |
| :Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pan cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lai | ierapkan praki iperbaiki kuali | ek pertania tas tanah da | n tanggu ın lahan. | h yang mei | ningkatk | an produ | csi dan produk | ivitas, memba | ıtu menjaga ekosistem, m | gan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap nnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. |
| Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi peningkatan produktivitas hasil pertanian dari gangguan risiko bencana, hama tanaman pangan, cuaca ekstrim, tata kelola, akses finansial, dan sebagainya, yang berbasis komunitas dan mempematikan daya dukung lingkungan. | | ž | š | | | | 645 juta | | Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Perda, Dipertan, Disperindag, Pertanahan, Hijau, dll |
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan sejak usid nim melalui integrasi pembelajaran pendidikan dasar, melalui kegiatan pembejaran sumber daya lokel, dengan berbasis komunitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan, serta inklusif. | | ž | Š | | | | 254 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Hijau |
| PROGRAM 8: Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | tropis yang ter | abaikan, da | n meme | angi hepat | itis, pen) | akit bers | umber air, sert | a penyakit mer | ular lainnya. | |

| Satuan Dasar Dasar Dasar Dasar Data D | | Tahun | | Target | Target Tahunan | | Indikatif | | | - | |
|--|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------------|
| Seman, Kada Yogyakarta, Kab Dira Steman, Kab Bantul, Gunungkidul Sieman Kada Yogyakarta, Kab Bantul, Gunungkidul Sieman Kada Yogyakarta, Kab Birtul, Sieman Kab Bantul, Sieman Kab Bantul, Dira Sieman Kab Bantul, Sieman Sieman Kab Bantul, Sieman Siema | Nama Program / Kegiatan / Output | _ | | 2019 | | | Alokasi Anggaran | Sumber Pendanaan | Lokasi | Pelaksana | |
| 1x | Kegiatan 1: Inovasi kegiatan-kegiatan penurunan prevalensi angka kejadian Diare di wilayah DIY | | న | ×9 | | | 467 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Dinkes, Hijau, dll | |
| 1 | Inovasi kegiatan-kegiatan penurunan prevalensi angka kejadian demam berdarah, monitoring persebaran epidemi demam berdarah di wilayah DIY. | | X. | 8 | | | 200 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman | Eliminate Dengue Project - UG | Σ |
| State Stat | Inovasi kegiatan kegiatan penurunan prevalensi angka kejadian Leprospirosis, monitoring persebaran serta perurunan angka korban kematian pada petani di wilayah DIV. | | Ą | 4x | | | 389 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Hijau, Dinkes, dll | |
| Sieman, Kab Bamul, Do Sieman, Kab Bamul, Sieman, Si | PROGRAM 9: Meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan l | kesempatan belaja | r sepanjan | ig hayat untuk | semna. | | | | | | |
| 14x | kegiatan 1. Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi genkan melek literasi, melalui duunigan fasilitasi dan pendampingan pengelolaan gerakan minat baca di sekolah dasan/madrasal/S.B. | | | | | | 265 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Dinas Pendidikan, Hijau, Komu Dongeng, Komunitas Buku, dll | ınitas |
| Sempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua di wilayah perdesara. Sieman, Kab Bantul, Kora Cogayakarta, Kab Bantul, Serta pekerjaan yang layak untuk semua di wilayah perdesara. Sieman, Kab Bantul, Serta pekerjaan yang layak untuk semua di wilayah perdesara. Sieman, Kab Bantul, | Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi budaya yang mendukung gerakan literasi publik, melalui pertunjukan wayang, ritual budaya lokal, hingga seni kontemporer. (dialog dan penyampaian pengetahuan) | | 14x | 14x | | | 28 milyar | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | IVAA - Festival Arsip, IKAPI - B: Buku, Festival Dongeng Menta Festival Boneka Papermoon, B Ngayogiazz. Festival Kesenian | azaar ari, iennale, |
| Signation Septembrity Se | | | | | | | | | | Yogyakarta, dll | |
| sempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semual di wilayah perdesaan. 2x 4x (Ada Yogyahara, Kab Bantul, Gurungkidul 2x 4x (Ada Yogyahara, Kab Bantul, Koda Yogyahara, Kab Bantul, Saparta Kabantul, Saparta Non Pemerintah Pilar Lingkungan Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Lingkungan Matrik Kegiat | Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi gerakan melek literasi, melalui dukungan fasilitasi dan pendampingan pengelolaan taman baca masyarakat. | | 4x | 10x | | | swadaya | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Biblio Jaringan Perpustakaan A Komunitas Cemara, Hijau, dll | Alternatif, |
| 2x 4x 535 juta 500 yogakarta, kab Hij | PROGRAM 10: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempa | tan kerja yang pro | duktif dan | menyeluruh, | serta peke | rjaan yang | layak untuk se | mua di wilaya | ih perdesaan. | | |
| Matrik Kegiatan Non Permerintah Pilar Lingkungan Augs Tayan Permerintah Pilar Lingkungan | Kegiatan 1: Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi perekonomian perdesaan melalui bentuk pengembangan program perekonomian pertanian organik, berbasis komunitas. | | ă | * | | | 535 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Hijau | |
| VE VE VE VE VE VE VE VE | Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi perekonomian perdesaan melalui bentuk pengembangan program ekowisata , berbasis komunitas. | | న | 4x | | | 315 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Hijau, Kutilang, Pusat Studi Par Komunitas Desa Wisata Nusan POHA UGM, dll | riwisata, Itara, |
| Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Lingkungan utput Satuan Tahun Dasar Target Tahunan Indikatif Alokasi Sumber 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Anggaran Pendanaan Jumlah Penduduk Berakses Air Minum at erhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 1x 1x 90 juta | Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi perekonomian perdesaan melalui bentuk pengembangan ekonomi kreatif UMKM inklusif, yang melayani potensi produk kreativitas kelompok difabel. | | ž | 4x | | | 425 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | YEU-YAKKUM, Ohana, Ciqal, P. Sapda, Rumah Kreatif Jogja, dl | aluma, I |
| utput Satuan Tahun Dasar Target Tahunan Indikatif Alokasi Sumber (2017) 2018 2019 2020 2021 2022 Anggaran Pendanaan Jumlah Penduduk Berakses Air Minum a terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 1x 1x 90 juta | | Matrik Kegial | an Non F | Pemerintah | Pilar Ling | kungan | | | | | |
| . (2017) 2018 2019 2020 2021 2022 Anggaran Pendanaan Jumlah Penduduk Berakses Air Minum at erhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 1x 1x 90 juta | Nama Program / Kegiatan / Output | | Satuan | Tahun Dasa | | | et Tahunan | | | Lokasi | Lembaga |
| Jumlah Penduduk Berakses Air Minum a terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 1x 1x 90 juta | | | | (2017) | 2018 | | | | | | csana |
| nber air bersih mandiri secara 1x 1x 90 Juta | Indikator TPB/SDGS: PROGRAM 1: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang | Juml g aman dan terjang | ah Pendud kau bagi se | duk Berakses A emua. | ir Minum | | | | | | |
| berkelanutan, (pamsikarta/pengelola air minum berbasis komunitas) | Peningkatan jumlah organisasi komunitas dalam fungsi tata kelola sumber air bersih mandiri seca berkelaniutan, (pamsikarta/pengelola air minum berbasis komunitas) | ara | | | X, | Ţ | | 6 |) juta | Kota Yogyakarta Forum Ma dll | erti Code, |

| | | - | | , | Towns of Tables | | 1 - 11 - 12 - 12 - 1 | | | |
|---|---|---|--------------------|----------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| Nama Program / Kegiatan / Output | Satuan | lanun Dasar | 9010 | 2010 | 2019 2010 2020 2021 | 2000 | 2022 Angeren Dendenson | Sumber | Lokasi | Delaksana |
| | | (707) | 2010 | 2013 | 7070 | 7707 | Aliggalali | IIIaiiaaii | | relansalla |
| Indikator TPB/SDGS: | Jumlah Pend | Jumlah Penduduk Berakses Air Minum | Minum | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | n yang aman dan terjangkau bag | i semna. | | | | | | | | |
| Peningkatan jumlah organisasi komunitas dalam fungsi tata kelola sumber air bersih mandiri secara | liri secara | | Ţ | 1 | | | 90 juta | Ko | ta Yogyakarta | Kota Yogyakarta Forum Merti Code, |
| berkelanjutan. (pamsikarta/pengelola air minum berbasis komunitas) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Ekonomi | on Pemerintah | Pilar Ekor | iomi | | | | | | |
| (4) | Tahun Dasar | | Target Tahunan (4) | ınan (4) | - | Indikatif Alokasi | asi Sumber | ber | (F) :- :- ! - ! | Lembaga |
| Nama Program / Regiatan / Output (1) | Satuan (2) (2017) (3) | 2018 | 119 2020 | 2021 | 2022 | 2019 2020 2021 2022 Anggaran (5) |) Pendanaan (6) | aan (6) | LOKASI (7) | Pelaksana (8) |
| TUJUAN 7 Energi Bersih dan Terjangkau | | | | | | | | | | |
| Indikator TPB/SDGS: | Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua | angkau, andal, ber | kelanjutan | dan mod | ern untuk s | emna | | | | |
| PROGRAM 1: OPTIMALISASI PEMANFAATAN ENERGI BERSIH | | | | | | | | | | |
| 1) ADVOKASI MEKANISME DISTRIBUSI ENERGI YANG TEPAT SASARAN. 2) MENDORONG | unit kegiatan | | | | 1 | 100,000,000 | swadaya (hibah, sponsor | ponsor | DIY | LKY |
| PENGGUNAAN ENERGI BERSIH SECARA BERTAHAP MENGGANTIKAN ENERGI KOTOR | non fisik | | | | | | MAMPU, dll) | | | |
| PROGRAM 2: Penyiapan tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan pasar. Indikator: TPB | r:TPB | | | | | | | | | |
| 1) Penyiapan tenaga kerja yang mampu menghadapi tantangan era digital ekonomi. 2) | | | | | | | 1) setahun 1x @ 10.000.000 2) | 10.000.0002) | DIY | Ciqal, Yasanti, |
| peningkatan kualitas produk s/d packaging | | | | | | | setahun 2x @ 10.000.000 | 000.000 | | |
| PROGRAM 3: peningkatan pertumbuhan UMKM | | | | | | | | | | |
| Training, Chanelling, networking | | | | | | | sekali setahun @ Rp 10.000.000 DIY | Rp 10.000.000 | | Kadin |
| PROGRAM 4: peningkatan pertumbuhan UMKM | | | | | | | | | | |

| | | Tahun Dacar | | Target Tahinan (4) | (4) | Indikatif Alokaci | Sumber | | lombaga |
|--|---|------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|----------------------|---|--|--|
| Nama Program / Kegiatan / Output (1) | Satuan (2) | (2017) (3) | 2018 | 2019 2020 2021 | 2021 2022 | 1 | Per | Lokasi (7) | Pelaksana (8) |
| Penyediaan pusat layanan korban di tempat kerja PROGRAM 5: Penyelenggaraan fasilitas umum yang aksesible dan tenaga keria bisa melayani dengan perspektif ramah konsumen | ani dengan perspektif | ramah konsun | ner | | | | | | Yasanti |
| pelatihan assertifitas DDCCDAM 6:1 bonoodissar Assiltas s musim vana akcesikla 2) adama rambu2 hasi Danuandana Nieshiltas a 3 informasi frumina take hasilla) | And Disabilities 3) inf | ormaci (runni | a toke hr | | | | sekali setahun @ Rp 10.000.000 | | Ciqal, Yasanti, |
| advokasi fasilitas umum yang aksesibel, Pelatihan aksesibilitas | 0.000 | | (2) | ĺ | | | sekali setahun @ Rp 10.000.000 | | Ciqal |
| PKOGKAMI /: mendorong tumbunnya industri kreatif dan inklusif 1) pemberdayaan bahan baku lokal maupun kearifan lokal. 2) monitoring implementasi | | | | | | | 1) setahun 1x @ 5.000.000 2) | | Ciqal, LKY, Yasanti |
| perda disabilitas bidang tenaga kerja disabilitas DBC/CRAM 8-a handanan standar dala unah cecara manualiruh di cocala soktor. Ri hanhodatan akses masuarakat miskin ke lambasa keuranan | ingkatan aksas masyar | akat mickin ke | lembaga | neoueile | | | 3bln sekali @ 1.000.000 | | |
| advokasi mengawai penyusunan standar skala upah (Workshop, Loby, Audiensi, | | | 5 | | | | sekali setahun @ Rp 10.000.000 | | Kadin, Ciqal, Yasanti, LKY, KPI |
| | Matrik Kegia | tan Non Pe | merintah | Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Lingkungan | gan | | | | |
| | Tahun | | TargetT | Target Tahunan (4) | ١, | catif Sumber | | | |
| Nama Program / Keglatan / Output (1) | Satuan Dasar (2) (2017) (3) | ar) (3) 2018 | 2019 2 | 2020 2021 | Alokasi 2022 Anggaran (5) | š | Lokasi (7) | Lem Pelaks | Lembaga Pelaksana (8) |
| Indikator TPB/SDGS: | Jumlah Penduduk Berakses Air Minum | akses Air Minu | Ę | | | | | | |
| PROGRAM 1: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | yang aman dan terjan | gkau bagi sem | na. | | | | | | |
| Peningkatan jumlah organisasi komunitas dalam fungsi tata kelola sumber air bersih mandiri secara berkelanjutan. (pamsikarta/pengelola air minum berbasis komunitas) | | 1x | 1× | | 90 juta | | Kota Yogyakarta | Forum Merti Code, dll | ₽ |
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan sanitasi air bersih berkelanjutan melalui rinegrasi kurikulum pembelajaran pendidikan basar di sekolah dasar/sekolah dasar luar intagrasi kurikulum sehat, sekolah bersih rijiau sehat, dil) | | 2x | 4× | | 175 juta | а | Kota Yogyakarta | Hijau | |
| an pemahaman mengenai sanitasi air bersih berkelanjutan dan a sumber air bersih mandiri bagi kelompok rentan seperti s, warga di lingkungan kumuh dan perempuan | ; ; | 1x | XE | | 125 juta | e | Kota Yogyakarta, Kab Gunungkidul, Kab Bantul | Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll | , Dinsos, Jogja um, dll |
| Inmah desk keurahan yang mentenbertan buditan danam menumuni nalui mentenbertan keurahan yang melaksanaka samitan inta Berbasa Nasyarakat (SIBM) DOGOMAN 3-D-44 shun 2020 mentenbertan buditan menumuni nalui mentenbertan sang keurahan yang melaksanakan sang menumuni sa | Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanaka Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | an yang melak an dan memi | sanaka Sar simalkan n | itasi Total Berb | asis Masyaral Al dan baban | at (STBM) | acacaa demactos ina cuimac | bit nacy dedail sie is | ach deleja |
| PROGRAM 2. Pada dalun 2030, memingkatkan kualitas ali dengan mengurang potus, menginiangkan pembuangal secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global | giniangkan pembuang Jang aman secara glob | an, dan mem al. | manan p | elepasan marer | al dan banan | Kimia Derbanaya, m | engura ngi se tengan propor | sı alı ililibalı yang ud | ak diolan, dan |
| Peningkatan peran serta organisasi komunitas sekitar sungai dalam fungsi tata kelola Imbar cair secara berkelanjutan (organisas/paguyuban/forum komunikasi/kelompok pemerhati pelestari sungai) | | 3× | × | | swadaya | /a | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kab Gunungkidul | Forum Komunikasi Winongo Asri, Forum Merti Code, Forum Gajahv Forum Kali Mbedog, dll | Forum Komunikasi Winongo Asri, Forum Merti Code, Forum Gajahwong, Forum Kali Mbedog, dll |
| Peningkatan peran serta komunitas masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah padat secara mandir (program bank sampah, komposting, pemilahan sampah, dll) | | | | | swadaya | la Ja | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kab Gunungkidul | Bank Sampah Sukunan, Bank Sampah Badogan Bantul, dll | nan, Bank Sampah |
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pelestarian sumber daya lingkungan sejak usia dini melalui integrasi pembelajaran pendidikan dasar, melalui kegiatan-kegiatan praktik daur ulang mengurangi polusi dan limbah (program sekolah adiwiyata) | | 5× | 4× | | 125 juta | в | Kota Yogyakarta | Hijau | |
| PROGRAM 3: Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah dan danau. | a air, termasuk pegun | ıngan, hutan, | lahan basa | h, sungai, air ta | ah dan dana | = | | | |
| Peningkatan peran serta komunitas/masyarakat dalam perlindungan dan restorasi ekosistem lahan basah, serta berlasis budaya bokal (komunitas mangrove, komunitas muras, komunitas merti tuks/amber air, dll) | | 1× | 3× | | 390 juta | в | | Hijau | |
| Peningkatan kegiatan advokasi dan audit sosial penegakan hukum pengendalian penegendan an erapa penggunaan air tanah untuk kepentingan komerisial dan proteksi kawasan resapan air dari kepentingan komerisal (penegakan prosedur perijinan, implementasi perda/pergul/hukum adat (III) | | 1× | 4× | | 650 juta | ro. | | LBH, Walhi, dll | |
| PROGRAM 4: Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019. | terbuka hijau, paling s | edikit di 12 ka | wasan per | kotaan metropo | litan dan 20 l | ota sedang, hingga t | ahun 2019. | | |
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pengurangan risiko bencana melalui integrasi kurikulum pembelajaran pendidikan sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah. program sekolah siaga bencana/sekolah aman, adaptasi perubahan iklim, dil) | | ** | 16x | | 830 juta | œ | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul, Kab Kulonprogo | Hijau, anggota-angg dll | Hijau, anggota-anggota Forum PRB DIY, dll |
| | | | | | | | | | |

| | | | ľ | Target Tabunan (A) | (V) ueo | | Indibatif | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------|-----------------------------|---------------------|---|---|
| Nama Program / Kegiatan / Output (1) | Satuan (2) | 1 | 2018 2019 | 19 2020 | 202 | 2022 | Alokasi | Sumber Pendanaan | Lokasi (7) | Lembaga Pelaksana (8) |
| | | (2017) (3) | | | | | (2) | (9) | | |
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pembangunan barkelanjutan dan pengurangan risiko bercana dalam ingkungan pembelajaran akademisi penguuan tinggi (pusat studi bercana, pusat kalian pembangunan berkelanjutan, KKN ESD, dil) | | 9 | 6x 16x | | | , | 250 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul | PSBA UGM, PSL SADHAR, PSMB UPN, PSBA UMY, PSL UAD, dII |
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan risiko bencana dan ketahanan iklim melalui invassi media pembajairan publik dan kegiatan program terkati (kampung hijau, kampung siaga, kampung sehat, kampung lidim, dil) | | 4 | 4x 16x | | | | 570 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Hijau, anggota-anggota Forum PRB DIY, FPRB Desa, Kominfo, |
| Kegiatan 6: Melakukan penelitian mengenal kebutuhan terkait sistem transportasi publik dan aksesibilitas ruang publik | | 1x | × 2× | | | | 90 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll |
| Kegiatan 7: Advokasi sistem dan kebijakan layanan kursi roda yang mendukung akses perkotaan dan layanan publik yang aksesibel | | | 1x 4x | | | , | 45 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll |
| Kegiatan 8: Safari PRB bagi Penyandang Disabilitas Netra | | 1x | × ex | | | | 120 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll |
| Kegiatan 9: Emergency Respon tanggap Bencana yang inklusif | | Ħ | 1x 6x | | | C | 60 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll |
| Kegiatan 10: Tersedianya sistem pedestrian yang akses bagi Penyandang Disabilitas | | 2 | 2x 6x | | | | 35 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll |
| Kegiatan 11: Kampanye Publik bagi tersedianya ruang hijau yang aksesibel | | 2 | 2x 6x | | | 0, | 97 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll |
| PROGRAM S: Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dara perairan darta serta jasa lingkungannnya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional | tan dari ekosist | em daratan | dan perair | an darta se | erta jasa li | ngkungai | ınnya, khusus | nya ekosistem | hutan, lahan basah, pegu | unungan dan lahan kering, sejalan |
| Peningkatan jumlah unit kegiatan peran serta organisasi komunitas peduli dalam upaya perlindungan, pelestarian, restorasi dan pemanitaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati (flora endemik, fauna endemik, pangan, obat, dll) | | 7 | 7x 16x | | | 3, | swadaya | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Forum Masyarakat Peduli Muara Jangkaran, FKWA, FMCU, Pasag Merapi, Masyarakat Hutan Adat Wonosadi, dll |
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan konservasi perlindungan, pelestarian, restorasi dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan melalui integrasi kurkulum pembelajaran pendidikan pendelajaran menghargai kearifan lokal. | - | 4 | 4x 12x | | | | 273 juta | - | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Walhi, Hijau, Kutilang, Arupa, Javlec, Kanopi, Lestari, Damar, Kappala Indonesia, dll |
| Frogram, o. Weakukan ulundaran egbatun tengkan perundan dan perdagangan jenis tiora dan lauha dumudungi serta mengakasi permintaan dan pasokan midupan ilar secara ilegal Kegatan it. Peningkatan inovasi kegatan-kegatan kampanye regulasi/perturan daerah untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora/benih endemik dan satwa ilar | nora dan rauna | 2x 2x | serta men x 2x | gatası perm | iintaan da | п разока | in nidupan ilar 265 juta | secara negal | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, | BKSDA, TNGM, Hijau, Kanopi, Kutilang, WRC, COP, dll |
| diindungi/endemik serta mengatasi permintaan dan pasokan hidupan liar secara ilegal Peningkatan inovasi kegiatan-kegiatan penindakan hukum atas perburuan dan perdagangan jenis fora/benih endemik dan satwa liar dilindungi/endemik serta mengatasi permintaan dan asokan hidupan liar secara ilegal | | 2 | 2x 6x | | | 3, | swadaya | | Gunungkidul Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | BKSDA, TNGM, Kepolisian, dll |
| Peningkatan inovasi kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan kelestarian jenis flora dan sawa ilar dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan hidupan ilar secara ilegal (program breeding satwa liar endemik atau dilindungi, pemuliaan flora, pemberdayaan pendampingan komunitas hobi, dili, yang melibatkan secar aktif peran permak komunitas mayarakat. | | Č. | 2x 2x | | | o. | 975 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | BKSDA, Hijau, Komunitas Ular/Reptil, Komunitas Raptor, Komunitas Mamalia, dll |
| PROGRAM 7/Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. | enerapkan prakt mperbaiki kuali | ek pertania as tanah da | n tangguh in lahan. | yang meni | ngkatkan | produksi | dan produkti | /itas, membant | .u menjaga ekosistem, m | emperkuat kapasitas adaptasi terhadap |
| Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi peningkatan produktivitas hasil pertanian dari gangguan risiko bencana, hama tanaman pangan, cuaca ekstrim, tata kelola, akses finansial, dan sebagainya, yang berbasis komunitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan. | | 2 | 5x 6x | | | | 645 juta | | Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Perda, Dipertan, Disperindag, Pertanahan, Hijau, dll |
| | | | | | | | | | | |

| | Tahin | | Targe | Target Tahunan (4) | (4) | Indikatif | Sumbor | | |
|---|--|----------|------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------|--|--|
| Nama Program / Kegiatan / Output (1) | Satuan Dasar (2) (2017) (3) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 | Alokasi Anggaran (5) | Pendanaan (6) | Lokasi (7) | Lembaga Pelaksana (8) |
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan sejak usia dini melalui integrasi pembelajaran pendidikan dasar, melalui kegiatan pembelajaran sumber daya lokal, dengan berbasis komunitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan, serta inklusif. | | 5x | ×9 | | | 254 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Hijau |
| PROGRAM 8: Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | opis yang terabaikar | , dan m | emerangi | hepatitis, _I | senyakit ber | sumber air, serta | penyakit men | ılar lainnya. | |
| Kegiatan 1 : Inovasi kegiatan-kegiatan penurunan prevalensi angka kejadian Diare di wilayah DIY | | 5× | ×9 | | | 467 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Dinkes, Hijau, dll |
| Inovasi kegiatan-kegiatan penurunan prevalensi angka kejadian demam berdarah, monitoring persebaran epidemi demam berdarah di wilayah DIY. | | 3× | ×6 | | | 200 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman | Eliminate Dengue Project - UGM |
| Inovasi kegiatan-kegiatan penurunan prevalensi angka kejadian Leptospirosis, monitoring persebaran serta penurunan angka korban kematian pada petani di wilayah DIY. | | 1 | 4× | | | 389 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Hijau, Dinkes, dll |
| PROGRAM 9: Meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. | esempatan belajar s | panjang | t hayat un | tuk semua | | | | | |
| Kegiatan 1.: Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi gerakan melek literasi, melalui dukungan fasilitasi dan pendampingan pengelolaan gerakan minat baca di sekolah dasar/madrasi/Su. | | | | | | 265 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Dinas Pendidikan, Hijau, Komunitas Dongeng, Komunitas Buku, dll |
| Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi budaya yang mendukung gerakan literasi publik, melalui pertunjukan wayang, ritual budaya lokal, hingga seni kontemporer. (dialog dan penyampaian pengetahuan) | | 14x | 14x | | | 28 milyar | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | IVAA - Festival Arsip, IKAPI - Bazaar Buku, Festival Dongeng Mentari, Festival Boneka Papermoon, Biennale, Ngayogjazz, Festival Kesenian Yogyakarta, dll |
| Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi gerakan melek literasi, melalui dukungan fasilitasi dan pendampingan pengelolaan taman baca masyarakat. | | * | 10x | | | swadaya | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Biblio Jaringan Perpustakaan Alternatif, Komunitas Cemara, Hijau, dll |
| PROGRAM 10: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua di wilayah perdesaan. | an kerja yang produ | ktif dan | menyelur | uh, serta p | ekerjaan yaı | ig layak untuk se | mua di wilayah | perdesaan. | |
| Kegiatan 1.: Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi perekonomian perdesaan melalui bentuk pengembangan program perekonomian pertanian organik, berbasis komunitas. | | 2× | 4× | | | 535 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Hijau |
| Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi perekonomian perdesaan melalui bentuk pengembangan program ekowisata , berbasis komunitas. | | × | 4× | | | 315 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | Hijau, Kutilang, Pusat Studi Pariwisata, Komunitas Desa Wisata Nusantara, POHA UGM, dll |
| Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi perekonomian perdesaan melalui bentuk pengembangan ekonomi kreatif UMKM inklusif, yang melayani potensi produk kreativitas kelompok difabel. | | 2× | 4× | | | 425 juta | | Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul | YEU-YAKKUM, Ohana, Ciqal, Paluma, Sapda, Rumah Kreatif Jogja, dll |
| Mat | Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Hukum dan Tata Kelola | Pemeri | ntah Pila | ar Hukun | dan Tata | Kelola | | | |

| | | | • | | | | | | |
|---|------------------------|------|--|--------|-------|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Tahun | | Target Tahunan | unan | 1 | Sumber | Sumbor | | chedmo |
| Nama Program / Kegiatan / Output Satı | Satuan Dasar (2017) | 2018 | Dasar 2018 2019 2020 2021 2022 Anggaran (2017) | 2021 2 | 770 | | Pendanaan | Lokasi | Pelaksana |
| TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh | | | | | | | | | |
| Indikator TPB/SDGS: Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Mendorong Masyarakat peduli KDRT | | | | | | | | | |
| 1. Sosialisasi UU PKDRT, 2. Pelatihan Paralegal bagi anggota KPI 3. Pembuatan Posko PIPA KDRT | | | | | Rp. 1 | Rp. 100.000.000 | Ÿ | Kab. | KPI DIY |
| | | | | | (Swa | (Swadaya dan | g | -Bunun | |
| | | | | | Pem | Pemerintah)/Tahun | ī | kidul, Kota | |
| | | | | | | | × | Yogyakarta, | |
| | | | | | | | Ÿ | ab. | |
| | | | | | | | IS | Sleman, | |
| | | | | | | | Ÿ | Kab. Bantul, | |
| | | | | | | | Ÿ | Kab. | |
| | | | | | | | Ä | Kulonprogo | |
| | | | | | | | | | |

| | į | Tahun | | Target | Target Tahunan | | Indikatif Alokasi | Sumber | 1 | Lembaga |
|---|------------------|-----------------|----------|----------|----------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Nama Program / Kegiatan / Output | Satuan | Dasar (2017) | 2018 | 2019 20 | 2020 2021 | 702 | Anggaran | Pendanaan | Lokası | Pelaksana |
| PROGRAM 2: Mendorong penyadaran masyarakat terhadap pembangunan yang berkeadilan 2. Pembentukan Community crisis center di level desa/ kelurahan untuk pemberiam layanan. 3. Pendidikan pencegahan kekerasan pada anak untuk anak usia | er di level desa | / kelurah | an untul | k pember | iam layan: | ın. 3.Pendic | ikan pencegahan ke | kerasan pada a | ınak untuk aı | nak usia |
| dini | | | | | | | | | | |
| 1. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi bagi anak dan remaja (disabilitas) | | | | | | | 100:000:000 | × | Kab. | Sapda |
| 2. Penguatan Disability People Organization (DPO) melalui self defense untuk perempuan dengan disabilitas | | | | | | | (swadaya dan | U | Gunung- | |
| 3. Sosialisasi Pembangunan infra struktur yang menjaga prinsip kesepakatan dan kemanusiaan yang tidak beresiko bencana | | | | | | _ | pemerintah)/tahun | ~ | kidul, Kota | |
| 4. Pendidikan hukum di setiap line pendidikan dan masyarakat | | | | | | | | > | Yogyakarta, | |
| 5. Membangun kegiatan antar sekolah untuk mengurangi kekerasan antar pelajar. | | | | | | | | ~ | Kab. | |
| 6. Pelibatan masyarakatat (remaja, laki-laki, permpuan, lansia) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program | | | | | | | | S | Sleman, | |
| pembangunan sosial | | | | | | | | ~ | Kab. Bantul, | |
| | | | | | | | | ~ ~ | Kab. Kulonprogo | |
| PROGRAM 3: Penyadaran Hukum kepada masyarakat | | | | | | | | | | |
| 1. Sosialisasi Bantuan Hukum Prodeo kepada masyarakat | | | | | | _ | Rp. 100.000.000 | × | Kab. | PBHI |
| 2. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat | | | | | | | (Swadaya dan | U | Gunung- | |
| 3. Pelatihan Keterampilan Hukum Pidana dan Hukum Perdata | | | | | | _ | Pemerintah)/Tahun | ~ | kidul, Kota | |
| | | | | | | | | > | Yogyakarta, | |
| | | | | | | | | ~ | Kab. | |
| | | | | | | | | S | Sleman, | |
| | | | | | | | | ~ | Kab. Bantul, | |
| | | | | | | | | ~ | Kab. | |
| | | | | | | | | × | Kulonprogo | |
| PROGRAM 4: 1. Mendorong parpol sosialisasi caleg perempuan untuk duduk di legislatif 2. Kaderisasi perempuan di parpol 3. Mendorong parpol untuk pemenuhan quota 30% di legislatif 4. Mendorong adanya kebijakan untuk pemenuhan quota 30% di | rong parpol unt | tuk pemel | nuhan qu | uota 30% | di legislat, | f 4. Mendo | ong adanya kebijak | an untuk peme | nuhan quota | 30% di |
| setiap level pemerintah | | | | | | | | | | |
| 1. Diskusi dengan parpol untuk mendorong peningkatan legislatif perempuan di legislatig | | | | | | _ | Rp. | ~ | Kab. | KPI DIY |
| 2. Kampanye caleg perempuan dengan parpol | | | | | | | 150.000.000/Tahun | U | Gunung- | |
| 3. Pelatihan pendidikan pemilih untuk pemula dan masyarakat menjadi pemilh cerdas | | | | | | _ | (Swadaya dan | ~ | kidul, Kota | |
| 4. Pelatihan caleg perempuan untuk menjadi anggota legislatif . | | | | | | _ | Pemerintah | > | Yogyakarta, | |
| 5. Sosialisasi caleg perempuan | | | | | | | | × | Kab. | |
| 6. Pelatihan Kepemimpinan perempuan | | | | | | | | S | Sleman, | |
| 7. Diskusi dengan pemerintah unuk pemenuhan quota di level eksekutif | | | | | | | | ~ | Kab. Bantul, | |
| 8. Membangun jaringan dengan LSM, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, pemerintah, parpol | | | | | | | | ~ | Kab. | |
| | | | | | | | | × | Kulonprogo | |
| PROGRAM S: Mengkaji Kebijakan Diskriminasi Hak atas Pertanahan terkait Instruksi Kepala Daerah DIY 5 Maret tahun 1975 (K.898/I/A/1975) | /A/1975) | | | | | | | | | |
| 1. Diskusi Kajian tentang Instruksi Kepala Daerah DIY tahun 1975. | | | | | | _ | Rp. 75.000.000 | | DIY | ICM, |
| 2. Sosialisasi Hasil Kajian tentang Instruksi Kepala Daerah DIY tahun 1975. | | | | | | | (swadaya dan | | | Forum LSM |
| 3. Lobby /Audiensi terkait Hasil Kajian tentang Instruksi Kepala Daearh DIY tahun 1975. | | | | | | _ | pemerinta) | | | |
| | | | | | | | | | | |





Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Bappeda DIY

Kepatihan Danurejan Telp. 0274 - 562811 (Psw. 1209 - 1220, 1243 - 1246, 1253), 511185 Fax. 0274 - 586712 http://bappeda.jogjaprov.go.id Yogyakarta 55213